



1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022 (Pergub No.55/2022)	REALISASI 2022 (Audited)	(%)	REALISASI 2021 (Audited)
1	PENDAPATAN-LRA	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	5.1.1.1.1	1.069.726.272.973,00	1.235.493.977.265,00	115,50	1.627.366.516.469,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.1.1.1.2	7.410.091.220,00	17.713.806.139,00	239,05	38.776.532.961,25
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	5.1.1.1.3	766.767.946.987,00	766.991.557.636,00	100,03	40.489.377.934,00
6	Lain-lain PAD yang sah-LRA	5.1.1.1.4	308.803.312.881,00	206.555.313.887,36	66,89	433.057.048.769,92
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LRA (3 s/d 6)		2.152.707.624.061,00	2.226.754.654.927,36	103,44	2.139.689.476.134,17
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN-LRA	5.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil - LRA	5.1.1.2.1.1	1.691.789.267.956,00	1.938.939.483.801,00	114,61	1.009.724.770.219,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.2	2.314.920.067.000,00	2.314.812.589.728,00	100,00	2.314.920.067.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	5.1.1.2.1.3	389.548.099.410,00	366.834.632.121,00	94,17	346.127.480.826,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	5.1.1.2.1.4	423.167.540.000,00	384.159.530.465,00	90,78	136.961.051.879,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA (11 s/d 14)		4.819.424.974.366,00	5.004.746.236.115,00	103,85	3.807.733.369.924,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	5.1.1.2.2				
17	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LRA	5.1.1.2.2.1	3.792.655.336.000,00	3.792.655.366.000,00	100,00	7.911.837.607.000,00
18	Dana Insentif Daerah - LRA	5.1.1.2.2.2	0,00	11.485.688.000,00	0,00	15.684.418.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA (17 s/d 18)		3.792.655.336.000,00	3.804.141.054.000,00	100,30	7.927.522.025.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA (15+19)		8.612.080.310.366,00	8.808.887.290.115,00	102,29	11.735.255.394.924,00
21						
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA	5.1.1.3				
23	Pendapatan Hibah-LRA	5.1.1.3.1	0,00	4.396.650.135,00	0,00	4.038.442.024,12
24	Pendapatan Lainnya-LRA	5.1.1.3.2	0,00	70.416.062,00	0,00	6.940.173.769,00
25	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah-LRA (23 s/d 24)		0,00	4.467.066.197,00	0,00	10.978.615.793,12
26	JUMLAH PENDAPATAN-LRA (7+20+25)		10.764.787.934.427,00	11.040.109.011.239,40	102,56	13.885.923.486.851,30
27						



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022 (Pergub No.55/2022)	REALISASI 2022 (Audited)	(%)	REALISASI 2021 (Audited)
28	BELANJA	5.1.2				
29	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	3.063.415.619.287,00	2.413.293.504.407,00	78,78	2.277.396.143.279,00
31	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	4.887.557.345.186,00	4.487.048.045.881,96	91,81	4.665.313.897.647,17
32	Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
33	Hibah	5.1.2.1.4	1.725.059.365.734,00	1.634.316.326.641,84	94,74	3.695.916.305.303,00
34	Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	53.805.547.595,00	43.752.760.076,37	81,32	119.937.333.696,91
35	Jumlah Belanja Operasi (30 s/d 34)		9.729.837.877.802,00	8.578.410.637.007,17	88,17	10.758.813.679.926,10
36						
37	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
38	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	26.100.000.000,00	25.000.000.000,00	95,79	51.383.998.445,89
39	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	252.867.650.551,00	236.086.848.452,50	93,36	202.131.678.407,72
40	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	1.122.081.473.128,00	1.054.570.476.959,30	93,98	666.090.072.105,71
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	786.882.181.489,00	709.924.786.398,86	90,22	193.212.822.156,41
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.056.850.000,00	2.504.767.568,00	81,94	1.207.512.500,00
43	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.447.200.000,00	1.446.926.050,00	99,98	2.347.496.000,00
44	Jumlah Belanja Modal (38 s/d 43)		2.192.435.355.168,00	2.029.533.805.428,66	92,57	1.116.373.579.615,73
45						
46	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
47	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	328.275.344.112,00	196.021.127.021,00	59,71	119.120.628.800,00
48	Jumlah Belanja Tidak Terduga (47)		328.275.344.112,00	196.021.127.021,00	59,71	119.120.628.800,00
49						
50	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
51	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	659.960.672.645,00	650.691.965.709,00	98,60	814.343.316.031,00
52	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	2.050.955.258.463,00
53	Jumlah Belanja Transfer (51 s/d 52)		659.960.672.645,00	650.691.965.709,00	98,60	2.865.298.574.494,00
54	JUMLAH BELANJA (35 + 44 + 48 + 53)		12.910.509.249.727,00	11.454.657.535.165,80	88,72	14.859.606.462.835,80
55						
56	SURPLUS/DEFISIT (26 - 54)	5.1.3	(2.145.721.315.300,00)	(414.548.523.926,47)	19,32	(973.682.975.984,52)
57						
58	PEMBIAYAAN	5.1.4				
59						
60	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
61	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	1.865.721.315.300,00	1.929.248.255.479,04	103,40	3.023.008.564.518,56
62	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	300.000.000.000,00	300.153.254.727,00	100,05	0,00
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s/d 65)		2.165.721.315.300,00	2.229.401.510.206,04	102,94	3.023.008.564.518,56
67						



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022 (Pergub No.55/2022)	REALISASI 2022 (Audited)	(%)	REALISASI 2021 (Audited)
68	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
69	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	120.000.000.000,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (69 s/d 71)		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	120.000.000.000,00
73	PEMBIAYAAN NETTO (66 - 72)		2.145.721.315.300,00	2.209.401.510.206,04	102,97	2.903.008.564.518,56
74						
75	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (56 + 73)	5.1.5	0,00	1.794.852.986.279,57	0,00	1.929.325.588.534,04

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Pih. GUBERNUR PAPUA,

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri terutama dalam pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan keuangan.

Pemerintah Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur Papua menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR Papua berupa Laporan Keuangan tahun 2022 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua telah disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

1. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

4. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
6. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRP.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
31. Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
32. Peraturan Gubernur Papua Nomor 4B Tahun 2014 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
34. Peraturan Gubernur Papua Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Lainnya;
35. Peraturan Gubernur Papua Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012; dan
36. Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

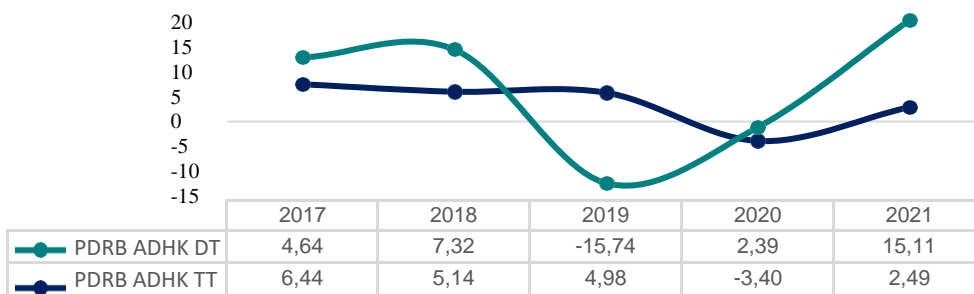
- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan |
| | 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan |
| | 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan |
| BAB II | EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD |
| | 2.1 Ekonomi makro |
| | 2.2 Kebijakan keuangan |
| BAB III | IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2021 |
| | 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan |
| | 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB IV | KEBIJAKAN AKUNTANSI |
| | 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan |
| | 4.2 Prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi |
| BAB V | PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN |
| | 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| | 5.2 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) |
| | 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca |
| | 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO) |
| | 5.5 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK) |
| | 5.6 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) |
| BAB VI | PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN |
| BAB VII | PENUTUP |

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Papua merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam terutama sektor pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang lebih dari 50 persen perekonomian di Papua dengan komoditas tembaga, emas, minyak dan gas. Selain sektor pertambangan, kegiatan perekonomian masyarakat dominan pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Perekonomian Papua selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan mengalami penguatan. Perekonomian Provinsi Papua sampai dengan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,11 persen dengan tambang dan penggalian serta tanpa tambang dan penggalian mencapai 2,49 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua ini terutama didorong oleh kinerja sektor usaha pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ini juga menunjukkan semakin membaiknya kinerja sektor tersebut yang ditunjukkan dengan peningkatan produktifitas hasil kerja. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian sangat menopang sektor non pertambangan yang masih terus mengalami kontraksi setiap tahunnya.

Gambar 001
Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Pertambangan dan Tanpa Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2017-2021

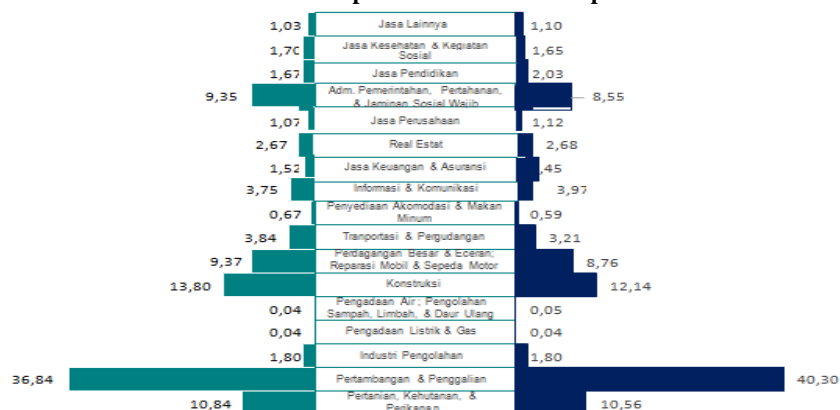


Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Sementara itu, secara absolut kontribusi sektor pertambangan dalam komposisi PDRB Provinsi Papua sangat dominan, dan cenderung naik di tahun 2021 menjadi 32,97 persen untuk PDRB ADHB dan 40,30 persen pada PDRB ADHK

Jika dilihat berdasarkan wilayah di Papua, sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Mimika memiliki laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain termasuk Provinsi Papua. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika periode 2020-2021 adalah sebesar 36,78 persen, sedangkan pada daerah lain berada pada kisaran 0-5 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 002
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2021



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Selanjutnya, jika dilihat kontribusi PDRB setiap wilayah terhadap pembentukan PDRB provinsi Papua kabupaten Mimika masih tergolong paling tinggi. Tercatat Kabupaten Mimika merupakan daerah yang memiliki daerah pertambangan yang sangat besar, sehingga dalam pembentukan PDRB baik kabupaten/kota maupun provinsi sangat berdampak sangat signifikan dalam pembentukan PDRB dengan tambang. Sepanjang tahun 2018-2021 kontribusi Kabupaten Mimika dalam pembentukan agregat PDRB Papua rata-rata mencapai 35,12 persen pertahun.

Tabel 001
Kontribusi PDRB ADHB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2018-2021

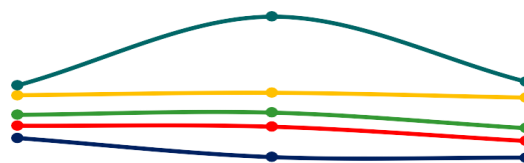
No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Merauke	6.87	8.36	8.00	7.01	7.56
2	Jayawijaya	3.6	4.35	4.13	3.54	3.91
3	Jayapura	6.87	8.55	8.01	7.19	7.66
4	Nabire	4.89	5.78	5.59	5.04	5.33
5	Kepulauan Yapen	1.85	2.22	2.07	1.88	2.01
6	Biak Numfor	2.45	2.86	2.61	2.3	2.56
7	Paniai	1.84	2.18	2.14	1.86	2.01
8	Puncak Jaya	0.61	0.73	0.69	0.59	0.66
9	Mimika	40.34	28.61	31.63	39.88	35.12
10	Boven Digoel	2.16	2.51	2.41	2.08	2.29
11	Mappi	1.26	1.54	1.49	1.3	1.40
12	Asmat	1.07	1.29	1.28	1.13	1.19
13	Yahukimo	1.06	1.26	1.25	1.1	1.17
14	Pegunungan Bintang	0.83	1.00	0.98	0.87	0.92
15	Tolikara	0.69	0.83	0.83	0.72	0.77
16	Sarmi	1.2	1.47	1.47	1.3	1.36
17	Keerom	1.28	1.49	1.46	1.29	1.38
18	Waropen	0.91	1.07	1.02	0.89	0.97
19	Supiori	0.45	0.53	0.52	0.46	0.49
20	Mamberamo Raya	0.7	0.86	0.86	0.77	0.80
21	Nduga	0.53	0.63	0.63	0.56	0.59
22	Lanny Jaya	0.79	0.95	0.96	0.85	0.89
23	Mamberamo Tengah	0.51	0.61	0.61	0.53	0.57
24	Yalimo	0.53	0.64	0.64	0.57	0.60
25	Puncak	0.61	0.73	0.72	0.63	0.67
26	Dogiyai	0.57	0.69	0.68	0.59	0.63
27	Intan Jaya	0.56	0.65	0.64	0.55	0.60
28	Deiyai	0.6	0.72	0.72	0.63	0.67
29	Jayapura	14.38	16.87	15.98	13.9	15.28

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Indeks Harga Konsumen (IDHK) dan Laju Inflasi

Kondisi inflasi di Papua dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Sampai dengan tahun 2021 inflasi gabungan Provinsi Papua adalah sebesar 0,90 persen, artinya harga barang mengalami penurunan secara umum. Penurunan terjadi dalam periode 2019-2021, mengindikasikan adanya penurunan konsumsi masyarakat terhadap barang pokok dan ketidakstabilan distribusi barang.

Gambar 003
Laju Inflasi Gabungan 3 Kota di Provinsi Papua Tahun 2021



	2019	2020	2021
Timika	0,53	4,11	0,86
Merauke	1,06	1,07	1,65
Jayapura	0,59	0,76	0,69
Papua	0,66	1,64	0,90
Papua	2,72	1,69	1,66

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022

IHK gabungan Provinsi Papua sampai dengan tahun 2021 menurut jenis konsumsi gabungan adalah berkisar antara 100,53 s.d 110,03. Jika dilihat menurut IHK gabungan di Provinsi Papua tahun 2021, konsumsi rumah tangga paling besar yaitu pada sektor a) transportasi, kemudian b) makanan, minuman dan tembakau; dan c) perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Tabel 002
Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 3 Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Jenis Konsumsi	Merauke	Timika	Kota Jayapura	Rata-Rata
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	108.11	115.89	106.10	110.03
2	Pakaian dan Alas Kaki	101.32	100.28	104.02	101.87
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.16	98.59	101.85	100.53
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Rangka	107.02	103.17	105.06	105.08
5	Kesehatan	117.06	100.21	108.12	108.46
6	Transportasi	102.98	122.31	113.10	112.80
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102.37	100.27	101.20	101.28
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105.18	110.20	103.05	106.14
9	Pendidikan	103.77	102.53	108.60	104.97
10	Penyedia Makanan dan Minuman	110.39	103.83	106.00	106.74
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113.62	105.89	107.02	108.84
12	Umum	105.84	109.40	105.87	107.04

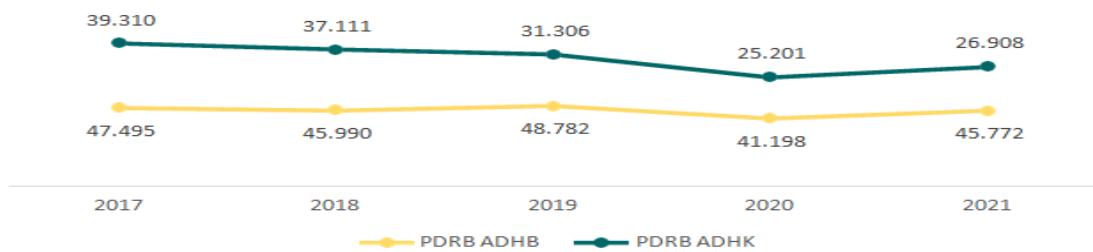
Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat IHK tertinggi adalah Timika mencapai rata-rata sebesar 106,57, kemudian Merauke sebesar 106,05, dan KotaJayapura sebesar 105,83.

PDRB Per Kapita dan Williamson Index

Secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya meningkatkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang negatif. Berdasarkan data BPS tercatat PDRB ADHB maupun ADHK per kapita menunjukkan kecenderungan menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2021 tercatat PDRBADHK per kapita adalah sebesar Rp26,91 Juta, dan PDRB ADHB Rp45,78 Juta.

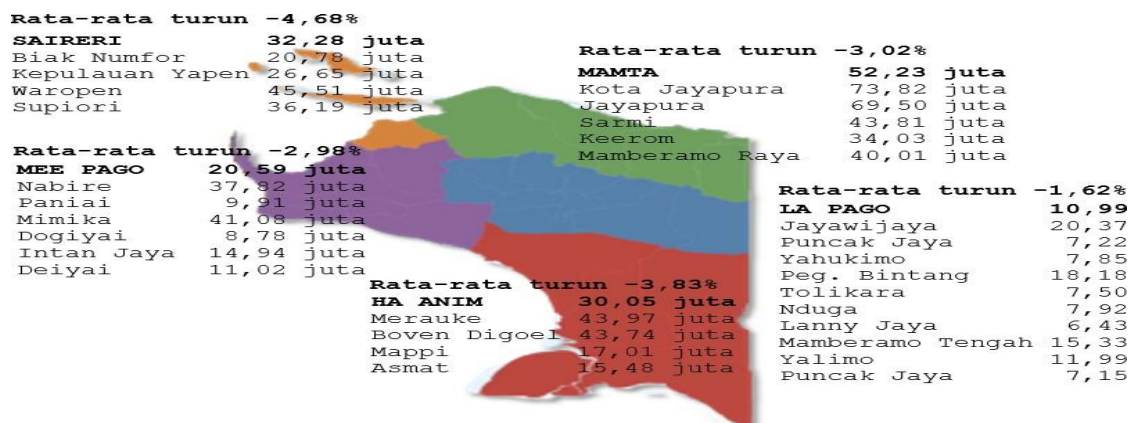
Gambar 004
PRDB Per Kapita ADHB dan ADHK Provinsi Papua Tahun 2017-2021



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Pendapatan Per Kapita di seluruh daerah mengalami penurunan yang drastis di tahun 2020 bila dibandingkan tahun 2019. Paling tinggi di Wilayah Adat Saireri rata-rata mencapai -4,68%, dan terendah di Wilayah Adat La Pago sebesar -1,62%. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak produksi terhambat dan rasionalisasi tenaga kerja yang akhirnya mengurangi pendapatan masyarakat.

Gambar 005
Pendapatan Per Kapita menurut Wilayah Adat Provinsi Papua Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Di sisi lain ketimpangan regional antarwilayah dengan formula Williamson Index terlihat naik sekitar 0,0605 poin untuk seluruh wilayah Papua. Dengan yang tertinggi kenaikannya di Wilayah Adat Saireri (0,0079 poin) dan Mamta (0,0064 poin). Ini berarti Pandemi Covid-19 menyebabkan kesenjangan antar wilayah semakin melebar.

Ratio Gini

Secara agregat nilai Gini Ratio Provinsi Papua selama periode 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami fluktuasi, dan cenderung meningkat. Terindikasi kesenjangan pembagian pendapatan relatif antarpenduduk dinilai cukup besar antara penduduk berpendapatan tinggi dan rendah. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan ketimpangan pendapatan antarpersonal di Provinsi Papua meningkat.

Tabel 003
Gini Ratio Provinsi Papua Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Merauke	0.370	0.370	0.386	0.380	0.385
2	Jayawijaya	0.330	0.300	0.318	0.342	0.344
3	Jayapura	0.280	0.260	0.401	0.432	0.378
4	Nabire	0.390	0.330	0.360	0.349	0.334
5	Kepulauan Yapen	0.330	0.370	0.381	0.400	0.387
6	Biak Numfor	0.360	0.380	0.372	0.401	0.374
7	Paniai	0.460	0.330	0.351	0.380	0.224
8	Puncak Jaya	0.210	0.300	0.415	0.376	0.368
9	Mimika	0.330	0.290	0.293	0.339	0.349
10	Boven Digoel	0.350	0.340	0.392	0.448	0.407
11	Mappi	0.390	0.320	0.416	0.427	0.384
12	Asmat	0.230	0.330	0.398	0.403	0.405
13	Yahukimo	0.330	0.340	0.414	0.394	0.336
14	Pegunungan Bintang	0.340	0.330	0.373	0.448	0.344
15	Tolikara	0.300	0.270	0.340	0.388	0.291
16	Sarmi	0.400	0.380	0.436	0.424	0.409
17	Keerom	0.360	0.360	0.432	0.396	0.393
18	Waropen	0.340	0.280	0.369	0.346	0.405
19	Supiori	0.250	0.320	0.364	0.319	0.320
20	Mamberamo Raya	0.200	0.400	0.411	0.211	0.324
21	Nduga	0.210	0.200	0.188	0.187	0.231
22	Lanny Jaya	0.310	0.310	0.297	0.281	0.293
23	Mamberamo Tengah	0.230	0.290	0.248	0.330	0.320
24	Yalimo	0.250	0.330	0.320	0.362	0.363
25	Puncak	0.180	0.150	0.321	0.302	0.312
26	Dogiyai	0.220	0.270	0.366	0.326	0.306
27	Intan Jaya	0.260	0.250	0.312	0.269	0.248
28	Deiyai	0.240	0.190	0.336	0.357	0.240
29	Kota Jayapura	0.320	0.310	0.305	0.278	0.276
30	Provinsi Papua	0.390	0.370	0.394	0.392	0.397

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022

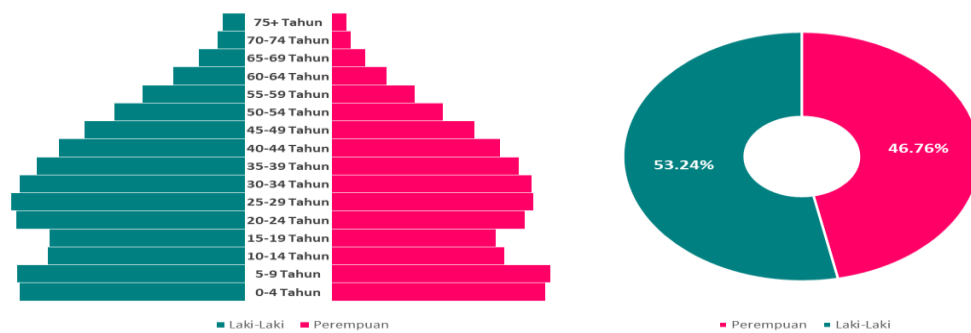
Berdasarkan tabel di atas, ketimpangan pendapatan tergolong cukup tinggi di antaranya adalah kabupaten Boven Digoel, Asmat, Waropen, dan Sarmi. Keempat daerah tersebut masing-masing memiliki nilai indeks gini sampai dengan tahun 2021 adalah berkisar antara 0,405-0,409 poin.

2.1.1 Penduduk, Ketenagakerjaan dan Sosial

2.1.1.1 Penduduk

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2021 mencatat jumlah penduduk Papua pada bulan September 2021 sebanyak 4.355.445 jiwa. Dari jumlah tersebut 53,24% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 46,76% nya perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Papua terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Papua mengalami penambahan dengan laju pertumbuhan penduduk 4,27%. Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda.

Gambar 006
Piramida Penduduk Hasil Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010-2035
Provinsi Papua, 2021



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Kemudian dari persebaran penduduk di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Papua terlihat tidak merata. Terdapat kabupaten/ kota yang memiliki luas wilayah yang sangat luas namun jumlah penduduk yang berada di kabupaten/kota tersebut sedikit, sebaliknya ada kabupaten/kota dengan luas wilayah yang kecil tetapi memiliki jumlah penduduk yang besar. Daerah dengan penduduk terbesar, terlihat di Kota Jayapura, dengan tingkat kepadatannya tertinggi di Provinsi Papua di tahun 2021 sebesar 431,67 jiwa per km² luas wilayah. Adapun yang paling rendah di Kabupaten Sarmi, hanya sebesar 1,54 jiwa per km² (lihat Tabel 3.10).

Berdasarkan Rasio Seks Provinsi Papua pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Rasio seks Provinsi Papua adalah sebesar 113,86, yang artinya diantara 100 orang perempuan terdapat 114 orang laki-laki. Jika diperhatikan pada perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, terlihat di seluruh kabupaten/kota wilayah Papua mempunyai angka Rasio Seks di atas 100, yang mengindikasikan bahwa di antara jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2.1.1.2 Ketenagakerjaan

Apabila dilihat sepanjang tahun 2017-2021, jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja di Provinsi Papua terlihat meningkat. Meskipun demikian pertumbuhan penduduk bukan angkatan kerja juga terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut terindikasi dengan semakin bertambahnya penduduk usia kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 004
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (jiwa)	1.762.841	1.835.963	1.842.203	1.769.403	1.952.777
1. Bekerja (jiwa)	1.699.071	1.777.207	1.775.030	1.692.745	1.887.781
2. Pengangguran (jiwa)	63,770	58,756	67,173	76,658	64,996
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	528027	528027	552684	552684	541,365
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas (jiwa)	2.291.111	2.291.111	3.684.406	2.449.145	2.911,846
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,94	79,11	76,92	72,16	78,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,62	3,20	3,65	4,28	3,33

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat selama tahun 2017-2021. Dimana untuk TPAK di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersebut mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Hal tersebut juga sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami fluktuasi dan cenderung turun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Selanjutnya, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 1,95 juta jiwa (78,29 persen) yang didominasi oleh laki-laki (1,14 juta jiwa). Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 1,88 juta jiwa yang juga didominasi oleh laki-laki (58,37 persen). Meski begitu, peran perempuan dalam

ketenagakerjaan di Provinsi Papua tidak bisa diabaikan karena perannya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar (24,12 persen).

2.1.1.3 Sosial

Pembangunan manusia di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan walaupun kenaikannya tidak signifikan. Angka ini meningkat atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,18 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 60,44. Sementara itu jika melihat pada komponen pembentukannya dari periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita juga mengalami tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Tabel 005
Komponen IPM Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup(Tahun)	65.1	65.4	65.65	65.79	65.93
Harapan Lama Sekolah(Tahun)	10.5	10.8	11.05	11.08	11.11
Rata-rata Lama Sekolah(Tahun)	6.2	6.5	6.65	6.69	6.76
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan(Ribu Rupiah)	6,996	7,159	7,336	6,359	6.95
Indeks Pembangunan Manusia(indeks)	59.09	60.06	60.84	60.44	60.62
Pertumbuhan IPM(Persen)	1.79	1.64	1.23	-0.66	0.18

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022

Selama tahun 2017-2021, Papua menjadi provinsi dengan percepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terjadi perubahan status pembangunan manusia Papua dari berstatus “rendah” menjadi berstatus “sedang”. IPM kabupaten/kota di wilayah Papua sepanjang tahun 2017-2021 sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura selama periode tersebut dapat dikatakan yang paling konsisten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, dimana sampai dengan tahun 2021 nilai IPM Kota Jayapura telah mencapai 80,11 poin. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Mimika pada urutan ke-2, dan Kabupaten Biak Numfor di urutan ke-3. Adapun pada tahun 2021 daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Nduga (urutan ke-29), Puncak (urutan ke-28) dan Pegunungan Bintang (urutan ke-27).

Selanjutnya, secara peringkat IPM di Provinsi Papua tahun 2021, Kota Jayapura masih merupakan daerah dengan IPM tertinggi. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Mimika, Biak Numfor, dan Merauke. Sedangkan terdapat 11 daerah dengan IPM masih dibawah 50 persen di antaranya kabupaten Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Intan Jaya, dan Deiyai. Meskipun demikian, hampir seluruh IPM kabupaten/kota di Papua cenderung meningkat setiap tahunnya.

a. Pendidikan

Salah satu kebutuhan dasar manusia, selain sandang, pangan, dan perumahan adalah pendidikan. Selain itu, pendidikan merupakan faktor yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin mudah seseorang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan fasilitas yang memadai.

Tahun 2020, persentase penduduk usia 7-24 tahun di Provinsi Papua yang masih bersekolah ada sebanyak 61,83 persen. Sedangkan, sisanya sebanyak 14,66 persen dan 23,52 persen adalah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/sederajat adalah sebesar 80,38 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 44,41 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK)

dimana APK SD/MI/ sederajat adalah sebesar 91,27 persen dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 75,05 persen.

a.1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di Provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena terdapat anak sekolah yang *drop out* atau masih berada di jenjang SMP. Terlihat angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD sebesar 78,83% tahun 2017, meningkat sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 80,07%. Angka partisipasi murni di tingkat SMP dan SMA/SMK sampai dengan tahun 2021 juga meningkat masing-masing sebesar 57,93% dan 44,41%. meskipun demikian nilai rata-rata capaian APM setiap jenjang pendidikan SD masih mendominasi jika dibandingkan tingkat SMP dan SMA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:

Tabel 006
Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Angka Partisipasi Murni	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI/Paket A	78,83	79,14	79,19	79,27	80,07
SMP/MTs/Paket B	56,13	57,09	57,19	57,95	57,93
SMA/SMK/MA/Paket C	43,48	44,31	44,32	44,73	44,41

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2022)

Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di Provinsi Papua yang sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan

a.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar provinsi Papua pada setiap jenjang pendidikan terlihat bervariasi. APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar sepanjang tahun 2017-2021 terlihat mengalami penurunan, dengan rata-rata mencapai 92,74%. Kemudian jenjang pendidikan SMP dan SMA juga terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan masing-masing mencapai rata-rata SMP (82,21%) dan SMA/SMK (72,19%), namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat jauh lebih rendah yaitu sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 78,11% dan 76,33%. Kondisi ini merefleksikan bahwa daya serap penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan tanpa melihat batas usia di Provinsi Papua masih rendah seperti tabel berikut:

Tabel 007
Angka Partisipasi Kasar Provinsi Papua Tahun 2017-2021

APK	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI/Paket A	92,94	94,47	91,94	91,27	93,07
SMP/MTs/Paket B	82,20	87,81	78,11	81,24	81,68
SMA/SMK/MA/Paket C	67,94	65,07	76,33	76,55	76,05

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2022)

Bila dilihat sepanjang tahun 2017-2021 angka partisipasi kasar SD rata-rata tumbuh sebesar 0,05% per tahun. Sementara pada tingkat SMP rata-rata tumbuh sebesar 0,08% per tahun, dan untuk tingkat SMA rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,85% pertahun.

a.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan untuk usia sekolah 7-18 tahun, berbeda dengan usia 19-24 tahun yang mengalami penurunan. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun di Provinsi Papua mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sebesar

81,80% menjadi 83,43% ditahun 2021. Begitu juga pada usia 13-15 tahun, dimana pada tahun 2017 sebesar 79,09% menjadi 80,02% di tahun 2021. Sementara pada usia 16-18 pada tahun 2017 sebesar 63,35% mengalami peningkatan menjadi 63,98% pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 0,68 poin, Sementara pada usia 19-24 tahun angka partisipasi sekolah sebesar 24,57% di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 22,90%. artinya sekitar 23% penduduk berusia 19-24 tahun di Provinsi Papua sedang bersekolah.

Tabel 008
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2017-2021

APS	2017	2018	2019	2020	2021
07-12	81,8	82,38	82,62	82,99	83,43
13-15	79,09	79,9	80,11	80,48	80,02
16-18	63,35	63,46	62,11	64,83	63,98
19-24	24,57	23,37	22,91	23,23	22,90

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

Bila dilihat sepanjang tahun 2017-2021 angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun rata-rata tumbuh sebesar 0,49% per tahun. Sementara pada usia 13-15 tahun rata-rata tumbuh sebesar 0,29% per tahun, dan untuk usia 16-18 tahun rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,28% per tahun. Sementara untuk usia 19-24 tahun rata-rata pertumbuhan -1,72 per tahun.

a.4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2021 cenderung mengalami kenaikan. Angka Putus Sekolah usia 07-12 tahun di Provinsi Papua mengalami kenaikan sejak tahun 2017 sebesar 0,59% menjadi 2,48% ditahun 2021. Begitu juga pada usia 13-15 tahun dimana pada tahun 2017 sebesar 0,71% menjadi 3,87% di tahun 2021. Sementara pada Usia 16-18 pada tahun 2017 sebesar 0,75% mengalami peningkatan menjadi 0,77% pada tahun 2021, artinya secara rata-rata dari 100 penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 1 orang yang putus sekolah. Dan rata-rata dari 100 penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 3 orang yang putus sekolah.

Tabel 009
Angka Putus Sekolah Provinsi Papua Tahun 2017-2021

APS	2017	2018	2019	2020	2021
07-12	0,59	0,62	0,81	0,99	2,48
13-15	0,71	1,27	1,44	1,66	3,87
16-18	0,75	0,86	0,83	1,8	0,77

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2022)

Bila dilihat sepanjang tahun 2017-2021 angka putus sekolah usia 07-12 tahun secara rata-rata terdapat sekitar 1 orang dari 100 penduduk berusia 7-12 tahun yang putus sekolah. Sementara usia 13-15 tahun secara rata-rata terdapat sekitar 2 orang dari 100 penduduk berusia 13-15 tahun yang putus sekolah. Dan usia 16-18 tahun secara rata-rata terdapat sekitar 1 orang dari 100 penduduk berusia 16-18 tahun yang putus sekolah.

a.5. Angka Mengulang

Secara keseluruhan angka mengulang dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi untuk masing-masing jenjang pendidikan. Tercatat Angka Mengulang di Provinsi Papua tahun 2016 pada tingkat SD sebesar 3,37%, meningkat cukup pesat pada tahun 2019 menjadi 4,13% dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 3,50%. Kemudian pada jenjang SMP angka mengulang di tahun 2016 sebesar 1,23%, sempat menurun di tahun 2017 menjadi 0,80% dan meningkat kembali ditahun berikutnya hingga di tahun 2020 menjadi 2,24%. Sementara pada jenjang SMA angka mengulang di tahun 2016 mencapai 0,70% dan terlihat meningkat hingga tahun 2020 menjadi 1,68%.

Tabel 010
Angka Mengulang Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Angka Mengulang	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/PaketA	3,37	3,03	4,02	4,13	3,50
SMP/MTs/PaketB	1,23	0,80	1,48	2,13	2,24
SMA/SMK/MA/PaketC	0,70	0,74	0,70	1,64	1,68

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

a.6. Angka Kelulusan

Secara keseluruhan masih terdapat siswa/i pada setiap jenjang Pendidikan di Provinsi Papua yang tidak lulus. Selain itu, tingkat kelulusan Pendidikan per jenjang Pendidikan di Papua memiliki trend yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan khususnya pada jenjang Pendidikan. Angka Kelulusan di Provinsi Papua pada tahun 2016 ditingkat SD sebesar 98,60% menurun menjadi 79,44% pada tahun 2020. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2020 masih terdapat 20,56% siswa/i yang tidak lulus dan melanjutkan Pendidikan pada jenjang SMP.

Tabel 011
Angka Kelulusan Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Angka Kelulusan	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A	98,6	97,88	98,18	81,61	79,44
SMP/MTs/Paket B	94,38	98,25	96,47	91,89	94,98
SMA/SMK/MA/Paket C	98,12	98,2	98,44	95,78	95,8

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

a.7. Perkembangan Guru dan Murid

Secara keseluruhan jumlah guru di Provinsi Papua baik pendidikan SD, SMP, SMA adalah sebanyak 35.536 orang pada tahun 2021. Dengan semakin tingginya kebutuhan terhadap pendidikan di Papua, juga diikuti dengan perkembangan jumlah guru di Papua terlihat cukup pesat dan bahkan pada setiap jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2021 mencapai 19.004 orang, kemudian untuk SMP mencapai 9.073 orang, pendidikan SMA sebesar 7.486 orang yang mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 10.387 orang.

Tabel 012
Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Sekolah Dasar	16.208	16.054	18.037	18.827	19.004
Sekolah Menengah Pertama	7.547	7.752	8.315	8.875	9.073
Sekolah Menengah Atas	7.094	7.138	7.316	10.387	7.486
Jumlah	30.849	30.944	33.668	38.089	35.563

Sumber: BPS RI, 2022

- Peningkatan rata-rata siswa paling terlihat pada pertumbuhan rata-rata jenjang pendidikan SMP dan SMA masing-masing sebesar 3,39% dan 5,22%. Sedangkan tingkat pendidikan SD hanya sebesar 0,88% pada tahun 2021. Meskipun Rata-rata jumlah siswa SD mencapai 0,88%, namun dari sisi jumlah siswa pendidikan SD paling dominan mencapai 463.838 siswa pada tahun 2021. Kemudian disusul SMP sebanyak 143.899 orang, untuk SMA sebanyak 108.319 siswa.

Tabel 013
Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Sekolah Dasar	448.483	447.968	442.845	439.345	463.838
Sekolah Menengah Pertama	126.477	125.678	131.812	129.930	143.899
Sekolah Menengah Atas	93.127	96.392	104.498	133.759	108.319
Jumlah	668.087	670.038	679.155	703.034	716.056

Sumber: BPS RI, 2022

a.8. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada saat ini tidak dapat mengimbangi kebutuhan akses pendidikan di Papua yang terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan buruknya kondisi fasilitas sekolah dari tahun 2016 hingga 2019.

Dengan rata-rata tahunan hanya 22,62%, proporsi SD dalam kondisi baik di Provinsi Papua tidak jauh berbeda dari tahun 2016 hingga 2019. Sementara sekolah memiliki fasilitas yang memadai, permasalahan yang sama juga terjadi pada fasilitas pendidikan SMP dan SMA yang relatif masih kurang memadai.

Tabel 014
Sekolah dalam Kondisi Baik Provinsi Papua Tahun 2016-2019

Sekolah Kondisi Baik	2016	2017	2018	2019
SD/MI/PaketA	22,48	22,48	22,77	22,75
SMP/MTs/PaketB	23,93	22,37	22,46	22,46
SMA/SMK/MA/PaketC	37,30	33,87	32,75	33,06

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Jumlah sekolah di Provinsi Papua yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah Kementerian Agama, serta di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, terlihat sebanyak 2.650 Sekolah Dasar, 760 Sekolah Menengah Pertama, 267 Sekolah Menengah Atas, 139 Sekolah Menengah Kejuruan dan 54 Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Provinsi Papua.

b. Kemiskinan

Tren penduduk miskin secara agregat di Papua terus meningkat sampai dengan tahun 2021. Data per bulan Maret tahun 2021 menunjukkan tingkat kemiskinan sebanyak 920,44 ribu orang atau 26,86%, dan posisi terakhir di bulan September 2021 sebanyak 944,49 ribu orang atau naik sebesar 27,36%. Meskipun telah mengalami peningkatan secara rata-rata, namun Provinsi Papua masih menjadi Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Hal tersebut menandakan biaya hidup minimal di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan. Menurut kewilayahan, daerah yang paling miskin selama ini adalah di perdesaan/kampung. Sampai tahun 2021 (September) tercatat kemiskinan di perdesaan mencapai 36,50%, atau meningkat sebesar 0,81% dibandingkan tahun 2020 (35,69%). Sementara itu, di wilayah perkotaan sebesar 4,94% yang mengalami kenaikan sebesar 0,35% dibandingkan tahun 2020 (4,59%).

Tabel 015
Kondisi Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapital/bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2017	Maret	457.541	7,49	2,82	27,62
	September	464.056	6,24	1,93	27,76
2018	Maret	499.463	6,73	2,28	27,74
	September	518.811	5,91	1,82	27,43
2019	Maret	540.099	7,17	2,60	27,53
	September	557.099	6,07	1,98	26,64
2020	Maret	563.099	6,16	2,08	26,6
	September	580.643	6,90	2,35	26,8
2021	Maret	634.703	5,60	2,08	26,86
	September	643.071	6,31	2,35	27,38

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks P1 ini, maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi dalam kisaran yang tidak terlalu berbeda jauh, namun telah menunjukkan perbaikan yang positif.

Tabel 016
Kedalaman Keparahan Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan
Pedesaan Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Tahun	Bulan	Indeks Kedalaman Keparahan		
		Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
2017	Maret	0,65	10,03	7,49
	September	0,56	8,40	6,24
2018	Maret	0,84	8,98	6,73
	September	0,76	7,94	5,91
2019	Maret	0,71	9,76	7,17
	September	0,59	8,26	6,07
2020	Maret	0,62	8,26	6,16
	September	0,82	9,34	6,90
2021	Maret	0,85	7,52	5,60
	September	0,86	8,53	6,31

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022

Penduduk miskin di Provinsi Papua didominasi oleh penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Sampai dengan tahun 2021 bulan September tercatat kedalaman keparahan penduduk miskin terkonsentrasi di wilayah pedesaan sebesar 8,53 persen, sedangkan pada wilayah perkotaan adalah sebesar 0,86 persen. Hal tersebut perlu dilakukan upaya lebih agar aktivitas perekonomian masyarakat tidak selalu terpusat pada wilayah perkotaan.

Secara persentase penduduk miskin dalam 5 (lima) tahun terakhir kabupaten/kota di Papua hampir sebagian besar mengalami perbaikan (angka kemiskinan menurun), sebaliknya dari segi jumlah penduduk miskin bertambah. Rata-rata penurunan angka kemiskinan kabupaten/kota jika dilihat berdasarkan tahun 2017 dengan 2021 adalah sebesar 0,91 poin. Sebaliknya, pada jumlah penduduk miskin kabupaten/kota meningkat sebesar 0,79 poin dari tahun 2017 dengan 2021. Jika dilihat berdasarkan data kewilayahan provinsi Papua sampai tahun 2021, angka kemiskinan paling tinggi yaitu kabupaten Intan Jaya (42,46 persen), namun secara jumlah paling besar terdapat di kabupaten Jayawijaya (78,18 ribu jiwa).

Tabel 017
Kondisi Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Angka Kemiskinan (Persen)					Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Merauke	10.81	10.54	10.35	10.03	10.16	24.06	23.72	23.49	22.89	23.83
2	Jayawijaya	38.62	38.66	38.33	37.22	37.09	81.94	82.90	83.23	81.71	78.18
3	Jayapura	13.01	13.44	13.13	12.44	12.13	16.31	17.19	17.19	16.61	15.56
4	Nabire	25.38	25.17	24.81	24.15	23.83	36.68	37.06	37.14	36.75	35.08
5	Kepulauan Yapen	26.82	27.17	27.13	26.30	26.09	25.35	26.30	27.19	27.04	25.67
6	Biak Numfor	25.44	25.72	25.50	24.57	24.45	36.63	37.93	38.60	38.02	36.38
7	Paniai	37.40	37.35	37.16	36.71	36.59	63.38	64.45	65.54	65.98	62.57
8	Puncak Jaya	36.01	36.27	35.71	34.74	36.00	44.16	45.51	45.89	46.07	46.39
9	Mimika	14.89	14.55	14.54	14.26	14.17	31.15	31.18	31.79	31.75	30.95
10	Boven Digoel	19.90	20.35	19.66	19.41	19.90	13.10	13.70	13.54	13.86	13.88
11	Mappi	25.75	25.64	25.50	25.04	26.05	24.31	25.21	26.10	26.91	26.36
12	Asmat	27.16	27.41	26.60	25.49	24.83	25.05	26.02	25.80	25.12	25.04
13	Yahukimo	39.33	39.25	38.82	37.34	37.64	73.27	74.02	73.92	71.76	73.62
14	Pegunungan Bintang	30.60	30.75	30.51	30.15	30.46	22.41	22.81	23.01	23.03	23.38
15	Tolikara	32.73	33.14	32.90	32.04	32.60	44.47	45.54	45.65	44.88	48.16
16	Sarmi	13.75	14.51	14.41	13.87	13.84	5.23	5.67	5.80	5.70	5.56
17	Keerom	16.69	16.90	16.83	16.32	16.00	9.14	9.40	9.55	9.42	9.30
18	Waropen	30.82	30.53	30.95	29.54	29.85	9.03	9.26	9.68	9.44	9.69
19	Supiori	37.40	39.22	38.79	36.91	37.91	7.09	7.76	7.97	7.78	7.83
20	Mamberamo Raya	29.88	30.10	29.13	28.38	28.78	6.63	6.94	6.96	6.98	7.04
21	Nduga	37.29	38.13	38.24	36.72	37.18	36.07	37.14	37.60	36.54	41.17
22	Lanny Jaya	39.60	40.06	39.52	38.13	38.73	69.78	71.08	70.60	68.62	76.75
23	Mamberamo Tengah	36.38	37.02	36.93	36.41	36.76	17.20	17.75	17.79	17.72	19.66
24	Yalimo	34.97	35.45	34.52	32.82	33.25	21.18	21.64	21.48	20.84	22.32
25	Puncak	37.46	38.15	38.24	36.96	36.26	40.17	42.10	43.09	42.43	40.78
26	Dogiyai	30.36	30.48	31.12	28.62	28.81	28.75	29.32	30.37	28.31	28.38
27	Intan Jaya	42.23	42.71	42.92	40.71	41.66	20.29	20.80	21.10	20.46	21.31
28	Deiyai	43.63	43.49	43.65	41.76	40.59	31.33	31.50	31.87	30.98	30.83
29	Kota Jayapura	11.46	11.37	11.49	11.16	11.39	33.51	33.74	34.42	33.80	34.79
30	Provinsi Papua	27.62	27.74	27.53	26.64	27.38	897.69	917.63	926.36	911.37	920.44

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022

c. Kesehatan

Kondisi kesehatan merupakan bagian yang erat hubungannya dengan keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan usia harapan hidup, dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Pada tahun 2021, fasilitas kesehatan di Provinsi Papua didominasi oleh Posyandu sebanyak 3.521 unit. Sedangkan, jumlah rumah sakit di Provinsi Papua ada sebanyak 45 unit. Dinas Kesehatan Provinsi Papua juga mencatat jumlah rumah sakit terbanyak ditemukan di Kota Jayapura sebanyak delapan unit. Selain itu, pada periode waktu yang sama, tenaga kesehatan di Provinsi Papua pada tahun 2021 didominasi oleh tenaga keperawatan sebanyak 8.437 orang.

Tahun 2021, sebanyak 72,93 persen perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dibantu proses kelahirannya oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, menunjukkan jumlah ibu hamil di Provinsi Papua pada tahun 2021 ada sebanyak 72.114 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Terkait dengan kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan, sebanyak 66,77 persen ibu hamil melakukan kunjungan K1 namun persentase ini menurun di kunjungan K4 menjadi 34,08 persen. Sebanyak 3,89 persen ibu hamil dinyatakan Kurang Energi Kronis (KEK) dan 11,74 persen mendapatkan asupan zat besi.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Papua pada tahun 2021 ada sebanyak 400.641 pasangan. Secara lebih lanjut, jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif ada sebanyak 164.831 orang dimana sebagian besar peserta KB menggunakan alat suntikan yaitu sebanyak 91.004 orang. Sebaliknya Metode Operasi Pria (MOP) menjadi metode KB yang paling sedikit dilakukan oleh peserta KB yaitu sebanyak 160 orang.

Jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Papua per Desember 2020 & per September 2021 menunjukkan penurunan jumlah kasus yang cukup baik. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus dari golongan corona virus, SARS-CoV-2, juga sering disebut Virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menyebar antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua, jumlah kasus terkonfirmasi positif per Desember 2020 sebanyak 41.703 kasus mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 11.481, dengan 1.155 kematian di tahun 2020 menurun menjadi 196 kematian di tahun 2021 dan 38.059 orang sembuh di tahun 2020, sementara pada tahun 2021 sebanyak 6.145 orang sembuh.

Perumahan dan Lingkungan

Pada tahun 2021, sebanyak 11,90 persen rumah tangga di Provinsi Papua menempati bangunan dengan luas lantai 19 m² atau kurang. Sebaliknya, ada hanya 4,65 persen rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas lantai lebih dari 100 m².

Jika ditinjau berdasarkan sumber air minum, pada tahun yang sama, sebanyak 26,07 persen rumah tangga di Provinsi Papua masih menggunakan air dalam kemasan. Secara lebih lanjut, Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2021 mencatat sebanyak 43,92 persen rumah tangga telah menggunakan listrik PLN. Sebaliknya, masih ada sebanyak 20,88 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik di rumah tangganya.

d. Kriminalitas

Pada periode 2019-2021 jumlah kasus kejahatan di Provinsi Papua yang dilaporkan terlihat mengalami penurunan. Tercatat pada periode 2020-2021 terdapat 8.005 kasus yang dilaporkan turun menjadi 6.864 kasus. Sedangkan risiko tindak pidana terhadap penduduk di Provinsi Papua juga memiliki tren menurun. Tercatat rasio tindak pidana per 100 ribu penduduk tahun 2019 adalah sebesar 248,70 per 100 ribu penduduk, kemudian

mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 199,64 per 100 ribu penduduk. Selain itu, penyelesaian kasus tindak pidana pada tahun 2019-2021 rata-rata hanya 46,26 persen yang terselesaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan juga *stakeholder* dalam bersama-sama meningkatkan ketentraman dan kenyamanan daerah.

Tabel 018
Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	3.347	4.304	4.355
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (kasus)	8.551	8.005	6.864
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (per 100.000 Penduduk)	248,70	234,28	199,64
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)	50,18	45,79	42,82
Tingkat Kriminalitas (Persen)	11,05	18,07	15,76

Sumber: Papua Dalam Angka 2022 (data diolah)

Secara keseluruhan, upaya dalam rangka menurunkan angka kriminalitas di Papua juga terlihat berdasarkan indikator tingkat kriminalitas yang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Tingkat kriminalitas di Provinsi Papua cenderung terus menurun, hingga tahun 2021 masih terdapat banyak kasus yang masih belum terselesaikan.

e. Agama dan Isu Sosial Lainnya

Pada tahun 2020 Provinsi Papua didominasi oleh penganut agama Kristen Protestan yaitu sebanyak 2.434.467 orang. Jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah penganut agama Kristen Katolik dan Islam yaitu sebanyak 949.120 orang dan 519.560 orang.

Sebanding dengan jumlah penganutnya, jumlah gereja Kristen Protestan merupakan yang terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6.223 unit, Gereja Katolik 814 unit, Masjid 1.447 unit, Pura 29 unit, dan Vihara sebanyak 18 unit.

Pada tahun 2021, Kementerian Agama RI mencatat tidak ada jumlah jemaah haji yang diberangkatkan dari Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda.

Kementerian Agama RI juga mencatat bahwa pada tahun 2021 ada sebanyak 4.134 pernikahan. Namun, ditahun yang sama, Mahkamah Agung mencatat ada sebanyak 1.838 talak dan cerai di Provinsi Papua.

Sedangkan, struktur penduduk menurut agama di Provinsi Papua menunjukkan sebagian besar penduduk Papua memeluk agama kristen protestan. Hal ini berpengaruh pada jumlah gereja protestan yang banyak ditemukan di Provinsi Papua yaitu sebanyak 6.223 bangunan.

2.1.2 Potensi Unggulan Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Alam Papua yang Kaya, Beragam dan Indah

a. Tanaman Pangan

Pada tahun 2021, produksi padi di Provinsi Papua sebesar 248.358,99 ton. Di tahun yang sama, luas panen padi di Provinsi Papua sebesar 55.125,37 ha. Secara lebih lanjut, produktivitas di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebesar 45,05 ton/ha dan tercatat paling besar di Kabupaten Merauke (45,48 ton/ha) dengan luas panen sebesar 50.823,78 ha.

b. Holtikultura

Luas panen di Provinsi Papua pada tahun 2021 didominasi oleh kangkung seluas 1.017 ha dengan luas panen terluas tercatat di Kabupaten Mimika seluas 436 ha. Begitu juga hasil produksi terbesar di tahun 2021 tanaman kangkung adalah yang menghasilkan 57.302 kuintal.

Jahe merupakan tanaman biofarmaka dengan hasil produksi terbesar di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebanyak 80.119 kg, serta kapulaga menjadi tanaman biofarmaka dengan hasil produksi terendah yaitu sebanyak 200 kg.

d. Tanaman Perkebunan

Pada tahun 2020 luas perkebunan di Provinsi Papua tercatat sebesar 152.555 ha. Sagu menjadi tanaman perkebunan luas lahan tertinggi yaitu 54.657 ha sehingga tanaman ini juga menunjukkan hasil produksi tertinggi yaitu sebesar 67.913 ton. Sebaliknya, lada menjadi tanaman perkebunan dengan luas lahan terendah yaitu 42ha, serta memberikan hasil sebanyak 4 ton.

e. Peternakan

Hewan ternak di Provinsi Papua pada tahun 2021 didominasi oleh babi dengan populasi sebanyak 1.022.717 ekor. Sapi potong menjadi populasi ternak terbesar kedua dengan jumlah 121.678 ekor. Sebaliknya sapi perah menjadi populasi ternak terkecil di Provinsi Papua dengan jumlah 19 ekor.

Secara keseluruhan, jumlah populasi unggas di Provinsi Papua pada tahun 2021 mencapai 9.086.251 ekor. Secara rinci, populasi unggas terbesar adalah ayam pedaging dengan jumlah populasi mencapai 5.532.049 ekor. Sebaliknya itik menjadi unggas dengan populasi terendah yaitu 94.120 ekor.

Hasil produksi daging di Provinsi Papua tahun 2021 menunjukkan daging babi menjadi hasil produksi daging terbesar sebanyak 9.116.240 kg diikuti oleh sapi potong sebesar 3.699.504 kg. Sedangkan hasil produksi daging kuda hanya sebesar 16.950 kg.

Pada produksi daging unggas, tahun 2021 di Provinsi Papua didominasi oleh ayam pedaging sebanyak 6.100.144 kg. Sedangkan yang terendah adalah produksi daging itik sebanyak 121.411 kg.

f. Perikanan

Produksi hasil perikanan tangkap di Provinsi Papua pada tahun 2019 ada sebanyak 220.929 ton. Produksi hasil perikanan tangkap tertinggi terdapat di Kota Jayapura sebanyak 56.762 ton. Sedangkan, produksi hasil perikanan budidaya di Provinsi Papua pada tahun 2020 ada sebanyak 24.266 ton hasil pembesaran, 22.874.000 ekor hasil pembenihan, serta 15.000 ekor merupakan ikan hias.

g. Kehutanan

Secara keseluruhan total luas kawasan di Provinsi Papua adalah atas hutan produksi (terbatas), produksi (dapat dikonversi), hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, areal lainnya dan kawasan perairan. Adapun luas penutupan lahan paling tinggi mencakup hutan lindung yaitu mencapai 30,95 persen atau seluas 7.815 juta Ha.

Aktivitas penggundulan hutan atau deforestasi di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan dan membaik, meskipun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi.

Sampai dengan tahun 2020 deforestasi hutan tetap tercatat sebesar 1.266,70 juta Ha, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebesar 22,24%. Kemudian pada hutan produksi yang dapat dikonversi juga terlihat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 60,08%. Sedangkan pada area penggunaan lain memiliki tren positif, artinya terjadi peningkatan deforestasi pada area tersebut. Dengan luas kawasan hutan yang cukup besar, di dalamnya terdapat beberapa potensi hasil hutan yang cukup banyak di antaranya ialah produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu kapis dan verner dengan jumlah produksi yang berbeda-beda setiap jenisnya. Produksi kayu bulat dan kayu gergajian dalam pada periode 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Selain itu, produksi kayu dan verner mengalami peningkatan jumlah produksi hingga di tahun 2020.

Tabel 019
Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua
Tahun 2016-2020 (m3)

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Verner
2016	525.314	112.064	238.624	9.450
2017	439.120	109.854	217.145	-
2018	474.279	106.268	206.580	-
2019	456.631	126.163	199.680	-
2020	463.470	140.674	149.461	65.928

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (data diolah, 2021)

2.1.2.2 Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Luas Areal Pertambangan

Luas lahan pertambangan secara keseluruhan tercatat adalah sebesar 3,35 juta ha yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penambangan liar. Luas areal pertambangan di Provinsi Papua didominasi oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat pesat. Tercatat 96,99% dari luas areal pertambangan merupakan areal yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, kemudian 2,99% adalah areal eksploitasi, dan 0,02% adalah penambangan liar.

Gambar 007
Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan Provinsi Papua (ha)



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

b. Potensi Sumber Daya Mineral

Jumlah sumberdaya berubara yang terdata di Provinsi Papua pada tahun 2016 mencapai 9,36 juta ton meningkat menjadi 38,56 juta ton. Sedangkan, jumlah cadangan batubara sampai dengan tahun 2020 mencapai 950 ribu ton.

Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya daerah yang ditemukan potensi sumber daya batubara di wilayah Papua. Perlu adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk mengeksplorasi sumber daya batu bara yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Selanjutnya, jumlah cadangan biji dan logam tembaga dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Tercatat potensi sumber daya tembaga mencapai 9,06 miliar bijih ton tembaga dengan cadangan sebesar 2,36 miliar bijih ton tembaga pada tahun 2016, kemudian angka tersebut menurun di tahun 2020 sebesar 3,37 miliar bijih ton tembaga dengan cadangan sebesar 1,81 miliar ton bijih tembaga. Begitupun dengan cadangan logam tembaga pada tahun 2016 adalah sebesar 23,44 juta ton, turun menjadi 19,52 juta ton. Hal yang sama juga terjadi pada sumber daya tembaga yang juga mengalami penurunan setiap tahunnya.

Selanjutnya, hal yang sama juga terjadi sumber daya dan cadangan emas primer yang terus mengalami penurunan hingga lima tahun terakhir. tercatat potensi sumber daya biji emas yang terdapat di Papua adalah sebesar 5,20 miliar bijih ton dengan cadangan 2,36 miliar bijih ton. Kondisi ini terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 3,37 miliar bijih ton sumber daya yang tersedia dengan cadangan mencapai 1,81 miliar bijih ton. Selanjutnya, potensi sumber daya nikel di Provinsi Papua tahun 2016-2020 cenderung juga mengalami penurunan. Tercatat sumber daya nikel tahun 2020 adalah sebesar 358 juta ton dengan cadangan mencapai 3,34 juta ton bijih nikel.

c. Ketersediaan Penerangan

Persentase rumah tangga di Provinsi Papua yang telah menggunakan listrik (PLN dan non PLN) terlihat fluktuatif dan cenderung menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN baru mencapai 50,9% kemudian turun menjadi 43,14% pada tahun 2020. Dari data BPS terlihat rumah tangga menurut sumber penerangan yang paling rendah pada tahun 2020 tersebar paling banyak pada wilayah adat La Pago diantaranya ialah Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya dan Mamberamo Tengah. sedangkan pada daerah lain seperti Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Mappi, dan Asmat juga masuk dalam kategori sangat rendah.

2.1.2.3 Hotel dan Pariwisata

Potensi pariwisata di Provinsi Papua sangat beragam jenisnya yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Objek wisata di Papua terbagi atas dua kelompok, yaitu wisata alam dan wisata buatan. Tercatat objek wisata alam di Provinsi Papua terdiri dari 6 objek, wisata budaya sebanyak 1 objek, dan objek wisata buatan sebanyak 4 objek. Tercatat pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan jumlah tamu baik WNA dan WNI sangat pesat yaitu sebesar 64,73 persen, kemudian menurun pada tahun 2020 cukup signifikan. Sampai dengan tahun 2020 jumlah tamu adalah sebanyak 550.392 orang. Dikeluarkannya berbagai kebijakan pencegahan pandemik Covid-19 yang berdampak terhadap penyelenggaraan transportasi udara dan laut menyebabkan banyak masyarakat yang enggan untuk bepergian menggunakan kapal laut dan pesawat udara. Kondisi ini akhirnya menyebabkan jumlah perjalanan wisatawan ke/dari Provinsi Papua turun dengan sangat drastis, yaitu dari 4.551.276 orang pada tahun 2019 menjadi 550.329 orang di tahun 2020, atau turun -87,91%. Sudah tentu dengan berkurangnya jumlah wisatawan mengakibatkan jumlah dan lama menginap para tamu hotel yang ada juga ikut menurun di tahun 2020. Secara keseluruhan rata-rata lama menginap tamu hotel paling lama 2 hari.

Papua merupakan tujuan wisata dengan potensi pariwisata yang hampir terlengkap di Indonesia, berupa alam (flora dan fauna) yang masih asli, budaya yang khas dan unik, serta wisata bahari yang tak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia. Besarnya potensi pariwisata yang dimiliki Papua mengharuskan pembangunan pariwisata perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terpadu tentang pariwisata, diantaranya dengan meningkatkan penyediaan kamar hotel maupun penginapan/akomodasi lainnya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran atas kamar/akomodasi tersebut.

Pada tahun 2020, jumlah hotel di Provinsi Papua ada sebanyak 259 unit, dimana jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun 2019 (265 unit). Kondisi ini mengakibatkan penurunan jumlah kamar dan tempat tidur, dimana pada tahun 2020 ada sebanyak 7.015 kamar dan 10.335 tempat tidur. Sedangkan, dibandingkan dengan tahun 2019 yang secara kumulatif tercatat ada sebanyak 7.389 kamar dan 10.486 tempat tidur.

Secara rata-rata selama tahun 2020 tamu asing menginap selama 2,72 hari sedangkan tamu domestik menginap selama 1,52 hari. Sedangkan Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya di Provinsi Papua untuk hotel berbintang sebesar 30,68 persen dan untuk hotel nonbintang sebesar 17,39 persen.

Perkembangan hotel bintang dan non bintang di Provinsi Papua mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 33 unit meningkat menjadi 43 unit, begitu pula dengan hotel non bintang yang dimana pada tahun 2016 sebanyak 200 unit meningkat menjadi 234 unit di tahun 2021.

2.1.2.4 Transportasi dan Komunikasi

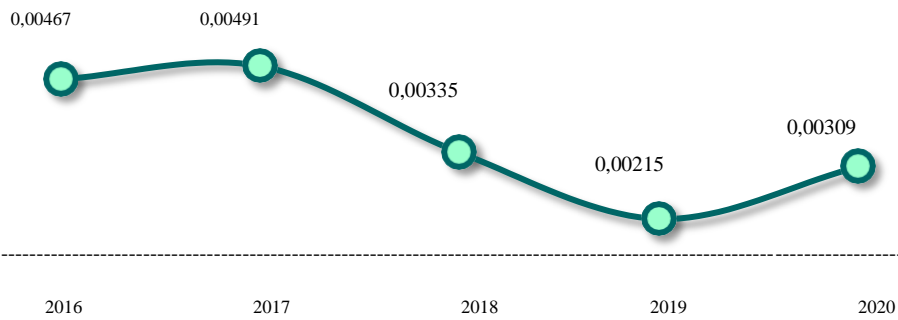
a. Transportasi

1. Transportasi Darat

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 rata-rata perbandingan panjang jalan dengan kendaraan bermotor adalah 1 km/467 unit kendaraan, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2020 sebesar 1 km/309 unit kendaraan bermotor. Dalam pelayanan transportasi darat di Provinsi Papua, terdapat 5 terminal tipe C, yaitu:

- a. Entrop di Kota Jayapura;
- b. Wamena di Kabupaten Jayawijaya;
- c. Oyehe di Kabupaten Paniai;
- d. Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- e. Biak di Kabupaten Biak Numfor.
- f.

Gambar 008
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)

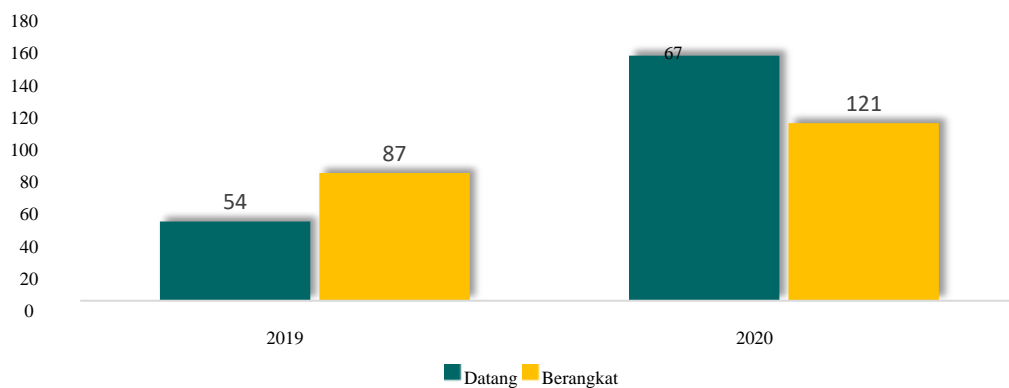


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

1. Transportasi Udara

Jumlah penumpang internasional berdasarkan moda transportasi pesawat terbang di Provinsi Papua mengalami lonjakan dari tahun 2019 sebanyak 54 penumpang meningkat di tahun 2020 menjadi 167 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 87 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 121 penumpang yang berangkat.

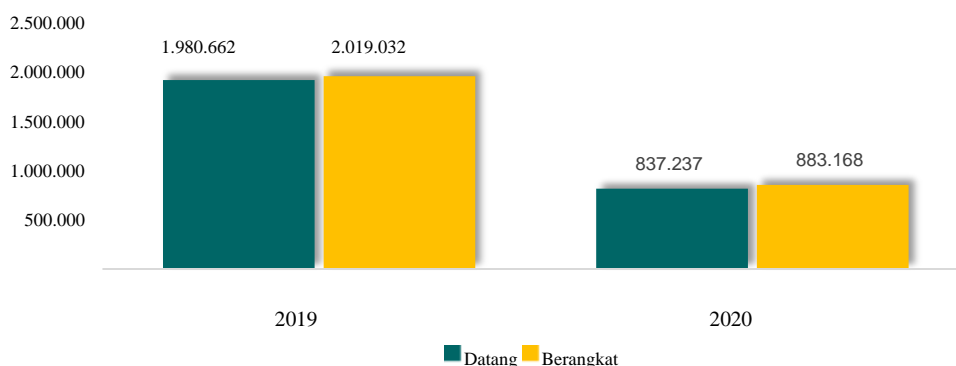
Gambar 009
Jumlah Penumpang Internasional berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (Orang)



Sumber: BPS RI, 2022

Berbeda dengan jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi pesawat terbang di Provinsi Papua yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 1.980,66 penumpang turun di tahun 2020 menjadi 837,23 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 2.019,03 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 883,16 penumpang yang berangkat.

Gambar 010
Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (Orang)



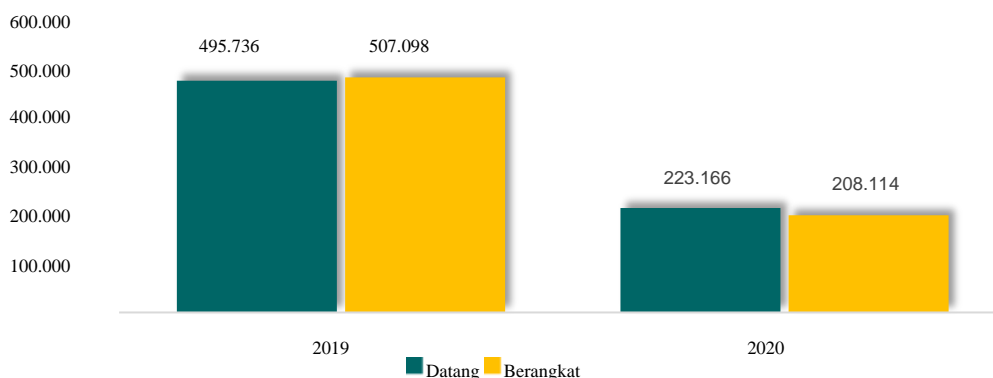
Sumber: BPS RI, 2022

2. Transportasi Laut

Jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi kapal di Provinsi Papua mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 495,73 penumpang turun di tahun 2020 menjadi 223,16

penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 503,09 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 208,114 penumpang yang berangkat menggunakan kapal laut.

Gambar 011
Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Kapal (Orang)



Sumber: BPS RI, 2022

b. Pos dan Telekomunikasi

Pos dan telekomunikasi merupakan beberapa cara yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Ketersediaan akses terhadap internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat digambarkan pada periode 2017-2021 tercatat pengguna internet dan HP mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Persentase penduduk yang dapat mengakses HP tahun 2017 adalah sebesar 36,31%, kemudian meningkat menjadi 38,94% sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan kebutuhan akan telekomunikasi cukup tinggi di Papua.

Sementara persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon seluler juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 50,37% meningkat di tahun 2021 menjadi 55,59%.

Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki menara BTS menurut penerimaan sinyal telepon Seluler cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 657 desa yang memiliki sinyal kuat, mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 593 desa.

Selanjutnya banyaknya desa/kelurahan yang memiliki menara *Base Transceiver Station* (BTS) di desa mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 sebanyak 356 desa yang memiliki BTS mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 609 desa yang memiliki BTS. Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 270 desa meningkat menjadi 363 desa di tahun 2021.

Persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai komputer di Provinsi Papua mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 12,87% turun menjadi 9,61% di tahun 2021.

Jumlah keluarga yang berlangganan telepon tetap kabel di Provinsi Papua mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebanyak 16,300 keluarga turun menjadi 5.164 keluarga yang berlangganan telepon kabel. Hal tersebut terjadi diakibatkan adanya peralihan penggunaan telepon kabel ke telepon seluler. Rata-rata konsumsi rumah tangga yang memiliki pengeluaran telekomunikasi di Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 5,4 juta rupiah meningkat menjadi 6,04 juta rupiah per tahun. Persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran telekomunikasi di Provinsi Papua mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2017 sebanyak 53,29% meningkat menjadi 53,54% di tahun 2021.

Perkembangan kantor pos di Provinsi Papua mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018-2019 sebanyak 79 unit meningkat menjadi 80 unit, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 61 unit.

2.1.2.5 Posisi Geografis Papua

Provinsi Papua adalah provinsi di ujung timur Indonesia yang secara geografis terletak pada $2^{\circ} 25' - 90^{\circ}$ Lintang Selatan dan $13000^{\circ} - 14100^{\circ}$ Bujur Timur dengan luas 319.036,05 km². Provinsi Papua berbatasan dengan Samudera Pasifik di bagian utara dan Laut Arafuru di bagian selatan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat serta sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, yang secara administratif Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan satu kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merilis data luas wilayah Provinsi Papua. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota yang terbagi menjadi 576 distrik dan 5.560 kampung. Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Papua yang menempati 44.071,00 km². Selain itu, Kabupaten Merauke juga menjadi kabupaten dengan jarak terjauh dari ibukota Provinsi Papua yang berjarak sejauh 662 km.

Sebaliknya, Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil di Provinsi Papua dengan luas 537,39 km², Kota Jayapura yang merupakan ibu kota Provinsi Papua memiliki luas wilayah sebesar 935,92 km², atau menempati 0,29 persen Wilayah Provinsi Papua.

2.1.2.6 Keragaman Etnis dan Kebudayaan yang Khas dan Unik

Penduduk asli di Provinsi ini tersebar ke dalam kelompok-kelompok bahasa yang jumlahnya lebih dari 250. Masing-masing suku tersebut memiliki keunikannya sendiri-sendiri yang merupakan ciri dari kekayaan kebudayaan Melanesia. *Tribal arts* Provinsi Papua, misalnya, sebagaimana yang ditunjukkan dari karya seniman-seniman tradisional Asmat, Kamoro, Teluk Cenderawasih, Pegunungan Tengah, Sentani dan lain-lain yang semuanya ini merupakan potensi yang luar biasa. Apalagi bila keragaman suku yang tersebar di berbagai ekosistem itu dipandang sebagai sumber berbagai kearifan lokal untuk meningkatkan mutu kemanusiaan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Kecenderungan di dunia belakangan ini menunjukkan, bahwa akibat berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh apa yang dikenal dengan "cara hidup modern" itu, maka kearifan lokal, atau bahkan sistem pengetahuan asli (sebagaimana yang dimiliki oleh suku-suku asli Papua) merupakan kekuatan yang tidak ternilai harganya apabila berhasil disistematisasi agar dapat digunakan secara lebih meluas.

2.1.2.7 Keragaman Hayati Flora dan Fauna yang Kaya

Keragaman hayati flora dan fauna yang kaya bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu yang terkaya di dunia. Provinsi Papua memiliki ribuan spesies flora dan fauna endemik, yang artinya bahwa spesies-spesies itu hanya dapat ditemukan di Papua. Hingga saat ini masih belum diketahui dengan pasti berapa sebenarnya jumlah spesies flora dan fauna Papua, karena setiap tahun sejumlah spesies baru terus ditemukan oleh para ahli biologi. Pada tahun 2005 saja, dilaporkan bahwa lebih dari 100 spesies baru ditemukan.

2.1.2.8 Iklim

Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman. Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata di hampir seluruh wilayah di Provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi. Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten

Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya. Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya. Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pegunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C.

Kelembaban udara rata-rata yaitu 78-85% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi Papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs. Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan butiran es sehingga menimbulkan hujan es.

2.1.3 Pertumbuhan PDRB

2.1.3.1 PDRB Menurut Penggunaan

Pertumbuhan Riil Ekonomi Papua Selama Triwulan I - III 2022 berdasar publikasi resmi yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Papua, menunjukkan ekonomi Papua triwulan III-2022 dibanding triwulan III-2021 tumbuh sebesar 5,78 persen (y-o-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri sebesar 33,08 persen, diikuti oleh Komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 9,29 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 6,38 persen, Komponen Pengeluaran dan Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (PK- LNPRT) sebesar 1,23 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi yaitu sebesar 7,71 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa Luar Negeri yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluarantumbuh sebesar 1,18 persen. Selengkapnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 020
Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua
Pada Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2022

Komponen Pengeluaran	2022				
	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Tahunan
1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,71	6,54	6,38	-	-
2.Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,09	7,49	1,23	-	-
3.Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,60	4,85	9,29	-	-
4.Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,40	4,04	-7,71	-	-
5.Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	-	-
6.Ekspor Luar Negeri	102,55	56,65	33,08	-	-
7.Impor Luar Negeri	54,52	21,59	1,18	-	-
8.Net Ekspor Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	-	-
PDRB Papua	13,30	14,38	5,78	-	-

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Lebih jauh mengikuti kalkulasi dari BPS Papua, bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2022 (y-on-y), komponen yang memberikan sumber pertumbuhan positif tertinggi adalah Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri sebesar 8,64 persen. Sumber pertumbuhan positif tertinggi kedua adalah komponen PK-RT sebesar 2,45 persen, diikuti oleh komponen PK-P dengan sumbangan pertumbuhan sebesar 1,57 persen dan komponen PK-LNPRT yang memberi sumbangan sebesar 0,02 persen. Komponen PMTB yang tumbuh negatif dan Komponen Lainnya masing-masing menjadi sumber penurunan pertumbuhan sebesar 3,00 persen dan 3,90 persen.

2.1.3.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, menurut publikasi dari BPS Papua, dengan mulai pulihnya perekonomian dibandingkan triwulan III-2021 yang menurun akibat adanya COVID-19 menyebabkan terjadi peningkatan pada seluruh kategorilapangan usaha sebagaimana tabel berikut.

Tabel 021
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Harga Konstan Provinsi Papua
Pada Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2022

Lapangan Usaha	2022				
	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,10	0,34	3,31	-	-
B. Pertambangan dan Penggalian	25,57	29,92	8,50	-	-
C. Industri Pengolahan	-3,09	0,08	-2,00	-	-
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,53	6,70	7,09	-	-
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,55	7,04	4,76	-	-
F. Konstruksi	13,08	3,30	0,52	-	-
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,55	6,37	2,38	-	-
H. Transportasi dan Pergudangan	17,88	21,78	22,95	-	-
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,84	6,81	5,83	-	-
J. Informasi dan Komunikasi	3,59	13,46	6,25	-	-
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,38	1,84	2,02	-	-
L. Real Estate	7,97	7,29	4,18	-	-
M. Jasa Perusahaan	3,85	9,77	0,08	-	-
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,03	0,53	6,32	-	-
O. Jasa Pendidikan	-0,97	4,50	3,81	-	-
R. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,66	0,66	-1,29	-	-
S. Jasa lainnya	4,83	6,83	2,42	-	-
PDRB Papua	13,30	14,38	5,78	-	-

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,95 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya penumpang berangkat, barang muat, dan jasa pengiriman barang baik darat, laut, maupun udara dibandingkan triwulan III-2021 sebagai akibat sudah dibukanya semua akses transportasi pada triwulan ini. Selain Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi lainnya yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,50 persen dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,09 persen.

Selanjutnya, bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan III-2022 (y-on-y) menurut catatan BPS Papua masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian yang memberikan sumber pertumbuhan terbesar yaitu 3,51 persen disusul lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,67 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,52 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,34 persen; Informasi dan komunikasi 0,24 persen; selain 5 lapangan usaha tersebut memiliki sumber pertumbuhan 0,50 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi Papua jika dikalkulasi tanpa menyertakan sektor pertambangan dan penggalian, berdasarkan catatan BPS Papua dapat tumbuh sekitar 3,88 persen di triwulan III-2022 dibandingkan triwulan III-2021 (y-on-y). Disini lapangan usaha Konstruksi terlihat memberikan kontribusi tertinggi sebesar 21,87 persen. Menyusul kemudian Perdagangan Besar Eceran, Reprasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,85 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,43 persen.

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga berupa makanan dan non makanan per kapita/perbulan cenderung meningkat sampai tahun 2021. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga juga diikuti dengan bertambahnya jumlah rumah tangga. Rata-rata pengeluaran konsumsi Provinsi Papua adalah sebesar Rp1.368 juta pertahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga lebih besar dikeluarkan untuk kebutuhan makanan dibandingkan non makanan. Sampai dengan tahun 2021 pengeluaran rumah tangga rata-rata per kapita/bulan untuk makanan adalah sebesar Rp793 ribu, dan non makanan sebesar Rp576 ribu.

Tabel 022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	%
Total pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan per kapita/bulan	1,079,861	1,124,696	1,459,494	1,309,714	1,368,379	
Pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan per kapita/bulan	638,354	623,987	774,064	723,821	792,781	57.94
Pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan per kapita/bulan	441,507	500,709	68,543	585,893	575,598	42.06

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan terbesar adalah umbi-umbian, kemudian sayur-sayuran, dan makanan serta minuman jadi. Sedangkan konsumsi paling rendah untuk makanan yaitu kacang-kacangan, buah, dan minyak kelapa. Pada pengeluaran konsumsi non makanan paling besar dikeluarkan untuk keperluan perumahan dan fasilitas umum rumah tangga, dan yang paling rendah yaitu untuk keperluan pesta dan upacara.

2.1.4 Keuangan dan Harga

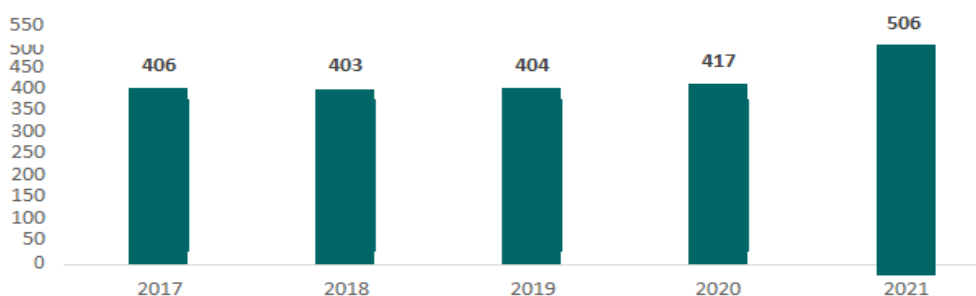
2.1.4.1 Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2021 jumlah penerimaan Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp13.885.923.486.851,29, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.139.689.476.134,17, Dana Perimbangan/Tansfer Pemerintah Pusat sebesar Rp11.735.255.394.924,00, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp10.978.615.793,12,00, sedangkan pengeluaran pemerintah sebesar Rp14.859.606.462.835,80. Untuk komponen belanja sebagian besar dihabiskan untuk belanja operasi sebesar Rp10.758.813.679.926,08, bantuan keuangan/transfer yang mencapai hingga Rp2.865.298.574.494,00 dan sisanya untuk belanja Modal dan Bagi Hasil ke kabupaten/kota.

2.1.4.2 Perbankan

Ketersediaan lembaga intermediasi keuangan atau bank di Papua jumlahnya semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di Provinsi Papua, ini juga mendorong adanya peran bank dalam aktivitas perekonomian tersebut. Ketersediaan lembaga keuangan bank di Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi terutama pada tahun 2021.

Gambar 012
Ketersedian Bank Provinsi Papua Tahun 2017-2021



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Ketersediaan dana perbankan dalam upaya meningkatkan daya saing investasi regional sangat dibutuhkan. Oleh karena, itu kinerja perbankan di suatu daerah perlu dijaga dan ditingkatkan agar tidak kolaps (jatuh). Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam buku statistic perbankan tahun 2021, penghimpunan dana pihak ke tiga (DPK) sampai dengan bulan Desember tahun 2021 tercatat sebesar Rp47,68 triliun.

Tabel 023
Komposisi. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga wilayah Provinsi Papua

KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA	SATUAN	BANK UMUM	BANK BPR
Deposito (Time Deposits)	Rp Miliar	8.599,97	620,21
Total DPK (Total Third Party Funds)	Rp Miliar	46.861,55	813,99
Pangsa Terhadap Total DPK (%) (Portion to Total Third Party %)	%	0,6420	0,0070

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2022 (data diolah)

Selanjutnya, berdasarkan jenis penggunaannya kredit pada bank wilayah Papua diperuntukan untuk konsumsi yaitu mencapai Rp17,39 triliun. Berdasarkan hal tersebut orientasi untuk melakukan kredit masih tergolong belum produktif di Papua, sedangkan pada penggunaan modal usaha dan investasi tergolong cukup rendah. Untuk kredit pada jenis lapangan usaha paling tinggi yaitu pada sektor perdagangan dan eceran mencapai Rp7,5 triliun. Sedangkan pada sektor potensial di Papua seperti sektor pertanian masih tergolong cukup rendah.

Tabel 024
Penyaluran Kredit menurut jenis penggunaan, lapangan usaha, dan bukan lapangan usaha di Provinsi Papua Tahun 2021

Uraian	Lapangan Usaha/Bukan Lapangan Usaha	Rp Miliar	%
Jenis Penggunaan	Modal Kerja (Working Capital)	10.357,33	15,96
	Investasi (Investment)	4.694,40	7,23
	Konsumsi (Consumption)	17.391,46	26,80
	Ekspor	1.714,79	2,64
	Impor	295,61	0,46
	Lainnya	30.432,80	46,90
	Lapangan Usaha	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	1.302,28
Perikanan		142,23	0,44
Pertambangan dan Penggalian		12,67	0,04
Industri Pengolahan		423,05	1,30
Listrik, gas dan air		105,41	0,32
Konstruksi		2.159,40	6,66
Perdagangan Besar dan Eceran		7.499,19	23,11
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum		979,55	3,02
Transportasi, pergudangan dan komunikasi		784,81	2,42
Perantara Keuangan		52,67	0,16
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan		506,34	1,56
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		478,40	1,47
Jasa Pendidikan		1,71	0,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		49,80	0,15
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya		516,72	1,59
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga		37,17	0,11
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya		-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya		0,30	0,00
Bukan Lapangan Usaha		Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	3.379,69
	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	41,83	0,13
	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	231,77	0,71
	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	95,84	0,30
	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	13.126,42	40,46
	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	515,91	1,59

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2022 (data diolah)

Kebutuhan akan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor untuk melakukan aktivitas pinjaman pada bank di wilayah Papua. Sampai dengan tahun 2021, tercatat aktivitas kredit paling tinggi pada bank yaitu untuk keperluan tempat rumah tangga seperti peralatan rumah tangga dan pemilikan rumah tinggal.

Selanjutnya, tercatat pinjaman UMKM dan MKM pada bank umum dan BPR di Provinsi Papua terlihat semakin meningkat. Tercatat pinjaman UMKM dan MKM pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 10 triliun kemudian naik menjadi Rp 11 triliun pada tahun 2021. Sama halnya dengan pinjaman umum baik pada bank umum maupun BPR juga terlihat meningkat setiap tahunnya.

Tabel 025
Penyaluran Kredit UMKM dan MKM di Provinsi Papua Tahun 2021

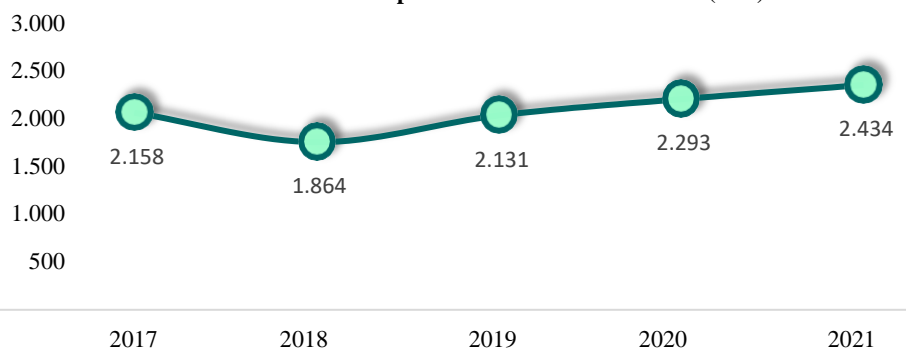
Tahun	Bulan	Bank Umum(Rp Miliar)	Bank BPR (Rp Miliar)	Kredit UMKM & MKM (Rp Miliar)
2018		27.582,88	1.047,54	10.313,00
2019		30.197,59	1.130,36	10.455,00
2021	Januari	30.804,64	1.253,65	9.953,00
	Februari	31.016,06	1.265,27	10.014,00
	Maret	31.297,06	1.289,98	10.080,00
	April	31.360,53	1.291,56	10.094,00
	Mei	31.344,34	1.291,69	10.039,00
	Juni	31.636,45	1.299,56	10.221,00
	Juli	31.419,14	1.313,63	10.066,00
	Agustus	31.490,04	1.321,13	10.139,00
	September	31.750,67	1.331,40	9.907,00
	Oktober	31.943,38	1.342,98	10.206,00
	November	32.206,77	1.351,33	10.307,00
	Desember	32.443,19	1.353,50	11.306,00

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2022 (data diolah)

2.1.4.3 Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Berdasarkan data statistik koperasi yang diperoleh di Provinsi Papua tercatat sampai dengan tahun 2021 koperasi yang aktif adalah berjumlah 2.434 unit koperasi. Tercatat kopeasi aktif tahun 2017 adalah sebesar 2.158 unit koperasi, kemudian terjadi peningkatan terus menerus hingga tahun 2021. Adanyapeningkatan jumlah koperasi aktif ini juga sangat dipengaruhi oleh Administrasi koperasi yang cukup tertata dengan baik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kinerja koperasi di Provinsi Papua adalah faktor modal, kemudian kapasitas SDM koperasi yang sudah cukup memadai. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi manajemen koperasi dapat berjalan optimal.

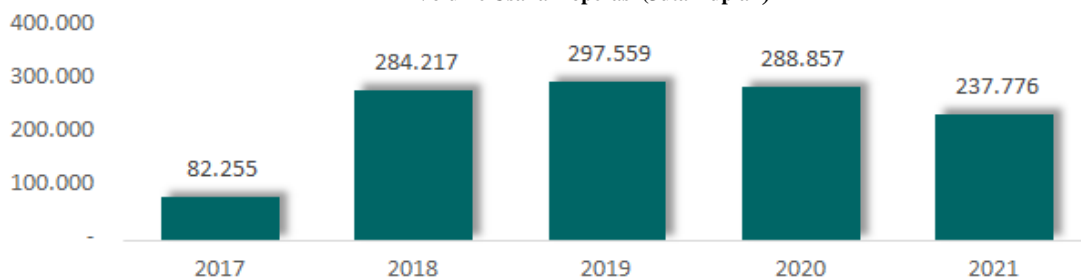
Gambar 013
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2017-2021 (unit)



Sumber: BPS RI, 2022

Selanjutnya, jumlah usaha dalam bentuk koperasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah usaha berbadan koperasi Provinsi Papua tahun 2017 adalah sebanyak Rp82 miliar, kemudian meningkat cukup tinggi sampai tahun 2020 adalah sebanyak Rp288 miliar. Selanjutnya mengalami penurunan menjadi Rp237 miliar di tahun 2021,

Gambar 014
Volume Usaha Koperasi (Juta Rupiah)



Sumber: BPS RI, 2022

2.1.4.4. Penanaman Modal

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Provinsi Papua masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sepanjang tahun 2017-2021 jumlah investor PMA di Provinsi Papua mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2021 jumlah investor PMA adalah sebanyak 95 proyek. Selain itu, realisasi investasi PMA dinilai sangat tinggi. Realisasi investasi PMA adalah sebesar 1,49 miliar US\$.

Tabel 026
Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Tahun 2017-2021 (Unit) (Juta US\$)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Juta US\$)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	135	102	127	184	95	1.924	1.132	941	568	1.489
Indonesia	26.257	21.972	30.354	56.726	27.271	32.240	29.308	28.209	28.666	31.093

Sumber: BPS RI, 2022

Selanjutnya realisasi penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dimana sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.218 unit proyek dengan nilai investasi mencapai Rp911 miliar.

Tabel 027
Realisasi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri Tahun 2017-2021 (Unit) (Milyar Rupiah)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (juta Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	33	23	68	323	473	1.218	105	568	2.722,2	911
Indonesia	8.838	10.815	30.451	96.623	106.002	262.351	328.605	386.498	413.536	447.064

Sumber: BPS RI, 2022

2.1.4.5. Inflasi

Inflasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, juga terkait erat dengan produktivitas ekonomi, serta parameter ekonomi lainnya.

Tabel 028
Perkembangan Inflasi Provinsi Papua

Inflasi (%yoy)	2018				2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nasional	3,40	3,12	2,88	3,13	2,48	3,28	3,39	2,72	2,96	1,96	1,42	1,45
Papua	3,16	4,09	5,31	6,36	2,58	2,79	2,69	0,66	1,21	1,03	1,93	1,65
Jayapura	4,18	4,42	5,63	6,70	2,98	3,00	2,63	0,59	0,28	0,14	1,38	0,60
Merauke	0,44	3,22	4,43	5,42	2,13	1,44	2,44	1,06	-0,20	1,94	1,48	1,45
Timika	n/a	n/a	n/a	n/a	1,98	3,30	3,10	0,53	-0,13	2,48	3,54	4,23

Sumber data: BPS, 2021 (diolah)

Inflasi Provinsi Papua selama triwulan III tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh tingginya inflasi pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, serta sandang. Terkait

terbatasnya pasokan daging sapi menjadi pemicu relatif lebih tingginya inflasi pada triwulan laporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan harga emas global pada triwulan III tahun 2019 ikut memengaruhi dinamika harga emas perhiasan di Provinsi Papua. Dengan dinamika perkembangan harga pada triwulan III Tahun 2019, Provinsi Papua mencatat inflasi sebesar 3,72 persen (yoy). Sampai dengan akhir Desember 2019 inflasi di perkirakan sebesar 3,4 persen (yoy) meningkat dari inflasi 2018 sebesar 3,27 persen (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan III Tahun 2019 bersumber dari kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Tekanan inflasi Papua pada triwulan IV 2020 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2020. Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2020 diperkirakan didorong oleh penurunan persediaan makanan dari dalam Papua akibat berakhirnya musim panen. Selain itu, faktor curah hujan dan gelombang tinggi yang meningkat pada triwulan IV 2020 baik di wilayah utara maupun selatan Papua memberikan tekanan produksi pertanian sertapenangkapan ikan oleh nelayan.

Tekanan peningkatan permintaan menjelang libur akhir tahun dan hari besar keagamaan nasional perayaan Natal dan Tahun Baru dapat mendorong peningkatan inflasi pada triwulan IV 2020. Mengingat liburan akhir tahun 2020 lebih panjang dibandingkan dengan akhir tahun 2019 karena penundaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri menjadi di akhir Desember 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020, 03 Tahun 2020, libur akhir tahun 2020 ditetapkan pada 24 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

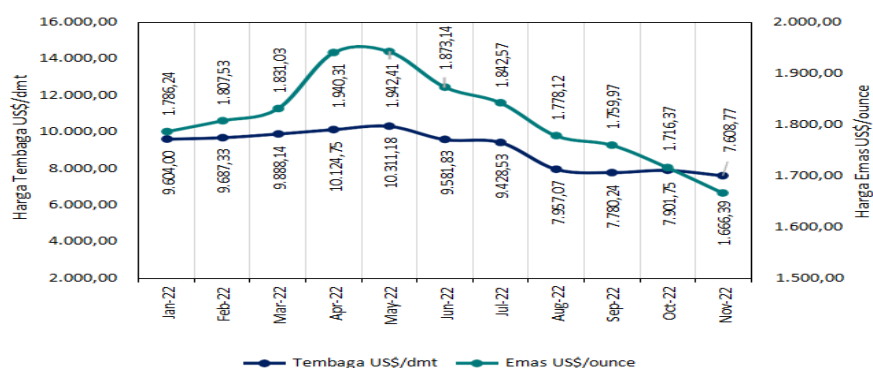
Relaksasi pembatasan perjalanan dapat mendorong momentum libur panjang akhir tahun untuk dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan ke/dari/intra Papua. Dengan demikian, peningkatan permintaan pada kelompok transportasi, khususnya komoditas angkutan udara, dapat mendorong tekanan inflasi pada komoditas angkutan udara di triwulan IV 2020.

Pada triwulan IV 2020 tepatnya bulan Desember, terdapat agenda besar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di 11 kabupaten di Provinsi Papua. Berdasarkan pengalaman sebelumnya di beberapa daerah, Pilkada dapat mendorong belanja dan meningkatkan inflasi.

2.1.5 Ekspor Impor Nonmigas Dan Migas

Jika diperhatikan dari sisi pengeluaran, peranan ekspor sangat dominan terhadap PDRB Papua selama periode Triwulan I-2022 hingga Triwulan III-2022, dimana bila dianalisis lebih jauh komoditi utama ekspor yang menjadi andalan Papua adalah dari pertambangan non migas, yang juga tampak mendominasi struktur PDRB Papua menurut lapangan usaha. Sehingga besar kecilnya ekspor pertambangan non migas sangat mempengaruhi variasi naik turunnya pertumbuhan ekonomi Papua baik itu dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha.

Gambar 015
Harga Acuan Ekspor Tembaga Dan Emas Selama Tahun 2022



Sumber : Ditjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022 (data diolah)

Selama ini terdapat 2 (dua) komoditi pertambangan non migas yang menjadi unggulan ekspor Papua yaitu bijih tembaga dan emas. Dari perkembangan net ekspor yang dipublikasikan Bank Indonesia, terlihat ada penurunan pada triwulan II-2022, yaitu penurunan pertumbuhan surplus netekspor sebesar 53,92% (y.o.y), yang disebabkan melambatnya pertumbuhan ekspor komoditi tambang sebesar 58,92% (y.o.y) akibat penurunan harga tembaga dan emas dunia mulai dari Juni sampai dengan November 2022 seperti terlihat pada **Gambar 015**.

Dengan memperhatikan kecenderungan harga acuan tembaga dan emas di bulan November 2022 tersebut, maka diakhir tahun ini sudah tidak mungkin lagi untuk menargetkan nilai ekspor Papua akan meningkat seperti tahun 2021 (sebesar 105,41% dari tahun 2020). Angka pertumbuhan nilai ekspor yang cukup moderat untuk PDRB Papua 2022 adalah 24% dari tahun 2021.

Selanjutnya untuk konsumsi rumah tangga, walaupun di masa pemulihan ekonomi lazimnya dapat tumbuh sangat cepat, namun karena di akhir tahun 2022 terdapat tekanan dari naiknya harga BBM menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Papua tahun 2022 ini diperkirakan hanya 3,5% dari tahun 2021. Begitu juga dengan investasi yang direprenstasikan oleh PMTB (Pertambahan Modal Tetap Bruto) akan terganggu dengan adanya kenaikan BBM yang membebani biaya produksi, sehingga secara moderat dimungkinkan PMTB akan meningkat sebesar 6,5% dari tahun 2021. Sementara untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, meskipun telah diresmikan beberapa DOB (Daerah Otonom Baru) yang dimekarkan dari provinsi induk Papua di tahun 2022 yaitu : Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah, namun hal tersebut belum berdampak signifikan terhadap target pengeluaran konsumsi pemerintah Papua di tahun 2022 ini, sehingga pada komposisi PDRB Papua diperkirakan tetapakan terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 3% dari tahun 2021. Adapun untuk komponen-komponen PDRB Pengeluaran lainnya ditargetkan dapat naik dalam kisaran 2 - 4%.

Berdasarkan perkiraan pertumbuhan seluruh komponen PDRB Menurut Pengeluaran di atas, maka ditargetkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua (PDRB Dengan Tambang) di tahun 2022 kurang lebih sebesar 8,70% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang diperkirakan lebih lambat dibandingkan tahun 2021 dimana ekonomi Papua tumbuh sebesar 15,11%. Beberapa faktor yang menyebabkan pelambatan ini sudah disampaikan di atas, antara lain penurunan harga acuan ekspor bijih tembaga dan emas, dan kenaikan BBM.

Adapun untuk pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang di tahun 2022, penetapan targetnya dilakukan dengan memperkirakan kenaikan seluruh lapangan usaha yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang kembali ke basisnya dengan peningkatannya diantara 3-6%, antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi, (2) pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang kembali normal selesai pelaksanaan PON Papua 2021, yaitu sektor Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, diperkirakan pertumbuhan ketiganya diantara 3-7% di tahun 2023; (3) pertumbuhan lapangan usaha yang terdampak kenaikan BBM, seperti sektor Industri Pengolahan; dan sektor Transportasi dan Pergudangan, diperkirakan pertumbuhannya sekitar 2-7%. Berdasarkan tiga pengelompokan pertumbuhan lapangan usaha ini, maka ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2022 jika tanpa memperhitungkan sektor pertambangan dan penggalian adalah sebesar 5,27%.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan otonomi daerah yang telah

digulirkan melalui Undang-Undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Papua dalam menetapkan yang berkaitan dengan Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan Daerah secara umum sebagai berikut:

2.2.1 **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pemerintah Provinsi Papua menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2022 pada bab sebelumnya, maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Pajak daerah dan retribusi daerah
 - a. Peningkatan kemudahan pembayaran pajak berbasis teknologi (ATM, android, *Payment Point*);
 - b. Peningkatan reward bagi masyarakat taat pajak dan penghapusan dendapajak berdasar tingkat tunggakan;
 - c. Peningkatan pendataan masyarakat wajib pajak dan sosialisasi padaperusahaan wajib pajak air permukaan;
 - d. Peningkatan pendataan potensi dan aset provinsi yang dapat menjadi obyekretribusi daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan OPD penghasil
 - f. Peningkatan akses pelayanan samsat, terutama di daerah pedalaman.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
 - b. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD
 - c. Identifikasi perusahaan potensial untuk investasi modal
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
3. Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah provinsi papua akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian dana hasil pajak dan bukan pajak termasuk perolehan Dana Alokasi Umum.

2.2.1.1 Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Pada Tahun 2022 Pendapatan APBD Provinsi Papua direncanakan sebesar Rp10.764.787.934.427,00 turun dari Tahun 2021 sebesar Rp1.931.533.161.573,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp2.152.707.624.061,00 turun dari Tahun 2021 sebesar Rp174.967.991.162,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp508.853.511.438,00 dari APBD Tahun 2021 menjadi Rp1.069.726.272.973,00;
- 2). Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp8.497.874.280,00 dari APBD Tahun 2021 menjadi Rp7.410.091.220,00;
- 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp727.164.951.746,00 dari APBD Tahun 2021 menjadi Rp766.767.946.987,00; dan
- 4). Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp34.845.574.866,00 dari APBD Tahun 2021 menjadi Rp308.803.312.881,00.

2. Pendapatan Tansfer

Pendapatan Transfer sebesar Rp8.612.080.310.366,00,00 terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Tabel 029
Estimasi Pendapatan Daerah Pada RAPBD Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2022
1	2		3
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.977.739.632.899	2.152.707.624.061
4.1.01	Pajak Daerah	1.578.579.784.411	1.069.726.272.973
4.1.02	Retribusi Daerah	15.907.965.500	7.410.091.220
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.602.995.241	766.767.946.987
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	314.448.887.747	308.803.312.881,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	12.696.321.096.000	8.612.080.310.366
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	12.696.321.096.000	8.612.080.310.366,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.500.000.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.500.000.000	
	Jumlah Pendapatan	14.675.560.728.899	10.764.787.934.427,00

2.2.1.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Papua tahun 2022, adalah:

1. intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
2. menyelenggarakan pelayanan prima melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;
3. melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah;
4. pemantapan kelembagaan sistem dan operasional pemungutan pendapatan daerah, Pengembangan kordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD penghasil, kabupaten/kota serta mitra kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat;
5. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi pendapatan yang optimal pada Pemerintah Daerah.
6. melakukan koordinasi yang lebih intens dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Dana Otonomi Khusus, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di samping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

7. peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
8. mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN) dan PPh pasal 21;
9. meningkatkan kordinasi yang lebih optimal dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI daerah pemilihan Papua dalam pelaksanaan dana perimbangan.

2.2.2 Belanja Daerah

2.2.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi, dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 dan Rencana Strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, menggunakan klasifikasi, kodefikasi subkegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun No 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.326.808.866.557,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp17.577.357.443.639,00 menjadi sebesar Rp12.250.548.577.082,00 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga.

Perkiraan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.250.548.577.082,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 9.729.837.877.802,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp3.063.415.619.287,00

- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.887.557.345.186,00
 - c. Belanja Hibah sebesar Rp1.725.059.365.734,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 53.805.547.595,00
2. Belanja Modal sebesar Rp2.192.435.355.168,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp 26.100.000.000,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp252.867.650.551,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.122.081.473.128,00
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp786.882.181.489,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.056.850.000,00
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp1.447.200.000,00
 3. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp659.960.672.645,00

Tabel 030
Proyeksi Belanja Daerah Pada APBD Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2022
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	13.073.312.621.594,00	9.729.837.877.802,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.199.558.014.598,00	3.063.415.619.287,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.945.963.577.466,00	4.887.557.345.186,00
5.1.03	Subsidi	250.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.788.949.620.088,00	1.725.059.365.734,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	138.591.409.442,00	53.805.547.595,00
5.2	BELANJA MODAL	1.428.870.777.370,00	2.192.435.355.168,00
5.2.01	Belanja Modal - Tanah	56.929.859.070,00	26.100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	232.819.490.142,00	252.867.650.551,00
5.2.03	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	935.580.906.346,00	1.122.081.473.128,00
5.2.04	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.539.121.812,00	786.882.181.489,00
5.2.06	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	4.001.400.000,00	3.056.850.000,00
5.2.07	Belanja Modal - Aset Lainnya		1.447.200.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00	328.275.344.112,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	150.000.000.000,00	328.275.344.112,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.925.174.044.675,00	659.960.672.645,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	866.955.064.748,00	659.960.672.645,00
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	2.058.218.979.927,00	
	JUMLAH BELANJA	17.577.357.443.639,00	12.250.548.577.082,00

2.2.2.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belasperseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan

kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);

6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
7. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

Sementara itu Pengelolaan Belanja Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 34 huruf e dimana penerimaan khusus besarnya setara 2,25% dimana alokasi belanjanya diarahkan sebagai berikut :

1. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk :
 - a. Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - b. Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga ada; dan
 - c. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditunjukkan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan besaran paling sedikit:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan ; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan

Sementara untuk Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus anggarannya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, perhubungan, energi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

Untuk Provinsi Papua Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang diterima Tahun Anggaran 2022, besaran adalah 1% Penerimaan yang bersifat umum, dan sebesar 1,25% Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja. Akibat dari pembagian presentasi tersebut diatas, maka penerimaan Provinsi menjadi berkurang sehingga kebijakan yang terkait dengan urusan bersama sudah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

2.2.2.4 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Untuk pos penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp449.448.024.775,00.

2.2.2.5 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Provinsi Papua menerapkan sistem penganggaran surplus/devisit pada Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (investasi) sebesar Rp100.000.000.000,00.

2.2.2.5 Strategi Pencapaian Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Strategi pencapaian kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

2.2.3. PERUBAHAN APBD

2.2.3.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dimungkinkan dilakukan perubahan APBD dikarenakan adanya perubahan asumsi-asumsi pada saat penyusunan APBD. Untuk melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk dibahas dan disetujui sebagai acuan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (RPPAS-P) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kebijakan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana anggaran program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.2.3.2 Tujuan Penyusunan KUA Perubahan

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, ini adalah:

1. Pembagian Perubahan Plafon Anggaran SKPD Berdasarkan Kemendesakan terhadap penanganan Isu Strategis Daerah;
2. Mengembangkan Skenario Prioritas daerah yang berbasis pada prioritas-prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Papua untuk memastikan pencapaian target **PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN**;
3. Menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran bagi seluruh pelaku pembangunan daerah dalam konteks penyusunan Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun 2022;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2022.

2.2.3.3 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022

Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 didasari adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun perubahan asumsi-asumsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.3.4 Rencana Perubahan Asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah

ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada Perubahan APBD, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.822.246.473.884,00 atau 20,38 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.942.541.460.543,00 menjadi sebesar Rp10.764.787.934.427,00 kenaikan ini berasal dari target pajak daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil. selanjutnya, terjadi penurunan pendapatan pada target Retribusi Daerah sebesar Rp24.451.110.221,00 atau 76,74 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022. Dan untuk Pendapatan Transfer pada pos pendapatan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Tambahan Infrastruktur tidak mengalami perubahan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan penjabaran pendapatan berikut ini :

Tabel 031
Pendapatan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.237.275.778.543,00	2.152.707.624.061,00	915.431.845.518,00	73,99
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.024.797.715.916,00	1.069.726.272.973,00	44.928.557.057,00	4,38
1.1.2	Retribusi Daerah	31.861.201.441,00	7.410.091.220,00	-24.451.110.221,00	-76,74
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.338.272,00	766.767.946.987,00	741.463.608.715,00	2930,18
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.312.522.914,00	308.803.312.881,00	153.490.789.967,00	98,83
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.705.265.682.000,00	8.612.080.310.366,00	906.814.628.366,00	11,77
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.705.265.682.000,00	8.612.080.310.366,00	906.814.628.366,00	11,77
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	3.071.553.835.000,00	4.006.709.334.956,00	935.155.499.956,00	30,45
	- DBH	756.633.768.000,00	1.691.789.267.956,00	935.155.499.956,00	123,59
	- DAU	2.314.920.067.000,00	2.314.920.067.000,00	0,00	0,00
	b. Dana Transfer Khusus	841.056.511.000,00	812.715.639.410,00	-28.340.871.590,00	-3,37
	- DAK Fisik	417.888.971.000,00	389.548.099.410,00	-28.340.871.590,00	-6,78
	- DAK Non Fisik	423.167.540.000,00	423.167.540.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	1.580.796.000.000,00	1.580.796.000.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	2.211.859.336.000,00	2.211.859.336.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	8.942.541.460.543,00	10.764.787.934.427,00	1.822.246.473.884,00	20,38

Rincian Pendapatan Daerah pada Perubahan Provinsi Papua Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah** mengalami kenaikan 73,99 persen atau kumulatif sebesar Rp915.431.845.518,00 dari semula sebesar Rp1.237.275.778.543,00 menjadi sebesar Rp2.152.707.624.061,00. Pendapatan Asli Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami kenaikan 4,38 persen atau sebesar Rp44.928.557.057,00 dari semula sebesar Rp1.024.797.715.916,00 menjadi sebesar Rp1.069.726.272.973,00;
 2. Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan 76,74 persen atau sebesar Rp24.451.110.221,00 dari semula sebesar Rp31.861.201.441,00 menjadi sebesar Rp7.410.091.220,00;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperkirakan mengalami kenaikan 2930,18 persen atau sebesar Rp741.463.608.715,00 dari semula sebesar Rp25.304.338.272,00 menjadi sebesar Rp766.767.946.987,00;
 4. Lain-Lain PAD Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan 98,83 persen atau sebesar Rp153.490.789.967,00 dari semula sebesar Rp155.312.522.914,00 menjadi sebesar Rp308.803.312.881,00.

c. **Pendapatan Transfer** mengalami kenaikan 11,77 persen atau kumulatif sebesar Rp906.814.628.366,00 dari semula sebesar Rp7.705.265.682.000,00 menjadi sebesar Rp8.612.080.310.366,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami kenaikan 123,59 persen atau sebesar Rp935.155.499.956,00 dari semula sebesar Rp756.633.768.000,00 menjadi sebesar Rp1.691.789.267.956,00;
2. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp2.314.920.067.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan 6,78 persen atau sebesar Rp28.340.871.590,00 dari semula sebesar Rp417.888.971.000,00 menjadi sebesar Rp389.548.099.410,00;
4. Dana Otonomi Khusus tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp1.580.796.000.000,00;
5. Dana Tambahan Infrastruktur tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp2.211.859.336.000,00.

2.2.3.5. Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan 174,59 persen atau sebesar Rp1.186.273.290.525,00 dari semula sebesar Rp979.448.024.775 menjadi sebesar Rp2.165.721.315.300,00 ;
2. Pengeluaran Pembiayaan berkurang 80 persen atau sebesar Rp80.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00;

Tabel 032
Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		APBD 2022	RAPBD-2022		
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	679.448.024.775,00	1.865.721.315.300,00	1.186.273.290.525,00	174,59
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	979.448.024.775,00	2.165.721.315.300,00	1.186.273.290.525,00	174,59
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(80.000.000.000,00)	(80,00)
	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(80.000.000.000,00)	(80,00)
	Pembiayaan Netto	879.448.024.775,00	2.145.721.315.300,00	1.266.273.290.525,00	143,99
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.3.6. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Belanja Masing-Masing Urusan SKPD dan Program/Kegiatan.

a. Perioritas Belanja Daerah

Prioritas belanja daerah diarahkan pada isu dan permasalahan pembangunan dengan memastikan program yang dialokasikan bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Visi “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan”.

Rumusan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tentu akan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi melalui pengembangan ekonomi lokal yang unggul berbasis kewilayahan, berkeadilan, berkelanjutan dan ini selaras dengan prioritas pembangunan RKPDP Provinsi Papua tahun 2022 yang telah dicanangkan yaitu Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan, merata dan

adil dan Prioritas Nasional yaitu “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan serta Berkelanjutan”.

Prioritas belanja daerah berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
 2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
 3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
 4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
 5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
 6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus); dan
 7. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).
- b. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 menggunakan struktur belanja yang telah disesuaikan dengan PP N0.12 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Penganggaran yang dijabarkan dalam Permendagri Noomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Terknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara keseluruhan jumlah belanja daerah diperkirakan terjadi kenaikan sebesar Rp3.088.519.764.409,00 atau 31,44 persen, dari semula sebesar Rp9.821.989.485.318,00 menjadi sebesar Rp12.910.309.249.727,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Struktur belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 033
Belanja Daerah pada Rancangan PPAS Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		APBD 2022	RAPBD-2022		
1	2	3	4	5	6
6	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	7.712.514.652.782,00	9.716.337.877.802,00	2.003.823.225.020,00	25,98
5.1.1	Belanja Pegawai	2.416.088.711.130,00	3.063.415.619.087,00	647.326.907.957,00	26,79
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.083.347.543.252,00	4.872.754.282.386,00	789.406.739.134,00	19,33
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	1.196.866.461.400,00	1.726.559.365.734,00	529.692.904.334,00	44,26
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.211.937.000,00	53.608.610.595,00	37.396.673.595,00	230,67
5.2	BELANJA MODAL	1.509.658.467.842,00	2.192.435.355.168,00	682.776.887.326,00	45,23
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	26.100.000.000,00	26.100.000.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.153.245.529,00	252.867.650.551,00	121.714.405.022,00	92,80
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618.392.117.492,00	1.122.081.473.128,00	503.689.355.636,00	81,45
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	755.672.754.821,00	786.882.181.489,00	31.209.426.668,00	4,13
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.440.350.000,00	4.504.050.000,00	63.700.000,00	1,43
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.000.000.000,00	341.775.344.112,00	286.775.344.112,00	521,41
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000,00	341.775.344.112,00	286.775.344.112,00	521,41
5.4	BELANJA TRANSFER	544.816.364.694,00	659.960.672.645,00	115.144.307.951,00	21,13
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	544.816.364.694,00	659.960.672.645,00	115.144.307.951,00	21,13
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	9.821.989.485.318,00	12.910.509.249.727,00	3.088.519.764.409,00	31,44
	Total Surplus (Defisit)	(879.448.024.775,00)	(2.145.721.315.300,00)	(1.266.273.290.525,00)	143,99

1. **Belanja Operasi** mengalami kenaikan 25,98 persen, atau sebesar Rp2.003.623.225.020,00 dari semula sebesar Rp7.712.514.652.782,00 menjadi sebesar Rp9.716.137.877.802,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai mengalami kenaikan 26,79 persen, atau sebesar Rp647.326.907.957,00 dari semula sebesar Rp2.416.088.711.130,00 menjadi sebesar Rp3.063.415.619.087,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan 19,33 persen, atau sebesar Rp789.406.739.134,00 dari semula sebesar Rp4.083.347.543.252,00 menjadi sebesar Rp4.872.754.282.386,00;
 - c. Belanja Subsidi tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022;
 - d. Belanja Hibah mengalami kenaikan 44,26 persen, atau sebesar Rp529.692.904.334,00 dari semula sebesar Rp1.196.866.461.400,00 menjadi sebesar Rp1.726.559.365.734,00;
 - e. Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan 229,44 persen, atau sebesar Rp37.196.673.595,00 dari semula sebesar Rp16.211.937.000,00 menjadi sebesar Rp53.408.610.595,00.
2. **Belanja Modal** mengalami kenaikan 45,23 persen, atau sebesar Rp682.776.887.326,00 dari semula sebesar Rp1.509.658.467.842,00 menjadi sebesar Rp2.192.435.355.168,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Modal Tanah bertambah 100,00 persen, atau sebesar Rp32.100.000.000,00 dari semula sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp32.100.000.000,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah 92,80 persen, atau sebesar Rp121.714.405.022,00 dari semula sebesar Rp131.153.245.529,00 menjadi sebesar Rp252.867.650.551,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah 81,45 persen, atau sebesar Rp503.689.355.636,00 dari semula sebesar Rp618.392.117.492,00 menjadi sebesar Rp1.122.081.473.128,00;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi bertambah 4,13 persen, atau sebesar Rp31.209.426.668,00 dari semula sebesar Rp755.672.754.821,00 menjadi sebesar Rp786.882.181.489,00;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah 1,43 persen, atau sebesar Rp63.700.000,00 dari semula sebesar Rp4.440.350.000,00 menjadi sebesar Rp4.504.050.000,00;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. Belanja Tidak Terduga bertambah 521,41 persen, atau sebesar Rp286.775.344.112,00 dari semula sebesar Rp55.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp341.775.344.112,00.
 4. Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 bertambah 21,13 persen, atau sebesar Rp115.144.307.951,00 dari semula sebesar Rp544.816.364.694,00 menjadi sebesar Rp659.960.672.645,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bagi Hasil bertambah 21,13 persen, atau sebesar Rp115.144.307.951,00 dari semula sebesar Rp544.816.364.694,00 menjadi sebesar Rp659.960.672.645,00;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Terkait Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Belanja sementara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dibagi per urusan per Program/Kegiatan pada masing–masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada lampiran ini.

2.2.3.7. Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

a. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Menunjuk pada pasal 10 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintah terklasifikasi sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, terbagi atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan
 - a) Urusan pemerintahan wajib terdiri dari :
 - urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketentraman, ketertiban umum dan pelindung masyarakat;
 - 6) sosial.
 - Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

b) Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari bidang :

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energy dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

c) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari bidang :

- 1) Administrasi Pemerintahan;
- 2) Pengawasan;
- 3) Perencanaan;
- 4) Keuangan;
- 5) Kepegawaian;
- 6) Pendidikan dan Pelatihan;
- 7) Penelitian dan Pengembangan

Terkait Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Belanja sementara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dibagi per urusan per Program/Kegiatan pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 034
Perubahan Plafon Anggaran Belanja Sementara SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Pagu SKPD berdasarkan tabel diatas sudah termasuk Gaji dan Tunjangan pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.

Kode	Perangkat Daerah	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAAN	BERTAMBAH
		Nilai	Nilai	/(BERKURANG)
1	2	3	4	5= (4 - 3)
1.01.2.23.2.24.01.0000	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.179.709.105.041	1.399.928.687.167	220.219.582.126
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	106.990.595.740	131.037.730.969	24.047.135.229
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	198.835.326.800	303.188.002.800	104.352.676.000
1.02.0.00.0.00.01.0002	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)	88.455.944.200	111.369.112.167	22.913.167.967
1.02.0.00.0.00.01.0004	Rumah Sakit Jiwa Abepura	24.379.713.012	59.557.100.050	35.177.387.038
1.02.0.00.0.00.01.03	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	114.367.210.636	75.714.000.000	(38.653.210.636)
	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (BLUD)	-	158.823.448.444	158.823.448.444
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.693.085.422.325	3.180.786.563.311	487.701.140.986
1.05.0.00.0.00.05.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	44.929.947.380	46.803.055.290	1.873.107.910
1.06.2.08.2.12.07.00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44.196.883.280	49.196.778.257	4.999.894.977
2.07.2.17.3.30.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	64.820.401.687	67.820.401.434	2.999.999.747
2.09.3.27.0.00.01.00	Dinas Pertanian dan Pangan	89.918.144.400	90.918.125.455	999.981.055
2.11.3.28.0.00.02.00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	185.217.778.338	192.942.474.669	7.724.696.331
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	21.983.444.425	33.983.444.145	11.999.999.720
2.15.2.15.2.15.15.0000	Dinas Perhubungan	91.058.725.839	126.555.991.129	35.497.265.290
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.076.271.050	53.076.271.300	2.000.000.250
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.907.795.650	16.466.162.110	1.558.366.460
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	107.595.100.470	143.195.357.872	35.600.257.402

Kode	Perangkat Daerah	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		Nilai	Nilai	(4 - 3)
1	2	3	4	5= (4 - 3)
2.22.3.26.0.00.03.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33.771.998.152	36.312.408.556	2.540.410.404
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.717.726.960	69.287.270.960	18.569.544.000
3.29.0.00.0.00.01.00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	48.801.343.589	64.871.625.524	16.070.281.935
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	946.406.952.665	1.433.935.452.665	487.528.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Umum dan Protokol	102.264.122.921	187.264.120.306	84.999.997.385
4.01.0.00.0.00.01.0012	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	22.331.800.200	37.108.219.200	14.776.419.000
4.01.0.00.0.00.01.02	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	32.609.832.600	34.502.023.645	1.892.191.045
4.01.0.00.0.00.01.04	Biro Hukum	32.783.669.930	34.683.282.076	1.899.612.146
4.01.0.00.0.00.01.05	Biro Organisasi	21.861.316.000	25.393.879.600	3.532.563.600
4.02.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	477.324.222.000	677.324.222.000	200.000.000.000
4.02.0.00.0.00.05.00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	151.235.322.500	156.367.933.500	5.132.611.000
5.01.5.05.1.03.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	134.536.910.662	154.536.885.439	19.999.974.777
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	2.311.836.187.856	3.587.291.686.018	1.275.455.498.162
5.02.0.00.0.00.03.00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	138.448.314.109	153.963.954.006	15.515.639.897
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian Daerah	35.642.130.943	55.069.563.338	19.427.432.395
5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.095.262.150	51.095.262.650	1.000.000.500
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	13.578.921.540	15.536.863.205	1.957.941.665
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	10.749.833.000	18.749.815.000	7.999.982.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	71.191.906.200	80.672.371.600	9.480.465.400
8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.273.901.068	29.204.015.504	14.930.114.436
TOTAL		9.821.989.485.318	13.144.533.561.361	3.322.544.076.043

TABEL 035
LAMPIRAN KOMPOSISI PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.237.275.778.543,00	2.152.707.624.061,00	915.431.845.518,00	73,99
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.024.797.715.916,00	1.069.726.272.973,00	44.928.557.057,00	4,38
1.1.2	Retribusi Daerah	31.861.201.441,00	7.410.091.220,00	-24.451.110.221,00	-76,74
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.338.272,00	766.767.946.987,00	741.463.608.715,00	2930,18
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.312.522.914,00	308.803.312.881,00	153.490.789.967,00	98,83
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.705.265.682.000,00	8.612.080.310.366,00	906.814.628.366,00	11,77
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.705.265.682.000,00	8.612.080.310.366,00	906.814.628.366,00	11,77
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
a. Dana Transfer Umum		3.071.553.835.000,00	4.006.709.334.956,00	935.155.499.956,00	30,45
- DBH		756.633.768.000,00	1.691.789.267.956,00	935.155.499.956,00	123,59
- DAU		2.314.920.067.000,00	2.314.920.067.000,00	0,00	0,00
b. Dana Transfer Khusus		841.056.511.000,00	812.715.639.410,00	-28.340.871.590,00	-3,37
- DAK Fisik		417.888.971.000,00	389.548.099.410,00	-28.340.871.590,00	-6,78
- DAK Non Fisik		423.167.540.000,00	423.167.540.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	1.580.796.000.000,00	1.580.796.000.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	2.211.859.336.000,00	2.211.859.336.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	8.942.541.460.543,00	10.764.787.934.427,00	1.822.246.473.884,00	20,38
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	7.712.514.652.782,00	9.716.337.877.802,00	2.003.823.225.020,00	25,98
5.1.1	Belanja Pegawai	2.416.088.711.130,00	3.063.415.619.087,00	647.326.907.957,00	26,79
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.083.347.543.252,00	4.872.754.282.386,00	789.406.739.134,00	19,33
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	1.196.866.461.400,00	1.726.559.365.734,00	529.692.904.334,00	44,26
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.211.937.000,00	53.608.610.595,00	37.396.673.595,00	230,67
5.2	BELANJA MODAL	1.509.658.467.842,00	2.192.435.355.168,00	682.776.887.326,00	45,23
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	26.100.000.000,00	26.100.000.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.153.245.529,00	252.867.650.551,00	121.714.405.022,00	92,80
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618.392.117.492,00	1.122.081.473.128,00	503.689.355.636,00	81,45
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	755.672.754.821,00	786.882.181.489,00	31.209.426.668,00	4,13
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.440.350.000,00	4.504.050.000,00	63.700.000,00	1,43
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.000.000.000,00	341.775.344.112,00	286.775.344.112,00	521,41
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000,00	341.775.344.112,00	286.775.344.112,00	521,41
5.4	BELANJA TRANSFER	544.816.364.694,00	659.960.672.645,00	115.144.307.951,00	21,13
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	544.816.364.694,00	659.960.672.645,00	115.144.307.951,00	21,13
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	9.821.989.485.318,00	12.910.509.249.727,00	3.088.519.764.409,00	31,44
	Total Surplus/ (Defisit)	-879.448.024.775,00	-2.145.721.315.300,00	-1.266.273.290.525,00	143,99
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	679.448.024.775,00	1.865.721.315.300,00	1.186.273.290.525,00	174,59
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	979.448.024.775,00	2.165.721.315.300,00	1.186.273.290.525,00	121,12
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-80.000.000.000,00	-80,00
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-80.000.000.000,00	-80,00
	Pembiayaan Netto	879.448.024.775,00	2.145.721.315.300,00	1.266.273.290.525,00	143,99
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	9.921.989.485.318,00	12.930.509.249.727,00	3.008.519.764.409,00	30,32

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
TAHUN 2022

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD yang terdiri dari ikhtisar kinerja pendapatan daerah dan ikhtisar kinerja belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

3.1.1 Ikhtisar Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Ikhtisar Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 dengan menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp10.764.787.934.427,00 merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.
Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).
2. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp11.040.109.011.239,40 atau 102,56% dari yang ditargetkan sebesar Rp10.764.787.934.427,00 atau melampaui target sebesar RpRp275.321.076.812,40 atau 2,56%. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Papua yang baik dan efektif.
3. Realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp11.040.109.011.239,40 terdiri dari:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp371.532.798.288,45 dari anggaran sebesar Rp227.703.329.387,00 atau 163,17%, atau melampaui target sebesar Rp143.829.468.901,45 atau 63,17%;
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp3.027.541.660,00 dari anggaran sebesar Rp1.006.500.000,00 atau 300,80%, melampaui target sebesar Rp2.021.041.660,00 atau 200,80%;
 - c) Urusan Pemerintahan Pilihan terealisasi sebesar Rp1.422.530.400,00 dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 94,84%, tidak mencapai target sebesar Rp77.469.600,00 atau (5,16%);
 - d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp1.744.435.725,00 dari anggaran sebesar Rp2.061.000.000,00 atau 84,64%, tidak mencapai target sebesar Rp316.564.275,00 atau (15,36%)
 - e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp10.662.381.705.165,90 dari anggaran sebesar Rp10.532.517.105.040,00 atau 101,23%, melampaui target sebesar Rp129.864.600.125,90 atau 1,23%.

Ikhtisar Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 036
Ikhtisar Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2022

(Dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH	REALISASI 2022		LEBIH / (KURANG)	
		PERUBAHAN	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	10.764.787.934.427,00	11.040.109.011.239,40	102,56	275.321.076.812,40	2,56
4.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	227.703.329.387,00	371.532.798.288,45	163,17	143.829.468.901,45	63,17
4.1.01	Pendidikan	0,00	253.511.176.353,00	0,00	253.511.176.353,00	0,00
4.1.02	Kesehatan	227.703.329.387,00	116.933.858.670,45	51,35	(110.769.470.716,55)	(48,65)
4.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.084.763.265,00	0,00	1.084.763.265,00	0,00
4.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.1.06	Sosial	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.006.500.000,00	3.027.541.660,00	300,80	2.021.041.660,00	200,80

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH	REALISASI 2022		LEBIH / (KURANG)	
		PERUBAHAN	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
4.2.07	Tenaga Kerja	0,00	157.327.000,00	0,00	157.327.000,00	0,00
4.2.09	Pangan	290.000.000,00	400.842.500,00	138,22	110.842.500,00	38,22
4.2.11	Lingkungan Hidup	0,00	89.525.930,00	0,00	89.525.930,00	0,00
4.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	134.669.500,00	0,00	134.669.500,00	0,00
4.2.15	Perhubungan	0,00	94.209.000,00	0,00	94.209.000,00	0,00
4.2.16	Komunikasi dan Informasi	0,00	122.425.000,00	0,00	122.425.000,00	0,00
4.2.18	Penanaman Modal	666.500.000,00	435.100.000,00	65,28	(231.400.000,00)	(34,72)
4.2.19	Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	1.446.742.730,00	2.893,49	1.396.742.730,00	2.793,49
4.2.22	Kebudayaan	0,00	146.700.000,00	0,00	146.700.000,00	0,00
4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	1.500.000.000,00	1.422.530.400,00	94,84	(77.469.600,00)	(5,16)
4.3.25	Kelautan dan Perikanan	1.500.000.000,00	1.400.980.400,00	93,40	(99.019.600,00)	(6,60)
4.3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	21.550.000,00	0,00	21.550.000,00	0,00
4.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2.061.000.000,00	1.744.435.725,00	84,64	(316.564.275,00)	(15,36)
4.4.01	Sekretariat Daerah	2.061.000.000,00	332.035.725,00	16,11	(1.728.964.275,00)	(83,89)
4.4.02	Sekretariat DPRD	0,00	1.412.400.000,00	0,00	1.412.400.000,00	0,00
4.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	10.532.517.105.040,00	10.662.381.705.165,90	101,23	129.864.600.125,90	1,23
4.5.01	Perencanaan	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
4.5.02	Keuangan	10.521.179.105.040,00	10.655.328.386.098,50	101,28	134.149.281.058,50	1,28
4.5.03	Kepegawaian	0,00	150.790.000,00	0,00	150.790.000,00	0,00
4.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	11.338.000.000,00	6.900.179.067,37	60,86	(4.437.820.932,63)	(39,14)

3.1.2 Ikhtisar Kinerja Belanja dan Transfer Provinsi Papua

Ikhtisar Kinerja Belanja dan Transfer Provinsi Papua Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 dengan menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja dan Transfer TA 2022 sebesar Rp12.910.509.249.727,00 merupakan batas maksimal jumlah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja belanja yang baik apabila realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan. Selisih kurang realisasi belanja merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih lebih merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).
2. Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.454.657.535.165,80 atau 88,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.910.509.249.727,00 yang terdiri dari:
 - a. Realisasi belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp5.286.817.906.917,85 atau mencapai 95,49% dari anggaran sebesar Rp5.536.228.443.596,00 tidak terealisasi sebesar negatif Rp249.410.536.678,15 atau (4,51%);
 - b. Realisasi belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp693.091.474.476,40 atau mencapai 89,47% dari anggaran sebesar Rp774.706.198.275,00 tidak terealisasi sebesar Rp81.614.723.798,60 atau (10,53%);
 - c. Realisasi belanja Urusan Pilihan terealisasi sebesar Rp123.602.529.945,12 atau 92,13% dari anggaran sebesar Rp134.158.896.484,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp10.556.366.538,88 atau (7,87%);
 - d. Realisasi belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah terealisasi sebesar Rp2.193.075.938.938,65 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp2.318.087.627.992,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp125.011.689.053,35 atau (5,39%).
 - e. Realisasi belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp3.076.499.221.921,81 atau 76,19% dari anggaran sebesar Rp4.037.738.972.612,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp961.239.750.690,19 atau (23,81%).
 - f. Realisasi belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp62.838.759.415,00 atau 77,89% dari anggaran sebesar Rp80.672.371.600,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp17.833.612.185,00 atau (23,11%).
 - g. Realisasi belanja Unsur Pemerintahan Umum terealisasi sebesar Rp18.731.703.551,00 atau 64,78% dari anggaran sebesar Rp28.916.739.168,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp10.185.035.617,00 atau (35,22%).

Ikhtisar Kinerja Belanja dan Transfer Provinsi Papua berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 037
Ikhtisar Kinerja Belanja dan Transfer Provinsi Papua
Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2022

(Dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		LEBIH / (KURANG)	
		(Pergub No.55/2022)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
5	BELANJA DAERAH	12.910.509.249.727,00	11.454.657.535.165,80	88,72	(1.455.851.714.561,17)	(11,28)
5.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	5.536.228.443.596,00	5.286.817.906.917,85	95,49	(249.410.536.678,15)	(4,51)
5.1.01	Pendidikan	1.399.929.226.625,00	1.511.350.180.500,56	107,96	111.420.953.875,56	7,96
5.1.02	Kesehatan	856.147.516.640,00	746.253.578.857,44	87,16	(109.893.937.782,56)	(12,84)
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.180.786.563.311,00	2.932.931.139.971,85	92,21	(247.855.423.339,15)	(7,79)
5.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	46.803.055.290,00	45.816.529.458,00	97,89	(986.525.832,00)	(2,11)
5.1.06	Sosial	52.562.081.730,00	50.466.478.130,00	96,01	(2.095.603.600,00)	(3,99)
5.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	774.706.198.275,00	693.091.474.476,40	89,47	(81.614.723.798,60)	(10,53)
5.2.07	Tenaga Kerja	67.820.401.142,00	53.814.853.902,00	79,35	(14.005.547.240,00)	(20,65)
5.2.09	Pangan	90.918.125.455,00	79.660.523.262,00	87,62	(11.257.602.193,00)	(12,38)
5.2.11	Lingkungan Hidup	206.589.160.006,00	191.511.845.239,31	92,70	(15.077.314.766,69)	(7,30)
5.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	33.627.160.330,00	32.964.977.384,00	98,03	(662.182.946,00)	(1,97)
5.2.15	Perhubungan	126.555.991.129,00	97.133.690.808,00	76,75	(29.422.300.321,00)	(23,25)
5.2.16	Komunikasi dan Informasi	53.076.271.300,00	52.443.964.410,82	98,81	(632.306.889,18)	(1,19)
5.2.18	Penanaman Modal	16.466.162.110,00	15.870.238.942,00	96,38	(595.923.168,00)	(3,62)
5.2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	143.340.518.247,00	136.782.391.559,19	95,42	(6.558.126.687,81)	(4,58)
5.2.22	Kebudayaan	36.312.408.556,00	32.908.988.969,08	90,63	(3.403.419.586,92)	(9,37)
5.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	134.158.896.484,00	123.602.529.945,12	92,13	(10.556.366.538,88)	(7,87)
5.3.25	Kelautan dan Perikanan	69.287.270.960,00	64.718.306.567,12	93,41	(4.568.964.392,88)	(6,59)
5.3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral	64.871.625.524,00	58.884.223.378,00	90,77	(5.987.402.146,00)	(9,23)
5.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2.318.087.627.992,00	2.193.075.938.938,65	94,61	(125.011.689.053,35)	(5,39)
5.4.01	Sekretariat Daerah	1.559.395.472.492,00	1.475.563.292.771,65	94,62	(83.832.179.720,35)	(5,38)
5.4.02	Sekretariat DPRD	758.692.155.500,00	717.512.646.167,00	94,57	(41.179.509.333,00)	(5,43)
5.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	4.037.738.972.612,00	3.076.499.221.921,81	76,19	(961.239.750.690,19)	(23,81)
5.5.01	Perencanaan	156.536.119.794,00	137.975.670.470,00	88,14	(18.560.449.324,00)	(11,86)
5.5.02	Keuangan	3.738.751.663.285,00	2.813.138.070.573,81	75,24	(925.613.592.711,19)	(24,76)
5.5.03	Kepegawaian	55.069.563.338,00	51.967.967.803,00	94,37	(3.101.595.535,00)	(5,63)
5.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	51.095.262.650,00	40.353.637.137,00	78,98	(10.741.625.513,00)	(21,02)
5.5.06	Pengelola Perbatasan Daerah	15.536.863.205,00	14.050.975.302,00	90,44	(1.485.887.903,00)	(10,56)
5.5.07	Penghubung	20.749.500.340,00	19.012.900.636,00	91,63	(1.736.599.704,00)	8,37
5.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	80.672.371.600,00	62.838.759.415,00	77,89	(17.833.612.185,00)	(22,11)
5.6.01	Inspektorat	80.672.371.600,00	62.838.759.415,00	77,89	(17.833.612.185,00)	(28,38)
5.8	Unsur Pemerintahan Umum	28.916.739.168,00	18.731.703.551,00	64,78	(10.185.035.617,00)	(35,22)
5.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	28.916.739.168,00	18.731.703.551,00	64,78	(10.185.035.617,00)	(35,22)

3.1.3 Pencapaian Program/Kegiatan Pemerintah Daerah terkait dengan *Mandatory Spending* dan Penanganan *Stunting*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN); dan
4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam penyelesaian *mandatory spending* adalah dengan perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD tahun 2022. Terdapat 3 (tiga) poin *mandatory spending* yang dituangkan dalam APBD tahun 2022, yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur.

1. Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dari belanja daerah sebagaimana diamankan dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun kegiatan fungsi pendidikan dijabarkan dalam program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 038
Program Kegiatan Fungsi Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDIDIKAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.185.529.997.427,00	1.051.012.672.928,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349.646.990,00	349.646.990,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.182.115.542.897,00	1.047.599.197.025,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	347.842.540,00	347.663.940,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.440.000,00	599.930.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	966.525.000,00	966.525.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.000.000,00	1.149.709.973,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	999.994.104,00	999.032.644,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	675.185.695,00	674.824.544,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	324.808.409,00	324.208.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	209.819.106.174,00	200.869.785.147,56
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	78.284.332.640,00	70.277.249.536,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	114.274.329.302,00	113.716.521.705,00
Pengelolaan Pendidikan Khusus	17.260.444.232,00	16.876.013.906,56
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	991.980.062,00	970.786.837,00
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	260.898.800,00	252.930.575,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	260.473.150,00	259.843.150,00
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	470.608.112,00	458.013.112,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.588.148.858,00	2.585.848.858,00
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2.588.148.858,00	2.585.848.858,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.267.279.490,00	4.139.884.774,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.267.280.000,00	1.165.989.097,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	999.999.490,00	997.032.392,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	1.000.000.000,00	994.503.971,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.000.000.000,00	982.359.314,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.842.312.560,00	14.714.690.078,00
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	31.842.312.560,00	14.714.690.078,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.019.631.375,00	1.827.816.235,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.131.481.375,00	1.047.205.295,00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	888.150.000,00	780.610.940,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	699.999.449,00	697.967.122,60
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	699.999.449,00	697.967.122,60
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.712.493.572,00	0,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.712.493.572,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.199.999.549,00	1.943.654.054,48
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	2.199.999.549,00	1.943.654.054,48
PROGRAM KEBLIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.288.000.000,00	18.571.563.045,00
Pengembangan Kompetensi Teknis	2.686.400.000,00	677.642.433,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	22.601.600.000,00	17.893.920.612,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	11.572.946.325,00	11.354.117.530,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	11.572.946.325,00	11.354.117.530,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	901.199.520,00	901.000.220,00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	901.199.520,00	901.000.220,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.009.563.816,00	908.497.016,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	987.025.818,00	416.181.418,00

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Pendidikan dan Pelatihan UKM bagi UKM yang Wilayahnya Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.022.537.998,00	492.315.598,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.699.168.322,00	2.691.369.850,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.699.168.322,00	2.691.369.850,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	772.895.000,00	765.688.021,62
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	395.000.000,00	389.667.032,00
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	377.895.000,00	376.020.989,62
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	2.447.999.740,00	2.444.999.740,00
Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	2.447.999.740,00	2.444.999.740,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.065.513.000,00	2.769.721.610,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3.065.513.000,00	2.769.721.610,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.712.493.572,00	0,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.712.493.572,00	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.997.599.916,00	40.909.178.575,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.997.599.916,00	40.909.178.575,00
NON PROGRAM	0,00	850.138.934.086,00
Non Kegiatan	0,00	254.912.054.086,00
Non Kegiatan	0,00	595.226.880.000,00
TOTAL	1.541.514.121.831,00	2.212.593.008.372,26
TOTAL BELANJA DAERAH	12.910.509.249.727,00	11.454.657.535.165,80
PERSENTASE PROGRAM/KEGIATAN PENDIDIKAN TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH	11,94	19,32

2. Fungsi Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Adapun kegiatan fungsi kesehatan dijabarkan dalam program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 039
Program Kegiatan Fungsi Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
KESEHATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	430.428.030.006,00	333.295.615.653,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.575.000,00	222.051.550,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300.049.706.052,00	275.610.850.497,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	442.500.000,00	441.520.010,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.755.440.850,00	11.349.859.434,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.300.000.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.487.920.904,00	32.775.817.838,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.462.587.200,00	11.189.048.744,00
Fasilitasi Keprotokolan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)	1.707.300.000,00	1.706.467.580,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	389.052.789.055,00	244.316.766.906,12
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	231.981.535.990,00	163.283.808.808,17
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	145.165.942.835,00	69.610.494.369,95
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	203.907.980,00	194.933.880,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	11.701.402.250,00	11.227.529.848,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	36.136.704.844,00	17.335.631.951,00
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	31.842.312.560,00	14.714.690.078,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.294.392.284,00	2.620.941.873,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	129.995.245,00	126.850.997,00
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	129.995.245,00	126.850.997,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	399.997.490,00	399.125.358,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	99.994.930,00	99.994.608,00
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	300.002.560,00	299.130.750,00

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Non Program	0,00	264.793.492.860,16
Non Kegiatan	0,00	150.779.587.992,32
Non Kegiatan	0,00	114.013.904.867,84
TOTAL	856.147.516.640,00	860.267.483.725,28
TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI	11.728.761.390.155,00	10.407.426.021.465,80
PERSENTASE PROGRAM/KEGIATAN KESEHATAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI	7,30	8,27

3. Fungsi Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yang merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan publik antar daerah. Adapun program/kegiatan belanja infrastruktur dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 040
Program Kegiatan Fungsi Infrastruktur

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	77.095.254.323,00	72.460.846.420,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.240.000.006,00	1.212.548.864,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.820.299.092,00	62.547.002.715,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400.045.880,00	368.953.770,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.704.954.017,00	1.697.754.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.696.495.100,00	2.682.396.350,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.785.180.000,00	2.544.740.721,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.448.280.228,00	1.407.450.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	51.449.196.792,00	50.338.543.572,47
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	38.153.761.792,00	37.427.536.672,68
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.295.435.000,00	12.911.006.899,79
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	174.674.136.485,00	151.091.516.944,61
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	174.674.136.485,00	151.091.516.944,61
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.000.000.000,00	9.803.599.046,59
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	10.000.000.000,00	9.803.599.046,59
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	41.249.401.515,00	40.608.327.439,35
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	41.249.401.515,00	40.608.327.439,35
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	812.174.569.148,00	780.944.602.993,35
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	812.174.569.148,00	780.944.602.993,35
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.099.180.755,00	8.827.878.807,76
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.099.180.755,00	8.827.878.807,76
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.992.471.877.968,00	1.807.501.707.217,72
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.992.471.877.968,00	1.807.501.707.217,72
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	11.572.946.325,00	11.354.117.530,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	11.572.946.325,00	11.354.117.530,00
Non Program		142.052.724.200,00
Non Kegiatan		142.052.724.200,00
TOTAL	3.180.786.563.311,00	3.074.983.864.171,85
TOTAL BELANJA DAERAH	12.910.509.249.727,00	11.454.657.535.165,80
PERSENTASE PROGRAM/KEGIATAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA BERSIFAT UMUM	24,64	26,84

Selanjutnya, program percepatan pencegahan *stunting* merupakan program prioritas pemerintah yang didukung oleh pimpinan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan pemerintah desa. Prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan *stunting* adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran (1.000 HPK).

Upaya Pemerintah Provinsi Papua adalah dengan merencanakan program/kegiatan penanganan *stunting* dan data status gizi balita Provinsi Papua selama penanganan *stunting* dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 041
Program Kegiatan Penanganan Stunting

Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.800.156.119,00	18.084.838.671,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	12.331.697.454,00	11.644.061.071,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	75.000.000,00	74.399.138,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	2.420.000.000,00	2.414.816.831,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	68.395.332.754,00	54.164.907.159,34
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	900.000.245,00	896.199.694,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	700.000.020,00	680.491.647,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	500.526.140,00	0,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	187.250.000,00	141.550.000,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	128.029.972.100,00	53.501.457.423,95
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	203.907.980,00	194.933.880,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	10.000.000.000,00	9.114.760.515,09
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	164.674.136.485,00	141.976.756.429,52
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	155.352.980,00	155.352.980,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.064.740.000,00	3.063.956.739,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.800.100.000,00	1.799.359.828,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	1.264.640.000,00	1.264.596.911,00
TOTAL		413.502.812.277,00	299.172.438.917,90

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dari uraian Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 diketahui realisasi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang tidak mencapai target dari yang dianggarkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 realisasinya melebihi target sebesar Rp275.321.076.812,40 atau 2,56%, dan bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.885.923.486.851,20 menurun sebesar negatif Rp2.845.814.475.611,80 atau (20,49%). Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang melampaui target adalah dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah melampaui target sebesar Rp74.047.030.866,36 atau 3,44% dan Pendapatan Transfer melampaui target sebesar Rp196.806.979.749,00 atau 2,23%
2. Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.454.657.535.165,80 atau 88,72% dari anggarannya sebesar Rp12.910.509.249.727,00 Hal ini disebabkan antara lain: (1) terlambatnya Transfer Dana Otonomi Khusus yang mengakibatkan realisasi belanja tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan (2) Adanya efisiensi belanja yang merupakan sisa kegiatan yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran OPD.
3. Dalam percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting di Provinsi Papua tentunya terdapat kendala-kendala diantaranya sebagai berikut:
 - a. Belum efektifnya program-program pencegahan *stunting*;
 - b. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana;
 - d. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program; dan
 - e. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah Provinsi Papua yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Provinsi Papua yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari atas:

- a. Pemerintah Provinsi Papua; dan
- b. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut:

Tabel 042
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
1	1-01.2-23.2-24.01.001.0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	1-02.0-00.0-00.01.001.0	Dinas Kesehatan
3	1-02.0-00.0-00.02.000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
4	1-02.0-00.0-00.03.000.0	Rumah Sakit Jiwa
5	1-02.0-00.0-00.04.000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
6	1-03.1-04.2-10.01.001.0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	1-05.0-00.0-00.01.001.0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1-06.2-08.2-12.01.001.0	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	2-07.2-17.3-30.01.001.0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
10	2-09.3-27.0-00.01.001.0	Dinas Pertanian dan Pangan
11	2-11.3-28.0-00.01.001.0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12	2-13.0-00.0-00.01.001.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
13	2-15.0-00.0-00.01.001.0	Dinas Perhubungan
14	2-16.2-20.2-21.01.001.0	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	2-18.0-00.0-00.01.001.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	2-19.0-00.0-00.01.001.0	Dinas Olah Raga dan Pemuda
17	2-22.3-26.0-00.01.001.0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	2-25.0-00.0-00.01.001.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	2-29.0-00.0-00.01.001.0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
20	4-01.0-00.0-00.01.000.0	Sekretariat Daerah
21	4-01.0-00.0-00.01.001.0	Biro Umum dan Protokol
22	4-01.0-00.0-00.01.002.0	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
23	4-01.0-00.0-00.01.003.0	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
24	4-01.0-00.0-00.01.004.0	Biro Hukum
25	4-01.0-00.0-00.01.005.0	Biro Organisasi
26	4-02.0-00.0-00.01.001.0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
27	4-02.0-00.0-00.02.001.0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
28	5-01.5-05.1-03.01.001.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	5-02.0-00.0-00.01.001.0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
30	5-02.0-00.0-00.02.001.0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
31	5-03.0-00.0-00.01.001.0	Badan Kepegawaian Daerah
32	5-04.0-00.0-00.01.001.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33	5-06.0-00.0-00.01.000.0	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
34	5-07.0-00.0-00.01.000.0	Badan Penghubung Daerah
35	6-01.0-00.0-00.01.001.0	Inspektorat
36	8-01.0-00.0-00.01.000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Provinsi Papua pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

4.2 PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat kebijakan akuntansi dalam penyusunan kebijakan akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua:

1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*);
3. Prinsip Realisasi (*Realization*);
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*);
5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*);
6. Prinsip Konsistensi (*Consistency*);
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*); dan
8. Prinsip Penyajian Wajar. (*Fair Presentation*).

4.2.1 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Papua, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2.2 Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3 Prinsip Realisasi (*Realization*)

Bagi Pemerintah Provinsi Papua, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Papua suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8 Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Basis - basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan Pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut:

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

4.3.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Papua, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.1.2 Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Papua.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
4. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
5. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
6. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Provinsi Papua meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
7. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Papua yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
8. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
9. Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
10. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode

berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

4.3.1.3 Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

4.3.1.4 Surplus/defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.3.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Papua, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Papua terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas pelaporan lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Papua.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Papua, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

c. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

4.3.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

4.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.3 Neraca

1. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
3. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

4.3.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. *diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau*
2. *berupa kas dan setara kas.*

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang

mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Aset Non lancar

1. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Papua atau yang digunakan masyarakat umum.
2. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.
3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.
4. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
5. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
6. Investasi nonpermanen terdiri dari:
 - a. Investasi dalam Surat Utang Negara;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
 - c. Investasi nonpermanen lainnya.
7. Investasi permanen terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.
 - b. Investasi permanen lainnya.
8. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
9. Aset tetap terdiri dari:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. Aset tetap lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
11. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

12. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Papua dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
13. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
14. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
 1. *Kas dicatat sebesar nilai nominal;*
 2. *Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;*
 3. *Piutang dicatat sebesar nilai nominal;*
 4. *Persediaan dicatat sebesar:*
 - a) *Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;*
 - b) *Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;*
 - c) *Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.*
15. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
16. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
17. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
18. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
19. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.3.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Papua mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Papua atau dengan pemberi jasa lainnya.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

1. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
2. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Papua yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Provinsi pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Papua. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.

Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.3.4.1 Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Papua selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Papua dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a. Penerimaan Pajak Daerah;
- b. Penerimaan Retribusi Daerah;
- c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah;
- e. Penerimaan Dana Bagi Hasil;
- f. Penerimaan Dana Alokasi Umum;
- g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus;
- h. Penerimaan Dana Penyesuaian;
- i. Penerimaan Hibah;
- j. Penerimaan Dana Darurat;
- k. Penerimaan Lainnya;
- l. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- a. Pembayaran Pegawai;
- b. Pembayaran Barang;
- c. Pembayaran Bunga;
- d. Pembayaran Subsidi;
- e. Pembayaran Hibah;
- f. Pembayaran Bantuan Sosial;
- g. Pembayaran Tak Terduga/Kejadian Luar Biasa; dan
- h. Pembayaran Transfer.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Papua menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Papua. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

4.3.4.2 Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Papua kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Pencairan Dana Cadangan;
- d. Penerimaan dari Divestasi;
- e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua;
- e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

4.3.4.3 Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a. Penerimaan dari utang obligasi;
- b. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a. Pembayaran pokok utang obligasi;
- b. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

4.3.4.4 Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Papua. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

4.3.5 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f. Pos Luar Biasa
- g. Surplus/Defisit-LO

4.3.5.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan;

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.5.2 Beban

Pengakuan beban yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Papua adalah Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Papua tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Papua.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Papua.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah Provinsi Papua terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode Penyusutan/amortisasi yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Papua adalah Metode garis lurus (*straight line method*);

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.3.5.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4.3.5.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

4.3.5.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali Pemerintah Provinsi Papua.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.5.6 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.

Adapun kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Provinsi Papua tidak termasuk perusahaan daerah dan tidak mengatur:

- a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
- b. Instrumen keuangan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Papua dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pencatatan Persediaan yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Papua adalah menggunakan Metode Metode Periodik:

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pencatatan Persediaan yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi adalah Metode Periodik yakni dengan melakukan perhitungan fisik persediaan (*stock opname*).

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan :

- a) Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang; dan
- b) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Penilaian dan penyajian Persediaan yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Papua adalah dengan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir dan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Investasi

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi Pemerintah Provinsi Papua dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi investasi mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Provinsi Papua baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- b. Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. Kerjasama operasi; dan
- d. Investasi dalam properti.

Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Papua; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Papua dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi

Papua dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi Papua. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi Papua. Pelepasan investasi Pemerintah Provinsi Papua dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Provinsi Papua yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Kebijakan akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

- a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
- b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Papua dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Papua dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Papua dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Papua dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Papua tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Papua. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Provinsi Papua tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Papua.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan Pemerintah Provinsi Papua adalah Metode garis lurus (*straight line method*);

Selain tanah dan aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Papua tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut.

Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Provinsi Papua yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Papua, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Provinsi Papua atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Provinsi Papua adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
- c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- d. Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya; dan
- e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Utang Pemerintah Provinsi Papua harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Kebijakan Akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas Pemerintah Provinsi Papua dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Laporan Konsolidasi

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada entitas pelaporan dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari Pemerintah Provinsi Papua yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Kebijakan Akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Provinsi Papua sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan SKPKD.

Kebijakan ini tidak mengatur:

- a. Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
- b. Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
- d. Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran entitas akuntansi sampai dengan akhir periode akuntansi.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*)

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan

mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju AkruaI menjadi basis AkruaI penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akruaI penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akruaI, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju AkruaI (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

- a. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
- c. persediaan di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akruaI penuh;
- d. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akruaI. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
- e. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- g. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akruaI utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo; dan
- h. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan.

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

- a. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dan seterusnya.
- b. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akruaI, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akruaI.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN-LRA Rp11.040.109.011.239,40

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11.040.109.011.239,40 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dirinci sebagai berikut:

Tabel 043
Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
		(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	2.152.707.624.061,00	2.226.754.654.927,36	103,44	20,17	2.139.689.476.134,17
2	PENDAPATAN TRANSFER-LRA	8.612.080.310.366,00	8.808.887.290.115,00	102,29	79,79	11.735.255.394.924,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA	0,00	4.467.066.197,00	0,00	0,04	10.978.615.793,12
	JUMLAH PENDAPATAN-LRA	10.764.787.934.427,00	11.040.109.011.239,40	102,56	100,00	13.885.923.486.851,30

Realisasi Pendapatan-LRA TA 2022 sebesar Rp11.040.109.011.239,40 atau mencapai 102,56% dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah pergeseran sebesar Rp10.764.787.934.427,00. Hal ini berarti melebihi dari target pendapatan sebesar Rp275.321.076.812,40 atau 2,56%.

Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8.808.887.290.115,00 atau 79,79%.

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp13.885.923.486.851,20 maka realisasi Pendapatan-LRA pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.845.814.475.611,84 atau (20,49%).

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Unit Organisasi / OPD Tahun Anggaran 2022 dapat di lihat pada **Lampiran : 01**

Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2022 dan Realisasi TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA Rp2.226.754.654.927,36

Pendapatan Asli Daerah-LRA, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dan 2021 bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah dirinci sebagai berikut:

Tabel 044
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA	1.069.726.272.973,00	1.235.493.977.265,00	115,50	55,48	1.627.366.516.469,00
2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	7.410.091.220,00	17.713.806.139,00	239,05	0,80	38.776.532.961,25
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LRA	766.767.946.987,00	766.991.557.636,00	100,03	34,44	40.489.377.934,00
4 Lain-lain PAD yang sah-LRA	308.803.312.881,00	206.555.313.887,36	66,89	9,28	433.057.048.769,92
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LRA	2.152.707.624.061,00	2.226.754.654.927,36	103,44	100,00	2.139.689.476.134,17

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada TA 2022 sebesar Rp2.226.754.654.927,36 atau mencapai 103,44% dari yang ditargetkan dalam APBD Pergeseran 2022 sebesar Rp2.152.707.624.061,00 dan mempunyai kontribusi sebesar 20,17% terhadap total realisasi pendapatan TA 2022.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2022 melampaui target sebesar Rp74.047.030.866,36 atau 3,44% dengan rincian sebagai berikut (1) realisasi pendapatan pajak daerah-LRA sebesar Rp1.235.493.977.265,00 atau 115,50% (2) pendapatan retribusi daerah-LRA sebesar Rp17.713.806.139,00 atau 239,05% (3) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasi sebesar Rp766.991.557.636,00 atau 100,03% dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terealisasi sebesar Rp206.555.313.887,36 atau 66,89%.

Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp2.139.689.476.134,17 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp87.065.178.793,19 atau 4,07%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Rp1.235.493.977.265,00

Pajak Daerah Provinsi Papua merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tanggal 15 November 2011. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp1.235.493.977.265,00 atau mencapai 115,50% dari yang ditargetkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 sebesar Rp1.069.726.272.973,00 dan mempunyai kontribusi sebesar 55,48% terhadap Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp2.226.754.654.927,36.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 045
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	244.516.000.000,00	267.996.252.856,00	109,60	23.480.252.856,00	9,60
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	135.857.000.000,00	150.797.322.000,00	111,00	14.940.322.000,00	11,00
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	226.353.272.973,00	254.146.270.400,00	112,28	27.792.997.427,00	12,28
4 Pajak Air Permukaan – LRA	213.000.000.000,00	225.605.474.573,00	105,92	12.605.474.573,00	5,92
5 Pajak Rokok – LRA	250.000.000.000,00	336.948.657.436,00	134,78	86.948.657.436,00	34,78
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.069.726.272.973,00	1.235.493.977.265,00	115,50	165.767.704.292,00	15,50

Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 melampaui target sebesar Rp165.767.704.292,00 atau 15,50%. Pendapatan pajak paling tinggi terdapat pada Pendapatan Pajak Rokok yang terealisasi sebesar Rp336.948.657.436,00 atau 134,78%, ini melebihi target anggaran Pajak

Rokok TA 2022 sebesar Rp86.948.657.436,00 atau 34,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000.000,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp1.627.366.516.469,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 turun sebesar Rp391.872.539.204,00 atau (24,08%).

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp17.713.806.139,00

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 15 November 2011 dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp17.713.806.139,00 atau mencapai 239,05% dari anggarannya sebesar Rp7.410.091.220,00. Pendapatan retribusi Daerah Provinsi Papua TA 2022 dan melampaui target sebesar Rp10.303.714.919,00 atau 139,05% dan mempunyai kontribusi sebesar 0,80% terhadap Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp2.226.754.654.927,36.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 046
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.542.591.220,00	5.823.271.639,00	229,03	3.280.680.419,00	129,03
2 Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	6.093.540.000,00	0,00	6.093.540.000,00	0,00
3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.361.000.000,00	3.329.096.600,00	141,00	968.096.600,00	41,00
4 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	258.000.000,00	0,00	258.000.000,00	0,00
5 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00	0,00
6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	11.775.000,00	23,55	(38.225.000,00)	(76,45)
7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	290.000.000,00	105.302.500,00	36,31	(184.697.500,00)	(63,69)
8 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	356.500.000,00	0,00	0,00	(356.500.000,00)	(100,00)
9 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	310.000.000,00	3.250.000,00	1,05	(306.750.000,00)	(98,95)
10 Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000.000,00	1.453.070.400,00	96,87	(46.929.600,00)	(3,13)
11 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	482.500.000,00	0,00	482.500.000,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.410.091.220,00	17.713.806.139,00	239,05	10.303.714.919,00	139,05

Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Papua tertinggi TA 2022 terdapat pada Retribusi pelayanan pendidikan sebesar Rp6.093.540.000,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp38.776.532.961,25, maka realisasi Retribusi Daerah pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp21.062.726.822,25 atau (54,32%).

Rincian pendapatan retribusi daerah pemerintah provinsi papua per OPD dapat dilihat pada: **Lampiran 02**

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Rp766.991.557.636,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian PAD yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, dan perusahaan milik swasta.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 sebesar Rp766.991.557.636,00 atau 100,03% dari anggarannya sebesar Rp766.767.946.987,00. Hal ini berarti melampaui target sebesar Rp223.610.649,00 atau 0,03%. Apabila dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp40.489.377.934,00, maka realisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp726.502.179.702,00 atau 1.794,30%.

Anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 047
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	42.767.946.987,00	724.223.405.759,00	1.693,38	681.455.458.772,00	1.593,38
2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	42.768.151.877,00	0,00	42.768.151.877,00	0,00
3 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	724.000.000.000,00	0,00	0,00	(724.000.000.000,00)	(100,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal - LRA	766.767.946.987,00	766.991.557.636,00	100,03	223.610.649,00	0,03

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Bagian Laba BUMN TA 2022 sebesar Rp724.223.405.759,00 di atas dirinci sebagai berikut:

- 🏛️ Dividen Bumn Inalum (Freeport) 2020 sebesar Rp123.711.472.089,00
- 🏛️ Deviden PT Inalum (Freeport) 2021 sebesar Rp600.511.933.670,00

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Bagian Laba BUMD TA 2022 sebesar Rp42.768.151.877,00 di atas dirinci sebagai berikut:

- 🏛️ Dividen PD Irian Bhakti sebesar Rp200.000.000,00 merupakan Dividen tahun 2021;
- 🏛️ Dividen PT Bank Papua sebesar Rp41.964.951.746,00 merupakan penerimaan dividen tahun buku 2021;
- 🏛️ Dividen PT ASKRIDA sebesar Rp3.200.131,00 merupakan penerimaan dividen tahun 2021 dan;
- 🏛️ Dividen PT JAMKRIDA sebesar Rp600.000.000,00 merupakan penerimaan dividen tahun 2021.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang sah-LRA Rp206.555.313.887,36

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah TA 2022 sebesar Rp206.555.313.887,36 atau 66,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp308.803.312.881,00 dapat dikatakan kurang dari target anggaran sebesar Rp102.247.998.993,64 atau (33,11%) dan mempunyai kontribusi sebesar 9,28% terhadap Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp2.226.754.654.927,36.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 048
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	80.242.340,00	0,00	80.242.340,00	0,00
2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	23.243.600,00	0,00	23.243.600,00	0,00
3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	11.588.000.000,00	5.262.000,00	0,05	(11.582.738.000,00)	(99,95)
4 Jasa Giro	32.304.574.714,00	38.899.063.785,97	120,41	6.594.489.071,97	20,41
5 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.519.387,00	0,00	1.519.387,00	0,00
6 Pendapatan Bunga	0,00	477.409.334,70	0,00	477.409.334,70	0,00
7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.857.925.933,24	0,00	3.857.925.933,24	0,00
8 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	350.000.000,00	2.462.243.375,00	703,50	2.112.243.375,00	603,50

9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	71.252.500,00	0,00	71.252.500,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.500.000.000,00	13.785.143.400,00	131,29	3.285.143.400,00	31,29
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	210.264.030,00	0,00	210.264.030,00	0,00
13	Pendapatan BLUD	224.860.738.167,00	109.955.210.875,45	48,90	(114.905.527.291,55)	(51,10)
14	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	29.200.000.000,00	36.725.664.326,00	125,77	7.525.664.326,00	25,77
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		308.803.312.881,00	206.555.313.887,36	66,89	(102.247.998.993,64)	(33,11)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp226.501.734.882,56 atau (52,30%) apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp433.057.048.769,92.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah per Unit Organisasi / OPD Tahun Anggaran 2022 dapat di lihat pada Lampiran : 02

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT **Rp8.808.887.290.115,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang oleh Pemerintah Provinsi Papua dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan dana transfer lainnya. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sedangkan dana transfer lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian/Dana BOS dan Dana Insentif Daerah.

Penetapan target pendapatan transfer pemerintah pusat untuk Provinsi Papua Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : Perpres 104 tahun 2021, Peraturan Presiden RI Nomor : Perpres 98 tahun 2022, dan PMK. nomor 170/PMK.07/2022

Realisasi pendapatan transfer pusat terealisasi sebesar Rp8.808.887.290.115,00 atau 102,29% dari yang dianggarkan pada sebesar Rp8.612.080.310.366,00.

Pendapatan transfer pusat mempunyai kontribusi 79,79% dari total realisasi pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp11.040.109.011.239,40.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 049
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	8.612.080.310.366,00	8.808.887.290.115,00	102,29	100,00	11.735.255.394.924,00
2 PENDAPATAN TRANSFER PUSAT-LAINNYA-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer-LRA	8.612.080.310.366,00	8.808.887.290.115,00	102,29	100,00	11.735.255.394.924,00

Realisasi pendapatan dana transfer pusat TA 2022 sebesar Rp8.808.887.290.115,00 atau 102,29%.

Pendapatan transfer pusat yang terdiri dari (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; (3) Dana Alokasi Khusus Fisik; (4) Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah; dan (5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan dana rincian Alokasi dan realisasi dana transfer pusat TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 050
Rincian Alokasi dan Realisasi Transfer Pusat
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
61 Dana Bagi Hasil	1.117.950.334.000,00	2.079.382.363.292,00	140.442.879.491,00	1.938.939.483.801,00	0,00
6111 Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	186.985.175.000,00	254.734.027.135,00	32.800.134.670,00	221.933.892.465,00	0,00
611111 DBH PPh Pasal 21	184.529.934.000,00	249.657.103.884,00	32.496.421.559,00	217.160.682.325,00	0,00
611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP	2.455.241.000,00	5.076.923.251,00	303.713.111,00	4.773.210.140,00	0,00
6112 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	154.654.265.000,00	315.200.967.409,00	19.130.719.972,00	296.070.247.437,00	0,00

	Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
			Kotor	Potongan	Bersih	
	611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	148.333.629.000,00	302.394.060.753,00	18.348.857.817,00	284.045.202.936,00	0,00
	611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi	6.320.636.000,00	12.806.906.656,00	781.862.155,00	12.025.044.501,00	0,00
6123	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	718.668.976.000,00	1.431.498.364.359,00	82.279.173.568,00	1.349.219.190.791,00	0,00
	612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	3.699.756.000,00	6.164.270.044,00	400.056.586,00	5.764.213.458,00	0,00
	612312 DBH SDA Minerba - Royalti	714.969.220.000,00	1.425.334.094.315,00	81.879.116.982,00	1.343.454.977.333,00	0,00
6125	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	57.641.918.000,00	77.949.004.389,00	6.232.851.281,00	71.716.153.108,00	0,00
	612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	10.714.799.000,00	12.159.585.714,00	1.158.596.920,00	11.000.988.794,00	0,00
	612513 DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	46.927.119.000,00	65.789.418.675,00	5.074.254.361,00	60.715.164.314,00	0,00
62	Transfer Dana Alokasi Umum	2.314.920.067.000,00	2.314.920.067.000,00	107.477.272,00	2.314.812.589.728,00	41.315.931.743,00
6211	Transfer Dana Alokasi Umum	2.314.920.067.000,00	2.314.920.067.000,00	107.477.272,00	2.314.812.589.728,00	41.315.931.743,00
	621111 Dana Alokasi Umum	2.314.920.067.000,00	2.314.920.067.000,00	107.477.272,00	2.314.812.589.728,00	41.315.931.743,00
63	Dana Alokasi Khusus Fisik	417.888.971.000,00	366.834.632.121,00	0,00	366.834.632.121,00	0,00
6311	Dana Alokasi Khusus Reguler	291.964.295.000,00	253.541.999.921,00	0,00	253.541.999.921,00	0,00
	631111 Dana Alokasi Khusus Reguler	291.964.295.000,00	253.541.999.921,00	0,00	253.541.999.921,00	0,00
	C04 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA yang disalurkan	76.943.236.000,00	68.938.212.274,00	0,00	68.938.212.274,00	0,00
	C05 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMK yang disalurkan	111.524.330.000,00	111.017.325.688,00	0,00	111.017.325.688,00	0,00
	C06 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SLB yang disalurkan	14.450.189.000,00	14.084.195.171,00	0,00	14.084.195.171,00	0,00
	D02 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	28.341.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D03 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Kefarmasian yang disalurkan	11.352.192.000,00	11.147.132.361,00	0,00	11.147.132.361,00	0,00
	D04 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	32.516.904.000,00	32.348.223.702,00	0,00	32.348.223.702,00	0,00
	F01 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Jalan yang disalurkan	16.836.220.000,00	16.006.910.725,00	0,00	16.006.910.725,00	0,00
6312	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	125.924.676.000,00	113.292.632.200,00	0,00	113.292.632.200,00	0,00
	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	125.924.676.000,00	113.292.632.200,00	0,00	113.292.632.200,00	0,00
	F02 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yang	21.979.119.000,00	21.134.717.496,00	0,00	21.134.717.496,00	0,00
	F03 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan DPP dan SIKM yang disalurkan	15.202.926.000,00	13.247.555.755,00	0,00	13.247.555.755,00	0,00
	F06 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang disalurkan	38.000.000.000,00	34.775.126.254,00	0,00	34.775.126.254,00	0,00
	G02 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yang	12.495.435.000,00	12.113.666.330,00	0,00	12.113.666.330,00	0,00
	G03 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yang	27.692.598.000,00	24.462.784.698,00	0,00	24.462.784.698,00	0,00
	G04 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yang	10.554.598.000,00	7.558.781.667,00	0,00	7.558.781.667,00	0,00
64	Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	3.804.141.054.000,00	3.804.141.054.000,00	0,00	3.804.141.054.000,00	0,00
6412	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	3.792.655.366.000,00	3.792.655.366.000,00	0,00	3.792.655.366.000,00	0,00
	641211 Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1.580.796.000.000,00	1.580.796.000.000,00	0,00	1.580.796.000.000,00	0,00
	641212 Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	2.211.859.366.000,00	2.211.859.366.000,00	0,00	2.211.859.366.000,00	0,00
6431	Dana Insentif Daerah	11.485.688.000,00	11.485.688.000,00	0,00	11.485.688.000,00	0,00
	643111 Dana Insentif Daerah	11.485.688.000,00	11.485.688.000,00	0,00	11.485.688.000,00	0,00
65	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	423.167.540.000,00	384.702.191.519,00	1.022.331.998,00	383.679.859.521,00	0,00
6541	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	133.116.365.000,00	117.913.760.476,00	0,00	117.913.760.476,00	0,00

	Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
			Kotor	Potongan	Bersih	
	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	116.940.577.000,00	112.027.235.580,00	0,00	112.027.235.580,00	0,00
	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	16.175.788.000,00	5.886.524.896,00	0,00	5.886.524.896,00	0,00
6542	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	6.939.000.000,00	6.939.000.000,00	0,00	6.939.000.000,00	0,00
	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	6.939.000.000,00	6.939.000.000,00	0,00	6.939.000.000,00	0,00
6543	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	272.399.130.000,00	252.291.772.043,00	0,00	252.291.772.043,00	0,00
	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	272.399.130.000,00	252.291.772.043,00	0,00	252.291.772.043,00	0,00
	001 BOS Reguler - Alokasi Bos Reguler yang disalurkan (9EI)	270.014.130.000,00	249.906.772.043,00	0,00	249.906.772.043,00	0,00
	015 BOS Kinerja - Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang disalurkan	2.385.000.000,00	2.385.000.000,00	0,00	2.385.000.000,00	0,00
6547	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.312.973.000,00	4.312.973.000,00	643.745.461,00	3.669.227.539,00	0,00
	654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan	4.312.973.000,00	4.312.973.000,00	643.745.461,00	3.669.227.539,00	0,00
	006 BOK - Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang disalurkan (9EI)	4.312.973.000,00	4.312.973.000,00	643.745.461,00	3.669.227.539,00	0,00
6548	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan	2.009.564.000,00	1.004.782.000,00	216.470.037,00	788.311.963,00	0,00
	654812 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	2.009.564.000,00	1.004.782.000,00	216.470.037,00	788.311.963,00	0,00
	008 PK2UMK - Alokasi Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil yang disalurkan (9EI)	2.009.564.000,00	1.004.782.000,00	216.470.037,00	788.311.963,00	0,00
6549	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	3.212.500.000,00	1.500.000.000,00	161.165.500,00	1.338.834.500,00	0,00
	654921 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	3.212.500.000,00	1.500.000.000,00	161.165.500,00	1.338.834.500,00	0,00
	011 Museum - Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum yang disalurkan (9EI)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	161.165.500,00	1.338.834.500,00	0,00
	016 TBudaya - Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya yang disalurkan (9EI)	1.712.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000,00	301.800.000,00	0,00	301.800.000,00	0,00
	655211 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000,00	301.800.000,00	0,00	301.800.000,00	0,00
	019 P3A - Alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan (9EI)	301.800.000,00	301.800.000,00	0,00	301.800.000,00	0,00
6553	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	876.208.000,00	438.104.000,00	951.000,00	437.153.000,00	0,00
	655311 Dana Fasilitasi Penanaman Modal	876.208.000,00	438.104.000,00	951.000,00	437.153.000,00	0,00
	020 FPM - Alokasi Dana Fasilitasi Penanaman Modal yang disalurkan (9EI)	876.208.000,00	438.104.000,00	951.000,00	437.153.000,00	0,00
	Jumlah	8.078.067.966.000,00	8.949.980.307.932,00	141.572.688.761,00	8.808.407.619.171,00	41.315.931.743,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2022)

5.1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN-LRA Rp5.004.746.236.115,00

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan TA 2022 adalah sebesar Rp5.004.746.236.115,00 atau mencapai 103,85% dari anggarannya sebesar Rp4.819.424.974.366,00 dan mempunyai kontribusi 56,81% dari total realisasi pendapatan transfer pada TA 2022 sebesar Rp8.808.887.290.115,00.

Bila dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan TA 2021 adalah sebesar Rp3.807.733.369.924,00, maka realisasi TA 2022 naik sebesar Rp1.197.012.866.191,00 atau 31,44%.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 051
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LRA
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.691.789.267.956,00	1.938.939.483.801,00	114,61	38,74	1.009.724.770.219,00
2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.314.920.067.000,00	2.314.812.589.728,00	99,99	46,25	2.314.920.067.000,00
3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	389.548.099.410,00	366.834.632.121,00	94,17	7,33	346.127.480.826,00
4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	423.167.540.000,00	384.159.530.465,00	90,78	7,68	136.961.051.879,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat-Dana Perimbangan-LRA	4.819.424.974.366,00	5.004.746.236.115,00	103,85	100,00	3.807.733.369.924,00

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp1.938.939.483.801,00

Dana Transfer Umum atau yang disebut Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan pusat yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp1.938.939.483.801,00 atau 114,61% dari anggaran perubahan APBD TA 2022 sebesar Rp1.691.789.267.956,00. Hal ini berarti realisasinya melampaui target sebesar Rp247.150.215.845,00 atau 14,61%.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 052
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil - LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	438.407.537.252,00	296.070.247.437,00	67,53	(142.337.289.815,00)	(32,47)
2 DBH PPh Pasal 21	0,00	217.160.682.325,00	0,00	217.160.682.325,00	0,00
3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	4.773.210.140,00	0,00	4.773.210.140,00	0,00
4 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	5.764.213.458,00	0,00	5.764.213.458,00	0,00
5 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	1.343.454.977.333,00	0,00	1.343.454.977.333,00	0,00
6 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	11.000.988.794,00	0,00	11.000.988.794,00	0,00
7 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	1.253.381.730.704,00	60.715.164.314,00	4,84	(1.192.666.566.390,00)	95,16
Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.691.789.267.956,00	1.938.939.483.801,00	114,61	247.150.215.845,00	14,61

Alokasi dan realisasi transfer umum – Dana Bagi hasil ke daerah oleh pemerintah pusat-Transfer Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp1.938.939.483.801,00 di atas dirinci sebagai berikut:

Tabel 053
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Bagi Hasil -LRA
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
61 Dana Bagi Hasil	1.117.950.334.000,00	2.079.382.363.292,00	140.442.879.491,00	1.938.939.483.801,00	0,00
6111 Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	186.985.175.000,00	254.734.027.135,00	32.800.134.670,00	221.933.892.465,00	0,00
611111 DBH PPh Pasal 21	184.529.934.000,00	249.657.103.884,00	32.496.421.559,00	217.160.682.325,00	0,00
DBH PPh Pasal 21, Triwulan ke-1 TA 2022		36.905.986.800,00	0,00	36.905.986.800,00	0,00
DBH PPh Pasal 21, Triwulan ke-2 TA 2022		36.905.986.800,00	0,00	36.905.986.800,00	0,00
DBH PPh Pasal 21, Triwulan ke-3 TA 2022		36.905.986.800,00	0,00	36.905.986.800,00	0,00

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
DBH PPh Pasal 21, Triwulan ke-4 TA 2022		73.811.973.600,00	0,00	73.811.973.600,00	0,00
DBH PPh Pasal 21 Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022		22.826.337.799,00	22.826.337.799,00	0,00	0,00
Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 berdasarkan KMK Nomor 29/KM.7/2022 pada, TA 2022		42.300.832.085,00	9.670.083.760,00	32.630.748.325,00	0,00
611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP	2.455.241.000,00	5.076.923.251,00	303.713.111,00	4.773.210.140,00	0,00
DBH PPh Pasal 25/29 OP, Triwulan ke-1 TA 2022		491.048.200,00	0,00	491.048.200,00	0,00
DBH PPh Pasal 25/29 OP, Triwulan ke-2 TA 2022		491.048.200,00	0,00	491.048.200,00	0,00
DBH PPh Pasal 25/29 OP, Triwulan ke-3 TA 2022		491.048.200,00	0,00	491.048.200,00	0,00
DBH PPh Pasal 25/29 OP, Triwulan ke-4 TA 2022		982.096.400,00	0,00	982.096.400,00	0,00
DBH PPh Pasal 25/29 OP Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022		303.713.111,00	303.713.111,00	0,00	0,00
Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25/29 OP berdasarkan KMK Nomor 29/KM.7/2022 pada, TA 2022		2.317.969.140,00	0,00	2.317.969.140,00	0,00
6112 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	154.654.265.000,00	315.200.967.409,00	19.130.719.972,00	296.070.247.437,00	0,00
611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	148.333.629.000,00	302.394.060.753,00	18.348.857.817,00	284.045.202.936,00	0,00
611211 DBH PBB Minyak dan Gas Bumi		16.381.721.046,00	1.803.344.046,00	14.578.377.000,00	0,00
611211 DBH PBB Non Migas Lainnya		269.717.861.832,00	15.207.311.355,00	254.510.550.477,00	0,00
611211 DBH PBB Perhutanan		5.052.078.072,00	468.917.692,00	4.583.160.380,00	0,00
611211 DBH PBB Perkebunan		9.987.734.473,00	779.697.533,00	9.208.036.940,00	0,00
611211 DBH PBB Sektor Lainnya		1.254.665.330,00	89.587.191,00	1.165.078.139,00	0,00
611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi	6.320.636.000,00	12.806.906.656,00	781.862.155,00	12.025.044.501,00	0,00
611213 DBH PBB Biaya Pemungutan DBH PBB Minyak dan Gas Bumi		682.604.999,00	75.142.999,00	607.462.000,00	0,00
611213 DBH PBB Biaya Pemungutan DBH PBB Non Migas Lainnya		11.236.492.373,00	633.620.299,00	10.602.872.074,00	0,00
611213 DBH PBB Biaya Pemungutan DBH PBB Perhutanan		280.662.666,00	26.050.089,00	254.612.577,00	0,00
611213 DBH PBB Biaya Pemungutan DBH PBB Perkebunan		554.868.262,00	43.315.876,00	511.552.386,00	0,00
611213 DBH PBB Biaya Pemungutan DBH PBB Sektor Lainnya		52.278.356,00	3.732.892,00	48.545.464,00	0,00
6123 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	718.668.976.000,00	1.431.498.364.359,00	82.279.173.568,00	1.349.219.190.791,00	0,00
612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	3.699.756.000,00	6.164.270.044,00	400.056.586,00	5.764.213.458,00	0,00
612311 DBH SDA Minerba Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		407.044.400,00	0,00	407.044.400,00	0,00
612311 DBH SDA Minerba Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		508.805.500,00	0,00	508.805.500,00	0,00
612311 DBH SDA Minerba Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		1.294.914.600,00	0,00	1.294.914.600,00	0,00
612311 DBH SDA Minerba Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		2.064.457.458,00	0,00	2.064.457.458,00	0,00
612311 DBH SDA Minerba Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		1.488.991.500,00	0,00	1.488.991.500,00	0,00
612311 DBH SDA Minerba Iuran Tetap (Non Tunai TDF)		400.056.586,00	400.056.586,00	0,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba - Royalti	714.969.220.000,00	1.425.334.094.315,00	81.879.116.982,00	1.343.454.977.333,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		74.334.653.800,00	0,00	74.334.653.800,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		92.918.317.250,00	0,00	92.918.317.250,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		250.239.227.000,00	0,00	250.239.227.000,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		224.218.864.580,00	0,00	224.218.864.580,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		297.477.021.950,00	0,00	297.477.021.950,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba Royalti (003.Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)		73.797.623.326,00	0,00	73.797.623.326,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba Royalti (003.Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)		335.038.384.003,00	4.569.114.576,00	330.469.269.427,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba Royalti (Non Tunai TDF)		77.310.002.406,00	77.310.002.406,00	0,00	0,00
6125 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	57.641.918.000,00	77.949.004.389,00	6.232.851.281,00	71.716.153.108,00	0,00
612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	10.714.799.000,00	12.159.585.714,00	1.158.596.920,00	11.000.988.794,00	0,00
612512 DBH SDA Kehutanan PSDH (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		1.604.995.950,00	0,00	1.604.995.950,00	0,00
612512 DBH SDA Kehutanan PSDH (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		1.604.995.950,00	0,00	1.604.995.950,00	0,00
612512 DBH SDA Kehutanan PSDH (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		3.750.179.650,00	0,00	3.750.179.650,00	0,00
612512 DBH SDA Kehutanan PSDH (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		3.754.627.450,00	0,00	3.754.627.450,00	0,00
612512 DBH SDA Kehutanan PSDH (003.Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)		286.189.794,00	0,00	286.189.794,00	0,00
612512 DBH SDA Kehutanan PSDH (Non Tunai TDF)		1.158.596.920,00	1.158.596.920,00	0,00	0,00

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda	
		Kotor	Potongan	Bersih		
612513	DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	46.927.119.000,00	65.789.418.675,00	5.074.254.361,00	60.715.164.314,00	0,00
	612513 DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		7.030.735.200,00	0,00	7.030.735.200,00	0,00
	612513 DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		7.030.735.200,00	0,00	7.030.735.200,00	0,00
	612513 DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		16.424.491.650,00	0,00	16.424.491.650,00	0,00
	612513 DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		16.441.156.950,00	0,00	16.441.156.950,00	0,00
	612513 DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (003.Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)		13.788.045.314,00	0,00	13.788.045.314,00	0,00
	612513 DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (Non Tunai TDF)		5.074.254.361,00	5.074.254.361,00	0,00	0,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2021)

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Rp2.314.812.589.728,00

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum Provinsi Papua TA 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 104 Tahun 2021, sebesar Rp2.314.920.067.000,00 mempunyai kontribusi sebesar 46,26% atas total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp5.004.746.236.115,00.

Tabel 054
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Dana Alokasi Umum - LRA
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda	
		Kotor	Potongan	Bersih		
62	Transfer Dana Alokasi Umum	2.314.920.067.000,00	2.314.920.067.000,00	107.477.272,00	2.314.812.589.728,00	41.315.931.743,00
6211	Transfer Dana Alokasi Umum	2.314.920.067.000,00	2.314.920.067.000,00	107.477.272,00	2.314.812.589.728,00	41.315.931.743,00
621111	Dana Alokasi Umum	2.314.920.067.000,00	2.314.920.067.000,00	107.477.272,00	2.314.812.589.728,00	41.315.931.743,00
	Bulan Januari Tahun 2022		192.909.998.000,00	0,00	192.909.998.000,00	0,00
	Bulan Februari Tahun 2022		192.909.998.000,00	0,00	192.909.998.000,00	0,00
	Bulan Maret Tahun 2022		192.909.998.000,00	0,00	192.909.998.000,00	0,00
	Bulan April Tahun 2022		192.909.998.000,00	0,00	192.909.998.000,00	0,00
	Bulan Mei Tahun 2022		192.909.998.000,00	0,00	192.909.998.000,00	0,00
	Bulan Juni Tahun 2022		182.581.015.065,00	0,00	182.581.015.065,00	10.328.982.935,00
	Susulan Bulan Juni Tahun 2022		10.328.982.935,00	0,00	10.328.982.935,00	0,00
	Bulan Juli Tahun 2022		182.581.015.065,00	0,00	182.581.015.065,00	10.328.982.935,00
	Susulan Bulan Juli Tahun 2022		10.328.982.935,00	0,00	10.328.982.935,00	0,00
	Bulan Agustus Tahun 2022		182.581.015.065,00	0,00	182.581.015.065,00	10.328.982.935,00
	Susulan Bulan Agustus Tahun 2022		10.328.982.935,00	0,00	10.328.982.935,00	0,00
	Bulan September Tahun 2022		182.581.015.062,00	0,00	182.581.015.062,00	10.328.982.938,00
	Susulan Bulan September Tahun 2022		10.328.982.938,00	0,00	10.328.982.938,00	0,00
	Bulan Oktober Tahun 2022		192.909.998.000,00	107.477.272,00	192.802.520.728,00	0,00
	Bulan November Tahun 2022		192.909.998.000,00	0,00	192.909.998.000,00	0,00
	Bulan Desember Tahun 2022		192.910.089.000,00	0,00	192.910.089.000,00	0,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2023)

Bila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2021 sebesar Rp2.314.920.067.000,00; maka realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 turun sebesar Rp107.477.272,00 atau (0,005%).

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rp366.834.632.121,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi dan penugasan.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp366.834.632.121,00 atau mencapai 94,17% dan mempunyai kontribusi sebesar 7,33% atas total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp5.004.746.236.115,00.

Tabel 055
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda	
		Kotor	Potongan	Bersih		
63	Dana Alokasi Khusus Fisik	417.888.971.000,00	366.834.632.121,00	0,00	366.834.632.121,00	0,00
6311	Dana Alokasi Khusus Reguler	291.964.295.000,00	253.541.999.921,00	0,00	253.541.999.921,00	0,00
	631111 Dana Alokasi Khusus Reguler	291.964.295.000,00	253.541.999.921,00	0,00	253.541.999.921,00	0,00
	C04 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA yang disalurkan	76.943.236.000,00	68.938.212.274,00	0,00	68.938.212.274,00	0,00
	C05 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMK yang disalurkan	111.524.330.000,00	111.017.325.688,00	0,00	111.017.325.688,00	0,00
	C06 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SLB yang disalurkan	14.450.189.000,00	14.084.195.171,00	0,00	14.084.195.171,00	0,00
	D02 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	28.341.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D03 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Kefarmasian yang disalurkan	11.352.192.000,00	11.147.132.361,00	0,00	11.147.132.361,00	0,00
	D04 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	32.516.904.000,00	32.348.223.702,00	0,00	32.348.223.702,00	0,00
	F01 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Jalan yang disalurkan	16.836.220.000,00	16.006.910.725,00	0,00	16.006.910.725,00	0,00
6312	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	125.924.676.000,00	113.292.632.200,00	0,00	113.292.632.200,00	0,00
	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	125.924.676.000,00	113.292.632.200,00	0,00	113.292.632.200,00	0,00
	F02 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yang	21.979.119.000,00	21.134.717.496,00	0,00	21.134.717.496,00	0,00
	F03 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan DPP dan SIKM yang disalurkan	15.202.926.000,00	13.247.555.755,00	0,00	13.247.555.755,00	0,00
	F06 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang disa	38.000.000.000,00	34.775.126.254,00	0,00	34.775.126.254,00	0,00
	G02 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yan	12.495.435.000,00	12.113.666.330,00	0,00	12.113.666.330,00	0,00
	G03 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan,	27.692.598.000,00	24.462.784.698,00	0,00	24.462.784.698,00	0,00
	G04 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani	10.554.598.000,00	7.558.781.667,00	0,00	7.558.781.667,00	0,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2023)

Bila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Papua TA 2021 sebesar Rp346.127.480.826,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 naik sebesar Rp20.707.151.295,00 atau 5,98%.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA Rp384.159.530.465,00

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp384.159.530.465,00 atau mencapai 90,78% dan mempunyai kontribusi sebesar 7,68% atas total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp5.004.746.236.115,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2021 sebesar Rp136.961.051.879,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022 naik sebesar Rp247.198.478.586,00 atau 180,49%.

Penyaluran dana BOS tahun 2021 sebesar Rp1.164.670.231.000,00 oleh Kementerian Keuangan langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah yang mana sebelumnya pada tahun 2019 Kementerian Keuangan transfer ke rekening kas umum daerah (RKUD).

Alokasi dan realisasi detil transfer ke daerah oleh pemerintah pusat-Transfer Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 056
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
65 Dana Alokasi Khusus Nonfisik	423.167.540.000,00	384.702.191.519,00	1.022.331.998,00	383.679.859.521,00	0,00
6541 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	133.116.365.000,00	117.913.760.476,00	0,00	117.913.760.476,00	0,00
654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	116.940.577.000,00	112.027.235.580,00	0,00	112.027.235.580,00	0,00
654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	16.175.788.000,00	5.886.524.896,00	0,00	5.886.524.896,00	0,00
6542 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	6.939.000.000,00	6.939.000.000,00	0,00	6.939.000.000,00	0,00
654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	6.939.000.000,00	6.939.000.000,00	0,00	6.939.000.000,00	0,00
6543 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	272.399.130.000,00	252.291.772.043,00	0,00	252.291.772.043,00	0,00
654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	272.399.130.000,00	252.291.772.043,00	0,00	252.291.772.043,00	0,00
001 BOS Reguler - Alokasi Bos Reguler yang disalurkan (9EI)	270.014.130.000,00	249.906.772.043,00	0,00	249.906.772.043,00	0,00
015 BOS Kinerja - Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang disalurkan	2.385.000.000,00	2.385.000.000,00	0,00	2.385.000.000,00	0,00
6547 Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.312.973.000,00	4.312.973.000,00	643.745.461,00	3.669.227.539,00	0,00
654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan	4.312.973.000,00	4.312.973.000,00	643.745.461,00	3.669.227.539,00	0,00
006 BOK - Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang disalurkan (9EI)	4.312.973.000,00	4.312.973.000,00	643.745.461,00	3.669.227.539,00	0,00
6548 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan	2.009.564.000,00	1.004.782.000,00	216.470.037,00	788.311.963,00	0,00
654812 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	2.009.564.000,00	1.004.782.000,00	216.470.037,00	788.311.963,00	0,00
008 PK2UMK - Alokasi Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil yang disalurkan (9EI)	2.009.564.000,00	1.004.782.000,00	216.470.037,00	788.311.963,00	0,00
6549 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	3.212.500.000,00	1.500.000.000,00	161.165.500,00	1.338.834.500,00	0,00
654921 Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	3.212.500.000,00	1.500.000.000,00	161.165.500,00	1.338.834.500,00	0,00
011 Museum - Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum yang disalurkan (9EI)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	161.165.500,00	1.338.834.500,00	0,00
016 TBudaya - Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya yang disalurkan (9EI)	1.712.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000,00	301.800.000,00	0,00	301.800.000,00	0,00
655211 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000,00	301.800.000,00	0,00	301.800.000,00	0,00
019 P3A - Alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan (9EI)	301.800.000,00	301.800.000,00	0,00	301.800.000,00	0,00
6553 Dana Fasilitas Penanaman Modal	876.208.000,00	438.104.000,00	951.000,00	437.153.000,00	0,00
655311 Dana Fasilitas Penanaman Modal	876.208.000,00	438.104.000,00	951.000,00	437.153.000,00	0,00
020 FPM - Alokasi Dana Fasilitas Penanaman Modal yang disalurkan (9EI)	876.208.000,00	438.104.000,00	951.000,00	437.153.000,00	0,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2023)

5.1.1.2.1.5 Dana Otonomi Khusus-LRA

Rp3.792.655.366.000,00

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Salah satu sumber penerimaan Provinsi Papua berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah sumber penerimaan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional;
- 2) Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan Infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.792.655.366.000,00 dan Rp7.911.837.607.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 057
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	1.580.796.000.000,00	1.580.796.000.000,00	100,00	41,68	5.289.079.464.000,00
2 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	2.211.859.336.000,00	2.211.859.336.000,00	100,00	58,32	2.622.758.143.000,00
Jumlah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	3.792.655.336.000,00	3.792.655.336.000,00	100,00	100,00	7.911.837.607.000,00

Tabel di atas menunjukkan pendapatan transfer Dana Otonomi khusus TA 2022 terealisasi 100,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

🏰 Dana Otonomi Khusus-LRA terealisasi 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.580.796.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.708.283.464.000,00 atau (70,11%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.289.079.464.000,00.

🏰 Dana Tambahan Infrastruktur-LRA terealisasi 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.211.859.336.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp410.898.777.000,00 atau (15,67%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.622.758.143.000,00.

Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001, maka pada tahun 2002 Pemerintah Provinsi Papua menerima Transfer Dana Otonomi Khusus untuk pertama kalinya sebesar Rp1.382.282.450.000,00 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2009 mengalami penurunan, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dimana Dana Otonomi Khusus Papua dibagi dengan Provinsi Papua Barat dan selanjutnya mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Total alokasi dan realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp104.613.494.260.550,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 058
Alokasi dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Dari Tahun 2002 s.d. Tahun 2022

(dalam Rupiah)

TAHUN	ANGGARAN	DANA OTONOMI KHUSUS	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR	TOTAL
2002-2012	33.730.917.281.550,00	28.434.488.660.550,00	5.296.428.571.000,00	33.730.917.231.550,00
2013	4.927.378.620.000,00	4.355.950.048.000,00	571.428.572.000,00	4.927.378.620.000,00
2014	6.777.070.560.000,00	4.777.070.560.000,00	2.000.000.000.000,00	6.777.070.560.000,00
2015	7.190.429.880.000,00	4.940.429.880.000,00	2.250.000.000.000,00	7.190.429.880.000,00
2016	7.382.551.859.000,00	5.395.051.859.000,00	1.987.500.000.000,00	7.382.551.859.000,00
2017	8.205.152.407.000,00	5.580.152.407.000,00	2.625.000.000.000,00	8.205.152.407.000,00
2018	8.020.854.115.000,00	5.620.854.115.000,00	2.400.000.000.000,00	8.020.854.115.000,00
2019	8.674.676.695.000,00	5.850.230.158.000,00	2.824.446.537.000,00	8.674.676.695.000,00
2020	7.999.969.920.000,00	5.288.694.844.000,00	2.711.275.076.000,00	7.999.969.920.000,00
2021	7.911.837.607.000,00	5.289.079.464.000,00	2.622.758.143.000,00	7.911.837.607.000,00
2022	3.792.655.366.000,00	1.580.796.000.000,00	2.211.859.366.000,00	3.792.655.366.000,00
2013-2022	70.882.577.029.000,00	48.678.309.335.000,00	22.204.267.694.000,00	70.882.577.029.000,00
TOTAL	104.613.494.310.550,00	77.112.797.995.550,00	27.500.696.265.000,00	104.613.494.260.550,00

5.1.1.2.1.6 Dana Insentif Daerah – LRA

Rp11.485.688.000,00

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 059
Anggaran dan Realisasi Detil Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.485.688.000,00	0,00	11.485.688.000,00	0,00
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.485.688.000,00	0,00	11.485.688.000,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp11.485.688.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021 sebesar Rp15.684.418.000,00; maka realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 turun sebesar Rp4.198.730.000,00 atau (26,77%).

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA Rp4.467.066.197,00

Pendapatan lain-lain daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan transfer pendapatan, yang termasuk hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp4.467.066.197,00 dan Rp10.978.615.793,12 dirinci sebagai berikut:

Tabel 060
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 PENDAPATAN HIBAH-LRA	0,00	4.396.650.135,00	0,00	98,42	4.038.442.024,12
2 PENDAPATAN DANA DARURAT-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 PENDAPATAN LAINNYA-LRA	0,00	70.416.062,00	0,00	1,58	6.940.173.769,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA	0,00	4.467.066.197,00	0,00	100,00	10.978.615.793,12

Tabel 060 di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.467.066.197,00 atau melebihi anggarannya sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 sebesar Rp10.978.615.793,12, maka realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2022 turun sebesar Rp6.511.549.596,12 atau (59,31%).

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA Rp4.396.650.135,00

Pendapatan hibah adalah pendapatan berupa uang atau barang/jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN/BUMD, maupun Lembaga/Badan/Organisasi lainnya.

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA TA 2022 sebesar Rp4.396.650.135,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah Daerah-LRA TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 061
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00	599.040.000,00	0,00	599.040.000,00	0,00
2 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	3.797.610.135,00	0,00	3.797.610.135,00	0,00
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	4.396.650.135,00	0,00	4.396.650.135,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan pendapatan hibah TA 2022 terealisasi melampaui target pendapatan sebesar Rp4.396.650.135,00 atau 0,00% yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi dalam Negeri sebesar Rp599.040.000,00 atau 0,00% ini merupakan penerimaan hibah dari PT. Jasa raharja dengan Naskah Perjanjian Hibah antara PT. Jasa Rahaja dan Pemerintah Provinsi Papua Nomor Pihak ke I : P/14/SP/2022 dan Nomor Pihak ke II : 900/4650/SET pada hari rabu tanggal dua puluh April tahun dua ribu dua puluh dua dan Sumbangan Pihak ke Tiga/sejenis Sebesar Rp3.797.610.135,00 atau 0,00%.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LRA Rp70.416.062,00

Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah Lainnya-LRA TA 2022 merupakan Pendapatan atas Pengembalian yang terealisasi sebesar Rp70.416.062,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp11.454.657.535.165,80

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas (a) Belanja Operasi, (b) Belanja Modal, (c) belanja tidak terduga dan (d) belanja transfer.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp11.454.657.535.165,80 dan Rp14.859.606.462.835,80 dirinci sebagai berikut:

Tabel 062
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 BELANJA OPERASI	9.729.837.877.802,00	8.578.410.637.007,17	88,17	74,89	10.758.813.679.926,00
2 BELANJA MODAL	2.192.435.355.168,00	2.029.533.805.428,66	92,57	17,72	1.116.373.579.615,73
3 BELANJA TIDAK TERDUGA	328.275.344.112,00	196.021.127.021,00	59,71	1,71	119.120.628.800,00
4 BELANJA TRANSFER	659.960.672.645,00	650.691.965.709,00	98,60	5,68	2.865.298.574.494,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	12.910.509.249.727,00	11.454.657.535.165,80	88,72	100,00	14.859.606.462.835,80

Belanja Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp11.454.657.535.165,80 atau 88,72% dari anggarannya sebesar Rp12.910.509.249.727,00. Sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp1.455.851.714.561,20 atau (11,28%).

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.404.948.927.670,00 atau (22,91%) bila dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp14.859.606.462.835,80.

Belanja Operasi mempunyai proporsi 74,89% lebih besar dibandingkan dengan proporsi Belanja Modal 17,72%, proporsi Belanja Tidak Terduga sebesar 1,71% dan proporsi belanja transfer sebesar 5,68% dari total Belanja Daerah.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah per Unit Organisasi / OPD Tahun Anggaran 2022 dapat di lihat pada **Lampiran : 03**

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan realisasi TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Rp8.578.410.637.007,17

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja Operasi dirinci atas jenis a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp8.578.410.637.007,17 dan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.758.813.679.926,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 063
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Belanja Pegawai	3.063.415.619.287,00	2.413.293.504.407,00	78,78	28,13	2.277.396.143.279,00
2 Belanja Barang dan Jasa	4.887.557.345.186,00	4.487.048.045.881,96	91,81	52,31	4.665.313.897.647,17
3 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
4 Belanja Hibah	1.725.059.365.734,00	1.634.316.326.641,84	94,74	19,05	3.695.916.305.303,00
5 Belanja Bantuan Sosial	53.805.547.595,00	43.752.760.076,37	81,32	0,51	119.937.333.696,91
Jumlah Belanja Operasi	9.729.837.877.802,00	8.578.410.637.007,17	88,17	100,00	10.758.813.679.926,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Rp2.413.293.504.407,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai dengan perjanjian kerja yang dipekerjakan oleh pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai pada TA 2022 sebesar Rp2.413.293.504.407,00 atau mencapai 78,78%. Hal ini berarti sebesar Rp650.122.114.880,00 atau 21,22% dari anggarannya sebesar Rp3.063.415.619.287,00 yang tidak terealisasi dan mempunyai Proporsi sebesar 28,13% terhadap Belanja Operasi sebesar Rp8.578.410.637.007,17.

Bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2021 sebesar Rp2.277.396.143.279,00, maka realisasi belanja pegawai pada TA 2022 naik sebesar Rp135.897.361.128,00 atau 5,97%.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 064
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.202.170.162.040,00	867.297.592.206,00	72,14	(334.872.569.834,00)	(27,86)
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.667.895.028.755,00	1.399.994.118.880,00	83,94	(267.900.909.875,00)	(16,06)
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.403.694.457,00	30.216.408.760,00	46,92	(34.187.285.697,00)	(53,08)
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	89.617.523.034,00	78.821.029.371,00	87,95	(10.796.493.663,00)	(12,05)
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	336.955.000,00	136.103.051,00	40,39	(200.851.949,00)	(59,61)
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.664.000.000,00	828.750.000,00	49,80	(835.250.000,00)	(50,20)
7 Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	36.036.886.001,00	35.999.502.139,00	99,90	(37.383.862,00)	(0,10)
8 Belanja Pegawai BOS	56.870.000,00	0,00	0,00	(56.870.000,00)	(100,00)
9 Belanja Pegawai BLUD	1.234.500.000,00	0,00	0,00	(1.234.500.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Pegawai	3.063.415.619.287,00	2.413.293.504.407,00	78,78	(650.122.114.880,00)	(21,22)

Realisasi belanja pegawai tertinggi pada belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp1.399.944.118.880,00 atau 83,94% dari anggaran sebesar Rp1.667.895.028.755,00 dan realisasi belanja Pegawai terendah pada Realisasi belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar

Rp136.103.051,00 atau 40,39% dari anggaran sebesar Rp336.955.000,00. Sedangkan untuk realisasi belanja pegawai BOS dan Belanja pegawai BLUD tidak terealisasi.

rincian belanja pegawai Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 per unit organisasi dapat dilihat pada

Lampiran: 04

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp4.487.048.045.881,96

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang dan jasa-jasa pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2022 sebesar Rp4.487.048.045.881,96 atau mencapai 91,81%. Hal ini berarti Belanja Barang dan Jasa yang tidak terealisasi sebesar Rp400.509.299.304,04 atau (8,19%) dari anggarannya. Belanja Barang dan Jasa mempunyai Proporsi 52,31% terhadap total realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp8.578.410.637.007,17.

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 065
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Belanja Barang Pakai Habis	2.807.371.393.178,00	2.668.585.544.798,73	95,06	(138.785.848.379,27)	(4,94)
2 Belanja Barang Tak Pakai Habis	782.940.000,00	780.738.400,00	99,72	(2.201.600,00)	(0,28)
3 Belanja Jasa Kantor	509.817.887.957,00	417.501.388.245,51	81,89	(92.316.499.711,49)	(18,11)
4 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.500.000.000,00	50.123.091.897,95	99,25	(376.908.102,05)	(0,75)
5 Belanja Sewa Tanah	2.112.919.700,00	1.692.000.000,00	80,08	(420.919.700,00)	(19,92)
6 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	92.369.715.185,00	78.426.425.942,00	84,90	(13.943.289.243,00)	(15,10)
7 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	52.582.850.000,00	46.881.945.348,00	89,16	(5.700.904.652,00)	(10,84)
8 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	65.650.000,00	23.650.000,00	36,02	(42.000.000,00)	(63,98)
9 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	139.170.596.696,00	120.050.369.438,13	86,26	(19.120.227.257,87)	(13,74)
10 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.700.000.000,00	3.597.298.500,00	97,22	(102.701.500,00)	(2,78)
11 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	4.000.000.000,00	3.807.776.210,79	95,19	(192.223.789,21)	(4,81)
12 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.526.935.000,00	3.953.505.000,00	87,33	(573.430.000,00)	(12,67)
13 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.899.474.000,00	44.056.875.999,00	95,99	(1.842.598.001,00)	(4,01)
14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.691.115.094,00	2.453.498.285,00	91,17	(237.616.809,00)	(8,83)
15 Belanja Pemeliharaan Tanah	12.148.425.000,00	10.311.665.688,00	84,88	(1.836.759.312,00)	(15,12)
16 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.950.884.210,00	44.610.718.388,00	93,03	(3.340.165.822,00)	(6,97)
17 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73.212.797.495,00	69.881.447.570,04	95,45	(3.331.349.924,96)	(4,55)
18 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.254.828.346,00	96.352.845.610,67	88,19	(12.901.982.735,33)	(11,81)
19 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.941.053.000,00	11.861.437.422,39	85,08	(2.079.615.577,61)	(14,92)
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	517.775.699.650,00	457.407.163.093,00	88,34	(60.368.536.557,00)	(11,66)
21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	18.479.959.485,00	15.884.415.458,00	85,95	(2.595.544.027,00)	(14,05)
22 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	704.000.000,00	701.500.000,00	99,64	(2.500.000,00)	(0,36)
23 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.245.120.000,00	5.877.870.000,00	94,12	(367.250.000,00)	(5,88)
24 Belanja Penunjang Otonomi Khusus	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00
25 Belanja Barang dan Jasa BOS	272.399.130.123,00	254.517.734.086,00	93,44	(17.487.076.037,00)	(6,56)
26 Belanja Barang dan Jasa BLUD	96.853.971.067,00	74.312.820.500,75	76,73	(22.541.150.566,25)	(23,27)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	4.887.557.345.186,00	4.487.048.045.881,96	91,81	(400.509.299.304,04)	(8,19)

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp4.665.313.897.647,17, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp178.265.851.765,21 atau (3,82%).

Rincian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 per unit organisasi dapat dilihat pada **Lampiran: 04**

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi Rp0,00

Belanja subsidi merupakan anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada pabrikan dengan maksud membantu biaya produksi supaya harga jual terjangkau oleh masyarakat. Anggaran ini terutama untuk "Public Service Obligation" yang harga jualnya diintervensi oleh pemerintah.

Realisasi belanja subsidi Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggarannya. Belanja subsidi mempunyai Proporsi 0,00% terhadap total realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Rp1.634.316.326.641,84

Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp1.634.316.326.641,84 dan Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp3.695.916.305.303,00.

Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 066
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.375.000.000,00	1.224.300.000,00	89,04	(150.700.000,00)	(10,96)
2 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
3 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	940.901.227.000,00	927.419.815.308,00	98,57	(13.481.411.692,00)	(1,43)
4 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.275.000.000,00	20.272.400.873,02	77,15	(6.002.599.126,98)	(22,85)
5 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	747.797.567.534,00	678.926.206.460,82	90,79	(68.871.361.073,18)	(9,21)
6 Belanja Hibah kepada Koperasi	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00	0,00	0,00
7 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.910.571.200,00	3.773.604.000,00	63,84	(2.136.967.200,00)	(36,16)
Jumlah Belanja Hibah	1.725.059.365.734,00	1.634.316.326.641,84	94,74	(90.743.039.092,16)	(5,26)

Realisasi belanja hibah pada TA 2022 sebesar Rp1.634.316.326.641,84 atau mencapai 94,74%. Hal ini berarti tidak terealisasi sebesar Rp90.743.039.092,16 atau (5,26%) dari anggarannya sebesar Rp1.725.059.365.734,00. Belanja hibah mempunyai Proporsi 19,05% terhadap total realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp8.578.410.637.007,17.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah pada TA 2021 sebesar Rp3.695.916.305.303,00, maka realisasi Belanja Hibah pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.061.599.978.661,16 atau (55,78%).

Pelaporan realisasi belanja hibah sampai dengan akhir TA 2022 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi Papua bertanggung-jawab mulai dari verifikasi usulan calon penerima hibah sampai dengan hibah tersebut dicairkan kepada penerimanya dengan dilengkapi bukti-bukti yang sah. Sedangkan

sesuai ketentuan Pasal 19, penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta menyimpan bukti-bukti penggunaan hibah sebagai obyek pemeriksaan.

5.1.2.1.5 Bantuan Sosial Rp43.752.760.076,37

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.

Realisasi belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp43.752.760.076,37 atau mencapai 81,32%. Hal ini berarti sebesar Rp10.052.787.518,63 atau (18,68%) dari anggarannya sebesar Rp53.805.547.595,00 yang tidak terealisasi. Belanja Bantuan Sosial mempunyai Proporsi 0,51% terhadap total realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp8.578.410.637.007,17.

Bila dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial pada TA 2021 sebesar Rp119.937.333.696,91 maka realisasi belanja bantuan sosial pada TA 2022 turun sebesar Rp76.184.573.620,54 atau (63,52%).

Anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 067
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
		(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	32.995.317.000,00	25.987.319.875,00	78,76	(7.007.997.125,00)	(21,24)
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	480.000.000,00	480.000.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.818.515.595,00	3.618.500.000,00	94,76	(200.015.595,00)	(5,24)
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	16.511.715.000,00	13.666.940.201,37	82,77	(2.844.774.798,63)	(17,23)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		53.805.547.595,00	43.752.760.076,37	81,32	(10.052.787.518,63)	(18,68)

Pelaporan belanja bantuan sosial Pemerintah Provinsi Papua telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450).

Rincian Belanja Operasi menurut sub unit organisasi/OPD TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran: 04**.

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp2.029.533.805.428,66

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 sebesar Rp2.029.533.805.428,66, atau mencapai 92,57%. Hal ini berarti sebesar Rp162.901.549.739,34, atau (7,43%) dari anggarannya sebesar Rp2.192.435.355.168,00 yang tidak terealisasi. Belanja Modal mempunyai proporsi 17,72% terhadap total realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp11.454.657.535.165,80.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Unit Organisasi / OPD Tahun Anggaran 2022 dapat di lihat pada **Lampiran : 05**

Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 dan realisasi TA 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 068
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Belanja Modal Tanah	26.100.000.000,00	25.000.000.000,00	95,79	1,23	51.383.998.445,89
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.867.650.551,00	236.086.848.452,50	93,36	11,63	202.131.678.407,72
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.122.081.473.128,00	1.054.570.476.959,30	93,98	51,96	666.090.072.105,71
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	786.882.181.489,00	709.924.786.398,86	90,22	34,98	193.212.822.156,41
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.056.850.000,00	2.504.767.568,00	81,94	0,12	1.207.512.500,00
6 Belanja Modal Aset Lainnya	1.447.200.000,00	1.446.926.050,00	99,98	0,07	2.347.496.000,00
Jumlah Belanja Modal	2.192.435.355.168,00	2.029.533.805.428,66	92,57	100,00	1.116.373.579.615,73

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada TA 2021 sebesar Rp1.116.373.579.615,73, maka realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp913.160.225.812,93 atau 81,80%.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Tanah Rp25.000.000.000,00

Belanja Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Realisasi Belanja Modal tanah pada TA 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00, atau mencapai 95,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.100.000.000,00. Hal ini berarti sebesar Rp1.100.000.000,00, atau (4,21%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal tanah mempunyai proporsi 1,23% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp2.029.533.805.428,66.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tanah pada TA 2021 sebesar Rp51.383.998.445,89, maka realisasi Belanja Modal tanah turun sebesar Rp26.383.998.445,89, atau (51,35%) pada TA 2022.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal tanah Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 069
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Belanja Modal Tanah Persil	26.100.000.000,00	25.000.000.000,00	95,79	(1.100.000.000,00)	(4,21)
Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	26.100.000.000,00	25.000.000.000,00	95,79	(1.100.000.000,00)	(4,21)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah	26.100.000.000,00	25.000.000.000,00	95,79	(1.100.000.000,00)	(4,21)

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Rp236.086.848.452,50

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan biaya yang dikeluarkan berdasarkan harga perolehan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2022 sebesar Rp236.086.848.452,50, atau mencapai 93,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.867.650.551,00. Hal ini berarti sebesar Rp16.780.802.098,50 atau (6,64%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal peralatan dan mesin mempunyai proporsi 11,63% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp2.029.533.805.428,66.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 070
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Belanja Modal Alat Besar	1.096.111.175,00	570.739.294,25	52,07	(525.371.880,75)	(47,93)
2 Belanja Modal Alat Angkutan	21.554.222.250,00	18.176.411.888,00	84,33	(3.377.810.362,00)	(15,67)
3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.528.363.000,00	3.356.575.605,75	95,13	(171.787.394,25)	(4,87)
4 Belanja Modal Alat Pertanian	2.196.597.500,00	2.107.274.561,00	95,93	(89.322.939,00)	(4,07)
5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.276.788.412,00	61.684.622.979,29	89,04	(7.592.165.432,71)	(10,96)
6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.874.800.000,00	2.818.074.280,00	98,03	(56.725.720,00)	(1,97)
7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	67.260.421.247,00	64.507.859.229,45	95,91	(2.752.562.017,55)	(4,09)
8 Belanja Modal Alat Laboratorium	57.355.064.660,00	57.085.717.903,00	99,53	(269.346.757,00)	(0,47)
9 Belanja Modal Komputer	21.461.284.305,00	20.352.236.136,82	94,83	(1.109.048.168,18)	(5,17)
10 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	470.000.000,00	433.789.809,94	92,30	(36.210.190,06)	(7,70)
11 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	100.598.750,00	91.276.250,00	90,73	(9.322.500,00)	(9,27)
12 Belanja Modal Rambu-Rambu	5.693.399.252,00	4.902.270.515,00	86,10	(791.128.737,00)	(13,90)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.446.539.376,00	236.086.848.452,50	93,36	(16.780.802.098,50)	(6,65)

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2022 sebesar Rp236.086.848.452,50, atau mencapai 93,36% ini bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2021 sebesar Rp202.131.678.407,72, maka realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin naik sebesar Rp33.955.170.044,78 atau 16,80% pada TA 2022.

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Rp1.054.570.476.959,30

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini terdiri dari biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya konstruksi.

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2022 sebesar Rp1.054.570.476.959,30 atau mencapai 93,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.122.081.473.128,00. Hal ini berarti sebesar Rp67.510.996.168,70, atau (6,02%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal gedung dan bangunan mempunyai proporsi 51,96% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp2.029.533.805.428,66.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 071
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	Lebih/(Kurang)	
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)		Rp.	%
1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.111.015.171.948,00	1.044.651.301.529,32	94,03	(66.363.870.418,68)	(5,97)
2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.030.000.000,00	2.018.495.148,22	99,43	(11.504.851,78)	(0,57)
3 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	9.036.301.180,00	7.900.680.281,76	87,43	(1.135.620.898,24)	(12,57)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.122.081.473.128,00	1.054.570.476.959,30	93,98	(67.510.996.168,70)	(6,02)

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2022 sebesar Rp1.054.570.476.959,30, atau mencapai 93,98%. bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2021 sebesar Rp666.090.072.105,71, maka realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2022 naik sebesar Rp388.480.404.853,59 atau 58,32%.

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp709.924.786.398,86

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini terdiri dari biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya konstruksi.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2022 sebesar Rp709.924.786.398,86 atau mencapai 90,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp786.882.181.489,00. Hal ini berarti sebesar Rp76.957.395.090,14, atau (9,78%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan mempunyai proporsi 34,98% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp2.029.533.805.428,66.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 072
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022 (Pergub No.55/2022)	REALISASI 2022 (Audited)	%	Lebih/(Kurang)	
				Rp.	%
1 Belanja Modal Jalan	691.422.215.805,00	636.786.823.405,07	92,10	(54.635.392.399,93)	(7,90)
2 Belanja Modal Jembatan	69.434.762.866,00	48.809.379.526,91	70,30	(20.625.383.339,09)	(29,70)
3 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	644.000.000,00	640.438.726,73	99,45	(3.561.273,27)	(0,55)
4 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	14.291.163.451,00	13.629.574.113,79	95,37	(661.589.337,21)	(4,63)
5 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.400.000.000,00	1.999.235.930,36	83,30	(400.764.069,64)	(16,70)
6 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	165.000.000,00	164.145.801,00	99,48	(854.199,00)	(0,52)
7 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,00	0,00
8 Belanja Modal Instalasi Lain	5.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
9 Belanja Modal Jaringan Listrik	8.502.539.367,00	7.877.688.895,00	92,65	(624.850.472,00)	(7,35)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	786.882.181.489,00	709.924.786.398,86	90,22	(76.957.395.090,14)	(9,78)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2022 sebesar Rp709.924.786.398,86 atau mencapai 90,22% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2021 sebesar Rp193.212.822.156,41, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan naik sebesar Rp516.711.964.242,45, atau 267,43% pada TA 2022.

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Rp2.504.767.568,00

Belanja Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2022 sebesar Rp2.504.767.568,00 atau mencapai 81,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.056.850.000,00. Hal ini berarti sebesar Rp552.082.432,00 atau (18,06%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mempunyai Proporsi 0,07% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp2.029.533.805.428,66.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 073
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022 (Pergub No.55/2022)	REALISASI 2022 (Audited)	%	Lebih/(Kurang)	
				Rp.	%
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	633.750.000,00	629.092.500,00	99,27	(4.657.500,00)	(0,73)
2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	386.600.000,00	381.600.000,00	98,71	(5.000.000,00)	(1,29)
3 Belanja Modal Hewan	994.000.000,00	989.266.318,00	99,52	(4.733.682,00)	(0,48)
4 Belanja Modal Tanaman	506.000.000,00	504.808.750,00	99,76	(1.191.250,00)	(0,24)
5 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	536.500.000,00	0,00	0,00	(536.500.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.056.850.000,00	2.504.767.568,00	81,94	(552.082.432,00)	(18,06)

5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya Rp1.446.926.050,00

Belanja Modal aset lainnya merupakan Belanja Modal yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam Belanja Modal tanah, peralatan mesin, jalan, jaringan dan irigasi serta Belanja Modal bangunan dan Gedung. Belanja Modal Aset Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memperoleh Aset Lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2022 sebesar Rp1.446.926.050,00 atau mencapai 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.447.200.000,00. Hal ini berarti sebesar Rp273.950,00 atau (0,02%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal Aset Lainnya mempunyai Proporsi 0,07% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp2.029.533.805.428,66.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA Rp196.021.127.021,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga Rp196.021.127.021,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga pemerintah provinsi papua dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Nomor 24 tahun 2013 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2022 sebesar Rp196.021.127.021,00 atau 59,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp328.275.344.112,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2021 sebesar Rp119.120.628.800,00, maka realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2022 naik sebesar Rp76.900.498.221,00 atau 64,56%.

**Tabel 074
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Belanja Tidak Terduga	328.275.344.112,00	196.021.127.021,00	59,71	100,00	119.120.628.800,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	328.275.344.112,00	196.021.127.021,00	59,71	100,00	119.120.628.800,00

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER Rp650.691.965.709,00

Transfer yang dimaksud adalah bagian dari Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada kabupaten/kota se-Provinsi Papua, termasuk Transfer Bagi Hasil Pendapatan kepada Kabupaten/Kota dan Transfer Bantuan Keuangan.

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Papua kepada kabupaten/kota se-Provinsi Papua TA 2022 dan TA 2021 terealisasi masing-masing sebesar Rp650.691.965.709,00 dan sebesar Rp2.865.298.574.494,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 075
Anggaran dan Realisasi Transfer Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022
dan Realisasi Tahun Anggaran 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 BELANJA TRANSFER	659.960.672.645,00	650.691.965.709,00	98,60	100,00	2.865.298.574.494,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER-LRA	659.960.672.645,00	650.691.965.709,00	98,60	100,00	2.865.298.574.494,00

5.1.2.4.1 BELANJA TRANSFER BAGI HASIL Rp650.691.965.709,00

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota TA 2022 sebesar Rp650.691.965.709,00 atau 98,60% dari anggarannya dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp814.343.316.031,00, maka realisasi pada TA 2022 turun sebesar negatif Rp163.651.350.322,00 atau (20,10%).

Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota Provinsi Papua TA 2022 dan Realisasi TA 2021 di rinci sebagai berikut:

Tabel 076
Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	659.960.672.645,00	650.691.965.709,00	98,60	100,00	814.343.316.031,00
2 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pajak	659.960.672.645,00	650.691.965.709,00	98,60	100,00	814.343.316.031,00

5.1.2.4.2 BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Rp0,00

Transfer Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.050.955.258.463,00, maka realisasi pada TA 2022 turun sebesar Rp2.050.955.258.463,00 atau (100,00%).

Realisasi belanja bantuan keuangan TA 2022 dan 2021 masing-masing dirinci sebagai berikut:

Tabel 077
Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.955.258.463,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.955.258.463,00

5.1.3 SURPLUS/DEFISIT (Rp414.548.523.926,47)

Surplus/(Defisit) timbul sehubungan dengan selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 078
Surplus/(Defisit) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK/(TURUN)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 PENDAPATAN-LRA	11.040.109.011.239,40	13.885.923.486.851,30	(2.845.814.475.611,80)	(20,49)
2 BELANJA	11.454.657.535.16,80	14.859.606.462.835,80	(3.404.948.927.670,00)	(22,91)
SURPLUS/(DEFISIT)	(414.548.523.926,47)	(973.682.975.984,52)	559.134.452.058,20	(57,42)

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah-LRA selama TA 2022 sebesar Rp11.040.109.011.239,40 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp11.454.657.535.165,80 maka Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 mengalami Defisit anggaran sebesar Rp414.548.523.926,50.

5.1.4 PEMBIAYAAN NETO Rp2.209.401.510.206,04

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Provinsi Papua.

Pembiayaan Netto pada TA 2021 sebesar Rp2.903.008.564.518,56 mengalami penurunan sebesar Rp693.607.054.312,52 atau (23,89%) menjadi sebesar Rp2.209.401.510.206,04 pada TA 2022.

Pembiayaan Neto pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 079
Pembiayaan Neto Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK/(TURUN)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.229.401.510.206,04	3.023.008.564.518,56	(793.607.054.312,52)	(26,25)
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	120.000.000.000,00	(100.000.000.000,00)	(83,33)
PEMBIAYAAN NETO	2.209.401.510.206,04	2.903.008.564.518,56	(693.607.054.312,52)	(23,89)

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp2.229.401.510.206,04

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan TA 2022 sebesar Rp2.229,401,510,206,04 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 080
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	<i>(Pergub No.55/2022)</i>	<i>(Audited)</i>	Anggaran	Kontribusi	<i>(Audited)</i>
1 Penggunaan SiLPA	1.865.721.315.300,00	1.929.248.255.479,04	103,40	86,54	3.023.008.564.518,56
2 Pencairan Dana Cadangan	300.000.000.000,00	300.153.254.727,00	100,05	13,46	0,00
3 Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	2.165.721.315.300,00	2.229.401.510.206,04	102,94	100,00	3.023.008.564.518,56

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA Rp1.929.248.255.479,04

Penggunaan SiLPA TA 2022 sebesar Rp1.929.248.255.479,04 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp3.023.008.564.518,56.

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan Rp300.153.254.727,00

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 melakukan pencairan dana Cadangan sebesar Rp300.153.254.727,00 atau 100,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000.000,00.

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp20.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada TA 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan TA 2021 sebesar Rp120.000.000.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 081
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase (%)		REALISASI 2021
	(Pergub No.55/2022)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	100,00	0,00
3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000.000,00
4 Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	100,00	120.000.000.000,00

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan Rp0,00

Pemerintah Provinsi Papua, pada Tahun Anggaran 2022 melakukan pembentukan dana cadangan sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

5.1.4.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp20.000.000.000,00

Pembayaran Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Provinsi Papua pada Pembayaran Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Provinsi Papua pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tahun 2021 dengan SP2D Nomor: 10397/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/12-2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00.

5.1.4.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp0,00

Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 tidak terdapat Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri atau nihil

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp1.794.852.986.279,57

Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu **NIHIL** karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. SILPA merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 082
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Provinsi Papua
TA 2022 dan Realisasi TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK/(TURUN)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 SURPLUS/(DEFISIT)	(414.548.523.926,47)	(973.682.975.984,52)	559.134.452.058,02	(57,42)
2 PEMBIAYAAN NETTO	2.209.401.510.206,04	2.903.008.564.518,56	(693.607.054.312,52)	(23,89)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.794.852.986.279,57	1.929.325.588.534,04	1.252.741.506.370,54	64,93

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sampai dengan tutup TA 2022 sebesar Rp1.794.852.986.279,57 merupakan akumulasi SiLPA sampai dengan 31 Desember 2022. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.929.325.588.534,04 merupakan akumulasi SILPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp1.794.852.986.279,54 dirinci sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.768.953.115.230,74, terdiri dari:

- a. PAD sebesar Rp27.890.134.807,36
- b. RKUD sebesar Rp812.945.099.149,11
- c. OTSUS sebesar Rp179.504.913.446,31
- d. OTSUS 1% sebesar Rp365.497.545.082,19
- e. OTSUS 1,25% sebesar Rp158.064.226.172,42

- f. OTSUS DTI sebesar Rp225.051.196.573,35
2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.084.402.201,00, terdiri dari:
- a. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.070.028.510,00
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua sebesar Rp14.373.691,00
3. Kas di BLUD sebesar Rp22.779.956.117,83, terdiri dari:
- c. RSUD Jayapura sebesar Rp1.168.604.598,190
 - d. RSUD Abepura sebesar Rp21.611.351.519,64
4. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.035.512.730,00

5.2 **Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.

Laporan perubahan SAL Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 menyajikan secara komparatif dengan periode TA 2021 pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SiLPA), Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih akhir sebagai berikut:

5.2.1 **SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL Rp1.929.325.588.534,04**

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 adalah akumulasi SiLPA TA 2021 atau diperoleh dari saldo anggaran lebih akhir periode pelaporan pada tahun anggaran sebelumnya dan periode tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 sebesar Rp1.929.325.588.534,04 merupakan akumulasi SiLPA TA 2021 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 083
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2022

URAIAN			<i>(dalam Rupiah)</i>
			JUMLAH
1	SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN ANGGARAN 2021		(973.682.975.984,52)
	a.	PENDAPATAN-LRA	13.885.923.486.851,29
	b.	BELANJA	14.859.606.462.835,81
2	PEMBIAYAAN NETTO TAHUN ANGGARAN 2021		2.903.008.564.518,56
	a.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.023.008.564.518,56
	b.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	120.000.000.000,00
3	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL TAHUN 2022		1.929.325.588.534,04

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 sebesar Rp1.929.325.588.534,04 terdiri dari SURPLUS/(DEFISIT) TA 2021 sebesar negatif Rp973.682.975.984,52 dan Pembiayaan Netto TA 2021 sebesar Rp2.903.008.564.518,56.

5.2.2 **PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp1.929.248.255.479,04 TAHUN BERJALAN**

Penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Papua sebagai penerimaan pembiayaan TA 2022 sebesar Rp1.929.248.255.479,04 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.023.008.564.518,56.

Nilai Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.794.852.986.279,57; terdiri dari (1).Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp1.929.325.588.534,04; dan (2). Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar negatif Rp77.333.055,00.

5.2.3 **SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp1.794.852.986.279,57 (SiLPA/SiKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA tahun 2022 adalah sebesar Rp1.794.852.986.279,57 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 084
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		JUMLAH
1	SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN ANGGARAN 2022	(414.548.523.926,47)
	a. PENDAPATAN DAERAH	11.040.109.011.239,40
	b. BELANJA DAERAH	11.454.657.535.165,80
2	PEMBIAYAAN NETTO TAHUN ANGGARAN 2022	2.209.401.510.206,04
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.229.401.510.206,04
	b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
3	SALDO LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2022	1.794.852.986.279,57

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.794.852.986.279,57 terdiri dari SURPLUS/(DEFISIT) Tahun Anggaran 2022 sebesar negatif Rp414.548.523.926,47 dan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.209.401.510.206,04.

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp77.333.055,00)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, terkait dengan kesalahan pencatatan akun, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat koreksi kesalahan pembukuan sebesar negatif Rp77.333.055,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.211.849.778,00.

5.2.5 KOREKSI ATAS UANG MUKA PENGADAAN Rp0,00

Baik pada TA 2022 maupun pada TA 2021 tidak terdapat koreksi atas Uang Muka Pengadaan atau NIHIL.

5.2.6 KOREKSI ATAS KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA Rp0,00

Koreksi atas Kas yang dibatasi Penggunaannya baik pada TA 2022 maupun pada TA 2021 sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

5.2.7 KOREKSI ATAS KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Rp0,00

Selama periode tahun 2022 tidak terdapat koreksi atas Kas di Bendahara Pengeluaran, demikian pula pada TA 2021 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan sebesar atau NIHIL.

5.2.8 LAIN-LAIN Rp0,00

Koreksi Lain-lain pada TA 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp0,00 atau NIHIL

5.2.9 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR TAHUN 2022 Rp1.794.852.986.279,57

Saldo Anggaran Lebih akhir diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi koreksi pembukuan Saldo Anggaran Lebih dan dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih 1 (satu) periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.794.852.986.279,57 dan TA 2021 adalah sebesar Rp1.929.325.588.534,04.

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022. Posisi keuangan adalah posisi tentang Aset, Kewajiban, dan ekuitas.

Penjelasan atas pos-pos Neraca Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

5.3.1 ASET Rp23.612.100.674.504,90

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai Aset Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.612.100.674.504,90 atau mengalami kenaikan sebesar Rp387.226.620.643,90 atau 1,67% dibandingkan dengan Nilai Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.224.874.053.861,00.

Nilai Aset Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2021 dan 2022 dirinci sebagai berikut.

Tabel 085
Aset Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Jumlah	(%)
1 ASET LANCAR	3.270.108.797.026,79	3.684.767.307.757,44	(414.658.510.730,65)	(11,25)
2 INVESTASI JANGKA PANJANG	1.261.587.449.344,36	1.284.352.401.090,36	(22.764.951.746,00)	(1,77)
3 ASET TETAP	17.922.725.953.178,30	17.056.594.753.432,80	866.131.199.745,50	5,08
4 DANA CADANGAN	918.567.915.952,00	1.174.797.615.936,00	(256.229.699.984,00)	(21,81)
5 ASET LAINNYA	239.110.559.003,44	24.361.975.644,39	214.748.583.359,05	881,49
JUMLAH ASET	23.612.100.674.504,90	23.224.874.053.861,00	387.226.620.643,90	1,67

5.3.1.1 ASET LANCAR Rp3.270.108.797.026,79

Aset lancar adalah Aset yang berbentuk uang tunai maupun aktiva lainnya yang dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp414.658.510.730,65 atau (11,25%) dari semula sebesar Rp3.684.767.307.757,44 per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp3.270.108.797.026,79 per tanggal 31 Desember 2022.

Rincian Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 086
Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Jumlah	(%)
1 Kas di Kas Daerah	1.768.953.115.230,74	1.860.233.147.857,34	(91.280.032.626,60)	(4,91)
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	1.084.402.201,00	1.234.650.558,00	(150.248.357,00)	(12,17)
3 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	40.855.109.267,30	(40.855.109.267,30)	(100,00)
4 Kas di BLUD	22.779.956.117,83	22.749.163.967,40	30.792.150,43	0,14
5 Kas di Bendahara BOS	2.035.512.730,00	4.253.516.884,00	(2.218.004.154,00)	(52,15)
6 Kas Lainnya	32.467.726,00	161.462.829,00	(128.995.103,00)	(79,89)
7 Piutang Pajak (Netto)	75.227.500,00	186.224.800,00	(110.997.300,00)	(59,60)
8 Piutang Retribusi (Netto)	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00
9 Belanja Dibayar Dimuka	1.308.161.509,60	219.952.775,03	1.088.208.734,57	494,75
10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Piutang Lainnya (Netto)	35.999.782.251,84	28.635.175.940,80	7.364.606.311,04	25,72
13 Persediaan	1.437.839.613.759,78	1.726.238.344.878,57	(288.398.731.118,79)	(16,71)
JUMLAH ASET LANCAR	3.270.108.797.026,79	3.684.767.307.757,44	(414.658.510.730,65)	(11,25)

5.3.1.1.1

Kas di Kas Daerah

Rp1.768.953.115.230,74

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Papua yang berada di Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua yaitu Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Bank Mandiri Cabang Jayapura, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jayapura dan Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Jayapura.

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.768.953.115.230,74 atau mengalami penurunan sebesar Rp91.280.032.626,60 atau (4,91%) dibandingkan dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.860.233.147.857,34.

Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 087
Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Rekening		Saldo Per 01 Januari 2022	Per 31 Desember 2022		Selisih
	No Rekening	Nama Rekening		Buku Pembantu Kas Daerah	Rekening Koran	
1	BANK PAPUA					
	100.21.10.02.010800,001	PT BANK PAPUA – PAD	30.390.297.767,99	27.890.134.807,36	27.890.134.807,36	0,00
	100.21.10.02.065770,006	PT BANK PAPUA – RKUD	472.020.857.263,89	0,00	0,00	0,00
	100.21.10.02.009990,009	PT BANK PAPUA – OTSUS	179.504.913.446,31	0,00	0,00	0,00
	100.01.02.121222	PT BANK PAPUA – RKUD - 222		321.851.856.013,00	321.851.856.013,00	0,00
2	BANK MANDIRI JAYAPURA					
	1540017238464	PT BANK MANDIRI (RKUD)	169.983.447.542,22	670.598.131.582,42	670.447.222.351,42	150.909.231,00
	1540007430691	PT BANK MANDIRI (GIRO)	482.762.022.060,93	0,00	0,00	0,00
	1540018040323	PT BANK MANDIRI (OTSUS 1 %)	0,00	365.497.545.082,19	365.497.545.082,19	0,00
	1540018040224	PT BANK MANDIRI (OTSUS 1,25 %)	0,00	158.064.226.172,42	158.064.226.172,42	0,00
	1540018040331	PT BANK MANDIRI (OTSUS DTI)	0,00	225.051.196.573,35	225.051.196.573,35	0,00
3	BANK BRI JAYAPURA					
	0307.01.001876.30.5	PT. BRI 30.5 (GIRO)	414.639.402.267,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4	BANK BNI JAYAPURA					
	355645173	PT. BNI 173 (GIRO)	110.932.207.509,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L		1.860.233.147.857,34	1.768.953.115.230,74	1.768.802.180.999,74	150.934.231,00

Sesuai dengan Lampiran I.03 PSAP – 02 yang menyebutkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Terdapat selisih antara rekening Buku Pembantu Kas terhadap Rekening Koran senilai Rp150.934.231,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Selisih antara Buku Pembantu Kas RKUD terhadap Rekening Koran Bank Mandiri RKUD senilai Rp150.909.231,00 adalah sebagai berikut:

- Selisih pemotongan biaya SKN BI atas retur SP2D no. 01472/SP2D/5-07.0-00.1.0.0/LS/06-2022 senilai Rp2.900 dan retur SP2D no 01472/SP2D/5-07.0-00.1.0.0/LS/06-2022 senilai Rp2.900, atas selisih tersebut telah dilakukan koreksi dengan keterangan koreksi biaya SKN pada tanggal 23 Februari 2023.
- Selisih atas double pendebitan rekening RKUD Pemerintah Provinsi Papua dengan Nomor SP2D 10424/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/12-2022 dikarenakan time out system SKN Bank Indonesia, atas selisih tersebut telah dilakukan koreksi pengembalian dana pada tanggal 11 Januari 2023.
- Selisih kurang pengembalian potongan pajak atas retur SP2D no. 02750/SP2D/2-19.0-00.0-00.1.1/2022 senilai Rp903.431,00, atas selisih tersebut telah dilakukan pengembalian pada rekening Pemerintah Provinsi Papua nomor 1000102121222 pada tanggal 08 Maret 2023.

b. Selisih antara Buku Pembantu Kas Giro BRI senilai Rp25.000,00 merupakan biaya menutupan rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua, atas selisih pada tanggal 20 Februari 2023

tersebut telah dilakukan pengembalian ke rekening Pemerintah Provinsi Papua dengan nomor rekening Bank Papua 1000102121222 atas nama RKUD Provinsi Papua.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1.084.402.201,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Papua yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022, yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) serta pemungutan pajak atas pembayaran belanja yang dilakukan dengan menggunakan uang berasal dari UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 088
Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Jumlah	(%)
1	Kas Pengelolaan UP	1.084.402.201,00	1.234.650.558,00	(150.248.357,00)	(12,17)
2	Kas Pengelolaan TU	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		1.084.402.201,00	1.234.650.558,00	(150.248.357,00)	(12,17)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.084.402.201,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp150.248.357,00 atau (12,17%) dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.234.650.558,00. Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 yang berasal dari pengelolaan UP/TU dan telah disetorkan seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.084.402.201,00 terdapat pada 2 (dua) OPD.

Rincian lebih lanjut Kas di Bendahara Pengeluaran menurut Sub Unit Organisasi/OPD dapat dilihat pada **Lampiran : 07** dan **Lampiran : 08**.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas atas penerimaan daerah yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 089
Kas di Bendahara Penerimaan Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Jumlah	(%)
1	RSUD Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RSUD Abepura	0,00	40.855.109.267,30	(40.855.109.267,30)	(100,00)
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	40.855.109.267,30	(40.855.109.267,30)	(100,00)

5.3.1.1.4 Kas di BLUD Rp22.779.956.117,83

Kas di BLUD adalah Saldo Kas per 31 Desember yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.779.956.117,83 dirinci sebagai berikut:

Tabel 090
Kas di BLUD RSUD Jayapura
per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	KETERANGAN	REKENING		SALDO PER 31 Desember 2022	SALDO PER 31 Desember 2021
		NOMOR REKENING	NAMA REKENING		
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA			1.168.604.598,19	22.749.163.967,40
1	BANK PAPUA	1.000.102.029.724,00	BLUD RSUD Jayapura	1.152.478.873,40	22.740.878.467,40
2	BANK PAPUA	1.000.202.103.632,00	Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	KAS TUNAI			16.125.724,79	8.285.500,00
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA			21.611.351.519,64	0,00
1	BANK PAPUA	1.000.102.029.724,00	BLUD RSUD Abepura	21.360.669.970,72	0,00
2	BANK MANDIRI	1.540.005.347.541,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	250.681.548,92	0,00
3	KAS TUNAI			0,00	0,00
	TOTAL			22.779.956.117,83	22.749.163.967,40

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Rp2.035.512.730,00

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa Dana BOS Satdikmen negeri di Provinsi Papua yang terdiri dari 139 SMA Negeri dan 80 SMK Negeri serta Satdiksus negeri di Provinsi Papua yang terdiri dari 7 SLB Negeri.

Pada TA 2022 terdapat 140 SMA Negeri dan 80 SMK Negeri yang telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 ialah saldo akhir per 31 Desember 2022 berdasarkan Laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS adalah sebesar Rp2.035.512.730,00

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Rp32.467.726,00

Kas Lainnya merupakan saldo Hutang PFK yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran non BLUD PER 31 Desember 2022 yang berada pada Rumah Sakit Jiwa Abepura senilai Rp3.581.600,00 dan pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp28.886.126,00.

Seluruh saldo Kas Lainnya telah disetorkan ke Ditjen Pajak pada Semester 1 (satu) Tahun 2023.

5.3.1.1.7 Piutang Pajak

Rp1.709.883.101,00

Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Piutang Pajak Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.709.883.101,00 dan Rp1.746.400.601,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 091
Piutang Pajak Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1 Piutang PKB	1.654.208.401,00	1.690.725.901,00
Piutang s.d Tahun 2013	652.462.400,00	654.776.100,00
Piutang s.d Tahun 2014	172.672.700,00	174.925.100,00
Piutang Tahun 2015	254.161.801,00	256.477.301,00
Piutang Tahun 2016	303.435.500,00	306.710.400,00
Piutang Tahun 2017	27.608.000,00	34.489.000,00
Piutang Tahun 2018	116.438.000,00	118.018.000,00
Piutang Tahun 2019	89.055.000,00	90.571.000,00
Piutang Tahun 2021	38.375.000,00	54.759.000,00
Piutang Tahun 2022	0,00	0,00
2 Piutang BBN-KB	55.674.700,00	55.674.700,00
Piutang s.d Tahun 2013	54.294.800,00	54.294.800,00
Piutang s.d Tahun 2014	0,00	0,00
Piutang Tahun 2015	412.500,00	412.500,00
Piutang Tahun 2016	967.400,00	967.400,00
3 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00

Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
	Piutang Tahun 2020	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	0,00
	Piutang Pajak Air Permukaan PT Freeport	0,00	0,00
	Piutang Tahun 2017	0,00	0,00
	Piutang Tahun 2018	0,00	0,00
	Piutang Tahun 2019	0,00	0,00
	Piutang Pajak Air Permukaan Pabrik	0,00	0,00
	Piutang Tahun 2019	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak		1.709.883.101,00	1.746.400.601,00

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.654.208.401,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan piutang yang diakui atas pajak yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Adapun SKP/SKPT yang telah ditetapkan mulai dari tahun 2013-2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 092
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Piutang PKB S/D Tahun 2013	652.462.400,00	654.776.100,00
2	Piutang PKB Tahun 2014	172.672.700,00	174.925.100,00
3	Piutang PKB Tahun 2015	254.161.801,00	256.477.301,00
4	Piutang PKB Tahun 2016	303.435.500,00	306.710.400,00
5	Piutang PKB Tahun 2017	27.608.000,00	34.489.000,00
6	Piutang PKB Tahun 2018	116.438.000,00	118.018.000,00
7	Piutang PKB Tahun 2019	89.055.000,00	90.571.000,00
8	Piutang PKB Tahun 2021	38.375.000,00	54.759.000,00
9	Piutang PKB Tahun 2022	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		1.654.208.401,00	1.690.725.901,00

Saldo piutang pajak kendaraan bermotor tahun 2022 terdiri dari Piutang PKB sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp652.462.400,00, Piutang PKB tahun 2014 sebesar Rp172.672.700,00, Piutang PKB tahun 2015 sebesar Rp254.161.801,00, Piutang PKB tahun 2016 sebesar Rp303.435.500,00, Piutang PKB Tahun 2017 sebesar Rp27.608.000,00, Piutang PKB Tahun 2018 sebesar Rp116.438.000,00, Piutang PKB tahun 2019 sebesar Rp89.055.000,00 dan Piutang PKB tahun 2021 sebesar Rp38.375.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp0,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 093
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2022
1	UPTB JAYAPURA	0,00
2	UPTB NABIRE	0,00
3	UPTB TIMIKA	0,00
4	UPTB SENTANI	0,00
5	UPTB KEEROM	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022		0,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp38.375.000,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 094
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2021	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2021
1	UPTB JAYAPURA	31.429.000,00	7.289.000,00	24.140.000,00
2	UPTB NABIRE	3.205.000,00	2.405.000,00	800.000,00
3	UPTB TIMIKA	15.342.000,00	5.139.000,00	10.203.000,00
4	UPTB SENTANI	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
5	UPTB KEEROM	2.973.000,00	1.551.000,00	1.422.000,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021		54.759.000,00	16.384.000,00	38.375.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019 sebesar Rp89.055.000,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 095
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2019	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2019
1	UPTB JAYAPURA	34.001.000,00	1.516.000,00	32.485.000,00
2	UPTB NABIRE	0,00	0,00	0,00
3	UPTB TIMIKA	48.964.000,00	0,00	48.964.000,00
4	UPTB SENTANI	7.368.000,00	0,00	7.368.000,00
5	UPTB KEEROM	238.000,00	0,00	238.000,00
6	UPTB JAYAPURA	0,00	0,00	0,00
7	UPTB NABIRE	0,00	0,00	0,00
8	UPTB TIMIKA	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019		90.571.000,00	1.516.000,00	89.055.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 sebesar Rp116.438.000,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 096
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2018	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2018
1	UPTB JAYAPURA	7.039.000,00	1.580.000,00	5.459.000,00
2	UPTB NABIRE	15.575.000,00	0,00	15.575.000,00
3	UPTB TIMIKA	51.110.000,00	0,00	51.110.000,00
4	UPTB SENTANI	32.982.000,00	0,00	32.982.000,00
5	UPTB KEEROM	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
6	UPTB JAYAPURA	7.622.000,00	0,00	7.622.000,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018		118.018.000,00	1.580.000,00	116.438.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017 sebesar Rp27.608.000,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 097
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2017	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2017
1	UPTB JAYAPURA	22.957.000,00	6.881.000,00	16.076.000,00
2	UPTB MERAUKE	8.754.000,00	0,00	8.754.000,00
3	UPTB NABIRE	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017		34.489.000,00	6.881.000,00	27.608.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 sebesar Rp303.435.500,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 098
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2016	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2016
1	UPPD JAYAPURA	177.100.400,00	3.274.900,00	173.825.500,00
2	UPPD SENTANI	49.427.100,00	0,00	49.427.100,00
3	UPPD MERAUKE	29.037.700,00	0,00	29.037.700,00
4	UPPD BIAK	2.363.000,00	0,00	2.363.000,00
5	UPPD NABIRE	46.811.500,00	0,00	46.811.500,00
6	UPPD KEEROM	1.970.700,00	0,00	1.970.700,00
7	UPPD PANIAI	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016		306.710.400,00	3.274.900,00	303.435.500,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015 sebesar Rp254.161.801,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 099
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2015

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2015	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2015
1	UPPD JAYAPURA	174.859.301,00	2.315.500,00	172.543.801,00
2	UPPD SERUI	1.920.300,00	0,00	1.920.300,00
3	UPPD SENTANI	12.053.000,00	0,00	12.053.000,00
4	UPPD MERAUKE	27.130.300,00	0,00	27.130.300,00
5	UPPD BOVEN DIGOEL	1.747.400,00	0,00	1.747.400,00
6	UPPD MAPPI	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
7	UPPD BIAK	683.100,00	0,00	683.100,00
8	UPPD NABIRE	36.928.900,00	0,00	36.928.900,00
9	UPPD SUPIORI	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015		256.477.301,00	2.315.500,00	254.161.801,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014 sebesar Rp172.672.700,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 100
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2014

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2014	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2014
1	UPPD JAYAPURA	91.184.500,00	2.252.400,00	88.932.100,00
2	UPPD BIAK	5.310.300,00	0,00	5.310.300,00
3	UPPD NABIRE	15.603.000,00	0,00	15.603.000,00
4	UPPD TIMIKA	14.210.000,00	0,00	14.210.000,00
5	UPPD WAMENA	1.670.700,00	0,00	1.670.700,00
6	UPPD MERAUKE	39.589.800,00	0,00	39.589.800,00
7	UPPD SENTANI	7.219.000,00	0,00	7.219.000,00
8	UPPD KEEROM	0,00	0,00	0,00
9	UPPD MAPPI	0,00	0,00	0,00
10	UPPD SUPIORI	137.800,00	0,00	137.800,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014		174.925.100,00	2.252.400,00	172.672.700,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013 sebesar Rp652.462.400,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 101
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2013

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2013	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2013
1	UPPD JAYAPURA	89.425.100,00	2.313.700,00	87.111.400,00
2	UPPD BIAK	27.228.800,00	0,00	27.228.800,00
3	UPPD SERUI	14.473.400,00	0,00	14.473.400,00
4	UPPD NABIRE	22.447.800,00	0,00	22.447.800,00
5	UPPD TIMIKA	350.573.900,00	0,00	350.573.900,00
6	UPPD MERAUKE	118.339.500,00	0,00	118.339.500,00
7	UPPD SENTANI	30.118.200,00	0,00	30.118.200,00
8	UPPD KEEROM	1.382.200,00	0,00	1.382.200,00
9	UPPD MAPPI	511.400,00	0,00	511.400,00
10	UPPD SUPIORI	275.800,00	0,00	275.800,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013		654.776.100,00	2.313.700,00	652.462.400,00

Beberapa langkah yang telah diupayakan oleh Bapenda untuk menagih piutang pajak di atas antara lain melalui turun langsung ke lapangan menemui wajib pajak. Kendala utama yang dihadapi Bapenda saat turun lapangan antara lain alamat tidak jelas, pindah alamat, kendaraan hilang, kendaraan ditarik dealer, atau kendaraan rusak total.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp55.674.700,00

Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan piutang yang diakui atas pajak yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Adapun SKP/SKPT yang telah ditetapkan mulai dari tahun 2013-2022, dirinci sebagai berikut:

Tabel 102
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	PIUTANG PAJAK BBNKB S/D TAHUN 2013	54.294.800,00	54.294.800,00
2	PIUTANG PAJAK BBNKB TAHUN 2015	412.500,00	412.500,00
3	PIUTANG PAJAK BBNKB TAHUN 2016	967.400,00	967.400,00
Saldo Piutang Pajak BBNKB		55.674.700,00	55.674.700,00

Saldo Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2022 terdiri dari Piutang Pajak BBNKB sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp54.294.800,00, Piutang Pajak BBNKB tahun 2015 sebesar Rp412.500,00, dan Piutang Pajak BBNKB tahun 2016 sebesar Rp967.400,00.

Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 sebesar Rp967.400,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 103
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2016	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2016
1	UPPD JAYAPURA	286.300,00	0,00	286.300,00
2	UPPD MERAUKE	0,00	0,00	0,00
3	UPPD NABIRE	681.100,00	0,00	681.100,00
4	UPPD PANIAI	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak BBN-KB Tahun 2016		967.400,00	0,00	967.400,00

Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015

Piutang Pajak BBNKB tahun 2015 sebesar Rp412.500,00 berdasarkan UPPD/ Samsat dirinci sebagai berikut:

Tabel 104
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2015	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2015
1	UPPD JAYAPURA	303.500,00	0,00	303.500,00
2	UPPD MERAUKE	109.000,00	0,00	109.000,00
Saldo Piutang Pajak BBN-KB Tahun 2015		412.500,00	0,00	412.500,00

Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013

Piutang Pajak BBNKB tahun 2013 sebesar Rp54.294.800,00 berdasarkan UPPD/ Samsat dirinci sebagai berikut:

Tabel 105
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2013	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2013
1	UPPD NABIRE	3.830.300,00	0,00	3.830.300,00
2	UPPD TIMIKA	46.898.100,00	0,00	46.898.100,00
3	UPPD MERAUKE	3.459.400,00	0,00	3.459.400,00
4	UPPD SENTANI	107.000,00	0,00	107.000,00
5	UPPD MAPPI	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak BBN-KB Tahun 2013		54.294.800,00	0,00	54.294.800,00

3. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp0,00

Saldo piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

4. Piutang Pajak Air Permukaan Rp0,00

Piutang Pajak Air Permukaan merupakan piutang yang diakui atas pajak yang sudah ada ketetapannya (SKPD) namun belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan pada Putusan pembayaran lunas tahun 2021, maka Piutang Pajak Air Permukaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

5.3.1.1.7.1 Penyisihan Piutang Pajak (Rp1.634.655.601,00)

Penyisihan Piutang dimaksudkan agar Aset berupa piutang di neraca dapat terjaga nilainya atau nilai yang diharapkan sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan penyisihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kualitas piutang sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya Jatuh tempo piutang dan Upaya penagihan.

Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan;
- d. Kualitas macet.

Penentuan kualitas piutang untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Transfer antar Pemerintahan, dan Piutang Jaminan Kesehatan dikategorikan dalam :

- a. Kualitas piutang lancar apabila piutang dimaksud belum jatuh tempo;
- b. Kualitas piutang kurang lancar apabila piutang dimaksud belum dilunasi lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun sejak jatuh tempo;
- c. Kualitas piutang diragukan apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun sejak jatuh tempo; dan

- d. Kualitas piutang macet apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sejak jatuh tempo.

Penentuan kualitas piutang untuk Piutang Lain-lain berupa Piutang Penjualan Kendaraan Dinas dan Piutang Penjualan Rumah Dinas dikategorikan dalam :

- kualitas piutang lancar apabila piutang dimaksud belum jatuh tempo;
- kualitas piutang kurang lancar apabila piutang dimaksud belum dilunasi lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun sejak jatuh tempo;
- kualitas piutang diragukan apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun sejak jatuh tempo; dan
- kualitas piutang macet apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 5 tahun sejak jatuh tempo.

Kepala SKPD wajib membentuk Penyisihan Piutang tidak tertagih terhadap piutang yang dikelola oleh SKPD yang dipimpinnya. Penyisihan Piutang tidak tertagih untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Transfer antar Pemerintahan, dan Piutang Jaminan Kesehatan ditetapkan sebesar :

- 20% (dua puluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang tidak tertagih untuk Piutang Lain-lain ditetapkan sebesar :

- 10% (dua puluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 40% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.

Tabel 106
Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Papua
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2022
		KURANG LANCAR (1 s/d 2 thn) 20%	DIRAGUKAN (>2 s/d 3 thn) 50%	MACET (> 3 thn) 100%		
2013	706.757.200,00	0,00	0,00	706.757.200,00	706.757.200,00	0,00
2014	172.672.700,00	0,00	0,00	172.672.700,00	172.672.700,00	0,00
2015	254.574.301,00	0,00	0,00	254.574.301,00	254.574.301,00	0,00
2016	304.402.900,00	0,00	0,00	304.402.900,00	304.402.900,00	0,00
2017	27.608.000,00	0,00	0,00	27.608.000,00	27.608.000,00	0,00
2018	116.438.000,00	0,00	0,00	116.438.000,00	116.438.000,00	0,00
2019	89.055.000,00	0,00	44.527.500,00	0,00	44.527.500,00	44.527.500,00
2021	38.375.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00	7.675.000,00	30.700.000,00
Jml	1.709.883.101,00	7.675.000,00	44.527.500,00	1.582.453.101,00	1.634.655.601,00	75.227.500,00

Berdasarkan penetapan Penyisihan Piutang tidak tertagih yang telah dijelaskan di atas, maka yang disajikan dalam Penyisihan Piutang adalah dari kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Perhitungan Penyisihan Piutang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan secara total per objek pajak, belum dilakukan perhitungan per masing-masing wajib pajak per masa pajak. Perhitungan dilakukan di BPKAD, tidak dilakukan OPD.

Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor**(Rp1.578.980.901,00)**

Tabel 107
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2022
		KURANG LANCAR (1 s/d 2 thn) 20%	DIRAGUKAN (>2 s/d 3 thn) 50%	MACET (> 3 thn) 100%		
2013	652.462.400,00	0,00	0,00	652.462.400,00	652.462.400,00	0,00
2014	172.672.700,00	0,00	0,00	172.672.700,00	172.672.700,00	0,00
2015	254.161.801,00	0,00	0,00	254.161.801,00	254.161.801,00	0,00
2016	303.435.500,00	0,00	0,00	303.435.500,00	303.435.500,00	0,00
2017	27.608.000,00	0,00	0,00	27.608.000,00	27.608.000,00	0,00
2018	116.438.000,00	0,00	0,00	116.438.000,00	116.438.000,00	0,00
2019	89.055.000,00	0,00	44.527.500,00	0,00	44.527.500,00	44.527.500,00
2021	38.375.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00	7.675.000,00	30.700.000,00
Jml	1.654.208.401,00	7.675.000,00	44.527.500,00	1.526.778.401,00	1.578.980.901,00	75.227.500,00

Piutang ini masih terus diupayakan penagihannya pada wajib pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui mekanisme penagihan langsung atas piutang tersebut namun ditemui hal-hal sebagai berikut: alamat tidak jelas, pindah alamat, bukan milik, lapor jual, rusak, hilang, tarikan dealer, nomor polisi ganda. Kedepannya Dispenda akan melakukan inventarisasi atas piutang-piutang yang ada di masing-masing UPPD/ Samsat sehingga atas piutang yang tak tertagih, dapat diajukan penghapusan piutang pajak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 168.

Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**(Rp55.674.700,00)**

Tabel 108
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2022
		KURANG LANCAR (1 s/d 2 thn) 20%	DIRAGUKAN (>2 s/d 3 thn) 50%	MACET (> 3 thn) 100%		
2013	54.294.800,00	0,00	0,00	54.294.800,00	54.294.800,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00
2016	967.400,00	0,00	0,00	967.400,00	967.400,00	0,00
Jml	55.674.700,00	0,00	0,00	55.674.700,00	55.674.700,00	0,00

Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan**(Rp0,00)**

Berdasarkan pada Putusan pembayaran lunas Pajak Air Permukaan tahun 2021, maka Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

Tabel 109
Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan PT FREEPORT
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2022
		KURANG LANCAR (1 s/d 2 thn) 20%	DIRAGUKAN (>2 s/d 3 thn) 50%	MACET (> 3 thn) 100%		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.8**Piutang Retribusi****Rp558.000,00**

Piutang BPJS Kesehatan merupakan piutang yang timbul dari klaim yang telah disetujui oleh Verifikator BPJS atas kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang bersumber dari dana Jaminan Sosial yang belum dibayarkan oleh BPJS.

Saldo piutang BPJS pada RSUD Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp558.000,00 dan sebesar Rp558.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110
Piutang Retribusi/BPJS Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Piutang BPJS RSUD Abepura	0,00	0,00
2	Piutang BPJS RSJ Abepura	558.000,00	558.000,00
Saldo Piutang Retribusi		558.000,00	558.000,00

Saldo Piutang BPJS pada Rumah Sakit Jiwa Abepura merupakan Pendapatan atas kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2021.

5.3.1.1.9 Belanja Dibayar Dimuka Rp1.308.161.509,60

Berdasarkan PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Belanja Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai bagian Aset Lancar. Pada tahun 2020 Belanja Dibayar Dimuka adalah Sewa Dibayar Dimuka atas pemanfaatan fasilitas/Aset pihak lain oleh Pemerintah daerah Provinsi Papua.

Saldo Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.308.161.509,60 merupakan pembayaran sewa rumah jabatan dan jasa berlangganan, yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 111
Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

NO	OPD	KETERANGAN	RINCIAN PEMBAYARAN 2022				
			Nilai Kontrak	TANGGAL DIMULAI	TANGGAL BERAKHIR	Beban Periode	Beban Dibayar Dimuka
						31 Desember 2022	Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6a = (3*(5-4)*(6-4)	5 (3 - 6a)	
SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR							
1	Dinas Perhubungan	Penggunaan 4 (empat) gedung/bangunan milik CV. Bintang Mas sebagai Kantor Sementara Dinas Perhubungan Provinsi Papua	6.000.000.000,00	24-Jan-2022	23-Jan-2023	5.620.879.120,88	379.120.879,12
2	Biro Hukum	Pekerjaan Sewa Menyewa Gedung Ruko (Biro Hukum Sekretariat Daerah)	180.000.000,00	25-Agu-2022	24-Agu-2023	63.296.703,30	116.703.296,70
		Pekerjaan Sewa Menyewa Gedung Ruko (Biro Hukum Sekretariat Daerah)	180.000.000,00	25-Agu-2022	24-Agu-2023	63.296.703,30	116.703.296,70
SEWA BANGUNAN GUDANG							
	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pembayaran Sewa Ruko Selama 1 (satu) Tahun (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	70.000.000,00	4-Feb-2022	4-Feb-2023	63.287.671,23	6.712.328,77
SEWA ASRAMA							
1	Biro Umum dan Protokol	Pembayaran sewa bangunan/rumah untuk asrama mahasiswa di Bali (Biro Umum)	139.150.000,00	8-Nov-2022	8-Nov-2023	20.205.342,47	118.944.657,53
		Pembayaran sewa bangunan/rumah untuk asrama mahasiswa di Bali (Biro Umum)	102.850.000,00	8-Nov-2022	8-Nov-2023	14.934.383,56	87.915.616,44
		Pembayaran sewa bangunan/rumah untuk asrama mahasiswa di Makasar (Biro Umum)	237.837.838,00	1-Mei-2022	31-Mei-2023	146.917.550,56	90.920.287,44
		Pembayaran sewa bangunan/rumah untuk asrama mahasiswa di Batam (Biro Umum)	160.000.000,00	17-Nov-2022	17-Nov-2024	9.630.642,95	150.369.357,05
		Pembayaran sewa bangunan/rumah untuk asrama mahasiswa di Batam (Biro Umum)	80.000.000,00	17-Nov-2022	17-Nov-2023	9.643.835,62	70.356.164,38
SEWA RUMAH TIDAK BERSUSUN							
1	Dinas Olah Raga dan Pemuda	Sewa Rumah di Perumahan Pemda III No. C11 Kotaraja, Jayapura (Dinas Pemuda dan Olahraga)	100.000.000,00	21-Mar-2022	20-Mar-2023	78.296.703,30	21.703.296,70
2	Inspektorat	Sewa Rummah Jabatan/ Rumah Dinas Kepala Inspektorat Provinsi Papua	85.000.000,00	16-Agu-2022	16-Agu-2023	31.904.109,59	53.095.890,41
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Sewa Rumah Dinas Jabatan Eselon II Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	100.000.000,00	15-Des-2022	15-Des-2023	4.383.561,64	95.616.438,36
TOTAL			7.434.837.838,00			6.126.676.328,40	1.308.161.509,60

5.3.1.1.10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,00

Bagian Lancar Piutang Penjualan Angsuran merupakan piutang penjualan angsuran rumah dinas dan piutang penjualan angsuran kendaraan dinas yang telah jatuh tempo melalui mekanisme dan pengaturannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tagihan penjualan angsuran rumah dinas yang belum lunas, dan telah melewati batas jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dipindahkan ke dalam akun Aset Lain-lain.

5.3.1.1.11 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pihak ketiga (rekanan dan anggota DPRD) sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan Piutang ganti rugi berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Pengukuran Piutang disajikan sebagai Aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun yang berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya:

5.3.1.1.11.1 Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi (Rp0,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi yang perlu dilakukan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022, yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 112
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2022
		KURANG LANCAR (1 s/d 2 thn) 20%	DIRAGUKAN (>2 s/d 3 thn) 50%	MACET (> 3 thn) 100%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.12 Piutang Lainnya Rp35.999.782.251,84

Piutang lainnya terdiri dari Piutang Deposito, Piutang Kelebihan Transfer, dan Piutang atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 113
Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Piutang Deposito	3.972.141.729,19	3.162.705.718,80
2	Piutang Kelebihan Transfer DBH	0,00	378.236.602,00
3	Piutang atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran	0,00	94.233.620,00
4	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	10.101.784.094,96	25.000.000.000,00
5	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.144.187.626,04	0,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	6.491.015.537,00	
7	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	12.290.653.264,66	0,00
Saldo Piutang Lainnya		35.999.782.251,84	28.635.175.940,80

1. Piutang Deposito Rp3.972.141.729,19

Piutang Deposito adalah perhitungan atas bunga deposito per 31 Desember 2022 yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua dan dibayarkan di sesuai dengan tanggal jatuh tempo deposito.

Perhitungan Piutang Deposito sebesar Rp3.972.141.729,19 terdiri dari Piutang Deposito pada Bank Papua, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114
Piutang Deposito Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

NO	BANK/ NOMOR REKENING	NILAI SALDO AKHIR TAHUN 2021	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Bunga	Periode Bunga (per 31 - Des -2022)	Bunga Deposito yang sudah bisa diakui menjadi hak (Piutang Pendapatan)
I	RKUD					
1	BANK MANDIRI JAYAPURA					
	15402-044476158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154-020-451-7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 1	0,00				0,00
2	BANK BRI JAYAPURA					
	0307-01-004445-40-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0307-01-004941-40-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0307-01-005159-40-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2	0,00				0,00
3	BNI JAYAPURA					
	789.826.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 3	0,00				0,00
4	BANK PAPUA					
	1.003.301.003.671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 4	0,00				0,00
	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4)	0,00				0,00
II	Dana Cadangan					
1	BANK PAPUA					
	1000302001016	458.455.328.086,00	4,25%	3 bulan	3.363.052.440,96	3.363.052.440,96
	1000301005955	459.333.864.054,00	4,40%	1 bulan	609.089.288,23	609.089.288,23
	Total	917.789.192.140,00				3.972.141.729,19
	Total	917.789.192.140,00				3.972.141.729,19
	Grand Total (I+II)	917.789.192.140,00				3.972.141.729,19

2. Piutang Kelebihan Transfer

Rp0,00

Piutang Kelebihan Transfer merupakan piutang yang timbul dari kelebihan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Adapun kelebihan transfer DBH ini timbul karena jumlah bagi hasil pajak yang ditransfer lebih besar daripada jumlah yang seharusnya ditransfer.

Saldo Piutang Kelebihan Transfer per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp378.236.602,00 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 115
Piutang Kelebihan Transfer DBH Pajak Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	60.566.887,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	292.958.763,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan	0,00	17.450.326,00
5	Pajak Rokok	0,00	7.260.626,00
	Saldo Piutang Kelebihan Transfer	0,00	378.236.602,00

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui terdapat kelebihan transfer kepada Kabupaten/Kota yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 116
Piutang Lebih Transfer DBH Ke Kabupaten/Kota
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	KABUPATEN/KOTA	PIUTANG PKB	PIUTANG BBNKB	PIUTANG PAP	PIUTANG PBBKB	PAJAK ROKOK
1	KOTA JAYAPURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KAB. BIAK NUMFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KAB. YAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KAB. NABIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KAB. MIMIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KAB. JAYAWIJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KAB. MERAUKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KAB. JAYAPURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KAB. SARMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KAB. PUNCAK JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KAB. PANIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KAB. BOVEN DIGUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	KAB. KEEROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	KABUPATEN/KOTA	PIUTANG PKB	PIUTANG BBNKB	PIUTANG PAP	PIUTANG PBBKB	PAJAK ROKOK
14	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	KAB. YAHUKIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KAB. TOLIKARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KAB. ASMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KAB. MAPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KAB. WAROPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	KAB. SUPIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KAB. MAMBERAMO RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KAB. LANNY JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KAB. MAMBERAMO TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	KAB. NDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	KAB. YALIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KAB. DEIYAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	KAB. INTAN JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	KAB. DOGIYAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	KAB. PUNCAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelebihan transfer DBH sebesar Rp0,00 tersebut disajikan dalam neraca di Pos Piutang Lainnya pada bagian Aset Lancar, hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 6 Tentang Akuntansi Piutang Bab V Piutang Transfer Antar Pemerintah dimana disebutkan bahwa secara spesifik piutang yang timbul karena kelebihan transfer tersebut dalam neraca dikelompokkan dalam pos piutang lainnya.



3. Piutang atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Rp0,00

Piutang atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran diakui akibat adanya kelebihan pembayaran hutang Pengadaan Peti Jenazah dan Asesoris Tahun 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sesuai nomor kontrak 602,1/1933,2/KPS/PJA/RSU/JPR/10/2020 senilai Rp233.566.380, berdasarkan SP2D No. 2599/SP2D-LS/1.02.02.01/2021 hutang tersebut dibayarkan senilai Rp327.800.000, piutang tersebut telah dihapuskan sesuai dengan surat pernyataan nomor 800/345.1 tanggal 21 Februari 2023.



4. Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Rp10.101.784.094,96

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 masing - masing senilai Rp10.101.784.094,96 dan Rp25.000.000.000,00 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Tambahan uang muka tahun 2022 senilai Rp10.101.784.094,96 ialah sebagai berikut:

-  Pembayaran Uang Muka atas oleh pada Dinas Perhubungan untuk Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Ninia di Kabupaten Yahukimo dengan total Nilai pekerjaan fisik Rp828.457.721,00;
-  Kekurangan volume atas pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp9.273.326.373,96.

b. Pengurang Uang Muka Tahun 2021 senilai Rp25.000.000.000,00 adalah sebagai berikut:

-  Uang muka Tanah yang akan diserahkan ke masyarakat untuk keperluan relokasi bencana banjir senilai Rp20.000.000.000,00 dengan total harga Rp80.000.000.000,00, yang telah diakui sebagai Aset Tanah senilai Rp20.000.000.000;
-  Uang muka Tanah untuk pembangunan Gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp5.000.000.000,00 atas total harga Rp26.250.000.000,00, yang telah dilunasi melalui SP2D no. 06372/SP2D/1-03.1-04.2-10.1.1.0/LS/11-2022 senilai Rp21.000.000.000,00.

5. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp3.144.187.626,04

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp2.793.731.626,04 dengan rincian sebagai berikut:

- 🏛️ Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan total nilai Rp20.625.000,00;
- 🏛️ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total nilai Rp3.025.045.626,04;
- 🏛️ Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total nilai Rp98.517.000,00.

6. Piutang Pendapatan BLUD Rp6.491.015.537,00

Piutang pendapatan BLUD ialah Piutang yang timbul akibat klaim pendapatan pelayanan Kesehatan masyarakat pada RSUD Jayapura BLUD, nilai Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2022 adalah Rp6.491.015.537,00.

7. Piutang Konsolidasi Penyelesaian Sengketa Pajak Air Permukaan Rp0,00

Piutang Konsolidasi Penyelesaian Sengketa merupakan piutang dari kesepakatan untuk penggantian biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua akibat sengketa Pajak Air Permukaan yang akan ditanggung oleh PT Freeport Indonesia sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama antara PT Freeport dengan Pemerintah Provinsi Papua tentang Penyelesaian Pembayaran Pajak Air Permukaan PT Freeport Indonesia Nomor JK19000072-001-000-000 dan 973/10068/SET sebesar Rp71.100.211.233,00 dan telah dilunasi pada tahun 2021.

Penyisihan Piutang Konsolidasi Sengketa PAP (Rp0,00)

Perhitungan Penyisihan Piutang Konsolidasi Penyelesaian Sengketa PAP per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 117
Piutang Konsolidasi Penyelesaian Sengketa PAP
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2021
		KURANG LANCAR (1 s/d 3 thn) 10%	DIRAGUKAN (>3 s/d 5 thn) 40%	MACET (> 5 thn) 100%		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Rp12.290.653.264,66

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya terdiri dari Piutang atas kelebihan pembayaran paket pekerjaan Tahun 2022 yang telah disetorkan pada tahun 2023 dan Saldo Remunerasi Bulan Desember 2022 TDF-TKD sesuai dengan Nota Dinas dari Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 masing-masing senilai Rp12.260.045.034,00 dan Rp30.608.230,66.

5.3.1.1.13 Persediaan Rp1.437.839.613.759,78

Persediaan menurut PSAP Nomor 5 adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 118
Persediaan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Bahan Kimia	19.478.237,00	15.640.000,00
2	Bahan/Bibit Tanaman	2.468.058.548,00	569.872.500,00
3	Bahan Lainnya	1.626.116.037,00	402.073.284,00
4	Suku Cadang Alat Kedokteran	10.476.619.245,44	11.932.410.868,00
5	Suku Cadang Alat Laboratorium	4.525.335.610,40	3.086.165.897,40

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
6	Alat Tulis Kantor	4.716.991.996,50	5.416.464.889,00
7	Bahan Cetak	3.258.251.775,00	4.379.440.499,00
8	Perabot Kantor	0,00	0,00
9	Alat Listrik	5.794.000,00	8.333.510,00
10	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.115.587.538,00	169.355.467.894,27
11	Obat	14.400.168.916,36	30.789.549.926,89
12	Obat-obatan Lainnya	5.895.017.887,00	11.142.500.622,56
13	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.363.792.554.657,76	1.454.312.503.780,93
14	Persediaan Campuran Lainnya	5.438.539.699,52	8.578.743.169,00
15	Komponen Jembatan Baja	9.411.030.955,70	9.411.030.955,70
16	Komponen Peralatan - Tiang Pancang	10.690.068.656,10	16.838.147.081,82
TOTAL PERSEDIAAN		1.437.839.613.759,78	1.726.238.344.878,57

Saldo persediaan Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.437.839.613.759,78. Saldo persediaan tersebut dihitung dengan menggunakan metode fisik sesuai Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Persediaan.

Penilaian Persediaan yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi adalah dengan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir dengan pencatatan metode periodik, dalam metode ini, fungsi akuntansi secara tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi penilaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Saldo persediaan sebesar Rp1.437.839.613.759,78 bersumber dari hasil Rekonsiliasi Inspektorat bersama OPD yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik persediaan per 31 Desember 2022.

Rincian lebih lanjut Persediaan menurut OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran : 09**.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp1.261.587.449.344,36

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

5.3.1.2.1 Investasi Nonpermanen Rp36.395.781.663,00

Nilai Investasi Nonpermanen (Pinjaman Jangka Panjang) adalah:

- Kas Tunai 2006 – 2009	Rp21.376.649.706,00
- Belanja yang langsung dibiayai Pemprov	<u>Rp15.019.131.957,00</u>
Jumlah	Rp36.395.781.663,00

Nilai Aset Tetap yang dipinjamkan Pemda ke PT TV Mandiri Papua tidak dicatat sebagai bagian Pinjaman Jangka Panjang karena masih tercatat di Neraca Provinsi Papua dan belum ada berita acara serah terima Aset dari Pemerintah Provinsi Papua kepada PT TV Mandiri Papua.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Rp1.225.191.667.681,36

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Pemerintah Provinsi Papua memiliki 7 (tujuh) investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp1.225.191.667.681,36

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua dalam Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah menggambarkan jumlah yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Provinsi Papua melakukan penilaian dan penyajian penyertaan modal dengan menggunakan dua metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.

Metode penilaian dan penyajian penyertaan modal adalah sebagai berikut:

1. Metode Biaya, digunakan untuk kondisi:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20%;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
2. Metode Ekuitas, digunakan untuk kondisi:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50%.

Besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain adalah:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat / pertemuan dewan direksi.

Saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 119
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021	METODE
		(Audited)	(Audited)	
1	PT. Bank Papua	815.198.447.584,41	837.163.399.330,41	Ekuitas
2	PDAM Kabupaten Jayapura	15.457.858.550,00	15.457.858.550,00	Biaya
3	PD Irian Bakti	127.512.455.274,92	127.712.455.274,92	Ekuitas
4	PT. TV Mandiri Papua	0,00	0,00	Ekuitas
5	PT. Irian Bhakti Mandiri	193.760.304.507,70	193.760.304.507,70	Ekuitas
6	PT. Asuransi Bangun Askrida	25.000.000,00	25.000.000,00	Biaya
7	PT. Jaminan Kredit Daerah Papua	73.237.601.764,33	73.837.601.764,33	Ekuitas
TOTAL PENYERTAAN MODAL		1.225.191.667.681,36	1.247.956.619.427,36	

a. PT Bank Papua

PT Bank Papua sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor: 37/GIB/1966 dan disahkan menjadi peraturan daerah provinsi irian barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada lembaran daerah provinsi irian barat No. 42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar IB Rp4.000.000,00.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua merupakan salah satu bagian dari struktur komposisi pemegang saham pada PT Bank Papua saat ini, dimana penyertaan modalnya, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua. Sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, modal dasar PT Bank Papua bersumber dari penyeteroran modal berupa penyertaan saham. Dalam hal ini, penyertaan saham oleh Pemerintah Provinsi Papua sebesar 51%, Pemerintah Kabupaten/ Kota sebesar 30%, Pihak Ketiga sebesar 15%, dan Pegawai Bank sebesar 4%. Selain itu di dalam Perda tersebut diatur pula perubahan modal tersebut ditetapkan

oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara otomatis akan dicatat sebagai modal dasar dalam bank.

Tabel 120
Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua pada PT. Bank Papua per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

TAHUN	SETORAN MODAL	SALDO PENYETORAN MODAL
Saldo Awal		98.605.000.000,00
2009	25.000.000.000,00	123.605.000.000,00
2010	10.000.000.000,00	133.605.000.000,00
2011	10.000.000.000,00	143.605.000.000,00
2012	25.000.000.000,00	168.605.000.000,00
2013	25.000.000.000,00	193.605.000.000,00
2014	90.000.000.000,00	283.605.000.000,00
2015	0,00	283.605.000.000,00
2016	30.000.000.000,00	313.605.000.000,00
2017	75.000.000.000,00	388.605.000.000,00
2018	50.000.000.000,00	438.605.000.000,00
2019	50.000.000.000,00	488.605.000.000,00
2020	50.000.000.000,00	538.605.000.000,00
2021	75.000.000.000,00	613.605.000.000,00
2022	20.000.000.000,00	633.605.000.000,00

Saldo Investasi Pemerintah Provinsi Papua Pada PT. Bank Papua hanya menghitung nilai penyertaan modal dan pengurang akibat penerimaan deviden, hal ini dikarenakan belum diterimanya Laporan Keuangan PT. Bank Papua Tahun 2022.

Tabel 121
Investasi Pemerintah Provinsi Papua pada PT. Bank Papua per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Investasi per 1 Januari	837.163.399.330,41	790.917.702.023,41
2	Ditambah: Bagian Laba Tahun Berjalan	0,00	10.882.080.000,00
3	Ditambah : Setoran Modal	20.000.000.000,00	75.000.000.000,00
4	Koreksi Pencatan Laba Tahun Lalu	0,00	0,00
5	Pembayaran Dividen	(41.964.951.746,00)	(39.636.382.693,00)
Saldo Investasi		815.198.447.584,41	837.163.399.330,41

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua terhadap PT Bank Papua berada dalam kategori kepemilikan lebih dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, maka pencatatan atau penilaian investasi berupa penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua, maka pencatatan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan metode ekuitas, yaitu dengan mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

b.PDAM Kabupaten Jayapura

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 30 April 1982. PDAM mulai beroperasi sejak tanggal 20 Juni 1992 setelah dilakukan serah terima Aset Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dituangkan dalam Berita Acara antara Menteri Pekerjaan Umum dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Gubernur dengan Bupati Kabupaten Jayapura. Lebih lanjut, organisasi dan personalia PDAM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Jayapura Nomor Kep87/S.01/IV/2004 dan susunan Badan Pengawas PDAM ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura nomor 249 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua pada PDAM Kabupaten Jayapura sebesar Rp15.457.858.550,00 berupa penyerahan aktiva tetap dari dana Inpres Tahun 1981/1982 melalui Pemda Provinsi Papua sebesar Rp12.723.858.550,00 dan berupa penyerahan prasarana dan sarana air bersih dari dana DSAK Nomor 105 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 Rp2.734.000.000,00 melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua sesuai Berita Acara Penyerahan Kegiatan tanggal 17 Mei 2005.

Persentase kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua kepada PDAM Kabupaten Jayapura per 31 Desember 2022 adalah sebesar 12,76% dari total penyertaan modal pemerintah, tidak terdapat perubahan investasi Pemerintah Provinsi Papua pada PDAM Kabupaten Jayapura. Saldo penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 122
Investasi Pemerintah Provinsi Papua pada PDAM Kabupaten Jayapura
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Penyertaan Pemerintah Provinsi Papua	15.457.858.550,00	15.457.858.550,00
2	Penyertaan Pemerintah Kota Jayapura	36.602.235.880,00	36.602.235.880,00
3	Penyertaan Pemerintah Kabupaten Jayapura	74.778.319.955,00	74.778.319.955,00
4	Jumlah Modal	126.838.414.385,00	126.838.414.385,00
5	Laba (Rugi) Eks. BPAM	0,00	(21.225.620.528,84)
6	Hibah	0,00	157.731.000,00
Saldo Investasi		126.838.414.385,00	105.770.524.856,16

Oleh karena penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua pada PDAM Kabupaten Jayapura berada dalam kategori kepemilikan dibawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka pencatatan atau penilaian investasi berupa penyertaan modal diharuskan menggunakan metode biaya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua, bahwa apabila penilaian investasi menggunakan metode biaya, maka investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha yang terkait. Dengan demikian, nilai penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Papua pada PDAM Kabupaten Jayapura per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp15.457.858.550,00.

c. PD. Irian Bhakti

Penyertaan Modal pada PD. Irian Bhakti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti tanggal 26 Maret 1986. Sesuai dengan Perda tersebut, modal dasar perusahaan daerah berjumlah Rp189.000.000,00 yang telah disetorkan secara tunai oleh Pemerintah Provinsi Papua. Selain itu, di dalam Perda tersebut diatur pula bahwa modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dengan persetujuan DPRD/DPRD dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua pada PD. Irian Bhakti adalah sebesar Rp5.114.000.000,00 yaitu berasal dari modal dasar sebesar Rp189.000.000,00, penambahan modal pada tanggal 25 Juli 2003 sebesar Rp975.000.000,00, tanggal 10 Oktober 2003 sebesar Rp2.950.000.000,00, dan tanggal 23 Januari 2007 Rp1.000.000.000,00.

Kepemilikan modal pada PD. Irian Bhakti adalah sebesar 100%. Oleh karena penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua terhadap PD. Irian Bhakti berada dalam kategori kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatan atau penilaian investasi berupa penyertaan modal diharuskan menggunakan metode ekuitas.

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pada PD Irian Bhakti dilakukan hanya dengan mengurangi nilai investasi berdasarkan deviden yang diterima, hal ini dikarenakan belum diterimanya Laporan Keuangan PD Irian Bhakti.

Tabel 123
Investasi Pemerintah Provinsi Papua pada PD Irian Bhakti
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Investasi per 1 Januari	127.712.455.274,92	77.718.093.118,79
2	Ditambah: Bagian Laba (Rugi)	0,00	25.194.362.156,13
3	Ditambah: Penyertaan Modal	0,00	25.000.000.000,00
4	Dikurangi: Koreksi pencatatan rugi Tahun 2019	0,00	0,00
5	Dikurangi Deviden tahun berjalan	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)
Saldo Investasi		127.512.455.274,92	127.712.455.274,92

d. PT. TV Mandiri Papua

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua pada PT. TV Mandiri Papua merupakan Pengalihan dari 6.999 lembar saham, yaitu senilai Rp6.999.000.000,00 atas nama PT. Bangun Tanah Papua menjadi atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua sesuai dengan Notaris Habel Rumbiak, SH AKTA: RUPS tentang pengalihan saham dan perubahan pengurus PT. Televisi Mandiri Papua No. 03 tanggal 12 November 2010.

Laporan Keuangan PT Televisi Mandiri Papua tahun 2014 telah diaudit oleh KAP Gatot Victor pada tahun 2015. Dalam laporan keuangan yang telah diaudit tersebut, PT Televisi Mandiri Papua mengakui hutang kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp54.267.051.043,00.

Atas laporan keuangan tersebut diketahui beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 124
Investasi Pemerintah Provinsi Papua pada PT. Televisi Mandiri Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	0,00	0,00
2	Saldo Laba (Akumulasi Rugi)	0,00	(38.400.708.212,00)
Saldo Investasi		0,00	(38.400.708.212,00)

Karena jumlah Ekuitas bernilai minus maka pengakuan nilai investasi Pemerintah Provinsi Papua pada PT. Televisi Mandiri Papua diakui sebesar Rp0,00.

PT. Televisi Mandiri Papua pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai surat kepada Gubernur Papua nomor: 002/TVMP_DIR/I/2017 perihal penutupan siaran dan operasional kantor Papua TV menyatakan bahwa seluruh Aset yang berada di gedung BPD lantai 6 akan diamankan oleh penanggungjawab operasional perusahaan dan akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

e. PT. Irian Bhakti Mandiri (Holding Company)

Pada akhir tahun 2013 telah terjadi perubahan nama PT Rakyat Papua Sejahtera (*Holding Company*) menjadi PT Irian Bhakti Mandiri sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013. Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-04459.40.20.2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Irian Bhakti Mandiri.

Penyertaan Modal pada PT. Rakyat Papua Sejahtera (*Holding Company*) berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua ke dalam Modal Saham Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (*Holding Company*). Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, modal dasar perusahaan daerah adalah sebesar

Rp500.000.000.000,00 dan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yaitu minimal 70% atau sebesar Rp350.000.000.000,00.

Penyertaan tersebut disediakan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp212.057.130.200,00 dan barang/*asset* senilai Rp137.942.869.800,00. Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai diberikan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp75.000.000.000,00, tahun 2013 sebesar Rp50.000.000.000,00, dan sisa sebesar Rp87.057.130.200,00 diberikan berdasarkan hasil evaluasi Tim yang dibentuk oleh Gubernur terhadap usulan rencana kegiatan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC.

Kepemilikan modal pada PT. Irian Bhakti Mandiri adalah sebesar 100%. Oleh karena penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua terhadap PT Irian Bhakti Mandiri berada dalam kategori kepemilikan lebih dari 50%, sehingga pencatatan atau penilaian investasi berupa penyertaan modal diharuskan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua, maka pencatatan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan metode ekuitas, yaitu dengan mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Adapun bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah akan mengurangi nilai investasi dari Pemerintah.

Pengungkapan nilai investasi Provinsi Papua pada PT Irian Bhakti Mandiri belum dilakukan hal ini disebabkan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Unadited 2022, belum diterima Laporan Keuangan PT Irian Bhakti Mandiri.

Tabel 125
Nilai investasi Pemerintah Provinsi Papua pada PT Irian Bhakti Mandiri
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Investasi per 1 Januari	193.760.304.507,70	193.760.304.507,70
2	Bagian Laba/Rugi Tahun berjalan	0,00	0,00
Saldo Investasi		193.760.304.507,70	193.760.304.507,70

f. PT. Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada PT Asuransi Bangun Askrida dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 570/1848/PUOD Tanggal 4 Juni 1994 dan telah didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua dalam Modal Saham PT Asuransi Bangun Askrida. Penyertaan modal ini telah direalisasikan sebesar Rp25.000.000,00 melalui rekening Askrida pada BPD DKI Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1995.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari 2 (dua) lembar saham No. 00512 dan 00513 dengan nilai per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya. Persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebesar 0,010% dari total modal disetor perseroan sebesar Rp196.120.000.000,00.

Berdasarkan hasil RUPS PT Asuransi Bangun Askrida tanggal 8 Mei 2014 yang tertuang dalam Akta Notaris Yurisa Martanti, SH., MH Nomor 08 tanggal 8 Mei 2014 yang berkaitan dengan permodalan, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua diberikan perpanjangan waktu untuk melakukan penambahan sahamnya sebesar Rp130.000.000,00 sebelum pelaksanaan RUPS Tahun 2015. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan penambahan nilai penyertaan modal pada Tahun Anggaran 2015, sekaligus untuk mengenakan kelebihan penyetoran sebesar Rp5.000.000,00 guna

menambahkan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada TA 2015.

Namun, berdasarkan laporan keuangan PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2015 (*Audited*) penambahan saham sebesar Rp130.000.000,00 dan penggenapan kelebihan penyeteroran sebesar Rp5.000.000,00 sebagaimana disebutkan diatas belum direalisasi, sehingga nilai penyertaan modal Provinsi Papua pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2022 tetap menggunakan metode biaya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua, bahwa apabila penilaian investasi menggunakan metode biaya, maka investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha yang terkait. Dengan demikian, nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2022 (*Audited*), yaitu sebesar Rp25.000.000,00.

g. PT JAMKRIDA

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua membentuk Perusahaan Daerah dengan nama PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua (JAMKRIDA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2013. Pembentukan JAMKRIDA Papua sebagai upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah papua. Tujuan pembentukannya adalah memberikan jasa penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua. Kegiatan usaha penjaminan kredit yang dilakukan oleh JAMKRIDA Papua melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit/pembiayaan dengan lebih mengutamakan orang asli Papua yang mengelola UMKM dan Koperasi dengan memperhatikan kelayakan usaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana disebutkan di atas, modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pihak Ketiga. Modal yang disetor untuk pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebesar Rp25.000.000.000,00 pada tahun 2014 sebagai penyertaan modal dengan menerbitkan SP2D Nomor 1772/SP2D-LS/1.20.05.02/2014 pada tanggal 20 Agustus 2014, yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 dan SP2D Nomor 2750/SP2D-LS/1.20.05.02/2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 sebagaimana disajikan pada pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2014.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Papua melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp25.000.000.000,00 Dengan demikian, jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada PT JAMKRIDA sampai pada per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp50.000.000.000,00.

Di tahun 2017, berdasarkan Surat Direktur PT. JAMKRIDA Papua nomor 70/Dirut/JKD/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 telah disetorkan deviden sebesar Rp700.000.000,00 ke kas daerah Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2017. Dengan surat yang sama, Direktur PT. JAMKRIDA mengharapkan adanya penambahan penyertaan modal maksimal sebesar Rp49.000.000.000,00 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Koperasi dan UKM nomor 06/M.KUKM/III/2016 tanggal 11 Maret 2016. Namun, permintaan penambahan penyertaan modal tersebut belum dapat direalisasikan di tahun 2017.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022, pengungkapan nilai investasi pada PT JAMKRIDA hanya mengurangi penerimaan deviden, hal ini belum diterimanya Laporan Keuangan PT JAMKRIDA.

Tabel 126
Nilai Investasi Pemerintah Provinsi Papua Pada PT JAMKRIDA
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Investasi per 1 Januari	73.837.601.764,33	53.463.398.890,03
2	Ditambah: Bagian Laba (Rugi)	0,00	1.024.202.874,30
3	Ditambah: Penyertaan Modal	0,00	20.000.000.000,00
4	Koreksi pencatatan rugi Tahun sebelumnya	0,00	0
5	Dikurangi Dividen tahun berjalan	(600.000.000,00)	-650.000.000,00
Saldo Investasi		73.237.601.764,33	73.837.601.764,33

Kepemilikan modal pada PT. JAMKRIDA, yaitu sebesar 100%. Oleh karena penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua terhadap PT. JAMKRIDA berada dalam kategori kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatan atau penilaian investasi berupa penyertaan modal diharuskan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua, maka pencatatan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan metode ekuitas, yaitu dengan mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Adapun bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi dari pemerintah.

5.3.1.3

ASET TETAP

Rp17.922.725.953.178,30

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan Aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp30.977.697.766.778,20 dan Rp29.033.540.688.695,65 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 127
Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Tanah	1.981.692.479.514,59	1.930.579.388.732,89
2	Peralatan dan Mesin	2.607.642.528.059,21	2.408.541.531.890,26
3	Gedung dan Bangunan	7.826.120.649.429,38	6.813.958.741.827,25
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.645.422.821.067,40	15.822.893.370.754,40
5	Aset Tetap Lainnya	465.129.952.070,00	464.010.914.520,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.451.689.336.637,62	1.593.556.740.970,85
TOTAL ASET TETAP		30.977.697.766.778,20	29.033.540.688.695,65

Saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak termasuk KDP) masing-masing senilai Rp29.526.008.430.140,58 dan Rp27.439.983.947.724,80 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 128
Aset Tetap Tidak Termasuk KDP Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Saldo Awal per 01 Januari 2022	27.439.983.947.724,80	26.655.627.688.702,80
2	Penambahan Selama TA 2022	2.460.880.301.009,40	1.305.150.679.652,78
	a. Belanja modal	2.001.033.258.282,37	1.126.322.553.615,73
	b. Kapitalisasi belanja barang Jasa	174.752.847.533,22	47.041.615.168,01
	c. BLUD	39.813.444.800,30	0,00
	d. Reklasifikasi antar Aset Tetap	26.491.140.216,17	10.858.964.268,20
	e. KDP jadi Aset	218.789.610.177,34	1.544.723.760,65
	f. Mutasi KIB Karena Perubahan SKPD	0,00	0,00
	g. Mutasi antar SKPD	0,00	280.740.000,00
	h. Hibah Aset	0,00	83.240.895.268,00
	i. Belanja Modal Yang dimutasikan	0,00	0,00
	j. Kas yang dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
	k. Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	l. Uang Muka Aset Tetap jadi	0,00	0,00
	m. Hutang Aset tetap	0,00	34.663.367.272,19
	n. Dana BOS	0,00	1.197.820.300,00
3	Pengurangan Selama TA 2022	374.855.818.593,62	520.794.420.630,78
	a. Hibah /Non Aset	0,00	15.899.374.000,00
	b. Belanja Modal yang menjadi barang/jasa	61.249.942.547,16	29.813.618.288,84
	c. Belanja Modal yang menjadi persediaan	21.450.973.881,13	8.604.681.323,28
	d. Belanja Modal jadi Uang Muka	10.358.144.874,96	0,00
	e. Reklasifikasi ke persediaan	0,00	101.550.048.238,02
	f. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	102.963.788.119,92	1.065.200.500,00
	g. Belanja Modal yang dihapuskan	0,00	1.201.656.500,00
	h. Mutasi antar SKPD	0,00	280.740.000,00
	i. Utang Aset yang telah lunas	34.663.367.272,19	64.001.881.319,98
	j. Belanja Modal Habis Pakai	0,00	7.351.629.804,00
	k. Reklasifikasi antar KIB	27.078.062.673,94	984.924.496,00
	l. Belanja Modal jadi Hibah	50.644.251.685,78	21.155.311.000,00
	m. Belanja Modal dikembalikan ke Kasda	0,00	10.007.800.000,00
	n. Belanja Modal Jadi Ekstrakomtabel	14.315.641.653,15	46.645.522.628,78
	o. Reklas antar Aset Tetap	0,00	211.387.842.531,88
	p. Belanja Modal/Aset yg menjadi KDP	51.234.551.885,39	843.210.000,00
	q. Koreksi Saldo Awal ekstrakomptabel	0,00	980.000,00
	r. Penghapusan Aset Tetap	897.094.000,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	29.526.008.430.140,58	27.439.983.947.724,80

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp1.451.689.336.637,62 dan Rp1.593.556.740.970,85 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 129
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Saldo Awal per 01 Januari 2022	1.593.556.740.970,85	1.360.131.354.705,62
2	Penambahan Selama TA 2022	77.773.870.783,45	236.666.896.525,88
	a. Belanja modal menjadi KDP	34.598.741.970,11	33.587.867.267,00
	b. Belanja barang menjadi KDP	299.299.401,00	0,00
	c. Reklasifikasi antar Aset Tetap	17.676.030.411,34	203.079.029.258,88
	d. Uang Muka Pengadaan Barang dan jasa	25.000.000.000,00	0,00
	e. Reklas dari Ekstrakomptabel	199.799.001,00	0,00
3	Pengurangan Selama TA 2022	219.641.275.116,68	3.241.510.260,65
	a. KDP yang telah selesai	219.198.958.215,68	1.544.723.760,65
	b. Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00	1.696.786.500,00
	c. Ekstrakomptable	442.316.901,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	1.451.689.336.637,62	1.593.556.740.970,85

5.3.1.3.1

Tanah

Rp1.981.692.479.514,59

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akruar menyatakan Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah dapat diakui sebagai Aset Tetap bila memenuhi lima kriteria yaitu: berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah tidak memungkinkan untuk penggunaan biaya perolehan maka nilai Aset tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Saldo tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp1.981.692.479.514,59 dan Rp1.930.579.388.732,89 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 130
Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2022	1.930.579.388.732,89	1.904.036.662.287,00
2	Penambahan Selama TA 2022	51.113.090.781,70	52.054.771.445,89
	a. Belanja Modal/Aset tanah	25.000.000.000,00	51.383.998.445,89
	b. Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00	212.323.000,00
	c. Penilaian Aset Tanah	0,00	0,00
	d. BLUD	1.113.090.781,70	146.500.000,00
	e. Penambahan P3D	0,00	0,00
	f. Mutasi Antar SKPD	0,00	0,00
	g. KDP menjadi Aset	25.000.000.000,00	0,00
	h. Hibah	0,00	311.950.000,00
3	Pengurangan Selama TA 2022	0,00	25.512.045.000,00
	a. Belanja modal /Aset menjadi KDP	0,00	0,00
	b. Mutasi KIB karena perubahan SKPD	0,00	0,00
	c. Belanja Modal yang jadi Barang/Jasa	0,00	0,00
	d. Belanja Modal yang Hibah	0,00	0,00
	e. Penilaian Aset Tanah	0,00	0,00
	f. Belanja Modal jadi persediaan	0,00	25.000.000.000,00
	g. Reklas antar Aset Tetap	0,00	512.045.000,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	1.981.692.479.514,59	1.930.579.388.732,89

Dalam Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya untuk mengurus bukti-bukti kepemilikan atas tanah-tanah yang belum disertifikatkan dan balik nama dari Hak milik ke Hak Pakai Pemerintah Provinsi Papua.

Kenaikan nilai Aset tanah selama tahun 2022 sebesar Rp51.113.090.781,70 (Saldo per 31 Desember 2022 – Saldo per 31 Desember 2021) ialah berasal belanja modal senilai Rp25.000.000.000,00, kapitalisasi belanja Barang dan Jasa BLUD Rp1.113.090.781,70 dan Kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp25.000.000.000,00.

Aset tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua Yang Bersengketa dan telah dilakukan Upaya Pengamanan dan Penertiban.

1. Tanah Bangunan Perumahan Komplek DPRP di Jalan Baru Kotaraja seluas 50.000 m² dengan nilai perolehan Rp4.171.948.320,00.

Tanah tersebut telah memiliki bukti legalitas sesuai dengan SHP No 65/ Desa Vim tanggal 30 Mei 1995. Tanah tersebut sebagian digunakan untuk membangun rumah dinas 20 unit dan sisanya belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Rumah – rumah dinas tersebut sebagian besar ditempati oleh anggota DPRP yang telah purna bakti masa jabatannya. Tanah diluar perumahan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua yang seharusnya masih kosong telah dikapling dan dipagar menjadi 11 unit oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pengamanan Aset adalah telah dibuat surat teguran kepada penghuni dan telah di pasang Plang tanah milik Pemerintah Provinsi Papua serta tidak diberikan Surat Ijin Penghunian (SIP) atas Rumah – rumah Dinas tersebut.

2. Tanah peruntukan Stadion Kotaraja di Jalan Baru Kota Raja seluas 73.330 m² dengan nilai perolehan Rp. 39.378.210.000,00.

Pada lokasi tanah tersebut terdapat bangunan milik Pemerintah Provinsi Papua berupa kolam renang yang sudah tidak dimanfaatkan dan telah memiliki bukti legalitas sesuai dengan SHP no 37/Desa Vim

tanggal 29 Mei 1993 untuk kolam renang seluas 22.536 m². Pada lokasi tanah tersebut terdapat bangunan rumah masyarakat dan bangunan untuk peternakan yang dikuasai oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua yaitu melakukan koordinasi dengan BPN kota untuk segera diterbitkan HGB pada setiap penghuni untuk dikenakan sewa tanah pertahun sesuai dengan jenis jasa komersil.

3. Aset Tanah ex Dinas Sosial di Kelapa Lima, Merauke seluas 48.188 m²

Tanah seluas 48.188 m² dengan nilai perolehan senilai Rp. 3.402.756.000,00 berada di Persil Kuda Mati Kabupaten Merauke sesuai bukti kepemilikan Tanah SHP. No.10/desa Kelapa lima, Persil Kuda Mati. Tanah persil seluas 48.188 m² adalah milik Pemerintah Provinsi Papua, yang dimanfaatkan sebagai Balai Latihan Kerja (BLK). Lokasi tanah tersebut sebagian besar telah diperjual belikan oleh masyarakat setempat dan dikuasai oleh masyarakat. Pada lokasi tanah tersebut, masyarakat telah membangun rumah dan merenovasi eks kantor Dinsos, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua melakukan pendekatan persuasif dan bila tidak diindahkan maka akan dilanjutkan ke Pengadilan.

4. Tanah Dinas Perkebunan Jl. Sumatra Jayapura (Eks Dinas Perkebunan).

Tanah seluas 1.657 m² dengan bukti legalitas tanah berupa sertifikat SHP no 13/Desa Mandala tanggal 19 Februari 1990. Tanah bangunan pemerintah tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat usaha rental, bangunan rumah makan dan rumah tinggal. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua melakukan pendekatan persuasif dan meminta setiap penghuni untuk membuat pernyataan bahwa tanah bangunan tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Papua.

5. Tanah Gedung Klinik Hewan Jalan Raya Entrop Jayapura.

Tanah seluas 50.000 m² dengan nilai perolehan senilai Rp30.700.000.000,00. Tanah tersebut terdiri dari tempat pemotongan hewan yang sudah beralih fungsi menjadi Rumah Dinas dengan bukti legalitas tanah berupa sertifikat SHP no 17/desa Entrop tanggal 17 September 1996 seluas 560 m² dan kantor Balai Klinik Hewan.

- a. Tanah yang masih dikuasai oleh Balai Klinik Hewan hanya seluas kurang lebih 13.000 m², tanah tersebut telah dipagar keliling namun sebagian lokasi dijadikan jalan umum oleh masyarakat.
- b. Luas tanah sudah berkurang seluas 30.000 m² dan berpindah tangan karena proses jual beli dan sudah dipenuhi rumah masyarakat.

6. Tanah Dinas Perikanan dan Kelautan Kantor Balai Benih Ikan Jl. Yabaso Sentani Kabupaten Jayapura.

Tanah seluas 48.000 m² dengan nilai perolehan Rp7.680.000.000,00. Tanah tersebut awalnya direncanakan untuk kantor Balai Benih Ikan di Jl. Yabaso, Sentani Kabupaten Jayapura. Namun sehubungan dengan tanah tersebut yang telah dikuasai oleh masyarakat, maka kantor Balai Benih Ikan dipindahkan ke Desa Berap, Distrik Genyem Kabupaten Jayapura.

7. Tanah Dinas Pariwisata Gedung Expo Waena.

Tanah seluas 120.000 m² dengan nilai perolehan Rp24.000.000.000,00 dengan bukti legalitas Sertipikat HP No 676/Desa Waena tanggal 12 Oktober 1982. Gedung Expo tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua karena dikuasai oleh Pihak ketiga. Upaya yang telah dilakukan dengan melakukan beberapa kali rapat dengan pemilik Ulayat untuk mencari solusi atas masalah tersebut, namun sampai saat ini mengalami kendala karena tuntutan Ganti Rugi tanah dari Pihak Adat yang cukup besar.

8. Tanah Dinas Kesehatan.

Tanah peruntukan puskesmas yang terletak di Jl. Baru Pasar Yotefa dengan nilai perolehan Rp1.600.000.000,00 di tempati dan dikuasai oleh masyarakat untuk usaha perdagangan berupa kios.

9. Hotel Arfak Lokasi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Dasar Kepemilikan:

- a. Dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT.Natour Kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989.
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 276/HGB/BPN 89 tanggal 11 Maret 1989. Telah dilakukan Kajian Penilaian Aset Tanah Hotel Numbay dengan Nilai tanah senilai Rp4.131.100.000. Lokasi Tanah Hotel tersebut, di tuntut ganti rugi tanah oleh Masyarakat Adat/ Pemilik Ulayat dan bangunan dikuasai sepenuhnya oleh Masyarakat atau Pihak yang tidak berhak.

10. Hotel Mapia Lokasi Kabupaten Biak Numfor.

Dasar Kepemilikan:

- a. Dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT.Natour Kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989.
- b. Sertipikat Tanah HPL nomor 01/ Mandala tanggal 1 Mei 1993 seluas 21.264 m², dengan harga perolehan Rp3.402.240.000,00.

Permasalahan :

- a. Tanah Hotel Mapia Biak seluas 21.264 m² sesuai surat pelepasan tanah dari pemilik an. Matias Rumaropen tertanggal 19 Juli 2010 dimana sebagian tanah hotel tersebut di jual kembali oleh Pemilik Ulayat kepada Masyarakat Luar untuk pembangunan rumah tinggal dan usaha.
 - b. Dalam rangka Penertiban Aset milik Pemerintah Provinsi Papua telah dilakukan pendekatan persuasif kepada warga yang ada namun tidak ada solusi penyelesaian.
 - c. Sebanyak 15 kapling berupa: tempat usaha, kafe, bengkel, penjualan batu tela dan dibangun rumah sewa yang disewakan terdiri dari tiga bangunan kopel, dua bangunan rumah kopel terdiri dari tiga unit dan satu bangunan kopel empat unit, serta tempat tinggal penduduk. Bangunan yang dibangun oleh masyarakat tersebut sebagian besar dibuat secara permanen.
11. Dinas Perikanan dan Kelautan TPI (Tanah Pelabuhan Pendaratan Ikan) Hamadi Kota Jayapura. Tanah seluas 20.000 m² dengan bukti legalitas SHP nomor 19 tanggal 28 April 1997. Permasalahan yang di hadapi pengelolaan TPI Hamadi tidak sesuai mekanisme yang ada.
12. Tanah Hotel Marauw berlokasi di Biak seluas 3.250.000 m² dengan HPL nomor 26.09.02.14.5.0000 atas nama Pemerintah Provinsi Papua, adanya kredit macet oleh PT. Biak Marauw Tourism Development Corporation dengan jaminan HGB yang berlaku selama 30 tahun. Tanah tersebut dilelang oleh KPKNL senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah), diatas tanah tersebut tidak lagi berdiri bangunan Hotel yang mana sudah dirobahkan.

5.3.1.3.2

Peralatan dan Mesin

Rp2.607.642.528.059,21

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin diakui sebagai Aset Tetap apabila berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan dapat diukur dengan handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Aset Tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya yang tercantum di dalam Kontrak/SPK untuk memperoleh

dan mempersiapkan Aset sampai siap di dimanfaatkan. Penyajian peralatan dan mesin berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp2.607.642.528.059,21 dan senilai Rp2.408.541.531.890,26 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 131
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2022	2.408.541.531.890,26	2.169.165.561.237,20
2	Penambahan Selama TA 2022	252.848.297.658,81	296.062.233.437,52
	a. Belanja Modal /Aset Peralatan dan Mesin	208.232.006.607,21	202.080.652.407,72
	b. Kapitalisasi Belanja Barang	3.042.017.739,00	5.326.145.299,20
	c. Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.994.224.294,00	4.308.081.562,60
	d. BLUD	37.580.049.018,60	0,00
	e. Hutang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00
	f. Mutasi antar SKPD	0,00	280.740.000,00
	g. Hibah Aset	0,00	82.928.945.268,00
	h. Aset P3D	0,00	0,00
	i. Dana Bos jadi Aset Tetap	0,00	1.137.668.900,00
	j. Dana Covid jadi Aset Tetap	0,00	0,00
	k. Kas yang dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
3	Pengurangan Selama TA 2022	53.747.301.489,86	56.686.262.784,46
	a. Hibah /Non Aset	0,00	0,00
	b. Belanja Modal yang menjadi barang/jasa	1.514.280.816,40	5.004.162.400,00
	c. Belanja Modal yang menjadi persediaan	18.470.755.028,13	8.604.681.323,28
	d. Reklasifikasi ke Aset Tetap lainnya (ATB)	0,00	0,00
	e. Reklasifikasi ke persediaan	0,00	0,00
	f. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	1.319.585.400,00	980.203.500,00
	g. Belanja Modal yang dihapuskan	0,00	1.201.656.500,00
	h. Belanja Modal jadi KDP	0,00	0,00
	i. Mutasi antar SKPD	0,00	280.740.000,00
	j. Utang Aset yang telah lunas	0,00	361.456.989,00
	k. Koreksi Saldo Awal ekstrakomptabel	0,00	0,00
	l. Penghapusan Aset Tetap	897.094.000,00	0,00
	m. Belanja Modal Habis Pakai	0,00	6.999.492.524,00
	n. Reklasifikasi antar KIB	1.306.271.357,94	984.924.496,00
	o. Belanja Modal jadi Hibah	18.359.289.151,00	21.153.311.000,00
	p. Belanja Modal dikembalikan ke Kasda	0,00	7.800.000,00
	q. Belanja Modal Jadi Ekstrakomptabel	11.880.025.736,39	11.107.834.052,18
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	2.607.642.528.059,21	2.408.541.531.890,26

Kenaikan nilai peralatan dan mesin selama tahun 2022 sebesar Rp199.100.996.168,95 (Saldo per 31 Desember 2022 - Saldo per 31 Desember 2021) yang berasal dari:

1. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 senilai Rp208.232.006.607,21 nilai ini kemudian dikurangi dengan Reklasifikasi Belanja Modal menjad jasa senilai Rp1.514.280.816,40, Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp18.470.755.028,13, Penghapusan Aset Tetap senilai Rp897.094.000,00, reklasifikasi antar KIB senilai Rp1.306.271.357,94, Hibah Aset senilai Rp18.359.289.151,00, reklasifikasi ke asset lainnya senilai Rp1.319.585.400,00 dan Barang Ekstrakomptabel senilai Rp11.880.025.736,39.
2. Kapitalisasi belanja barang dan jasa (yang digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin) senilai Rp3.042.017.739,00.
3. Reklasifikasi Aset Tetap yang secara khusus menambah nilai Aset peralatan mesin senilai Rp3.994.224.294,00.
4. Peralatan mesin dari BLUD senilai Rp37.580.049.018,60.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp7.826.120.649.429,38

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam

kelompok gedung dan bangunan adalah: gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya.

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan maka Gedung dan Bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

Pada Tahun Anggaran 2022 nilai Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi merupakan nilai konstruksi, perencanaan pengawasan dan pemeliharaan/ renovasi yang didasarkan pada nilai kontrak.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp7.826.120.649.429,38 dan senilai Rp6.813.958.741.827,25 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 132
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2022	6.813.958.741.827,25	6.443.641.537.030,32
2	Penambahan Selama TA 2022	1.237.922.027.500,74	737.011.195.413,02
	a. Belanja Modal	1.053.603.951.959,30	676.090.072.105,71
	b. Kapitalisasi Belanja Barang	16.956.800.294,50	22.066.707.814,87
	c. Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.216.021.038,29	2.646.324.459,60
	d. Kapitalisasi KDP	140.452.423.608,65	1.544.723.760,65
	e. BLUD	1.120.305.000,00	0,00
	f. Reklas dari Persediaan	24.572.525.600,00	0,00
	g. Hutang Aset Tetap	0,00	34.663.367.272,19
	h. Dana Bos yang jadi Aset Tetap	0,00	0,00
	i. Kapitalisasi Uang Muka Tahun 2019	0,00	0,00
3	Pengurangan Selama TA 2022	225.760.119.898,61	366.693.990.616,09
	a. Belanja Modal/Aset yg menjadi KDP	0,00	843.210.000,00
	b. Hibah/Non Aset	0,00	15.779.694.000,00
	c. Reklasifikasi antar Aset Tetap	25.313.906.316,00	145.621.559.431,65
	d. Uang Muka	1.084.818.501,00	0,00
	e. Mutasi Antar SKPD	0,00	0,00
	f. Belanja Modal ke Persediaan	1.296.894.000,00	76.306.078.238,02
	g. Belanja Modal yang jadi Barang Jasa	38.899.379.051,98	20.135.125.938,84
	h. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	101.644.202.719,92	0,00
	i. Koreksi Saldo Awal ekstrakomptabel	0,00	0,00
	j. Ekstrakomptabel	742.132.118,76	34.355.824.076,60
	k. Utang Aset yang telah Lunas	34.663.367.272,19	63.640.424.330,98
	l. Hibah Aset Tetap	22.115.419.918,76	12.074.600,00
	m. Belanja Modal dikembalikan ke Kas Daerah	0,00	10.000.000.000,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	7.826.120.649.429,38	6.813.958.741.827,25

Kenaikan nilai gedung dan bangunan selama tahun 2022 sebesar Rp1.012.161.907.602,13 (Saldo per 31 Desember 2022 - Saldo per 31 Desember 2021) yang berasal dari:

1. Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2022 senilai Rp1.053.603.951.959,30. Nilai ini kemudian dikurangi dengan nilai pengurangan diantaranya; Reklasifikasi antar KIB senilai Rp25.313.906.316,00, uang muka pengadaan asset senilai Rp1.084.818.501,00, Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp1.296.894.000,00, Reklasifikasi ke Barang jasa senilai Rp38.899.379.051,98, Pelunasan Hutang Aset Tetap senilai Rp34.663.367.272,19, Aset Tetap dihibahkan senilai Rp22.115.419.918,76 Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp101.644.202.719,92 dan Barang Ekstrakomptabel senilai Rp742.132.118,76.
2. Belanja barang dan jasa yang menjadi Aset Tetap gedung/bangunan senilai Rp16.956.800.294,50.
3. Reklas Antar KIB senilai Rp1.216.021.038,29.
4. Kapitalisasi KDP yang mana fisik Aset telah selesai pekerjaan 100% senilai Rp140.452.423.608,65.
5. Pengadaan Aset dari BLUD senilai Rp1.120.305.000,00.

6. Reklasifikasi dari Persediaan senilai Rp24.572.525.600,00.

Gedung Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua yang bersengketa:

1. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat 25 Rumah Dinas yang berlokasi di BBI Holtikultura, Desa Kurik Kabupaten Merauke. Rumah dinas sebanyak 10 rumah ditempati oleh Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sedangkan 15 Rumah Dinas ditempati oleh masyarakat.
2. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan terdapat 33 Rumah Dinas untuk Instruktur Balai Latihan Kerja yang berlokasi di Balai Latihan Kerja, Jl. Pasifik Indah, Kota Jayapura. Rumah dinas sebanyak 16 rumah ditempati oleh para PNS Instruktur BLK sedangkan 17 rumah dinas ditempati oleh masyarakat yang tidak berhak dan terdapat 1 buah bangunan yang dialihfungsikan menjadi 5 kopel rumah tinggal masyarakat.
3. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura terdapat 56 Rumah Dinas yang berlokasi di lingkungan RSUD Jayapura Jalan Kesehatan Dok II kota Jayapura. Rumah Dinas sebanyak 44 Rumah ditempati oleh tenaga medis dan pegawai RSUD Jayapura. Sedangkan sebanyak 12 rumah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak yang terdiri dari pensiunan menempati 9 rumah dan 3 rumah ditempati oleh masyarakat pemilik hak ulayat.
4. Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat 15 Rumah Dinas yang berlokasi di Balai Hewan dan Laboratorium Provinsi Papua, Jl. Entrop/Abepura, Kota Jayapura. Rumah dinas sebanyak 5 rumah ditempati oleh PNS aktif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 10 rumah ditempati oleh pensiunan. Terdapat 21 Rumah Dinas yang berlokasi di Jl. Raya Sentani, Waena, kota Jayapura. Rumah dinas sebanyak 11 rumah ditempati oleh Pegawai yang masih aktif sedangkan 10 rumah dinas dikuasai oleh pensiunan dan keluarga pensiun.
5. Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua terdapat bangunan berupa eks kantor perkebunan sebanyak 5 (lima) bangunan yang berlokasi di Jl. Sumatera Dok V Kota Jayapura. Namun seluruh bangunan tersebut dikuasai oleh Masyarakat yang tidak berhak. Selain itu terdapat pula 1 bangunan kantor yang digunakan oleh Pusat Koperasi Pegawai RI Provinsi Papua yang berlokasi di Jl. Raya Cigombong, Kota Jayapura namun sekarang ditempati oleh masyarakat.
6. Hotel Numbay Lokasi Kota Jayapura

Dasar Kepemilikan:

- a. Dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT.Natour Kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989.
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 19 tanggal 26 Februari 1990 seluas 7.959 m².
- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 30 Juni 1994 seluas 5.420 m².
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 21 tanggal 31 Mei 1990 seluas 22.737 m².

Dengan harga perolehan tanah senilai Rp12.098.860.000,00

Permasalahan:

- a. Tanah Hotel Numbay seluas 7.959 m² masih terdapat rumah pribadi anak-anak bekas karyawan dan rumah kontrak oleh dua Partai Politik serta satu gedung masih ditempati pemilik tanah.
- b. Beberapa unit kamar Hotel Numbay blok atas yang berbatasan dengan Jl. Maluku masih ditempati pensiunan karyawan Hotel eks PT. Natour sejak pensiun sampai dengan saat ini, selain itu telah dibangun rumah tinggal oleh pensiunan karyawan hotel.
- c. Tahun 1990 rumah /gedung depan Jalan Angkasa dipinjamkan kepada 2 (dua) Partai Politik (PDI dan PPP) masih tetap ditempati sampai dengan saat ini dan Aset gedung yang dipinjamkan belum dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

7. Hotel Asmat berlokasi di Kabupaten Merauke.

Dasar Kepemilikan:

- a. Dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT.Natour Kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989.
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) an. PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional Nomor 10 tanggal 24 April 1978 Seluas 6.288 m².
- c. Telah dilakukan Pensertipikatan dengan membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor 028/8001/SET dan Nomor 734.A/SKB-91/VI/2015 tentang Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Papua tanggal 24 Juni 2015.

Dengan Nilai Tanah Hotel Asmat Merauke berdasarkan Tim Penilai Independen senilai Rp7.760.100.000.

Permasalahan:

- a. Hotel Asmat Merauke merupakan Aset Milik Pemerintah Provinsi Papua, namun sejak melakukan renovasi bangunan yaitu penambahan kamar hotel dari 16 kamar menjadi 22 kamar, 1 Gedung Aula Noken Said an. Rumah Karyawan hotel Pemerintah Kabupaten Merauke tidak berkoordinasi dengan Pihak Pemerintah Provinsi Papua.
- b. Penerimaan sektor jasa usaha dari Hotel Asmat Merauke, menurut keterangan pihak hotel penyeteroran hasil penerimaan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke sejak tahun 2011, namun pihak hotel tidak dapat menunjukkan bukti penyeteroran tersebut.
- c. Penyeteroran penghasilan hotel di tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2010 tidak dapat dibuktikan karena pengelolaan Aset tersebut langsung oleh Pemerintah Kabupaten Merauke.
- d. Pimpinan Hotel Asmat Merauke sampai dengan saat ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 322 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011.

8. Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Papua yang berlokasi di Jakarta:

- a. Tanah Abang: Lokasi Jl. K.H Mas Mansyur No.63, RT 016/009, luas tanah 8.403 m² dengan bukti legalitas HP Nomor 428 tanggal 29 Juli 2013, sedang dalam proses pengurusan HP ke HPL pada BPN Pusat untuk proses pemanfaatan bagi hasil antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pihak Pengembang. Saat ini sedang dalam Penyelesaian pengosongan Penghuni yang menempati lokasi Tanah abang.
- b. Bangunan Kali Batu Senen: Lokasi Jalan Kali Batu / Timur VI No 3.RT.010/002 luas tanah 575 m² dengan bukti legalitas HP 167 tanggal 29 Juli 2013, bangunan tersebut di tempati oleh Pihak Lain.
- c. Bangunan Kepu Selatan: Lokasi Jl. Kepu Selatan No. 55 RT.008/009 luasan 1.214 m² dengan bukti legalitas HP Nomor 237 tanggal 29 Juli 2013, bangunan tersebut di tempati oleh Pihak Lain.
- d. Bangunan Tanah Tinggi: lokasi Jl. Tanah Tinggi I No 78-A RT 012/006 luasan 910 m² dengan bukti legalitas HP Nomor 105 tanggal 29 Juli 2013, bangunan tersebut di tempati oleh Pihak Lain.
- e. Bangunan Rawa Barat: Lokasi Jl. Suryo Nomor 60 RT.001/04 luasan 437 m² dengan bukti legalitas HP nomor 364 tanggal 7 september 1999, bangunan tersebut di tempati oleh Pihak lain.

Gedung Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua yang bersengketa tersebut kedepan akan dilakukan Pengelolaan secara KSP, BGS dan KSPI yang mana pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi selama ini terhadap bangunan yang bersengketa dengan membuat surat pernyataan penempatan sementara Gedung/Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua kepada Pihak ketiga.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp16.645.422.821.067,40

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akruar menyatakan Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai jalan, irigasi dan jaringan maka jalan, irigasi dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal.

Jalan, Irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya ini menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi biaya perolehan yang terdiri dari biaya konstruksi, perencanaan dan pengawasan sampai jaringan tersebut siap pakai.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.645.422.821.067,40 dan Rp15.822.893.370.754,40 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 133
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2022	15.822.893.370.754,40	15.680.007.831.778,30
2	Penambahan Selama TA 2022	915.122.087.450,15	212.897.083.706,35
	a. Belanja Modal	710.724.650.597,86	193.212.822.156,41
	b. Kapitalisasi Belanja Barang	130.181.503.899,72	17.464.554.053,94
	c. Kapitalisasi KDP	53.337.186.568,69	0,00
	d. Reklasifikasi antar Aset Tetap	20.878.746.383,88	2.219.707.496,00
	e. Aset P3D	0,00	0,00
	f. Mutasi antar SKPD	0,00	0,00
	g. Belanja dana Bos	0,00	0,00
	i. Hibah tapi Aset	0,00	0,00
	j. Uang Muka Tahun 2019 Jadi Aset Tetap	0,00	0,00
	k. Reklas dari Persediaan	0,00	0,00
3	Pengurangan Selama TA 2022	92.592.637.137,15	70.011.544.730,25
	a. Belanja Modal menjadi KDP	51.234.551.885,40	0,00
	b. Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00	64.713.915.100,25
	c. Hibah/Non Aset	0,00	119.680.000,00
	d. Belanja Modal yg jadi barang jasa	20.716.282.678,79	3.725.747.450,00
	e. Belanja Modal menjadi persediaan	4.258.535,00	0,00
	f. Mutasi antar OPD	0,00	0,00
	g. Uang Muka	9.273.326.373,96	0,00
	h. Koreksi Saldo Awal ekstrakomptabel	0,00	0,00
	i. Ekstrakomptabel	1.194.675.048,00	1.125.099.500,00
	j. Hibah Aset Tetap	10.169.542.616,00	0,00
	k. Belanja Modal menjadi Habis Pakai	0,00	327.102.680,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	16.645.422.821.067,40	15.822.893.370.754,40

Kenaikan nilai Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022 sebesar Rp822.529.450.313,00 (saldo per 31 Desember 2022 – saldo per 31 Desember 2021) yang berasal dari:

1. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp710.724.650.597,86, Nilai ini kemudian dikurangi dengan belanja modal yang menjadi Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp51.234.551.885,40, reklasifikasi dari barang/jasa senilai Rp20.716.282.678,79, Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp4.258.535,00, Hibah Aset senilai Rp10.169.542.616,00, Uang muka pengadaan barang dan jasa senilai Rp9.273.326.373,96 dan ekstrakomptabel tahun berjalan senilai Rp1.194.675.048,00.
2. Belanja Barang dan Jasa yang Menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp130.181.503.899,72.
3. Konstruksi dalam Pengerjaan yang telah selesai senilai Rp53.337.186.568,69.
4. Reklasifikasi antar asset tetap sebesar Rp20.878.746.383,88.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp465.129.952.070,00

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI menyatakan Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi buku perpustakaan/buku dan non buku, barang corak kesenian/kebudayaan/ olahraga, hewan, ikan dan tanaman.

Aset Tetap lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu kantor yang bukan miliknya.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan harga perolehan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp465.129.952.070,00 dan senilai Rp464.010.914.520,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 134
Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2022	464.010.914.520,00	458.776.096.370,00
2	Penambahan Selama TA 2022	3.874.797.618,00	7.125.395.650,00
	a. Belanja Modal/ Aset Tetap Lainnya	3.472.649.118,00	3.555.008.500,00
	b. Kapitalisasi Belanja Barang	0,00	2.037.708.000,00
	c. Belanja Dana BOS	0,00	60.151.400,00
	d. Reklasifikasi antar Aset Tetap	402.148.500,00	1.472.527.750,00
3	Pengurangan Selama TA 2022	2.755.760.068,00	1.890.577.500,00
	a. Reklasifikasi ke KDP	0,00	0,00
	b. Reklasifikasi ke persediaan	1.679.066.318,00	243.970.000,00
	c. Reklasifikasi antar Aset Tetap	457.885.000,00	540.323.000,00
	d. Ekstrakomptabel	498.808.750,00	0,00
	e. Koreksi Saldo Awal ekstrakomptabel	0,00	980.000,00
	f. Koreksi Saldo Berjalan Ekstrakomptabel	0,00	56.765.000,00
	g. Reklasifikasi ke barang jasa	0,00	948.582.500,00
	h. Reklasifikasi ke Belanja Hibah	0,00	2.000.000,00
	i. Reklasifikasi ke Barang Habis Pakai	120.000.000,00	12.960.000,00
	j. Reklas ke Aset lain lain	0,00	84.997.000,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	465.129.952.070,00	464.010.914.520,00

Kenaikan Aset Tetap lainnya selama tahun 2022 sebesar Rp1.119.037.550,00 (Saldo per 31 Desember 2022- Saldo Per 31 Desember 2021) berasal dari:

1. Realisasi belanja modal selama tahun 2022 senilai Rp3.472.649.118,00. Nilai ini kemudian dikurangi dengan Belanja modal yang jadi persediaan senilai Rp1.679.066.318,00, Reklasifikasi Aset Tetap senilai Rp457.885.000,00, Belanja modal yang jadi barang/jasa Rp120.000.000,00, dan barang Ekstrakomptabel senilai Rp498.808.750,00.
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap senilai Rp402.148.500,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp1.451.689.336.637,62

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI menyatakan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah Aset dalam proses dan sedang dalam pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui bila manfaat ekonomi masa yang akan datang dari Aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan dapat diukur dengan handal, dan masih dalam proses

pengerjaan. KDP akan dipindahkan ke pos Aset Tetap jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat sesuai tujuan perolehannya.

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi Aset Tetap tersebut menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing senilai Rp1.451.689.336.637,62 dan Rp1.593.556.740.970,85 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 135
Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2022	1.593.556.740.970,85	1.360.131.354.705,62
2	Penambahan Selama TA 2022	77.773.870.783,45	236.666.896.525,88
	a. Belanja modal menjadi KDP	34.598.741.970,11	33.587.867.267,00
	b. Belanja barang menjadi KDP	299.299.401,00	0,00
	c. Reklasifikasi antar Aset Tetap	17.676.030.411,34	203.079.029.258,88
	d. Uang Muka Pengadaan Barang dan jasa	25.000.000.000,00	0,00
	e. Reklas dari Ekstrakomptabel	199.799.001,00	0,00
3	Pengurangan Selama TA 2022	219.641.275.116,68	3.241.510.260,65
	a. KDP yang telah selesai	219.198.958.215,68	1.544.723.760,65
	b. Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00	1.696.786.500,00
	c. Ekstrakomptabel	442.316.901,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	1.451.689.336.637,62	1.593.556.740.970,85

Penurunan konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Kapitalisasi dari belanja modal senilai Rp34.598.741.970,11 dikurangi dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang reklas ke Aset Tetap karena telah selesainya pekerjaan fisik sebesar 100% senilai Rp219.198.958.215,68 serta Belanja Modal yang menjadi Ekstrakomptabel Rp442.316.901,00.
2. Reklasifikasi belanja barang jasa yang menjadi Kontruksi dalam Pengerjaan senilai Rp299.299.401,00.
3. Reklasifikasi antar Aset Tetap senilai Rp17.676.030.411,34.
4. Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp25.000.000.000,00.
5. Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomptabel senilai Rp199.799.001,00.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

(Rp13.054.971.813.599,90)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu Aset Tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai Aset Tetap tersebut juga semakin menurun. (Buletin Teknis SAP Nomor 18) Perhitungan Akumulasi Penyusutan tahun 2022 dilakukan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Jalan, Jembatan dan Irigasi.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai negatif Rp13.054.971.813.599,90 dan senilai negatif Rp11.976.945.935.262,80 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 136
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Reklas Ke Aset Lain-lain / Penghapusan	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(1.676.181.370.907,51)	0,00	2.216.679.400,01	(232.561.698.641,00)	(1.906.526.390.148,50)
3	Gedung dan Bangunan	(1.072.167.067.378,81)	0,00	955.891.084,00	(139.631.087.778,19)	(1.210.842.264.073,00)
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	(9.228.597.496.976,53)	0,00	0,00	(709.005.662.401,87)	(9.937.603.159.378,40)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(11.976.945.935.262,85)	0,00	3.172.570.484,01	(1.081.198.448.821,06)	(13.054.971.813.599,90)

Akumulasi Penyusutan tahun 2022 senilai negatif Rp13.054.971.813.599,90 berasal Penghapusan Aset Tetap senilai Rp3.172.570.484,01 dan Beban Penyusutan aset tetap tahun 2022 senilai negatif Rp1.081.198.448.821,06.

Nilai buku Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp17.922.725.953.178,30 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 137
Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Klasifikasi	Harga Perolehan per 31 Desember 2022	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Nilai Buku per 31 Desember 2022
1	Tanah	1.981.692.479.514,59	0,00	1.981.692.479.514,59
2	Peralatan dan Mesin	2.607.642.528.059,21	(1.906.526.390.148,50)	701.116.137.910,71
3	Gedung dan Bangunan	7.826.120.649.429,38	(1.210.842.264.073,00)	6.615.278.385.356,38
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	16.645.422.821.067,40	(9.937.603.159.378,40)	6.707.819.661.689,00
5	Aset Tetap Lainnya	465.129.952.070,00	0,00	465.129.952.070,00
6	KDP	1.451.689.336.637,62	0,00	1.451.689.336.637,62
	Jumlah	30.977.697.766.778,20	(13.054.971.813.599,90)	17.922.725.953.178,30

5.3.1.4 DANA CADANGAN **Rp918.567.915.952,00**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

5.3.1.4.1 Dana Cadangan **Rp918.567.915.952,00**

Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dana Cadangan digunakan untuk mendanai peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua yang dititikberatkan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan pasca berakhirnya penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua. Selain itu di dalam perda tersebut diatur pula bahwa pembentukan Dana Cadangan bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan.

Dana Cadangan yang belum digunakan dapat disimpan dalam portofolio atas nama Pemerintah Provinsi Papua dengan tingkat bunga yang menguntungkan. Bunga atas penempatan dana cadangan merupakan penerimaan daerah yang menambah saldo Dana Cadangan tersebut. Perubahan saldo akhir Dana Cadangan dari awal pembentukan tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 138
Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	No Rekening	Saldo 1 Januari 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2022
1	100211002099907 (Giro Bank Papua)	774.840.900,00	3.882.912,00	0,00	778.723.812,00
2	110003020010611 (Deposito Bank Papua)	438.097.756.115,00	20.357.571.971,00	0,00	458.455.328.086,00
4	1000302001344 (Deposito Bank Papua)	735.925.018.921,00	10.118.969.010,00	746.043.987.931,00	0,00
5	1000301005955 (Deposito Bank Papua)	0,00	459.333.864.054,00	0,00	459.333.864.054,00
Jumlah		1.174.797.615.936,00	489.814.287.947,00	746.043.987.931,00	918.567.915.952,00

Hal ini sesuai dengan Lampiran I.03 PSAP – 02 yang menyebutkan Hasi-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

5.3.1.5 ASET LAINNYA Rp239.110.559.003,44

Aset Non Lancar lainnya diklasifikasikan sebagai Aset lainnya. Termasuk dalam Aset lainnya adalah Aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan Aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran Rp6.329.312.319,11

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran rumah dinas dan tagihan penjualan angsuran kendaraan dinas yang belum dilunasi oleh yang bersangkutan dari beberapa kali penjualan Aset rumah dinas dan kendaraan dinas sejak tahun 2004. Penjualan Aset rumah dinas dan kendaraan dinas dilakukan melalui mekanisme penghapusan Aset daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Terdapat 9 (sembilan) Keputusan Gubernur yang pembayaran/pelunasannya telah jatuh tempo per 31 Desember 2022, yaitu:

Tabel 139
Piutang Penjualan Angsuran Yang Belum Jatuh Tempo
Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Saldo per 01 Januari 2022	Koreksi Saldo Awal	Koreksi	Pembayaran 2022	Saldo per 31 Desember 2022
PIUTANG PENJUALAN ANGSURAN – RUMAH DINAS					
- SK Gubernur No. 133 Tahun 2004	1.965.289.047,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	1.941.289.047,00
- SK Gubernur No. 223 Tahun 2005	1.312.047.335,00	0,00	0,00	0,00	1.312.047.335,00
- SK Gubernur No. 191 Tahun 2009	2.178.942.200,05	0,00	0,00	(18.569.540,00)	2.160.372.660,05
PIUTANG PENJUALAN ANGSURAN – KENDARAAN DINAS					
- SK Gubernur No. 9 Tahun 2004	2.692.631,00	0,00	0,00	0,00	2.692.631,00
- SK Gubernur No. 129 Tahun 2009	24.506.255,00	0,00	0,00	0,00	24.506.255,00
- SK Gubernur No. 138 Tahun 2010	162.109.500,00	0,00	0,00	(12.600.000,00)	149.509.500,00
- SK Gubernur No. 84A Tahun 2011	420.568.291,00	0,00	0,00	0,00	420.568.291,00
- SK Gubernur No.89 Tahun 2013	66.620.000,00	0,00	0,00	(12.900.000,00)	53.720.000,00
- SK Gubernur No.188.4 Tahun 2020	264.606.600,06	0,00	0,00	0,00	264.606.600,06
Jumlah Piutang Penjualan Angsuran	6.397.381.859,11	0,00	0,00	(68.069.540,00)	6.329.312.319,11

5.3.1.5.1.1 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran (Rp4.762.710.783,03)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Penyusutan Aset Tetap terhadap piutang perlu dilakukan penyisihan terhadap piutang yang sudah jatuh tempo.

Piutang Penjualan Angsuran Rumah Dinas dan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas yang perlu dilakukan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 140
Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Pemerintah Provinsi Papua
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	JATUH TEMPO	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2021
			KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		
			(1 s/d 3 thn)	(>3 s/d 5 thn)	(> 5 thn)		
			10%	40%	100%		
	Rumah Dinas						
2004	1.941.289.047,00	Mei 2014	0,00	0,00	1.941.289.047,00	1.941.289.047,00	0,00
2005	1.312.047.335,00	Nov-15	0,00	0,00	1.312.047.335,00	1.312.047.335,00	0,00
2009	2.160.372.660,05	2019	0,00	864.149.064,02	0,00	864.149.064,02	1.296.223.596,03
	Kendaraan Dinas						
2004	2.692.631,00		0,00	0,00	2.692.631,00	2.692.631,00	0,00
2009	24.506.255,00	Desember 2014	0,00	0,00	24.506.255,00	24.506.255,00	0,00
2010	149.509.500,00	Desember 2015	0,00	0,00	149.509.500,00	149.509.500,00	0,00
2011	420.568.291,00	Juli 2016	0,00	0,00	420.568.291,00	420.568.291,00	0,00
2013	53.720.000,00	Apr-18	0,00	21.488.000,00	0,00	21.488.000,00	32.232.000,00
2021	264.606.600,06	Juli 2021	26.460.660,01	0,00	0,00	26.460.660,01	238.145.940,05
Jml	6.329.312.319,11		26.460.660,01	885.637.064,02	3.850.613.059,00	4.762.710.783,03	1.566.601.536,08

5.3.1.5.4

Aset Tak Berwujud

Rp21.592.512.508,00

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

ATB diakui bila memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dapat dikendalikan, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Termasuk dalam ATB yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah *software* komputer dan aplikasi komputer.

ATB diakui bila memenuhi kriteria:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan Aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Saldo Aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 terinci sebagai berikut:

Tabel 141
Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	OPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.776.395.000,00	1.776.395.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	273.410.499,00	273.410.499,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	3.744.950.000,00	3.744.950.000,00
4	Rumah Sakit Jiwa	1.099.230.000,00	1.099.230.000,00
5	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	63.450.000,00	63.450.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	467.500.000,00	467.500.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	137.364.700,00	137.364.700,00
8	Dinas Olah Raga dan Pemuda	1.004.950.000,00	1.004.950.000,00
9	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	422.750.000,00	422.750.000,00
10	Sekretariat Daerah	379.005.000,00	379.005.000,00
11	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	1.195.975.000,00	1.195.975.000,00
12	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	155.100.000,00	155.100.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00	0,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	8.492.747.440,00	8.466.995.440,00
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	546.943.869,00	546.943.869,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	478.500.000,00	478.500.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	245.000.000,00	245.000.000,00
18	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	321.084.000,00	321.084.000,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	77.550.000,00	77.550.000,00
20	Inspektorat	310.607.000,00	310.607.000,00
	Saldo Aset Tak Berwujud	21.592.512.508,00	21.166.760.508,00

Penambahan Aset tidak berwujud pada tahun 2022 senilai Rp425.752.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) OPD antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp400.000.000,00.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah senilai Rp25.752.000,00.

Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp18.888.944.037,00)

Akumulasi Amortisasi adalah amortisasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban amortisasi tahun berjalan. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam Aset Tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak (Buletin Teknis SAP Nomor 17 Perhitungan Akumulasi Amortisasi tahun 2015 dilakukan untuk Aset Tak Berwujud).

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022 senilai negatif Rp18.888.944.037,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 142
Akumulasi Amortisasi Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

No	Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan per 01 Januari 2022	Koreksi saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2022	Reklasifikasi Akumulasi Amortisasi	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022
		(Audited)				(Audited)
1	Aset Tidak Berwujud	(17.312.291.538,00)	0,00	1.576.652.499,00	0,00	(18.888.944.037,00)
	Jumlah	(17.312.291.538,00)	0,00	1.576.652.499,00	0,00	(18.888.944.037,00)

Perhitungan amortisasi mulai tahun 2014 sampai saat ini disesuaikan dengan tanggal pencairan SP2D sebagai perhitungan umur pemakaian barang. Sedangkan perhitungan amortisasi barang sampai dengan 31 Desember 2022 menggunakan penyusutan pertahun dengan menggunakan metode garis lurus sesuai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dimana amortisasi Aset tak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Persentase amortisasi yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai amortisasi pertahun.

5.3.1.5.5 Aset Lain-lain Rp166.811.931.063,39

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Lain-lain, Aset Tetap yang Rusak, Aset Tetap yang Dihilangkan, dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp166.811.931.063,39 dan sebesar Rp76.596.589.376,32 dirinci sebagai berikut:

Tabel 143
Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

KLASIFIKASI		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Aset Lain-lain	0,00	0,00
2	Aset Tetap yang Rusak	59.678.088.596,00	0,00
3	Aset Tetap yang Dihilangkan	106.768.513.658,92	0,00
4	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	365.328.808,47	13.391.825.636,32
TOTAL ASET LAIN-LAIN		166.811.931.063,39	13.391.825.636,32

1. Aset Lain-lain Rp0,00

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 144
Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

KLASIFIKASI		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
2	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Saldo Aset Lain-lain		0,00	0,00

2. Aset Tetap yang Rusak**Rp59.678.088.596,00**

Aset Tetap yang Rusak merupakan Aset Tetap yang sudah dihentikan penggunaannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Aset Tetap yang per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 145
Aset Tetap yang Rusak Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Peralatan dan mesin	37.509.411.146,00	38.644.788.290,00
2	Bangunan/Gedung	21.142.069.300,00	17.754.679.300,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	326.608.150,00	326.608.150,00
4	Aset Tetap lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00
Total Aset Tetap yang Rusak		59.678.088.596,00	57.426.075.740,00

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp59.678.088.596,00 dan Rp57.426.075.740,00.

Tabel 146
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku 31 Desember 2022	
		31 Desember 2021	31 Desember 2022		
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>		
1	Peralatan dan mesin	37.509.411.146,00	(38.644.788.290,00)	(37.509.411.146,00)	0,00
2	Bangunan/Gedung	21.142.069.300,00	(17.754.679.300,00)	(18.710.570.384,00)	2.431.498.916,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	326.608.150,00	(326.608.150,00)	(326.608.150,00)	0,00
4	Aset Tetap lainnya	700.000.000,00	(700.000.000,00)	(700.000.000,00)	0,00
Total		59.678.088.596,00	(57.426.075.740,00)	(57.246.589.680,00)	2.431.498.916,00

3. Aset Tetap yang Dihilangkan**Rp106.768.513.658,92**

Aset Tetap yang Dihilangkan merupakan Aset Tetap yang diserahterimakan kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Provinsi Papua sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Aset Tetap yang Dihilangkan per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 147
Aset Tetap yang Dihilangkan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Aset yang dihibahkan pada tahun 2015	392.150.000,00	392.150.000,00
2	Aset yang di Hibahkan pada Tahun 2017	5.386.538.000,00	5.386.538.000,00
3	Aset yang di Hibahkan pada Tahun 2022	100.989.825.658,92	0,00
Total Aset Tetap yang Dihilangkan		106.768.513.658,92	5.778.688.000,00

Saldo Aset Tetap yang Dihilangkan pada Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp106.768.513.658,92 yang terdiri dari:

1. Aset Gedung/Bangunan ex Biro Pemerintahan Kampung (dihilangkan tahun 2017) yang tercatat pada Sekretaris Daerah senilai Rp5.386.538.000,00.
2. Aset Tetap jalan, irigasi dan Jaringan dari Dinas Pekerjaan Umum dihibahkan tahun 2015 senilai Rp392.150.000,00.
3. Aset Tetap Gedung Kantor KPU Prov Papua yang akan dihibahkan Berdasarkan BA Serah Terima Barang Nomor: 011/2888/SET Tanggal 7 Maret 2023 senilai Rp100.989.825.658,92.

Tabel 148
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihilangkan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku 31 Desember 2022	
		31 Desember 2021	31 Desember 2022		
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>		
1	Aset Tetap yang dihibahkan pada tahun 2015				
	- Aset Tetap jalan, irigasi dan Jaringan	392.150.000,00	(34.709.480,22)	(34.709.480,22)	357.440.519,78
2	Aset yang di Hibahkan pada Tahun 2017				
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.386.538.000,00	(893.924.061,81)	(893.924.061,81)	4.492.613.938,19
Jumlah (1) + (2)		5.778.688.000,00	(928.633.542,03)	(928.633.542,03)	4.850.054.457,97

4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya**Rp365.328.808,47**

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp365.328.808,47 dan sebesar Rp13.391.825.636,32, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp365.328.808,47 terdiri dari:

- Utang Beban Transfer Beasiswa Siswa Unggul Papua merupakan sisa dana beasiswa pada rekening Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bank Mandiri Nomor 1540058802020 per 31 Desember 2022 sebesar Rp139.116.665,47 yang belum disalurkan.
- Subsidi bunga pinjaman untuk Usaha Kecil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja pada Rekening Bank Papua Nomor 1000126002481 yang belum digunakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp226.212.143,00
- Titipan Dana Aneka Tunjangan Guru dan Tenaga Pendidikan pada Rekening Penampung Bank Papua Nomor 100002222011021360 per 31 Desember 2021 sebesar Rp56.287.500,00 yang telah disalurkan per tanggal 24 Januari 2022
- Dana BOS yang belum tersalurkan sebesar Rp56.870.000,00 merupakan saldo atas penyaluran Dana BOS kepada SD/SMP/SMK yang telah terbit SP2Dnya namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah disalurkan pada tanggal 13 Oktober 2022, dirinci sebagai berikut:

Tabel 149
Dana Bos yang Belum Tersalurkan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Titipan Dana BOS APBN SMK Provinsi Papua	100002222028005000	0,00	22.960.000,00
2	Titipan Dana BOS APBN SMA Provinsi Papua	100002222028006000	0,00	33.910.000,00
3	Dana BOS Provinsi Papua (APBN)	100002222028001000	0,00	0,00
TOTAL			0,00	56.870.000,00

5.3.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**Rp126.203.681.155,00**

Treasury Deposit Facility ialah Fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Sesuai surat nomor S-210/WPB.34/2023 perihal Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TDK) Tahun 2022 adalah senilai Rp126.203.681.155,00

5.3.2 KEWAJIBAN**Rp149.638.006.751,25**

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 150
Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

KLASIFIKASI		<i>(dalam Rupiah)</i>	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	149.638.006.751,25	154.675.600.410,29
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		149.638.006.751,25	154.675.600.410,29

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**Rp149.638.006.751,25**

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 terdiri dari Utang PFK, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp32.467.726,00

Utang PFK mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Utang perhitungan kepada pihak ketiga merupakan penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa potongan Iuran Wajib Pegawai, Taperum, Askes, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Beras.

Utang PFK merupakan utang perhitungan kepada pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dibayarkan kepada pihak ketiga berupa pajak dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran OPD. Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 151
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	PPH Ps. 21	PPH Ps. 22	PPH Ps. 23	Utang PPh Ps 4 (2)	PPN	PFK 2022 AUDITED	PFK 2021 AUDITED
1 Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.724.029,00
2 Rumah Sakit Jiwa	0,00	300.000,00	166.400,00	0,00	3.115.200,00	3.581.600,00	0,00
3 Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.680.000,00	2.407.849,00	2.532.634,00	0,00	22.265.643,00	28.886.126,00	0,00
4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.800,00
Total	1.680.000,00	2.707.849,00	2.699.034,00	0,00	25.380.843,00	32.467.726,00	161.462.829,00

5.3.2.1.2 Utang Belanja

Rp35.574.502.168,78

Saldo utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 yang merupakan utang belanja barang dan jasa dan Utang Pengadaan Aset Tetap yang sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2022 belum terbayarkan dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.2.1.2.1 Utang Belanja Barang dan Jasa

Rp35.463.547.430,78

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp35.463.547.430,78 dan sebesar Rp12.137.703.191,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152
Utang Belanja Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	TAHUN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
			<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA		10.720.386.530,78	10.844.169.360,78
-	Utang Otsus/KPS TA 2017	2017	2.568.285.021,28	2.568.285.021,28
-	Utang APBD TA 2017	2017	3.109.989.770,90	3.109.989.770,90
-	Utang Obat BPJS TA 2018	2018	2.543.319.818,60	2.543.319.818,60
-	Utang Belanja Barang & Jasa RSUD s.d.TA 2019	2019	2.487.856.600,00	2.577.049.930,00
-	Penambahan Utang Belanja Barang & Jasa TA RSUD TA 2020	2020	10.935.320,00	45.524.820,00
2	RUMAH SAKIT JIWA		0,00	820.077.781,00
-	Hutang Jasa Medis Tahun 2020	2020	0,00	83.805.687,00
-	Hutang Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Nakes Bulan Juli-Desember 2021	2021	0,00	736.272.094,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		0,00	0,00
-	Utang Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Penataan Kawasan GIDI Telaga Ria (Dinas PU)	2020	0,00	0,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		24.543.054.900,00	0,00
-	Iuran Jaminan/Asuransi- Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI	2022	24.543.054.900,00	0,00
6	SEKRETARIAT DAERAH		0,00	273.350.050,00
-	Tagihan Rekening Air Minum pada Kantor Gubernur Provinsi Papua Bulan November dan Desember 2021	2021	0,00	273.350.050,00
7	BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS		200.106.000,00	200.106.000,00
-	Utang Pengadaan Inventaris Biro Tata Pemerintahan	2020	200.106.000,00	200.106.000,00
	TOTAL UTANG BELANJA		35.463.547.430,78	12.137.703.191,78

5.3.2.1.2.2 Utang Pengadaan Aset Tetap

Rp110.954.738,00

Utang pengadaan Aset Tetap merupakan utang yang terjadi karena belum dilakukannya pembayaran atas pekerjaan dimana dokumen tagihan pihak ke tiga telah diberikan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) telah diterbitkan dan Surat Perintah Membayar (SPM) telah diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2022.

Saldo utang pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp110.954.738,00 dan sebesar Rp34.775.577.654,19 dengan rincian sebagai berikut:

- 🏛️ Hutang Manajemen Kontruksi Pembangunan Lapangan Tenis Kota Jayapura TA 2020 senilai Rp110.954.738,00.
- 🏛️ Sisa hutang atas pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Kota Jayapura TA 2020 senilai Rp1.255.644,00 yang telah dihapuskan dikarenakan Penyedia menyatakan tidak lagi menagih sisa hutang, sesuai surat nomor 14/P/WS-CP,KSO/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.
- 🏛️ Hutang Pembangunan Venue PON TA 2021 sesuai hasil Review Inpektorat nomor X.700/4/266/LHR-ITPROV Tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp34.506.791.272,19 yang telah dibayarkan melalui SP2D No. 05968/SP2D/2-19.0-00.0-00.1.1.0/LS/11-2022 tanggal 22 November 2022.
- 🏛️ Hutang pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atas nomor Kontrak 522/22464 TGL, 25 November 2021 senilai Rp156.576.000,00 telah dibayarkan melalui SP2D No 03644/SP2D/2-11.3-28.0-00.1.1.0/LS/08-2022 tanggal 31 Agustus 2022.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp114.031.036.856,47

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp114.031.036.856,47 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp107.600.856.735,32 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. Utang Kekurangan Transfer Dana Bagi Hasil Rp 113.891.920.191,00** Utang Kekurangan Transfer Dana Bagi Hasil merupakan utang yang timbul akibat penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Provinsi Papua yang tidak sejalan dengan realisasi penerimaan pajak di tahun 2022 atau penetapan DBH pada Kabupaten/ Kota tahun 2022 lebih kecil dari yang seharusnya dibagi hasilkan.

Tabel 153
Utang Kekurangan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Pajak Kendaraan Bermotor	19.090.799.128,00	13.750.645.226,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.324.958.962,00	8.004.863.223,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.101.715.432,00	5.438.123.597,00
4	Pajak Air Permukaan	20.326.461.940,00	50.009.124.187,00
5	Pajak Rokok	33.047.984.729,00	12.357.897.666,00
Saldo Utang Kurang Salur		113.891.920.191,00	89.560.653.899,00

Rincian Utang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua yang berasal dari sisa Utang Transfer Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dan Tahun 2021. Adapun rincian jumlah kekurangan salur pada Kab/Kota sebagai berikut:

Tabel 154
Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua yang Kurang Salur per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	PKB	BBN KB	PAP	PBB-KB	Rokok
1 KOTA JAYAPURA	3.249.194.335,00	1.692.243.730,00	198.422.581,00	3.456.136.091,00	2.644.431.460,00
2 KAB. BIAK NUMFOR	570.246.354,00	302.869.319,00	213.293.337,00	1.690.439.725,00	1.457.603.728,00
3 KAB. YAPEN	326.524.152,00	225.488.432,00	335.839.164,00	1.054.133.517,00	1.304.203.781,00
4 KAB. NABIRE	1.144.085.808,00	499.564.673,00	228.025.240,00	2.253.742.267,00	969.575.914,00
5 KAB. MIMIKA	4.478.551.243,00	3.745.196.827,00	13.418.251.543,00	3.261.609.969,00	1.770.278.242,00
6 KAB. JAYAWIJAYA	1.151.556.646,00	443.060.919,00	190.408.826,00	1.396.014.290,00	1.469.298.854,00
7 KAB. MERAUKE	2.073.100.203,00	734.940.686,00	306.147.613,00	3.312.474.097,00	1.134.260.316,00
8 KAB. JAYAPURA	1.083.596.863,00	529.821.186,00	1.251.296.895,00	1.475.084.495,00	1.020.311.123,00
9 KAB. SARMI	282.032.745,00	166.562.469,00	209.006.427,00	330.008.247,00	437.769.987,00
10 KAB. PUNCAK JAYA	224.380.661,00	79.977.601,00	210.990.927,00	403.508.794,00	1.453.785.875,00
11 KAB. PANIAI	298.959.513,00	258.180.534,00	210.990.927,00	603.014.147,00	2.101.502.574,00
12 KAB. BOVEN DIGUL	572.526.258,00	239.595.345,00	71.573.090,00	1.922.626.906,00	491.258.696,00
13 KAB. KEEROM	429.851.720,00	277.662.494,00	214.077.815,00	655.084.884,00	524.855.140,00
14 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	196.864.469,00	39.555.369,00	210.990.927,00	389.558.527,00	573.086.960,00
15 KAB. YAHUKIMO	226.550.508,00	109.592.234,00	157.193.583,00	453.901.845,00	2.172.049.036,00
16 KAB. TOLIKARA	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	357.639.600,00	1.524.647.280,00
17 KAB. ASMAT	196.864.469,00	107.392.500,00	210.990.927,00	1.344.608.106,00	735.242.606,00

	KABUPATEN/KOTA	PKB	BBN KB	PAP	PBB-KB	Rokok
18	KAB. MAPPI	231.865.117,00	323.055.775,00	210.868.338,00	907.146.197,00	683.393.181,00
19	KAB. WAROPEN	172.317.630,00	181.652.788,00	210.990.927,00	526.523.807,00	417.256.398,00
20	KAB. SUPIORI	213.085.744,00	279.548.521,00	210.990.927,00	471.826.907,00	508.636.140,00
21	KAB. MAMBERAMO RAYA	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	586.503.815,00	462.982.241,00
22	KAB. LANNY JAYA	196.864.469,00	108.899.756,00	157.193.583,00	384.425.101,00	1.348.553.627,00
23	KAB. MAMBERAMO TENGAH	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	309.231.053,00	844.098.812,00
24	KAB. NDUGA	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	283.468.210,00	1.258.310.045,00
25	KAB. YALIMO	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	621.735.974,00	1.209.338.698,00
26	KAB. DEIYAI	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	321.700.687,00	1.203.907.467,00
27	KAB. INTAN JAYA	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	394.568.919,00	1.469.899.951,00
28	KAB. DOGLAY	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	663.863.470,00	1.154.595.087,00
29	KAB. PUNCAK	196.864.469,00	108.899.756,00	210.990.927,00	271.135.785,00	702.851.510,00
	Jumlah	19.090.799.128,00	11.324.958.962,00	20.326.461.940,00	30.101.715.432,00	33.047.984.729,00

2. Utang Beban Transfer Beasiswa dan Tunjangan **Rp139.116.665,47**

Tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus per 31 Desember 2021 yang masih berada di rekening penampungan di Bank Papua Nomor Rekening 100002222011021360 atas nama Titipan Dana Aneka Tunjangan sebesar Rp56.287.500,00 dan telah disalurkan tanggal 24 Januari 2022

Utang Beban Transfer Beasiswa Siswa Unggul Papua merupakan sisa dana beasiswa pada rekening Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua pada Bank Mandiri Nomor 1540058802020 per 31 Desember 2022 sebesar Rp139.116.665,47 yang belum disalurkan.

3. Utang Dana BOS **Rp0,00**

Saldo utang dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp00, saldo tersebut merupakan dana pada rekening penampung dana BOS yang belum disalurkan per 31 Desember 2021 dan telah disalurkan seluruhnya per tanggal 13 Oktober 2022.

Tabel 155
Utang Dana BOS Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Audited)	(Audited)
1	Sisa dana BOS tahun 2017 yang belum disalurkan	0,00	0,00
2	Sisa dana pada rekening penampung dana BOS yang belum disalurkan per 31 Desember 2021	0,00	56.870.000,00
Saldo Utang Kurang Salur Dana BOS		0,00	56.870.000,00

4. Utang Pengembalian Transfer ke Pemerintah Pusat **Rp0,00**

Utang Pengembalian Transfer ke Pemerintah Pusat merupakan hutang pengembalian atas sisa penggunaan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Satpol PP dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana sesuai bukti penerimaan hibah STS nomor 33128/STS-EPAD/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan surat Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 900/249 tanggal 5 April 2021 perihal permohonan penyeteroran sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dan telah dibayarkan melalui SP2D No. 00701/SP2D/5-02.0-00-00.1.1.0/LS/04-2022 tanggal 04 April 2022.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG **Rp0,00**

Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Papua baik per 31 Desember 2022 maupun per 31 Desember 2021.

5.3.3 EKUITAS **Rp23.462.462.667.753,60**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.462.462.667.753,60 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.070.198.453.450,70.

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 PENDAPATAN-LO Rp11.190.102.000.789,40

Pendapatan adalah hak Pemerintah Provinsi Papua yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp11.190.102.000.789,40 dan TA 2021 sebesar Rp14.758.229.827.806,90 dirinci sebagai berikut:

Tabel 156
Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	(AUDITED)	(Audited)	Rp	%
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	2.250.543.963.322,44	1.763.168.390.821,81	487.375.572.500,63	27,64
2 PENDAPATAN TRANSFER-LO	8.935.090.971.270,00	12.899.925.625.924,00	(3.964.834.654.654,00)	(30,74)
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	4.467.066.197,00	95.135.811.061,12	(90.668.744.864,12)	(95,30)
JUMLAH PENDAPATAN – LO	11.190.102.000.789,40	14.758.229.827.806,90	(3.568.127.827.017,49)	(24,18)

Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.568.127.827.017,49 atau (24,18%).

Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO Rp2.250.543.963.322,44

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah Pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Papua, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua menggambarkan perbandingan antara Pendapatan TA 2022 dengan Pendapatan TA 2021.

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp2.250.543.963.322,44 dan sebesar Rp1.763.168.390.821,81 dirinci sebagai berikut.

Tabel 157
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	(AUDITED)	(Audited)	Rp	%
1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	1.235.457.459.765,00	1.359.741.188.976,07	(124.283.729.211,07)	(9,14)
2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	17.713.806.139,00	46.108.750.197,25	(28.394.944.058,25)	(61,58)
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	724.226.605.890,00	37.103.640.271,43	687.122.965.618,57	1.851,90
4 Lain-lain PAD yang Sah-LO	273.146.091.528,44	320.214.811.377,06	(47.068.719.848,62)	(14,70)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	2.250.543.963.322,44	1.763.168.390.821,81	487.375.572.500,63	27,64

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp2.250.543.963.322,44 naik sebesar Rp487.375.572.500,63 atau 27,64% bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2021 sebesar Rp1.763.168.390.821,81.

Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2021, maka Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 turun sebesar Rp124.283.729.211,07 atau (9,14%) menjadi sebesar Rp1.235.457.459.765,00, Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 turun sebesar Rp28.394.944.058,25 atau (61,58%) menjadi sebesar Rp17.713.806.139,00 penurunan juga terjadi pada Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp47.068.719.848,62 atau (14,70%). Sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp687.122.965.618,57 atau 1.851,90% menjadi sebesar Rp724.226.605.890,00.

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp1.235.457.459.765,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang pungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Laporan Operasional disajikan dalam basis akrual, dikarenakan pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp1.235.457.459.765,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.359.741.188.976,07, maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp124.283.729.211,07 atau (9,14%).

Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 158
Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	267.959.735.356,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	150.797.322.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	254.146.270.400,00
Pajak Air Permukaan-LO	225.605.474.573,00
Pajak Rokok-LO	336.948.657.436,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO	1.235.457.459.765,00

(dalam Rupiah)

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	1.235.493.977.265,00
b. Pendapatan Pajak Daerah (LO)	1.235.457.459.765,00
Selisih (a - b)	36.517.500,00
Dapat ditelusuri dari:	
Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	1.235.493.977.265,00
<i>Mutasi Tambah:</i>	
-	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Penyesuaian atas Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	(36.517.500,00)
Pendapatan Pajak Daerah (LO)	1.235.457.459.765,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**Rp17.713.806.139,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pendapatan retribusi dipungut dan dikelola oleh OPD pengelola retribusi dengan segala pungutan yang tarifnya ditetapkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang retribusi daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp17.713.806.139,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 159
Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	5.823.271.639,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	6.093.540.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.328.096.600,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	258.000.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	154.000.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	11.775.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	105.302.500,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	3.250.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	1.453.070.400,00
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	483.500.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	17.713.806.139,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp17.713.806.139,00 bila dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2021 sebesar Rp46.108.750.197,25, maka Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp28.394.944.058,25 atau (61,58%).

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**Rp724.226.605.890,00**

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan asli daerah dari laba atas penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Papua pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 sebesar Rp724.226.605.890,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 160
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	724.223.405.759,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	3.200.131,00
Jumlah Pendapatan Bagian Laba BUMD-LO	724.226.605.890,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 sebesar Rp724.226.605.890,00 bila dibandingkan dengan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2021 sebesar Rp37.103.640.271,43, maka Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp687.122.965.618,57 atau 1.851,90%.

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA)	766.991.557.636,00
b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO)	724.226.605.890,00
Selisih (a - b)	42.764.951.746,00
Dapat ditelusuri dari:	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan (LRA)	766.991.557.636,00
<i>Mutasi Tambah:</i>	
-	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Penyesuaian atas penerimaan Dividen PD Irian Bhakti	(200.000.000,00)
Penyesuaian atas penerimaan Dividen PT BPD Papua	(41.964.951.746,00)
Penyesuaian atas penerimaan Dividen PT JAMKRIDA	(600.000.000,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO)	724.226.605.890,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah Rp273.146.091.528,44

Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan asli daerah diluar dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp273.146.091.528,44 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 161
Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	12.172.800,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	23.243.600,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.262.000,00
Jasa Giro-LO	83.632.054.539,35
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	1.519.387,00
Pendapatan Bunga-LO	477.409.334,70
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	3.857.925.933,24
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.462.243.375,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.215.440.126,04
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	13.785.143.400,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	869.000,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	210.264.030,00
Pendapatan dari BLUD-LO	116.446.226.412,45
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	36.725.664.326,00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	12.290.653.264,66
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah-LO	273.146.091.528,44

Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp320.214.811.377,06 dan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp47.068.719.848,62 atau (14,70%) menjadi sebesar Rp273.146.091.528,44 pada TA 2022.

Selisih Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Lain-lain PAD yang Sah (LRA)	206.555.313.887,36
b. Lain-lain PAD yang Sah (LO)	267.784.227.528,44
Selisih (a - b)	(61.228.913.641,08)
Dapat ditelusuri dari:	
Lain-lain PAD yang Sah (LRA)	206.555.313.887,36
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Penyesuaian Piutang Deposito	3.972.141.729,18
Penyesuaian Jasa Giro Dana Cadangan	40.607.594.297,20

Penerimaan atas kekurangan Jasa Giro Dana Cadangan TA 2021	153.254.727,00
Piutang Pelayan Kesehatan RSUD Jayapura (BLUD)	6.491.015.537,00
Mencatat saldo Remunerasi TDF-TKD Bulan Desember 2022	30.608.230,66
Mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.793.731.626,04
Mencatat Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan	7.248.637.034,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Penyesuaian Tagihan Penjualan Angsuran	(68.069.540,00)
Lain-lain PAD yang Sah (LO)	267.784.227.528,44

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO Rp8.935.090.971.270,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Pemerintah Provinsi Papua dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp8.935.090.971.270,00 dan TA 2021 sebesar Rp12.899.925.625.924,00. Hal ini berarti Pendapatan Transfer-LO pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.964.834.654.654,00 atau (30,74%) dirinci sebagai berikut:

Tabel 162
Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	5.130.949.917.270,00	4.972.403.600.924,00	158.546.316.346,00	3,19
2 Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	3.804.141.054.000,00	7.927.522.025.000,00	(4.123.380.971.000,00)	(52,01)
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	8.935.090.971.270,00	12.899.925.625.924,00	(3.964.834.654.654,00)	(30,74)

Pendapatan Transfer-LO kepada Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Rp5.130.949.917.270,00

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp5.130.949.917.270,00 dan TA 2021 sebesar Rp4.972.403.600.924,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 163
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Dana Bagi Hasil Pajak	518.004.139.902,00	594.205.179.058,00	(76.201.039.156,00)	(12,82)
2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.420.935.343.899,00	415.519.591.161,00	1.005.415.752.738,00	241,97
3 Dana Alokasi Umum	2.441.016.270.883,00	2.314.920.067.000,00	126.096.203.883,00	5,45
4 Dana Alokasi Khusus	750.994.162.586,00	1.647.758.763.705,00	(896.764.601.119,00)	(54,42)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO	5.130.949.917.270,00	4.972.403.600.924,00	158.546.316.346,00	3,19

Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan-LO pada TA 2022 sebesar Rp5.130.949.917.270,00 naik sebesar Rp158.546.316.346,00 atau 3,19% dari Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan-LO pada TA 2021 sebesar Rp4.972.403.600.924,00.

Selisih Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan-LRA dan Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LRA)	5.004.746.236.115,00
b. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LO)	5.130.949.917.270,00
Selisih (a - b)	(126.203.681.155,00)
Dapat ditelusuri dari:	
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LRA)	5.004.746.236.115,00
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Mencatat Saldo Pokok TDF-TKD per 31 Desember 2022	126.203.681.155,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
-	0,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LO)	5.130.949.917.270,00

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Rp518.004.139.902,00

Dana bagi hasil pajak adalah dana yang bersumber dari hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp518.004.139.902,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 164
Transfer Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
DBH PBB-LO	296.070.247.437,00
DBH PPh Pasal 21-LO	217.160.682.325,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	4.773.210.140,00
Jumlah Transfer DBH Pajak-LO	518.004.139.902,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO pada TA 2022 sebesar Rp518.004.139.902,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.201.039.156,00 atau (12,82%) dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO pada TA 2021 sebesar Rp594.205.179.058,00.

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp1.420.935.343.899,00

Dana bagi hasil sumber daya alam adalah dana yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Papua dari sumber daya alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp1.420.935.343.899,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 165
Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	5.764.213.458,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.343.454.977.333,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	11.000.988.794,00
DBH SDA Kehutanan-DR-LO	60.715.164.314,00
Jumlah Transfer DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	1.420.935.343.899,00

Pendapatan Transfer DBH Bukan Pajak/SDA-LO pada TA 2022 sebesar Rp1.420.935.343.899,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.005.415.752.738,00 atau 241,97% dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO pada TA 2021 sebesar Rp415.519.591.161,00.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Rp2.441.016.270.883,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp2.441.016.270.883,00 mengalami kenaikan sebesar Rp126.096.203.883,00 atau 5,45% dari Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2021 sebesar Rp2.314.920.067.000,00.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Rp750.994.162.586,00

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dengan bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp750.994.162.586,00 terdiri dari: (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler-LO sebesar Rp253.541.999.921,00; (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan – LO sebesar Rp113.292.632.200,00; dan (3) Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO sebesar Rp384.159.530.465,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 166
Transfer Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Dana Alokasi Khusus Reguler	253.541.999.921,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	68.938.212.274,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan-LO	111.017.325.688,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	14.084.195.171,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	11.147.132.361,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	32.348.223.702,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	16.006.910.725,00
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	113.292.632.200,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	69.157.399.505,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	12.113.666.330,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	24.462.784.698,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	7.558.781.667,00
65 Dana Alokasi Khusus Nonfisik	384.159.530.465,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	252.771.442.987,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	112.027.235.580,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	6.939.000.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	5.886.524.896,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.338.834.500,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	3.669.227.539,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	788.311.963,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	437.153.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	301.800.000,00
Jumlah Transfer Dana Alokasi Khusus	750.994.162.586,00

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus-LO pada TA 2022 sebesar Rp750.994.162.586,00 mengalami penurunan sebesar Rp896.764.601.119,00 atau (54,42%) dari Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus-LO pada TA 2021 sebesar Rp1.647.758.763.705,00.

5.4.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Rp3.804.141.054.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah dana transfer yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp3.804.141.054.000,00 dan TA 2021 sebesar Rp7.927.522.025.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 167
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

	URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	Dana Otonomi Khusus	3.792.655.366.000,00	7.911.837.607.000,00	(4.119.182.241.000,00)	(52,06)
2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Insentif Daerah	11.485.688.000,00	15.684.418.000,00	(4.198.730.000,00)	(26,77)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya-LO	3.804.141.054.000,00	7.927.522.025.000,00	(4.123.380.971.000,00)	(52,01)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO TA 2022 sebesar Rp3.804.141.054.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.123.380.971.000,00 atau (52,01%) dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO 2021 sebesar Rp7.927.522.025.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO TA 2022 terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah lainnya dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus Rp3.792.655.366.000,00

Dana Otonomi Khusus adalah Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Khusus pada Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp3.792.655.366.000,00 dan TA 2021 sebesar Rp7.911.837.607.000,00 terdiri dari:

🏛️ Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp1.580.796.000.000,00;

🏛️ Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp2.211.859.366.000,00.

5.4.1.2.2.2 Dana Penyesuaian Rp0,00

Pendapatan Dana Penyesuaian Pemerintah Provinsi Papua baik pada TA 2022 maupun 2021 tidak ada realisasi atau Rp0,00.

5.4.1.2.2.3 Dana Insentif Daerah Rp11.485.688.000,00

Dana Insentif Daerah adalah pendapatan berupa uang yang berasal dari pemerintah pusat karena memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dana Insentif daerah yang diterima Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp11.485.688.000,00 dan pada TA 2021 adalah sebesar Rp15.684.418.000,00.

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO Rp4.467.066.197,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain kepada Pemerintah Provinsi Papua yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp4.467.066.197,00 dan TA 2021 sebesar Rp95.135.811.061,12 dirinci sebagai berikut:

Tabel 168
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1	Pendapatan Hibah	4.396.650.135,00	88.195.637.292,12	(83.798.987.157,12)	(95,01)
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	70.416.062,00	6.940.173.769,00	(6.869.757.707,00)	(98,99)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO		4.467.066.197,00	95.135.811.061,12	(90.668.744.864,12)	(95,30)

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp4.467.066.197,00. Bila dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp95.135.811.061,12, maka Lain-lain Pendapatan yang sah-LO pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp90.668.744.864,12 atau (95,30%) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp4.396.650.135,00

Pendapatan Hibah adalah Pendapatan berupa Uang, Barang dan atau Jasa yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Masyarakat, Organisasi dan Badan Usaha Dalam Negeri yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pendapatan hibah berupa uang, barang dan atau jasa bagi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp4.396.650.135,00.

🏛️ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp599.040.000,00.

🏛️ Sumbangan Pihak Ketiga senilai Rp3.797.610.135,00 berasal dari Sumbangan Sukarela dari Pihak Ketiga (SP3) yang mengerjakan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua.

Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp4.396.650.135,00 mengalami penurunan sebesar Rp83.798.987.157,12 atau (95,01%) dibandingkan dengan Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua TA 2021 sebesar Rp88.195.637.292,12.

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya Rp70.416.062,00

Pendapatan Lainnya Pemerintah Provinsi Papua merupakan pendapatan yang diperoleh dari hibah dana BOS atau pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun sebelumnya.

Pendapatan Lainnya Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp70.416.062,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.869.757.707,00 atau (98,99%) dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya pada Pemerintah Provinsi Papua TA 2021 adalah senilai Rp6.940.173.769,00.

Rekapitulasi Pendapatan-LO dan Pendapatan Asli Daerah-LO per unit organisasi/OPD TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran: 10 - Lampiran: 11**.

5.4.2 BEBAN Rp10.605.685.323.139,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp10.605.685.323.139,00 dan pada TA 2021 sebesar Rp15.742.185.276.466,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 169
Beban Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(AUDITED)	(Audited)	Rp	%
1	Beban Pegawai-LO	2.433.503.558.492,00	2.289.363.220.911,00	144.140.337.581,00	6,30
2	Beban Persediaan	2.969.915.028.532,77	2.706.685.917.768,85	263.229.110.763,92	9,73
3	Beban Jasa	1.030.016.211.865,83	1.105.078.456.764,86	(75.062.244.899,03)	(6,79)
4	Beban Pemeliharaan	168.310.042.449,22	201.282.625.768,61	(32.972.583.319,39)	(16,38)
5	Beban Perjalanan Dinas	473.291.578.551,00	474.309.610.723,00	(1.018.032.172,00)	(0,21)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	23.787.857,00	0,00	23.787.857,00	0,00
8	Beban Hibah	1.696.830.984.408,60	4.689.289.982.303,00	(2.992.458.997.894,40)	(63,81)
9	Beban Bantuan Sosial	43.752.760.076,37	119.937.333.696,91	(76.184.573.620,54)	(63,52)
10	Beban Penyusutan	1.082.775.101.320,10	1.215.519.842.691,01	(132.744.741.370,91)	(10,92)
11	Beban Penyisihan Piutang	705.435.304,02	1.035.860.315,20	(330.425.011,18)	(31,90)
12	Beban Transfer	675.401.468.603,00	2.898.926.734.192,00	(2.223.525.265.589,00)	(76,70)
13	Beban Lain-lain	31.159.365.679,15	40.755.691.331,58	(9.596.325.652,43)	(23,55)
Jumlah Beban Operasional		10.605.685.323.139,10	15.742.185.276.466,00	(5.136.499.953.326,96)	(32,63)

Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp10.605.685.323.139,10. Bila dibandingkan dengan Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp15.742.185.276.466,00. maka Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.136.499.953.326,96 atau (32,63%)

Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp10.605.685.323.139,10 dirinci sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Pegawai-LO Rp2.433.503.558.492,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Beban Pegawai dan Tunjangan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp2.433.503.558.492,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 170
Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	867.297.592.206,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.399.994.118.880,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.216.408.760,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	78.821.029.371,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	136.103.051,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	828.750.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB	35.999.502.139,00
Beban Pegawai BLUD	20.210.054.085,00
Beban Pegawai-LO	2.433.503.558.492,00

Beban Pegawai-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp2.433.503.558.492,00 dan TA 2021 sebesar Rp2.289.363.220.911,00. Hal ini berarti Beban Pegawai-LO pada TA 2022 naik sebesar Rp144.140.337.581,00 atau sebesar 6,30% dibandingkan Beban Pegawai-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp2.289.363.220.911,00.

Selisih Belanja Pegawai dan Beban Pegawai-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai (LRA)	2.413.293.504.407,00
b. Beban Pegawai (LO)	2.433.503.558.492,00
Selisih (a - b)	(20.210.054.085,00)

Dapat ditelusuri dari:

Belanja Pegawai **2.413.293.504.407,00**

Mutasi Tambah:

Reklasifikasi Beban Jasa Tenaga Kesehatan BLUD ke Beban Pegawai 20.210.054.085,00

Mutasi Kurang:

- 0,00

Beban Pegawai (LO) **2.433.503.558.492,00**

5.4.2.2 Beban Persediaan Rp2.969.915.028.532,77

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk Barang atau Perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban persediaan yang dimaksudkan dalam laporan operasional adalah penggunaan barang barang persediaan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan periode 31 Desember 2022.

Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 memiliki Beban Persediaan-LO sebesar Rp2.969.915.028.532,77 dirinci sebagai berikut:

Tabel 171
Beban Persediaan-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Barang Pakai Habis	2.961.157.588.507,05
Beban Barang Tak Habis Pakai	8.757.440.025,72
Beban Persediaan-LO	2.969.915.028.532,77

Beban Pesediaan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp2.969.915.028.532,77 mengalami kenaikan sebesar Rp263.229.110.763,92 atau 9,73% apabila dibandingkan dengan Beban Pesediaan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp2.706.685.917.768,85.

Selisih Belanja Barang dan Beban Barang/Persediaan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Barang (LRA)	2.669.366.283.198,73
-------------------------	----------------------

b. Beban Barang/Persediaan (LO)	2.969.915.028.532,77
Selisih (a - b)	(300.548.745.334,04)
Dapat ditelusuri dari:	
Belanja Barang (LRA)	2.669.366.283.198,73
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Beban Jasa Tenaga Kesehatan (BLUD) ke Beban Barang/Persediaan	12.724.414.418,87
Penyesuaian Penggunaan Persediaan OPD Awal Tahun dari Beban Barang/Persediaan	1.716.811.673.922,87
Belanja Modal yang tidak menghasilkan Aset Tetap	21.045.672.294,78
Belanja Modal menjadi Beban Barang/Persediaan	26.690.591.939,59
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Belanja Barang menghasilkan Aset Tetap	(51.111.031.236,00)
Penyesuaian Sisa Persediaan OPD Akhir Tahun dari Beban Barang/Persediaan	(1.425.612.576.006,07)
Beban Barang/Persediaan (LO)	2.969.915.028.532,77

5.4.2.3 Beban Jasa Rp1.030.016.211.865,83

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa yang habis pakai.

Beban Jasa pada Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp1.030.016.211.865,83 dirinci sebagai berikut:

Tabel 172
Beban Jasa Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Jasa Kantor	377.301.654.139,10
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	142.748.780.581,95
Beban Sewa Tanah	1.692.000.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	78.309.345.942,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	45.793.736.613,43
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	23.650.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	84.900.120.665,80
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	78.309.345.942,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.807.776.210,79
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	3.953.505.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	44.056.875.999,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.453.498.285,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	701.500.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.877.870.000,00
Beban Penunjang Otonomi Khusus	3.000.000.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	157.945.779.428,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	73.852.820.500,75
Beban Jasa -LO	1.030.016.211.865,83

Beban Jasa-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp1.030.016.211.865,83 mengalami penurunan sebesar Rp75.062.244.899,03 atau (6,79%) dibandingkan Beban Jasa – LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp1.105.078.456.764,86.

Selisih Belanja Jasa dan Beban Jasa-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

Belanja Jasa (LRA)	1.111.372.069.453,13
Beban Jasa (LO)	1.030.016.211.865,83
Selisih (a - b)	81.355.857.587,30
Dapat ditelusuri dari:	
Belanja Jasa (LRA)	1.111.372.069.453,13
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Belanja Modal menjadi Beban Jasa	14.873.480.239,00
Penyesuaian Penyajian Uang Muka Pembangunan Bandar Udara Ninia atas Pembayaran Potongan Pajak ke Kas Negara dan Jasa Konsultansi Perencanaan	256.360.780,00
Pengakuan Utang dari Beban Iuran Jaminan/Asuransi	24.543.054.900,00

Reklasifikasi dari Beban Hibah dan Beban Tidak Terduga/Luar Biasa atas iuran ke BPJS	68.082.633.784,00
Penyesuaian Beban Dibayar di Muka OPD Awal Tahun dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan	219.952.775,04

Mutasi Kurang:

Belanja Jasa Menghasilkan Aset Tetap	(50.507.168.656,26)
Penyesuaian Sisa Persediaan OPD Akhir Tahun dari Beban Jasa Kantor	(6.605.644.593,61)
Penyesuaian Pembayaran Utang dari Beban Jasa Kantor	(1.009.622.144,00)
Reklas Beban Jasa Tenaga Kesehatan BLUD ke Beban Barang/Persediaan	(12.724.414.418,87)
Reklas Beban Jasa Tenaga Kesehatan BLUD ke Beban Pegawai	(20.210.054.085,00)
Penyesuaian Beban Dibayar di Muka OPD Akhir Tahun dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan	(1.308.161.509,60)
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS ke Beban Lain-Lain/Ekstrakomptabel	(16.601.206.126,00)
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS ke Beban Hibah atas Sekolah Swasta (SMA, SMK, dan SLB)	(80.365.068.532,00)

Beban Jasa (LO) 1.030.016.211.865,83

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan Rp168.310.042.449,22

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan adalah beban atas pemeliharaan aset tetap Pemerintah Provinsi Papua yang tidak dikapitalisasi ke aset tetap selama periode TA 2022.

Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 memiliki Beban Pemeliharaan sebesar Rp168.310.042.449,22 dirinci sebagai berikut :

Tabel 173
Beban Pemeliharaan-LO Tahun Anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH
Beban Pemeliharaan Tanah	10.311.665.688,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.533.115.536,40
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.857.061.151,01
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.746.762.651,42
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.861.437.422,39
Beban Pemeliharaan-LO	168.310.042.449,22

Beban Pemeliharaan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp168.310.042.449,22 mengalami penurunan sebesar Rp32.972.583.319,39 atau (16,38%) dibandingkan Beban Pemeliharaan – LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp201.282.625.768,61.

Selisih Belanja Pemeliharaan (LRA) dan Beban Pemeliharaan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Pemeliharaan (LRA)	233.018.114.679,10
b. Beban Pemeliharaan (LO)	168.310.042.449,22
Selisih (a - b)	64.708.072.229,88

Dapat ditelusuri dari:

Belanja Pemeliharaan (LRA) 233.018.114.679,10

Mutasi Tambah:

Belanja Modal menjadi Beban Pemeliharaan	23.408.092.151,38
--	-------------------

Mutasi Kurang:

Belanja Pemeliharaan Menghasilkan Aset Tetap	(88.116.164.381,26)
--	---------------------

Beban Pemeliharaan (LO) 168.310.042.449,22

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas Rp473.291.578.551,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Jabatan.

Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 memiliki Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp473.291.578.551,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 174
Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	457.407.163.093,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	15.884.415.458,00
Beban Perjalanan Dinas-LO	473.291.578.551,00

Beban Perjalanan Dinas-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp473.291.578.551,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.018.032.172,00 atau (0,21%) dibandingkan Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2021 sebesar Rp474.309.610.723,00.

5.4.2.6 Beban Subsidi Rp23.787.857,00

Beban Subsidi merupakan beban yang timbul akibat belanja yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat umum.

Beban Subsidi Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp23.787.857,00 adalah beban yang disalurkan dalam rangka subsidi bunga kredit Program Papeda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.

Selisih Belanja Subsidi (LRA) dan Beban Subsidi (LO) dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Subsidi (LRA)	0,00
b. Beban Subsidi (LO)	23.787.857,00
Selisih (a - b)	(23.787.857,00)
Dapat ditelusuri dari:	
Belanja Subsidi (LRA)	0,00
Mutasi Tambah:	23.787.857,00
Pengkuan Beban Subsidi berdasarkan Surat PT BPD Papua Nomor 05/09/UMK/2023 atas Rekening Nomor 1000126002481	
Mutasi Kurang:	0,00
-	0,00
Beban Subsidi (LO)	23.787.857,00

5.4.2.7 Beban Hibah Rp1.696.830.984.408,60

Beban Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pemerintah Provinsi Papua Memiliki Beban Hibah-LO TA 2022 sebesar Rp1.696.830.984.408,60 dirinci sebagai berikut:

Tabel 175
Beban Hibah-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.224.300.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	862.075.468.308,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	67.766.337.107,78
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	678.926.206.460,82
Beban Hibah kepada Koperasi	2.700.000.000,00
Beban Hibah Dana BOS	80.365.068.532,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.773.604.000,00
Beban HibaH-LO	1.696.830.984.408,60

Beban Hibah–LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp1.696.830.984.408,60 mengalami penurunan sebesar Rp2.992.458.997.894,40 atau (63,81%) dibandingkan Beban Hibah–LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp4.689.289.982.303,00.

Selisih Belanja Hibah (LRA) dan Beban Hibah (LO) dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Hibah (LRA)	1.634.316.326.641,84
b. Beban Hibah (LO)	1.696.830.984.408,60
Selisih (a - b)	(62.514.657.766,76)
Dapat ditelusuri dari:	
Belanja Hibah (LRA)	1.634.316.326.641,84
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Belanja Modal ke Beban Hibah (Aset Tetap yang Dihilangkan)	50.644.251.685,76
Belanja BOS Sekolah Swasta (SMA, SMK, dan SLB) yang Menjadi Beban Hibah	80.365.068.532,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Beban Hibah ke Beban Barang/Persediaan	(3.150.315.451,00)
Beban Hibah ke Beban Iuran Jaminan/Asuransi atas Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN ke BPJS	(65.344.347.000,00)
Beban Hibah (LO)	1.696.830.984.408,60

5.4.2.8 **Beban Bantuan Sosial** **Rp43.752.760.076,37**

Beban Bantuan Sosial adalah beban bantuan berupa uang yang diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Beban bantuan sosial merupakan beban pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Beban Bantuan Sosial–LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp43.752.760.076,37 mengalami penurunan sebesar Rp76.184.573.620,54 atau (63,52%) dibandingkan Beban Bantuan Sosial–LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp119.937.333.696,91.

Beban Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp43.752.760.076,37 dirinci sebagai berikut:

Tabel 176
Beban Bantuan Sosial-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	25.987.319.875,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	480.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.618.500.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	13.666.940.201,37
Beban Bantuan Sosial-LO	43.752.760.076,37

5.4.2.9 **Beban Penyusutan** **Rp1.082.775.101.320,10**

Beban Penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan. Beban penyusutan masuk dalam Laporan Operasional, sedangkan akumulasi penyusutan masuk dalam Neraca.

Beban penyusutan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.082.775.101.320,10 dirinci sebagai berikut:

Tabel 177
Beban Penyusutan-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Penyusutan Alat Besar	232.546.365.308,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	15.333.333,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	139.631.087.778,19
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	709.005.662.401,91
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.576.652.499,00
Beban Penyusutan-LO	1.082.775.101.320,10

Beban penyusutan dihitung menggunakan pendekatan bulanan penggunaan, dengan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh sesuai dengan Bultek SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual.

5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang Rp705.435.304,02

Beban penyisihan piutang adalah pengakuan atas taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Beban penyisihan piutang akan tampak dalam Laporan Operasional, sedangkan akun akumulasi penyisihan piutang akan terlihat dalam Neraca.

Beban penyisihan piutang TA 2022 sebesar Rp705.435.304,02 dan TA 2021 sebesar Rp1.035.860.315,20 dirinci sebagai berikut:

Tabel 178
Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	74.479.800,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	630.955.504,02
Beban Penyisihan Piutang-LO	705.435.304,02

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp705.435.304,02 mengalami penurunan sebesar Rp330.425.011,18 atau (31,90%) dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp1.035.860.315,20.

5.4.2.11 Beban Transfer Rp675.401.468.603,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp675.401.468.603,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 179
Beban Transfer Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota	675.401.468.603,00
Beban Transfer-LO	675.401.468.603,00

Bila dibandingkan Beban Transfer Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp2.898.926.734.192,00, maka Beban Transfer Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.223.525.265.589,00 atau (76,70%).

Selisih Belanja Transfer (LRA) dan Beban Transfer (LO) dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Belanja Transfer (LRA) 650.691.965.709,00
- b. Beban Transfer (LO) 675.401.468.603,00

Selisih (a - b)

Dapat ditelusuri dari:

Belanja Transfer (LRA) 650.691.965.709,00

Mutasi Tambah:

- Pengakuan Hutang Kurang Salur Dana Bagi Hasil TA 2022 94.070.275.147,00
- Penyesuaian atas Piutang Kelebihan Transfer Dana Bagi Hasil 378.236.602,00

Mutasi Kurang:

- Pembayaran Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak PKB, BBN-KB, PAP, PBB-KB dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua untuk Tahun 2021 (69.739.008.855,00)

Beban Transfer (LO) 675.401.468.603,00

5.4.2.12 Beban Lain-lain Rp31.159.365.679,15

Beban lain-lain Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 yang terdiri dari beban barang ekstrakomptabel sebesar Rp31.159.365.679,15.

Rekapitulasi Beban per unit organisasi/OPD TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran: 12**

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL Rp584.416.677.650,38

Surplus/defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang dari Pendapatan dan Beban selama periode pelaporan dari kegiatan operasional.

Surplus/defisit dari kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp584.416.677.650,38 dan 31 Desember 2021 sebesar negatif Rp983.955.448.659,09 merupakan selisih lebih Pendapatan dibandingkan Beban yang berasal dari kegiatan operasional yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 180
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	(AUDITED)	(Audited)	Rp	%
1 PENDAPATAN-LO	11.190.102.000.789,40	14.758.229.827.806,90	(3.568.127.827.017,49)	(24,18)
2 BEBAN	10.605.685.323.139,10	15.742.185.276.466,00	(5.136.499.953.326,96)	(32,63)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	584.416.677.650,38	(983.955.448.659,09)	1.568.372.126.309,47	(159,39)

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 adalah sebesar Rp584.416.677.650,38 naik sebesar Rp1.568.372.126.309,47 atau (159,39%) dibandingkan dengan TA 2021 adalah sebesar negatif Rp983.955.448.659,09.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp1.255.644,00

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.255.644,00 dirinci sebagai berikut:

5.4.4.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Rp0,00

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL dan tahun 2021 sebesar Rp280.740.000,00 berasal dari Surplus mutasi aset tetap.

5.4.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Rp1.255.644,00

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada tahun 2022 sebesar Rp1.255.644,00 dan tahun 2021 sebesar Rp54.000.000,00 berasal dari Surplus akibat tidak ditagihnya hutang belanja TA 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.4.4.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Rp0,00

Defisit Penjualan Aset Nonlancar pada tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL dan tahun 2021 sebesar Rp359.936.939,00 adalah sebagai berikut:

🏛️ Defisit atas penghapusan Peralatan dan Mesin Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah senilai Rp68.305.679,00.

🏛️ Defisit atas pengembalian Aset Lainnya Pada Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp10.891.260,00.

🏛️ Defisit Mutasi Aset antar OPD senilai Rp280.740.000,00.

5.4.4.4 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Rp0,00

Surplus Penjualan Aset Nonlancar baik pada tahun 2022 maupun tahun 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

5.4.4.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL sedangkan tahun 2021 sebesar Rp156.244.000,00 ialah defisit dari kekurangan volume pengadaan Peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA Rp584.417.933.294,38

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa adalah surplus atau defisit dari kegiatan operasional ditambah dengan surplus atau defisit kegiatan non operasional. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa pada Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp584.417.933.294,38 dan pada TA 2021 sebesar negatif Rp984.136.889.598,09 dirinci sebagai berikut:

Tabel 181
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(AUDITED)	(Audited)	Rp	%
1	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	584.416.677.650,38	(983.955.448.659,09)	1.568.372.126.309,47	(159,39)
2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.255.644,00	(181.440.939,00)	182.696.583,00	(100,69)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		584.417.933.294,38	(984.136.889.598,09)	1.568.554.822.892,47	(159,38)

5.4.6 POS LUAR BIASA (Rp188.384.463.037,00)

Pos Luar Biasa adalah pendapatan dan pengeluaran yang timbul dari peristiwa atau transaksi yang merupakan bagian dari kegiatan normal, tetapi atas dasar sifat, ruang lingkup, atau karakternya yang jarang terjadi, maka perlu disajikan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan (asas bruto), dengan tujuan agar dapat memberikan sudut pandang baru terhadap hasil/output dan pengembangan dalam kegiatan normal Daerah.

Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua pada pada TA 2022 sebesar negatif Rp188.384.463.037,00 dan pada TA 2021 sebesar negatif Rp119.120.628.800,00. dirinci sebagai berikut:

5.4.6.1 Pendapatan Luar Biasa Rp0,00

Pendapatan luar biasa pada Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.6.2 Beban Luar Biasa Rp188.384.463.037,00

Beban luar biasa Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 memenuhi definisi peristiwa luar biasa dan perlu disajikan secara terpisah.

Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp188.384.463.037,00. Bila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua TA 2021 sebesar Rp119.120.628.800,00, maka Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp69.263.834.237,00 atau 58,15%.

Selisih Belanja Tak Terduga (LRA) dan Beban Luar Biasa/Tak Terduga (LO) diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Tak Terduga (LRA)	196.021.127.021,00
b. Beban Luar Biasa/Tak Terduga (LO)	188.384.463.037,00
Selisih (a - b)	7.636.663.984,00

Dapat ditelusuri dari:

Belanja Tak Terduga (LRA) 196.021.127.021,00

Mutasi Tambah:

-

Mutasi Kurang:

Pengembalian Sisa Dana Hibah atas Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020 Provinsi Papua (4.898.377.200,00)

Beban Tak Terduga/Luar Biasa ke Beban Iuran Jaminan/Asuransi atas Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 ke BPJS (2.738.286.784,00)

Beban Luar Biasa/Tak Terduga (LO) 188.384.463.037,00

5.4.7 SURPLUS/DEFISIT-LO**Rp396.033.470.257,38**

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/defisit merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban selama periode pelaporan setelah perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp396.033.470.257,38 dan TA 2021 sebesar negatif Rp1.103.257.518.398,09 dirinci sebagai berikut:

Tabel 182
Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(AUDITED)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	584.417.933.294,38	(984.136.889.598,09)	1.568.554.822.892,47	(159,38)
2 POS LUAR BIASA	(188.384.463.037,00)	(119.120.628.800,00)	(69.263.834.237,00)	58,15
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	396.033.470.257,38	(1.103.257.518.398,09)	1.499.290.988.655,47	(135,90)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Laporan Operasional Pemerintah Provinsi pada TA 2022 mengalami SURPLUS sebesar Rp396.033.470.257,38.

Bila dibandingkan dengan Surplus/defisit Laporan Operasional TA 2021 sebesar negatif Rp1.103.257.518.398,09, maka Surplus/defisit Laporan Operasional TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.499.290.988.655,47 atau (135,90%).

5.6 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan Arus Kas dengan menggunakan metode langsung, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

Laporan Arus Kas mencerminkan kondisi obyektif kas dan menyajikan informasi keuangan mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas per tanggal pelaporan, sehingga saldo akhir kas dalam Laporan Arus Kas akan sama dengan saldo kas dalam Neraca per tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua diklasifikasikan dalam 4 (empat) komponen aktivitas, yaitu: (1) Aktivitas Operasi; (2) Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan; (3) Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan; dan (4) Aktivitas Transitoris/Non Anggaran. Masing-masing aktivitas dilaporkan arus masuk dan arus keluar kasnya sehingga diperoleh informasi tentang arus kas bersih dari tiap-tiap aktivitas.

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Papua selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Realisasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp1.614.905.039.162,19 dan Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2021 sebesar Rp137.669.621.815,21. Arus kas bersih dari aktivitas operasi positif menggambarkan bahwa secara internal pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional rutinnnya, terkait dengan penyediaan pelayanan publik.

Realisasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 yang bernilai positif menunjukkan adanya kesehatan keuangan dan kesinambungan fiskal yang baik serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2021 sebesar Rp137.669.621.815,21; maka Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.477.235.417.346,98 atau 1.173,03%.

Realisasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dapat dirinci sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas **Rp11.040.028.768.899,40**

Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp11.040.028.768.899,40 dan pada TA 2021 sebesar Rp13.880.902.505.035,30.

Realisasi Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 183
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)		
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%	
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.235.493.977.265,00	1.627.366.516.469,00	(391.872.539.204,00)	(24,08)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	17.713.806.139,00	38.776.532.961,25	(21.062.726.822,25)	(54,32)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	766.991.557.636,00	40.489.377.934,00	726.502.179.702,00	1.794,30
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	206.475.071.547,36	428.036.066.953,92	(221.560.995.406,56)	(51,76)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	1.938.939.483.801,00	1.009.724.770.219,00	929.214.713.582,00	92,03
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	2.314.812.589.728,00	2.314.920.067.000,00	(107.477.272,00)	(0,00)
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	366.834.632.121,00	346.127.480.826,00	20.707.151.295,00	5,98
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Nonfisik	384.159.530.465,00	136.961.051.879,00	247.198.478.586,00	180,49
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	3.792.655.366.000,00	7.911.837.607.000,00	(4.119.182.241.000,00)	(52,06)
10	Penerimaan Dana Insentif daerah	11.485.688.000,00	15.684.418.000,00	(4.198.730.000,00)	(26,77)
11	Penerimaan Hibah	4.396.650.135,00	4.038.442.024,12	358.208.110,88	8,87
12	Penerimaan Lainnya	70.416.062,00	6.940.173.769,00	(6.869.757.707,00)	(98,99)
13	<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi		11.040.028.768.899,40	13.880.902.505.035,30	(2.840.873.736.135,93)	(20,47)

Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp11.040.028.768.899,40 mengalami penurunan sebesar Rp2.840.873.736.135,93 atau (20,47%) bila dibandingkan dengan Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp13.880.902.505.035,30.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas Rp9.425.123.729.737,17

Realisasi Arus keluar kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp9.425.123.729.737,17 dan Arus keluar kas aktivitas operasi TA 2021 sebesar Rp13.743.232.883.220,08.

Realisasi Arus keluar kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

Tabel 184
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)		
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%	
1	Pembayaran Pegawai	2.413.293.504.407,00	2.277.396.143.279,00	135.897.361.128,00	5,97
2	Pembayaran Barang dan Jasa	4.487.048.045.881,96	4.665.313.897.647,17	(178.265.851.765,21)	(3,82)
3	Pembayaran Subsidi	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
4	Pembayaran Hibah	1.634.316.326.641,84	3.695.916.305.303,00	(2.061.599.978.661,16)	(55,78)
5	Pembayaran Bantuan Sosial	43.752.760.076,37	119.937.333.696,91	(76.184.573.620,54)	(63,52)
6	Pembayaran Tak Terduga	196.021.127.021,00	119.120.628.800,00	76.900.498.221,00	64,56
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	650.691.965.709,00	814.343.316.031,00	(163.651.350.322,00)	(20,10)
8	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	0,00	2.050.955.258.463,00	(2.050.955.258.463,00)	(100,00)
9	<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi		9.425.123.729.737,17	13.743.232.883.220,08	(4.318.109.153.482,91)	(31,42)

Arus keluar kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp9.425.123.729.737,17 mengalami penurunan sebesar Rp4.318.109.153.482,91 atau (31,42%) dibandingkan dengan realisasi arus keluar kas aktivitas operasi pada TA 2021 sebesar Rp13.743.232.883.220,08.

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Pemerintah Provinsi Papua melakukan aktivitas investasi untuk menjaga kesinambungan operasional rutin pemerintah daerah saat ini serta untuk meningkatkan kapasitas pemberian pelayanan publik di masa depan.

Realisasi Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 bersaldo negatif Rp1.749.300.308.361,66 dan TA 2021 bersaldo negatif Rp1.231.352.597.799,73. Hal ini menunjukkan

adanya pengeluaran kas yang lebih besar dibandingkan penerimaan kas dan menunjukkan adanya pertumbuhan aset tetap yang positif.

Realisasi arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dan 2021 terdiri dari:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas Rp300.233.497.067,00

Arus masuk kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp300.233.497.067,00 dan TA 2021 sebesar Rp5.020.981.816,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 185
Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 <i>Pencairan Dana Cadangan</i>	300.153.254.727,00	0,00	300.153.254.727,00	0,00
2 Penjualan atas Tanah	10.815.000,00	0,00	10.815.000,00	0,00
3 Penjualan atas Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	4.924.427.026,00	(4.898.927.026,00)	(99,48)
4 Penjualan atas Gedung dan Bangunan	43.927.340,00	88.230.090,00	(44.302.750,00)	(50,21)
5 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Penjualan Aset Lainnya	0,00	8.324.700,00	(8.324.700,00)	(100,00)
8 <i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	300.233.497.067,00	5.020.981.816,00	295.212.515.251,00	5.879,58

Arus masuk kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp300.233.497.067,00 atau naik sebesar Rp295.212.515.251,00 atau 5.879,58% dibandingkan dengan realisasi arus masuk kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2021 sebesar Rp5.020.981.816,00.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas Rp2.049.533.805.428,66

Realisasi arus keluar kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp2.049.533.805.428,66 dan TA 2021 sebesar Rp1.236.373.579.615,73 terdiri dari:

Tabel 186
Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 <i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Perolehan Tanah	25.000.000.000,00	51.383.998.445,89	(26.383.998.445,89)	(51,35)
3 Perolehan Peralatan dan Mesin	236.086.848.452,50	202.131.678.407,72	33.955.170.044,78	16,80
4 Perolehan Gedung dan Bangunan	1.054.570.476.959,30	666.090.072.105,71	388.480.404.853,59	58,32
5 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	709.924.786.398,86	193.212.822.156,41	516.711.964.242,45	267,43
6 Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.504.767.568,00	3.555.008.500,00	(1.050.240.932,00)	(29,54)
7 Perolehan Aset Lainnya	1.446.926.050,00	0,00	1.446.926.050,00	0,00
8 <i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>	20.000.000.000,00	120.000.000.000,00	(100.000.000.000,00)	(83,33)
9 <i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>				
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	2.049.533.805.428,66	1.236.373.579.615,73	813.160.225.812,93	65,77

Realisasi Arus keluar kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.049.533.805.428,66 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.236.373.579.615,73. Hal ini berarti realisasi arus keluar kas aktivitas investasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp813.160.225.812,93 atau 65,77%.

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Realisasi arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas Rp0,00

Realisasi arus masuk kas Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Papua tidak menerima kas yang berhubungan dengan pinjaman dan/atau pelunasan utang jangka panjang.

Tabel 187
Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas Rp0,00

Realisasi arus keluar kas baik baik Tahun Anggaran 2022 maupun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

Tabel 188
Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Papua mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah yang terdiri dari:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas Rp3.005.491.221.085,90

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris pada TA 2022 sebesar Rp3.005.491.221.085,90 dan pada TA 2021 sebesar Rp2.161.652.085.532,75 adalah merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 189
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	702.978.511.580,00	609.528.763.758,75	93.449.747.821,25	15,33
2 Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	2.301.278.058.947,90	1.552.123.321.774,00	749.154.737.173,90	48,27
3 Penerimaan Sisa UUDP Tahun Sebelumnya	1.234.650.558,00	0,00	1.234.650.558,00	0,00
4 Kas Masuk dari kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	3.005.491.221.085,90	2.161.652.085.532,75	843.839.135.553,15	39,04

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris pada TA 2022 sebesar Rp3.005.491.221.085,90 yang merupakan penjumlahan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar

Rp702.978.511.580,00, Penerimaan Kembali Uang Persediaan sebesar Rp2.301.278.058.947,90 yang terdiri atas (1) setoran kas tahun berjalan sebesar Rp84.646.353.496,00 dan (2) pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU TA 2022 sebesar Rp2.216.631.705.451,90, dan Penerimaan Sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.234.650.558,00 yang merupakan setoran sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 di TA 2022. Hal ini berarti pada TA 2022 Arus masuk kas dari aktivitas transitoris mengalami kenaikan sebesar Rp843.839.135.553,15 atau (39,04%) apabila dibandingkan dengan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.161.652.085.532,75.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas **Rp3.005.340.972.728,90**

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada TA 2022 sebesar Rp3.005.340.972.728,90 dan TA 2021 sebesar Rp2.203.784.515.358,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 190
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	702.978.511.580,00	609.409.970.929,75	93.568.540.650,25	15,35
2 Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	2.302.362.461.148,90	1.553.519.435.161,00	748.843.025.987,90	48,20
3 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	40.855.109.267,30	(40.855.109.267,30)	(100,00)
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	3.005.340.972.728,90	2.203.784.515.358,05	801.556.457.370,85	36,37

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.005.340.972.728,90 yang terdiri dari pengeluaran PFK BUD sebesar Rp702.978.511.580,00, dan Pemberian Kembali Uang Persediaan Kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.302.362.461.148,90, yang merupakan Pencairan SP2D UP/GU/TU TA 2022. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada TA 2022 sebesar Rp3.005.340.972.728,90, bila dibandingkan dengan Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada TA 2021 sebesar Rp2.203.784.515.358,05, maka realisasi Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp801.556.457.370,85 atau 36,37%.

5.5.5 SALDO AKHIR KAS **Rp1.794.885.454.005,57**

Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BLUD.

Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD.

Saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp1.794.885.454.005,57 dan sebesar Rp1.929.487.051.363,04. Hal ini berarti terjadi penurunan saldo kas sebesar Rp134.601.597.357,47 atau (6,98%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 191
Saldo Akhir Kas Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.614.905.039.162,19	137.669.621.815,21	1.477.235.417.346,98	1.073,03
2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.749.300.308.361,66)	(1.231.352.597.799,73)	(517.947.710.561,93)	42,06
3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	150.248.357,00	(42.132.429.825,30)	42.282.678.182,30	(100,36)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(134.245.020.842,47)	(1.135.815.405.809,82)	1.001.570.384.967,35	(88,18)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di	1.928.090.937.976,04	3.021.839.384.740,56	(1.093.748.446.764,52)	(36,19)

Bend Penerimaan dan Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS					
Koreksi SILPA Tahun Lalu		(77.333.055,00)	1.211.849.778,00	(1.289.182.833,00)	(106,38)
Saldo Awal Setelah Koreksi		1.928.013.604.921,04	3.023.051.234.518,56	(1.095.037.629.597,52)	(36,22)
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas Bendahara BOS		1.793.768.584.078,57	1.887.235.828.708,74	(93.467.244.630,17)	(4,95)
Terdiri dari:					
1	Kas di Kas Daerah	1.768.953.115.230,74	1.860.233.147.857,34	(91.280.032.626,60)	(4,91)
2	Kas di BLUD	22.779.956.117,83	22.749.163.967,40	30.792.150,43	0,14
3	Kas Dana BOS	2.035.512.730,00	4.253.516.884,00	(2.218.004.154,00)	(52,15)
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.084.402.201,00	1.234.650.558,00	(150.248.357,00)	(12,17)
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	40.855.109.267,30	(40.855.109.267,30)	(100,00)
Kas Lainnya		32.467.726,00	161.462.829,00	(128.995.103,00)	(79,89)
Saldo Akhir Kas		1.794.885.454.005,57	1.929.487.051.363,04	(134.601.597.357,47)	(6,98)

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas Bendahara BOS TA 2022 sebesar Rp1.928.090.937.976,04 berbeda dengan Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas Bendahara BOS TA 2021 sebesar Rp1.887.235.828.708,74 atau terdapat selisih sebesar Rp40.855.109.267,30 yang merupakan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021. Pada TA 2022, Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 sebesar Rp40.

Adapun Saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.794.885.454.005,57 terdiri dari (1) saldo kas di Bendahara Umum Daerah yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.768.953.115.230,74; (2) saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.084.402.201,00; (3) saldo kas di Bendaharan Penerimaan sebesar Rp0,00; (4) saldo kas di bendahara BLUD RSUD sebesar Rp22.779.956.117,83; (5) saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp2.035.512.730,00; (6) saldo kas lainnya sebesar Rp32.467.726,00.855.109.267,30 (RSUD Abepura (BLUD)) menjadi bagian dari kas di BLUD.

5.6 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Ekuitas Awal, Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Saldo Ekuitas akhir sebagai berikut:

- 5.6.1 EKUITAS AWAL** **Rp23.070.198.453.450,70**
- Ekuitas awal adalah total nilai ekuitas neraca tahun sebelumnya. Ekuitas awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp23.070.198.453.450,70. Dibandingkan dengan ekuitas awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp24.362.193.927.168,20, maka ekuitas awal per 1 Januari 2022 mengalami penurunan sebesar negatif Rp1.291.995.473.717,50 atau (5,30%).
- 5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO** **Rp396.033.470.257,38**
- Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp396.033.470.257,38 dan sebesar negatif Rp1.103.257.518.398,09. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan surplus/(Defisit)-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.499.290.988.655,47 atau (135,90%).
- 5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR** **(Rp3.769.255.954,47)**
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencakup koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, akumulasi penyusutan, koreksi aset lainnya, dan lain-lain.
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2022 sebesar negatif Rp3.769.255.954,47 dan tahun 2021 sebesar negatif Rp188.737.955.319,40. Hal ini berarti pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp184.968.699.364,93 atau (98,00%).
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 5.6.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN** **(Rp3.805.277.795,60)**
- Koreksi nilai Persediaan pada tahun 2022 senilai negatif Rp3.805.277.795,60 merupakan koreksi atas penggunaan alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan sedangkan koreksi nilai persediaan pada tahun 2021 senilai Rp18.160.650,00 yang merupakan koreksi barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa cincin emas pada Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.6.3.2 KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN** **Rp0,00**
- Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai 0,00 dan Rp870.391.749,70.
- Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2021 dikarenakan adanya perhitungan ulang aplikasi terhadap barang yang mengalami penyesuaian KIB pada Tahun 2020, serta penyesuaian pencatatan akumulasi penyusutan tahun 2015-2020 yang belum tercatat.
- 5.6.3.3 KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN** **Rp0,00**
- Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00 dan negatif Rp27.122.459.232,47.

- 5.6.3.4 KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN Rp0,00**
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00 dan negatif Rp3.882.173.838,58.
- 5.6.3.5 KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA Rp0,00**
Tidak terdapat Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya baik pada tahun 2022 maupun tahun 2021.
- 5.6.3.6 KOREKSI EKUITAS PIUTANG (Rp94.233.620,00)**
Koreksi Ekuitas Piutang Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai negatif Rp94.233.620,00 dan senilai negatif Rp159.893.524.801,00.
Pada tahun 2022 terdapat Koreksi ekuitas piutang senilai negatif Rp94.233.620,00 merupakan koreksi atas penghapusan Piutang kelebihan pembayaran hutang Pengadaan Peti Jenazah dan Asesoris Tahun 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sesuai nomor kontrak 602,1/1933,2/KPS/PJA/RSU/JPR/10/2020 senilai, piutang tersebut telah dihapuskan atas dasar surat pernyataan.
- 5.6.3.7 KOREKSI EKUITAS HUTANG Rp207.588.517,00**
Koreksi Ekuitas Hutang pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing adalah senilai Rp207.588.517,00 dan Rp166.405.520,00 yang dapat dirincikan sebagai berikut:
Koreksi Ekuitas Hutang senilai Rp207.588.517,00 dengan rincian sebagai berikut:
- ✚ Hutang Belanja Rumah Sakit Jiwa Abepura yang sudah terbayarkan dengan no SP2D 212/SP2D-LS/1.02.04.01/2021 senilai Rp83.805.687,00.
 - ✚ Koreksi atas hutang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Pada RSUD Jayapura TA. 2020, Spk 602.1/1779.2/ SPK/ APBD- RSUD/ JPR/ IX/ 2020 Tgl 21 September 2020 Oleh CV. PAPUA INA MANDIRI yang telah dibayarkan tahun melalui SP2D no 6997/SP2D-LS/1.02.02.01/2021 senilai Rp34.589.500,00.
 - ✚ Koreksi atas Hutang Belanja barang Jasa TA 2019 yang telah dibayarkan kepada Indofarma Global Medika pada tahun 2021 sesuai SP2D no 2969/SP2D-LS/1.02.02.01/2021 senilai Rp89.193.330,00.
- 5.6.3.8 KOREKSI EKUITAS PERALATAN MESIN (Rp0,87)**
Pada Tahun 2022 terdapat koreksi saldo ekuitas peralatan dan mesin sebesar Rp0,87 yang merupakan koreksi atas pembulatan saldo peralatan dan mesin menyesuaikan dengan rinciannya. Sedangkan pada Tahun 2021 tidak terdapat koreksi saldo ekuitas peralatan dan mesin.
- 5.6.3.9 KOREKSI SALDO AWAL – EKSTRAKOMPTABEL Rp0,00**
Ekstra komtabel (*extra comptable*) merupakan salah satu komponen pengurang aset, yaitu aset yang nilainya dibawah batas kapitalisasi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi.
Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 tidak terdapat koreksi saldo awal-ekstrakomtabel.
- 5.6.3.10 KOREKSI EKUITAS SALDO AWAL KAS (Rp77.333.055,00)**
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Kas Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing adalah senilai negatif Rp77.333.055,00 dan Rp1.211.849.778,00 dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Koreksi Ekuitas Kas Tahun 2022 senilai negatif Rp77.333.055,00 merupakan kelebihan catat Kas di Dana BOS Tahun 2021 senilai Rp77.393.055,00 dan kurang catat pada Kas Kas Tunai pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD senilai Rp60.000,00.
- ❖ Koreksi Ekuitas Kas Tahun 2021 senilai Rp1.211.849.778,00 ialah Koreksi Kas berupa pajak yang telah disetor ke Kas Negara berupa PPh Pasal 21 sebesar Rp70.588.636,00 atas pembayaran Ganda TPP dan ULP Tahun 2020, serta Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS senilai Rp1.282.438.414,00.

5.6.3.11 KOREKSI LABA INVESTASI PADA INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN Rp0,00

Tidak terdapat Koreksi Ekuitas Laba Investasi tahun 2022 dan tahun 2021.

5.6.3.12 KOREKSI EKUITAS ASET LAINNYA Rp0,00

Tahun 2022 tidak terdapat Koreksi Ekuitas Aset Lainnya, sedangkan pada tahun 2021 terdapat Koreksi Ekuitas Aset Lainnya senilai negatif Rp105.625.199,00 adalah koreksi akibat pengakuan penyisihan tagihan penjualan Angsuran berdasarkan SK Gubernur No. 133 Tahun 2004, SK Gubernur No. 138 Tahun 2010, SK Gubernur No. 84A Tahun 2011, Sk. Gubernur No.89 Tahun 2013 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

5.6.3.13 KOREKSI EKUITAS ASET TETAP LAINNYA Rp0,00

Tahun 2022 tidak terdapat koreksi ekuitas Aset Tetap Lainnya, sedangkan pada tahun 2021 terdapat Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya senilai negatif Rp980.000,00 adalah koreksi atas Aset Tetap lainnya yang nilainya dibawah kapitasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

5.6.4 EKUITAS AKHIR Rp23.462.462.667.753,60

Ekuitas Akhir diperoleh melalui penjumlahan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit Laporan Operasional dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Nilai Ekuitas akhir tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp23.462.462.667.753,60 dan sebesar Rp23.070.198.453.450,70. Hal ini berarti Ekuitas Akhir tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp392.264.214.302,90 atau 1,70%.

Nilai Ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp23.462.462.667.753,60 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca.

BAB VII

PENUTUP

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi, kenaikan dan penurunan SAL, posisi keuangan, kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, kondisi obyektif kas, dan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
2. Pendapatan-LRA Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp11.040.109.011.239,40, atau mencapai 102,56% dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp10.764.787.934.427,00. Hal ini berarti melebihi target pendapatan sebesar Rp275.321.076.812,36 atau 2,56%. Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8.808.887.290.115,00 atau 79,79%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp13.885.923.486.851,30 maka realisasi Pendapatan-LRA pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.845.814.475.611,93 atau 20,49%.
3. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.454.657.535.165,80 atau 88,72% dari anggarannya sebesar Rp12.910.509.249.727,00, Sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp1.455.851.714.561,17 atau 11,28%. Realisasi belanja daerah pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.404.948.927.669,98 atau (22,91%) bila dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp14.859.606.462.835,80. Belanja Operasi mempunyai proporsi 74,89% lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja modal 17,72% dan proporsi belanja tak terduga sebesar 1,71% dan proporsi belanja transfer sebesar 5,68% dari total belanja dan transfer daerah.
4. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2022 sebesar Rp1.929.325.588.534,04 merupakan akumulasi SILPA TA 2021. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp1.929.248.255.479,04. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp1.794.930.319.334,57. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar negatif Rp77.333.055,00 dan Lain-lain sebesar Rp0,00 sehingga, Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 Provinsi Papua sebesar Rp1.794.852.986.279,57.
5. Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2022 adalah Total Aset sebesar Rp23.612.100.674.504,90; Total Kewajiban sebesar Rp149.638.006.751,25 dan total Ekuitas sebesar Rp23.462.462.667.753,60. Total Aset merupakan gambaran kekayaan daerah per 31 Desember 2022 terdiri dari: (1) Aset Lancar sebesar Rp3.270.108.797.026,79; (2) Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.261.587.449.344,36; (3) Aset Tetap (netto) sebesar Rp17.922.725.953.178,30; (4) Dana Cadangan sebesar Rp918.567.915.952,00; dan (5) Aset Lainnya sebesar Rp239.110.559.003,44.
6. Pendapatan Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp11.190.102.000.789,40 dan Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp10.605.685.323.139,10. Surplus/(Defisit) dari kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp584.416.677.650,38. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.255.644,00, Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp584.417.933.294,38. Pos luar biasa Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebesar negatif Rp188.384.463.037,00, sehingga Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami Surplus-LO sebesar Rp396.033.470.257,38.
7. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 menggambarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.614.905.039.162,19, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar negatif Rp1.749.300.308.361,66, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp150.248.357,00, sehingga

terjadi penurunan kas pada tahun 2022 sebesar Rp134.245.020.842,47. Dengan demikian, Saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 sebesar Rp1.794.885.454.005,57 terdiri dari (1) saldo kas di Bendahara Umum Daerah yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.768.953.115.230,74; (2) saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.084.402.201,00; (3) saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00; (4) saldo kas di bendahara BLUD RSUD sebesar Rp22.779.956.117,83; (5) saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp2.035.512.730,00; (6) saldo kas Lainnya sebesar Rp32.467.726,00.

8. Ekuitas awal 1 Januari 2022 sebesar Rp23.070.198.453.450,70. Surplus – LO pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp396.033.470.257,38 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar negatif Rp3.769.255.954,47, sehingga Ekuitas akhir 31 Desember 2021 sebesar Rp23.462.462.667.753,60.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) pada umumnya berjalan dengan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Namun demikian kami juga menyadari dan perlu dipahami bersama, bahwa di samping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas di masa-masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Provinsi Papua dan pengabdian pada masyarakat di Tanah Papua.

PH. GUBERNUR PAPUA,

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MMp



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas

efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua menyajikan realisasi Belanja Daerah senilai Rp11,45 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat realisasi belanja senilai Rp1,57 triliun yang melampaui anggaran induk dengan rincian yaitu Belanja Barang dan Jasa senilai Rp403,70 miliar, Belanja Hibah senilai Rp437,44 miliar, Belanja Bantuan Sosial senilai Rp27,54 miliar, Belanja Modal senilai Rp566,11 miliar, dan Belanja Tidak Terduga senilai Rp141,02 miliar.

Atas pelampauan realisasi belanja tersebut Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Anggaran Perubahan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun penetapan peraturan gubernur tersebut tidak melalui persetujuan bersama DPRD dan pengesahan Menteri Dalam Negeri serta pelaksanaan dan substansi belanja tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria antara lain yaitu keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap pelampauan realisasi belanja tersebut dan dampaknya terhadap penyajian belanja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 01.B/LHP/XIX.JYP/05/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jayapura, 10 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Papua
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Martuana Saragi S.T., M.M., CSFA
Register CSFA Nomor R.0123.2022



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(**RKPD**)
TAHUN 2023**

BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok II, Kota Jayapura
Papua



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun RKPD Tahun 2023 yang digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan/3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan/4

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pemerintah nasional periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
 - b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - c. prioritas pembangunan daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - e. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 19* di daerah.
- (3) RKP Provinsi berpedoman pada RKP dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan RKP Provinsi.
- (4) Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
- (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (6) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan **hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan**.
- (7) Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (8) Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 19* di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat program-program yang berorientasi pada penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19*.

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKP Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKP Provinsi Tahun 2023.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas :
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - b. rancangan akhir RKP;
 - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKP;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKP;
 - f. hasil rewiu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 - g. daftar isian fasilitasi RKP Tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat **kegiatan dan sub kegiatan** yang berasal dari seluruh Renja SKPD yang berpedoman pada Renstra SKPD dan RPJMD.
- (3) Penyusunan Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (4) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja SKPD sebagaimana tercantum pada RPJMD dan Rentsra SKPD.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RKPD dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Dokumen RKPD;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang terdiri dari Kondisi Umum Daerah, yang mencakup aspek geografi, aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, serta dilengkapi dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, kinerja **dana otonomi khusus** dan permasalahan pembangunan daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang terdiri dari Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Priotitas Pembangunan Daerah, yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2023;
 - e. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kerangka Pengembangan Wilayah, Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Perekonomian Wilayah, Kebijakan Pengembangan Konektivitas, Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan, dan Pemetaan Program Strategis Dalam Kerangka Percepatan Pembangunan Papua;
 - f. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, yang terdiri dari Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kunci; dan
 - h. Pentutup.
- (2) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Format Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 6

- (1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyusunan :
 - a. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penyusunan RKPD Provinsi sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Tahun 2023;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2023;
 - c. penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2023;
 - d. pelaksanaan musyawarah RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2023; dan
 - f. penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2023.
- (3) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (5) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 7

Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 Agustus 2022

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Agustus 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan karuniaNya Pemerintah Provinsi Papua dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2022 ini tetap memedomani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023, Dokumen RKP, program-program prioritas dan strategis nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan telah selesainya penyusunan RKPD Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, para Kepala Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dalam membangun Provinsi Papua demi mewujudkan Visi Papua 2018-2023 yaitu : **“Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan”**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD sampai Tahun Berjalan
- 2.3 Kinerja Dana Otonomi Khusus
- 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2023

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

- 5.1 Kerangka Pengembangan wilayah
- 5.2 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah
- 5.3 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- 5.4 Pengembangan Perekonomian Wilayah
- 5.5 Kebijakan Pengembangan Konektivitas
- 5.6 Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan
- 5.7 Pemetaan Program Strategis Dalam Kerangka Percepatan Pembangunan

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- 6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023
- 6.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 7.1 Indikator Kinerja Utama
- 5.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2022
Tabel 2.2	Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua
Tabel 2.3	Potensi Mineral Logam dan Non Logam
Tabel 2.4	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021
Tabel 2.5	Indikator-Indikator Kemiskinan di Provinsi Papua
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 2017 – 2021
Tabel 2.7	Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2015-2020 (%)
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2016-2020
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2020
Tabel 2.10	Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020
Tabel 2.11	Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020
Tabel 2.12	Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020
Tabel 2.14	Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan
Tabel 2.15	Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 Berdasarkan Berat Badan per Tinggi Badan
Tabel 2.16	Angka Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Papua, Februari 2018 –Agustus 2020
Tabel 2.17	Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang)
Tabel 2.18	Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Pendidikan
Tabel 2.20	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Tahun 2020
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2019/2020-2020/2021

Tabel	2.22	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua
Tabel	2.23	Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2020-2021
Tabel	2.24	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
Tabel	2.25	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
Tabel	2.26	Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk
Tabel	2.27	Angkatan Kerja
Tabel	2.28	Lapangan Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel	2.29	Tabel Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel	2.30	Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)
Tabel	2.31	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m3)
Tabel	2.32	Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan (ha)
Tabel	3.1	Perkembangan PDRB Provinsi Papua Dari Sisi Permintaan
Tabel	3.2	Perkembangan PDRB Provinsi Papua dari sisi Lapangan Usaha
Tabel	3.3	Perkembangan Inflasi Provinsi Papua
Tabel	3.4	Indikator-Indikator Kemiskinan Di Provinsi Papua
Tabel	3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tabel	3.6	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tabel	3.7	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tabel	3.8	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 s.d 2020 (Rp)
Tabel	3.9	Pagu dan Estimasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 s.d 2022 (Rp)
Tabel	3.10	Realisasi Dan Alokasi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.)
Tabel	3.11	Alokasi Pembagian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (dalam Rp.)
Tabel	4.1	Keselarasn Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan
Tabel	4.2	Sandingan Isu-Isu Strategis Nasional, RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dan RKPD 2022
Tabel	4.3	Telaah POKIR DPRD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 (Daftar Terlampir)

Tabel	4.4	Persandingan antara Prioritas Nasional, Prioritas Daerah dan Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2023
Tabel	4.5	Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2023
Tabel	4.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasara Pembangunan Tahun 2023
Tabel	5.1	Pusat Pertumbuhan dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua
Tabel	5.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Tabel	5.3	Rencana Pengembangan Sebaran Sarana Prasarana Kesehatan dalam peningkatan akses dan kualitas kesehatan di Papua
Tabel	5.4	Pengembangan Perekonomian Wilayah
Tabel	5.5	Pengembangan Wilayah Perbatasan
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2023
Tabel	7.2	Sasaran Makro Pembangunan Daerah
Tabel	7.3	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2022
- Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua
- Gambar 2.2 Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua
- Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng
- Gambar 2.4 Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua
- Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Alam
- Gambar 2.6 Peta Intensitas Curah Hujan
- Gambar 2.7 Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI Liputan Tahun 2020 (dalam hektar)
- Gambar 2.8 Peta Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2020
- Gambar 2.9 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua
- Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua (%)
- Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
- Gambar 2.12 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
- Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Papua dan Indonesia (%), 2015-2019
- Gambar 2.14 IPM Nasional menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2020
- Gambar 2.15 Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015 - 2017 (%)
- Gambar 2.16 Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah)
- Gambar 2.17 Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua
- Gambar 2.18 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%)
- Gambar 2.19 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah)
- Gambar 2.20 Perkembangan Nilai Tukar Petani Papua menurut Subsektor Januari – Februari 2021
- Gambar 2.21 Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB

- Gambar 2.22 Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua
- Gambar 2.23 Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua
- Gambar 2.24 Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%)
- Gambar 2.25 Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017
- Gambar 2.26 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua
- Gambar 2.27 Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua
- Gambar 2.28 Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2020
- Gambar 2.29 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2020 (km)
- Gambar 2.30 Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua
- Gambar 2.31 Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua
- Gambar 2.32 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang)
- Gambar 2.33 Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)
- Gambar 2.34 Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua
- Gambar 2.35 Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang)
- Gambar 2.36 Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016
- Gambar 2.37 Jumlah Cadangan (Reserve) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua
- Gambar 4.1 Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023
- Gambar 5.1 Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua
- Gambar 5.2 Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua
- Gambar 5.3 Pengembangan Kewilayahan Papua secara Hilostic, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS)
- Gambar 5.4 Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 51 Tahun 2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang disebutkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 260 juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen-dokumen perencanaan ini dipedomani oleh Visi Provinsi Papua 2019-2023 yaitu **"Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan"** untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan.

Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Papua saat ini berada dalam era baru pelaksanaan otonomi khusus, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Adanya perubahan Undang-undang ini mengubah proporsi, mekanisme, dan tata kelola keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dana Otonomi Khusus. Perubahan pasal terkait pengelolaan keuangan juga dimaksudkan untuk mendorong sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Wilayah Papua. Hal ini membawa konsekuensi perubahan

perencanaan dan penganggaran di Provinsi Papua, secara khusus anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota di Provinsi Papua telah menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041, dimana Dokumen RIPPP ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Selain itu, RIPPP ini juga menjadi dasar pengelolaan Otonomi Khusus guna optimalisasi pembangunan dan mensejajarkan Wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Sehingga RKPD Provinsi Papua tahun 2023 ini juga harus berpedoman kepada dokumen RIPPP selain dokumen perencanaan pembangunan yang telah dipedomani.

RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 juga merupakan RKPD yang sangat strategis, karena merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, sehingga harus memastikan semua rencana pembangunan yang disusun dalam RKPD Tahun 2023 dapat menjamin pencapaian target indikator pembangunan akhir Periode RPJMD.

RKPD disusun berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Sedangkan perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Adapun perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Terakhir, untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, penyusunan RKPD 2023 juga diperkuat dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu :

1. Pengendalian perencanaan;

2. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran;
3. Perencanaan berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Integrasi sumber pendanaan.

Selanjutnya, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, penyusunan RKPD 2023 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Melalui penerapan berbasis IT (Informasi dan Teknologi) tersebut diharapkan RKPD 2023 akan lebih berkualitas, yang dapat memenuhi beberapa kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan penjabaran dari RPJMD;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. Program dan kegiatan dalam RKPD dilengkapi dengan pendanaan yang terukur dan menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2023 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi tahapan sebagai berikut :

- 1. Persiapan Penyusunan RKPD,** Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD,** Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri dari perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD
 - a. Perumusan rancangan awal RKPD, Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :
 - 1) Pengolahan data dan informasi
 - 2) Analisis gambarn umum kondisi daerah

- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah
 - 4) Evaluasi kinerja tahun lalu
 - 5) Penelaahan terhadap kebijakan nasional
 - 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)
 - 7) Perumusan permasalahan pembangunan
 - 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah
 - 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif
 - 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif
 - 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik
 - 12) Penyelerasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif
- b. Penyajian rancangan awal RKPD, Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
- 1) Pendahuluan
 - 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
 - 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
 - 4) Prioritas dan sasaran pembangunan
 - 5) Rencana program prioritas daerah

3. Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Papua.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD Provinsi Papua dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 2 forum musrenbang yaitu musrenbang otonomi khusus dan musrenbang RKPD, dimana musrenbang otonomi khusus akan difokuskan untuk persiapan pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sesuai sasaran dan ketentuan penggunaannya. sedangkan Musrenbang RKPD akan mengelaborasi hasil musrenbang otsus untuk kewenangan Provinsi yang harus disepakati dalam rancangan RKPD bersama perangkat daerah, Bappeda Provinsi dengan perangkat daerah dan Bappeda kabupaten/kota. Penajaman, penyelerasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

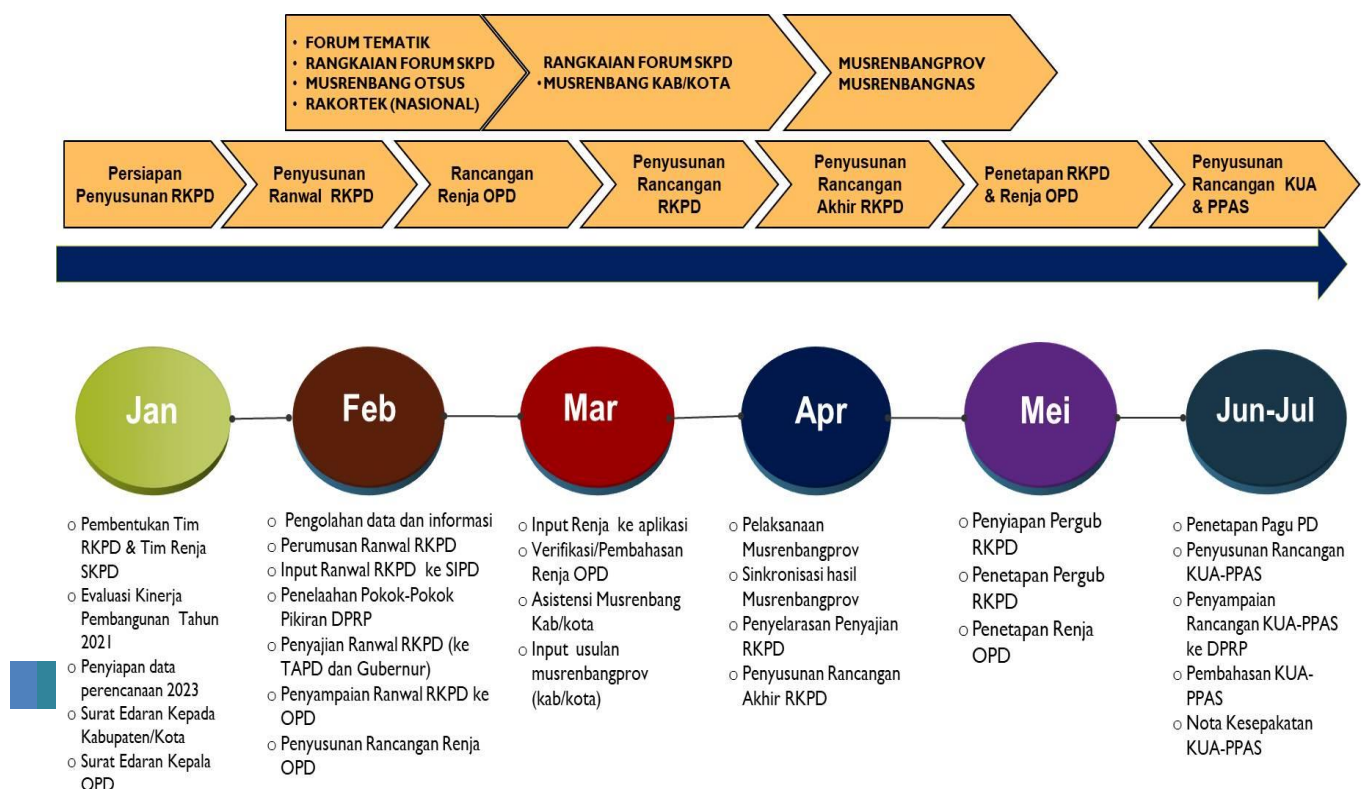
- a. Program dan kegiatan priortas pembangunan daerah Provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah Provinsi maupun melalui musrenbang kabupaten/kota
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi Papua
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, serta sinergi semua sumber pendanaan yang dikelola Provinsi Papua.
- e. Implementasi pendekatan THIS dalam program prioritas pembangunan Provinsi Papua (kolaborasi program/kegiatan dan pendanaan lintas sektor)
- f. Sinergi dengan RKP.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD

6. Penetapan RKPD, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, agar terjadi keselarasan antara perencanaan nasional dan daerah.

Semua ini dijabarkan dalam jadwal dan tahapan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Papua 2023 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2023



Untuk itu pondasi yang dibangun melalui RKPD 2023 harus lebih baik yang diwujudkan dengan perumusan prioritas daerah yang komprehensif dan holistik, yang dijabarkan secara integratif dan spasial, serta disusun secara teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Semua ini merupakan rangkaian proses sistematis dan terstruktur yang diimplementasikan melalui *Sistem Informasi Pembangunan Daerah* yang menjadi inovasi dari penyusunan RKPD Provinsi Papua saat ini, oleh karena hirarkinya semakin bertambah kuat dan terkendali yang akan menjamin dan memastikan terintegrasinya RKPD 2023 dengan RPJMD 2018-2023, RENSTRA-PD 2018-2023, RENJA-PD 2023, dan kepentingan seluruh *stakeholder* pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang

(RPJP) Nasional

10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;
17. Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefiskasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5998 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2019 sampai dengan 2023
37. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 selain disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

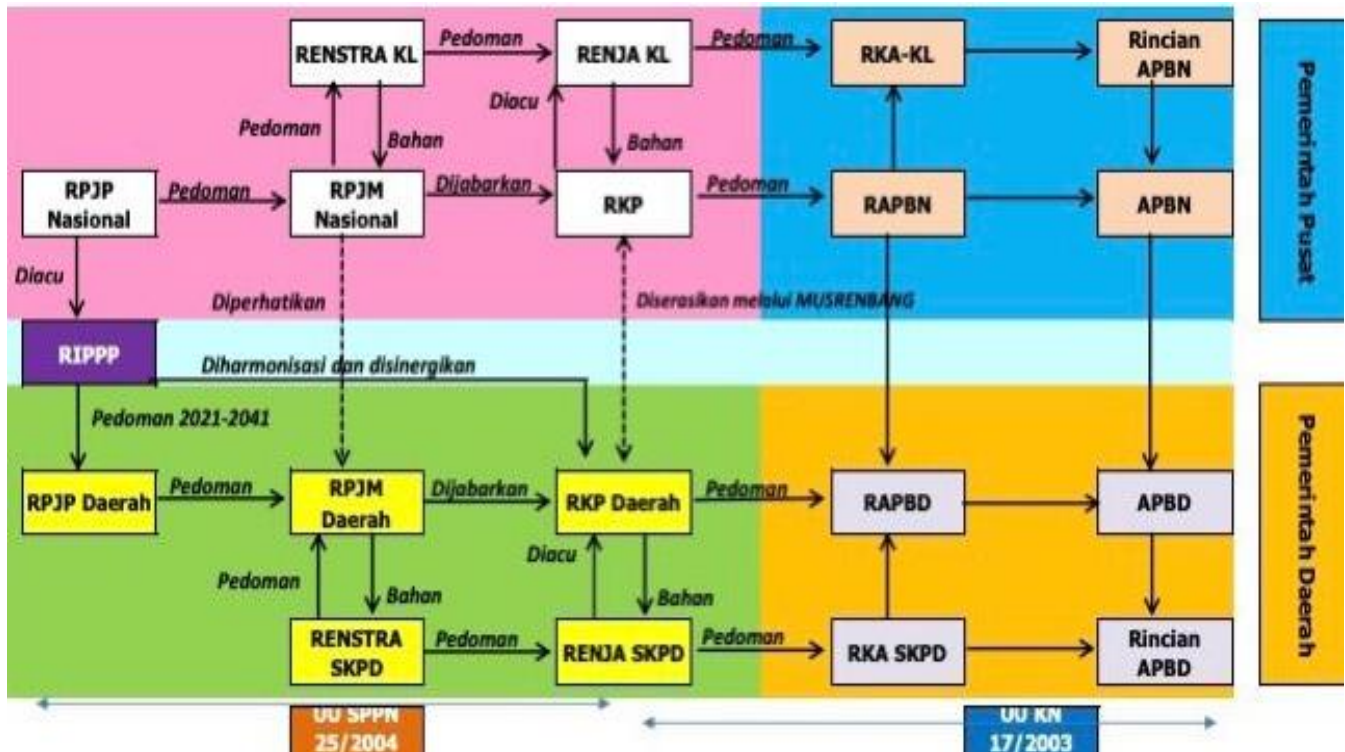
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program

Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2023 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-undang 17 Tahun 2003

Mengacu pada Gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKP dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah:

(1) RKP disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas, (2) RKP disusun dengan berpedoman pada RPJP dan RPJM yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. (3) selanjutnya RKP ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun 2023, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2023.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka

penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Sedangkan tujuannya adalah : (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023; (2). Menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023; (3). Menjadi acuan penyusunan RKPD tahun 2023 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua; (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan otonomi Khusus.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, termasuk pendapatan dan belanja dana otonomi khusus.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan otonomi khusus.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat mengenai aspek-aspek prioritas pengembangan kewilayahan yang perlu diperhatikan kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan Provinsi Papua

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023 dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.

BAB VIII PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2023 yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

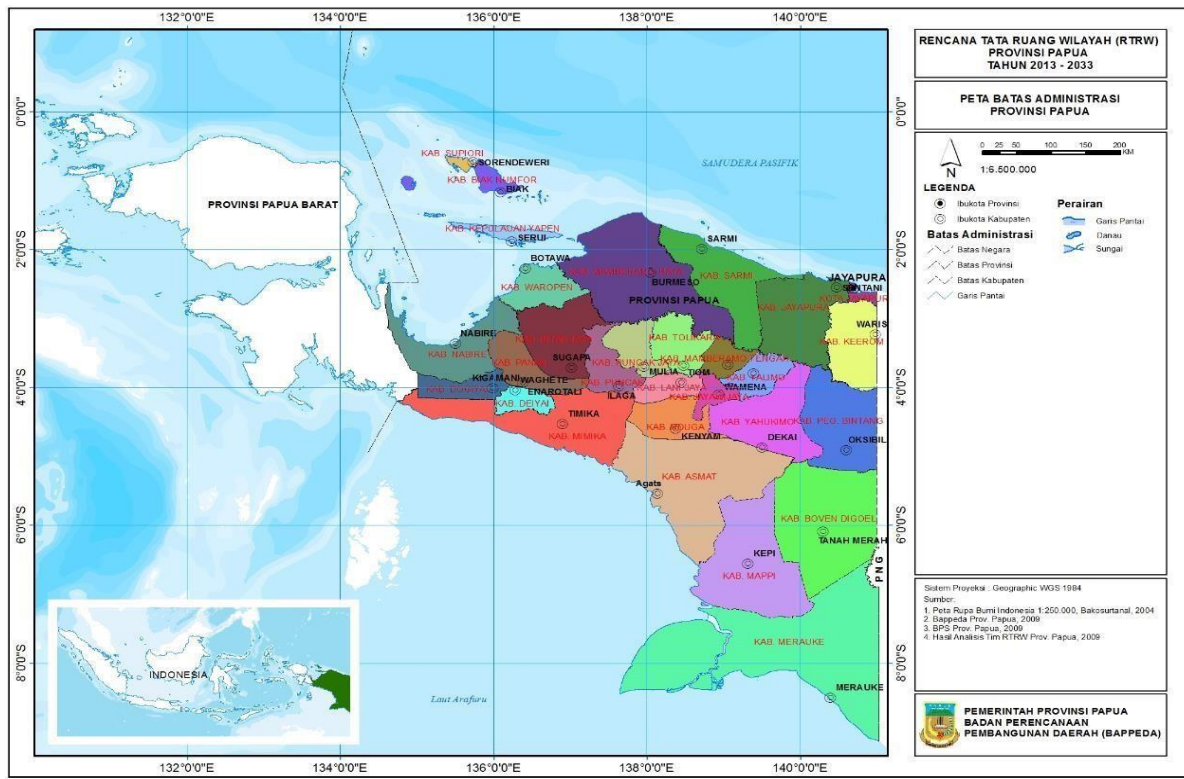
A. Luas dan Batas Wilayah

Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak pada garis koordinat $01^{\circ} 00' \text{ LU} -9^{\circ} 10' \text{ LS}$ dan $134^{\circ} 00' \text{ BT} -141^{\circ} 05' \text{ BT}$ dengan luas 32.027.839 hektar. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 Distrik dan 4.378 Kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Samudra Pasifik
Sebelah Selatan : Laut Arafuru
Sebelah Barat : Papua Barat
Sebelah Timur : Papua New Guinea

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar, kemudian Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas 7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir Saireri seluas 2.212.400 hektar.

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Tabel 2.1
Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2020

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km2)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Ha Anim	Merauke	47.406,90	Merauke	20	190	14	Dataran Mudah Akses
	Asmat	24.687,57	Agats	23	221	4	Dataran Sulit Akses
	BovenDigoel	24.66598	Tanah Merah	20	111	5	Dataran Sulit Akses
	Mappi	23.17845	Keppi	15	164	2	Dataran Sulit Akses
LaPago	Jayawijaya	2.331,19	Wamena	40	331	15	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	3.439,79	Tiom	39	356	-	
	Mamberamo Tengah	3.384,14	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	5.381,47	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	14.655,36	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	5.618,84	Ilaga	25	206	-	
	Puncak Jaya	2.446,50	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	6.14967	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	15.057,90	Dekai	51	518	1	
	Yalimo	3.65876	Elelim	5	300	-	
MeePago	Nabire	4.549,75	Nabire	15	89	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	2.300,37	Timika	18	147	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	2.32588	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	4.522,15	Kigamani	10	79	-	
	Intan Jaya	9.336,60	Sugapa	8	97	-	
Paniai	20.686,00	Enarotali	24	216	-		
Saireri	Biak Numfor	13.017,45	Biak	19	262	23	Dataran Mudah



Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km2)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
	Kepulauan Yapen	4.936,37	Serui	16	165	18	Akses
	Supiori	63424	Sorendiwari	5	38	1	Dataran Sulit Akses
	Waropen	5.381,47	Waren	12	117	1	
Mamta	Jayapura	14.390,16	Sentani	19	144	17	Dataran Mudah Akses
	Keerom	9.01503	Arso	11	91	-	
	Sarmi	13.965,58	Sarmi	19	111	2	
	Mamberamo Raya	28.034,87	Burmeso	9	59	-	Dataran Sulit Akses
	Kota Jayapura	950,38	Jayapura	5	39	23	
	Total	316.556			576	5.549	

Sumber : BPS Provinsi Papua, PAD 2021 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat 19 kabupaten diwilayah Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan. Dari 5.549 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik tahun 2021, sebanyak 4.349 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit akses, dimana kurang lebih 80% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi. Keragaman kondisi geografi wilayah kabupaten/kota yang tidak seimbang baik itu dilihat dari luas maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi pemerintah provinsi selama ini dalam memberi pelayanan publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah administrasi, terutama sengketa tapal batas antar wilayah kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki luas 1.456.400 hektar menurut UU pemekaran selama ini mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa kabupaten di sekelilingnya, seperti dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang.

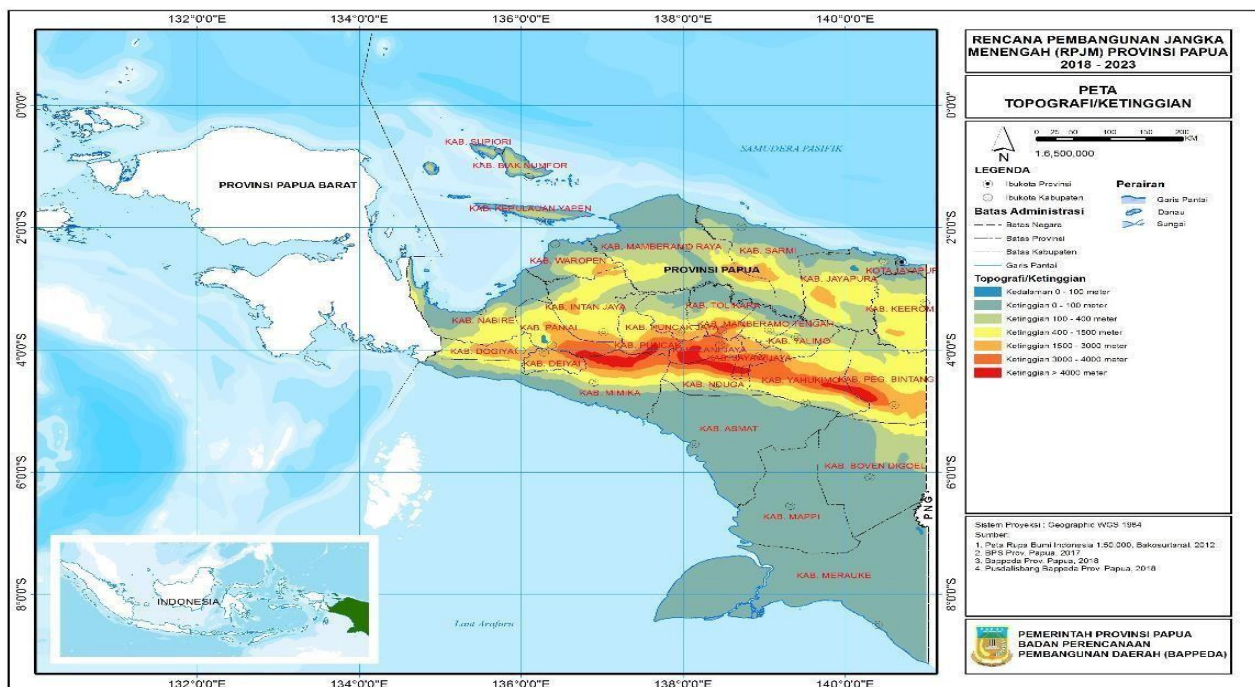
B. Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu : 1) Pegunungan Utara di lingkaran luar, 2) deretan Pegunungan Selatan di lingkaran dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari The Australian Continent. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling

rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl.

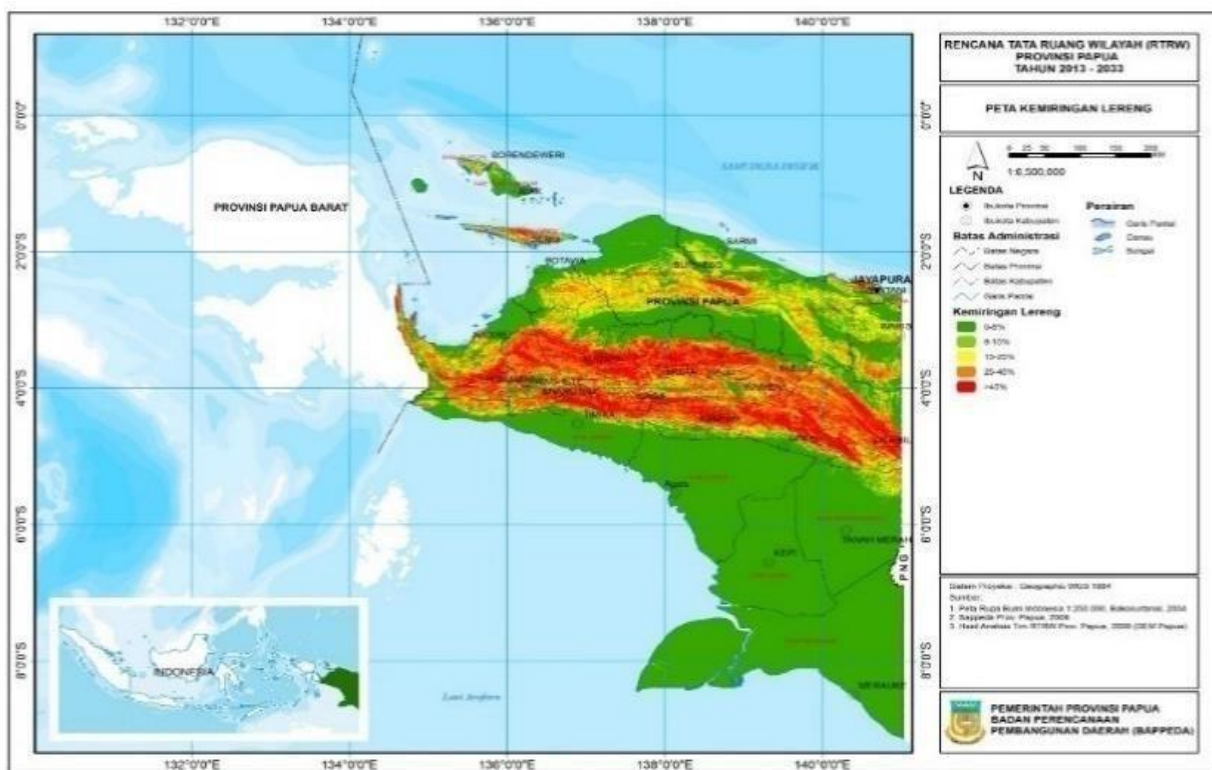
Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi papua adalah lereng landai (0– 8) % menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (> 40 %) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago. Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim menyebabkan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan.

Gambar 2.2
Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua



Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua, 2018-2023

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bappeda Provinsi Papua, 2013-2033

C. Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753, 823 km² (lihat Tabel 2.2). Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 2.2
Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan(Km ²)
Memberamo Hilir	660.457	80.099,16
Turitatu Hilir	788.626	47.872,90
Turiku Hilir	930.094	34.912,40
Apauwer	252.59	2.998,00
Wiru	155.114	2.494,80
Verkume	155.798	1.845,50



Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan(Km ²)
Biri	116.087	2.173,00
Sermo	151.866	1.599,20
Tor	244.29	3.153,60
Van Dallen	513.64	8.585,15
Wediman	875.27	11.492,30
Digul Kanan	420.912	7.253,70
Digul Hilir	1,178.81	33.698,04
Digul Kiri	615.753	6.162,50
Digul Timur	196.058	3.189,91
Digul Barat	196.01	2.489,90
Ein Hilir	1,956.46	65.315,43
Ein Hulu	509.886	5.337,72
Wapoga	574.393	10.637,14
Sobger	1.262.169	35.174,80
Turitatu Tengah	662.304	20.312,70
Bigadu	315.5	9.103,53
Sirowo	150.915	4.013,00
Turiku Hulu	10.628.779	7.925,61
Maro	559.804	9.909,00
Tami	320.328	7.015,40
Omba	157.253	3.427,60
Yawe	147.289	4.170,30
Lorentz	747.383	8.717,65
Kumbe	262.015	3.282,00
Wanggar	361.35	4.776,20
Kapiraya	121.26	2.860,90
Peter	682.955	10.992,30
Otokwa	187.337	3.395,30
Sentani	35.04	968,60
Grime	110.725	1.050,00
Bunga	397.783	3.457,07
Vriendschaps	475.472	5.912.508,00
Bian	640.218	12.080,12
Kamura	118.525	2.187,60
Rombak	346.119	1.971,20
Nadubuai	222.608	1.971,20
Brazza	990.666	10.088,02
Parongga	31.33	593,20
Yawe	61.296	1.272,00
Akimuga	288.925	2.660,10
Mimika	477,71	4.670,01
Aidoma	306.834	3.184.599,00



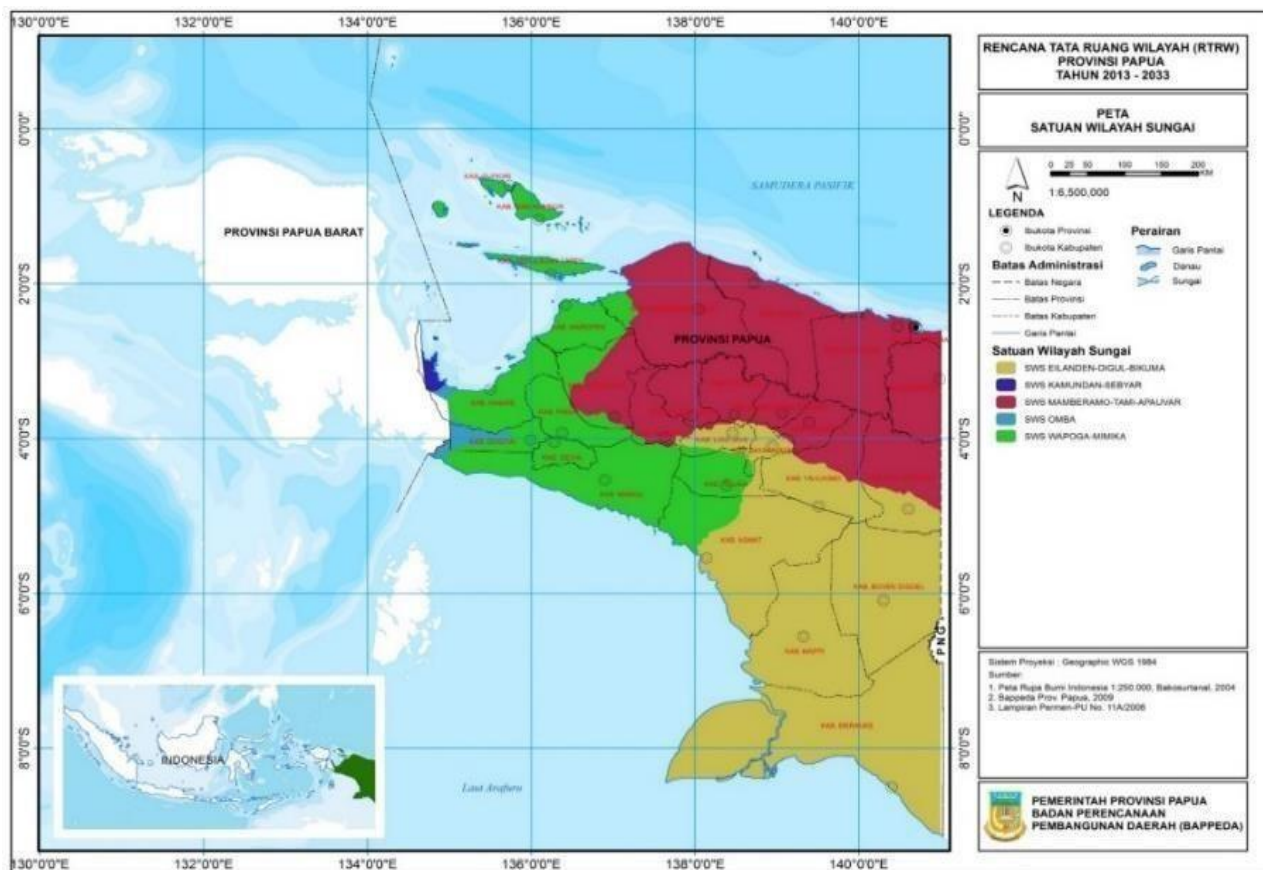
Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan(Km ²)
Minajerwi	447.597	5.054,70
Cemara	280.4	2.556,40
Otokwa	181.007	1.662,00
Nordwest	624.39	7.832,82
Odamun	264.36	6.808
Dolok	224.573	3.119,20
Bulaka	331.26	6.418,01
Siriwo	155.759	1.187,60
Kumbe	38.4	483,90
Paranggo	94.882	774,90
Kamura	270.438	2.243,20
Mappi	524.98	7.596,00
Biak	84.27	467,15
Supiori	83.457	245.917,00
Yapen	298.986	1.266.089,00
Gesa	457.979	5.551,02

Sumber : RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua sebagai berikut :

- 1) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua), terdiri atas beberapa DAS : DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS Sentani.
- 2) WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai : DAS Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.
- 3) Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba mencakup beberapa DAS : DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.

Gambar 2.4
Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bappeda Provinsi Papua, 2013-2033

- 4) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS Wapoga Mimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup beberapa DAS : DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori dan DAS Kemabu.

Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak, misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah.

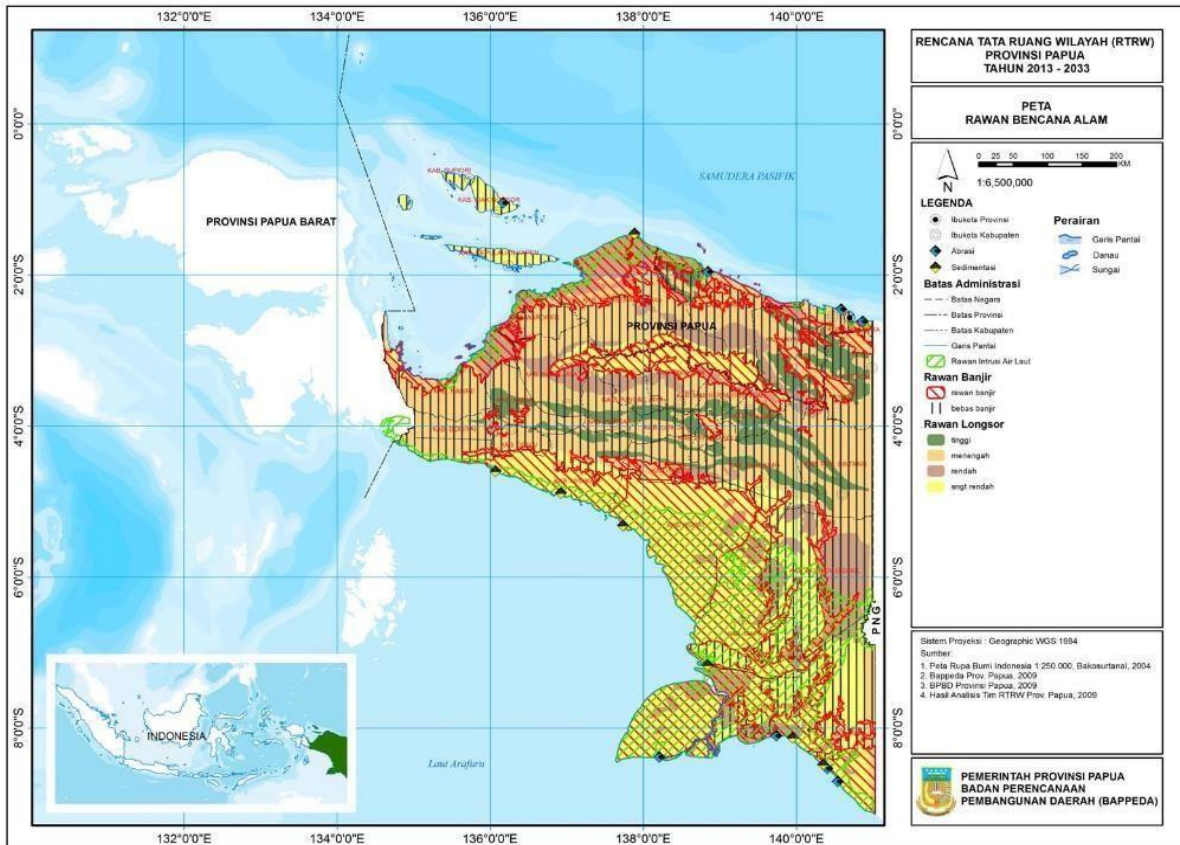
Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih

kokoh dibanding biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa over estimated. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.

D. Klimatologi

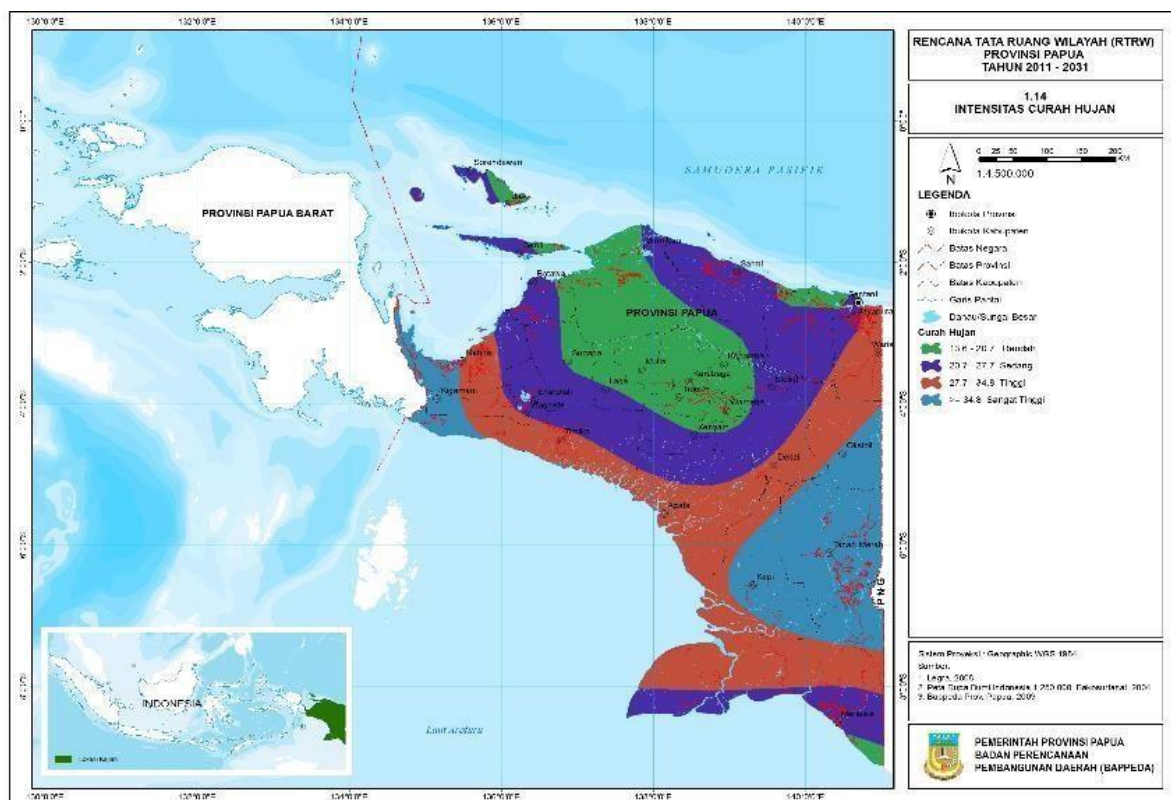
Iklm Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (tropical rain forest), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember- Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April - Mei dan Bulan Oktober - November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman. Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata di hampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat. Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi.

Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Alam



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bappeda Provinsi Papua, 2013-2033

Gambar 2.6
Peta Intensitas Curah Hujan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bappeda Provinsi Papua, 2013-2033



Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (lihat Gambar 2.6).

Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya. Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus-menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya.

Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pegunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-rata yaitu 7885 % dan durasi penyinaran matahari di Provinsi Papua berada pada level 35-68 % dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan butiran es sehingga menimbulkan hujan es. Hujan es yang pernah terjadi di tahun 2015 berlangsung selama 10 hari di tiga Kampung di Distrik Agadugume Kabupaten Puncak misalkan mengakibatkan tanaman di kebun warga membusuk dan mati, dan kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang mendiami tiga kampung tersebut terancam mengalami rawan pangan akibat peristiwa ini. Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033, maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang ialah sebagai berikut :

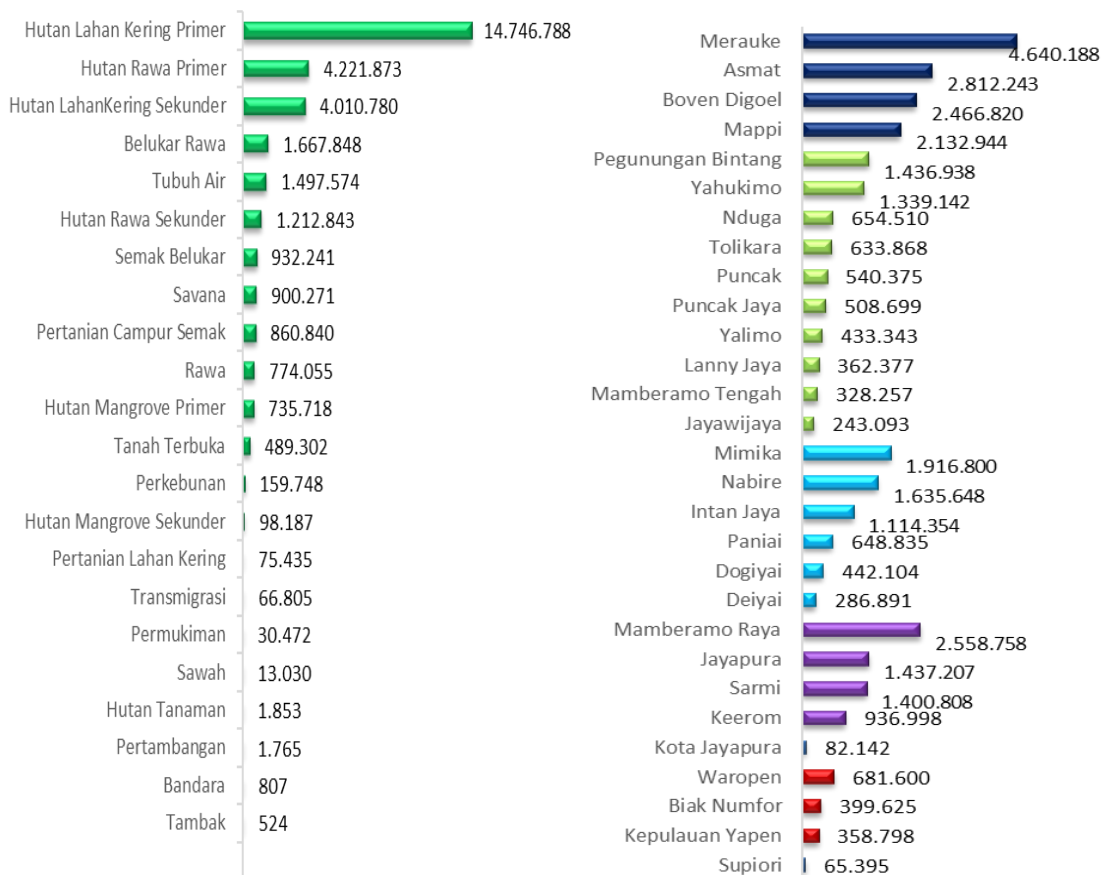
A. Potensi Hutan

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Provinsi Papua memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan

Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

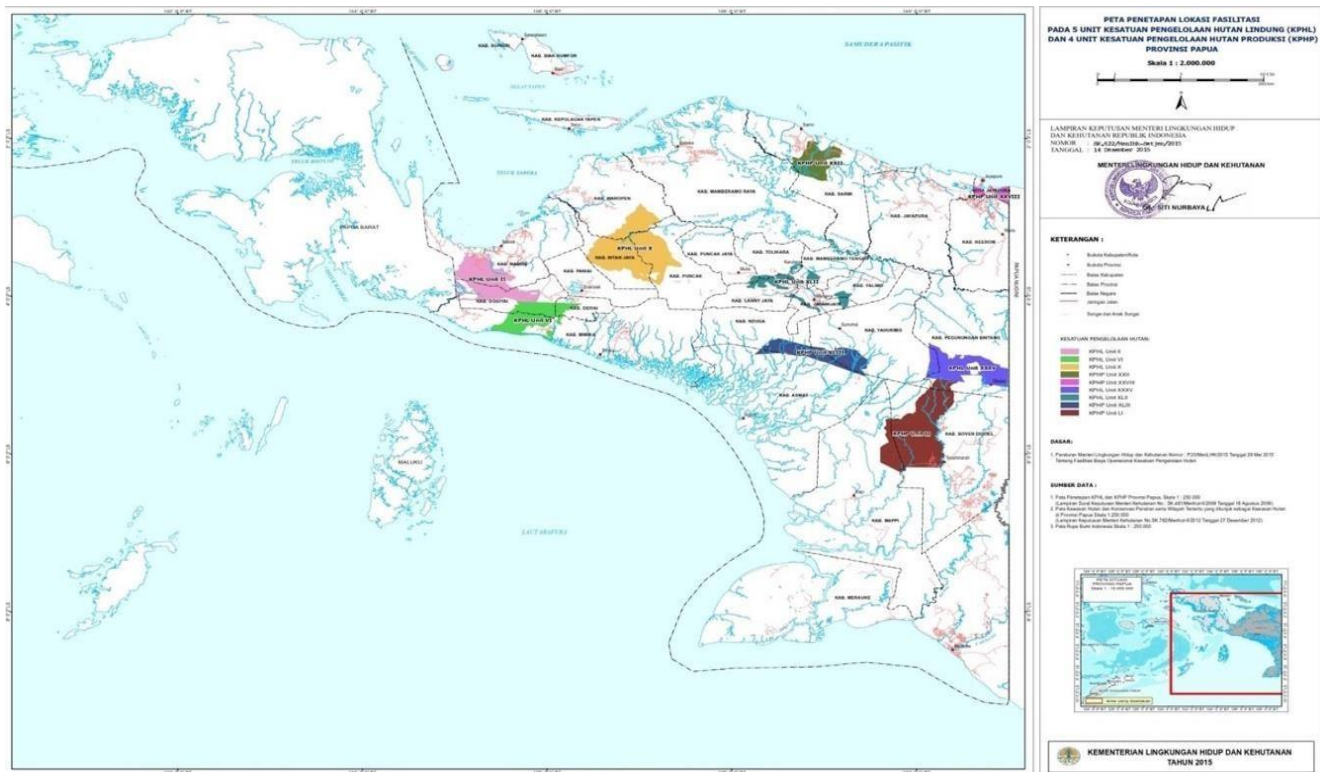
Gambar 2.7
Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI Liputan Tahun 2020 (dalam hektar)



Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2020

Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

Gambar 2.8
Peta Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2020



Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MenLHK/2015 Tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, di Provinsi Papua terdapat 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana secara garis besarnya terdiri atas KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang tersebar pada : (1) KPHL Unit II Lintas Nabire, Dogiyai, (2) KPHL Unit VI Lintas Mimika, Dogiyai, Deyiai, (3) KPHL Unit X Lintas Intan Jaya, Waropen, Puncak, (4) KPHP Unit XXII Sarmi, (5) KPHL Unit XLII Lintas Lanny Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, (6) KPHP Unit XLIII Lintas Yahukimo, Nduga, (7) KPHL Unit XXXV Lintas Pegunungan Bintang, Yahukimo, (8) KPHP Unit LI Lintas Boven Digul, Pegunungan Bintang, dan (9) KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.8 di atas.

2. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan perhutanan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Selain itu, kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.



Pada kawasan ini, kegiatan yang diperbolehkan ialah kegiatan permanen berdasarkan kawasan terbangun.

3. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan

Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Kawasan ini memiliki beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. Kegiatan pada kawasan pertanian adalah pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialih fungsikan dengan syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus lebih dulu memiliki kajian studi AMDAL.

Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlaur dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL. Kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang. Kawasan pertanian diharapkan menyediakan kegiatan pertanian berskala besar untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang merupakan penduduk asli setempat, baik Orang Asli Papua maupun pendatang.

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat. Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan orientasi pada pasar lokal. Meski demikian, beberapa investasi perkebunan untuk kakao dan kopi telah menunjukkan kemajuan dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh masyarakat adat.

B. Potensi Perikanan



1. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km²) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah :

- Laut Papua Utara dengan pusat kegiatan di Biak, dan Jayapura;
- Laut Papua Selatan dengan pusat kegiatan di Mimika dan Merauke.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relative sederhana. Perikanan tangkap yang digunakan oleh masyarakat relative masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

2. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada produksi budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut:

- Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura;
- Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Sarmi dan Waropen;
- Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Jayawijaya dan Jayapura, serta Kota

Jayapura.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang, sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan produktivitasnya.

C. Potensi Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (Australia Plate) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (Pacific Crustal Plate) yang bergerak kearah Barat. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar.

Tabel 2.3
Potensi Mineral Logam dan Non Logam

KABUPATEN/KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL
Kota Jayapura	S.Numbai, Kodam	Emas
	S.Yapis, Kel. Imbi	Emas
	S.APO	Emas
	S.Entrop	Emas
	S.Perumnas IV	Emas
	S.Borgonjie	Emas
	S.Kujabu, Waena	Emas
Jayapura	Sentani	Kobal,Tungsten,Nikel,Asbes
	S.Kemiri	Emas
	Sentani	Emas
	S.Deyau, Sentani	Emas
	S.Sawe Sentani	Emas
	S.Ayapo Sentani	Emas
	S. Tami	Krom
	Tg.Tanah merah	Talk
	Waris	Emas,tembaga,timahhitam
	Web	Emas,perak
	Arso	Krom,batubara
	Depapre	Marmre
	Bonggo	Batubara
	Genyem	Batubara
	Siduarsi	NikelLaterit
	S.Pisdan S. Pas	Emas
Senggi	Tembaga,timahhitam	
Kurulu	PasirKuarsa,batugamping	

Jayawijaya	Assolokobal	PasirKuarsa,batugamping
	Asologaima	Batubara
	Borme Utara	Emas
	Okbibab	Tungsten
	Soba	Timbal-Seng
	Holuwan	Timbal-Seng
	Bokondini	Tembaga,emas
	Tiom	Emas,batugaram
	Mbua	Batubara
	Nalca	Emas
	Dabera	Emas,tembaga
Aboyi	Emas,25elative25g	
Nabire	Yaur	Pasirkuarsa,granit,marmer
	Logari	Emas
	S.Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng,Kaolin
	JaliBumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Haiura	Emas,tembaga
	Wapoga	Emas
BiakNumfor	Supiori	Emas,BatuKapur
	Korido	Kalsit
	Biak	Fosfat,PasirBesi
Kep. Yapen	Yapen	PasirBesi
	P.Num	Nikel
Waropen	Waropen Bawah	Emas
	Waropen Atas	Batubara
Merauke	Jair	Emas,perak

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Papua, 2020

Berdasarkan potensi geologinya, wilayah Papua mempunyai kekayaan bahan galian mineral yang sangat besar dan potensial. Mulai dari emas, tembaga, nikel, timah, batu kapur, gamping, dan sebagainya tersedia di wilayah ini. Akan tetapi, meskipun kekayaan mineral tersebut sudah teridentifikasi sejak lama, namun hanya sedikit wilayah yang dapat memanfaatkan potensi tersebut. Salah satunya di Kabupaten Mimika yang memiliki potensi tembaga dan emas terbesar di dunia yang selama ini telah dikelola oleh perusahaan multinasional yaitu PT. Freeport Indonesia. Sedangkan di daerah-daerah penghasil emas lainnya seperti di Paniai dan Nabire lebih banyak dikelola oleh penambangan rakyat dengan jumlah yang sangat kecil.

Eksplorasi pertambangan di Papua sangat berisiko. Ditambah lagi cadangannya berada di lokasi-lokasi terpencil yang minim infrastruktur, tersembunyi di hutan dan pegunungan. Pada saat eksplorasi, membutuhkan penelitian khusus untuk menemukan cadangan mineral di Papua. Wilayah pertambangan secara topografi sangat sulit sehingga tak mudah merancang infrastruktur untuk tambang. Semua kondisi ini menjadi kendala bagi investor lain untuk

menanamkan modalnya di daerah pertambangan mineral. Sehingga perusahaan besar pertambangan yang ada masih sangat sedikit. Investasi pertambangan di Papua perlu dalam skala besar dengan resiko bisnis tinggi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang.

D. Potensi Pariwisata

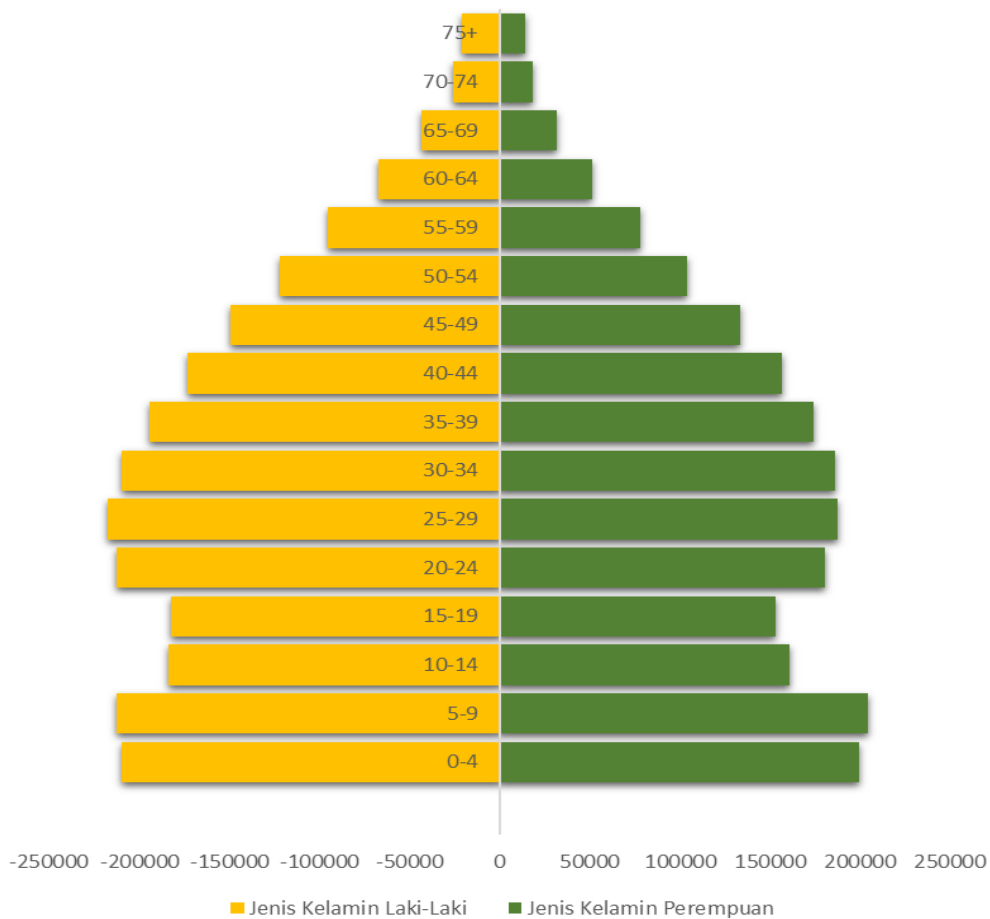
Provinsi Papua memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua ialah: Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata pulau, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan obyek wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Pariari (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

2.1.2. Aspek Demografi

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2021 mencatat jumlah penduduk Papua pada bulan September 2021 sebanyak 4.355.445 jiwa. Dari jumlah tersebut 53,23% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 46,76% nya Perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Papua terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Papua mengalami penambahan dengan laju pertumbuhan penduduk 4,27%. Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Lihat Gambar 2.9 berikut ini.

Gambar 2.9
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua



Sumber : BPS Provinsi Papua, PDA 2022, (Data diolah)

Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 55,97 persen dari total populasi, meningkat hingga mencapai 69,73 persen ditahun 2021. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia masih berada dalam masa bonus demografi, tidak terkecuali di Provinsi Papua.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua (%)

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
	2020	2021	2010-2020	2010-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	230 932	231 696	1,61	0,44
Jayawijaya	26 9553	273 291	3,13	1,85
Jayapura	16 6171	168 476	3,9	1,85
Nabire	169 136	170 914	2,59	1,40
Kepulauan Yapen	112 676	114 210	3,01	1,82

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
	2020	2021	2010-2020	2010-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Biak Numfor	134 650	135 231	0,58	0,58
Paniai	220 410	223 467	3,57	1,85
Puncak Jaya	224 527	227 641	8,02	1,85
Mimika	311 969	316 295	5,35	1,85
Boven Digoel	64 285	64 716	1,38	0,89
Mappi	108 295	109 579	2,77	1,58
Asmat	110 105	111 632	3,58	1,58
Yahukimo	350 880	355 746	7,61	1,58
Pegunungan Bintang	77 872	78 178	1,70	0,52
Tolikara	236 986	240 272	7,30	1,58
Sarmi	41 515	41 849	2,25	1,07
Keerom	61 623	62 15	2,34	1,16
Waropen	33 943	34 414	3,15	1,85
Supiori	22 547	22 860	3,45	1,86
Mamberamo Raya	36 483	36 989	6,87	1,85
Nduga	106 533	107 921	2,93	1,74
Lanny Jaya	196 399	198 686	2,74	1,56
Mamberamo Tengah	50 685	51 160	2,43	1,25
Yalimo	101 973	103 387	6,98	1,85
Puncak	114 741	115 474	2,03	0,85
Dogiyai	116 206	117 818	3,16	1,85
Intan Jaya	135 043	136 916	12,36	1,85
Deiyai	99 091	100 466	4,62	1,85
Kota Jayapura	398 478	404 004	4,35	1,85
Provinsi Papua	4 303 707	4 355 445	4,13	1,61

Sumber : Papua Dalam Angka 2022, (Data diolah)

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Papua sebesar 4.13 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2021 sebesar 1.61 persen dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk		Kepadatan Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	5,37	5,32	5,24	5,26	109,82	109,46
Jayawijaya	6,26	6,27	38,34	38,87	109,01	108,65
Jayapura	3,86	3,87	14,89	15,1	109,21	108,85
Nabire	3,93	3,92	15,22	15,38	111,19	110,82
Kepulauan Yapen	2,62	2,62	54,96	55,71	107,97	107,62
Biak Numfor	3,13	3,10	51,75	51,97	105,29	104,95
Paniai	5,12	5,13	44,17	44,79	121,48	121,06
Puncak Jaya	5,22	5,23	34,41	34,89	117,45	117,05
Mimika	7,25	7,26	14,42	14,62	120,6	120,18
Boven Digoel	1,49	1,49	3,62	3,65	113,60	113,32
Mappi	2,52	2,52	12,91	13,06	106,76	106,42
Asmat	2,56	2,56	7,02	7,12	107,79	107,44
Yahukimo	8,15	8,17	20,46	20,74	120,23	119,82
Pegunungan Bintang	1,81	1,79	13,94	13,99	118,13	117,73
Tolikara	5,51	5,52	21,59	21,89	119,54	119,13
Sarmi	0,96	0,96	1,53	1,54	114,01	113,62
Keerom	1,43	1,43	2,56	2,58	111,81	111,45
Waropen	0,79	0,79	1,06	1,08	112,93	112,55
Supiori	0,52	0,52	33,24	33,70	108,42	108,06
Mamberamo Raya	0,85	0,85	1,53	1,55	110,46	110,09
Sumber : Papua Dalam Angka 2022, (Data diolah)			83,56	84,64	119,89	119,48
Lanny Jaya	4,56	4,56	156,74	158,57	119,24	118,83
Mamberamo Tengah	1,18	1,17	22,55	22,76	112,41	112,04
Yalimo	2,37	2,37	47,04	47,69	113,96	113,58
Puncak	2,67	2,65	14,24	14,34	112,89	112,52
Dogiyai	2,70	2,71	27,42	27,42	27,80	108,93
Intan Jaya	3,14	3,14	34,43	34,91	111,41	111,04
Deiyai	2,30	2,31	184,39	186,95	113,22	112,84
Kota Jayapura	9,26	9,28	425,76	431,67	114,19	113,81
Papua Provinsi	100,00	100,00	13,49	13,65	114,23	113,86

Tahun 2020-2021

Sumber : Papua Dalam Angka 2022, (Data diolah)

Tabel 2.6
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	209 780	199 379	409 159
5-9	212 411	204 382	416 793
10-14	183 928	161 286	345 214
15-19	182 292	153 131	335 423
20-24	212 683	180 452	393 135
25-29	217 417	187 801	405 218
30-34	209 770	186 657	396 427
35-39	194 292	174 658	368 950
40-44	173 260	157 139	330 399
45-49	149 348	133 454	282 802
50-54	121 797	104 194	225 991
55-59	95 314	78 187	173 501
60-64	66 882	51 718	118 600
65-69	43 101	31 629	74 730
70-74	25 627	18 138	43 765
75+	20 917	14 421	35 338
Jumlah/Total	23 188 19	20 366 26	43 554 45

Sumber : Papua Dalam Angka 2022, (Data diolah)

Data pada table tersebut diatas menunjukkan persentase penduduk terbesar berada di Kota Jayapura tahun 2020 sebesar 9,26 persen dan tahun 2021 sebesar 9,28 persen dengan kepadatan tahun 2020 sebesar 425,76 persen dan tahun 2021 sebesar 431,76 persen.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar diaman PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sector perekonomian di daerah tersebut, yang bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua dalam periode 4 (empat) tahun terakhir terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Miliar rupiah) 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	14 536,82	16 023,14	16 037,19	16 731,24
Jayawijaya	7 614,07	8 331,54	8 269,88	8 455,28
Jayapura	14 531,35	16 381,31	16 062,75	17 177,62
Nabire	10 340,87	11 084,22	11 194,89	12 044,69
Kepulauan Yapen	3 907,66	4 250,57	4 152,74	4 485,40
Biak Numfor	5 183,88	5 486,11	5 223,67	5 495,54
Paniai	3 894,88	4 181,80	4 283,39	4 446,73
Puncak Jaya	1 300,99	1 404,63	1 387,23	1 407,07
Mimika	85 333,88	54 834,54	63 393,42	95 228,23
Boven Digoel	4 566,55	4 818,16	4 821,05	4 958,68
Mappi	2 674,53	2 957,68	2 995,01	3 100,29
Asmat	2 258,84	2 470,83	2 569,01	2 694,63
Yahukimo	2 231,87	2 422,17	2 504,26	2 626,04
Pegunungan Bintang	1 763,24	1 913,61	1 968,75	2 079,57
Tolikara	1 463,35	1 593,21	1 672,32	1 720,53
Sarmi	2 534,43	2 819,69	2 938,84	3 113,05
Keerom	2 701,91	2 855,77	2 924,34	3 070,63
Waropen	1 916,37	2 052,79	2 044,76	2 117,29
Supiori	946,75	1 009,18	1 042,05	1 087,35
Mamberamo Raya	1 484,86	1 646,55	1 722,53	1 835,56
Nduga	1 118,46	1 216,57	1 269,94	1 345,72
Lanny Jaya	1 676,46	1 828,87	1 930,04	2 020,05
Mamberamo Tengah	1 080,53	1 163,65	1 213,55	1 261,73
Yalimo	1 115,61	1 221,43	1 283,66	1 354,41

Puncak	1 286,28	1 400,81	1 438,05	1 513,26
Dogiyai	1 207,71	1 313,23	1355,63	1 411,76
Intan Jaya	1 183,79	1 248,66	1 273,03	1 303,56
Deiyai	1 267,40	1 389,14	1435,66	1 492,90
Kota Jayapura	30 422,58	32 325,75	32 032,13	33 199,63

Sumber : Papua Dalam Angka 2022, (Data diolah)

Dari table 2.7 di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Angka PDRB provinsi Papua pada tahun 2017 sebesar 188.938,08 miliar rupiah, pada tahun 2018 sebesar 210.600,57 miliar rupiah, tahun 2019 sebesar 89.510,70 miliar rupiah, tahun 2020 sebesar 99.232,88 miliar rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 235.343,25 miliar rupiah.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Miliar rupiah) 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	9 583,66	10 307,37	10 218,57	10 424,59
Jayawijaya	4 521,86	4 746,65	4 600,44	4 659,98
Jayapura	9 312,18	9 978,84	9 776,72	10 271,63
Nabire	7 124,94	7 457,29	7 366,39	7 693,27
Kepulauan Yapen	2 767,99	2898,82	2767,5	2901,32
Biak Numfor	3 355,45	3 429,60	3 255,91	3 327,27
Paniai	2 909,10	3 020,87	3 034,64	3 084,84
Puncak Jaya	970,47	1 010,15	969,32	983,03
Mimika	74 249,68	45 651,03	50 898,34	69 619,31
Boven Digoel	3 221,87	3 275,51	3190,5	3 223,28
Mappi	1 775,92	1 884,40	1 862,73	1 883,78
Asmat	1 452,80	1 522,33	1 531,36	1 563,59
Yahukimo	1 454,57	1 526,97	1 527,28	1 556,23
Pegunungan Bin	1 345,97	1 409,83	1 408,48	1 444,83
Tolikara	1 013,37	1 053,10	1 058,38	1 068,56
Sarmi	1 732,12	1 833,63	1 835,40	1 862,60
Keerom	1 916,26	1 991,01	1 992,55	2 048,90

Waropen	1 430,75	1 508,37	1 465,80	1 485,62
Supiori	729,4	760,97	9,12 76	781,18
Mamberamo Raya	957,67	1 013,95	1 012,23	1 030,71
Nduga	751,96	788,34	793,77	815,25
Lanny Jaya	1 103,03	1 159,95	1 180,65	1 202,14
Mamberamo Tengah	715,59	750,95	758,15	769,37
Yalimo	717,66	757,06	764,52	782,62
Puncak	786,72	824,47	825,11	831,07
Dogiyai	844,46	892,88	895,96	906,90
Intan Jaya	741,54	761,71	758,85	67,10
Deiyai	803,58	833,65	830,73	0'841,3
Kota Jayapura	21 778,32	22 857,30	22 125,49	22 852,20

Sumber : Papua Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Papua (Data diolah)

Sementara itu angka PDRB Papua atas dasar harga konstan (ADHK), selama kurun lima tahun terakhir adalah masing-masing 148.818,29 miliar rupiah (2017), 159.711,85 miliar rupiah (2018), 134.565,89 miliar rupiah (2019), 137.787,29 miliar rupiah (2020), dan 158.611,04 (2021). Distribusi persentase PDRB ADHB terbesar menurut lapangan usaha tahun 2021 di Provinsi Papua pada kategori pertambangan dan penggalian 36,84 persen, konstruksi 13,80 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,84 persen. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Provinsi Papua pada tahun 2021 yang paling besar menurut jenis pengeluaran adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 104.116,47 miliar rupiah, diikuti oleh pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 83.270,67 miliar rupiah. .

B. Indeks Gini

Indeks gini rasio pada umumnya digunakan untuk mengukur kesenjangan pembagian pendapatan relative antar penduduk pada suatu wilayah tertentu. Berikut ini terlihat data rasio gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam 6 (enam) tahun terakhir yang terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

Kabupaten/Kota	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	0.342	0.368	0.388	0.386	0.380	0.385

Kabupaten/Kota	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jayawijaya	0.337	0.331	0.318	0.318	0.342	0.344
Jayapura	0.310	0.281	0.337	0.401	0.432	0.378
Nabire	0.298	0.383	0.367	0.360	0.349	0.334
Kepulauan Yapen	0.324	0.325	0.374	0.381	0.400	0.387
Biak Numfor	0.357	0.361	0.430	0.372	0.401	0.374
Paniai	0.460	0.460	0.367	0.351	0.380	0.224
Puncak Jaya	0.152	0.214	0.352	0.415	0.376	0.368
Mimika	0.289	0.325	0.263	0.293	0.339	0.349
Boven Digoel	0.325	0.345	0.424	0.392	0.448	0.407
Mappi	0.441	0.394	0.416	0.416	0.427	0.384
Asmat	0.308	0.233	0.385	0.398	0.403	0.405
Yahukimo	0.251	0.332	0.400	0.414	0.394	0.336
Pegunungan Bintang	0.288	0.336	0.380	0.373	0.448	0.344
Tolikara	0.381	0.299	0.361	0.340	0.388	0.291
Sarmi	0.347	0.400	0.420	0.436	0.424	0.409
Keerom	0.354	0.358	0.382	0.432	0.396	0.393
Waropen	0.309	0.344	0.279	0.369	0.346	0.405
Supiori	0.307	0.252	0.382	0.364	0.319	0.320
Mamberamo Raya	0.303	0.203	0.405	0.411	0.211	0.324
Nduga	0.249	0.212	0.212	0.188	0.187	0.231
Lanny Jaya	0.275	0.309	0.232	0.297	0.281	0.293
Mamberamo Tengah	0.270	0.225	0.248	0.248	0.330	0.320
Yalimo	0.193	0.247	0.337	0.320	0.362	0.363
Puncak	0.194	0.177	0.233	0.321	0.302	0.312
Dogiyai	0.250	0.223	0.359	0.366	0.326	0.306
Intan Jaya	0.292	0.255	0.358	0.312	0.269	0.248
Deiyai	0.252	0.235	0.351	0.336	0.357	0.240
Kota Jayapura	0.283	0.317	0.310	0.305	0.278	0.276
Provinsi Papua	0.390	0.397	0.384	0.394	0.392	0.397

Sumber : Papua Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Papua (Data diolah)

Dari data di atas terlihat bahwa secara umum, nilai Gini Ratio Provinsi Papua selama periode 2016 s/d Maret 2021 terus mengalami fluktuasi, data terakhir di 2021 menunjukkan indeks gini ratio provinsi Papua sebesar 0,387. Apabila dilihat berdasarkan wilayah adat, Anim Ha merupakan wilayah adat yang cenderung mengalami perbaikan ketimpangan pendapatan sepanjang tahun 2016-2021. Sedangkan wilayah lainnya cenderung mengalami fluktuasi

ketimpangan pendapatan.

C. Tingkat Kemiskinan

Pada bulan Maret 2020, tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan Bulan Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 mengalami penurunan 1,62% menjadi 911,37 ribu orang, namun meningkat 1,12% dibandingkan dengan Bulan September 2020. Persentase penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 memiliki tren yang sama dengan jumlah penduduk miskin, yaitu menurun dibandingkan dengan Bulan Maret 2019, namun meningkat jika dibandingkan dengan Bulan September 2019. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,64%.

Data terakhir menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi Papua kembali mengalami kenaikan di tahun 2021. Data per bulan maret 2021 menunjukkan tingkat kemiskinan sebanyak 920,44 ribu orang atau 26,86 %, dan posisi terakhir di bulan September 2021 sebanyak 944,49 orang atau naik sebesar 27,36%.

Tabel 2.10
Indikator-Indikator Kemiskinan di Provinsi Papua

Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapital/bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persentase Penduduk Miskin
2017	Maret	457.541	7,49	2,82	27,62
	September	464.056	6,24	1,93	27,76
2018	Maret	499.463	6,73	2,28	27,74
	September	518.811	5,91	1,82	27,43
2019	Maret	540.099	7,17	2,60	27,53
	September	557.099	6,07	1,98	26,64
2020	Maret	563.099	6,16	2,08	26,6
	September	580,643	6,90	2,35	26,8
2021	Maret	634.703	5,60	2,08	26,86
	September	643.071	6,31	2,35	27,38

Sumber : Papua Dalam Angka 2022, (Data diolah)

Meskipun telah mengalami peningkatan secara rata-rata, namun Provinsi Papua masih menjadi Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Sementara, persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2020 sebesar 10,08%, Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan.

Pada periode September 2019, GK Papua Rp 557.236,00 lalu mengalami peningkatan menjadi Rp 562.992,00 pada periode Maret 2020, sementara itu di tahun 2021 GK provinsi Papua juga mengalami peningkatan menjadi Rp.643.071 atau naik sebesar Rp. 80.079 dibandingkan dengan GK tahun 2020. Namun nilai tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata GK nasional sebesar Rp 454.652,00. Hal tersebut menandakan biaya hidup minimal di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan. Menurut kewilayahan, daerah yang paling miskin selama ini adalah di perdesaan/kampung. Sampai tahun 2021 (September) tercatat kemiskinan di perdesaan mencapai 36,50%, atau meningkat sebesar 0,81% dibandingkan Tahun 2020 (35,69%). Sementara itu di wilayah perkotaan sebesar 4,94% yang mengalami kenaikan sebesar 0,35% dibandingkan tahun 2020 (4,59%).

Tabel 2.11
Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2016-2021 (%)

Tahun	Bulan	Indeks Kedalaman Kemiskinan		
		Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	Maret	0,88	12,39	9,37
	September	0,78	9,82	7,43
2017	Maret	0,15	3,81	2,82
	September	0,08	2,63	1,93
2018	Maret	0,24	3,06	2,28
	September	0,23	2,45	1,82
2019	Maret	0,17	3,58	2,60
	September	0,13	2,72	1,98
2020	Maret	0,14	2,85	2,08

2021	September	0,17	3,22	2,35
	Maret	0,25	2,27	1,69
	September	0,22	2,80	2,05

Sumber: BPS Papua, PDA Provinsi Papua 2022 (data diolah)

Tabel 2.12
Kedalaman Keparahan di Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (%)

Tahun	Bulan	Indeks Kedalaman Keparahan		
		Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	Maret	0,65	10,03	7,49
	September	0,56	8,40	6,24
2018	Maret	0,84	8,98	6,73
	September	0,76	7,94	5,91
2019	Maret	0,71	9,76	7,17
	September	0,59	8,26	6,07
2020	Maret	0,62	8,26	6,16
	September	0,82	9,34	6,90
2021	Maret	0,85	7,52	5,60
	September	0,86	8,53	6,31

Sumber: BPS Papua, PDA Provinsi Papua 2022 (data diolah)

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2016-2021 cenderung mengalami fluktuatif dalam kisaran yang tidak terlalu berbeda jauh, namun telah menunjukkan perbaikan yang positif.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2016-2020

IPM dan Komponen Pembentuknya	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,1	65,1	65,4	65,65	65,79	65,93
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,2	10,5	10,8	11,05	11,08	11,11
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,1	6,2	6,5	6,65	6,69	6,76
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	6,637	6,996	7,159	7,336	6,359	6,95
Indeks Pembangunan Manusia	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62
Pertumbuhan IPM (%)	1,4	1,79	1,64	1,23	-0,66	0,18

Sumber : BPS Provinsi Papua, PDA 2022 (data diolah)

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada Tahun 2021 sebesar 60,62. Angka ini meningkat atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,18 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 60,44. Sementara itu jika melihat pada komponen pembentukannya dari periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita juga mengalami trend positif atau naik dari tahun ke tahun dan masuk dalam kategori "SEDANG". Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

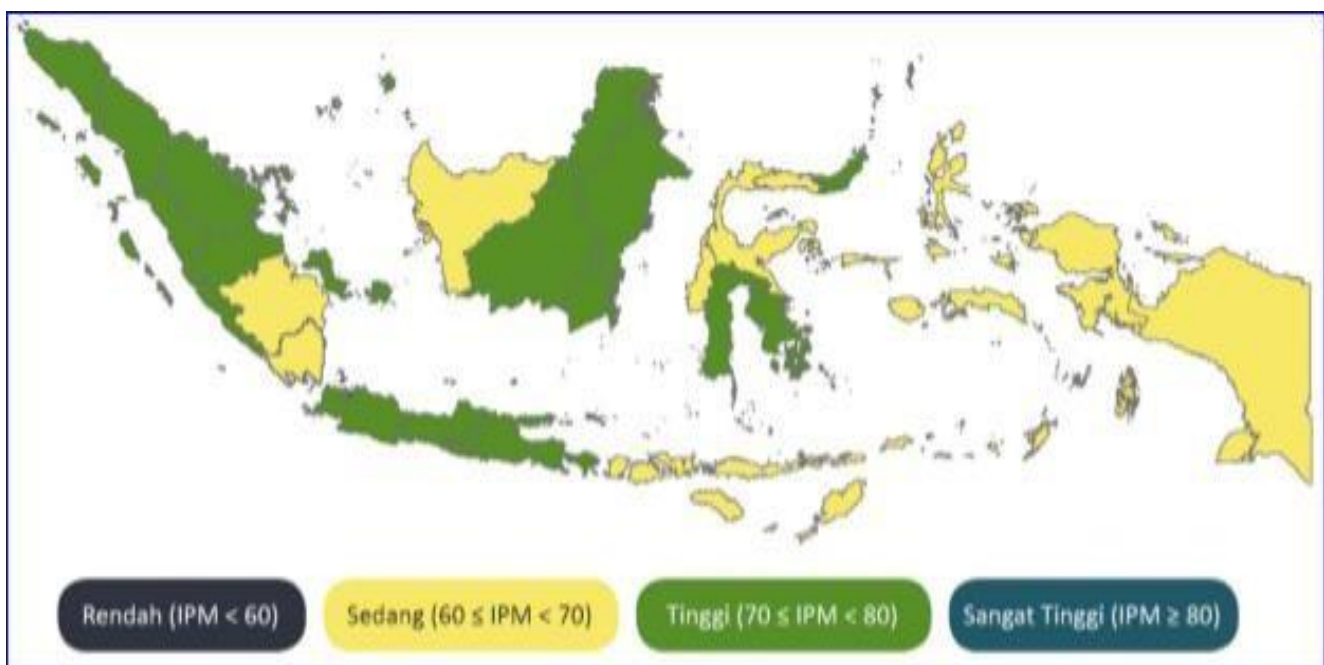
Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	68.09	68.64	69.38	69.98	70.09	70.49
Jayawijaya	54.96	55.99	56.82	57.79	58.03	58.67
Jayapura	70.50	70.97	71.25	71.84	71.69	72.03
Nabire	66.64	67.11	67.70	68.53	68.83	69.15
Kepulauan Yapen	65.55	66.07	67.00	67.76	67.66	67.72
Biak Numfor	71.13	71.56	71.96	72.57	72.19	72.33
Paniai	54.34	54.91	55.83	56.58	56.31	56.70
Puncak Jaya	45.49	46.57	47.39	48.33	48.37	48.99
Mimika	71.64	72.42	73.15	74.13	74.19	74.48
Boven Digoel	59.35	60.14	60.83	61.51	61.53	61.62
Mappi	56.54	57.10	57.72	58.30	58.15	58.70
Asmat	47.31	48.49	49.37	50.37	50.55	51.29
Yahukimo	47.13	47.95	48.51	49.25	49.37	49.48
Pegunungan Bintang	41.90	43.24	44.22	45.21	45.44	46.28
Tolikara	47.11	47.89	48.85	49.68	49.50	49.60
Sarmi	61.27	62.31	63.00	63.45	63.63	63.94
Keerom	64.10	64.99	65.75	66.59	66.40	66.49
Waropen	63.10	64.08	64.80	65.34	64.94	65.10
Supiori	60.59	61.23	61.84	62.30	62.30	62.72
Mamberamo Raya	49.00	50.25	51.24	52.20	51.78	52.18
Nduga	26.56	27.87	29.42	30.75	31.55	32.84
Lanny Jaya	45.16	46.49	47.34	48.00	47.86	48.68
Mamberamo Tengah	44.15	45.50	46.41	47.23	47.57	48.32
Yalimo	44.95	46.19	47.13	48.08	48.34	49.01
Puncak	39.96	41.06	41.81	42.70	43.04	43.17
Dogiyai	53.32	54.04	54.44	55.41	54.84	55.00
Intan Jaya	44.82	45.68	46.55	47.51	47.79	48.34
Deiyai	48.50	49.07	49.55	50.11	49.46	49.96
Kota Jayapura	78.56	79.23	79.58	80.16	79.94	80.11
Provinsi Papua	58.05	59.09	60.06	60.84	60.44	60.62

Sumber: BPS Provinsi Papua 2022, (Data diolah)

Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik juga PDB perkapita yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Gambar 2.10
IPM Nasional menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Papua 2022, (Data diolah)

Dan selama tahun 2017-2021, Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terjadi perubahan status pembangunan manusia Papua dari berstatus "rendah" menjadi berstatus "sedang". IPM kabupaten/kota di wilayah Papua sepanjang tahun 2015-2021 sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura selama periode tersebut dapat dikatakan yang paling konsisten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, dimana sampai dengan tahun 2021 nilai IPM Kota Jayapura telah mencapai 80,11 poin. Kemudian di ikuti dengan Kabupaten Mimika pada urutan ke-2, dan Kabupaten Biak Numfor di urutan ke3. Adapun pada tahun 2021 daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Nduga (urutan ke 29), Puncak (urutan 28) dan Pegunungan Bintang(urutan ke 27).

E. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, sertatingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2.15
Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Kabupaten/kota	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	8.27	8.49	8.56	8.72	8.73
Jayawijaya	4.99	5.17	5.30	5.51	5.60
Jayapura	9.54	9.60	9.79	10.04	10.05
Nabire	9.49	9.53	9.70	10.00	10.01
Kepulauan Yapen	8.82	9.07	9.19	9.46	9.47
Biak Numfor	9.85	10.00	10.22	10.33	10.34
Paniai	3.94	4.20	4.38	4.57	4.77
Puncak Jaya	3.50	3.51	3.61	3.62	3.74
Mimika	9.54	9.76	9.91	10.17	10.18
Boven Digoel	8.08	8.32	8.55	8.78	8.79
Mappi	6.10	6.29	6.30	6.31	6.51
Asmat	4.71	4.74	4.82	4.94	5.08
Yahukimo	4.00	4.01	4.02	4.26	4.27
Pegunungan Bintang	2.32	2.49	2.61	2.81	3.04
Tolikara	3.50	3.62	3.63	3.64	3.65
Sarmi	8.34	8.52	8.53	8.82	8.83
Keerom	7.57	7.83	8.00	8.01	8.02
Waropen	8.67	8.87	9.18	9.20	9.21
Supiori	8.14	8.39	8.60	8.81	8.87
Mamberamo Raya	5.23	5.46	5.65	5.66	5.87
Nduga	0.71	0.85	0.97	1.13	1.42
Lanny Jaya	3.17	3.18	3.19	3.20	3.43
Mamberamo Tengah	2.67	2.78	2.90	3.15	3.33
Yalimo	2.25	2.44	2.58	2.79	3.01
Puncak	1.94	1.95	1.96	2.15	2.16
Dogiyai	4.90	4.91	4.92	4.93	4.94
Intan Jaya	2.50	2.51	2.64	2.84	3.09

Kabupaten/kota	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Deiyai	2.98	2.99	3.00	3.01	3.25
Kota Jayapura	11.15	11.30	11.55	11.56	11.57
Provinsi Papua	6.27	6.52	6.65	6.69	6.76

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2022 (Data diolah)

Dari table di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih dibawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana hingga tahun 2019 tercatat RLS Provinsi Papua hanyamencapai 6,69 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua dalam menyerap penduduk usias ekolah. Beberapa daerah di Provinsi Papua telah memiliki capaian RLS yang cukup baik, namun sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua masih memiliki capaian RLS yang relatif rendah.

F. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel 2.16
Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Kabupaten/kota	Tahun)Harapan Lama Sekolah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	12.98	13.24	13.59	13.88	14.14
Jayawijaya	11.30	11.58	11.93	12.27	12.53
Jayapura	14.16	14.17	14.19	14.20	14.39
Nabire	10.86	11.14	11.59	11.92	12.18
Kepulauan Yapen	11.85	12.24	12.72	12.73	12.74
Biak Numfor	13.93	13.94	13.95	13.96	14.20
Paniai	10.33	10.47	10.48	10.49	10.50
Puncak Jaya	6.24	6.59	6.96	7.24	7.49
Mimika	11.48	11.77	12.17	12.40	12.69

Kabupaten/kota	Tahun)Harapan Lama Sekolah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Boven Digoel	10.98	10.99	11.06	11.07	11.08
Mappi	10.48	10.53	10.54	10.55	10.79
Asmat	8.12	8.47	8.74	9.02	9.30
Yahukimo	7.55	7.59	7.60	7.61	7.62
Pegunungan Bintang	5.52	5.79	6.14	6.25	6.47
Tolikara	7.70	8.04	8.28	8.60	8.61
Sarmi	11.29	11.55	11.81	12.05	12.29
Keerom	11.89	12.14	12.41	12.42	12.43
Waropen	12.61	12.77	12.78	12.79	12.80
Supiori	12.71	12.72	12.73	12.74	13.00
Mamberamo Raya	11.07	11.30	11.78	11.79	11.80
Nduga	2.64	2.95	3.29	3.61	3.87
Lanny Jaya	7.71	8.01	8.35	8.62	8.89
Mamberamo Tengah	8.01	8.33	8.63	8.93	9.22
Yalimo	8.20	8.46	8.83	9.11	9.32
Puncak	4.66	4.93	5.19	5.39	5.40
Dogiyai	10.12	10.13	10.57	10.58	10.59
Intan Jaya	6.76	7.11	7.36	7.65	7.66
Deiyai	9.78	9.79	9.80	9.81	9.82
Kota Jayapura	14.98	14.99	15.00	15.01	15.02
Provinsi Papua	10.54	10.83	11.05	11.08	11.11

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2022, (Data diolah)

Dari table di atas secara umum, perkembangan HLS Provinsi Papua mengalami sedikit peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun capaian HLS Provinsi Papua rata- rata meningkat sebesar 0,24 poin per tahun, dimana pada tahun 2021 HLS Provinsi Papua mencapai 11,11 tahun, yang mengindikasikan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal.

G. Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara

umum pada suatu waktu tertentu. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antarsektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini.

Tabel 2.17
Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	66.56	66.71	66.93	67.00	67.07
Jayawijaya	58.67	58.99	59.39	59.64	59.90
Jayapura	66.47	66.66	66.93	67.05	67.16
Nabire	67.55	67.72	67.97	68.06	68.15
Kepulauan Yapen	68.71	68.85	69.06	69.12	69.17
Biak Numfor	67.87	68.00	68.20	68.25	68.29
Paniai	65.70	65.94	66.27	66.44	66.62
Puncak Jaya	64.41	64.65	64.98	65.15	65.33
Mimika	71.93	72.06	72.27	72.32	72.36
Boven Digoel	58.77	59.16	59.64	59.97	60.32
Mappi	64.30	64.56	64.91	65.11	65.31
Asmat	56.32	56.88	57.53	58.05	58.59
Yahukimo	65.32	65.52	65.80	65.93	66.05
Pegunungan Bintang	63.90	64.08	64.34	64.44	64.54
Tolikara	65.10	65.30	65.58	65.71	65.83
Sarmi	65.82	66.00	66.26	66.36	66.46
Keerom	66.18	66.35	66.60	66.69	66.78
Waropen	65.82	65.99	66.24	66.33	66.42
Supiori	65.33	65.53	65.81	65.94	66.06
Mamberamo Raya	56.90	57.18	57.55	57.77	58.00
Nduga	54.60	54.82	55.12	55.27	55.43
Lanny Jaya	65.65	65.79	66.00	66.06	66.11
Mamberamo Tengah	62.92	63.14	63.44	63.59	63.75
Yalimo	64.94	65.10	65.34	65.42	65.49
Puncak	65.13	65.33	65.61	65.74	65.86

Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dogiyai	65.12	65.32	65.60	65.73	65.85
Intan Jaya	65.09	65.26	65.51	65.60	65.69
Deiyai	64.63	64.83	65.11	65.24	65.36
Kota Jayapura	70.00	70.15	70.38	70.45	70.52
Provinsi Papua	65.14	65.36	65.65	65.79	65.93

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (Data diolah)

Secara umum capaian AHH Provinsi Papua mengalami kecenderungan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 65,93 tahun, naik dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 65,79.

H. Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di provinsi Papua periode tahun 2017 sampai dengan 2021 yang dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.18
Pengeluaran Perkapita Masyarakat tahun 2017-2021

Kabupaten/kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	10,277	10,430	10,498	10,097	10,201
Jayawijaya	7,524	7,637	7,835	7,441	7,545
Jayapura	10,055	10,160	10,375	9,898	9,989
Nabire	8,983	9,143	9,195	8,840	8,856
Kepulauan Yapen	7,605	7,739	7,785	7,484	7,491
Biak Numfor	9,812	9,969	10,211	9,705	9,607
Paniai	6,355	6,535	6,767	6,361	6,377
Puncak Jaya	5,341	5,459	5,523	5,282	5,289
Mimika	11,591	11,700	12,035	11,431	11,400
Boven Digoel	8,048	8,211	8,300	7,947	7,864
Mappi	6,143	6,268	6,513	6,353	6,327
Asmat	5,771	5,882	6,066	5,733	5,736
Yahukimo	4,554	4,737	5,030	4,875	4,895

Kabupaten/kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pegunungan Bintang	5,506	5,578	5,633	5,409	5,429
Tolikara	4,827	4,946	5,142	4,826	4,841
Sarmi	6,723	6,814	6,860	6,600	6,617
Keerom	8,824	8,918	9,136	8,910	8,926
Waropen	6,810	6,978	7,018	6,732	6,788
Supiori	5,655	5,769	5,820	5,677	5,708
Mamberamo Raya	4,596	4,755	4,807	4,581	4,603
Nduga	3,972	4,131	4,181	3,975	3,976
Lanny Jaya	4,356	4,517	4,569	4,350	4,393
Mamberamo Tengah	4,510	4,609	4,671	4,462	4,487
Yalimo	4,702	4,799	4,860	4,647	4,664
Puncak	5,413	5,506	5,702	5,378	5,412
Dogiyai	5,375	5,522	5,709	5,373	5,415
Intan Jaya	5,293	5,440	5,593	5,283	5,328
Deiyai	4,597	4,761	4,958	4,632	4,673
Kota Jayapura	14,781	14,922	15,176	14,763	14,937
Provinsi Papua	6,996	7,159	7,336	6,954	6,955

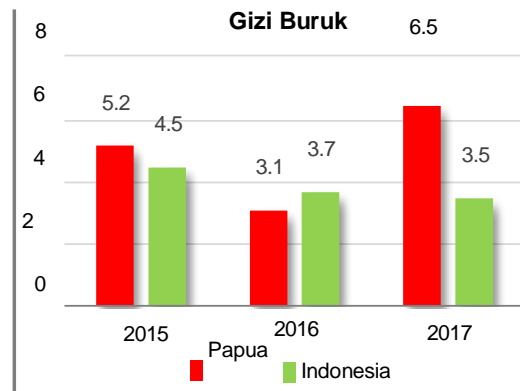
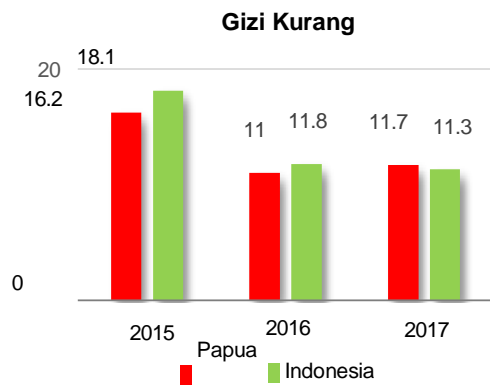
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2022 (Data diolah)

Secara umum capaian pendapatan perkapita masyarakat di Provinsi Papua mengalami kecenderungan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 6,955, naik dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6,954.

I. Persentase Balita Gizi Buruk

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. Status gizi buruk bayi usia 0-23 bulan di Provinsi Papua cukup memprihatinkan, karena selama tahun 2015-2017 kecenderungannya mengalami peningkatan, yakni dari 5,2% di tahun 2015 menjadi 6,5% di tahun 2017. Padahal untuk jangka waktu yang sama secara keseluruhan gizi buruk di Indonesia mengalami penurunan. Angka gizi buruk di Papua juga terlihat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia yang pada tahun 2017 hanya sebesar 3,5%.

29	Kota Jayapura	167	776	6 788	558	248	653	7 187	58
Jumlah		1 141	4 573	36 561	2 257	1 773	4 895	36 587	360





Tabel 2.19
Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan

No	Kabupaten/Kota	BB/TB					
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
1	Kab Merauke	177	308	3 194	388	108	53
2	Kab Jayawijaya	9	23	497	61	7	11
3	Kab Jayapura	34	143	1 835	281	98	30
4	Kab Nabire	250	435	4 518	482	110	76
5	Kab Kepulauan Yapen	24	124	1 611	56	13	4
6	Kab BiakNumfor	91	256	2 495	267	86	65
7	Kab Paniai	0	0	0	0	0	0
8	Kab PuncakJaya	0	0	223	71	6	0
9	Kab Mimika	114	271	4 459	514	148	56
10	Kab Boven Digoel	85	345	3 479	246	71	41
11	Kab Mappi	57	189	2 498	132	32	15
12	Kab Asmat	0	0	0	0	0	0
13	Kab Yahukimo	0	0	1	0	0	0
14	Kab Pegunungan Bintang	0	0	0	0	0	0
15	Kab Tolikara	5	13	184	9	0	0
16	Kab Sarmi	16	41	517	60	15	7
17	Kab Keerom	31	101	1 297	133	40	23
18	Kab Waropen	36	65	381	16	2	0
19	Kab Supiori	14	44	465	26	11	1
20	Kab Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0
21	Kab Nduga	0	0	0	0	0	0
22	Kab Lanny Jaya	0	0	0	0	0	0
23	Kab MamberamoTengah	19	31	519	71	17	7



24	Kab Yalimo	0	0	0	0	0	0
25	Kab Puncak	0	0	0	0	0	0
26	Kab Dogiyai	0	0	0	0	0	0
27	Kab IntanJaya	0	0	0	0	0	0
28	Kab Deiyai	0	0	0	0	0	0
29	Kota Jayapura	159	591	6 422	654	226	112
JUMLAH		1 121	2 980	34 595	3 467	990	501

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Provinsi Papua termasuk paling tinggi memiliki stunting di atas rata-rata Indonesia bersama 19 provinsi lainnya. Keadaan stunting yang terlihat tinggi di Provinsi Papua ini, yaitu mencapai 32,80%, perlu ditangani segera dengan efektif, agar manfaat bonus demografi yang akan diterima selama periode 2020-2030 mendatang dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Papua.

J. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Papua menurun dibandingkan kondisi Februari 2020. Jumlah angkatan kerja mencapai 1,84 juta orang atau bertambah 6.240 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2020 berkurang dibandingkan Agustus 2019. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Papua pada Februari 2020 mengalami penurunan sekitar 2,19 persen dibanding Agustus 2019.

Tabel 2.20
Angka Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Provinsi Papua, Februari 2018 –Agustus 2020

Jenis Kegiatan Utama	2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk 15+	2.332.383	2.320.862	2.378.923	2.394.887	2.433.130
Angkatan Kerja	1.851.486	1.835.963	1.808.848	1.842.203	1.830.409
Bekerja	1.797.668	1.777.207	1.746.963	1.775.030	1.764.113

Pengangguran	53.818	58.756	61.885	67.173	66.296
Bukan Angkatan Kerja	480.897	484.899	570.075	552.684	602.721
Sekolah	193.332	176.043	220.158	188.438	217.936
Mengurus RT	243.493	256.249	277.906	293.959	316.567
Lainnya	44.072	52.607	72.011	70.287	68.218
TPAK (%)	79.38	79.11	76.04	76.92	75.23
TPT (%)	2.91	3.20	3.42	3.65	3.62

Sumber : BPS Provinsi Papua, (Data diolah)

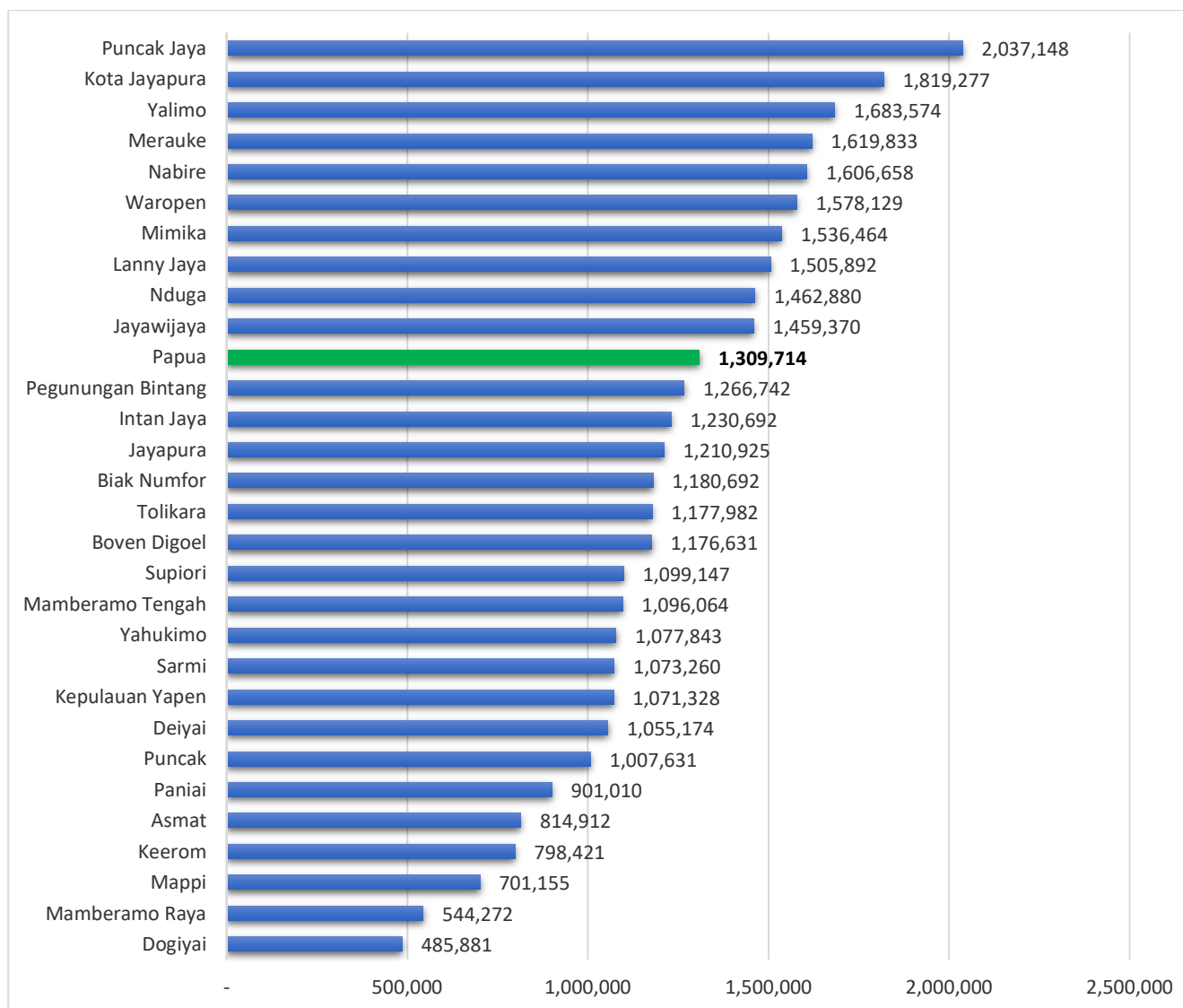
Jumlah pengangguran di Papua pada Agustus 2020 sebanyak 66.296 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sejak Februari 2020. Jumlah pengangguran bertambah 4.411 orang dibandingkan dengan keadaan tahun lalu pada periode sama.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran rumah tangga terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Secara umum, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan penduduk Papua pada tahun 2020 sebesar 1.309.714 rupiah. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, sebanyak 10 kabupaten/kota memiliki rata-rata pengeluaran yang berada di atas angka provinsi. Kabupaten dengan pengeluaran konsumsi tertinggi adalah Kabupaten Puncak Jaya dengan rata-rata pengeluaran sebesar 2.037.148 rupiah, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Dogiyai dengan rata-rata pengeluaran sebesar 485.881 rupiah.

Gambar 2.12
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2021 (Data diolah)

Pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua lebih besar dialokasikan pada kebutuhan makanan dibandingkan non makanan. Sampai dengan tahun 2020 pengeluaran rumah tangga rata-rata per kapita/bulan untuk makanan adalah sebesar Rp.723.821 ribu, dan non makanan sebesar Rp.585.893 ribu. Pengeluaran konsumsi penduduk untuk makanan lebih besar daripada konsumsi bukan makanan, yaitu masing-masing sebesar 723.821 rupiah dan 585.893 rupiah.

Tabel 2.21
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1) Total pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan per kapita/bulan	936.387	1.079.861	1.124.696	1.459.494	1.309.714
a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan per kapita/bulan	524.592	638.354	623.987	774.064	723.821



b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan per kapita/bulan	411.795	441.507	500.709	685.430	585.893
c. Jumlah Rumah Tangga Provinsi Papua	745.393	758.750	771.820	784.718	797.604
2) Rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan per kapita/bulan	1,26	1,42	1,46	1,86	1,64
3) Persentase pengeluaran konsumsi makanan per kapita/bulan	56,02	59,11	55,48	53,04	55,27
4) Persentase pengeluaran konsumsi non makanan per kapita/bulan	43,98	40,89	44,52	46,96	44,73

Sumber : Pusdalisbang Bappeda Provinsi Papua, 2021

Pada table di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu tersebut, pola konsumsi penduduk Papua tidak banyak mengalami perubahan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan selalu lebih besar (55,27 persen) daripada konsumsi bukan makanan (44,73 persen), hal tersebut mengindikasikan adanya pergeseran atau perubahan tingkat kesejahteraan penduduk Papua. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang meningkat lebih lambat dibandingkan pendapatan. Tabel berikut menyajikan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk Papua per kapita sebulan menurut kelompok komoditas makanan dan bukan makanan pada tahun 2020

Tabel. 2.22

Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019 dan 2020

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (%)	2020 (%)
Makanan + Bukan Makanan	1.214.718	1.309.714	100	100
Makanan	665.291	723.821	100	100
Padi-padian	62.899	69.690	9,45	9,67
Umbi-umbian	94.722	95.312	14,24	13,17
Ikan/udang/cumi/kerang	62.665	65.734	9,42	9,08
Daging	46.478	54.769	6,99	7,57
Telur dan susu	30.082	30.771	4,52	4,25
Sayur-sayuran	91.799	98.130	13,8	13,56
Kacang-kacangan	9.781	11.017	1,47	1,52



Buah-buahan	23.690	28.421	3,56	3,93
Minyak dan kelapa	21.176	24.077	3,18	3,33
Bahan minuman	30.461	30.803	4,58	4,26
Bumbu-bumbuan	16.189	16.953	2,43	2,34
Konsumsi Lainnya	13.245	14.661	1,99	2,03
Makanan dan minuman jadi	94.539	105.704	14,21	14,6
Rokok	67.568	77.508	10,16	10,71
Bukan Makanan	549.427	585.893	100	100
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	341.191	359.983	62,1	61,44
Aneka barang dan jasa	119.407	119.947	21,73	20,47
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	24.358	28.572	4,43	4,88
Barang tahan lama	31.837	33.462	5,79	5,71
Pajak, pungutan, dan asuransi	21.674	29.581	3,94	5,05
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	10.959	14.249	1,99	2,45

Sumber: BPS Papua (Data Susenas, Maret 2020)

Pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi makanan terbesar adalah pada kelompok makanan dan minuman jadi (14,60 persen), di mana pada tahun sebelumnya pengeluaran konsumsi terbesar adalah untuk kelompok umbi-umbian. Di tahun yang sama, kelompok umbi-umbian memberikan kontribusi sebesar 13,17 persen pada pengeluaran konsumsi makanan di Papua, di bawah kelompok sayur-sayuran yang memberikan *share* sebesar 13,56 persen. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi pergeseran besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi untuk masing-masing jenis kelompok komoditas makanan. Meskipun demikian, komoditas dari kelompok makanan dan minuman jadi; umbi-umbian; dan sayur-sayuran menjadi tiga kelompok yang memberikan kontribusi terbesar pada pengeluaran konsumsi makanan baik pada tahun 2019 dan 2020.

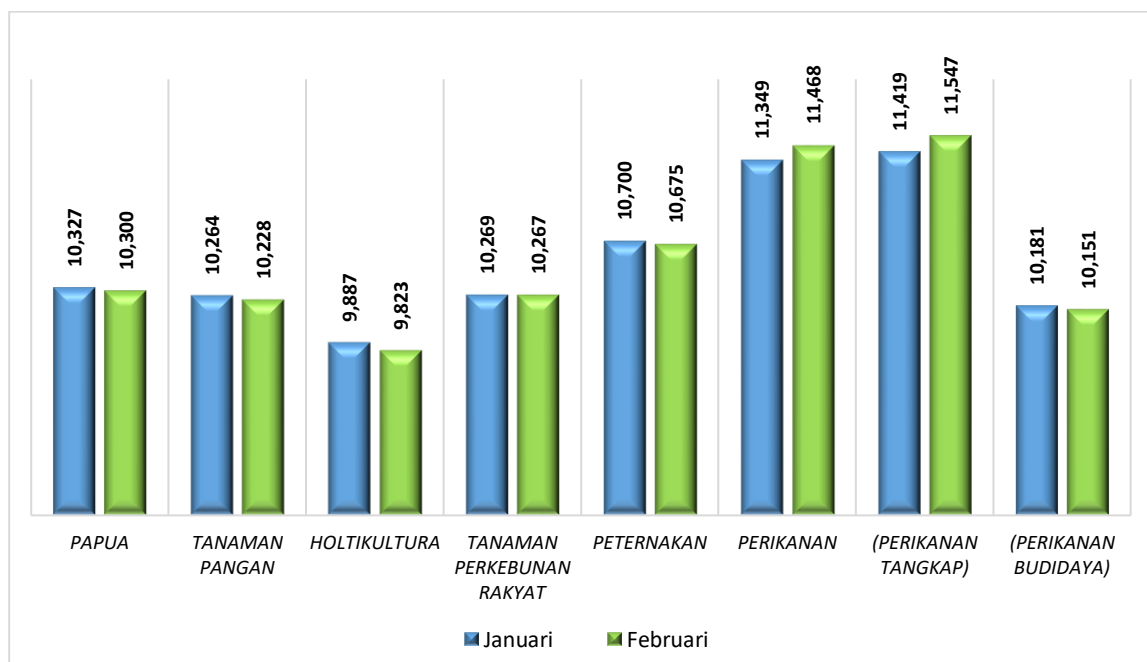
Sementara itu, sebagian besar pengeluaran penduduk untuk konsumsi bukan makanan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga. Hasil Susenas mencatat persentase pengeluaran konsumsi penduduk untuk kelompok komoditi ini lebih dari 61 persen. Selanjutnya, kelompok aneka barang dan jasa memberikan kontribusi hampir 21 persen terhadap total pengeluaran penduduk untuk konsumsi bukan makanan pada tahun 2020, sementara kelompok barang tahan lama memberikan kontribusi sebesar 5,71 persen. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa tidak ada perubahan pola

konsumsi bukan makanan selama dua tahun terakhir. Kelompok komoditi perumahan dan fasilitas; aneka barang dan jasa; serta barang tahan lama masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pengeluaran konsumsi bukan makanan penduduk di Papua.

2.1.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga di terima petani (It) terhadap indeks harga di bayar petani (Ib) (%) merupakan salah satu indicator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di pedesaan, NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang di konsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP Papua Februari 2021 tercatat turun -0,26 persen menjadi 103,00 dibandingkan NTP Januari. Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, perubahan Indeks NTP disebabkan karena perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih besar dari pada perubahan Indeks Harga yang diterima petani (It).

Gambar 2.13
Perkembangan Nilai Tukar Petani Papua menurut Subsektor
Januari – Februari 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (Data diolah)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan NTP Papua bulan Februari 2021 dengan bulan sebelumnya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor tanaman pangan turun -0,35 persen, hortikultura turun -0,64 persen, tanaman perkebunan rakyat turun -0,03

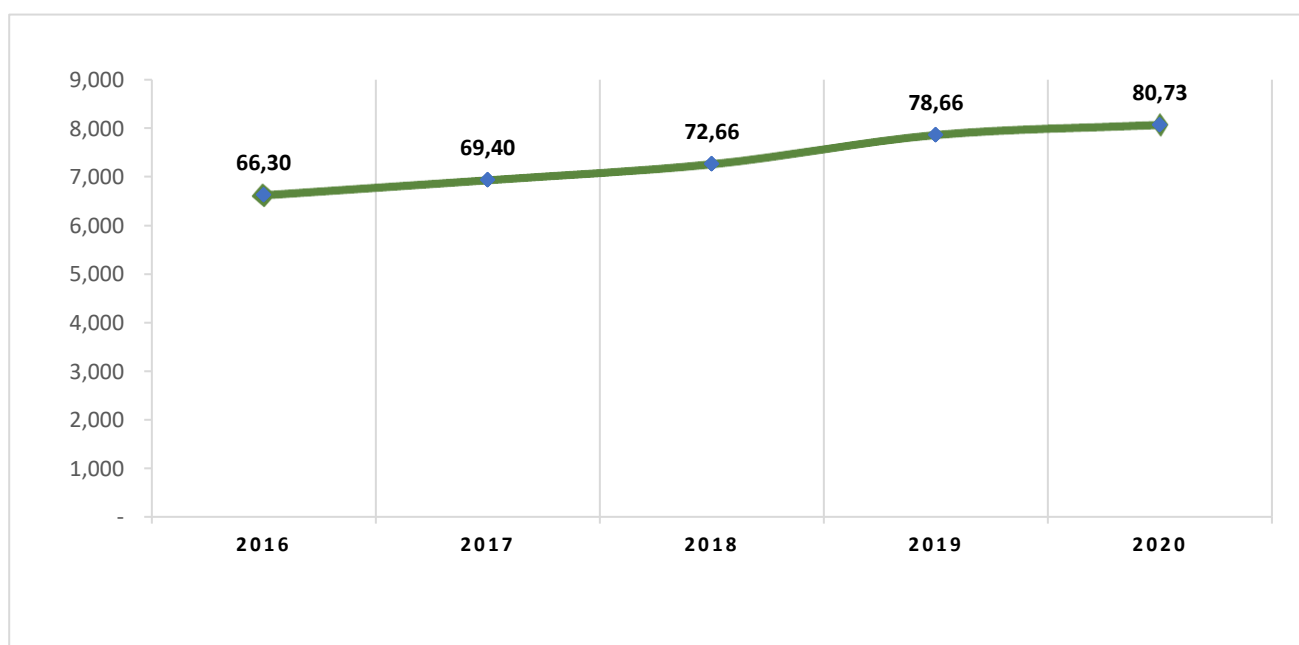
persen, peternakan turun -0,23 persen, dan subsektor perikanan naik 1,05 persen.

Permasalahan rendahnya NTP antara lain disebabkan oleh (1) skala usaha budi daya pertanian yang relatif kecil; (2) harga komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) pembangunan infrastruktur yang belum merata sehinggamenyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi; (4) aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah (5) daya saing komoditas pertanian relatif rendah; (6) laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan.

2.1.4.3. Produktivitas total daerah

Ukuran produktifitas daerah dapat memvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan satu satuan nilai tambah atau PDRB. Perkembangan produktivitas daerah Provinsi Papua selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5% per tahun, serta rata-rata produktifitas Rp.73,56 juta per tenaga kerja per tahun. Lihat Gambar 2.14 di bawah ini.

Gambar 2.14
Produktifitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020



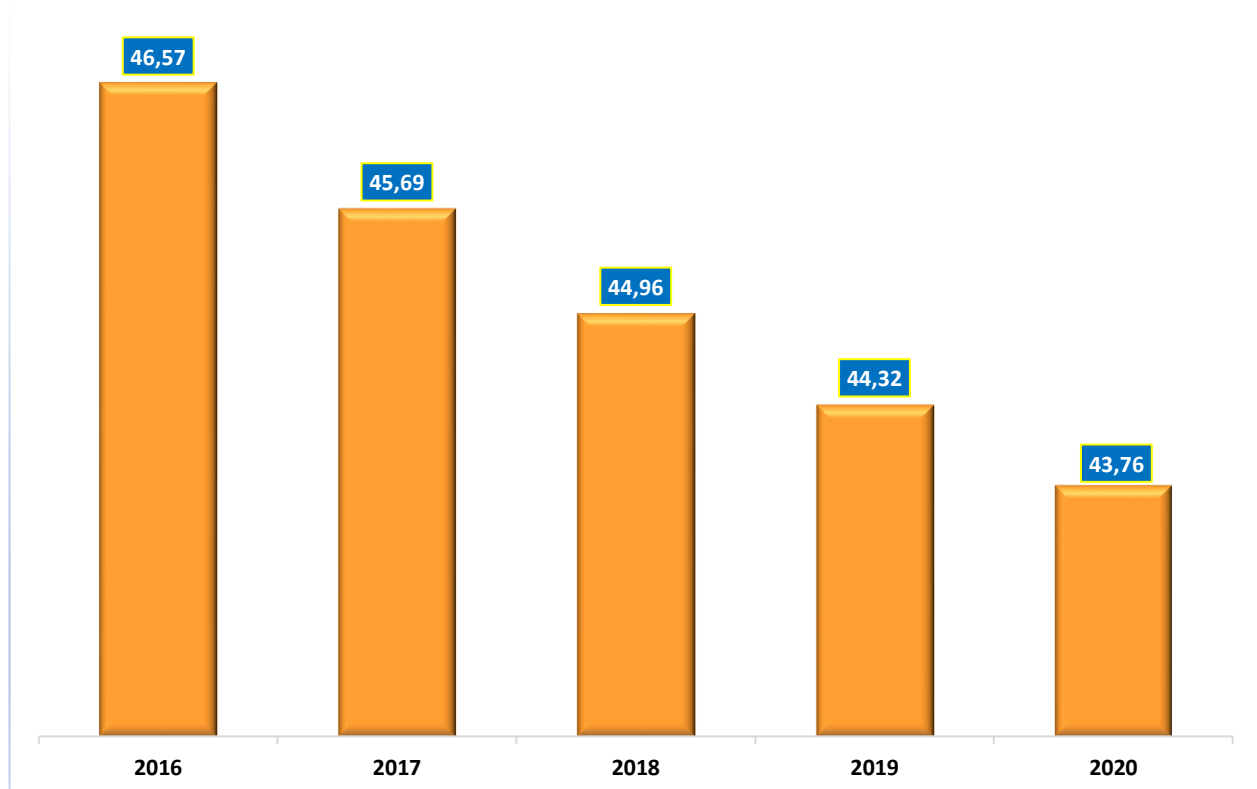
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

2.1.4.4. Tingkat ketergantungan penduduk,

Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi

Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Trend rasio penduduk usia non produktif masih tergolong cukup besar di bandingkan dengan penduduk usia produktif di Provinsi Papua. Tercatat selama 5 (lima) tahun terakhir rasio ketergantungan di Provinsi Papua terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yang artinya ada peningkatan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif. Tercatat pada tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif adalah sebesar 46,57%, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 43,76%.

Gambar 2.15
Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (dalam%)



Sumber : Papua Dalam Angka, 2021 (data diolah)

2.1.4.5. Bank dan Kelembagan Keuangan.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di Provinsi Papua, ini juga mendorong adanya peran bank dalam aktivitas perekonomian tersebut. Ketersediaan Lembaga keuangan Bank di Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Gambar 2.16

Ketersediaan Bank Provinsi Papua Tahun 2016-2020



Sumber : Papua Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Ketersediaan dana perbankan dalam upaya meningkatkan daya saing investasi regional sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kinerja perbankan di suatu daerah perlu dijaga dan ditingkatkan agar tidak kolaps (jatuh). Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam buku statistic perbankan tahun 2020, tercatat rasio pinjaman pada bank umum di Provinsi Papua terlihat semakin meningkat. sebaliknya, rasio pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) terlihat memiliki trend yang negative atau semakin mengalami penurunan. Berdasarkan kondisi tersebut dengan kata lain BPS sangat memprihatinkan, karena rasio LDR BPR setiap tahunnya jauh di atas nilai 100, bahkan lebih dari 200% per tahun (sangat tidak aman), yang mengindikasikan jumlah kredit (pinjaman) jauh lebih besar dibandingkan dana pihak ketiga yang disimpan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka dipastikan dalam lima tahun mendatang banyak BPR yang kolaps. Padahal daya jangkau BPR ini ke pengusaha golongan lemah, dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin di daerah perdesaan sangat tinggi sekal

Tabel 2.22
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Bank Umum dan BPR di Provinsi Papua Tahun 2016-2020

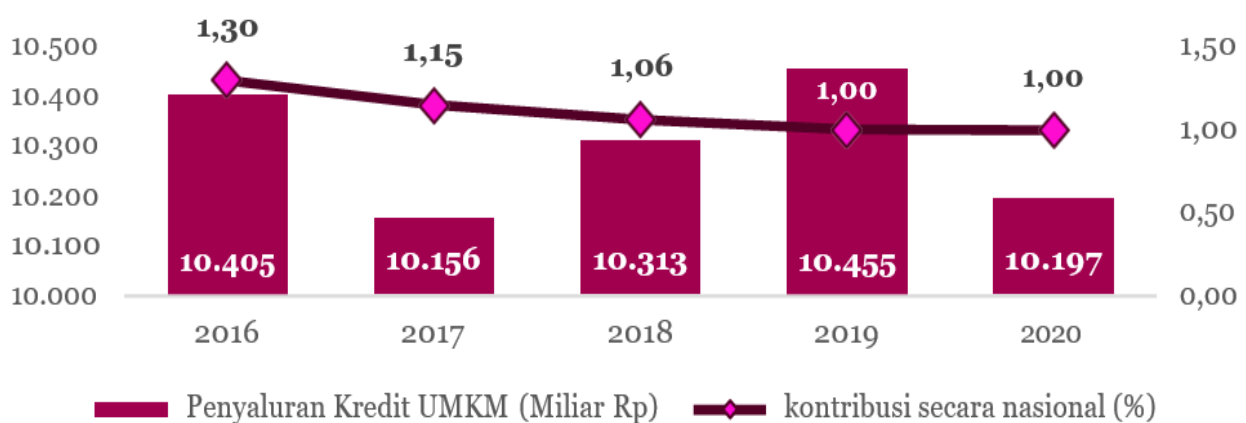


Jenis Bank	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum (Rp)	24.279	25.471	27.583	30.198	31.322
Dana Pihak Ketiga Bank Umum (Rp)	38.647	39.482	41.179	46.654	46.639
BPR (Rp)	858	1.004	1.048	1.130	1.241
Dana Pihak Ketiga BPR (Rp)	346	495	496	688	844
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Pada Bank Umum	6.282	6.451	6.698	6.473	6.716
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Pada BPR	24.798	20.283	21.129	16.424	14.704

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2021

Oleh karena itu perlu adanya penguatan, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah provinsi melalui kebijakan fiskal untuk menjaga dan melindungi BPR agar tidak kolaps dimasa mendatang. Terlebih lagi jika melihat proporsi penyaluran kredit oleh bank di Provinsi Papua selama ini kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sangat rendah sekali, di bawah 10 triliun rupiah per tahun, dan sekitar 1,3% saja kontribusinya secara nasional, maka BPR menjadi satu-satunya alternatif terbaik untuk meningkatkan pemberian kredit bagi UMKM di Provinsi Papua.

Gambar 2.17
Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua Tahun 2016-2020



Sumber : Satatistik Perbankan Indonesia, 2021 (Data diolah)

2.1.4.6. Kondisi Politik dan Keamanan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tercatat tahun 2016 IDI Papua adalah sebesar 61,02 persen meningkat 3,52 point pada tahun 2020 menjadi 64,54 persen. Hal tersebut juga tidak terlepas dari komponen pembentuk dari setiap aspek diantaranya Aspek kebebasan Sipil (Persen); Aspek Hak-Hak Politik (Persen) dan Aspek Lembaga Demokrasi (Persen).

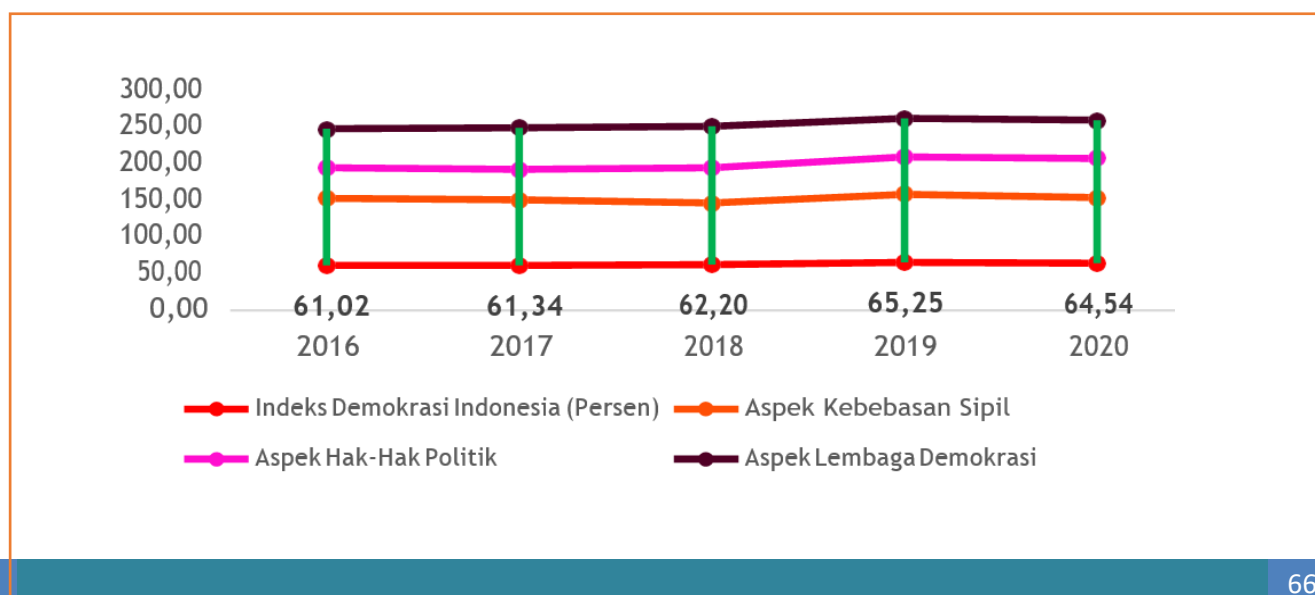
Tabel 2.23
Komponen Indeks Demokrasi Indonesia menurut Aspek di Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Demokrasi Indonesia (%)	61,02	61,34	62,20	65,25	64,54
Aspek Kebebasan Sipil (%)	92,15	89,09	84,36	93,08	89,32
Aspek Hak-Hak Politik (%)	41,13	42,16	47,90	51,16	53,54
Aspek Lembaga Demokrasi (%)	53,45	56,91	57,05	52,61	51,83

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2021 (Data diolah)

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan aspek pembentuk IDI, persentase hak-hak politik cenderung meningkat meskipun nilainya tergolong cukup rendah. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yaitu kebebasan hak sipil dan Lembaga demokrasi cenderung mengalami penurunan. Meskipun cenderung aspek kebebasan sipil terlihat mengalami penurunan, tetapi capaian rata-rata pertahun tergolong cukup tinggi.

Gambar 2.18
Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Papua Tahun 2016-2020





Selain itu, jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan dalam periode 2017-2020 terlihat mengalami fluktuasi. Tercatat setiap tahun terdapat kasus baru, terutama pada periode 2019-2020 terdapat 4.043 kasus yang dilaporkan menjadi 7.778 kasus. Sedangkan, resiko tindak pidana terhadap penduduk di Provinsi Papua juga memiliki trend meningkat. Tercatat rasio tindak pidana per 100 ribu penduduk tahun 2017 adalah sebesar 3.641/100 ribu penduduk, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 4.220/100 ribu penduduk. Selain itu, penyelesaian kasus tindak pidana pada tahun 2016-2020 rata-rata hanya 50,25 persen yang terselesaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan juga stake holder dalam bersama-sama meningkatkan ketentraman dan kenyamanan daerah.

Tabel 2.24
Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	3.203	3.252	3.300	3.347	4.304
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Kasusus)	-	7.722	7.153	3.735	7.778
Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pindana (Per 100.000 Penduduk)	-	3.641	1.883	1.883	4.220
Presentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)	51,96	51,86	49,60	50,41	47,42
Tingkat Kriminalitas (Persen)	26,97	23,65	21,53	11,05	18,07

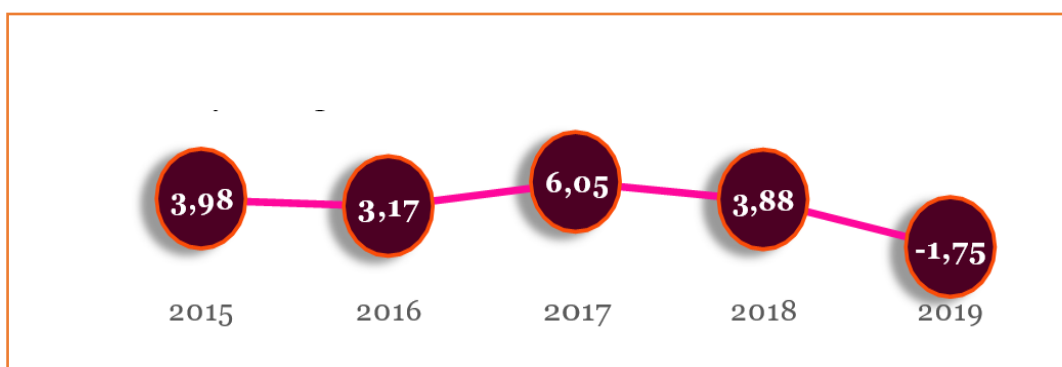
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2021

Secara keseluruhan, upaya dalam rangka menurunkan angka kriminalitas di Papua juga terlihat berdasarkan indikator tingkat kriminalitas yang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Tingkat kriminalitas di Provinsi Papua cenderung terus menurun, hingga tahun 2020 masih terdapat 18,07 persen kasus yang masih belum terselesaikan.

2.1.4.7. Daya saing investasi

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal dapat dijadikan suatu indikator penentu keberhasilan dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan adanya indikator ini, para penyusun rencana pembangunan ekonomi bisa mengetahui berapa investasi yang diperlukan agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakar ekonomi biasanya menggunakan nilai ICOR moderat antara 2–4 poin sebagai indikasi iklim investasi di suatu wilayah dalam kondisi yang menguntungkan. Secara umum nilai ICOR di Provinsi Papua hanya mampu bergerak di bawah 4 poin, bahkan sampai dengan tahun 2019 tercatat mencapai angka -1,75 poin. ICOR sebesar -1,75 mempunyai arti bahwa untuk menciptakan nilai PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar -1,75 rupiah. Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mampu menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang dapat menguntungkan investor. Fakta ini terekam pada nilai ICOR di setiap daerah yang cenderung lebih besar dari 4 poin, dan mengalami kenaikan rata-rata dalam interval -1,75% sampai dengan 3,98% per tahun selama periode 2015-2019.

Gambar 2.19
Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2015-2019



Sumber : Provinsi Papua, 2021

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek



pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	79,27	80,83	91,27	93,07
SMP/MTs	57,95	57,93	81,24	81,68
SMA/SMK/MA	44,73	44,41	76,55	75,05

perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.1.5.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

1. Pendidikan

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua (persen), 2020-2021

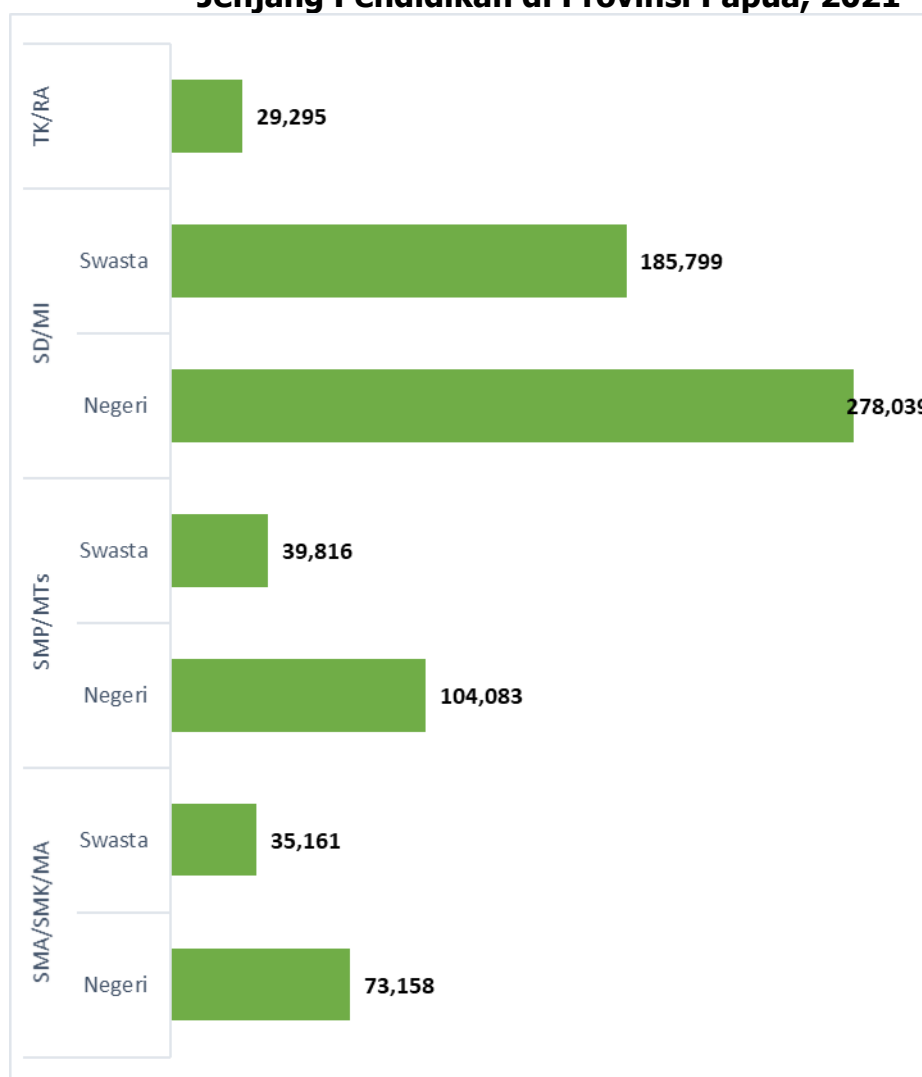
Sumber: BPS Provinsi Papua, PDA 2022 (Data diolah)

Tahun 2021, persentase penduduk usia 7-24 tahun di Provinsi Papua yang masih bersekolah ada sebanyak 61,90 persen. Sedangkan, sisanya sebanyak 16,02 persen dan 22,08 persen adalah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/sederajat adalah sebesar 80,38 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah

(MA)/sederajat sebesar 44,41 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 93,07 persen dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 75,05 persen

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk suatu daerah merupakan asset yang potensial dalam upaya pengembangan daya saing daerah dalam berbagai aspek pembangunan. Kualitas penduduk suatu daerah merupakan penentu utama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Namun asset tersebut membutuhkan perhatian khusus, jika potensi tersebut tidak dikelola dengan baik, sebaliknya justru akan menjadi beban suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia yang besar di Provinsi Papua harus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas secara sistematis salah satunya melalui pendidikan.

Gambar 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua, 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, PDA 2022 (Data diolah)

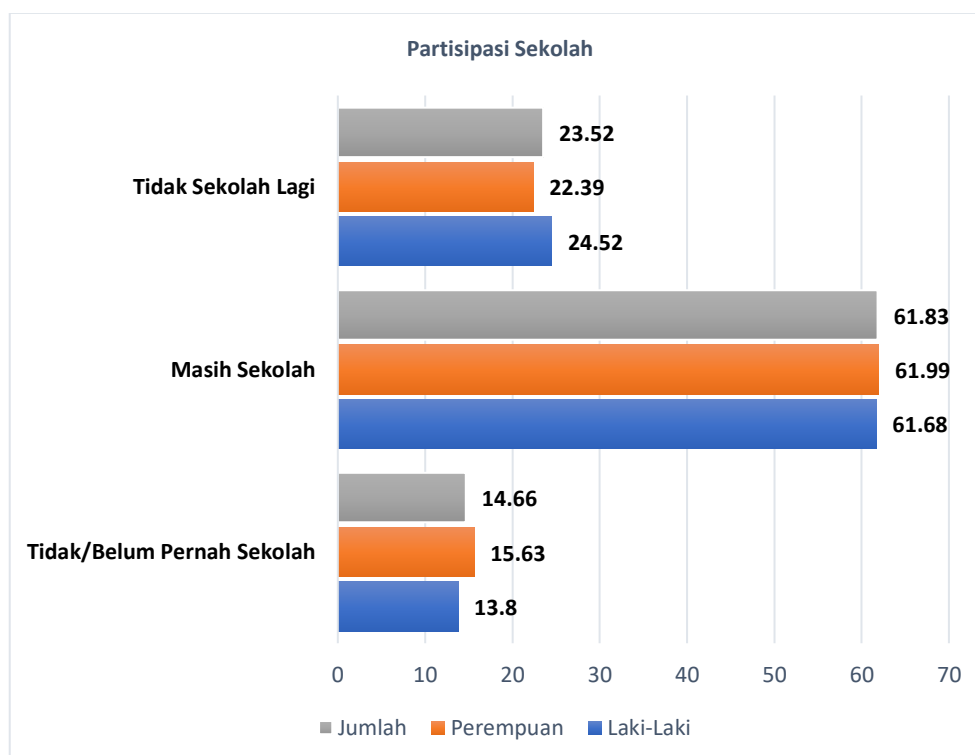
Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena ada yang drop out atau masih berada di jenjang SMP. Nilai rata-rata capaian APM setiap jenjang pendidikan SD masih mendominasi jika dibandingkan tingkat SMP dan SMA/SMK. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di Provinsi Papua yang sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan.

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Gambar 2.21
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua

Sumber : BPS Provinsi Papua, PDA 2022 (Data diolah)



Sumber data : BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (Data diolah)

B. Angka Putus Sekolah

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Tahun 2020

Karakteristik	Jenjang Pendidikan		
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	2,47	4,49	0,75
Jenis Kelamin			
Laki-laki	2,54	3,47	0,82
Perempuan	2,39	5,61	0,66
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	0,57	0,57	0,01
Pedesaan	3,10	6,18	0,33

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2021 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan Jenjang pendidikan SMP/Sederajat memiliki angka putus sekolah tertinggi dibandingkan dengan jenjang yang lain. Pada tahun 2020, 44 s/d 45 dari 1.000 penduduk putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat. Dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SD/ sederajat, 24 s/d 25 di antaranya harus putus sekolah. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SM/ sederajat yang paling kecil dimana 7 s/d 8 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SM/ sederajat putus sekolah, lebih rendah sekitar 3 dari nasional.

C. Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.25 di bawah ini, terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Papua terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan jumlah sekolah bernilai positif. Artinya, penambahan sekolah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang cenderung semakin melek terhadap pendidikan. Sedangkan pada pendidikan sekolah dasar sepanjang tahun 2019/2020 terlihat cenderung berkurang sampai dengan tahun 2020/2021 (lihat Tabel 2.25).

Tabel 2.27
Jumlah Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2019/2020-2020/2021



Jenjang Pendidikan	2019/2020	2020/2021
TamanKanak-Kanak	730	656
Sekolah Dasar	2.636	2.614
Sekolah Menengah Pertama	745	743
SekolahMenengah Atas	375	380
Sekolah Menengah Kejuruan	138	257

Sumber: BPS Provinsi Papua ,PDA 2021 (Data diolah)

D. Perkembangan Guru dan Murid

Tabel 2.28
Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua

Jenjang Pendidikan	2019/2020	2020/2021
	(org)	(org)
TamanKanak-Kanak	2.680	2.745
Sekolah Dasar	18.747	19.499
Sekolah Menengah Pertama	8.738	9.298
Sekolah Menengah Atas	7.300	7.655
Sekolah Menengah Kejuruan	2.873	5.605

Sumber: BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah sekolah sehingga kebutuhan guru juga semakin bertambah untuk semua jenjang pendidikan. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2021 mencapai 19.499 orang, kemudian untuk SMP mencapai 9.298 orang, pendidikan SMA sebesar 7.655 orang dan SMK mencapai 5.605 orang.

Tabel 2.29
Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2020-2021

Jenjang Pendidikan	2019/2020	2020/2021
	(org)	(org)



TamanKanak-Kanak	31.222	32.327
Sekolah Dasar	453.467	450.765
Sekolah Menengah Pertama	135.743	134.091
Sekolah Menengah Atas	101.341	104.631
Sekolah Menengah Kejuruan	36.154	65.282

Sumber: BPS Provinsi Papua,PDA 2021 (diolah)

Seiring dengan adanya peningkatan jumlah guru dan murid di Provinsi Papua pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) juga sangat berdampak terhadap ketersediaan guru dan persebarannya selama ini. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua, rata-rata rasio guru terhadap murid dikabupaten/kota nilainya sangat bervariasi. Rata-rata wilayah adat Mamta,Saereri dan AnimHa memiliki rasioguru terhadap muridcukupideal,meskipun di antara ketiganya masih terdapat daerah dengan rasio yang cukup tinggi diantaranya MamberamoRaya, Mappi dan Asmat. Sedangkan pada wilayah adat La Pago dan Mee Pago didominasi oleh daerah yang memiliki rasio guru terhadap murid dapat dikatakan cukup tinggi, meskipun tidak semua masuk dalam kategori belum ideal. Adapun daerah dengan rasio guru terhadap murid cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Paniai, Dogiyai dan Deiyai.

2. Kesehatan

A. Angka kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2.30
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Bayi	24	23	22

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.30 diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 kabupaten/kota yang tersebar di 5 wilayah adat.

B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel 2.31
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Ibu	216	212	208

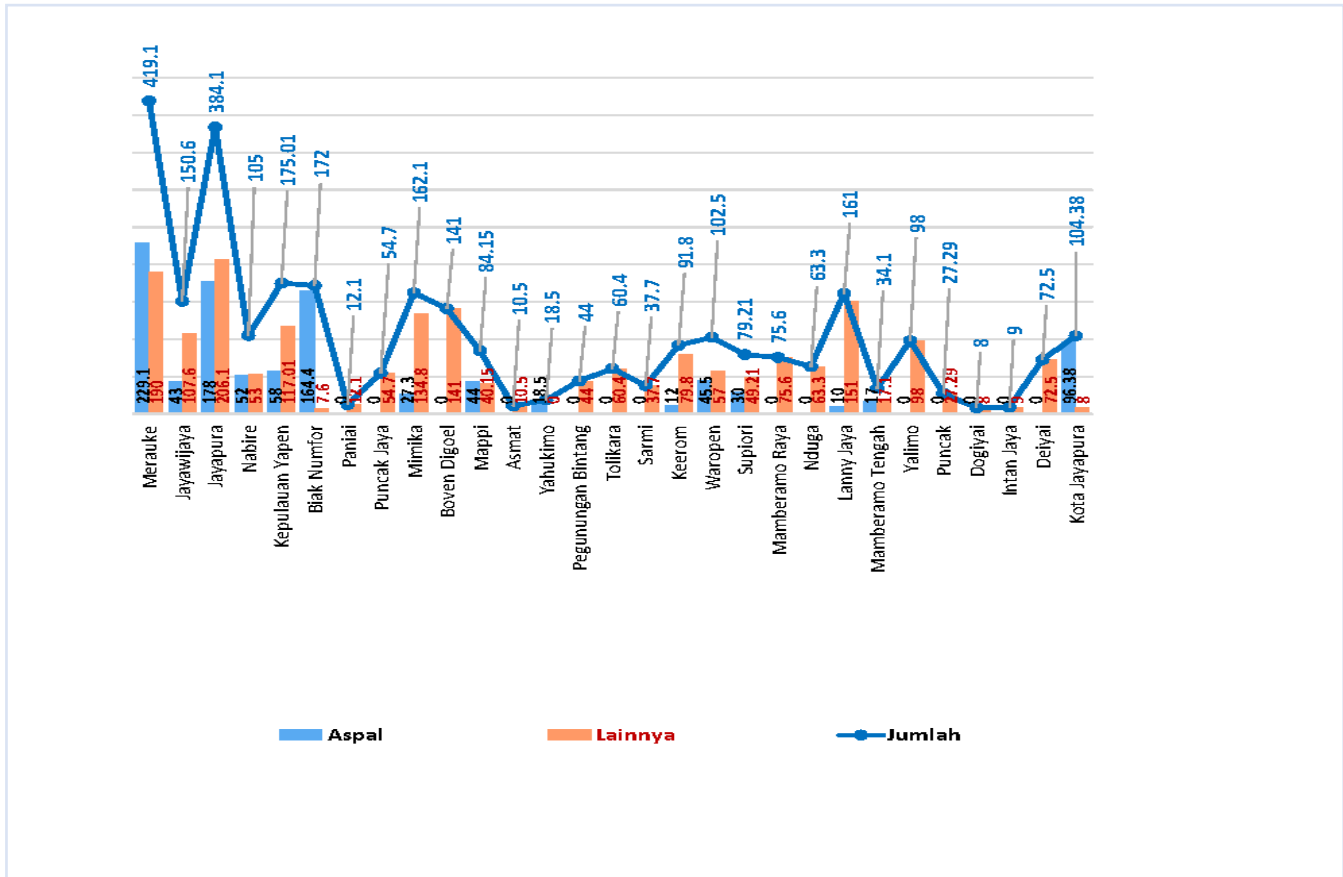
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021 (Data diolah)

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi namun cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2019 kasus AKI mencapai 216 kasus, terus menurun sampai dengan 208 kasus pada tahun 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi kasus AKI di Provinsi Papua untuk tahun-tahun yang akan datang.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

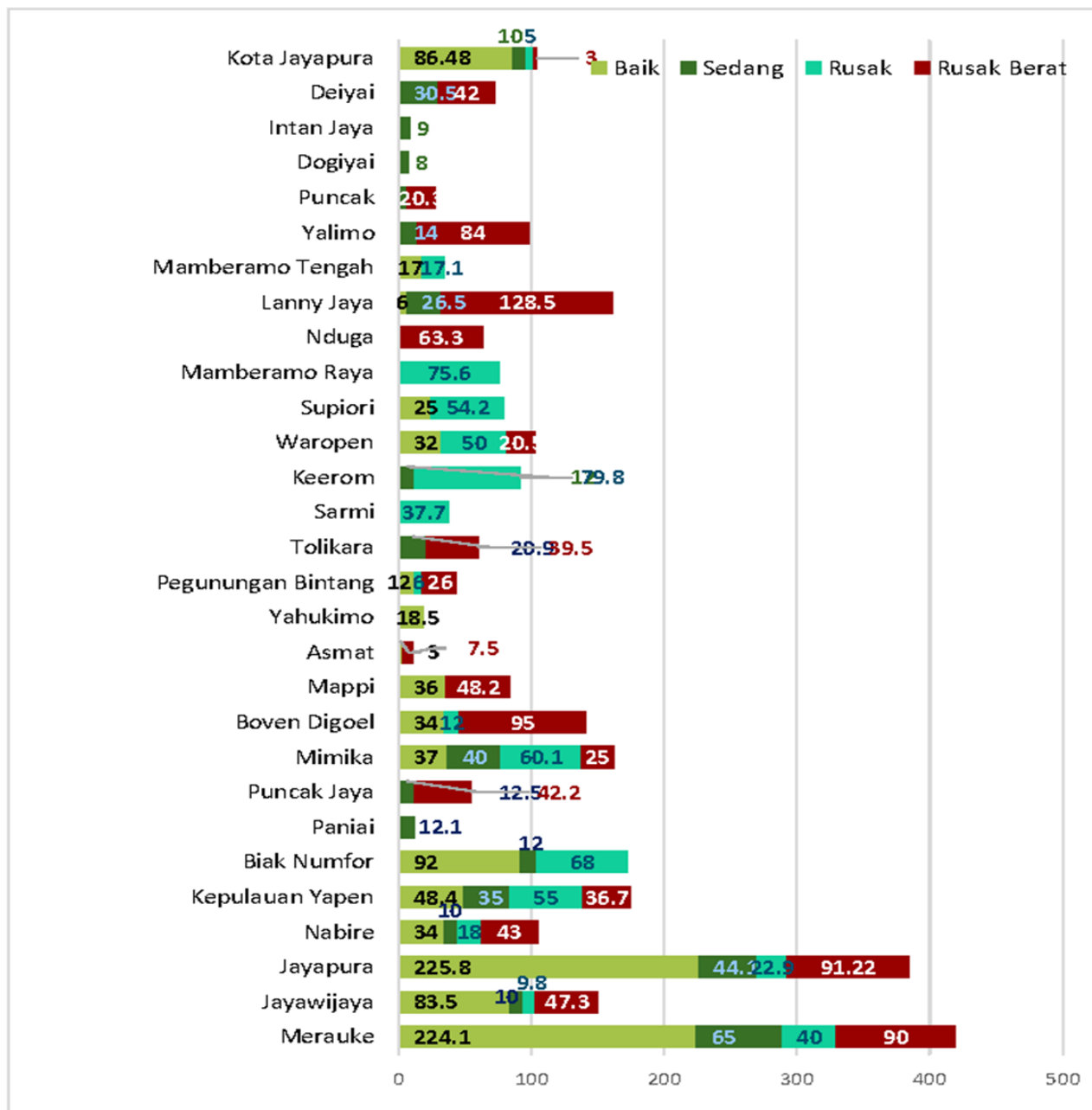
Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Lima kabupaten/kota dengan jalan provinsi terpanjang di Papua terdapat di Kabupaten Merauke 419,10 km (14,17%), Kabupaten Jayapura 384,10km (12,99%), Kabupaten Kepulauan Yapen 175,01km (5,92%), Kabupaten Biak Numfor 172km (5,82%), dan Kabupaten Mimika 162,10km (5,48%).

Gambar 2.22
Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Gambar 2.23
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2020 (km)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Pada tahun 2020, sepertiga dari panjang jalan provinsi di Papua berada dalam kondisi baik yaitu sepanjang 1.014,78 km (34,31%), kondisi sedang sepanjang 378,60 km (12,80%), sisanya dengan persentase yang cukup besar (52,89%) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kota Jayapura merupakan kabupaten yang kondisi jalan provinsinya sudah baik secara umum, dimana persentase panjang jalan kondisi baik lebih besar dari jalan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang lebih dari 75% jalannya berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

A. Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua cenderung terjadi peningkatan sepanjang tahun 2018-2020. Tercatat sampai dengan tahun 2020 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 24,83 unit. Artinya 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 24-25 unit tempat ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 29 kabupaten/kota sepanjang tahun 2016-2020 sangat bervariasi.

Tabel 2.32
Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Provinsi Papua	20,63	20,28	24,83
MAMTA			
Jayapura	40,52	39,53	56,34
Sarmi	43,9	42,7	43,12
Keerom	52,33	51,14	68,56
Mamberamo Raya	26,13	25,74	22,20
Kota Jayapura	18,1	17,96	18,01
LA PAGO			
Jayawijaya	25,72	25,38	27,55
Puncak Jaya	19,35	18,87	27,97
Yahukimo	14,28	14,14	29,75
Pegunungan Bintang	9,81	9,63	27,42
Tolikara	24,91	24,66	24,43
Nduga	0,51	0,51	14,03
Lanny Jaya	15,25	15,14	15,81
Mamberamo Tengah	14,35	14,32	13,52
Yalimo	20,29	19,81	20,38
Puncak	1,89	1,86	22,37
MEE PAGO			
Nabire	28,33	27,88	38,74
Paniai	14,07	13,75	10,53
Mimika	12,85	12,61	18,51
Dogiyai	14,7	14,5	9,37
Intan Jaya	1,64	1,62	10,87
Deiyai	11,86	11,75	8,18
SAERERI			
Kepulauan Yapen	35,72	34,39	34,85
Biak Numfor	20,15	19,62	21,41

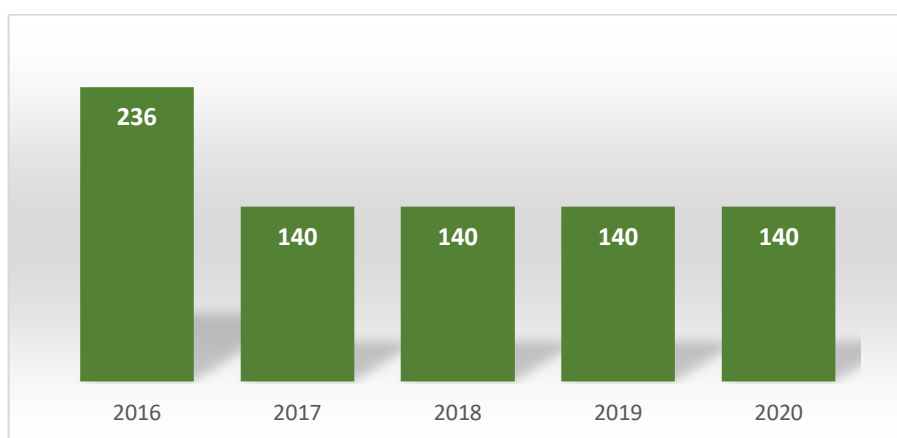
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Waropen	37,89	36,81	42,68
Supiori	33,97	32,83	19,35
ANIM HA			
Merauke	22,91	22,73	27,55
Boven Digoel	40,61	39,73	29,12
Mappi	25,2	24,3	11,02
Asmat	25,42	24,93	26,39

Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Akses kepemilikan rumah di Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau tercatat mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sepanjang tahun 2016-2020. Sementara jumlah rumah layak huni yang telah terbangun di Provinsi Papua selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menurun, dari 263 unit terbangun di tahun 2016 dan di tahun selanjutnya menjadi 140 unit hingga pada tahun 2020.

Gambar 2.24
Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua



Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Papua, 2021 (Data diolah)

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan

pembekalan masyarakat dalam penangan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Gambar 2.25
Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018(diolah)

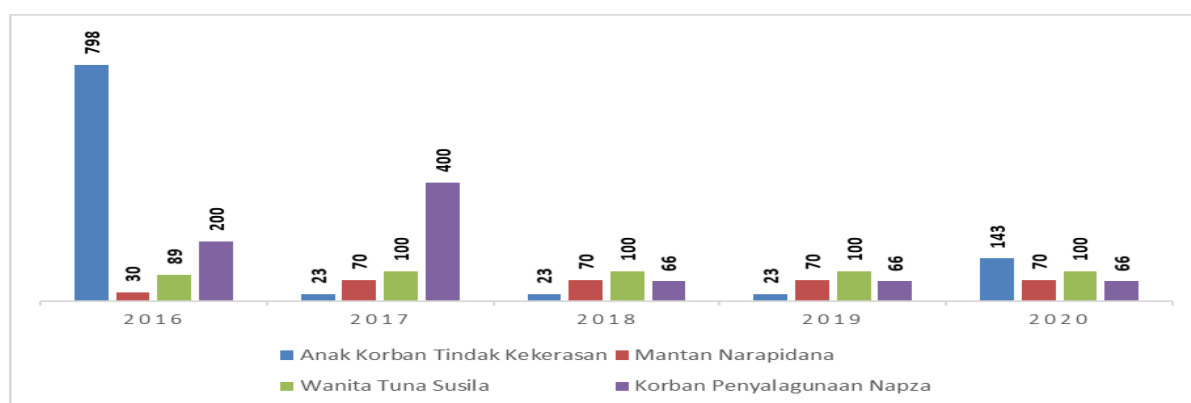
6. SOSIAL

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal ini terindikasi melalui tingginya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, anak korban tindak kekerasan, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan korban penyalahgunaan napza pada rentang tahun 2016-2020. Meskipun demikian, penyandang fakir miskin di Provinsi Papua cenderung meningkat, tercatat jumlah fakir miskin di tahun 2020 mencapai 562.992 orang (lihat gambar 2.26).

Gambar 2.26
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (orang)



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021 (Data diolah)

Selama lima tahun terakhir, jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dari 410 anak (tahun 2016) menjadi 1.123 anak (tahun 2020). Trend yang meningkat juga terjadi pada lanjut usia terlantar, yaitu 220 orang (tahun 2016) menjadi 2.572 orang (tahun 2020). Kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat terjadi pada anak korban kekerasan, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan korban penyalahgunaan napza. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2016 sebanyak 89 orang dan bertambah menjadi 100 orang pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah mantan narapidana di Provinsi Papua pada tahun 2016 tercatat sebanyak 30 orang dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 70 orang. Adapun jumlah anak korban kekerasan yang teridentifikasi pada tahun 2016 sebanyak 798 anak, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 143 anak. Sementara korban penyalahgunaan napza tahun 2016 mencapai 200 orang dan meningkat di tahun 2017 menjadi 400 orang, namun hingga tahun 2020 tercatat menurun menjadi 100 orang. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan penyalahgunaan Napza di Papua karena masih banyak para pecandu narkoba yang belum teridentifikasi.

2.1.5.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja didefinisikan dengan penduduk usia 15 tahun ke atas. Di tahun 2021, penduduk usia kerja di Provinsi Papua sebanyak 2,49 juta jiwa. Secara lebih lanjut, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 1,95 juta jiwa (78,29 persen) yang didominasi oleh laki-laki (1,14 juta jiwa). Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 1,88 juta jiwa yang juga didominasi oleh laki-laki (58,37 persen). Meski begitu, peran perempuan dalam ketenaga kerjaan di Provinsi Papua tidak bisa diabaikan karena perannya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar (24,12 persen). Secara lebih lanjut, penduduk bekerja di Provinsi Papua mendominasi di sector pertanian (1,29 juta jiwa). Hal ini mungkin erat kaitannya dengan pendidikan tertinggi pada penduduk bekerja yang didominasi pada level pendidikan sekolah dasar atau dibawahnya (1,09 juta jiwa).

Tabel 2.33
Angkatan Kerja di Provinsi Papua

Kelompok Umur	Bekerja	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja	Presentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	96 282	504	9 791	10 295	106 577	90,34
20-24	173 663	1 701	18 578	20 279	193 942	89,54
25-29	244 615	2 135	11 758	13 893	258 508	94,63
30-34	254 016	2 488	5 746	8 234	262 250	96,86
35-39	253 479	1 331	2 264	3 595	257 074	98,6
40-44	246 648	NA	1 158	2 230	248 878	99,10
45-49	196 196	842	903	1 745	197 941	99,12
50-54	174 140	NA	938	1 521	175 661	99,13
55-59	115 522	NA	NA	784	116 306	99,33
60+	133 220	1 166	1 254	2 420	135 640	98,22
Papua	1 887 781	12 037	52 959	64 996	1 952 777	96,67

Sumber : BPS Provinsi Papua, PDA 2022 (Data diolah)

Tabel 2.34
Lapangan Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua



Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	619 900	512 050	1 131 950
2	12 245	954	13 199
3	23 757	12 730	36 487
4	43 178	930	44 108
5	61 697	82 642	144 339
6	47 092	1 545	48 637
7	12 046	12 982	25 028
8	1 889	378	2 267
9	8 279	1 018	9 297
10	100 167	26 864	127 031
11	24 054	23 336	47 390
12	7 428	14 381	21 809
13	15 458	8 493	23 951
14	11 537	4 715	16 252
Jumlah	988 727	703 018	1 691 745

Sumber : BPS Provinsi Papua, PDA 2022 (Data diolah)

Tabel 2.35
Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	1 144 918	807 859	1 952 777
Bekerja	1 102 027	785 754	1 887 781
Pengangguran Terbuka	42 891	22 105	64 996
Bukan Angkatan Kerja	180 101	361 264	541 365
Sekolah	75 876	70 118	145 994
Mengurus Rumah Tangga	33 035	255 633	288 668
Lainnya	71 190	35 513	106 703

Jumlah/Total	13250191169	1169123	2494142
---------------------	--------------------	----------------	----------------

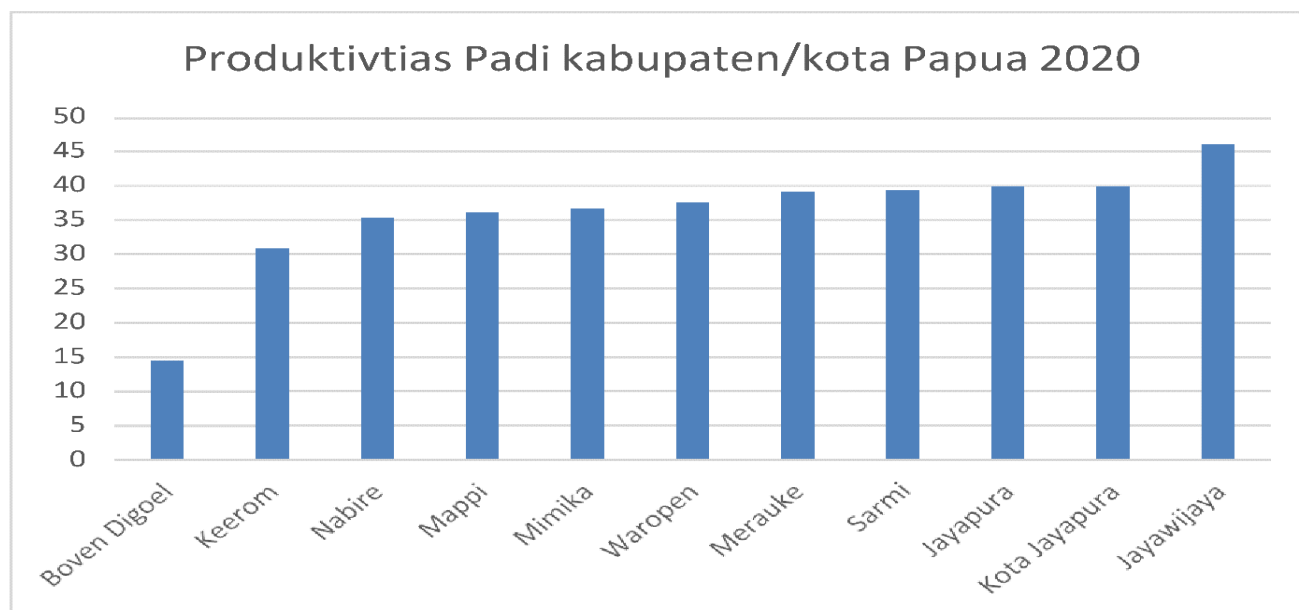
Sumber : BPS Provinsi Papua, PDA 2022 (Data diolah)

2. Pangan

A. Tingkat Konsumsi Pangan

Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan ketahanan pangan ialah produktivitas padi yang merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Papua maupun sebagai komoditas unggulan beberapa kabupaten/kota. Gambar 2.27 memperlihatkan produktivitas padi di beberapa wilayah yang menghasilkan padi di Papua, dimana tingkat produktivitas masih relatif rendah diangka 35 ton/ha jauh dibandingkan Jawa Barat yang mencapai lebih dari 55 ton/ha. Tentu hal ini pada dasarnya dapat jadi peluang bagi pemerintah untuk dapat memberikan penguatan perbekalan baik bersifat materil maupun non materil seperti pemberian pupuk dan traktor, serta edukasi teknologi pangan terkini.

Gambar 2.27
Produktivitas Padi kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2020

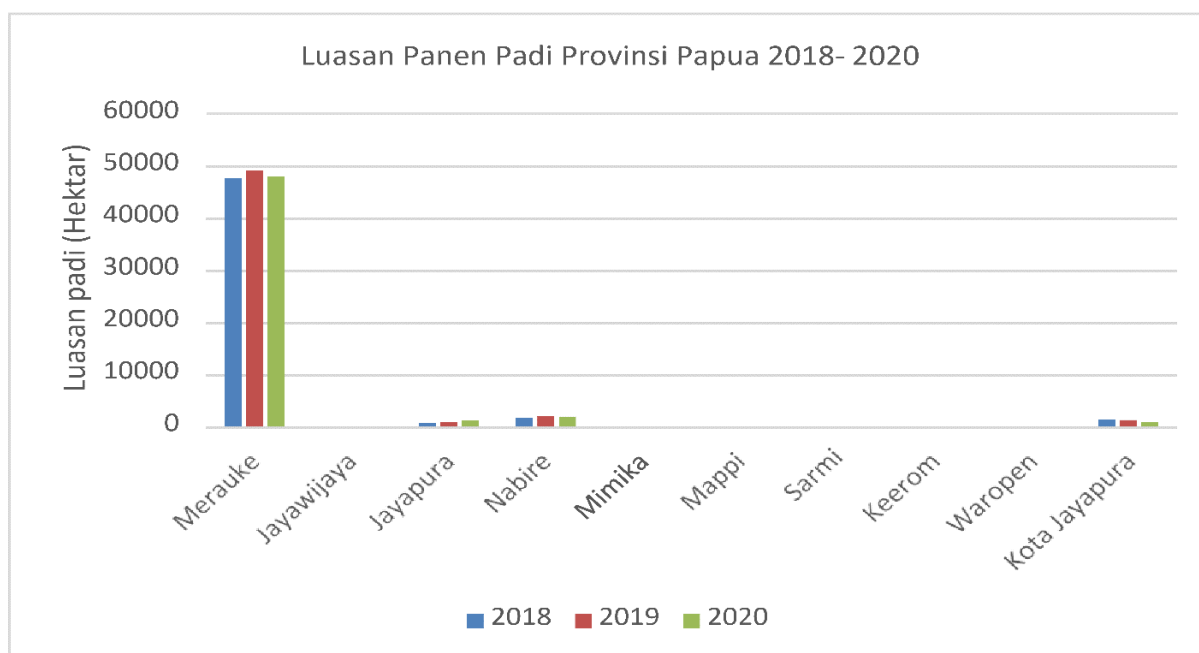


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020

Selain dari tingkat produktivitas yang menjadi tolak ukur ialah luasan panen padi untuk melihat potensi produksi padi disejumlah wilayah. (Gambar.....) memperlihatkan luasan panen padi Provinsi Papua 2018-2020. Penelusuran lebih dalam menemukan bahwa hanya 11 dari 42 kabupaten/kota yang menghasilkan

produk tanaman pangan khusus padi. Temuan lebih jauh menemukan dari tahun 2018-2020 terdapat penurunan sekitar lebih dari 1500 ha kendati pertumbuhan luas panen tetap meningkat dibanding 2013 sejumlah 27 ribu ha. Sektor pertanian juga masih didominasi di wilayah Merauke dengan capaian luasan di hampir 90% dari total luasan padi di seluruh Papua sebagai dampak dari sentralisasi produksi padi dan food estate Merauke. Temuan menarik justru di Kota Jayapura kendati memiliki industri dan jasa yang relatif tinggi, sektor pertanian juga memiliki lahan yang sangat besar. Hal ini dapat menjadi catatan untuk pemerintah dalam menyiapkan lumbung-lumbung lainnya dalam menjaga ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Papua.

Gambar 2.28
Luasan Panen Padi Provinsi Papua Tahun 2018-2020

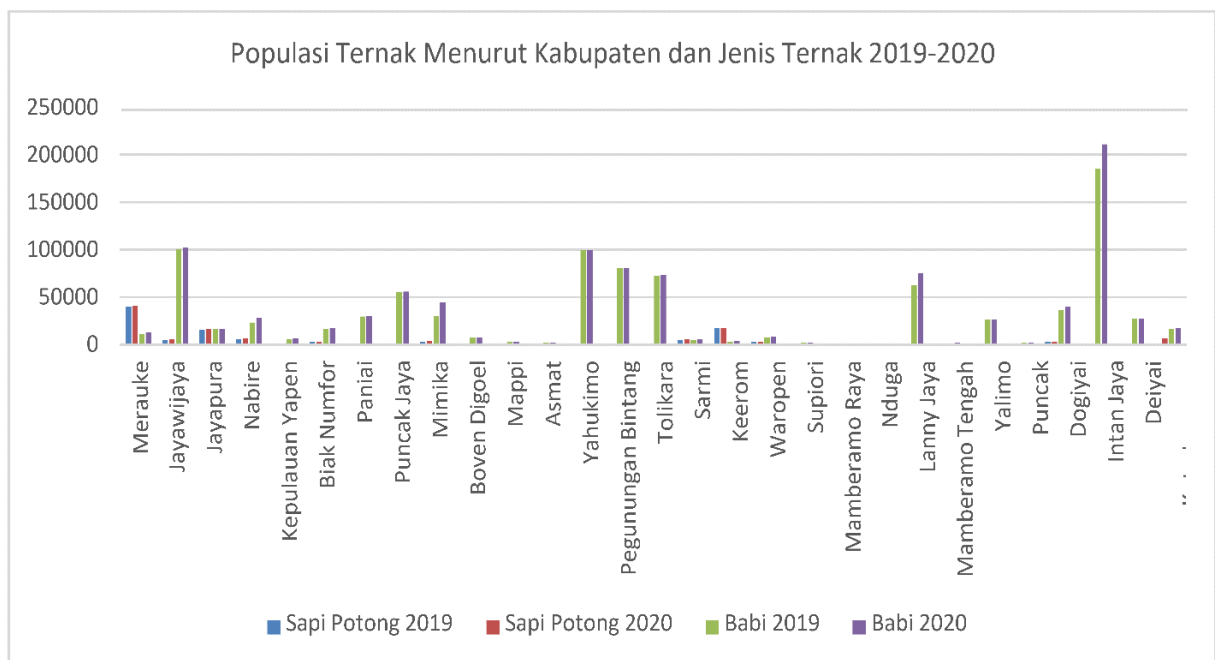


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020

Pembahasan ketahanan pangan juga masuk kedalam ranah peternakan yang menjadi salah satu pemenuhan gizi bagi masyarakat di Provinsi Papua. Ketersediaan ternak wajib dalam penyediaan protein dan juga berperan sebagai nilai ekonomi bagi masyarakat. Gambar 2.28, menunjukkan populasi ternak di Papua pada tahun 2019-2020. Secara konsisten babi mendominasi populasi ternak

dengan capaian hingga 994 ribu hewan ternak, disusul oleh sapi potong dengan capaian lebih dari 100 ribu populasi. Berdasarkan gambar diatas, pada beberapa wilayah mengalami peningkatan untuk ternak babi seperti di Intan Jaya, Lanny Jaya, Yalimo dan Jayawijaya dan mengalami penurunan di Kabupaten Mappi, Boven Digoel, dan Supiori. Temuan sapi potong juga serupa bahkan disetiap kabupaten/kota yang terekam tidak mengalami penurunan jumlah ternak, bahkan mengalami kenaikan hingga 10% dari total ternak.

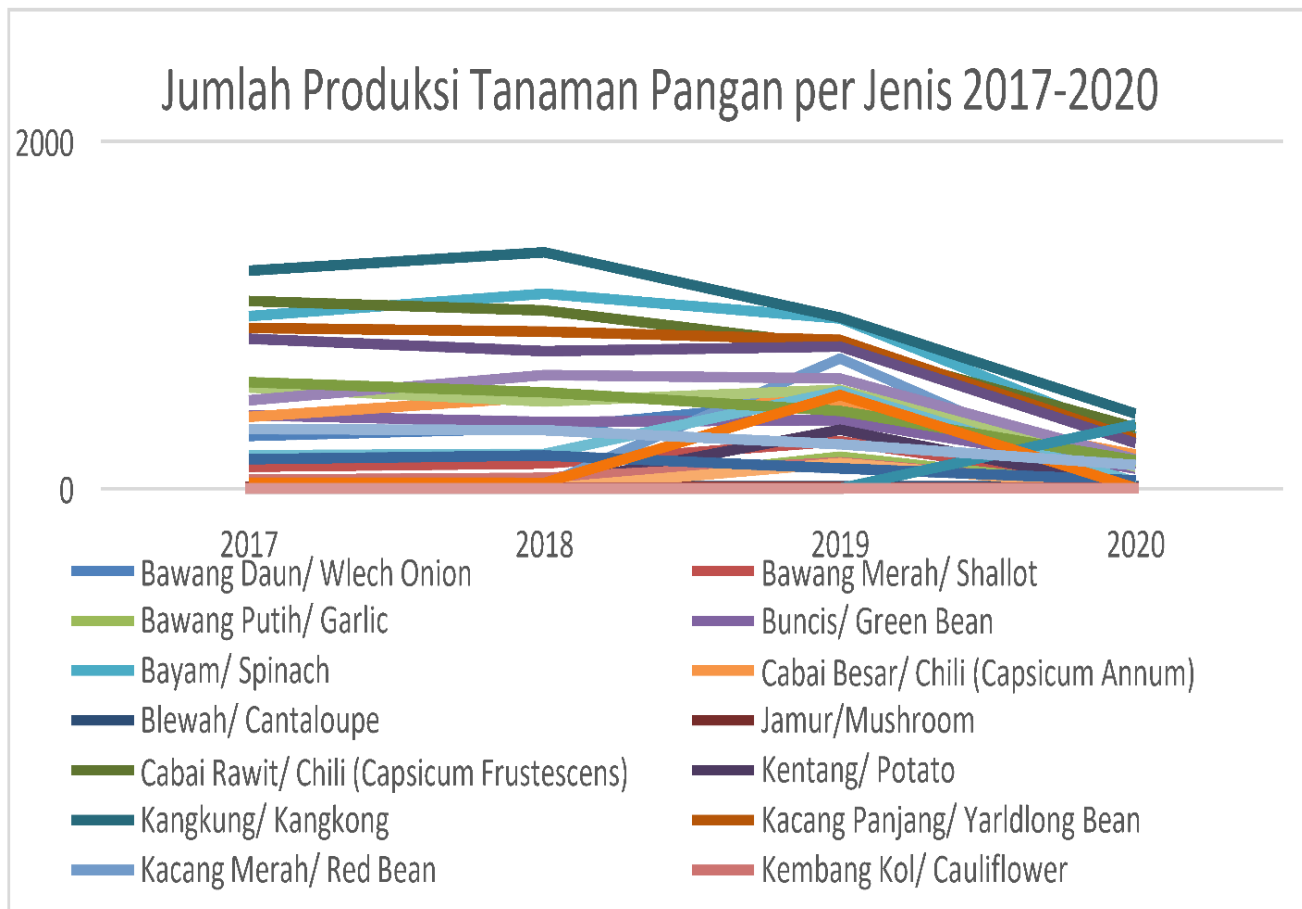
Gambar 2.29
Populasi Ternak Menurut Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Faktor terakhir yang menunjang dari ketahanan pangan ialah jumlah produksi tanaman pangan yang mampu merefleksikan kekayaan sumber gizi bagi masyarakat Papua. Gambar 2.29, menunjukkan capaian jumlah produksi tanaman pangan perjenis pada masa tahun pengamatan 2017-2020. Didapatkan bahwa capaian tanaman pangan masih relatif mengalami penurunan sebagai dampak pandemi, hampir seluruh capaian terkontraksi cukup dalam.

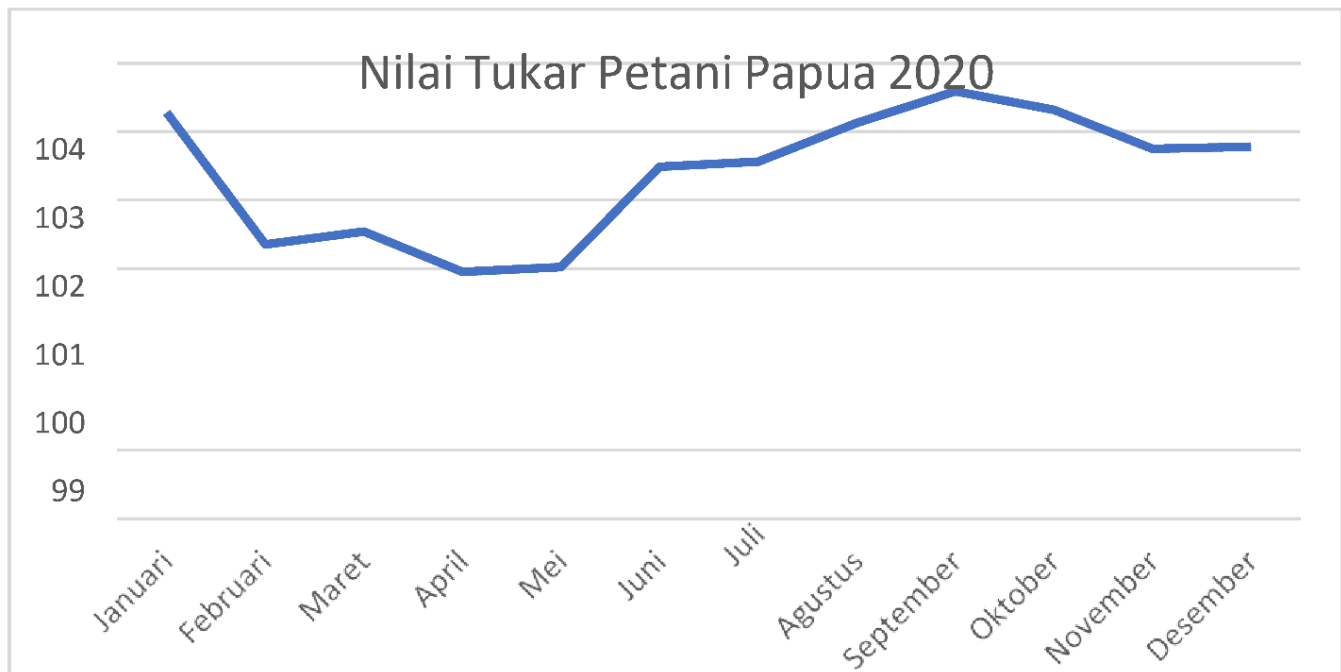
Gambar 2.30
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Per Jenis di Provinsi Papua Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Lantas melihat potensi yang terdapat di hampir seluruh sektor, baik pertanian, peternakan maupun perkebunan pangan dapat menjadi indikasi bahwa potensi ketahanan pangan sangat mungkin dicapai, namun memerlukan langkah tepat sasaran dari pemerintah. Salah satunya ialah merawat kesejahteraan petani sebagai stakeholder utama dalam ketahanan pangan yang direpresentasikan oleh Nilai Tukar Petani (NTP). Gambar 2.30, menunjukkan bahwa kendati sempat mengalami kontraksi namun pertumbuhan NTP mengalami penurunan sebagai dampak pandemi, namun kembali meningkat meskipun pada posisi akhir berada dibawah dari posisi bulan Januari 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa poin kesejahteraan petani menjadi tantangan untuk pemerintah dalam menyediakan nilai tukar yang stabil dan menguntungkan.

Gambar 2.31
Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Selain dari faktor petani sebagai stakeholder utama, pemerintah juga dapat mengintervensi melalui beberapa terapan teknologi. Seperti pemberian fasilitas sarana. Benih, obat-obatan) dan prasarana pertanian (irigasi, pipa damparit) dapat menjadi salah satu langkah sembari meningkatkan kapasitas dan kelembagaan petani yang dapat dilakukan melalui pembentukan gabungan kelompok tani berbadan hukum yang mampu mendapatkan bantuan pemerintah dan permodalan untuk mengesklasikan usahanya. Selain itu untuk menjaga rantai pasok, penggunaan RFID pada peternakan dapat menilai seberapa banyak populasi ternak dalam waktu yang akurat, sehingga mampu diketahui kebutuhan impor/tidak secara guna sasaran. Terakhir ialah penciptaan sarana close loop dalam pertanian yang dibantu oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dapat menciptakan pertanian yang lebih mandiri dan ketahanan pangan secara

B. Pertanahan

Kondisi pertanahan khususnya di Provinsi Papua sering menjadi masalah yang serius, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam menindaklanjuti permasalahan- permasalahan pertanahan. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdapat penurunan peralihan tanah di Provinsi Papua dari 7.057 hektar pada tahun 2016 menjadi 5.887 hektar pada tahun 2017. Adapun proporsi luas peralihan tanah dengan jual-beli mengalami peningkatan dari 87,96% pada tahun 2016, menjadi 88,51% pada tahun



2017 (lihat Tabel 2.34)

Tabel 2.36
Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	Jualbeli	Pewarisan	Hibah	Tukar menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7057
2017	5.211	451	197	3	25	5887

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) nomor : SK.6979/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 target alokasi untuk Provinsi Papua seluas ± 729.116 hektar, yang berasal dari : Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 190.119 hektar, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 362.336 hektar, Program pemerintah untuk pencadangan percontohan sawah baru seluas ± 9.053 hektar, Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 97.421 hektar, Pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 57.219 hektar, Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 1.666 hektar, Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ± 11.302 hektar.

2.1.5.3. Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Potensi Pariwisata di Provinsi Papua memiliki ragam wisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa obyek wisata dapat dikelompokkan kedalam kategori diantaranya: (1) Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua ialah: Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke,



dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (2) Wisata Alam Jenis wisata alam di Provinsi Papua yang sangat potensial dan masuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) ataupun Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) diantaranya rumah semut di TN Wasur, Air Panas Catta Mosso, Wisata Alam Gunung Foja dan Pantai Holtekemp. (3) Wisata Buatan Beberapa wisata buatan yang ada di Provinsi Papua diantaranya Wisata Perbatasan PLBN Skow, Wisata Kerajinan Kapak Batu, dan Wisata Rohani Pulau Nau. Secara rinci beberapa wisata buatan di Provinsi Papua. (4) Wisata Budaya Adapun wisata sejarah yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata provinsi diantaranya wisata sejarah Jepang, Mummy Kurulu, Wisata sejarah perang dunia II Teluk Tanah Merah, dan Festival Bahari Teluk Tanah Merah.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua yang tidak termasuk ke dalam 4 (empat) kelompok di atas, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen).

Tabel 2.37
Potensi Wisata Alam Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KPPP/KSPP	WISATA ALAM	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
MAMBERAMO TAMI	KSPP-PLBN Skow	Wa Air Panas Catta	Kampung Mosso
	KSPP-Pulau Liki & Armo	Watching Dolpin, Diving & Snorklin	
	KPPP-Danau Sentani & Pegunungan Cycloop	Bird Watching di Repang Muaif (ekowisata)	
	KPPP-Teluk Humbolt	Pantai Holtekam	
	KPPP-Pegunungan Foja	Wa Gunung Foja, Air Terjun Sikari, Wa Rufaer.	
	KPPP-Danau Rombabay	Wa Danau Rombabay	



DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KPPP/KSPP	WISATA ALAM	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
SAIRERI	KSPP-Kepulauan Padaido	Wisata Bahari: Diving, Snorkling	P. Pay, P. Auki, P. Wundi, P. Nusi, P. Owi
	KPPP -Pulau Mapia	Wisata Bahari	
	KPPP -Yapen Timur	Bird Watching, Penyu Belimbing, Pantai Pasir Panjang	Sawindui, Barawai Inggrisau Pantai Lori - Yobi
	KSPP-Yapen Barat	Wisata Bahari Pulau Mandena, Wisata Bahari Miosnum, Wisata Bahari P Manupa, Habitat Cenderawasih Awado, Pantai Pasir Putih Pulau Mundaong, Telaga Suandei Yerui	
	KPPP- Mangrove waropen	Hutan Mangrove	Waropen
	KPPP-Tahura Ruar	Angre dan Burung	Biak Timur
MEE PAGO	KSPP-Tn Teluk Cenderawasih	Hiu Paus watisore	
	KPPP-Danau Paniai, Tigi, Tage	Wisata bahari	
LA PAGO	KPPP-Danau Habema & Danau Kuyawage	Wisata Alam	
ANIM HA	KPPP -Tn Wasur	Rumah Semut	

Sumber: Bappeda Provinsi Papua Tahun 2021 dalam Lapdal Revisi RTRW Papua.

Tabel 2.38
Potensi Wisata Buatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KPPP/KSPP	WISATA BUATAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
MAMBERAMO TAMI	KSPP-PLBN Skow	Wisata Perbatasan, Wisata Belanja, Festival Cross Border	Perbatasan RI/PNG, dan Skouw
	KSPP-Pulau Liki & Armo	Wisata Mancing	Mararena & P. Wakde



DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KPPP/KSPP	WISATA BUATAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
	KPPP-Danau Sentani & Pegunungan Cycloop	Kp Wisata Asei, Tugu Mc-Arthur, Kerajinan Kapak Batu Ormu Wari, Desa Wisata Tablasupa	
	KPPP-Teluk Humbolt	Festival Humbolt, Jembatan Yotefa (Jbt Merah)	
	KPPP-Kampung Wisata Yowong	Agrowisata Buah Naga, Telaga Cinta Yowong	
SAIRERI	KSPP-Yapen Barat	Kp Wisata Ausen	
	KPPP- Mangrove waropen	Wisata Rohani Pulau Nau	Pulau Nau
MEE PAGO	KSPP- Cartens Pyramid	Ekowisat, Wisata Minat Khusus (Climbing Tourism)	
	KSPP- Hutan Mangrove Pomako	Ekowisata	
	KPPP-Danau Paniai, Tigi, Tage	Ekowisata, Wisata Rohani dan Alam di Bobaigo	
LA PAGO	Kspp-Lembah Baliem	Festival Lembah Baliem, Atraksi Wisata Bakar Batu	
	KPPP-Taman Nasional Lorentz	Ekowisata	

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KPPP/KSPP	WISATA BUATAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
ANIM HA	KPPP –Bukit Karubaga	Wisata Paralayang, Wisata Religi	Kp Omapaga, dan Gurika
	KPPP -T KPPP -PLBN Sota	Wisata Perbatasan	
	KPPP -Budaya Asmat	Seni Ukir Tradisional Asmat, Rumah Diatas Papan, Museum Buday Asmat	
	KPPP -Suku Koroway	Rumah Pohon Koroway-Komba	

Sumber: Bappeda Provinsi Papua Tahun 2021 dalam Lapdal Revisi RTRW Papua.

Tabel 2.39
Potensi Wisata Budaya Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KPPP/KSPP	WISATA BUDAYA	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
MAMBERAMO TAMI	KSPP-Pulau Liki & Armo	Wisata Sejarah Jepang	
	KPPP-Danau Sentani & Pegunungan Cycloop	Situs Megalitic Tutari, Wisata Sejarah Pd II, Teluk Tanah Merah	
SAIRERI	KPPP – GOA Jepang	Wisata Sejarah	Kampung Sumberker
MEE PAGO	KPPP-Pantai Keakwa	Wisata Sejarah	
LA PAGO	Kspp-Lembah Baliem	Mummi Kurulu, Goa Kontilola	
ANIM HA	KPPP -Boven Digoel	Rumah Pengasingan Bung Hatta (Historical Tourism)	

Sumber: Bappeda Provinsi Papua Tahun 2021 dalam Lapdal Revisi RTRW Papua.

Oleh karena itu, dengan melimpahnya potensi pariwisata di Provinsi Papua maka pengembangan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan baik diantaranya dengan



menyediakan SDM handal untuk menggalakan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi, serta perlu adanya penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

2. Pertanian

Perkembangan pertanian di Provinsi Papua dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Papua dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Papua. Berdasarkan Tabel 2.38, diketahui bahwa rata-rata produktivitas pertanian terus mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat pada produktivitas total di Papua terus menurun dari 9,82 ton/hadi tahun 2013 menjadi 7,37 ton/ha di tahun 2016 dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Rata-rata setiap tahunnya produktivitas berkurang hingga mencapai 8,65%. Hal ini disebabkan juga oleh produksi total pertanian yang terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,16% khususnya pada tanaman padi sawah yang setiap tahunnya memiliki jumlah produksi menurun paling tinggi yaitu sebesar 12,32% per tahunnya.

Secara keseluruhan terdapat empat komoditi dengan produktivitas mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Sedangkan padi sawah dan ubi jalar mengalami penurunan hingga mencapai masing-masing sebesar 27,86 dan 0,07%. Namun secara nilai produksi terlihat bahwa hampir semua jenis komoditi ini terus mengalami perbaikan, kecuali padi sawah.

Dalam bidang perkebunan, secara keseluruhan luas panen untuk 12 komoditi di Provinsi Papua tercatat pada tahun 2013 sebesar 99.182 ha dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017 sebesar 257,059 ha atau meningkat sebesar 61.42%. Produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Papua secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2013 adalah sebesar 400 ton/ha naik menjadi 441 ton/ha atau meningkat sebesar 9,35%. Jika dilihat per komoditi, tanaman cengkeh dan karet memiliki produktivitas tertinggi yaitu bisa mencapai di atas 90-95% yaitu pada tahun 2013 ke tahun 2017. Kemudian diikuti oleh komoditi pinang dan mente yang memiliki produktivitas berkisar antara 40-60% untuk tahun 2013 ke tahun 2017. Sedangkan komoditi lainnya hanya mampu meningkat di bawah 20% untuk tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.38).

Tabel 2.40
Luas Panen Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama Pertanian
di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
----------	------	------	------	------	------	-------------------

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
Luas Panen (Hektar)						
Padi Sawah	38.338	40.138	38.977	51.730	55.004	44.837
Jagung	3.002	2.951	2.736	3.342	3.464	3.099
Kacang Kedelai	3.750	3.258	2.761	5.723	6.282	4.355
Kacang Tanah	1.951	1.994	2.268	2.902	3.187	2.460
Ubi Kayu	3.171	3.729	3.822	3.463	3.559	3.549
Ubi Jalar	30.980	33.041	36.091	35.863	37.656	34.726
Total	81.192	85.111	86.655	103.023	109.152	93.027
Produksi (Ton)						
Padi Sawah	338.988	356.515	374.949	224.945	243.328	307.745
Jagung	7.034	6.948	6.666	8.143	8.550	7.468
Kacang Kedelai	4.609	3.821	3.523	7.964	9.082	5.800
Kacang Tanah	2.045	2.043	2.498	3.308	3.729	2.725
Ubi Kayu	38.900	45.512	46.388	45.059	47.112	44.594
Ubi Jalar	405.521	411.893	446.952	469.441	492.913	445.344
Produktifitas (Ton/Hektar)						
Padi Sawah	8,84	8,88	9,62	4,35	4,42	7,22
Jagung	2,34	2,35	2,44	2,44	2,47	2,41
Kacang Kedelai	1,23	1,17	1,28	1,39	1,45	1,30
Kacang Tanah	1,05	1,02	1,10	1,14	1,17	1,10
Ubi Kayu	12,27	12,20	12,14	13,01	13,24	12,57
Ubi Jalar	13,09	12,47	12,38	13,09	13,09	12,82

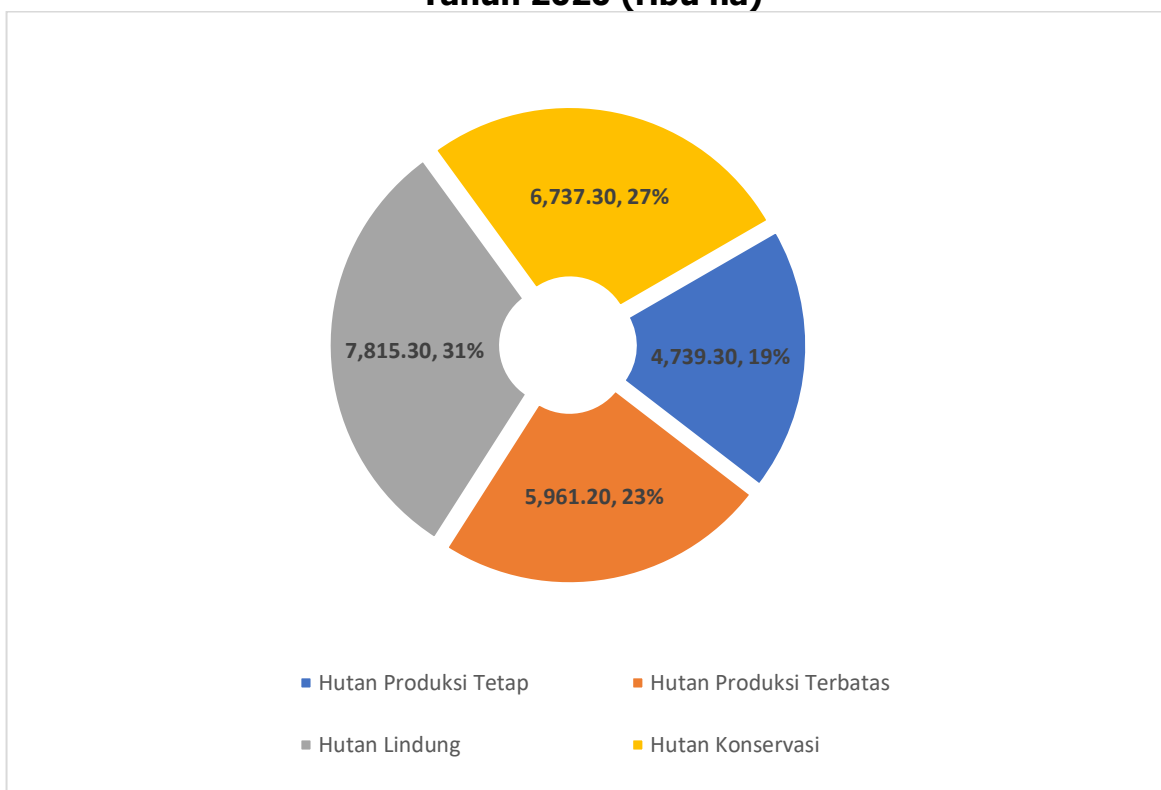
Sumber : RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, (Data diolah)

3. Kehutanan

Secara keseluruhan total luas kawasan di Provinsi Papua adalah sebesar 32.757.059 Ha yang terdiri atas hutan produksi (terbatas), hutan produksi (tetap), hutan produksi (dapat dikonversi), hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, areal lainnya dan kawasan perairan (lihat Gambar 2.30). Adapun luas penutupan lahan paling tinggi mencakup hutan lindung yaitu mencapai 30,95 persen atau seluas 7.815 juta Ha. tersebut masih tergolong cukup tinggi.

Gambar 2.32

Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tahun 2020 (ribu ha)



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusdalisbang Provinsi Papua, (Data diolah)

Dengan luas Kawasan hutan yang cukup besar, di dalamnya terdapat beberapa potensi hasil hutan yang cukup banyak di antaranya ialah produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan verner dengan jumlah produksi yang berbeda-beda setiap jenisnya. Produksi kayu bulat dan kayu gergajian pada periode 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Selain itu, produksi kayu dan verner mengalami peningkatan jumlah produksi hingga di tahun 2020, (lihat table 2.41).

Tabel 2.41
Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m3)

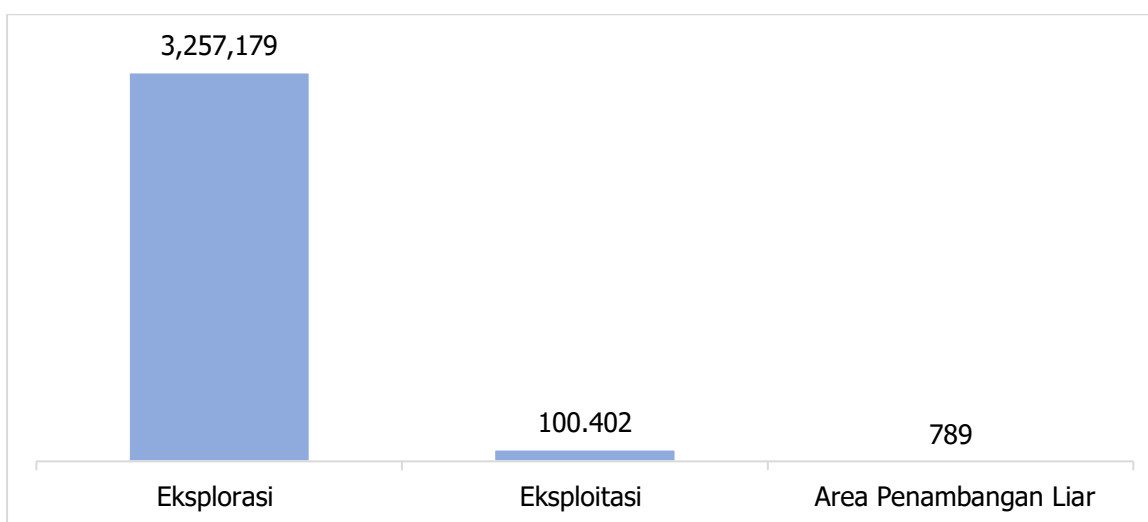
Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Verner
2016	525.314	112.064	238.624	9.450
2017	439.120	109.854	217.145	-
2018	474.279	106.268	206.580	-
2019	456.631	126.163	199.680	-
2020	463.470	140.674	149.461	65.928

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusdalisbang Provinsi Papua, (Data diolah)

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Luas lahan pertambangan secara keseluruhan tercatat adalah sebesar 3,35 juta ha yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penambangan liar. Luas areal pertambangan di Provinsi Papua didominasi oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat pesat. Tercatat 96,99% dari luas areal pertambangan merupakan areal yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, kemudian 2,99% adalah areal eksploitasi, dan 0,02% adalah penambangan liar.

Gambar 2.33
Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan(ha)

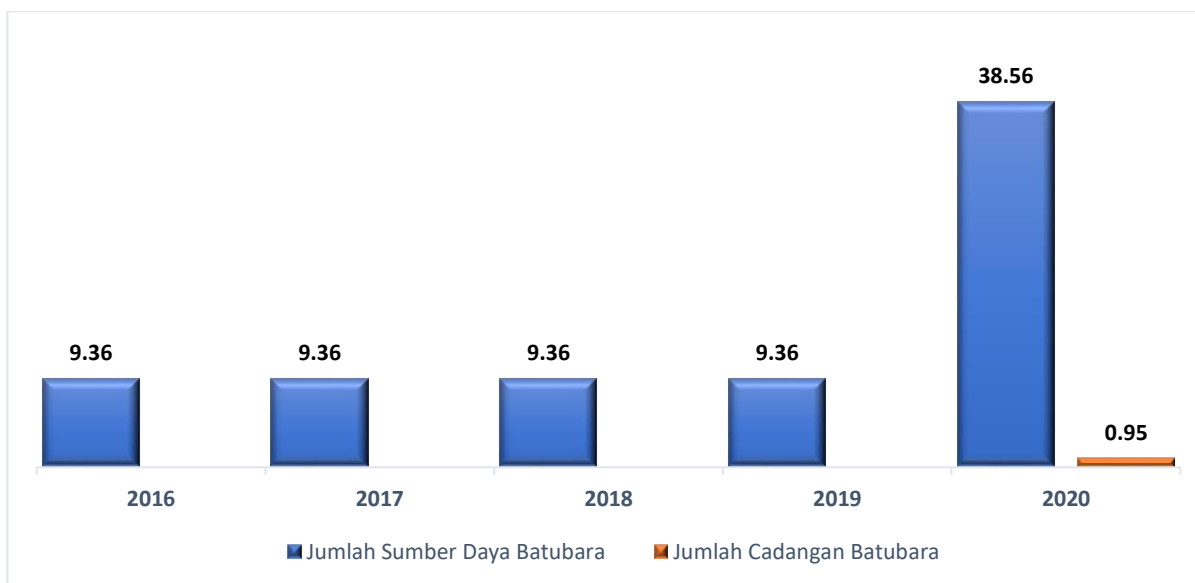


Sumber : Pusdalisbang Provinsi Papua (Data diolah)

5. Potensi Sumber Daya Mineral

Jumlah sumberdaya batubara yang terdata di Provinsi Papua pada tahun 2016 mencapai 9,36 juta ton meningkat menjadi 38,56 juta ton. Sedangkan, jumlah cadangan batubara sampai dengan tahun 2020 mencapai 950 ribu ton. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya daerah yang ditemukan potensi sumber daya batubara di wilayah Papua. Perlu adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk mengeksplorasi sumber daya batubara yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Gambar 2.34
Potensi Mineral Batubara di Provinsi Papua (juta ton)



Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusdalisbang Provinsi Papua (Data diolah)

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Evaluasi kinerja RKPD tahun 2021 dilakukan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan didasarkan pada urusan wajib yang terbagi atas urusan wajib terkait pelayanan dasar dan tidak terkait serta urusan pilihan. **Terkait pelayanan dasar** terbagi: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (7) Sosial. **Tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:** (1) Tenaga Kerja, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak, (3) Pangan, (4) Pertahanan, (5) Lingkungan Hidup, (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (7) Pemberdayaan Masyarakat dan desa, (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (9) Perhubungan, (10) Komunikasi dan Informasi, (11) Koperasi dan UKM, (12) Penanaman Modal, (13) Keper mudaan dan Olahraga, (14) Statistik, (15) Persandian, (16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, dan (18) Kearsipan. Kemudian **Urusan Pilihan meliputi:** (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Pariwisata, (3) Pertanian, (4) Kehutanan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral, (6) Perdagangan, (7) Perindustrian.

Evaluasi kinerja RKPD tahun 2021 dilakukan dengan perhitungan peringkat kinerja, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan formula berikut :

- a. Rata-rata kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja;
- b. Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan

penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud;

- c. Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.42
Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja

No.	Interval	Kriteria Penilaian	Notasi
1.	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi	T
3.	66 % ≤ 75%	Sedang	S
4.	51% ≤ 65%	Rendah	R
5.	≤ 51%	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Jika dianalisis secara parsial pada masing-masing indikator, maka kriteria penilaian yang Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) baik itu pada capaian kinerja maupun penyerapan anggaran dapat diinterpretasikan bahwa capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.

2.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Beberapa OPD yang mendapatkan pagu paling besar terlihat agak sulit mencapai kinerja keuangan dan fisik dalam kategori Sangat Tinggi, terkecuali Sekretariat Daerah saja yang terlihat mampu mencapai hal tersebut, dimana pagu yang diperoleh termasuk paling tinggi diatas Rp. 1 triliun, dengan capaian kinerja anggaran bisa sebesar 97,31% (ST) dan kinerja fisik sebesar 90,97% (T). Ada kecenderungan semakin besar pagu yang direncanakan OPD maka semakin sulit untuk mencapai kinerja Sangat Tinggi, sebaliknya semakin mudah mencapai kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 2.43
Kinerja OPD Menurut Pagu Yang Direncanakan Tahun 2021



OPD	Pagu	Rasio Rp	Rasio F
Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.409.754.693.160	80,30	61,86
Dinas Kesehatan	198.844.699.639	85,35	38,22
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	484.959.579.035	92,72	93,72
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)	88.455.944.200	0,00	0,00
Rumah Sakit Jiwa	84.070.359.311	95,35	33,33
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	223.476.784.731	88,00	22,06
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.060.393.179.335	81,43	82,20
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	61.472.666.994	92,77	95,11
Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.300.462.918	91,78	92,18
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	101.578.618.733	71,95	54,86
UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM	1.706.710.943	86,37	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	133.946.657.718	84,80	28,51
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	195.358.199.472	87,92	88,02
Cabang Dinas Kehutanan Jayapura	2.799.894.930	98,58	99,37
Cabang Dinas Kehutanan Sarmi	749.787.500	99,99	100,00
Cabang Dinas Kehutanan Keerom	1.500.000.000	86,88	88,04
Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya	599.949.000	98,21	98,31
Cabang Dinas Kehutanan Nabire	749.850.000	99,51	100,00
Cabang Dinas Kehutanan Mimika	1.049.989.224	99,05	99,76
Cabang Dinas Kehutanan Asmat	599.598.525	85,55	85,71
Cabang Dinas Kehutanan Mappi	599.985.000	100,00	100,00
Cabang Dinas Kehutanan Merauke	1.099.824.000	94,88	95,75
Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel	599.989.075	96,80	98,09
Cabang Dinas Kehutanan Yalimo	400.000.000	98,55	98,55
Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo	599.903.840	99,55	99,55
Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai-Deyai	599.968.318	99,84	100,00
Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya	599.598.055	99,44	100,00
Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Tengah	598.896.000	91,79	91,96
Cabang Dinas Kehutanan Paniai	635.552.124	98,20	99,53
Cabang Dinas Kehutanan Tolikara	499.961.470	99,92	100,00



OPD	Pagu	Rasio Rp	Rasio F
Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya	499.935.000	99,99	100,00
Cabang Dinas Kehutanan Puncak	500.000.000	97,74	100,00
KPHL UNIT II NABIRE	500.000.000	99,91	100,00
KPHL Unit VI Mimika	1.050.000.000	96,38	96,79
KPHP Unit XVII Waropen	499.780.000	99,09	100,00
KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya	697.971.000	99,88	100,00
KPHP Unit XXIII Sarmi	699.987.500	97,99	99,00
KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen	500.000.000	99,73	100,00
KPHL Unit XX Biak	1.949.899.400	99,24	99,63
KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	2.144.975.750	98,25	99,07
KPHP Unit XXIX Keerom	866.899.450	99,66	99,94
KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang	499.743.735	93,23	93,50
KPHL Unit XLII A Jayawijaya	1.999.999.485	99,85	100,00
KPHL Unit XLII B Lanny Jaya	600.000.000	99,84	100,00
KPHP Unit XLIII Nduga	500.000.000	99,91	100,00
KPHP Unit LIII Boven Digoel	499.999.834	99,54	99,69
UPTD Kebun Raya Koya Koso	1.750.000.000	99,87	100,00
BPTH Papua	1.904.897.766	94,67	95,85
UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek	1.499.988.500	98,93	100,00
UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua	1.499.997.999	89,87	89,96
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	32.692.358.296	89,01	46,34
Dinas Perhubungan	91.383.572.868	62,41	52,54
Dinas Komunikasi dan Informatika	49.066.747.780	93,94	88,91
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.319.008.110	86,59	31,03
Dinas Olah Raga dan Pemuda	301.056.488.794	99,79	95,71
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49.216.633.317	93,88	94,08
Dinas Kelautan dan Perikanan	58.360.480.051	92,98	92,56
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	86.194.648.354	95,15	99,43
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat	393.731.613	86,14	90,01
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Mimika	497.925.213	96,21	98,26



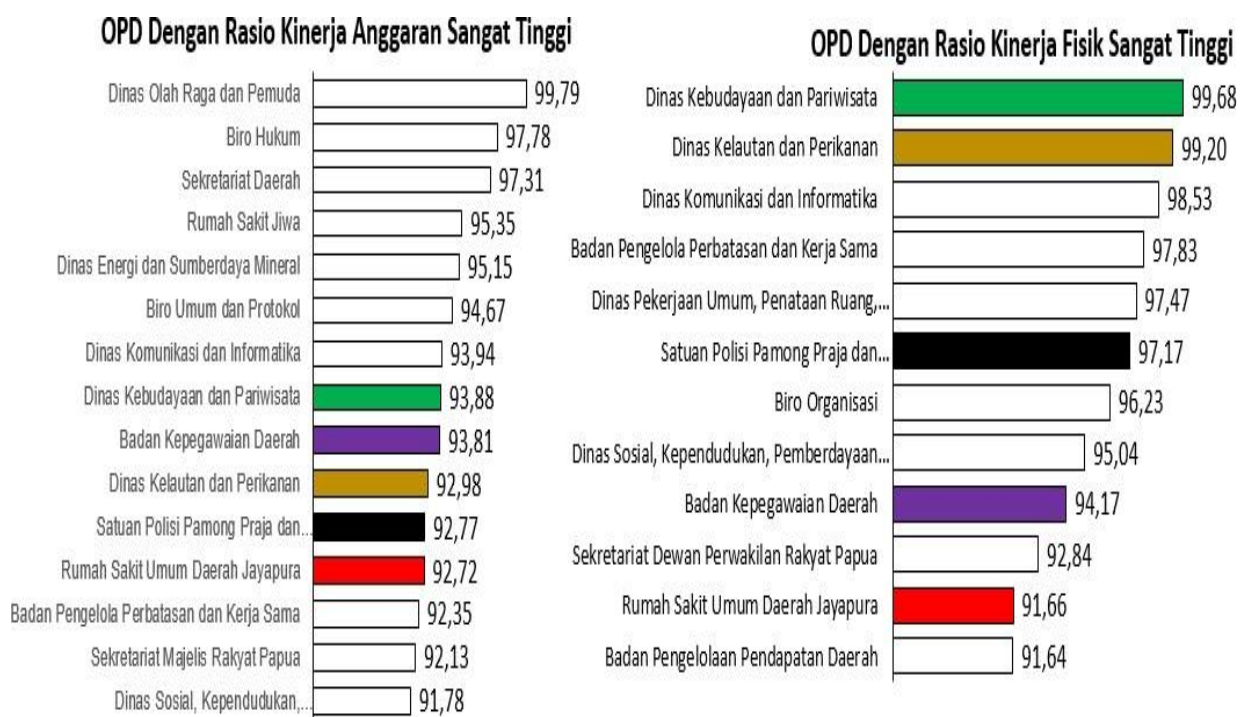
OPD	Pagu	Rasio Rp	Rasio F
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Puncak Jaya dan Puncak	447.882.389	92,44	92,63
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sarmi dan Mamberamo Raya	457.986.319	94,71	96,59
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deiyai	1.527.985.534	96,58	98,61
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Waropen	437.696.813	92,35	93,76
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Biak dan Supiori	447.985.419	92,25	95,98
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kepulauan Yapen	422.985.376	92,32	94,68
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pegunungan Bintang	422.908.675	95,71	96,60
Sekretariat Daerah	1.409.417.347.060	97,31	98,25
Biro Umum dan Protokol	142.807.265.975	94,67	94,21
Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	51.710.832.474	90,41	92,83
Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	34.582.498.988	86,24	0,00
Biro Hukum	179.250.083.251	97,78	86,72
Biro Organisasi	17.681.012.060	86,79	96,52
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	590.509.475.630	78,36	85,39
Sekretariat Majelis Rakyat Papua	259.351.884.999	92,13	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	154.642.171.670	78,88	81,08
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	8.503.701.519.378	80,98	1,68
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	140.302.815.628	88,60	88,98
Badan Kepegawaian Daerah	51.895.669.754	93,81	89,51
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.423.634.473	82,68	83,42
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	27.810.189.334	92,35	94,60
Badan Penghubung Daerah	15.954.957.610	79,44	0,00
Inspektorat	83.577.910.334	73,44	78,52
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.632.855.918	84,11	85,95

Sumber : F.03. TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Secara keseluruhan jika fokus pada kinerja dengan kategori Sangat Tinggi, maka terindikasi ada 15 OPD yang dinilai mempunyai rata-rata capaian kinerja anggaran Sangat Tinggi (rasio $91\% \leq 100\%$), dimana rasio yang tertinggi adalah Dinas Olah Raga dan Pemuda

sebesar 99,79%. Sementara untuk capaian kinerja fisik, jumlah OPD yang mendapat predikat Sangat Tinggi sebanyak 12 OPD, dengan angka rasio tertinggi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 99,68%. Dari kedua klaster tersebut, ternyata hanya 5 OPD saja yang bisa memperoleh dua predikat Sangat Tinggi sekaligus untuk anggaran dan fisik, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Kepegawaian Daerah; SATPOL PP dan PB Daerah; RSUD Jayapura

Gambar 2.35
OPD Yang Berkinerja Sangat Tinggi



Sumber : F.04 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2021 berdasarkan urusan adalah terdiri atas 247 Program dan 1549 kegiatan. Dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 80.32 persen dan capaian kinerja anggaran mencapai 83.49 persen. Berikut ini diuraikan capaian dari masing-masing OPD berdasarkan tiap urusan pembangunan dapat dilihat pada uraian berikut ini :

2.2.1.1 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Pendidikan, Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Realisasi keuangan pada Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2021, rata-rata realisasi keuangan sebesar 80,30% atau predikat Tinggi. Capaian ini berasal dari 7 program yang terdapat dalam RKPD 2021, dimana semuanya menunjukkan kinerja Sangat Tinggi (penyerapan di atas 91%), terkecuali Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi yang hanya mencapai predikat Tinggi karena penyerapannya 77,57%.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Anggaran Program Tahun 2021 Pada Dinas Pendidikan, Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Program	Jumlah Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	97	1.132.101.839.805	80,30	Tinggi	61,86	Sedang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34	924.452.496.685	77,57	Tinggi	66,82	Sedang
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	45	197.277.341.187	95,14	Sangat Tinggi	36,42	Sangat Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3	2.003.143.150	99,76	Sangat Tinggi	Na	Sangat Rendah
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	2.421.289.595	99,87	Sangat Tinggi	Na	Sangat Rendah
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1	734.909.400	95,16	Sangat Tinggi	Na	Sangat Rendah
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	12	3.050.998.143	96,66	Sangat Tinggi	7,37	Sangat Rendah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1	205.743.315	91,26	Sangat Tinggi	Na	Sangat Rendah

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Namun pada capaian realisasi fisik/kinerja dari 97 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2021 hanya sebesar 61,86% dari rata-rata capaian fisiknya dan termasuk kategori Sedang. Hal ini disebabkan karena dinas tersebut tidak lengkap mengisikan capaian fisik (n.a) pada F.04 TP2K yang menyebabkan penilaian kinerja fisik belum dapat menggambarkan keberhasilan capaian kinerja.

2.2.1.2 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Kesehatan

Realisasi keuangan pada Dinas Kesehatan sampai tahun 2021 sebesar Rp 169.719.183.998 dengan nilai capaian kinerja Keuangan rata-rata 85,35% atau predikat Tinggi. Capaian ini berasal dari 5 program yang terdapat dalam RKPD 2021. Berdasarkan program, maka capaian kinerja keuangan tertinggi dicapai pada Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan nilai 88,83% atau predikat Tinggi sedangkan terendah capaian kinerja Keuangan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan predikat Sedang.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Kesehatan

Program	Jumlah Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Kesehatan	47	169.719.183.999	85,35	Tinggi	38,22	Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12	51.483.258.309	82,61	Tinggi	89,50	Tinggi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3	105.709.495.138	88,83	Tinggi	16,00	Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	28	9.586.509.152	68,05	Sedang	na	Sangat Rendah
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2	314.651.200	79,24	Tinggi	42,91	Sangat Rendah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2	2.625.270.200	86,55	Tinggi	33,02	Sangat Rendah

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Pada capaian realisasi fisik sub kegiatan tahun 2021 pada Dinas Kesehatan dari target 47 sub kegiatan hanya mencapai 32,81% atau berpredikat Sangat Rendah. Dimana yang paling rendah ditemukan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, hanya 21,84%. Dua sub kegiatan diantaranya, ada yang tidak dapat dinilai karena tidak mencantumkan indikator kerjanya di F.04 TP2K.

2.2.1.3 Evaluasi Kinerja OPD Rumah Sakit

Realisasi keuangan program pada Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, keduanya teridentifikasi mempunyai predikat Sangat Tinggi (diatas 91%). Dimana paling tinggi adalah kinerja keuangan Rumah Sakit Jiwa mencapai 95,35%. Sementara yang terendah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebesar 88,00%, namun masih dalam predikat Tinggi.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Rumah Sakit

Program	Jumlah Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Rumah Sakit Jiwa	28	80.163.187.766	95,35	Sangat Tinggi	6,69	Sangat Rendah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19	27.908.981.098	92,11	Sangat Tinggi	4,70	Sangat Rendah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9	52.254.206.668	97,18	Sangat Tinggi	10,89	Sangat Rendah
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	34	196.666.714.894	88,00	Tinggi	11,45	Sangat Rendah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20	98.276.669.891	89,61	Tinggi	12,71	Sangat Rendah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14	98.390.045.003	86,45	Tinggi	9,65	Sangat Rendah
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	35	449.642.882.041	92,72	Sangat Tinggi	91,66	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18	126.609.687.925	89,93	Tinggi	88,76	Tinggi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15	298.340.649.599	93,73	Sangat Tinggi	94,42	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	24.692.544.517	95,46	Sangat Tinggi	97,00	Sangat Tinggi
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)	1	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	-	-	-	-	-

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Dari capaian kinerja keuangannya, ternyata seberapa besar kinerja fisik yang dicapai oleh Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dinilai Sangat Rendah (dibawah 51%), akibat semua kegiatan yang ada di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di kedua rumah sakit tersebut terindikasi capaian kinerja fisiknya rata-rata dibawah 20%. Lain halnya dengan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, hasil evaluasi pada triwulan IV tahun 2021 menunjukkan kinerja fisiknya yang sangat memuaskan, karena mendapat predikat Sangat Tinggi, terutama sekali pada Program Peningkatan Kapasitas



Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencapai 97%.

2.2.1.4 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja Keuangan Sampai Triwulan IV 2021
---------	-----------------	--------------------	--

Dan Kawasan Permukiman

Realisasi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 mencapai Rp 1.677.829.827.121 dengan nilai capaian kinerja Keuangan rata-rata sebesar 81,43% atau predikat Tinggi. Capaian ini berasal dari 10 program yang terdapat dalam RKPD 2021. Berdasarkan program, maka capaian kinerja keuangan tertinggi pada Program Pengembangan Perumahan dengan nilai 100% atau predikat Sangat Tinggi, sedangkan capaian kinerja keuangan terendah terlihat pada Program Penataan Bangunan Gedung sebesar 35,38 dengan predikat Sangat Rendah.



		Tahun 2021 (Rp)	%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	45	1.677.829.827.121	81,43	Tinggi	97,47	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24	84.621.315.029	82,64	Tinggi	99,06	Sangat Tinggi
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1	20.472.222.523	81,93	Tinggi	99,88	Sangat Tinggi
Program Penataan Bangunan Gedung	1	140.882.621.194	35,38	Sangat Rendah	13,07	Sangat Rendah
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2	8.934.072.921	99,87	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	10.448.968.367	97,94	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	5	126.684.526.845	89,20	Tinggi	99,24	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2	12.509.432.412	95,50	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Permukiman	1	371.568.275.271	91,52	Sangat Tinggi	99,40	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Perumahan	1	21.580.000.000	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Jalan	7	880.128.392.559	94,38	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian realisasi fisik sub kegiatan tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai 97,47%, sehingga mendapat penilaian Sangat Tinggi. Terdapat 5 (lima) program yang capaian kinerja fisiknya sudah mencapai 100%, yaitu (1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase; (2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; (3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi; (4) Program Pengembangan Perumahan; dan (5) Program Penyelenggaraan Jalan. Sementara yang Sangat Rendah adalah sub kegiatan yang ada di Program Penataan

Bangunan Gedung, hanya mencapai 13,07%.

2.2.1.5 Evaluasi Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 mencapai Rp 57.031.056.223 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 92,77% atau predikat Sangat Tinggi. Capaian ini berasal dari 4 program yang terdapat dalam RKPD 2021. Berdasarkan program, maka capaian kinerja Keuangan tertinggi pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, serta Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, keduanya bisa mencapai kinerja di atas 99%. Adapun 2 (dua) program lainnya memperoleh nilai rasio diantara 91,84% - 98,20%.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah	40	57.031.056.223	92,77	Sangat Tinggi	97,17	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26	48.695.798.641	91,84	Sangat Tinggi	99,49	Sangat Tinggi
Program Penanggulangan Bencana	7	5.132.318.420	98,20	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	643.878.445	99,99	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6	2.559.060.717	99,17	Sangat Tinggi	83,33	Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian realisasi fisik sub kegiatan sampai dengan triwulan IV 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah dari target 40 sub kegiatan sudah terealisasi 100% dengan capaian kinerja fisiknya mencapai 97,17% atau Sangat Tinggi. Capaian realisasi fisik tertinggi pada Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, masing-masing sebesar 100%.



2.2.1.6 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Realisasi keuangan pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 sebesar Rp 60.853.528.157 dengan nilai capaian kinerja Keuangan rata-rata 91,78% atau predikat Sangat Tinggi. Capaian ini berasal dari 15 program yang terdapat dalam RKPD 2021.

	Jumlah Kegiatan	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021
--	------------------------	------------------	-----------------------------------

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Program		Keuangan Tahun 2021 (Rp)	%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63	60.853.528.157	91,78	Sangat Tinggi	95,04	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20	51.079.929.139	91,33	Sangat Tinggi	89,38	Tinggi
Program Pemberdayaan Sosial	2	199.992.000	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	124.999.418	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penanganan Bencana	2	2.387.075.000	98,28	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pencatatan Sipil	3	912.711.090	117,84	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pendaftaran Penduduk	2	530.488.180	78,59	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	8	599.997.309	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	910.329.120	62,89	Rendah	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	129.000.000	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1	75.000.000	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3	169.719.190	96,98	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2	1.294.046.535	99,87	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Perlindungan Khusus Anak	3	182.337.017	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Perlindungan Perempuan	4	223.894.983	100,00	Sangat Tinggi	75,00	Sedang
Program Rehabilitasi Sosial	5	2.034.009.176	99,81	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Terdapat 7 (tujuh) program yang memiliki rasio kinerja keuangannya sebesar 100%, yaitu : (1) Program Pemberdayaan Sosial; (2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); (3) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; (4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan; (5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak; (6) Program Perlindungan Khusus Anak; dan (7) Program Perlindungan Perempuan. Sementara yang Rendah hanya 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan rasio kinerja keuangannya sebesar 62,89%.

Adapun untuk capaian realisasi fisik sub kegiatan sampai dengan triwulan II 2021 pada Pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari



target 65 sub kegiatan dapat dicapai 95,04% atau Sangat Tinggi. Dan teridentifikasi hampir seluruh program mempunyai sub kegiatan dengan realisasi fisiknya mencapai 100%.

2.2.1.7 Evaluasi Kinerja OPD Pertanian Dan Pangan

Realisasi keuangan pada Dinas Pertanian Dan Pangan tahun 2021 sebesar Rp 113.593.294.454 dengan nilai capaian kinerja Keuangan rata-rata 84,80% atau predikat Tinggi. Capaian ini berasal dari 10 program yang terdapat dalam RKPD 2021. Berdasarkan program, maka capaian kinerja Keuangan tertinggi pada Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; ketiga memiliki rasio kinerja keuangan di atas 99%. Sementara nilai rasionya yang rendah hanya pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan rasio capainnya 75,79% atau berpredikat Sedang.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Pertanian Dan Pangan

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Pertanian dan Pangan	42	113.593.294.454	84,80	Tinggi	78,24	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17	80.990.060.470	82,25	Tinggi	66,14	Sedang
Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	297.547.000	99,22	Sangat Tinggi	90,00	Tinggi
Program Pengawasan Keamanan Pangan	2	1.659.628.793	99,98	Sangat Tinggi	90,00	Tinggi
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2	2.064.308.205	92,14	Sangat Tinggi	90,84	Tinggi
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	1.181.652.527	99,22	Sangat Tinggi	89,51	Tinggi
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2	1.070.334.583	89,20	Tinggi	87,39	Tinggi
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3	5.441.915.761	75,79	Sedang	85,10	Tinggi
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8	12.959.272.157	96,94	Sangat Tinggi	79,88	Tinggi
Program Penyuluhan Pertanian	4	7.637.117.083	95,04	Sangat Tinggi	92,23	Sangat Tinggi
Program Perizinan Usaha Pertanian	1	291.457.875	97,15	Sangat Tinggi	93,05	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Secara keseluruhan capaian kinerja fisik dari 42 sub kegiatan di Dinas Pertanian Dan Pangan rata-rata mencapai 78,24%, atau dinilai Tinggi. Dimana rata-rata capaian fisik paling tinggi terlihat pada Program Penyuluhan Pertanian, dan Program Perizinan Usaha Pertanian, keduanya mempunyai nilai rasio masing-masing 92,23% dan 93,05%.

2.2.1.8 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup

Realisasi keuangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2021 sebesar Rp 171.759.130.397, dengan nilai capaian kinerja rata-rata 87,92% atau predikat Tinggi. Capaian ini berasal dari 12 program yang terdapat dalam RKPD 2021. Berdasarkan program, maka capaian kinerja keuangan tertinggi pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem dengan nilai capaian 99,05% atau predikat Sangat Tinggi. Program lainnya rata-rata memiliki rasio kinerja 83,55% - 98,30%.

Seluruh kinerja keuangan cabang dinas, Kesatuan Pengelolaan dan UPTD yang ada di bawah Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup rata-rata terlihat sangat memuaskan karena memperoleh predikat yang Sangat Tinggi dan Tinggi, atau rata-rata diatas 80%, dimana sebagian besar memiliki rasio kinerja di atas 91%.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	81	171.759.130.397	87,92	Tinggi	88,84	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44	139.817.930.319	86,84	Tinggi	86,82	Tinggi
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	3	4.382.460.223	99,05	Sangat Tinggi	98,73	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	649.753.650	92,82	Sangat Tinggi	92,84	Sangat Tinggi
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	2	1.271.454.000	90,82	Tinggi	87,19	Tinggi
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	2.948.890.500	98,30	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Hutan	17	15.873.509.540	90,54	Tinggi	94,81	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3	2.063.346.440	95,97	Sangat Tinggi	95,94	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Persampahan	2	739.632.300	92,45	Sangat Tinggi	49,40	Sangat Rendah
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1	417.724.900	83,55	Tinggi	83,55	Tinggi
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3	708.999.055	88,63	Tinggi	85,05	Tinggi
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	875.408.000	92,15	Sangat Tinggi	92,34	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Asmat						
Program Pengelolaan Hutan	2	512.985.525	85,55	Tinggi	84,87	Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel						
Program Pengelolaan Hutan	3	580.759.875	96,80	Sangat Tinggi	98,05	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai-Deyai						
Program Pengelolaan Hutan	2	599.030.822	99,84	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya						
Program Pengelolaan Hutan	2	596.222.947	99,44	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Jayapura						114
Program Pengelolaan Hutan	4	2.760.131.530	98,58	Sangat Tinggi	99,51	Sangat Tinggi



Cabang Dinas Kehutanan Keerom						
Program Pengelolaan Hutan	2	1.303.151.808	86,88	Tinggi	90,08	Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya						
Program Pengelolaan Hutan	2	589.230.000	98,21	Sangat Tinggi	97,46	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Tengah						
Program Pengelolaan Hutan	2	549.742.000	91,79	Sangat Tinggi	85,62	Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Mappi						
Program Pengelolaan Hutan	3	599.985.000	100,00	Sangat Tinggi	97,77	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Merauke						
Program Pengelolaan Hutan	3	1.043.495.975	94,88	Sangat Tinggi	99,86	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Mimika						
Program Pengelolaan Hutan	2	1.040.006.003	99,05	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Nabire						
Program Pengelolaan Hutan	2	746.150.000	99,51	Sangat Tinggi	99,69	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Paniai						
Program Pengelolaan Hutan	2	624.137.000	98,20	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Puncak						
Program Pengelolaan Hutan	2	488.687.000	97,74	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya						
Program Pengelolaan Hutan	2	499.896.373	99,99	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Sarmi						
Program Pengelolaan Hutan	2	749.687.500	99,99	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Tolikara						
Program Pengelolaan Hutan	2	499.541.470	99,92	Sangat Tinggi	99,66	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo						
Program Pengelolaan Hutan	1	597.203.840	99,55	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Kehutanan Yalimo						
Program Pengelolaan Hutan	1	394.210.000	98,55	Sangat Tinggi	96,79	Sangat Tinggi
KPHL UNIT II NABIRE						
Program Pengelolaan Hutan	1	499.575.000	99,92	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
KPHL Unit VI Mimika						
Program Pengelolaan Hutan	1	1.011.948.000	96,38	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi



KPHL Unit XLII A Jayawijaya						
Program Pengelolaan Hutan	2	1.996.947.555	99,85	Sangat Tinggi	99,74	Sangat Tinggi
KPHL Unit XLII B Lanny Jaya						
Program Pengelolaan Hutan	1	599.050.000	99,84	Sangat Tinggi	93,50	Sangat Tinggi
KPHL Unit XX Biak						
Program Pengelolaan Hutan	1	1.935.166.900	99,24	Sangat Tinggi	99,69	Sangat Tinggi
KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang						
Program Pengelolaan Hutan	1	465.930.000	93,23	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
KPHP Unit LIII Boven Digoel						
Program Pengelolaan Hutan	1	497.690.600	99,54	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen						
Program Pengelolaan Hutan	1	498.650.900	99,73	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
KPHP Unit XLIII Nduga						
Program Pengelolaan Hutan	1	499.570.000	99,91	Sangat Tinggi	99,00	Sangat Tinggi
KPHP Unit XVII Waropen						
Program Pengelolaan Hutan	2	495.214.000	99,09	Sangat Tinggi	99,95	Sangat Tinggi
KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya						
Program Pengelolaan Hutan	1	697.144.000	99,88	Sangat Tinggi	99,07	Sangat Tinggi
KPHP Unit XXIII Sarmi						
Program Pengelolaan Hutan	4	685.937.500	97,99	Sangat Tinggi	93,94	n.a
KPHP Unit XXIX Keerom						
Program Pengelolaan Hutan	2	863.963.450	99,66	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura						
Program Pengelolaan Hutan	1	2.107.450.000	98,25	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
BPTH Papua						
Program Pengelolaan Hutan	1	1.803.294.050	94,67	Sangat Tinggi	89,96	Tinggi
UPTD Kebun Raya Koya Koso						
Program Pengelolaan Hutan	1	250.000.000	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	1.497.775.000	99,85	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua						
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	1.348.092.713	89,87	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek						
Program Pengelolaan	1	1.483.870.296	98,93	Sangat	100,00	Sangat



Keanekaragaman Hayati (Kehati)				Tinggi	0	Tinggi
UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua						
PROGRAM Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	1.348.092.713	89,87		89,96	

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik pada Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup di triwulan IV ini dapat dikatakan mempunyai predikat Tinggi, karena dari 81 sub kegiatan yang ditargetkan dapat direalisasikan sekitar 88,84%. Dimana yang Sangat Tinggi kinerja fisik sub kegiatannya dapat dilihat pada (1) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya; (2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); (3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); (4) Program Pengelolaan Hutan; (5) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; dan (7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk seluruh cabang dinas, Kesatuan Pengelolaan, dan UPTD yang ada di Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup juga terlihat sangat memuaskan, karena rata-rata kinerja fisiknya bisa mencapai diatas nilai rasio 91% atau Sangat Tinggi.

2.2.1.9 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua

Realisasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua tahun 2021 mencapai Rp 29.099.650.538 dengan nilai capaian kinerja Keuangan rata-rata sebesar 89,01% atau predikat Tinggi. Capaian ini berasal dari 5 program yang terdapat dalam RKPD 2021.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Tahun 2021 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Berdasarkan program, maka capaian kinerja keuangan tertinggi dicapai pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan nilai 100% atau predikat Sangat Tinggi. Capaian realisasi fisik sub kegiatan tahun

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	34	29.099.650.538	89,01	Tinggi	46,34	Sangat Rendah
Program Administrasi Pemerintahan Desa	29	17.857.847.353	93,30	Sangat Tinggi	51,02	Rendah
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2	1.394.308.670	99,99	Sangat Tinggi	0,00	Sangat Rendah
Program Penataan Desa	1	9.097.585.005	98,35	Sangat Tinggi	50,10	Sangat Rendah
Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua	1	749.909.510	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	na	na	0,00	na	0,00

2021 pada Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua rata-rata sebesar 77,07% dari 34 sub kegiatan yang tersebar pada 5 program, dimana jumlah sub kegiatan terbanyak pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian fisiknya sebesar 83,45% dengan predikat Tinggi.

2.2.1.10 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Perhubungan

Realisasi keuangan pada Dinas Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp 57.029.939.123 dengan nilai capaian kinerja Keuangan rata-rata 62,41% atau predikat Rendah. Capaian ini berasal dari 4 program yang terdapat dalam RKPD 2021. Disini terlihat hanya ada 1 (satu) program yang mempunyai kinerja keuangannya cukup baik, yaitu Program Pengelolaan Penerbangan dengan rasio kinerja sebesar 72,86%. Sedangkan program-program lainnya dibawah 65%, dengan yang paling rendah pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) hanya mencapai 9,75%.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Perhubungan

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Komunikasi dan Informatika	20	46.094.611.074	93,94	Sangat Tinggi	98,53	Sangat Tinggi

Adapun untuk kinerja fisik sub kegiatannya, dari total 33 sub kegiatan realisasi fisik yang

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Perhubungan	33	57.029.939.123	62,41	Rendah	55,51	Rendah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2	32.982.503.940	62,31	Rendah	72,18	Sedang
Program Pengelolaan Pelayaran	1	2.618.278.000	55,27	Rendah	91,87	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Penerbangan	24	20.944.490.583	72,86	Sedang	58,36	Rendah
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6	484.666.600	9,75	Sangat Rendah	32,48	Sangat Rendah

bisa dicapai hanya sebesar 55,51% atau predikat Rendah.

2.2.1.11 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika

Realisasi keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 sebesar Rp 46.094.611.074 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 93,94% atau predikat Sangat Tinggi. Semua program pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan nilai capaian 100% atau predikat Sangat Tinggi, sedangkan nilai rasio terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai 89,45% atau predikat Sedang.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika



Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37	22.788.514.311	86,59	Tinggi	97,38	Sangat Tinggi
Program Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25	399.974.560.068.385.0500,00	84,21	Sangat Tinggi	99,85	Sangat Tinggi
Program Pelayan	1				97,38	Sangat Tinggi
Program Promosi	6	1.218.693.600	94,32	Sangat	92,94	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika rata-rata 98,53% dengan predikat Sangat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 20 yang tersebar 4 (empat) program.

2.2.1.12 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi keuangan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan IV 2021 sebesar Rp 22.788.514.311 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 86,59% atau predikat Tinggi. Semua program pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi pada Program Promosi Penanaman Modal yaitu 99,84% atau predikat Sangat Tinggi, sedangkan nilai rasio terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai 84,21% atau predikat Tinggi.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanaman Modal					Tinggi			
P P P P M	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021				Tinggi
				%	Predikat	Fisik (%)	Predikat	
P	Dinas Olah Raga Dan	30	300.435.895.421	99,79	Sangat	87,86	Tinggi	Tinggi
Penanaman Modal					Tinggi			

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rata-rata 1,95% dengan predikat Sangat rendah dari total sub kegiatan sebanyak 37 yang tersebar pada 5 (lima) program. Penilaian yang begitu rendah inidi dikarenakan OPD tidak mengisi dengan lengkap F.04 dan F.05 TP2K sehingga ada 4 program dimana seluruh sub kegiatannya tidak dapat dinilai.

2.2.1.13 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Olah Raga Dan Pemuda

Realisasi keuangan pada Dinas Olah Raga Dan Pemuda tahun 2021 sebesar Rp 300.435.895.421 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 99,79% atau redikat sangat Tinggi. Nilai tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai capaian 100,00% atau predikat Sangat Tinggi, sedangkan nilai rasio terendah pada Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan nilai 86,13% atau predikat Tinggi.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Olah Raga Dan Pemuda



Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	31	46.202.484.003	93,88	Sangat Tinggi	99,68	Sangat Tinggi
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	791.970.466	99,00	Sangat Tinggi	99,35	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	5	17.264.196.858	86,13	Tinggi	70,71	Sedang
Program Pembinaan Sejarah	2	399.999.860	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Permuseuman	1	2.499.453.330	99,98	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Ekonomi	4	1.176.067.604	98,01	Sangat	100,00	Sangat

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Dinas Olah Raga Dan Pemuda rata-rata 87,86% dengan predikat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 30 yang tersebar pada 3 (tiga) program.

2.2.1.14 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Realisasi keuangan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2021 sebesar Rp 46.202.484.003 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 93,88% atau predikat Sangat Tinggi.

Semua program pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi pada Program Pembinaan Sejarah; Program Pengembangan Kesenian Tradisional; dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, ketiganya dengan nilai rasio 100% atau predikat Sangat Tinggi.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata



Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Dinas Kelautan Dan Perikanan	37	54.262.237.511	92,98	Sangat Tinggi	99,20	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2	30.093.381.418	91,17	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata rata-rata 99,68% dengan predikat Sangat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 31 yang tersebar pada 9 (sembilan) program.

2.2.1.15 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Kelautan Dan Perikanan

Realisasi keuangan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan tahun 2021 sebesar Rp 54.262.237.511 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 92,98% atau predikat Sangat Tinggi. Semua program pada Dinas Kelautan Dan Perikanan yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi pada Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebesar 99,92%, dan nilai terendah pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yaitu sebesar 90,71 dengan predikat Tinggi.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan



Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Program Pengawasan		6.067.992.101	96,62	Sangat	98,81	Sangat
Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	57	82.016.614.330	95,15	Sangat Tinggi	86,92	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5	9.555.553.306	90,71	Tinggi	96,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3	8.404.008.270	96,00	Sangat Tinggi	99,91	Sangat Tinggi
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	8	1.496.457.400	98,84	Sangat Tinggi	99,99	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	24.785.018.454	90,71	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan rata-rata 99,20% dengan predikat Sangat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 37 yang tersebar pada 6 (enam) program.

2.2.1.16 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral

Realisasi keuangan pada Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral tahun 2021 adalah sebesar Rp 82.016.614.330 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 95,15% atau predikat Sangat Tinggi. Semua program pada Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar 99,70%, dan nilai terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu sebesar 87,50% dengan predikat Tinggi. Adapun untuk cabang dinas yang ada dibawah Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral, hampir semuanya terlihat mendapat predikat kinerja keuangan Sangat Tinggi (diatas 91%), terkecuali Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi, Dan Asmat, yang memperoleh predikat Tinggi karena rasio kinerja keuangannya 86,14%.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40	27.380.760.880	87,50	Tinggi	81,37	Tinggi
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	7	1.763.839.299	94,58	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	6	51.029.316.301	99,70	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	4	1.842.697.850	99,55	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Biak Dan Supiori	5	413.251.886	92,25	Sangat Tinggi	89,09	n.a
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1	146.963.800	97,98	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	128.656.300	98,97	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	137.631.786	81,93	Tinggi	81,82	Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Yalimo Dan Nduga	5	457.893.603	92,89	Sangat Tinggi	89,26	Tinggi
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1	175.623.000	97,57	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	137.369.853	98,12	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	144.900.750	83,80	Tinggi	82,10	Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kepulauan Yapen	5	390.500.130	92,32	Sangat Tinggi	86,36	Tinggi
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1	124.329.600	99,46	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	129.883.000	99,91	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	136.287.530	81,13	Tinggi	77,27	Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi, Dan Asmat	5	339.176.900	86,14	Tinggi	71,27	Sedang
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1	170.896.800	97,66	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	138.466.200	98,90	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	29.813.900	37,87	Sangat Rendah	52,12	Rendah
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Mimika	5	479.066.800	96,21	Sangat Tinggi	94,81	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1	122.356.200	97,88	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	138.454.900	98,90	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	218.255.700	93,70	Sangat Tinggi	91,35	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai Dan Deiyai	6	1.475.696.210	96,58	Sangat Tinggi	89,27	Tinggi
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1	174.383.500	99,65	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2	1.161.958.974	98,06	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	139.353.736	82,96	Tinggi	78,54	Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pegunungan Bintang	5	404.783.950	95,71	Sangat Tinggi	91,26	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	129.241.000	99,42	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	153.363.950	91,34	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Puncak Jaya Dan Puncak	3	414.001.800	92,44	Sangat Tinggi	85,44	Tinggi
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	5	139.427.800	99,64	Sangat Tinggi	80,00	Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	139.818.000	99,87	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	134.756.000	80,23	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sarmi Dan Mamberamo Raya	3	433.746.662	94,71	Sangat Tinggi	66,67	Sedang
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	5	148.819.996	99,21	Sangat Tinggi	90,55	Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	139.994.800	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1	144.931.866	86,28	Tinggi	100,00	Sangat



Daerah Provinsi						Tinggi
Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Waropen	3	404.193.300	92,35	Sangat Tinggi	84,24	Tinggi
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	5	129.932.000	99,95	Sangat Tinggi	83,34	Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	139.499.500	99,64	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	134.761.800	80,36	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Baik itu di dinas maupun cabang dinas Energi Dan Sumber Daya pada umumnya memiliki rasio kinerja fisik di atas 91% yang berpredikat Sangat Tinggi dan di atas 76% dengan predikat Tinggi. Untuk Dinas Energi Dan Sumber Daya itu sendiri, dari total 57 sub kegiatan, kinerja fisiknya yang dapat dicapai sebesar 86,92% atau berpredikat Tinggi.

2.2.1.17 Evaluasi Kinerja OPD Sekretariat Daerah

Realisasi keuangan pada Sekretariat Daerah tahun 2021 sebesar Rp 1.371.568.036.544 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 92,98% atau predikat Sangat Tinggi. Begitu juga dengan Biro Hukum dan Biro Umum Dan Protokol, keduanya mendapat predikat Sangat Tinggi masing- masing dengan nilai rasio kinerja keuangan sebesar 97,78% dan 94,67%. Sementara di Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa, Biro Organisasi, dan Biro Tata Pemerintahan Dan Otonomi Khusus, ketiganya lebih rendah, namun tetap dalam kategori yang baik karena rasio kerjanya masih di atas 85% dengan predikat Tinggi.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Sekretariat Daerah

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Sekretariat Daerah rata-rata 90,97% dengan predikat Tinggi. Adapun kinerja fisik untuk seluruh biro tidak dapat dinilai karena tidak mengisi F0.4 dan F.05 TP2K.

2.2.1.18 Evaluasi Kinerja OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Realisasi keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua tahun 2021 adalah sebesar Rp 462.722.227.842 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 78,36%

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Sekretariat Daerah	20	1.371.568.036.544	97,31	Sangat Tinggi	90,97	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20	1.371.568.036.544	97,31	Sangat Tinggi	90,97	Tinggi
Biro Hukum	22	175.276.312.142	97,78	Sangat Tinggi	16,61	n.a
Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	4	158.421.192.618	99,62	Sangat Tinggi	33,71	n.a
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18	16.855.119.524	83,31	Tinggi	12,81	n.a
Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	31	46.753.100.651	90,41	Tinggi	90,33	n.a
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	9	25.844.377.543	93,69	Sangat Tinggi	98,42	n.a
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22	20.908.723.108	86,67	Tinggi	87,02	n.a
Biro Organisasi	22	15.345.449.182	86,79	Tinggi	96,23	n.a
Program Penataan Organisasi	7	6.258.420.017	98,71	Sangat Tinggi	98,06	n.a
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15	9.087.029.165	80,13	Tinggi	95,37	n.a
Biro Tata Pemerintahan Dan Otonomi Khusus	32	29.825.382.802	86,24	Tinggi	n.a	n.a
Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	8	7.045.083.488	93,32	Sangat Tinggi	n.a	n.a
Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus**)	2	2.200.312.708	97,80	Sangat Tinggi	n.a	n.a
Program Penataan Organisasi	2	2.042.951.726	92,89	Sangat Tinggi	n.a	n.a
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20	18.537.034.880	82,08	Tinggi	n.a	n.a
Biro Umum Dan Protokol	23	135.195.067.604	94,67	Sangat Tinggi	89,95	n.a
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1	30.368.343.325	99,78	Sangat Tinggi	97,78	n.a
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22	104.826.724.279	93,28	Sangat Tinggi	89,59	n.a

atau predikat Tinggi. Semua program pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi pada Program Dukungan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebesar 99,52%, dan nilai terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu sebesar 45,32% dengan predikat Sangat Rendah.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua rata-rata 92,84% dengan predikat Sangat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 66 yang tersebar pada 3 (tiga) program.

2.2.1.19 Evaluasi Kinerja OPD Sekretariat Majelis Rakyat Papua

Realisasi keuangan pada Sekretariat Majelis Rakyat tahun 2021 adalah sebesar Rp

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Sekretariat Majelis Rakyat Papua	32	238.936.535.329	92,13	Sangat Tinggi	n.a	n.a

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	66	462.722.227.842	78,36	Tinggi	92,84	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30	93.443.189.431	45,32	Sangat Rendah	86,40	Tinggi
Program Dukungan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua	4	181.469.900.000	99,52	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	32	187.809.138.411	92,99	Sangat Tinggi	97,97	Sangat Tinggi

238.936.535.329 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 92,13% atau predikat Sangat Tinggi. Semua program pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar 99,87%, dan nilai terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu sebesar 85,74% dengan predikat Tinggi.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4	105.515.730.659	85,74	Tinggi	n.a	n.a
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	24	75.868.251.470	99,87	Sangat Tinggi	n.a	n.a
Program Utama Dan Penunjang				Sangat		
Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua tidak dapat dinilai semuanya, karena tidak mengisi lengkap F.04 dan F.05 TP2K.

2.2.1.20 Evaluasi Kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp 121.974.090.534 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 78,88% atau predikat Tinggi. Semua program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 99,96% (Sangat Tinggi), dan nilai terendah pada Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah yaitu sebesar 63,98% dengan predikat Rendah.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79	121.974.090.534	78,88	Tinggi	90,90	Sangat Tinggi
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36	22.294.662.798	96,45	Sangat Tinggi	85,50	Tinggi
Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus**))	21	1.610.774.000	89,49	Tinggi	97,61	Sangat Tinggi
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	5.590.994.076	63,98	Rendah	94,81	Sangat Tinggi
Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	28.227.291.521	92,22	Sangat Tinggi	92,00	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah rata-rata 90,90% dengan predikat Sangat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 76 yang tersebar pada 6 (enam) program, dengan nilai rasi kinerja fisik paling tinggi pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 100% (Sangat Tinggi), dan nilai terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 85,50 (Tinggi).

2.2.1.21 Evaluasi Kinerja OPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah

Realisasi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp 6.886.289.403.178 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 80,98% atau predikat Tinggi. Semua program pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah yang terdapat dalam RKPD 2021 memiliki capaian realisasi keuangan yang bervariasi, dengan nilai tertinggi pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 82,36% (Tinggi), dan nilai terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu sebesar 34,57% dengan predikat Sangat Rendah.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah



Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			Predikat	
				%	Predikat	Fisik (%)		
							81,72	Tinggi
							85,78	Tinggi
							80,26	Sedang
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	34	124.313.304.231	88,60	Tinggi	91,64	Sangat Tinggi	Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9	108.977.313.420	88,31	Tinggi	90,05	Tinggi	Tinggi
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25	15.335.990.811	90,77	Tinggi	92,21	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah rata-rata 81,72% dengan predikat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 60 yang tersebar pada 3 (tiga) program.

2.2.1.22 Evaluasi Kinerja OPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp 124.313.304.231 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 88,60% atau predikat Tinggi, yang tersebar pada 2 program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (90,77%) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (88,31%).

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Program Sampai Dengan Triwulan IV 2021 Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)



Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Badan Kepegawaian Daerah	30	48.683.596.391	93,81	Sangat Tinggi	94,17	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23	26.210.518.174	89,21	Tinggi	95,69	Sangat Tinggi
Program Kepegawaian	7	22.473.078.217	99,82	Sangat Tinggi	89,16	Tinggi

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah rata-rata 91,64% dengan predikat Sangat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 34 yang tersebar pada 2 (dua) program.

2.2.1.23 Evaluasi Kinerja OPD Badan Kepegawaian Daerah

Realisasi keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp 48.683.596.391 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 93,81% atau predikat Sangat Tinggi, yang tersebar pada 2 program yaitu Program Kepegawaian Daerah (99,82%) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (89,21%).

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Badan Kepegawaian Daerah

Daerah						
--------	--	--	--	--	--	--

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31	40.862.023.308	82,68	Tinggi	81,72	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23	27.808.474.267	87,50	Tinggi	82,95	Tinggi
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	13.053.549.041	73,98	Sedang	78,18	Tinggi

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah rata-rata 94,17% dengan predikat Sangat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 30 yang tersebar pada 2 (dua) program.

2.2.1.24 Evaluasi Kinerja OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 adalah sebesar Rp 40.862.023.308 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 82,68% atau predikat Tinggi, yang tersebar pada 2 program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (73,98%) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (87,50%).

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia rata-rata 81,72% dengan predikat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 31 yang tersebar pada 2 (dua) program.

2.2.1.25 Evaluasi Kinerja OPD Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama

Realisasi keuangan pada Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama tahun 2021



Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Badan Penghubung Daerah	26	12.674.750.827	79,44	Tinggi	53.85	Sangat Rendah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22	12.674.750.827	79,44	Tinggi	63.64	Rendah
Program Pelayanan Penghubung	4	na-	- na-	-	na--	- na-

adalah sebesar Rp 25.681.694.714 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 92,35% atau predikat Sangat Tinggi, yang tersebar pada 3 program yaitu Program Pengembangan Perumahan (99,62%), Program Pengelolaan Perbatasan (98,45%), dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (87,68%).

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Program Tahun 2021
Pada Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

	Jumlah	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja Tahun 2021
--	--------	--------------------	----------------------------

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama rata-rata 97,83% dengan predikat Sangat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 31 yang tersebar pada 3 (tiga) program.

2.2.1.26 Evaluasi Kinerja OPD Badan Penghubung Daerah

Realisasi keuangan pada Badan Penghubung Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp 12.674.750.827 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 79,44% atau predikat Tinggi, yang hanya dilaksanakan pada 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Badan Penghubung Daerah

Program	Kegiatan	Tahun 2021 (Rp)	%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	32	25.681.694.714	92,35	Sangat Tinggi	94,60	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2	3.984.780.000	99,62	Sangat Tinggi	99,96	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26	14.198.612.021	87,68	Sangat Tinggi	90,98	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	3	7.498.302.693	98,45	Sangat Tinggi	99,48	Sangat Tinggi

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Badan Penghubung Daerah rata-rata 63.64%

Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Inspektorat	29	61.381.229.358	73,44	Sedang	83,81	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16	34.933.153.344	83,71	Tinggi	92,29	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Pengawasan	9	18.528.186.401	63,69	Rendah	64,10	Rendah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	4	7.919.889.613	62,10	Rendah	94,28	Sangat Tinggi

dengan predikat Rendah dari total sub kegiatan sebanyak 26 yang tersebar pada 2 (dua) program.

2.2.1.27 Evaluasi Kinerja OPD Inspektorat

Realisasi keuangan pada Inspektorat tahun 2021 adalah sebesar Rp 61.381.229.358 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 73,44% atau predikat Sedang, yang dilaksanakan pada 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (83,71%), Program Penyelenggaraan Pengawasan (63,69%), dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi (62,10%).

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Program Sampai Tahun 2021 Pada Inspektorat

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)



Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021			
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	26	16.514.165.847	84,11	Tinggi	83,56	Tinggi

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Inspektorat rata-rata 83,81% dengan predikat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 29 yang tersebar pada 3 (tiga) program.

2.2.1.28 Evaluasi Kinerja OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Realisasi keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2021 adalah sebesar Rp 16.514.165.847 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 84,11% atau predikat Tinggi, yang dilaksanakan pada 6 program, dengan nilai rasio kinerja keuangan tertinggi adalah Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya sebesar 97,80% (Sangat Tinggi), dan nilai rasio terendah pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar 72,00% (Sedang).

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Program Tahun 2021 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	11.355.261.599	81,58	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1	578.474.376	96,70	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	
Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2021				Predikat
			%	Predikat	Fisik (%)	Predikat	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	42	73.090.410.965	71,95	Sedang	49,49	Sangat Rendah	
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	19	1.427.567.950	93,74	Sangat Tinggi	79,38	Tinggi	

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik rata-rata 83,56% dengan predikat Tinggi dari total sub kegiatan sebanyak 26 yang tersebar pada 6 (enam) program.

2.2.1.29 Evaluasi Kinerja OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Realisasi keuangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tahun adalah sebesar Rp 73.090.410.965 dengan nilai capaian kinerja keuangan rata-rata 71,95% atau predikat Sedang, yang dilaksanakan pada 13 program, dengan nilai rasio kinerja keuangan tertinggi adalah Program Hubungan Industrial, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pengawasan Ketenagakerjaan, keempatnya ini memiliki rasio kinerja keuangan sebesar 100% (Sangat Tinggi). Adapun untuk UPTD Balai Latihan Koperasi Dan UKM, realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.474.168.543 atau 86,37% dengan predikat Tinggi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	57.102.629.994	67,11	Sedang	66,67	Sedang
Program Hubungan Industrial	2	500.730.981	100,00	Sangat Tinggi	50,00	Sangat Rendah
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	1.159.991.012	100,00	Sangat Tinggi	82,74	Tinggi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	2	3.225.525.705	99,25	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penempatan Tenaga Kerja	2	339.991.185	100,00	Sangat Tinggi	50,00	Sangat Rendah
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2	541.423.960	99,93	Sangat Tinggi	50,00	Sangat Rendah
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	406.652.134	100,00	Sangat Tinggi	-	-
Program Pengembangan Ekspor	1	-	-	-	58,80	Rendah
Program Pengembangan UMKM	1	1.900.018.705	97,84	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	20	290.367.600	96,79	Sangat Tinggi	41,33	Sangat Rendah
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3	5.354.268.824	93,06	Sangat Tinggi	83,58	Tinggi
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1	1.182.392.000	98,36	Sangat Tinggi	59,68	Rendah
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	3	1.086.418.865	98,76	Sangat Tinggi	-na	-
UPTD Balai Latihan Koperasi Dan UKM	2	1.474.168.543	86,37	Tinggi	na	-
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1	1.302.889.963	85,75	Tinggi	na	-
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1	171.278.580	91,42	Sangat Tinggi	na	-

Tabel 2.72

Capaian Kinerja Program Sampai Dengan Triwulan IV 2021 Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Dan UPTD Balai Latihan Koperasi Dan UKM

Sumber : F.04 dan F.05 TP2K Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Capaian kinerja fisik sub kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja rata-rata hanya 49,49% dengan predikat Sangat Rendah dari total sub kegiatan sebanyak 42 yang tersebar pada 13 program. Sedangkan di UPTD Balai Latihan Koperasi Dan UKM, tidak dapat dinilai karena tidak lengkap mengisi F.04 dan F.05 TP2K.



2.2.2 Kinerja Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Tabel 2.73
Kinerja Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM					
Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	63,27	60.62	95.92
	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	56,03		
	Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	Sedang		
	Presntase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	50	na	na
	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	44,90	na	na
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,5	6.76	90.13
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,5	11.11	96.60
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	77,9	78.89	101.27



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	52,4	na	na
Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang per hari	200	na	na
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,07	65,93	96,81
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 penduduk	5	na	na
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1000 kelahiran hidup	213,34	na	na
	Angka Kesakitan	persen	4,26	na	na
Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Perolehan medali emas dalam PON	medali	90	na	na
	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional	Atlet	85	93	109
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	72,6	14.75	20.31
	Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	persen	20,1	na	na
Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah	9	7	128.57



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
		kabupaten/kota			
	Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	28,95	na	na
	Persentase penduduk tahan pangan	persen	52,43	na	na
Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli tanah tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1	na	na
	cakupan cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	1	na	na
	Cakupan kurikulum muatan lokal	Persen	2,5	na	na
Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI					
Tujuan 2, Meningkatkan keamanan, Ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan asyarakat Papua	Angka Kriminalitas	Per 100.000 penduduk	173	147	na
	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	62,39	63.08.00	na
Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	Persen	67,81	70	na



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	77,77	100	128,5
Meningkatnya Penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM(Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	na
	Rata-rata nilai skor peduli HAM	Nilai	65	75	na
Meningkatnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Nilai Skor aspek kebebasan sipil	Skor	94,04	95	106,4
	Nilai Skor aspek Hak-hak politik	Skor	46,85	50	110,7
	Nilai Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	57,73	60	86,7
Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan					
Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif ,Demokrasi, dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C	B	na
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	CC	B	na
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	B	A	na
Peningkatkan kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang	Persen	95	100	102.95



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
	direncanakan				
	Cakupan kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah Kabupaten/Kota	6	7	na
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase OPD dengan nilai SAKIP B	Predikat	BB	BB	70
	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	5,72	6,2	na
	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	81,30	85	na
	Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan E-planning dll ke program)	persen	90	95	111.111
	Cakupan Inovasi Pelayanan Publik yang Masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	1	1	na
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	90	100	111.111
	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	50	na	na



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
	Rasio belanja langsung dalam kondisi APBD	Persen	44,18	na	na
	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persen	61,19	na	na
Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100
	Ketepatan waktu penetapan APBD	Kategori	Tepat waktu	na	na
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	11,52	13.30	115.45
Keempat, Pungutan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pembangunan Wilayah berbasis Kultural					
Tujuan 4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi DT	persen	5,91	na	na
	Laju Pertumbuhan Ekonomi TT	persen	6,53	na	na
	Rasio Gini	Nilai Indeks	0,39	na	na
	Tingkat emisi karbon	Ton Co2	0,315	na	na
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	83,83	na	na
	Presentase penerapan green economy	Persen	60	na	na
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,32	na	na



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
	PDRB Perkapita DT	Juta Rupiah	60,13	na	na
	PDRB Perkapita TT	Juta Rupiah	47.50	na	na
	tingkat inflasi	Persen	2,34	na	na
Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	89,19	na	na
	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	Persen	55	na	na
	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	3,84	2.42	63.68
	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	2,71	0.98	36.29
	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	2,74	0.85	31.48
Megoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. Juta	20,21	na	na
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Udara	indeks	93,62	94.20	100.44
	Indeks Kualitas Air	indeks	79,10	90.00	113.78
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	82,66	111.00	134.22



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
	Intensitas Penurunan Emisi	Ton co2/rupee	47,370	0.449	130.90
Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	rasio	27,82	na	na
	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	2,26	na	na
	Laju Deforestasi	ribu hektar	31,20	na	na
Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	persen	9,28	na	na
	Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	persen	3,14	na	na
	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	jumlah	2	na	na
	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	57,38	na	na
	Jumlah UMKM yang berkembang	jumlah	3799	na	na
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	1265,42	na	na
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,9	na	na



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	8,67	4.50	51.90
	NTP perikanan tangkap	skor	104,58	na	na
	NTP perikanan budidaya	skor	94,08	na	na
	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	1,10	na	na
Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	78,97	na	na
	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	97,84	96.60	96.73
Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektorsektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Juta	60.49	3.34	5.52
	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Juta	86.08	2.00	2.32
	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	40	na	na
Tujuan 5. Mewujudkan Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	Indeks kemahalan Konstruksi	Persen	109,48	na	na
	Kepuasan pelayanan informasi dan komunikasi	kategori	C	na	na
Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	72,41	na	na
	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	45	60.37	134.15



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
	Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	persen	35	na	na
Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	40	97.86	244.65
Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase pemanfaatan sumber daya air	Persen	70	75.00	107.14
	Presentasi pengendalian daya rusak air	persen	50	na	na
Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	37,54	40.31	107.30
	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	42,87	100	233.26
	Backlog perumahan layak huni	Ribu ruta	113,93	na	na
Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	Unit	43,47	na	na
Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	persen	50	na	na
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	7,5	na	na
Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas dan Tertentu					
Tujuan 6. Meningkatkan pemerataan pembangunan	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status desa berkembang	persen	14,97	na	na



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
	Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago	persen	30,23	na	na
	Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri	persen	28,81	na	na
	Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago	persen	34,60	na	na
	Indeks Williamson Antarwilayah Adat	indeks	0,6255	na	na
	IPM wilayah perbatasan	Indeks	66,38	na	na
	Tingkat kerentanan sosial	Kategori	Sedang	na	na
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	0,483	na	na
Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Indeks kampung membangun	Indeks	48,38	na	na
	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	45,47	na	na
Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	67,49	97.54	146.37
Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan	Tahun	10,25	8.17	79.70
	Angka harapan hidup wilayah perbatasan	Tahun	67.01	65.88	98.31
	Pengeluaran perkapita wilayah perbatasan	Rp.juta perkapita	12,30	8.85	71.95



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Capaian
	Deskripsi		2021	2021	(%)
Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	50		na
	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang pertahun	30	3.432	11.44
Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	kategori	Sedang	REndah	Rendah
Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.79	79.69	99.87
	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	63.95	66.27	102.06

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam konteks ini, permasalahan pembangunan daerah yang ditemukan di Provinsi Papua terbagi dua besar, yaitu :

2.3.1. Permasalahan yang dirangkum menurut aspek, yaitu ;

a. Kesejahteraan Masyarakat

- Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas, karena didominasi oleh sektor tambang belum maksimal menyentuh sektor basis
- Penurunan tingkat kemiskinan belum diikuti dengan perbaikan tingkat kepatuhan dan kedalaman kemiskinan
- Masih tingginya tingkat ketimpangan/kesenjangan baik antar pendapatan maupun wilayah

b. Daya Saing

- Penurunan tingkat kesejahteraan petani
- Tingginya usia ketergantungan belum diimbangi dengan tingkat produktifitas

c. Pelayanan Umum melalui urusan

1) Pelayanan Wajib yang terkait kebutuhan dasar

- ✓ Akses, Kualitas, kuantitas peningkatan pelayanan Kesehatan serta keterjangkauan pendidikan masih minim
- ✓ Penataan ruang Prasarana infradas dan konektivitasnya belum merata
- ✓ Kondisi Jalan dan Proporisnya baik terhadap luas wilayah maupun jumlah penduduk belum proporsional
- ✓ Penanganan penyandang sosial dan komunitas adat terpencil belum optimal

2) Urusan Pelayanan Wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar

- ✓ Akses prasarana perhubungan, jaringan telekomunikasi dan listrik masih terbatas
- ✓ Peningkatan Partisipasi Perempuan dan perlindungan kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal
- ✓ Tingkat pengangguran rendah tetapi pendapatan pekerja juga rendah karena tingkat pendidikan yang bekerja rendah.

3) Urusan Pilihan

Kontribusi sektor-sektor kelautan/perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, terhadap Produk Domestik Bruto masih didominasi sektor pertambangan dan industri. Kondisi ini kontradiktif dengan

sektor basis yang merupakan dominan kehidupan masyarakat yaitu rumpun sektor pertanian

4) Urusan kekhususan

Kontribusi pelaksanaan Otsus Papua telah mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, namun implementasi pemanfaatan dana OTSUS perlu diiringi pula transparansi dan akuntabilitas

2.3.2. Permasalahan kinerja RKPD dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD/SKPD, yaitu ;

1. Tingkat kepatuhan pada konsistensi dokumen-dokumen perencanaan masih rendah,
2. Capaian realisasi indikator-indikator dan target serta realisasi menurut prioritas masih rendah,
3. Capaian kinerja dan kinerja capaian anggaran serta fisik SKPD/OPD, tidak seimbang (balance)
4. Rata-rata Realisasi fisik dan keuangan Program/Kegiatan Tahun 2021 di atas 80% kategori tinggi, namun belum optimal. Beberapa masalah yang menyebabkan daya serap terutama realisasi fisik kurang, dikarenakan :
 - ✓ Jadwal lelang yang terlambat
 - ✓ Terjadi keadaan luar biasa (*force di mayore*), beberapa diantaranya seperti permasalahan tanah, dll.
 - ✓ Adanya Pandemi Covid-19
 - ✓ Keterlambatan pencairan, (proses keuangan), SKPD/OPD kurang intensif mengisi Tabel F5 di TP2K sebagai soft pengendali Program/Kegiatan di Bappeda Provinsi Papua, sehingga tidak bisa menampilkan data kinerja program/kegiatan secara benar/utuh.
5. Capaian kinerja sasaran RPJMD Masih banyaknya data-data yang tidak bisa didiskripsikan karena tidak dilaksanakannya Pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 secara kontinyu.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada era masa pandemic Covid 19, terutama pada kondisi perekonomian mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktifitas perekonomian. Kebijakan yang diterapkan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan dan menekan penyebaran Covid 19. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk tetap dan terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian masyarakat.

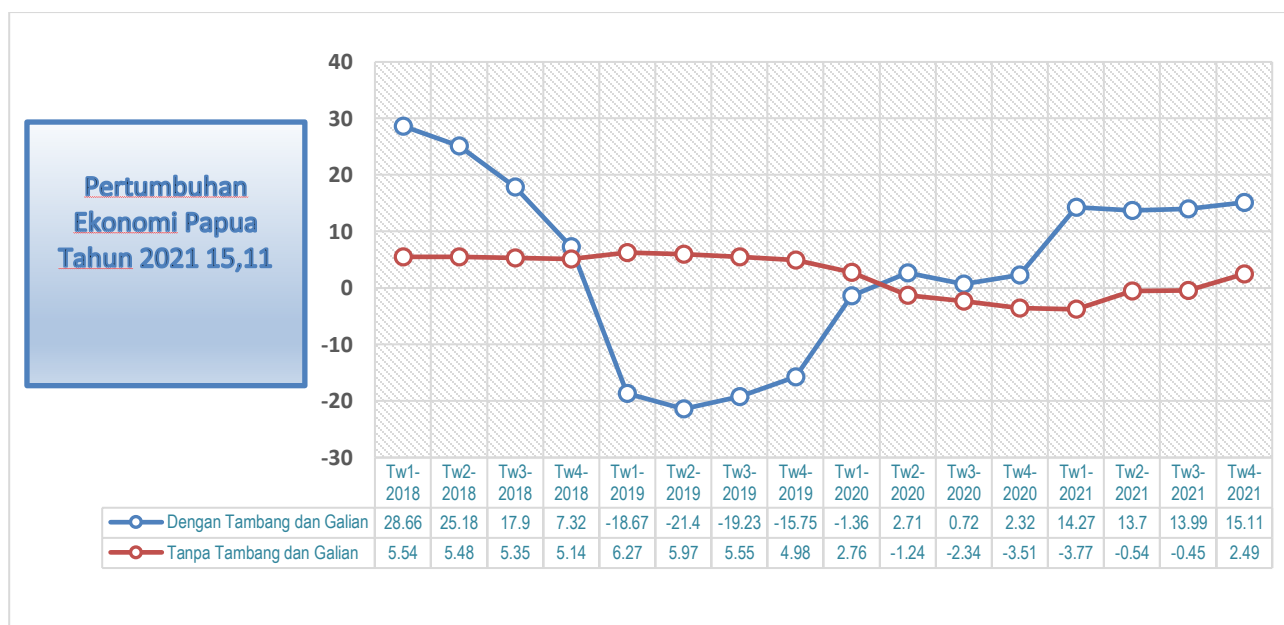
3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha memiliki 17 lapangan usaha. Dirinci berdasarkan total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB berdasarkan pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen terdiri komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Untuk Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 3.1
Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Tiap Triwulan Pada Tahun 2018 - 2021



Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2022

Dari tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 15,11 % dengan tambang dan penggalian serta tanpa tambang dan penggalian mencapai 2,49 %. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua ini terutama didorong oleh kinerja Sektor Usaha pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ini juga menunjukkan semakin membaiknya kinerja sektor tersebut yang ditunjukkan dengan peningkatan produktifitas hasil kerja. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian sangat menopang sektor non pertambangan yang masih terus mengalami kontraksi setiap tahunnya.

Tabel 3.2
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Papua Tahun 2019 - 2021

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,76	12,28	10,84
Pertambangan dan Penggalian	23,56	28,23	36,84
Industri Pengolahan	2,27	2,08	1,80
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air ; Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04
Konstruksi	16,13	15,43	13,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,91	10,51	9,37
Transportasi dan Pergudangan	6,77	4,36	3,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,77	0,67
Informasi dan Komunikasi	4,32	4,24	3,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,67	1,52
Real Estat	3,05	2,90	2,67
Jasa Perusahaan	1,38	1,23	1,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,81	11,07	9,35
Jasa Pendidikan	2,13	2,05	1,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	1,93	1,70
Jasa Lainnya	1,22	1,17	1,03
PDRB	100	100	100

Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2022

Dari tabel 3.2. menunjukkan distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Terbesar menurut lapangan usaha tahun 2021 di Provinsi Papua dinominasi oleh sektor

pertambangan dan penggalian 36,84 persen, konstruksi 13,80 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,84 persen.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 188.938,08 miliar rupiah (2017), 210.600,57 miliar rupiah (2018), 189.510,70 miliar rupiah (2019), 199.232,88 miliar rupiah (2020), dan 235.343,25 miliar rupiah (2021). Sedangkan angka PDRB Papua atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun lima tahun terakhir adalah masing-masing 148.818,29 miliar rupiah (2017), 159.711,85 miliar rupiah (2018), 134.565,89 miliar rupiah (2019), 137.787,29 miliar rupiah (2020), dan 158.611,04 (2021).

Distribusi persentase PDRB ADHB terbesar menurut lapangan usaha tahun 2021 di Provinsi Papua pada kategori pertambangan dan penggalian 36,84 persen, konstruksi 13,80 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,84 persen.

PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Provinsi Papua pada tahun 2021 yang paling besar menurut jenis pengeluaran adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 104.116,47 miliar rupiah, diikuti oleh pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 83.270,67 miliar rupiah.

Tabel 3.3
Perkembangan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Di Provinsi Papua
Tahun 2020 - 2021

PDRB (%yoy) Jenis Pengeluaran	2020	2021
	Realisasi	Realisasi
Konsumsi Rumah Tangga	101.038.245,83	104.116.466,53
Konsumsi LNPRT	4.545.263,16	4805579,89
Konsumsi Pemerintah	44.100.358,32	46.758.519,1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	69.306.443,6	83.270.666,3
Perubahan Investasi	(55.928,85)	529.851,3
Eksport Barang Jasa	64.946.449,02	108.687.785,7
Import Barang Jasa	84.647.946,63	112.825.618,91
PDRB PAPUA	199.232.884,45	235.343.249,91

Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2022

Menunjuk pada tabel 3.3. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Provinsi Papua pada tahun 2021 yang paling besar menurut jenis pengeluaran adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 104.116,47 miliar rupiah. Diikuti oleh pengeluaran

pembentukan modal tetap bruto sebesar 83.270,67 miliar rupiah.

3.1.2. Tingkat Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Papua

Tabel 3.4
Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2019 - 2021

Inflasi (% <i>yoy</i>)	2019				2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	Okt.
Nasional	2,48	3,28	3,39	2,72	2,96	1,96	1,42	1,69	1,37	1,33	1,60	1,66
Papua	2,58	2,79	2,69	0,66	1,21	1,03	1,93	1,64	2,47	0,46	-0,40	0,90
Jayapura	2,98	3,00	2,63	0,59	0,28	0,14	1,38	0,76	1,86	-0,53	-1,41	0,69
Merauke	2,13	1,44	2,44	1,06	-0,20	1,94	1,48	1,07	2,51	1,36	0,54	1,65
Timika	1,98	3,30	3,10	0,53	-0,13	2,48	3,54	4,11	3,88	2,08	1,24	0,86

Sumber data: Bank Indonesia Laporan Perekonomian Provinsi Papua November 2021 (BPS, 2021, diolah)

Berdasarkan pada tabel 3.4 menunjukkan adanya perkembangan Inflasi di provinsi Papua. Nampak tekanan inflasi tahunan Provinsi Papua pada triwulan III tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun 2020. Bahkan terjadi deflasi pada periode tersebut. Penyebab utama yang memberikan dampak terhadap deflasi tahunan adalah sektor transportasi sebesar - 0,72 % (*yoy*). Pada triwulan III 2021 Provinsi Papua mengalami deflasi sebesar -0,40 % (*yoy*), berbalik arah jika dibandingkan dengan Triwulan II 2021 sebesar 0,46% (*yoy*) maupun dengan triwulan III 2020 sebesar 1,93% (*yoy*). Dilihat dari kelompok komoditasnya, penyumbang deflasi terdalam adalah kelompok transportasi; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil masing-masing sebesar -0,72% (*yoy*); dan 0,07% (*yoy*). Dengan dinamika perkembangan harga pada triwulan III Tahun 2019, Provinsi Papua mencatat inflasi sebesar 3,72 persen (*yoy*). Sampai dengan akhir Desember 2019 inflasi di perkirakan sebesar 3,4 persen (*yoy*) meningkat dari inflasi 2018 sebesar 3,27 persen (*yoy*).

Provinsi Papua mengalami inflasi sebesar 0,90% (*yoy*) pada bulan Oktober 2021. Berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi data historis tiga tahun terakhir yang mencapai 1,48% (*yoy*). Dilihat dari kelompok komoditas, kelompok (1) transportasi; (2) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya dan (3) penyediaan makanan dan minuman / restoran menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar pada Oktober 2021. Secara komoditas, inflasi terutama disebabkan lonjakan harga angkutan

udara. Hal tersebut didorong oleh tingginya trafik angkutan udara karena event PON XX 2021 yang berlangsung pada 2 - 15 Oktober 2021. Selain tersebut, komoditas lainnya yang mengalami tekanan inflasi tahunan pada triwulan III Tahun 2021 bersumber dari kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, komunikasi dan informasi serta jasa keuangan.

Tekanan inflasi Papua pada triwulan IV 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2021.

Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2021 diprediksi didorong oleh penurunan persediaan makanan dari dalam Papua akibat berakhirnya musim panen. Selain itu, faktor curah hujan dan gelombang laut tinggi yang meningkat pada triwulan IV 2021 baik di wilayah pantai utara maupun selatan Papua memberikan tekanan produksi pertanian serta penangkapan ikan oleh nelayan.

Tekanan peningkatan permintaan menjelang libur akhir tahun dan hari besar keagamaan nasional perayaan Natal dan Tahun Baru dapat mendorong peningkatan inflasi pada triwulan IV 2021. Mengingat liburan akhir tahun 2021 lebih Panjang dibandingkan dengan akhir tahun 2020 karena penundaan cuti Bersama hari raya Idul Fitri menjadi di akhir Desember 2020. Berdasarkan surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020, 03 Tahun 2020, libur akhir tahun 2020 ditetapkan pada 24 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

Relaksasi pembatasan perjalanan dapat mendorong momentum libur panjang akhir tahun untuk dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan ke/dari/intra Papua. Dengan demikian, peningkatan permintaan pada kelompok transportasi, khususnya komoditas angkutan udara, dapat mendorong tekanan inflasi pada komoditas angkutan udara di triwulan IV 2021. Secara spasial, Jayapura mengalami deflasi sementara Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika mengalami inflasi secara tahunan. Ketiga kota inflasi mengalami penurunan inflasi tahunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika masing-masing sebesar -1,41% (yoy); 0,54% (yoy) dan 1,24% (yoy), di bandingkan dengan triwulan II 2021 yang sebesar -0,53% (yoy); 1,36% (yoy); dan 2,08% (yoy).

Tabel 3.5
Indikator Kemiskinan dan Persentasi Penduduk Miskin Di Provinsi Papua

Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (Rupiah / Kapital / bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
-------	-------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------



2017	Maret	457.541	7.49	2.82	897.690	27.62
	September	464.056	6.24	1.93	910.420	27.76
2018	Maret	499.463	6.73	2.28	917.630	27.74
	September	518.811	5.91	1.82	915.220	27.43
2019	Maret	540.099	7.17	2.60	926.360	27.53
	September	557.236	6.07	1.98	900.950	26.55
2020	Maret	562.992	6.16	2.08	911.370	26.64
	September	580.643	6.90	2.35	912.230	26.80
2021	Maret	591.959	5.60	1.69	920.442	26.86
	September	600.795	6.31	2.05	944.494	27.38

Sumber data : Papua Dalam Angka – BPS Tahun 2022

Dari tabel 3.5 menunjukkan bahwa Jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,06 point yaitu dari 26,80 % pada September 2020 menjadi 26,86 % persen pada Maret 2021. Demikian pula jika dibandingkan dengan presentasi penduduk miskin pada periode Maret 2021 sampai dengan September 2021, mengalami peningkatan 0,52 poin, yakni dari 26,86 % pada Maret 2021 menjadi 27,38 % pada bulan September 2021. Pada periode Maret 2019 sampai dengan Maret 2020, tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada angka 0,93 point; namun pada periode September 2020 sampai dengan September 2021 penduduk miskin di Provinsi Papua sedang mengalami peningkatan sebesar 0,58 point yakni dari 26,80 % pada bulan September 2020 ke 27,38 % atau 944.490 jiwa dari jumlah penduduk Papua secara keseluruhan yaitu 4.30 juta jiwa. Secara nasional dari sisi jumlah; maka penduduk miskin di Provinsi Papua masih relatif sedikit di bandingkan Provinsi lainnya di Indonesia; namun secara persentasi masih menjadi Provinsi dengan persentase penduduk miskin urutan 1 terbesar di Indonesia. Sementara itu menurut defenisinya Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin menurut pengeluaran perkapitanya. Dengan demikian penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapitanya setiap bulan dibawah GK; maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan pada periode September 2020, yaitu sebesar Rp 580.643,00 dan mengalami peningkatan Pada bulan Maret 2021 menjadi Rp. 591.959,00 dan bulan September tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi Rp. 600.795,00. Perkembangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan di Papua

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam rangka mengukur keberhasilan yang telah dicapai dalam membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk) sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada Tahun 2021 adalah sebesar 60,62. Angka ini menurun dari 60,44 pada tahun 2020.

3.1.3. Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2023

Secara agregat, prospek perekonomian Papua pada tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2022. Pada umumnya peningkatan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2023 didorong oleh perbaikan kinerja pertambangan terbesar di Papua dimana produksi tambang berasal dari tambang bawah tanah yang mengalami peningkatan produktivitas sejalan dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi dibandingkan tambang terbuka. Penanganan pandemic COVID-19 di tahun 2022 yang menjadi penentu pemulihan aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2023. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas yang efektif dan proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu utama pemulihan perekonomian sepanjang tahun 2023.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua ditetapkan untuk alokasi Pendidikan 30% ; Kesehatan 35%; dan Ekonomi 35%. Penetapan ini dilakukan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan program kegiatan pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.



3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Peningkatan kemudahan pembayaran pajak berbasis teknologi (ATM, android, Payment Point)
- b. Peningkatan reward bagi masyarakat taat pajak dan penghapusan denda pajak berdasar tingkat tunggakan
- c. Peningkatan koordinasi dan pemberian penghargaan pada perusahaan wajib pungut
- d. Peningkatan pendataan masyarakat wajib pajak dan sosialisasi pada perusahaan wajib pajak air permukaan
- e. Peningkatan penagihan pajak secara persuasive (pengumuman melalui media masa, pemberitahuan di tempat umum)
- f. Peningkatan pendataan potensi dan asset provinsi yang dapat menjadi obyek retribusi daerah
- g. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan OPD penghasil
- h. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD penghasil
- i. Identifikasi perusahaan potensial untuk ditanam modal
- j. Peningkatan akses pelayanan samsat, terutama di daerah pedalaman
- k. Penerapan SOP pelayanan dan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat
- l. Pemberian fasilitasi dan penghargaan Samsat untuk bekinerja prima
- m. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
- n. Peningkatan sarana-prasarana perkantoran
- o. Peningkatan kompetensi dan disiplin aparatur

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;

- b. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD penghasil
- c. Identifikasi perusahaan potensial untuk investasi modal
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

3. Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah provinsi Papua akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian dana hasil pajak dan bukan pajak termasuk perolehan Dana Alokasi Umum (DAU)

3.2.1.1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2019 – 2021

No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata- Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	15.104.934.356.670,80	12.662.509.557.913,50	15.826.765.456.928,82	4.41%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.903.014.146.178,85	1.255.685.466.969,77	2.103.322.309.869,82	16.74%
1.1.1.	Pajak Daerah	1.469.202.829.921,00	986.672.016.100,00	1.627.364.000.469,00	16.05%
1.1.2.	Retribusi Daerah	27.038.220.738,61	19.537.313.848,33	18.406.439.197,78	-16.77%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.739.418.877,00	31.983.026.838,00	40.489.377.934,00	27.94%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	382.033.676.642,24	217.493.110.183,44	417.062.492.269,04	24.34%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	4.522.405.712.374,00	3.402.100.028.906,00	3.807.733.369.924,00	-6,42%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.243.299.539,00	694.866.304.495,00	1.009.724.770.219,00	21.78%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.616.545.381.000,00	2.330.020.003.000,00	2.314.920.067.000,00	-5.80%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.198.617.031.835,00	377.213.721.411,00	483.088.532.705,00	-20.23%
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.679.514.498.118,00	8.004.724.062.037,72	9.915.709.777.135,00	8.05%
1.3.1.	Hibah	612.000.000,00	1.567.116.824,00	6.786.105.833,00	244.55%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%



1.3.4.	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.5.	Dana Otonomi Khusus	5.850.230.158.000,00	5.288.694.844.000,00	6.611.349.330.000,00	7.71%
1.3.6.	Dana Tambahan Infrastruktur	2.824.446.537.000,00	2.711.275.076.000,00	3.278.447.679.000,00	8.46%
1.3.7.	Sumbangan Pihak Ketiga	4.225.803.118,00	3.187.025.213,72	3.442.244.302,00	-8,29%
1.3.8.	Dana Intensif Daerah	0,00	0,00	15.684.418.000,00	

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan atas realisasi penerimaan PAD tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2020, adapun beberapa penjelasan terkait realisasi kinerja sesuai tabel diatas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Peningkatan Pajak Daerah pada tahun 2021 berasal dari penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia sebesar Rp. 504.725.035.487,- (lima ratus empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang merupakan hasil putusan Pengadilan Pajak Sengketa Pajak Air Permukaan (PAP)

b. Retribusi Daerah

Target Retribusi Tahun 2020 sebesar Rp. 19.004.753.748,- sedangkan target tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 15.907.965.500 terjadi penurunan yang disebabkan oleh :

1. Dampak masalah nasional yaitu Covid -19 yang menyebabkan sebagian obyek tidak berjalan sesuai dengan harapan;
2. Rumah Sakit Daerah Abepura masih melayani dan merawat pasien covid – 19 sehingga berpengaruh pada penerimaan RSUD (pengurangan ruang rawat inap, pembatasan pelayanan klinik)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kontribusi terbesar pada peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari deviden Bank Papua yang terealisasi di Tahun 2021 sebesar Rp. 39.636.382.693,- (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) meningkat sebesar Rp. 8.256.365.492,- (delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dari tahun 2020.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Peningkatan Lain-lain PAD yang sah ditahun 2021 berasal dari Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia sebesar Rp. 109.693.440.000,- (seratus sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil putusan Pengadilan Pajak Sengketa Pajak Air Permukaan (PAP).

3.2.1.2. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah provinsi Papua

Tabel 3.7
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	KINERJA REALISASI PENDAPATAN DAERAH		
		2019 %	2020 %	2021 %
1	PENDAPATAN	100,36	95,97	107,84
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98,51	118,41	106,35
1.1.1.	Pajak Daerah	101,48	110,43	103,09
1.1.2.	Retribusi Daerah	91,11	108,51	115,71
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	97,63	126,39	102,24
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89,07	175,84	121,36
1.2.	DANA PERIMBANGAN	101,80	82,33	79,85
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak	103,44	108,12	147,74
1.2.2	Dana Alokasi Umum	100,00	99,86	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	104,96	32,63	27,29
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100,04	100,04	125,06
1.3.1.	Hibah	122,40	313,42	1.357,22

1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian	-	-	-
1.3.5.	Dana Otonomi Khusus	100,00	100,00	125,00
1.3.6.	Dana Tambahan Infrastruktur	100,00	100,00	125,00
1.3.7.	Sumbangan Pihak Ketiga	422,58	318,7	344,22
1.3.8.	Dana Intensif Daerah	0,00	0,00	100,00

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2022

3.2.1.3. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 - 2023

No.	Uraian	PROYEKSI 2022 Rp	PROYEKSI 2023 Rp
1	PENDAPATAN	8.904.380.490.543,00	8.985.270.303.971,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.198.114.778.543,00	1.279.004.591.971,00
1.1.1.	Pajak Daerah	1.024.797.715.916,00	1.119.165.230.785,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	31.861.201.441,00	18.383.500.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.338.272,00	25.304.338.272,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.151.522.914,00	116.151.522.914,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	7.705.265.712.000,00	7.705.265.712.000,00
1.2.1	Dana Perimbangan	3.912.610.346.000,00	3.912.610.346.000,00
1.2.2	Dana Tambahan Infrastruktur	2.211.859.366.000,00	2.211.859.366.000,00
1.2.3	Dana Otonomi Khusus	1.580.796.000.000,00	1.580.796.000.000,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.3.1	Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

1.3.2	Dana Darurat	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian	0	0
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2022

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 s.d 2021 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	5		
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai	2.364.908.576.164,00	2.215.237.393.876,00	2.275.529.404.599,00
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			250.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.613.095.350.495,00	2.694.909.709.238,00	3.695.916.305.303,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	60.778.240.000,00	51.843.550.000,00	119.937.333.696,91
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	828.799.492.988,00	472.573.932.979,00	814.343.316.031,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	2.290.235.705.220,00	2.603.501.328.399,96	2.050.955.258.463,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.000.848.783,00	188.612.418.360,00	119.120.628.800,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.172.818.213.650,00	8.226.678.332.852,96	9.076.052.246.892,91
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai		223.467.808.881,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.012.305.795.609,79	3.541.109.943.103,40	4.665.313.897.647,17
2.2.3	Belanja Modal	2.236.551.423.150,79	839.209.380.704,20	1.116.373.579.615,73
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	6.248.857.218.760,58	4.603.787.132.688,60	5.781.687.477.262,90

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



No	Uraian	Realisasi		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	13.421.675.432.410,60	12.830.465.465.541,60	14.857.739.724.155,80

Sumber Data : BPKAD Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

**Tabel 3.10
Pagu dan Estimasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 s.d 2023 (Rp)**

KODE	URAIAN	PAGU 2022*	ESTIMASI 2023**
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.237.275.778.543	1.274.394.051.899,29
4.1.01	Pajak Daerah	1.024.797.715.916	1.055.541.647.393,48
4.1.02	Retribusi Daerah	31.861.201.441	32.817.037.484,23
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.338.272	26.063.468.420,16
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	155.312.522.914	159.971.898.601,42
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.705.265.682.000	7.936.423.652.460,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.705.265.682.000	7.936.423.652.460,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4.3.01	Pendapatan Hibah		
	Jumlah Pendapatan	8.942.541.460.543	9.210.817.704.359,29
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	7.712.514.652.782	7.943.890.092.365,46
5.1.01	Belanja Pegawai	2.416.088.711.130	2.488.571.372.463,9
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.083.347.543.252	4.205.847.969.549,56
5.1.05	Belanja Hibah	1.196.866.461.400	1.232.772.455.242
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.211.937.000	16.698.295.110,00
5.2	BELANJA MODAL	1.509.658.467.842	1.554.948.221.877,26
5.2.01	Belanja Modal Tanah		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.153.245.529	135.087.842.894,87
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618.392.117.492	636.943.881.016,76
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	755.672.754.821	778.342.937.465,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.440.350.000	4.573.560.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.000.000.000	56.650.000.000,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



KODE	URAIAN	PAGU 2022*	ESTIMASI 2023**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000	56.650.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	544.816.364.694	561.160.855.634,82
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	544.816.364.694	561.160.855.634,82
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		
	Jumlah Belanja	9.821.989.485.318	10.116.649.169.877,54
	Total Surplus/(Defisit)	(879.448.024.775)	(905.831.465.518,25)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	979.448.024.775	1.008.831.465.518,25
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	679.448.024.775	699.831.465.518,25
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	300.000.000.000	309.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	979.448.024.775	1.008.831.465.518,25
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000	103.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000	103.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	103.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	879.448.024.775	905.831.465.518,25
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	
	TOTAL APBD	9.921.989.485.318	10.219.649.169.877,54

Sumber data: *Ringkasan APBD- SIPD 2022 ; **proyeksi 3% data diolah

Penyusunan anggaran belanja tahun 2022 berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2023, yang tentunya didasarkan pada beberapa hal yaitu : (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD; (4) Teknis penyusunan APBD; dan (5) Hal khusus lainnya.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 6 (enam) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat



keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 6 (enam) prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dimaksud, meliputi:

1. Peningkatan akses kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan/ SDM
2. Penguatan stabilitas keamanan & demokrasi;
3. Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan di luar sektor tambang;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi
5. Pemantapan infrastruktur dasar dan konektifitas teknologi dan informatika antar wilayah
6. Meminimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing- masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2022. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip- prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;



5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan Mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (HIS), serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2022 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, RKP 2021 dan RKP 2022;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial;
9. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis

- program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
10. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
 12. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada tabel 3.9 juga memuat tentang Pembiayaan Daerah karena sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tampilan dan tabel dijadikan satu antara Pembelanjaan dan Pembiayaan. Dalam pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang memuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan yang memuat tentang penyertaan modal daerah.

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021, merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua



sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut dibangun dengan konstruksi yang bersumber dari dua elemen, yaitu:

- (1) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- (2) kristalisasi penggalan aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.

Kebijakan otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
3. Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat 3 huruf e dan f, yaitu :

Pertama, *Dana Otsus Block Grant* (setara 1% dari DAU Nasional) digunakan untuk :

- (1) Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;
- (2) Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat;
- (3) Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, *Dana Otsus Specific Grant* (setara 1,25% dari DAU Nasional) digunakan untuk :

- (1) Belanja pendidikan paling sedikit 30 %;
- (2) Belanja kesehatan paling sedikit 20 % ; dan
- (3) Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Tabel 3.11
Realisasi Dan Alokasi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2020 dan 2021 (Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Alokasi 2022
Total Dana Otsus		
Provinsi		
Kabupaten/ Kota		
Urusan Bersama		
a. Dinas Pendidikan		
b. Dinas Kesehatan		
c. RSUD Jayapura		
d. RSUD Abepura		
e. RS Jiwa Abepura		
Uraian		
f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
g. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil		
h. Dinas Komunikasi dan Informatika		
i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
j. Dinas Pemuda dan Olahraga		
k. Dinas Kelautan dan Perikanan		
l. Dinas Pariwisata		
m. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas		



Uraian	Realisasi 2021	Alokasi 2022
Pertanian Dan Perikanan)		
n. Dinas Perkebunan		
o. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
p. Dinas Kehutanan		
q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja)		
r. Sekretariat Daerah		
s. Sekretariat MRP		
t. Bappeda		
u. BPKAD (BTL)		

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua 2021 (data diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Disamping harus taat dengan RTRW juga harus berlandaskan RPJPD, dimana rencana pembangunan tahun 2023 ini merupakan bagian perencanaan tahapan ke lima tahunan dari RPJMD Tahun 2019-2023 dan merupakan bagian perencanaan tahapan ke lima tahunan dari RPJPD Tahun 2005–2025 Tahap IV, dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk memperkuat Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Selain itu prioritas pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2023.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan. Rumusan terhadap tujuan dan sasaran diterjemahkan dari visi dan misi pembangunan daerah. Untuk memberi tuntunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka perlu diperhatikan visi pembangunan Provinsi Papua periode 2019 – 2023, adalah **“PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”**.

Berkenaan dengan perwujudan visi pembangunan Provinsi Papua, elaborasi dari visi telah menghasilkan dan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Papua periode 2019-2023, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut :

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan,

kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjaga pasokan pangannya terjamin dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Untuk itu kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu Pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua, penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM serta peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan memperkuat kelembagaan sosial politik dan peran masyarakat, melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung, meningkatkan partisipasi dan transparansi, mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan mind- set, culture-set dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang

harmonis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.

Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua akan tetap melanjutkan pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi daerah yang berbasis potensi masing-masing wilayah dan kampung. Dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh serta berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan karakteristik/ kondisi wilayah dan potensi masing-masing wilayah serta peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah **La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereri** dan **Animha**, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023 mengingat pelaksanaan pembangunan di masa lalu, belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh Masyarakat. Penyebabnya antara lain, proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga dampaknya tidak dapat diselesaikan atau diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menysasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (cash transfer) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu : 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

Untuk mencapai visi tersebut maka telah dirumuskan dengan 5 (lima) misi pembangunan dengan 7 (tujuh) tujuan pembangunan, 33 (tiga puluh tiga) sasaran pembangunan beserta target pembangunan Provinsi Papua sampai tahun akhir Periode RPJMD (tahun 2023) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Keselarsan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
Visi : "PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN".

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM					
Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	60.11	65.47.	65.47.
	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	50,54	60	60
	Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatn Status	n/a	Sedang	Sedang
	Presntase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	n/a	60	60
	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	37,09	51	51
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,6	8,2	8,2
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,8	12	12
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	74,9	80	80
	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	42,8	60	60
Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang per hari	n/a	300	300
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan	Tahun	65,86	69,59	69,59
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 penduduk	7	4	4

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1000 kelahiran hidup	267,88	183,3	183,3
	Angka Kesakitan	persen	7,22	3	3
Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Perolehan medali emas dalam PON	medali	-	-	90
	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional	Atlet	30	100	100
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	69,19	75	75
	Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	persen	16,6	22,8	22,76
Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kabupaten/ kota	13	7	7
	Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	27,44	30	30
	Persentase penduduk tahan pangan	persen	42,83	60	60
Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3	1	5
	cakupan cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	1	2
	Cakupan kurikulum muatan lokal	Persen	n/a	5	5
Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI					
Tujuan2, Meningkatkan keamanan, Ketentraman dan	Angka Kriminalitas	Per 100.000 penduduk	218	147	147



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61.36.00	63.08.00	63.08.00
Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	Persen	64,64	70	70
Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	76,42	78,68	78,68
Meningkatnya Penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM(Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	15
	Rata-rata nilai skor peduli HAM	Nilai	0	75	75
Meningkatnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Nilai Skor aspek kebebasan sipil	Skor	92,96	95	95
	Nilai Skor aspek Hak-hak politik	Skor	42,49	50	50
	Nilai Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	54,49	60	60
Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan					
Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Demokrasi, dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	B	B
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	C	B	B
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	C	A	A
Peningkatkan kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	88	100	100

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
	Cakupan kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah Kabupaten/ Kota	0	7	29
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase OPD dengan nilai SAKIP B	Predikat	B	BB	BB
	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	5,08	6,2	6,2
	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	76,04	85	85
	Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan E-planing dll ke program)	persen	80	95	95
	Cakupan Inovasi Pelayanan Publik yang Masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	0	1	5
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	80	100	100
	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	75,38	85	85
	Rasio belanja langsung dalam kondisi APBD	Persen	36,70	50	50
	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persen	50	70	70
Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP
	Ketepatan waktu penetapan APBD	Kategori	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8,61	14	14
Keempat, Pungutan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pembangunan Wilayah berbasis Kultural					
Tujuan 4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi DT	persen	4,96	6,62	6,62
	Laju Pertumbuhan Ekonomi TT	persen	5,52	7,39	7,39
	Rasio Gini	Nilai Indeks	0,4	0,38	0,3840
	Tingkat emisi karbon	Ton Co2	0,371	0,282	0,282
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	82.06.	85.03	85.03
	Presentase penerapan green economy	Persen	n/a	70	70
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,91	2	2
	PDRB Perkapita DT	Juta Rupiah	59.13	60,94	60,94
	PDRB Perkapita TT	Juta Rupiah	39,82	53.43	53.43
	tingkat inflasi	Persen	2,41	2,26	2,26
Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	88	90	90
	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	Persen	-	65	70
	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	2,59	5	5
	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	1,09	5	5
	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	1,11	5	5



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
Mengoptimalkan perananan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. Juta	14,69	25	25
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Udara	indeks	91,58	95	95
	Indeks Kualitas Air	indeks	77,77	80	80
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	79,28	85	85
	Intensitas Emisi	Ton co2/rupee	-	63,16	63,16
Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	rasio	24,85	30	30
	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1,48	3	3
	Laju Deforestasi	ribu hektar	43,5	25	25
Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	persen	8,3	10	10
	Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	persen	2,19	4	4
	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	jumlah	0	4	10
	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	53,66	60	60
	Jumlah UMKM yang berkembang	jumlah	3517	4000	4000
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	980,5	1500	1500
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,2	3,5	3,5
Meningkatnya pembangunan ekonomi	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	5,33	12	12

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	NTP perikanan tangkap	skor	103,96	105	105
	NTP perikanan budidaya	skor	85,85	100	100
	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	0,33	2,46	2,46
Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	77,4	80	80
	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	97,09	98,34	98,34
Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektorsektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Juta	54.401.000	64.926.000	64.926.365
	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Juta	73.744.000	95.427.000	95.425.872
	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	90	20	20
Tujuan 5. Mewujudkan Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	Indeks kemahalan Konstruksi	Persen	2224,56	200	200
	Kepuasan pelayanan informasi dan komunikasi	kategori	-	B	B
Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	55,17	93,1	93,1
	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	30	55	55
	Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	persen	20	45	45
Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen		50	50

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase pemanfaatan sumber daya air	Persen		80	80
	Presentasi pengendalian daya rusak air	persen		60	80
Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	34,12	40	40
	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	39,52	45	45
	Backlog perumahan layak huni	Ribu ruta	138,55	100	100
Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	Unit	41,28	45	45
Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	persen		60	60
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen		10	10
Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas dan Tertentu					
Tujuan 6. Meningkatkan pemerataan pembangunan	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status desa berkembang	persen	6,94	25	25
	Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago	persen	31,78	29.23	29.23
	Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri	persen	29,8	28.16	28.16
	Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago	persen	35,89	33,8	33,8
	Indeks Williamson Antarwilayah Adat	indeks	0,7774	0,5640	0,5640
	IPM wilayah perbatasan	Indeks	64,02	68	68
	Tingkat kerentanan sosial	Kategori	Tinggi	Rendah	Rendah
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	0,508	0,467	0,467

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	2018	2023	2023
	Deskripsi		(baseline)	(Target tahunan)	(Target Akhir RPJMD)
Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Indeks kampung membangun	Indeks	43,43	52	52
	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	30	60	60
Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OA	persen	60	73	73
Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan	Tahun	8,09	12	12
	Angka harapan hidup wilayah perbatasan	Tahun	65,56	68	68
	Pengeluaran perkapita wilayah perbatasan	Rp.juta perkapita	10,12	13,12	14
Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	-	50	250
	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang pertahun	-	50	150
Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	kategori	Tinggi	Rendah	Rendah
Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Oembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	423	200	200
	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	79,84	80,00	80,00

Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

4.2. Perumusan Tema RKPD Tahun 2023

Tema pembangunan tahunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Darah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2023

disusun dengan berpedoman kepada kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP 2023, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

4.2.1. Penyeragaman dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025

Visi RPJP : Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik, dengan **Misi RPJP** :

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua

Prioritas Pembangunan tahap IV Tahun 2022-2025 :

Pada periode pembangunan Tahap IV ini, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Pada tahap pembangunan ini, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing, didukung oleh terpenuhinya permukiman yang sehat, sanitasi lingkungan yang memadai, pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat, presentase penduduk miskin yang rendah, rendahnya ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan energi listrik yang terbaru, ketersediaan air bersih, ketersediaan air bersih, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum, sosial serta kelembagaannya, yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisien dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi



landasan bagi keberhasilan pada tahap-tahap selanjutnya. Peningkatan infrastruktur, aksesibilitas wilayah serta ketentraman dan ketertiban yang menjadikan keadaan Papua yang kondusif untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal merupakan dasar tema pembangunan pada tahap selanjutnya. Pada tahap berikutnya peningkatan kemapaman, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan yang didukung oleh SDM yang berkualitas di seluruh wilayah sudah menjadi dasar pemahaman seluruh masyarakat Papua untuk mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat Papua yang mandiri di segala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam, yang memiliki makna sangat dalam untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kesejahteraan masyarakat, kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing menjadi tujuan akhir 20 tahun mendatang (tahun 2025), sehingga mampu mencapai visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

4.2.2. Penyelarasan dengan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Sesuai RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, fokus pembangunan Provinsi Papua di tahun kelima RPJMD (Tahun 2023) adalah : **Memastikan terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera sebagai dasar pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap terdepat dalam mempertahankan alam dan budaya sebagai aset bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua.**

Gambar 4.1
Arah Kebijakan Pembangunan Papua 2019-2023



Pencapaian fokus pembangunan tahun kelima RPJMD 2019-2023 dilakukan berdasarkan evaluasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tercapai dari tahun 2019-2021, sehingga prioritas pembangunan tahun 2023 adalah memastikan pencapaian semua tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Tahun 2019-2023 dapat terlaksana sesuai kondisi daerah dan kemampuan keuangan.

Isu strategis Pembangunan Provinsi Papua sesuai RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 yang harus diperhatikan juga yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah;
2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik



Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;

5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan;

Selain menelaah dari fokus pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023, perlu juga memperhatikan isu aktual Pembangunan Papua saat ini, antara lain :

1. Perubahan regulasi Otsus yang membutuhkan dasar tata kelola baru yang disesuaikan dengan regulasi Otsus terbaru serta menjamin kesinambungan dengan prioritas otsus yang telah dilaksanakan pada regulasi sebelumnya.
2. Memastikan pencapaian target indikator Pembangunan akhir RPJMD dapat terlaksana di tahun 2023
3. Pemulihan ekonomi dan adaptasi terhadap pola hidup baru di era pandemi yang belum berakhir.
4. Memastikan momentum keberhasilan ekonomi dan pemanfaatan sarana prasarana PON yang sudah terbangun secara berkelanjutan untuk pengembangan SDM dan ekonomi Papua.
5. Penyelerasan pembangunan Papua antara semua stackholder dengan berpedoman pada RIPP.
6. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan lainnya

4.2.3. Penyelerasan dengan RKP 2023

Tema RKP 2023 "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Arah Kebijakan RKP 2023 :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (al. Air bersih dan sanitasi)
8. Pembangunan IKN

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,375 – 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29 – 73,35
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0

Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

4.2.4. Penyeragaman dengan RIPP Tahun 2022-2041

Visi Pembangunan Papua 2041: “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui **3 (tiga) misi dan sasaran indikator** sebagai berikut:

- 1) Misi-1 : memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
- 2) Misi-2 : memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

- 3) Misi-3 ; meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahap I (RAPPP I) tahun 2023-2024 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah Papua disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan diarahkan pada:

- (1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi :
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan akreditasi;
 - b. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan orang asli Papua (OAP).
- (2) Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan strategi :
 - a. Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan kabupaten/kota dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
- (3) Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahraga, dengan strategi :
 - a. Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat;
 - b. Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga;
 - c. Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.
- (4) Pembangunan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan diarahkan pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara

merata dengan strategi:

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
- b. Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan

Pembangunan ekonomi diarahkan pada :

- (1) Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi :
 - a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal;
 - b. Peningkatan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*).
- (2) Penataan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan strategi :
 - a. Peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP;
 - b. Peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

4.2.5. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (SDGs). Agenda internasional ini untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim yang diupayakan dalam bentuk aksi nyata. Diharapkan agenda ini dapat tercapai di tahun 2030, dengan tujuan dan target meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan



mempromosikan pertanian berkelanjutan;

- 3) Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
- 7) Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs tersebut diatas sangat relevan dengan konteks pembangunan Papua untuk saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu Provinsi Papua juga berupaya sama untuk

mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 236 indikator TPB kewenangan Provinsi, terdapat 10 (sepuluh) prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi penekanan dan urgensi bagi pembangunan di Provinsi Papua sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
2. TPB 2 : Tanpa Kelaparan
3. TPB 4 : Pendidikan Berkualitas
4. TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
5. TPB 7 : Energi Bersih
6. TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
7. TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan Wilayah
8. TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim
9. TPB 15 : Ekosistem
10. TPB 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Selanjutnya dari hasil KLHS RPJMD, maka TPB yang perlu diperkuat dalam perencanaan program berdasarkan isu strategis yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif;
- b. Melakukan perencanaan dan menginternalisasi pembangunan ekonomi hijau dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dan kearifan lokal dalam pembangunan dan tata guna lahan.
- c. Menjaga dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan koordinasi (tata kelola) Lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam;

4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Provinsi Papua

Perumusan RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena akan menjadi salah satu rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Bagi anggota DPRD penyusunan pokok pikiran ini sekaligus merupakan penyaluran aspirasi masyarakat yang diterima pada saat komunikasi dengan masyarakat. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini telah diupayakan untuk selaras dengan prioritas pembangunan serta ketersediaannya kapasitas anggaran dengan mempertimbangkan asas manfaat, efisien, efektivitas sesuai mekanisme perundangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan nantinya ada kesinambungan program dan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Papua 2019-2023.

4.2.6.1 Maksud Penyusunan Pokok Pikiran DPRD

Maksud disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

- a. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengarahkan penyusunan program pembangunan di Provinsi Papua dengan tujuan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Papua.
- b. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua.
- c. Tujuan disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :
- d. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023;
- e. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA- SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
- f. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Provinsi Papua melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2023;
- g. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- h. Mewujudkan aspirasi masyarakat Provinsi Papua dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD;



- i. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4.2.6.2 Telaah POKIR DPRP Provinsi Papua

Penyampaian saran dan pendapat yang dituangkan didalam telaah pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun konsep perencanaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3

Telaah POKIR DPRP Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 (Daftar Terlampir)

Berdasarkan telaah dokumen-dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman diatas, dan dengan mempertimbangan berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan antara lain:

1. Prioritas pembangunan tahap akhir (keempat) RPJP Provinsi Papua Tahun 2005-2025
2. Fokus pembangunan tahun kelima (periode akhir) RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023
3. Isu strategis RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023
4. Isu aktual Pembangunan Provinsi Papua saat ini
5. Tema, arah kebijakan dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023
6. Visi, Misi dan Fokus Pembangunan Papua dalam dokumen RIPP
7. Telaah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Papua Tahun 2021 (belum ada)
9. Pokok-Pokok Pikiran DPRP Provinsi Papua untuk RKPD Tahun 2023 (belum ada)

Maka dapat dirumuskan beberapa kata atau kalimat kunci dari masing-masing dokumen rujukan tersebut yaitu :

No	Dokumen Rujukan	Kata/Kalimat Kunci Fokus Pembangunan Tahun 2023
----	-----------------	---

1	RPJP Provinsi Papua Tahun 2005-2025	Mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat, kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing.
2	RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023	Memastikan terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera sebagai dasar pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap terdapat dalam mempertahankan alam dan budaya sebagai aset bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua.
3	Ranwal RKP Tahun 2023	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
4	Draft RIPP	Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera
5	TPB/SDGs	Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif;
6	Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan (RKPD) Tahun 2021	Perlunya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah serta peningkatan tata kelola pemerintahan, kemandirian dan ketertiban
7	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua Tahun 2023	.

Berdasarkan keterkaitan arahan pembangunan 2023 dari berbagai dokumen rujukan diatas, maka dapat dirumuskan **Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2023** yaitu :

“ Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan ”

Tema tersebut mengandung makna bahwa di tahun 2023 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, maka pembangunan Provinsi Papua diarahkan untuk memastikan terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan dan Berkelanjutan sesuai visi RPJMD melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun

kualitas. Adapun penjabaran tema tersebut dalam beberapa kalimat kunci yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM Papua

Peningkatan Sumber Daya manusia merupakan tujuan utama pembangunan di Papua, yang pada akhir periode RPJMD 2019-2023 harus mencapai pemerataan akses dan peningkatan kualitas yang signifikan, sekaligus untuk menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan Papua yang semakin meningkat, dengan tetap berpegang pada arahan RPJPD yaitu SDM Papua yang berdaya saing dalam kapasitas dan berkarakter dalam budaya.

2. Pemantapan Ekonomi Papua

Pasca pelaksanaan PON XX Tahun 2021, telah membawa berbagai kemajuan ekonomi yang signifikan selain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi lokal serta mulai pulihnya kondisi ekonomi sebagai dampak dari pandemi yang masih berlangsung. Untuk itu Tahun 2023 harus lebih difokuskan untuk memantapkan keberhasilan-keberhasilan ekonomi yang telah dicapai dan pemerataan pengembangan ekonomi di seluruh wilayah Papua.

3. Papua yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Untuk mengejar ketertinggalan Provinsi Papua dengan Provinsi lainnya di Indonesia, maka diperlukan pendekatan pembangunan Papua yang inklusif sesuai kebutuhan dan kontekstual pembangunan di Papua melalui pembangunan infrastruktur dasar yang memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan serta didukung tata kelola pemerintahan berbasis pendekatan wilayah budaya.

4.3. Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dirumuskan diatas yaitu: **“Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”**, maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2023 sebagai berikut :

1. **Prioritas 1** : Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
2. **Prioritas 2** : Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
3. **Prioritas 3** : Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah
4. **Prioritas 4** : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5. **Prioritas 5** : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kelima Prioritas pembangunan daerah diatas telah selaras dengan permasalahan

pembangunan dan isu strategis daerah yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
I.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan • Rendahnya budaya baca pada masyarakat • Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat • Kurangnya Prestasi Olah Raga • Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah • Belum terinternalisasinya nilai adat dan budaya asli tanah tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat • Belum efektifnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP • Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan • Masih kurangnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan 2. Peningkatan prestasi & pemanfaatan sarpras olahraga 3. Perlindungan sosial 4. Peningkatan internalisasi adat dan budaya 5. Pengarusutamaan Gender & perlindungan anak 	<p>PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMERATAAN SDM</p>

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
II.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas • Belum optimalnya peran sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan • Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim • Belum terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif • Rendahnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan • Kurangnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja • Kurangnya daya saing dan realisasi investasi pada sektorsektor andalan daerah • Kurang tersedianya pangan yang berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan komoditas unggulan berbasis wilayah adat 2. Implementasi pembangunan berkelanjutan (green growth dan rendah karbon) 3. Peningkatan pemenuhan pangan berkelanjutan 	<p>PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</p>
III.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah • Belum terimplementasinya Rencana Tata Ruang secara konsisten • Belum tersedianya sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah • Masih kurangnya pemenuhan rumah layak huni dan penataan pemukiman • Kurangnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan • Minimnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah • Rendahnya kualitas pembangunan berbasis kampung • Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan • Kurangnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan konektivitas transportasi antar moda 2. Penyediaan infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah (air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi) 3. Percepatan pembangunan infrastruktur kampung, perbatasan dan wilayah terpencil) 4. Ketangguhan dalam adaptasi dan mitigasi bencana 	<p>PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS WILAYAH</p>

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
IV.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum Kurangnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat Belum optimalnya Penegakan HAM Kurangnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. 	Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Papua	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
V.	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua Rendahnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan tata kelola penyelenggaraan Otsus Peningkatan pelayanan publik Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Adapun keselarasan tema dan prioritas pembangunan daerah RKPD Tahun 2023 dengan Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD 2023 dengan RKP 2023

RKP 2023	RKPD 2023
Tema : Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tema : Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim	1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan SDM 2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas
2. Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan)	Peningkatan Kualitas dan pemerataan SDM
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i>	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mendorong pemulihan dunia usaha	1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan 2. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (al. Air bersih dan sanitasi)	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas
8. Pembangunan IKN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan berbagai rumusan kebijakan pembangunan dan tema pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan daerah dan fokus kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2023 yang diselaraskan dengan prioritas nasional tahun 2023 seperti dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan Dan Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	SKPD
1.	Peningkatan Kualitas dan pemerataan SDM	Akselerasi dan afirmasi pendidikan unggul papua	Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah; BPSDM;
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada jenjang SLTA & SLB	Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah;
		Pembangunan dan pengembangan SMK, BLK dan Politeknik berbasis potensi unggulan	Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah; Dinas Peridag, Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja;
		Penanganan Stunting	Dinas kesehatan, Dinas pertanian & Pangan; Dinas PUPR; Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah;
		Pengembangan Rumah Sakit Rujukan pada setiap wilayah adat.	Dinas Kesehatan, RSUD Dok 2, RSUD Abepura
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (primer & rujukan)	Dinas Kesehatan; RSUD Jayapura; RSUD Abepura;
		Pemerataan tenaga kesehatan dan insentif	Dinas Kesehatan; RSUD Jayapura; RSUD Abepura;
		Pengembangan prestasi dan industri olahraga	Dinas Olahraga & Pemuda; Dinas Pendidikan, perpustakaan & Arsip Daerah;
		Peningkatan apresiasi dan pemberdayaan lembaga adat & budaya	Dinas pariwisata & kebudayaan
2.	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Pengembangan komoditas unggulan masing-masing kabupaten/kota melalui penyediaan perluasan lahan, penyediaan bibit, penyediaan sarpras dan penguatan pendampingan pada petani.	Dinas Pertanian & Pangan; Dinas KLH
		Pengembangan industri hilirisasi pertanian, peternakan dan perkebunan	Dinas Pertanian & Pangan;
		Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah dan kabupaten/kota melalui peningkatan produksi dan	Dinas Pertanian & Pangan; DKP; Dinas Peridag, Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	SKPD
		peningkatan penyediaan sarana prasarna distribusi	
		Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Dinas Pertanian & Pangan; Dinas Peridag, Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan
		Penguatan kemandirian kampung berbasis komoditas lokal	DPMK & OAP; Dinas Pertanian & Pangan; Dinas KLH; DKP; Dinas Peridag, Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja; Badan Perbatasan & Kerjasama;
		Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Kehutanan & LH;
		Reformasi kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana melalui pengenalan operasi dan penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Satpol PP & Penanggulangan Bencana; Dinas PUPR; Diskominfo;
		Perlindungan sosial	Dinas Sosial, Kependudukan, PPPA;
3.	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas	Peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi dan akses bagi seluruh masyarakat	Dinas Perhubungan, Dinas PUPRKP
		Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Dinas PUPRKP
		Ketersediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan dan air limbah	Dinas PUPRKP
		Penyediaan energi baru dan terbarukan	Dinas ESDM
		Penyediaan dan pengelolaan air baku	Dinas PUPRKP
		Pengendalian banjir dan abrasi pantai	Dinas PUPRKP
		Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	Diskominfo
		Pengendalian pemanfaatan ruang	Bappeda, Dinas PUPR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	SKPD
4.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Memperkuat peran lembaga adat, keagamaan dalam kemitraan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Badan Kesbangpol, Sekretariat Daerah, Biro Hukum, Biro Kesra
		Menciptakan dan melembagakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Badan Kesbangpol, Satpol PP & penanggulangan Bencana; Diskominfo; Badan Perbatasan & Kerjasama;
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan tata kelola otsus melalui integrasi perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaan anggaran	Bappeda; BPKAD; Inspektorat; Biro Hukum; Biro Layanan Pengadaan; sekretariat MRP; Biro Tapem & Otsus;
		Transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pencegahan korupsi	Biro Organisasi; Inspektorat; Sekretariat DPRD;
		Pembinaan kabupaten/kota untuk penguatan kapasitas kelembagaan distrik dan kampung	Biro Tapem & Otsus;
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi dan aplikasi	Biro Organisasi; Biro Umum & Protokoler; Biro Tapem & Otsus; Diskominfo; Sekretariat DPRD;
		Pengelolaan pendapatan daerah	Bapenda
		Penguatan dan peningkatan perijinan	DPM-PTSP
		Penguatan kapasitas penyelenggara pemerintahan dengan berbasis kinerja	Sekretariat Daerah, Biro Organisasi, BKD, BPSDM

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma **“Money Follow Program Priority”** atau dalam terjemahan **“Uang Mengikuti Program Prioritas”**. Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu **“Money Follow**

Function” yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2023, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.4. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas Pembangunan tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Adapun Sasaran Makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2023 sebagai perwujudan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, adalah:

Tabel 4.7
Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET 2023	GAP
1	IPM	Indeks	60,06	65	-2,58
2	Persentase Penduduk Miskin	%	27,43	20	1,37
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,33	5 – 6,5	0,25
4	PDRB Perkapita Tanpa Tambang	Juta Rp	40,12	50	27,79
5	Gini Rasio	%	0,384	0,385	-0,16
6	Pengangguran Terbuka	%	2,91	2,57 – 1,75	0,66
9	Intensitas Emisi GRK	Ton CO2/Juta rupiah	0.449	0,282	0,151

Keterkaitan sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2023 dalam mendukung sasaran makro pembangunan nasional tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Keselarasan Sasaran Makro Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2023



SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RKP 2023	SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2023
Pertumbuhan Ekonomi (5,3 - 5,9 %)	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi (5 – 6,5%) PDRB Perkapita Tanpa Tambang (50 juta rupiah)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (27,02 %)	Intensitas Emisi GRK 0,282 Ton CO2/Juta rupiah
Tingkat Pengangguran Terbuka (5,3 – 6,0%)	Pengangguran Terbuka (2,57 – 1,75 %)
Rasio Gini (0,375 – 0,378)	Gini Rasio (0,385%)
Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (73,29 – 73,35)	IPM (65)
Tingkat Kemiskinan (7,0 – 8,0%)	Persentase Penduduk Miskin (20 %)

Adapun keterkaitan antara indikator sasaran prioritas nasional RKP 2023 dengan indikator sasaran prioritas pembangunan Provinsi Papua tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2023

FOKUS RKP 2023	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2023	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2023 *)
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim	<ul style="list-style-type: none"> Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0% (2023) → 0-1% (2024) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91% Nilai Tukar Petani /Nelayan 103-105/105-107 	<ul style="list-style-type: none"> NTP perikanan budidaya 100 Cakupan penanganan daerah rawan pangan 65% Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan) 50 KAT Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14% (2024) Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71% Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 % Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48% Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,2 tahun Harapan Lama Sekolah 12 tahun Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf 80% Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3 : 60% Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah 300 org/hari Angka Harapan Hidup 69,59% Angka Kematian Bayi (AKB) 4 per 1000 penduduk Angka Kematian Ibu (AKI) 183,3 Prevelensi Stunting ..??

FOKUS RKP 2023	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2023	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2023 *)
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kesakitan 3%
<p>Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43% Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48% Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71% 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional dan internasional 100 atlit Persentase organisasi pemuda yang aktif 75% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 80% Tingkat Kesempatan Kerja 98,34
<p>Mendorong pemulihan dunia usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Wirausaha 3,50% Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 % Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar Kontribusi PDB Pariwisata 4,3% Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan 22,8% Jumlah UMKM yang berkembang 4000 UMKM Jumlah Kunjungan Wisatawan 1500 orang Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB 10%
<p>Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9 % Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 % Produk Inovasi dan Produk Prioritas Nasional yang Dihasilkan 10 Peringkat Global Innovation Index 75-80 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08% Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80% 	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 4% Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan : 4 kawasan
<p>Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 % Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6% 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Udara 95% Indeks Kualitas Air 80% Indeks Kualitas Tutupan Lahan 85% Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 30% Intensitas Emisi GRK 0,282 Ton CO2/Juta rupiah
<p>Percepatan pembangunan infrastruktur dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> Volume tampungan air per kapita 54,50m³/det Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 65% Persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik 65%

FOKUS RKP 2023	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2023	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2023 *)
(al. Air bersih dan sanitasi)	<p>(82,07 layak, termasuk 11,5 aman)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5% ○ Masyarakat Pengguna Internet 80,7% ○ Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50% 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Presentasi pengendalian daya rusak air 80% ○ Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik 40% ○ Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak 45% ○ Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan ?? ○ Cakupan layanan telekomunikasi 60% ○ Proposisi rumah tangga dengan akses internet 10%
Pembangunan IKN	<ul style="list-style-type: none"> ○ Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A ○ Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha* 	

Sedangkan keterkaitan Prioritas Daerah & Program Pembangunan Tahun 2023 dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.10
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Program Prioritas Provinsi Papua Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,76	8,21	1. Akselerasi dan afirmasi pendidikan unggul papua 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada jenjang SLTA & SLB. 3. Pembangunan dan pengembangan SMK, BLK dan Politeknik berbasis potensi unggulan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,11	12			
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	78,89	80			
	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang per hari		300	Perluasan dan peningkatan sarpras perpustakaan dan minta baca masyarakat	1. Program Pembinaan Perpustakaan 2. Program Pengelolaan Arsip	Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,93	69,59	1. Penanganan Stunting 2. Pengembangan Rumah Sakit Rujukan pada setiap wilayah adat.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 penduduk		4	3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (primer & rujukan) 4. Pemerataan tenaga kesehatan dan insentif	Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1000 kelahiran hidup		183,3			
		Prevelensi Stunting	persen	29,5-26,2	25			
		Angka Kesakitan	Persen		3			
Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga		Perolehan medali emas dalam PON	Medali	93	-	Pe Pengembangan prestasi & industri olahraga	1. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Olahraga & Pemuda
		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional dan internasional	Atlet	93	100			
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	14,75	75	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan terutama bidang kewirausahaan	1. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 2. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Dinas Olahraga & Pemuda
		Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	Persen	n/a	22,8			
Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli tanah tanah Papua dalam		Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah		1	1. Peningkatan apresiasi adat dan budaya di berbagai bidang	1. Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
	berbagai bidang kehidupan masyarakat			n/a		2. Penguatan pemberdayaan lembaga adat dan budaya	2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3. Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual 4. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	dan Kebudayaan
		cakupan cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	n/a	1			
		Cakupan kurikulum muatan lokal	dokumen	11	5			
Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	97,54	73	Percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur didaserah tertinggal, perbatasan, terluar dan tertentu.	1. Program Peningkatam Kesejahteraan Orang Asli Papua 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Badan Pembangunan kampung & OAP	
Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan	Tahun	8,17	12	Percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur didaserah tertinggal, perbatasan, terluar dan tertentu.	Program Pengelolaan Perbatasan	Badan Perbatasan & Kerjasama	
	Angka harapan hidup wilayah perbatasan	Tahun	65,88	68				
	Pengeluaran perkapita wilayah perbatasan	Rp.juta perkapita	8,85	13,12				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun		50	1. Perlindungan sosial 2. Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan komprehensif	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penanganan Bencana 6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Sosial, Kependudukan, PPPA
		Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang pertahun	3,432	50			
	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79,69	200	1. Peningkatan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pemenuhan Hak Anak 4. Program Perlindungan Khusus	Dinas Sosial, Kependudukan, PPPA
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	65,27	??			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
							Anak	
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	81,5	90	1. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah dan kabupaten/kota melalui peningkatan produksi dan peningkatan penyediaan sarana prasarna distribusi 2. Pengembangan komoditas unggulan masing-masing kabupaten/kota melalui penyediaan perluasan lahan, penyediaan bibit, penyediaan sarpras dan penguatan pendampingan pada petani. 3. Pengembangan industri hilir tanaman pangan/ perkebunan/ peternakan	1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, perkebunan, peternakan 2. Penanganan bencana pertanian 3. Perijinan usaha pertanian 4. Penyuluhan pertanian 5. Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 6. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteliner	Dinas Pertanian & Pangan
		Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	2,42	5			
		Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	0,98	5			
		Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0,85	5			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	Jmlh kab/kota	7	7	1. Peningkatan infrastruktur pertanian yang mendukung produksi pangan dan tujuan pasar 2. Perbaiki sistem distribusi dan logistik 3. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan 4. Pengembangan industri hilirisasi pertanian tanaman pangan	1. Penanganan kerawanan pangan 2. Pengawasan keamanan pangan 3. Peningkatan diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Pertanian & Pangan
		Persentase kenaikan cadangan pangan	Persen		30			
		Persentase penduduk tahan pangan	Persen		60			
	Megoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. Juta		25	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan secara berkelanjutan	1. Pengelolaan Aspek kegeologian 2. Pengelolaan Mineral	Dinas ESDM
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,2	95	Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1. Perencanaan lingkungan hidup 2. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan & LH
		Indeks Kualitas Air	Indeks	90,0	80			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	111,0	85			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
		Intensitas Emisi	Ton co2/juta rupiah	0,449	0,343		hidup 3. Pengelolaan keanekaragaman hayati 4. Pengendalian bahan berbahaya dan beracun 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup 6. Pengakuan keberadaan hukum masyarakat adat, kearifan local yang terkait dengan PPLH	
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	28,51	30	Peningkatan pengelolaan sumberdaya kehutanan secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat sekitar hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan	1. Pengelolaan Hutan 2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem 3. Pendiikan dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidnag Kehutanan	Dinas Kehutanan & LH
	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	Persen		3				
	Laju Deforestasi	ribu hektar		25				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
							4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	
	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	Persen		10	1. Peningkatan akses tata niaga dan kualitas infrastruktur perdagangan 2. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya 3. Peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan perbankan dan fasilitasi pemasaran produk 4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Pengembangan destinasi pariwisata andalan dan ekonomi kreatif Provinsi Papua 6. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis wilayah adat	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri 4. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 5. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 6. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 7. Pemberdayaan UMK, UMKM 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 9. Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Perindagkop & UMKM
		Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	Persen		4			
		Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah		4			
		Persentase koperasi aktif dan berkembang	Persen		60			
		Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah		4000			
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	n/a	1500			
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari		3,5			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
				2,38				Dinas Pariwisata & Kebudayaan
Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	4,5	12	1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya 2. Peningkatan nilai gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan	1. Pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Perikanan tangkap 3. Pengelolaan perikanan budidaya 4. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 5. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan & Kelautan	
	NTP perikanan tangkap	Skor		105				
	NTP perikanan budidaya	Skor		100				
	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan		2,46				
Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen		80	1. Peningkatan daya saing tenaga kerja disertai perluasan kesempatan kerja 2. Pembangunan dan pengembangan SMK dan BLK serta Poltek berbasis komoditas unggulan	1. Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja 2. Program pengawasan ketenagakerjaan	Dinas Peridag, Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja;	
	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	96,6	98,34				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Juta	3.340.000	64.926.000	1. Penguatan dan peningkatan perijinan 2. Perbaiki tata kelola perijinan	1. Pengembangan iklim penanaman modal 2. Promosi penanaman modal 3. Pelayanan penanaman modal 4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 5. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Dinas PMPTSP
Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan		Rp. Juta	2.000.000	95.427.000				
Lama hari pengurusan ijin investasi		Hari		20				
Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	Persen	95	93,1	Peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi dan akses bagi seluruh masyarakat	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPRPKP
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	60,37	55		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	Persen	75	45		Program pengelolaan pelayaran Program pengelolaan penerbangan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD	
	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	97,86	50	Pengendalian pemanfaatan ruang		Dinas PUPRPKP	
	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah (meningkatkan pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan)	Persentase pemanfaatan sumber daya air	Persen	75	80	Ketahanan air (konservasi dan penyediaan air baku)	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)		
		Presentasi pengendalian daya rusak air / Presentase bangunan SDA yang fungsional	Persen	Tidak dilaksanakan	80				
		Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	7	17				
	Meningkatnya layanan irigasi	Persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	%	59,53	50/65	Pendayagunaan air dalam rangka ketahanan pangan			
	Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir	Presentasi pengendalian daya rusak air	%	81,27	80	Pengendalian banjir dan abrasi pantai			
	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	39,26	40	Peningkatan sistem jaringan air bersih,			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
		Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	64,92	45	pengelolaan persampahan dan air limbah	Program pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air Minum Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional Program pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Dinas PUPRPKP
		Backlog perumahan layak huni	Ribu juta	Tidak dilaksanakan	100	Peningkatan layanan PSU pada kawasan permukiman	Program pengembangan permukiman Program penataan bangunan dan Lingkungannya Program pengembangan perumahan Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Dinas PUPRPKP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Target		Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
				Realisasi 2021	2023			
	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	Unit	145	45	Penyediaan energi baru dan terbarukan	Pengelolaan Ketenagaan Kelistrikan	Dinas ESDM
	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen		60	Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	Program komunikasi & informasi publik	Diskominfo
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen		10			
Peningkatan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	Persen		70	Menciptakan dan melembagakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 2. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Badan Kesbangpol, Satpol PP & penanggulangan Bencana
	Meningkatnya Penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM(Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah			3	Peningkatan kesadaran masyarakat pada HAM	Program Penguatan Ideologi Pancasila

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
		Rata-rata nilai skor peduli HAM	Nilai		75			
	Meningkatnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Nilai Skor aspek kebebasan sipil	Skor	100	95	Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi daerah serta peningkatan pendidikan politik masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan 	Badan Kesbangpol, Satpol PP & penanggulangan Bencana
Nilai Skor aspek Hak-hak politik		Skor	51,83	50				
Nilai Skor aspek lembaga demokrasi		Skor	50	60				
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	kategori	Rendah	Rendah	Reformasi kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana melalui pengenalan operasi dan penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	<ol style="list-style-type: none"> Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan., Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran 	Badan Kesbangpol, Satpol PP & penanggulangan Bencana
Peningkatan tata kelola pemerintahan	Peningkatkan kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen		100	Penguatan tata kelola otsus melalui integrasi perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> Program Pemeintahan dan Otonomi Daerah Program utama dan penunjang Lembaga 	Bappeda; BPKAD; Inspektorat; Biro Hukum; Biro Layanan Pengadaan; sekretariat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
				97,8			Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua	MRP; Biro Tapem & Otsus;
		Cakupan kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah Kabupaten/ Kota		7			
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Presentase OPD dengan nilai SAKIP B	Predikat	B	BB	1. Transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pencegahan korupsi 2. Penguatan kapasitas penyelenggara pemerintahan dengan berbasis kinerja 3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 5. Peningkatan database kependudukan data OAP secara terpilah 6. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi dan aplikasi	1. Program Administrasi Umum 2. Program Penataan Organisasi 3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 5. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 7. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Inspektorat; Biro Organisasi; Biro Tapem & Otsus; Biro Hukum Biro Umum & Protokoler; Diskominfo; Sekretariat DPRP; BKD; Sekretariat DPRP; Kantor Pengubung
		Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks		6,2			
		Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen		85			
		Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan E-planing dll ke program)	persen	100	95			
		Cakupan Inovasi Pelayanan Publik yang Masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen		1			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
							8. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 9. Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 10. Program Kepegawaian Daerah 11. Program Pelayanan Penghubung 12. Program aplikasi informatika	
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen		100	100	Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang terintegratif secara sektoral dan spasial	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda; BPKAD; Bapenda
	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen			85		2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Rasio belanja langsung dalam kondisi APBD	Persen			50		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan	Persen			70		4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Pengelolaan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2021	Target 2023	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
		pefrencanaan pembangunan daerah					Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	1. Transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pencegahan korupsi 2. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapasitas APIP dan perkuatan SPIP 3. Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyusunan APBD 4. Pengelolaan pendapatan daerah	1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat; BPKAD
Ketepatan waktu penetapan APBD		Kategori		Tepat waktu				
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Persen	13,30	14				
	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Indeks kampung membangun	Indeks	3,84	52	1. Fasilitasi penataan kelembagaan kampung, lembaga adat dan masyarakat hukum adat 2. Penguatan kemandirian kampung berbasis komoditas lokal	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua	DPMK & OAP;
Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		persen		60				
Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial		ribu orang pertahun	3,432	50				

Adapun keterkaitan antara prioritas daerah dan program pembangunan daerah RPKD Provinsi Papua Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Keterkaitan Arah Kebijakan RKP dengan Program Prioritas RKPD
Provinsi Papua Tahun 2023

Arah Kebijakan RKP 2023	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM 2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatam Kesejahteraan Orang Asli Papua • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengelolaan Perbatasan • Program pengembangan perumahan
Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan)	Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Masyarakat Bdang Kesehatan • Program Penanganan kerawanan pangan



Arah Kebijakan RKP 2023	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i>	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja • Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan • Program Pengembangan iklim penanaman modal
Mendorong pemulihan dunia usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan 2. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, perkebunan, peternakan • Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual • Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif • Program Pengelolaan Hutan • Program Pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil • Program Perikanan tangkap • Program Pengelolaan perikanan budidaya • Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan UMK, UMKM • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata

Arah Kebijakan RKP 2023	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem • Program Perencanaan lingkungan hidup • Program Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup • Program Pengelolaan keanekaragaman hayati • Program Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (al. Air bersih dan sanitasi)	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyelenggaraan jalan • Program pengelolaan pelayaran • Program pengelolaan penerbangan • Pengelolaan Ketenagaan Kelistrikan • Program pengelolaan dan • Program Pengembangan sistem penyediaan air Minum • Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional • Program pengembangan permukiman • Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Pembangunan IKN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh program kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai sektor pembangunan

Tabel 4.12
Keterkaitan Arah Kebijakan RIPP dengan Program Prioritas RKPD
Provinsi Papua Tahun 2023

Arah Kebijakan RIPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
PAPUA SEHAT		



Arah Kebijakan RIPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
1. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Membudayakan hidup sehat & tata kelola pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Penanganan kerawanan pangan • Peningkatan diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat • Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
4. Meningkatkan pembudayaan & prestasi olahraga	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
PAPUA CERDAS		
Menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
PAPUA PRODUKTIF		
1. Meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja • Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan • Program Pengembangan iklim penanaman modal



Arah Kebijakan RIPPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
<p>2. Meningkatkan daya saing, industri, perdagangan dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan UMK, UMKM • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata
<p>3. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



Arah Kebijakan RIPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
<p>4. Mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, perkebunan, peternakan • Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual • Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif • Program Pengelolaan Hutan • Program Pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil • Program Perikanan tangkap • Program Pengelolaan perikanan budidaya • Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
<p>KONDISI PERLU</p>		
<p>1. Infrastruktur dasar & konektivitas</p>	<p>Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyelenggaraan jalan • Program pengelolaan pelayaran • Program pengelolaan penerbangan • Pengelolaan Ketenagaan Kelistrikan • Program pengelolaan dan • Program Pengembangan sistem penyediaan air Minum • Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional • Program pengembangan permukiman • Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
<p>2. Lingkungan Hidup</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan lingkungan hidup • Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup • Pengelolaan keanekaragaman hayati • Pengendalian bahan berbahaya dan beracun • Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup • Pengakuan keberadaan hukum masyarakat adat, kearifan local yang terkait dengan PPLH



Arah Kebijakan RIPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
3. Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Program Administrasi Umum • Program Penataan Organisasi • Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum • Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa • Program Kebijakan Administrasi Pembangunan • Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan • Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD • Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua • Program Kepegawaian Daerah • Program Pelayanan Penghubung • Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah • Program utama dan penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua • Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penelitian dan Pengembangan Daerah • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4. Tanah Adat/ulayat dan harmoni sosial	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua
<p>• PENGARUSUTAMAAN</p>		
1. Gender	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak • Program Perlindungan Khusus Anak



Arah Kebijakan RIPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Program Prioritas RKPD 2023
2. Sosial budaya	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Transformasi digital	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program aplikasi informatika
4. Resilien bencana & perubahan iklim	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanggulangan Bencana • Program Pencegahan, Penanggulangan., Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem • Program Perencanaan lingkungan hidup • Program Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup • Program Pengelolaan keanekaragaman hayati • Program Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting artinya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakang. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Untuk itu sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis **Wilayah Adat** di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi sektoral dan spasial. **5 (Lima) KPE (Kawasan Pengembangan Ekonomi)** berbasis wilayah adat yang dimaksud adalah :

- a. **Wilayah adat Saireri** yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen;
- b. **Wilayah adat Mamta** yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang sungai mamberamo hingga lautan pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya;
- c. **Wilayah adat Me Pago** yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat terdiri atas Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyiai;
- d. **Wilayah adat La Pago** yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang;
- e. **Wilayah adat Anim Ha** yang berada di wilayah selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

5.1. Kerangka Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan- tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak- hak adat masyarakat asli Papua. Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Gambar 5.1
Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap wilayah adat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah penyangga (hinterland) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan tersebut.
2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSN, PLBN, dan lokasi prioritas. Dalam hal ini diperlukan pengintegrasian fungsi PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan lokasi prioritas.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal.
5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang.
6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal, pengendalian kerusakan

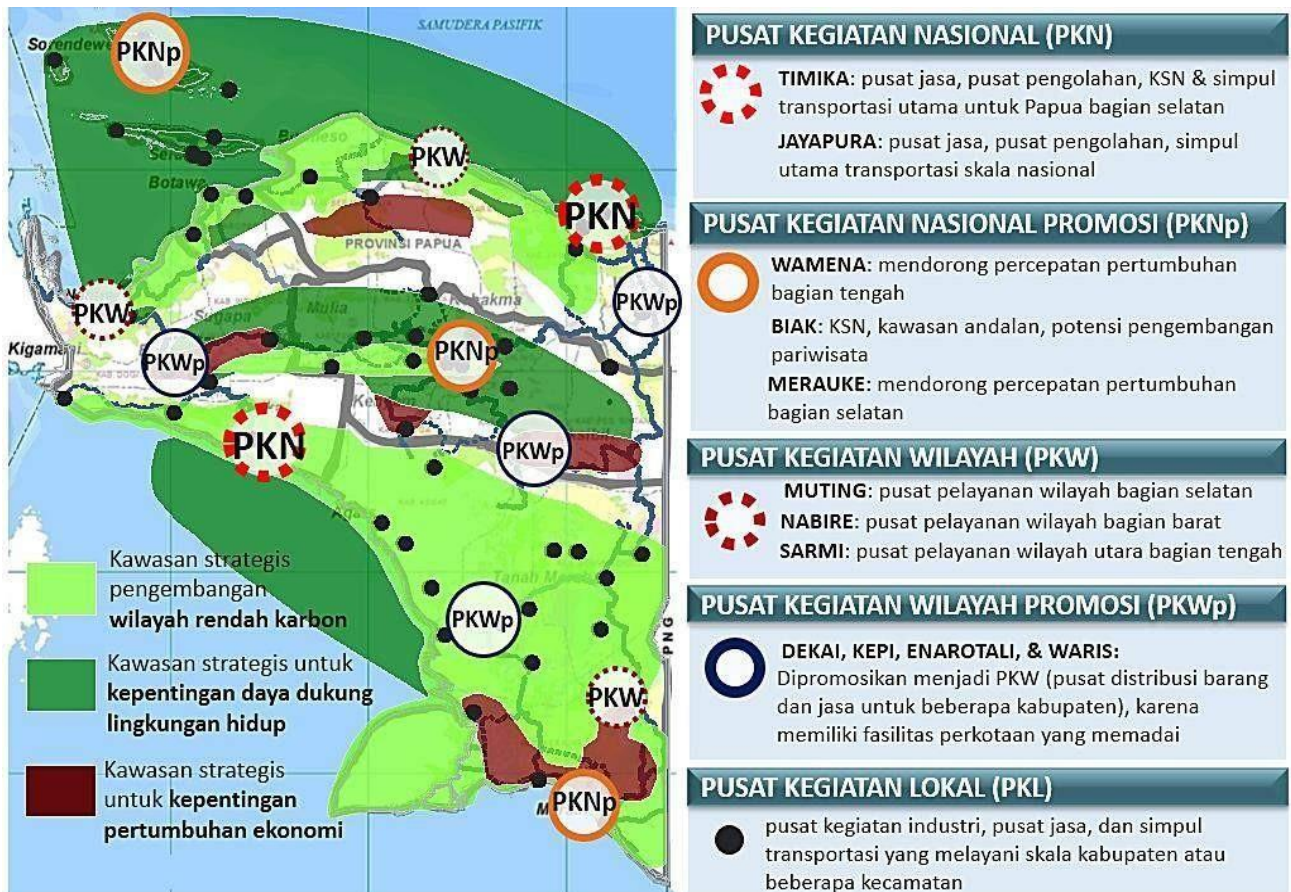
lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan.

5.2. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “Green Growth berbasis wilayah adat” diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

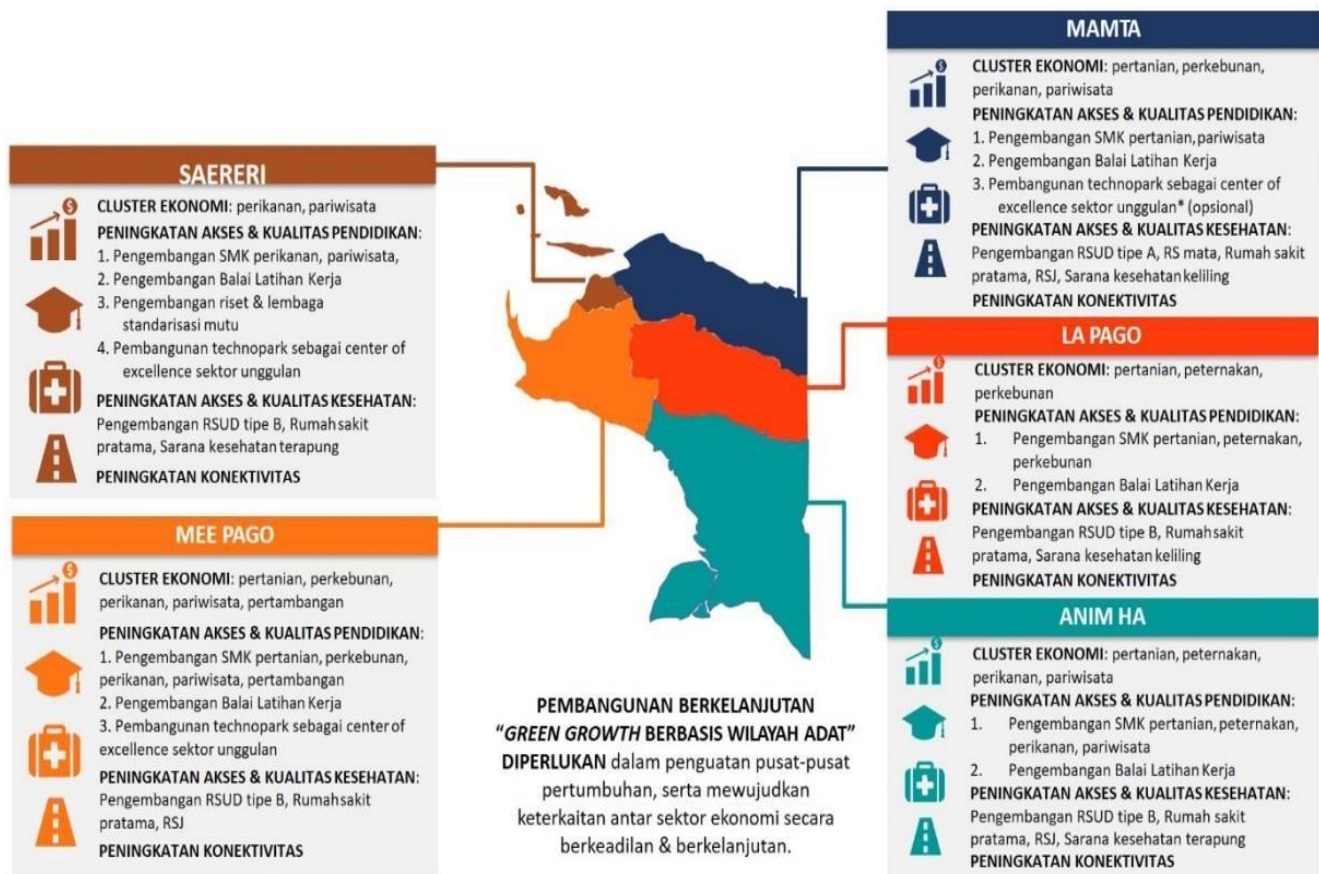
Dengan mengacu pada kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Papua, pengembangan kewilayahan Papua yang direncanakan secara holistic, integratif, tematik dan spasial maka dapat dirumuskan sebagaimana terlihat pada Gambar 5.2 bawah ini.

Gambar 5.2 **Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua**



Dengan mengacu pada kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Papua, pengembangan kewilayahan Papua yang direncanakan secara holistic, integratif, tematik dan spasial (HITS) maka dapat dirumuskan sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3 di bawah ini.

Gambar 5.3
Pengembangan Kewilayahan Papua secara Hilostic, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS)



Tabel 5.1

Pusat Pertumbuhan dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua

PUSAT PERTUMBUHAN	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<p>KEDUDUKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pintu gerbang ke kawasan internasional • berpotensi mendorong perkembangan wilayah sekitarnya • pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional <p>atau beberapa provinsi</p>				



			<p>Timika di Kab. Mimika</p> <ul style="list-style-type: none"> • KSN • simpul transportasi utama yang melayani Papua bagian selatan 	<p>Kota Jayapura dan Kab. Jayapura</p> <ul style="list-style-type: none"> • simpul utama transportasi skala nasional dengan adanya pelabuhan laut dan bandara Sentani 	
Pusat Kegiatan	KEDUDUKAN: dipromosikan menjadi PKN				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023



PUSAT PERTUM- BUHAN	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Nasional promosi (PKNp)	Wamena di Kab. Jayawijaya <ul style="list-style-type: none"> mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah Papua 	Merauke <ul style="list-style-type: none"> mendorong percepatan pertumbuhan di bagian selatan Papua 			Biak <ul style="list-style-type: none"> KSN kawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> mendukung PKN pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten 				
		Muting di Kab. Merauke <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan wilayah bagian selatan 	Nabire <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan wilayah barat menunjang wilayah sekitarnya dengan adanya jalan, pelabuhan, dan bandara 	Sarmi	
Pusat	KEDUDUKAN: dipromosikan menjadi PKW				



Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	Dekai di Kab. Yahukimo <ul style="list-style-type: none"> pusat simpul masuknya barang dan jasa pusat pengembangan industri di wilayah selatan 	Kepi di Kab. Mappi <ul style="list-style-type: none"> ibukota Kab. Mappi 	Enarotali di Kab. Paniai <ul style="list-style-type: none"> pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak 	Waris di Kab. Keerom <ul style="list-style-type: none"> memiliki fasilitas perkotaan memadai 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. (Semua ibukota kabupaten yang tidak termasuk PKN, PKNp, dan PKW maka ditentukan sebagai PKL) 				

5.3. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan SDM di Papua untuk mewujudkan “green growth” berbasis wilayah adat” dan pengembangan kluster ekonomi dilakukan dengan pembentukan SDM unggul melalui center of knowledge, politeknik agroindustri, technopark, SMK pertanian, dan balai latihan kerja yang terletak di lokasi- lokasi strategis dalam pembentukan kluster ekonomi setiap wilayah adat.

Secara umum SDM di kluster pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata di Papua harus menguasai kompetensi dasar untuk dapat menjalankan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran. Selain itu, keberadaan pusat kluster yang membantu memberikan informasi mengenai peluang pasar untuk hasil produk budidaya olahan pertanian tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertanian menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak harus dipelajari secara mandiri, namun terdapat lembaga antar kluster yang menjalin kemitraan dengan berbagai aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha pertanian eksternal, akademisi, swasta, organisasi sosial, dan lembaga keuangan eksternal untuk membantu SDM pelaku usaha pertanian. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi, namun juga dalam bentuk studi banding, penelitian & pengembangan, investasi, serta memberi bantuan input (benih, pupuk, modal, teknologi, dll). Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendorong SDM pelaku usaha pertanian di Papua yang saling bertukar input, output, pengetahuan, informasi dan teknologi serta bekerja sama dengan pelaku usaha pertanian

eksternal, sehingga dapat tercipta SDM yang kompeten, kompetitif, dan inovatif dalam implementasi green growth berbasis wilayah adat.

Tabel 5.2
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Politeknik Agroindustri terakreditasi B	Wamena di Kab. Jayawijaya* (*opsional)	Kab. Merauke* (*opsional)			
Technopark sebagai <i>center of excellence</i> sektor unggulan klaster ekonomi	v	v	V	V	v
SMK pertanian, pariwisata, dan/atau pertambangan	Wamena di Kab. Jayawijaya	Kab. Merauke	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura Kab. Sarmi	Kab. Biak Numfor
Balai Latihan Kerja (BLK)	Wamena di Kab. Jayawijaya Kab. Yahukimo	Kab. Merauke Kepi di Kab. Mappi Kab. Boven Digoel	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura	Kab. Biak Numfor
Lembaga standarisasi mutu					Kab. Biak Numfor

Tentu saja strategi pembangunan pendidikan menengah dan tinggi di atas tidak mengabaikan strategi yang saat ini telah dilakukan untuk mendukung pendidikan dasar, yaitu melalui penguatan sekolah kecil dan sekolah berasrama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan karakteristik wilayah, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kearifan lokal masyarakat Papua. Dalam implementasi upaya peningkatan tersebut diperlukan peran aktif masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal. Secara umum, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan pemberian tunjangan tenaga kesehatan, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan, pengembangan upaya kesehatan berbasis

masyarakat, pengembangan obat-obat tradisional, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV AIDS, TB paru, dan malaria.

Tabel 5.3
Rencana Pengembangan Sebaran Sarana Prasarana Kesehatan Dalam Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan Di Papua

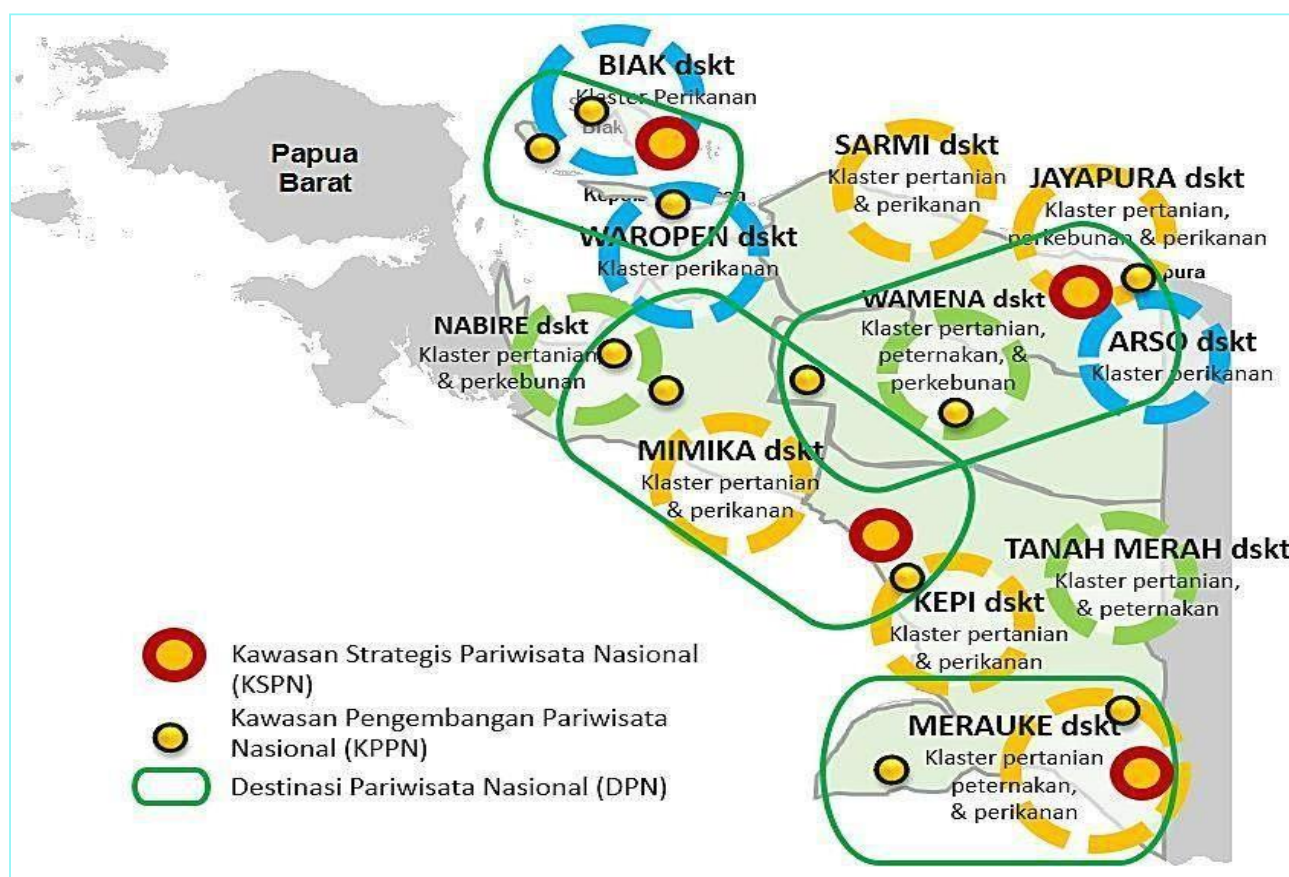
	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
RSUD tipe A				Kota Jayapura	
RSUD tipe B	v	v	V		v
Rumah sakit pratama	Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang	Mindiptana di Kab. Boven Digoel	Kab. Dogiyai	Kab. Sarmi	Kab. Supiori
		Muting di Kab. Merauke			
Rumah sakit mata				Kota Jayapura	
Rumah sakit jiwa		Kab. Merauke	Kab. Mimika	Kota Jayapura	
Sarana kesehatan terapung		v		v	
Sarana kesehatan keliling				v	v

Sebagaimana bidang pendidikan, penguatan di bidang kesehatan sekunder juga paralel dengan strategi pengembangan kesehatan primer dan kesehatan berbasis masyarakat melalui skema dukungan otonomi khusus.

5.4. Pengembangan Perekonomian Wilayah

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (cluster) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

Gambar 5.4
Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua



Tantangan dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua adalah dampak yang tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sehingga diperlukan upaya lebih agar klaster ekonomi terbentuk secara berkelanjutan. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Klaster tersebut memiliki jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan, tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi.

Tabel 5.4
Pengembangan Perekonomian Wilayah

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS LOKAL					
Sektor Primer	kopi, buah merah, ubi jalar, sagu	padi, karet, kopi, tebu, perikanan, peternakan, kelapa sawit	kopi, buah merah, ubi jalar, tambang, perikanan, sagu	kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, perikanan	hasil Laut, perikanan
Sektor Sekunder	industri pengolahan sagu, buah merah, ubi jalar, kopi	industri pengolahan tebu, kelapa sawit, peternakan, dan pengalengan ikan	industri pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan/ atau perkebunan	industri pengolahan ikan dan hasil perkebunan	industri kayu, pengolahan ikan
Sektor Tersier	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa
PENGEMBANGAN KLASTER EKONOMI DI PAPUA					
Klaster Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Wamena dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah Merah dan sekitarnya • Keki dan sekitarnya • Merauke dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Nabire dan sekitarnya • Mimika dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarmi dan sekitarnya • Jayapura dan sekitarnya 	
Klaster Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Wamena dan sekitarnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Nabire dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Jayapura dan sekitarnya 	
Klaster Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Wamena dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah Merah dan sekitarnya • Merauke dan sekitarnya 			
Klaster Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> • Keki dan sekitarnya • Merauke dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mimika dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarmi dan sekitarnya • Arso dan sekitarnya • Jayapura dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Biak dan sekitarnya • Waropen dan sekitarnya



Klaster Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya • KPPN Jayawijaya di Kab. Jayawijaya • KPPN Wamena di Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • KSPN Wasur-Merauke dan sekitarnya di Kab. Merauke • KPPN Kimaam dan sekitarnya di Kab. Merauke • KPPN Danau Bian dan sekitarnya di Kab. Merauke 	<ul style="list-style-type: none"> • KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya di Kab. Nabire • KPPN Paniai dan sekitarnya di Kab. Paniai • KSPN Agats-Asmat dan sekitarnya di Kab. Asmat • KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di 	<ul style="list-style-type: none"> • KSPN Sentani dan sekitarnya di Kab. Jayapura • KPPN Jayapura dan sekitarnya di Kota Jayapura 	<ul style="list-style-type: none"> • KSPN Biak dan sekitarnya di Kab. Biak • KPPN Numfor dan sekitarnya di Kab. Biak numfor • KPPN Serui dan sekitarnya di Kab. Kep.Yapen • KPPN Supiori dan
--------------------	---	---	--	---	--

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
	Jayawijaya		Kab. Mimika dan Jayawijaya		sekitarnya di Kab. Supiori

Dalam pengembangan klaster ekonomi terdapat interaksi di dalam klaster ekonomi, interaksi antar klaster ekonomi, interaksi di dalam wilayah adat, antar wilayah adat, maupun interaksi dengan wilayah luar Papua, berupa: (1) aliran barang dalam penciptaan nilai tambah yang ramah lingkungan (green added value); (2) aliran informasi & pengetahuan (sharing of knowledge) yang mendorong keterampilan dan inovasi; serta (3) aliran pemasaran. Interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal, serta dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya, tanpa mengabaikan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan klaster pariwisata, terdapat hubungan integrasi antara klaster pariwisata dengan klaster lainnya, yaitu sebagai lokasi promosi dan pemasaran output produksi



klaster ekonomi.

Pada implementasi kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “Green Growth berbasis wilayah adat”, maka arah pengembangan juga difokuskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian limbah. Tantangan terbesar dari implementasi ini adalah diperlukan arahan yang tepat dari para pemangku kepentingan agar teknologi ramah dapat digunakan sebaik mungkin oleh setiap pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir di dalam pengembangan klaster ekonomi.

5.5. Kebijakan Pengembangan Konektivitas

Pengembangan konektivitas Papua diarahkan untuk memadukan sistem pelayanan transportasi antarmoda, dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga.

Pada pengembangan klaster, infrastruktur menghubungkan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal dengan pusat pertumbuhan dan wilayah luar Papua, khususnya dalam pengembangan ekonomi OAP. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan.

5.6. Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan

Pengembangan wilayah pinggiran menjadi prioritas daerah dalam pembangunan pelayanan dasar terutama untuk menjamin bahwa pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan infrastruktur dasar sampai ke kampung-kampung yang ada di wilayah pinggiran. Salah satu Kawasan pinggiran yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan adalah kawasan perbatasan. Pembangunan Kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Terdapat 2 (dua) pendekatan pembangunan dalam mengembangkan kawasan perbatasan di Papua, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Pendekatan keamanan dilakukan melalui:

- Transformasi kelembagaan lintas batas negara menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu, yaitu *custom, immigration, quarantine, security (CIQS)*;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, yang melibatkan peran aktif masyarakat;

- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan;

Adapun pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) dilakukan melalui:

- Penguatan kegiatan ekonomi berbasis komoditas lokal di PLBN, PKSNI, dan lokpri yang mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga, serta didukung pembangunan infrastruktur & pelayanan dasar
- Pembangunan SDM yg handal & pemanfaatan IPTEK
- Pembangunan konektivitas antara PKSNI, lokpri, PKW, & PKN
- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
- Peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara tetangga

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka peran provinsi Papua akan lebih banyak pada pendekatan kesejahteraan masyarakat. Karena menyangkut Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN) , maka penyelenggaraan kewenangan ini tentu saja dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga akan mendorong daerah kabupaten di perbatasan agar mendayagunaan sumber daya ekonomi lokal dalam mendukung PKSN agar pembangunan PKSN memberikan kontribusi positif bagi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat kampung-kampung di sekitarnya.

Tabel 5.5
Pengembangan Wilayah Perbatasan

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	<p>KEDUDUKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menunjang sektor strategis nasional • menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi • daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang telah ada • berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga • pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga • simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya 				



	<p>Oksibil di Kab. Pegunungan Bintang</p> <ul style="list-style-type: none"> pusat pertumbuhan 	<p>Tanah Merah di Kab. Boven Digoel</p> <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina 		<p>Arso di Kab. Keerom</p> <ul style="list-style-type: none"> pusat pertumbuhan 	
	<p>wilayah sekitarnya</p>	<p>dan keamanan terpadu;</p> <ul style="list-style-type: none"> pusat perdagangan skala internasional pengembangan sekolah bertaraf internasional 		<p>wilayah sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> pengembangan sekolah bertaraf internasional 	
PKSN Promosi	<p>KEDUDUKAN: Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara</p>				

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI

		<p>Merauke di Kab. Merauke</p> <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan pusat perdagangan skala internasional pengembangan sekolah bertaraf internasional 		<p>Jayapura</p> <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan pusat perdagangan skala internasional 	
Lokasi Prioritas (lokpri) perbatasan	<p>KEDUDUKAN: Kawasan yang mempercepat pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik di Perbatasan</p>				
	<p>Kab. Pegunungan Bintang (9 distrik) Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop</p>	<p>Kab. Merauke (5 distrik) Eligobel, Muting, Sota, Uliin, Naukenjeri</p> <p>Kab. Boven Digoel (4 distrik) Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko</p>		<p>Kab. Keerom (5 distrik) Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe</p> <p>Kota Jayapura (2 distrik) Muara Tami, Jayapura Utara</p>	<p>Kab. Supiori (3 distrik) Supirori Barat, Supirori Utara, Kepulauan Aruri</p>
Pulau-Pulau Terkecil Terluar (PPKT)	<p>KEDUDUKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang berperan dalam kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia Penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain Penempatan sarana bantu navigasi pelayaran Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, dan industri jasa maritime 				
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	<p>KEDUDUKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pusat pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis sektor kelautan dan perikanan 				
		<p>SKPT Merauke</p>	<p>SKPT Timika</p>	<p>SKPT Sarmi</p>	<p>SKPT Biak Numfor</p>



Pos Lintas Batas Negara (PLBN)		PLBN Sota di Kabupaten. Merauke		PLBN Skouw di Kota Jayapura	
--------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------	--

5.7. Pemetaan Program Strategis dalam Kerangka Percepatan Pembangunan Papua

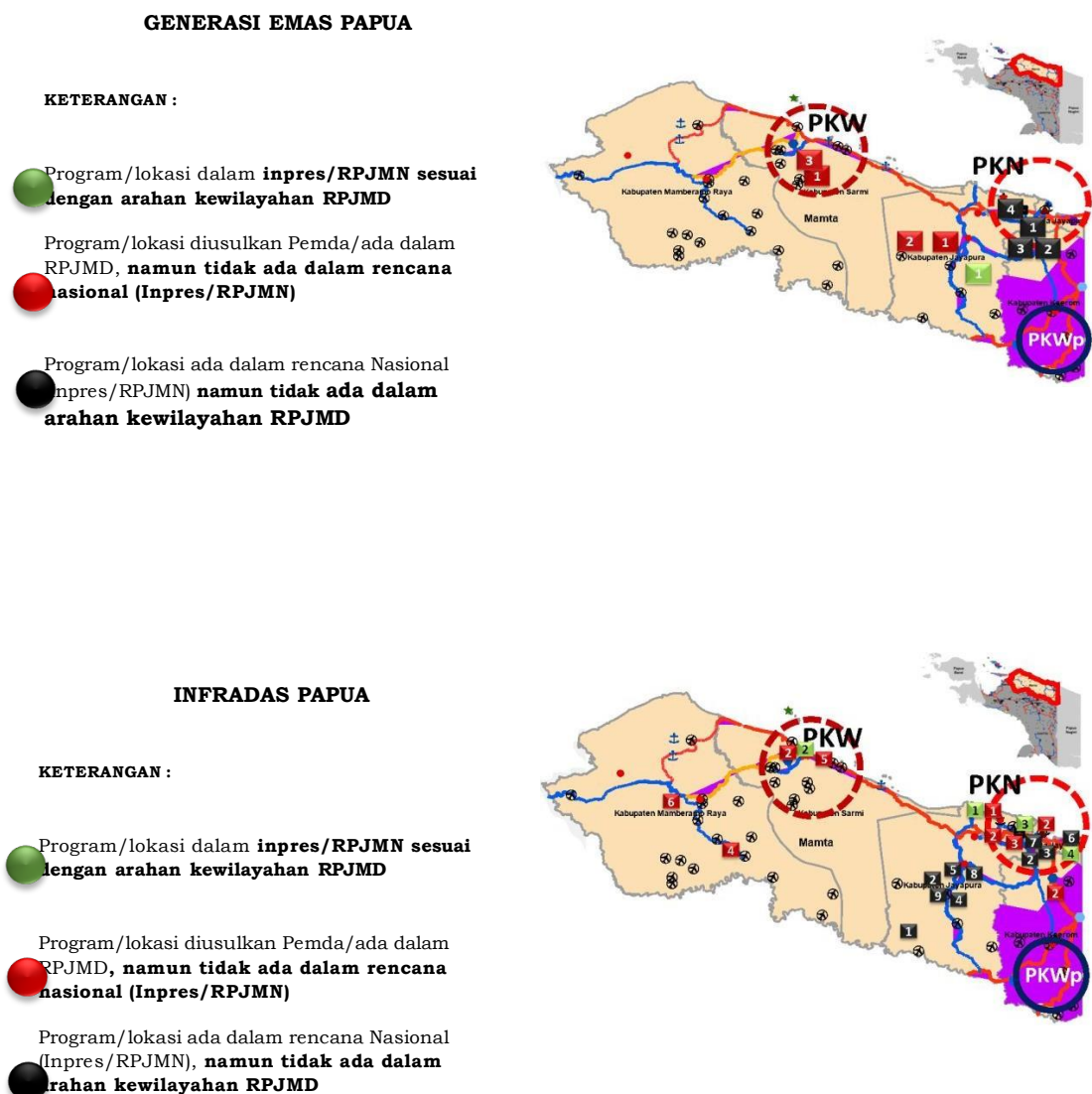
Berikut pemetaan program strategis berdasarkan pengembangan kewilayahan Provinsi Papua dalam kerangka percepatan pembangunan Papua:

1) Wilayah Adat Mamta

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
 1. Pembangunan dan Optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Kabupaten Jayapura;
 2. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Depapre (Kabupaten Jayapura);
 3. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Sarmi (Kabupaten Sarmi);
 4. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Perkotaan Jayapura;
 5. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pembangunan terminal barang dan penumpang di PLBN Skouw;
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
 1. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi;
 2. Penguatan dan Peningkatan RSUD di Kabupaten Jayapura Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Sarmi;
 3. Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre di Jayapura;
 4. Pembangunan terminal type B di Kab./kota Jayapura, Sarmi, Keerom;
 5. Pembangunan dermaga-dermaga di Danau Sentani;
 6. Pembangunan Bandara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya;
 7. Pembangunan Pelabuhan Wakde di Kabupaten Sarmi;
 8. Pembangunan pembangkit listrik hydropower di Kabupaten Membramo Raya
- c. Program/lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**
 1. Asrama Mahasiswa Nusantara di Kota Jayapura
 2. Papua Youth Creative Hub di Jayapura
 3. Pengembangan Pusat Kajian kebudayaan bertaraf internasional di Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura

4. Pembangunan Institut Teknologi Kesehatan di Kota Jayapura
5. Pembangunan Jalan Trans Merauke-Sorong
6. Pengembangan Jalan Perbatasan Papua di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura
7. Penyediaan moda kapal ternak di Kota Jayapura
8. Pengembangan Bandara Hub Primer (Bandara Sentani) di Jayapura
9. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Wilayah Strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) di Jayapura
10. Pengembangan terminal Skouw
11. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) di Kota Jayapura
12. Revitalisasi Danau Sentani di Kabupaten Jayapura
13. Pembangunan istana kepresidenan di Kabupten Jayapura

Gambar 5.5
Arah Pengembangan Konektivitas MAMTA



2) Wilayah Adat MEE PAGO






- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC (Vocational Training Council) berbasis komoditas lokal di Kabupaten Nabire
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
1. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC (Vocational Training Council) berbasis komoditas lokal di Kabupaten Mimika;
 2. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Nabire;
 3. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Mimika;
 4. Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kabupaten Nabire;
 5. Pembangunan Bandara Wanggar di Kabupaten Nabire;
 6. Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-sipu di Kabupaten Mimika;
 7. Rehabilitasi dan peningkatan Dermaga Samabusa di Kabupaten Nabire;
 8. Penyediaan dan pengelolaan air baku di kawasan perkotaan Kabupaten Mimika;
 9. Pembangunan pembangkit listrik hydropower PLTA Urumuka Kabupaten Paniai.
- c. Program/lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Penguatan puskesmas di Kabupaten Paniai
 2. Pembangunan sentra olahraga di Kabupaten Paniai
 3. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire
 4. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pomako di Kabupaten Mimika
 5. Pembangunan Bandara Nabire Baru di Kabupaten Nabire
 6. Pengembangan Bandara Enarotali di Kabupaten Paniai
 7. Peningkatan kapasitas Bandara Mozes Kolangin di Kabupaten Mimika
 8. sebagai bandara pendukung jembatan udara
 9. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Kabupaten Mimika (Distrik Sentani)
 10. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Kabupaten Paniai
 11. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Kabupaten Intan Jaya
 12. Revitalisasi Danau Paniai di Kabupaten Paniai

Gambar 5.6
Arah Pengembangan Konektivitas MEE PAGO

GENERASI EMAS PAPUA




KETERANGAN :

-  Program/lokasi dalam **inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD**
-  Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJMN)**
-  Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



INFRADAS PAPUA

KETERANGAN :

-  Program/lokasi dalam **inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD**
-  Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJMN)**
-  Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



3) Wilayah Adat LA PAGO

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
 1. Pembangunan Politeknik di Jayawijaya;
 2. Pembangunan BLK VTC berbasis komoditas lokal di Jayawijaya;
 3. Pembangunan / Revitalisasi SMK di Jayawijaya;
 4. Beasiswa pendidikan anak unggul Papua di seluruh kabupaten;
 5. Penambahan kuota guru, pemberian insentif dan peningkatan kualitas tenaga




- pendidik di seluruh kabupaten;
6. Penguatan dan Peningkatan RSUD di Jayawijaya;
 7. Penguatan Puskesmas di seluruh kabupaten;
 8. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (malaria, filariasis, kusta, HIV/AIDS, TB) di seluruh kabupaten;
 9. Penyediaan tenaga kesehatan melalui: (1) beasiswa program pendidikan dokter spesialis/ PPDS (2) penempatan wajib kerja dokter spesialis (3) penyediaan tenaga kesehatan individu (4) penugasan tim Nusantara Sehat di seluruh kabupaten;
 10. Optimalisasi jaringan internet di seluruh kabupaten;
 11. Perluasan elektrifikasi di seluruh kabupaten.
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
1. Pembangunan BLK VTC berbasis komoditas lokal di Yahukimo;
 2. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Tolikara;
 3. Pengembangan telemedicine di seluruh kabupate;
 4. Pelayanan kesehatan bergerak di seluruh kabupaten;
 5. Pembangunan Bandara Mamit di Tolikara;
 6. Pembangunan Bandara Fawi di Puncak Jaya;
 7. Pembangunan Bandara Wamena;
 8. Pembangunan Bandara Panggema dan Ninia di Yahukimo;
 9. Pembangunan Bandara Saminage di Yahukimo;
 10. Pembangunan Terminal Tipe B di Jayawijaya;
 11. Pembangunan Bandara Kobakma di Mamberamo Tengah;
 12. Pambangunan Bandara Kuyawge di Lanny Jaya;
 13. Pembangunan Bandara Taria Mamberamo Tengah;
 14. Pembangunan Dermaga Sungai Taria di Mamberamo Tengah;
 15. Pembangunan Bandara Nop Goliat di Yahukimo;
 16. Pembangunan terminal tipe B di Jayawijaya;
 17. Pembangunan ringroad di Jayawijaya;
 18. Penyediaan dan pengelolaan air di Puncak Jaya.
- c. Program/ lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN), **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Pembangunan/ pengembangan sekolah terintegrasi satu atap berpola asrama di

- Nduga, Yalimo, Jayawijaya, Puncak;
2. Pembangunan Bandara Elelim di Yalimo;
 3. Pembangunan Bandara Wamena di Yalimo;
 4. Pembangunan Bandara Nop Goliat di Jayawijaya;
 5. Pembangunan Bandara Korupun di Yahukimo;
 6. Pembangunan Bandara Oksibil di Peg. Bintang;
 7. Pembangunan Bandara Ilaga di Puncak;
 8. Pembangunan Bandara Mulia di Puncak Jaya;
 9. Penyediaan air baku di Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo dan Nduga.

Gambar 5.7
Arah Pengembangan Konektivitas LA PAGO

GENERASI EMAS PAPUA




KETERANGAN :

-  Program/lokasi dalam **inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
-  Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJM)**
-  Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



INFRADAS PAPUA

KETERANGAN :

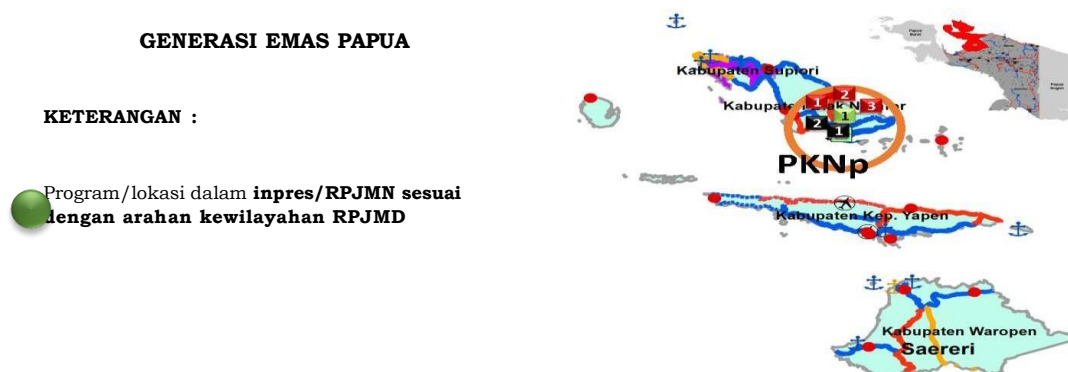
-  Program/lokasi dalam **inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
-  Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJM)**
-  Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



4) Wilayah Adat SAERERI

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Pembangunan dan Optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Biak Numfor
 2. Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waren di Waropen
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
1. Pembangunan / Revitalisasi SMK di Biak Numfor;
 2. Penguatan dan Peningkatan RSUD di Biak Numfor;
 3. Pengembangan Rumah Sakit Pratama di Supiori;
 4. Pembangunan Pelabuhan Waren di Waropen;
 5. Pembangunan Pelabuhan Miosbepondi di Supiori;
 6. Pembangunan Bandara Botawa di Waropen;
 7. Peningkatan Bandara Kamanap di Kep. Yapen;
 8. Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kep. Yapen;
 9. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Perkotaan Biak Numfor.
- c. Program/lokasi ada dalam rencana nasional **(inpres/RPJMN) namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Pembangunan Politeknik di Biak Numfor;
 2. Pembangunan dan pengembangan Universitas Negeri Kamasa di Biak Numfor;
 3. Pembangunan Jalan Trans Pulau Biak di Biak Numfor;
 4. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Samudera di Biak Numfor;
 5. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Seuir di Kepulauan Yapen;
 6. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Bandara Frans Kaisepo di Biak Numfor;
 7. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Strategis DPP Baru di Biak-Teluk Cendrawasih (Biak Numfor).

Gambar 5.8
Arah Pengembangan Konektivitas SAERERI





Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJMN)**


Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**

INFRADAS PAPUA

KETERANGAN :

 Program/lokasi dalam **inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD**

 Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJMN)**

 Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



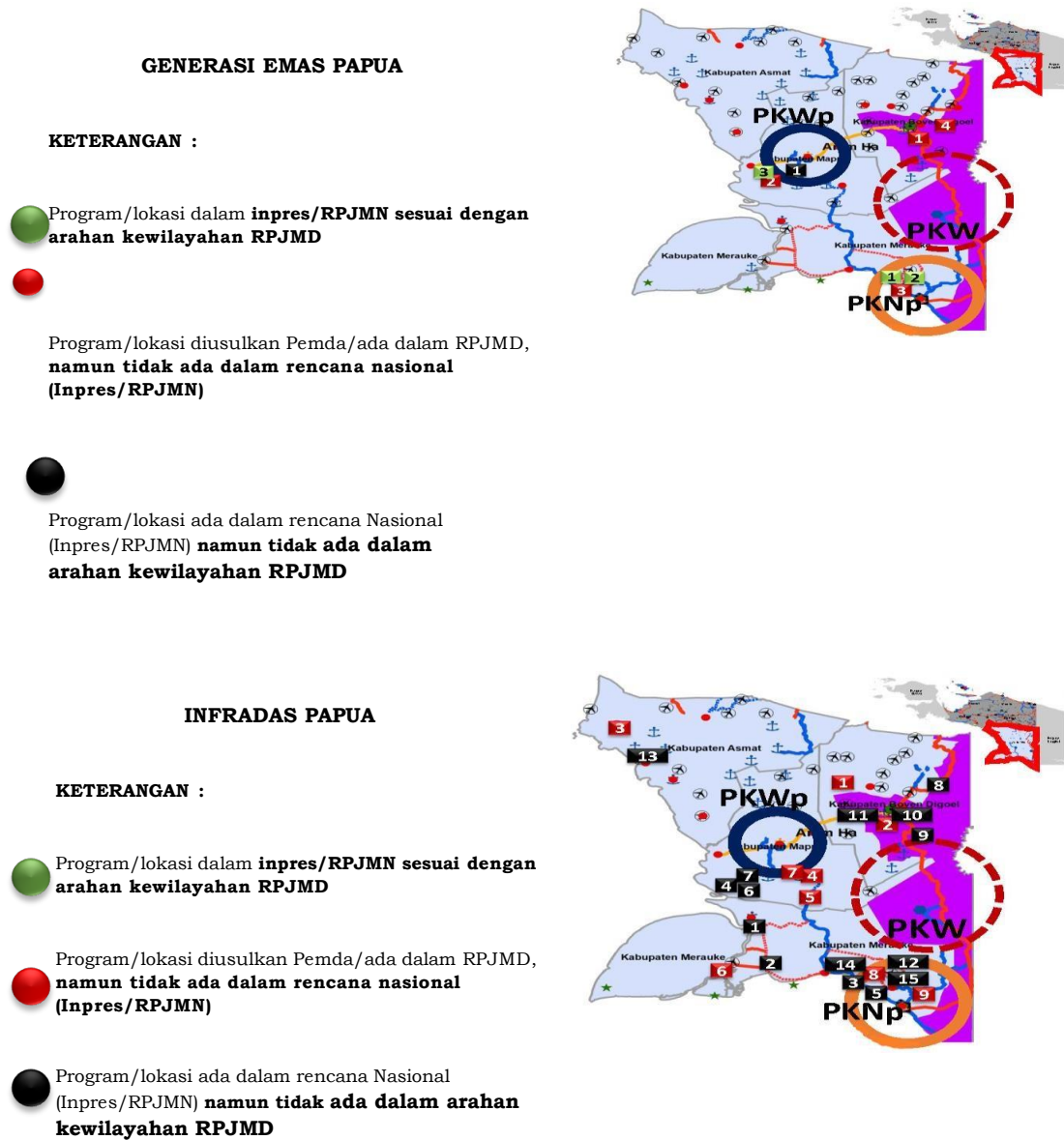
5) Wilayah Adat ANIM HA

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
 1. Pembangunan Politeknik di Kab. Merauke
 2. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Kabupaten Merauke
 3. Penguatan dan peningkatan RSUD di Kab. Mappi
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
 1. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC (Vocational Training Council) berbasis komoditas lokal di Kab. Boven Digoel
 2. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Kabupaten Mappi (Distrik Kepi)
 3. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Merauke
 4. Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Kabupaten Boven Digoel
 5. Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel
 6. Pembangunan Pelabuhan Kepi di Kabupaten Mappi
 7. Pembangunan Pelabuhan Kimam di Kabupaten Merauke
 8. Pembangunan Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi



9. Pembangunan Bandara Kepi di Kabupaten Mappi
 10. Pembangunan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat
 11. Penyediaan dan pengelolaan air baku di kawasan perkotaan Kabupaten Merauke
 12. Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Merauke
- c. Program/ lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Penguatan puskesmas di Kab. Mappi;
 2. Pembangunan Jalan Trans Merauke – Sorong di Kab. Merauke;
 3. Pembangunan Jembatan Bian di Kab. Merauke;
 4. Pembangunan Pelabuhan Merauke di Kab. Merauke;
 5. Pembangunan Pelabuhan Moor di Kab. Mappi;
 6. Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Merauke di Kab. Merauke;
 7. Pembangunan Pelabuhan Penyebarangan Bade di Kab. Mappi;
 8. Penyediaan moda kapal ternak di Kab. Merauke;
 9. Pembangunan Bandara Mindiptana di Kab. Boven Digoel;
 10. Peningkatan kapasitas pendukung jembatan udara di Bandara Tanah Merah, Boven Digoel;
 11. Peningkatan kapasitas pendukung jembatan udara di Bandara Manggelum, Boven Digoel;
 12. Peningkatan kapasitas pendukung jembatan udara di Bandara Korowai Batu, Boven Digoel;
 13. Pembangunan dan peningkatan kapasitas Bandara Mopah, Merauke;
 14. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN Kab. Asmat;
 15. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN Kab. Merauke;
 16. Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) perpipaan dan non- perpipaan di Kab. Merauke.

Gambar 5.9
Arah Pengembangan Konektivitas ANIM HA



5.8. Arahan Program Strategis Pembangunan Wilayah Adat Tahun 2023

Ini berisi kebijakan pembangunan 2023 lintas sector dan lintas wilayah dalam mewujudkan arahan pengembangan wilayah dalam RPJMD.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran "***money follow function kepada money follow program***", maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan : (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD Tahun 2023, dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki

daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan akhir RKPD Tahun 2023, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra- Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2023 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6.1.

6.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 6.2 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembangunan yang dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan yang diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut; maka perangkat kerja pemerintah daerah harus mampu menerapkan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pembangunan dalam dinamika serta suasana kerja yang kondusif, sinergi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sejak dimulainya proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Prinsip Good Governance merupakan komitmen yang mutlak diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan profesionalisme, transparansi, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan variabel-variabel pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran serta program kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Variabel-variabel dimaksud, kemudian disebut dengan Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal; maka ditetapkan suatu variabel pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas pada setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman dari pada sasaran prioritas pembangunan pada masing-masing sektor pembangunan.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari pada program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Berikut masing-masing indikator kinerja

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019, dapat dikemukakan pada tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2023
(Pergub Nomor 26 Tahun 2019)

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.21
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	80
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.59
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	100
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	75
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7495.8
6	Meningkatkan suasana aman, tertib dan kepastian hukum.	6.1.	Rasio Kasus/Kriminal yang ditangani.	%	70
7	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	7.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	78.68
8	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	8.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	95
		8.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	40
		8.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	60
9	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	9.1	Tingkat capaian realisasi program- program Otsus yang direncanakan.	%	100
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB
		10.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	%	95

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5	6
11	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	11.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	%	100
		11.2	Presentasi indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target.	%	85
12	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.	12.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		12.1	Ketepatan waktu penetapan APBD	Waktu	Tepat waktu
13	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	13.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	%	5
		13.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	5
		13.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	5
14	Menurunkan Angka Kemiskinan.	14.1	Persentasi Penduduk Msikin menurun	%	20
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	15.1	Membatkannya kualitas udara	indeks	95
		15.2	Membatkannya kualitas air	indeks	80
		15.3	Membatkannya tutupan lahan	indeks	85
		15.4	Menurunkan emisi gas rumah kaca	Ton CO2 / Rupiah	63.160,49
16	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya maritim dan kelautan secara berkelanjutan.	16.	Kontribusi sumber daya sektor maritim/kelautan dan perikanan terhadap PAD	%	12
17	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja	17.1	Kesempatan kerja meningkat	%	98,34
18	Meningkatkan Daya Saing dan realisasi sektor-sektor potensial andalan daerah	18.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan.	Rp/Triliun	64.926,00
		18.2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan.	Rp/Triliun	95.427,00
19	Meningkatnya akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan akses bagi seluruh wilayah.	19.1	Persentasi jalan provinsi dalam kondisi baik.	%	60
20	Implementasi Rencana Tata Ruang	20.1	Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang.	%	50

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5	6
	secara konsisten				
21	Meningkatnya ketersediaan ketersediaan system pengairan yang mendai dalam mendukung produktifitas wilayah.	21.1	Persentasi pemanfaatan sumber daya air.	%	80
22	Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni dan Penataan Pemukiman	22.1	Cakupan rumah tangga dengan rumah layak huni	%	50
		22.2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	%	40
		22.3	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	%	45,25
23	Meningkatkan kulaitas pembangunan berbasis kampung	23.1	Indeks Desa Membangun	indeks	52
24	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	24.1	Persentasi pemenuhan kebutuhan dasar OAP	%	73
25	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	25.1	Rata-rata Lama Sekolah di wilayah perbatasan.	tahun	12
		25.2	Angka Harapan Hidup di wilayah perbatasan	tahun	68
		25.3	Pengeluaran Perkapita di wilayah perbatasan.	Rp/juta	14
26	Meningkatnya bantuan social PMKS	26.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan social	Rp / Org / Thn	40
27	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah menghadapi bencana	27.1	Indeks Resiko Bencana (IBRI)	katergori	rendah.
28	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Perlindungan Anak.	28.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	200
		28.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	80

Sumber : RPJMD Papua tahun 2019 - 2023

Tabel 7.2

**Target Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah
Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Tahun 2021			Proyesi		Target RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian	2022	2023	

1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	60.44	63.27	60.22	98.17	61,13	61,65	65.47
2	Angka Kemiskinan	%	26.80	26.28	27.38	98.65	26.21	25.00	20.00
3.	Pertumbuhan Ekonomi (DT)	%	2.39	5.91	15.11	98.90	17.17	19.23	6.62
4.	PDRB Perkapita (TT)	Rp/Juta	42.87	30.27	41.53	137.20	45.34	48.23	53.43
5.	Gini Rasio	%	0.398	0,390	0.396	99,9	0,395	0,390	0.384
6.	Tingkat Pengangguran	%	4.28	2,32	3,33	97,68	3,25	3,18	2.00
7.	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 / Rp.	?	?	?	?	?	0.311	0.282

Sumber : Papua Dalam Angka Tahun 2021 (diolah)

Secara agregat, prospek perekonomian Papua pada tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2022. Secara umum peningkatan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2023 didorong oleh perbaikan kinerja sektor pertambangan terbesar di Papua dimana produksi tambang berasal dari tambang bawah tanah yang mengalami peningkatan produktivitas dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi dibandingkan tambang terbuka. Penanggulangan dan pengendalian pandemic COVID-19 di tahun 2022 diharapkan dapat menjadi pemicu terhadap pemulihan aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2023. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pada semester I tahun 2022 diperkirakan akan mampu menjaga stabilitas dan memicu laju pertumbuhan ekonomi tumbuh Provinsi Papua. Efektivitas dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yang akan terus digalakkan pemerintah pada triwulan II atau III 2022 menjadi penentu pemulihan perekonomian sepanjang tahun 2023.

7.1 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman Outcome pada tingkat OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. IKK merupakan sasaran kerja dan sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Kunci masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum

dalam tabel 7.3 berikut :

Tabel. 7.3.

**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023.**

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target 2023	SKPD (Penanggung Jawab)
1.	Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.			
1.1.	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan			Dinas PPAD
1.1.2.	Program Pengelolaan Pendidikan			
1.1.2.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ Paket C sederajat	%	100,00	
1.1.2.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/Paket C sederajat	%	0,50	
1.1.2.3.	Rasio Guru / Murid SMA / SMK	Guru/Murid	25,00	
1.1.2.4.	Cakupan Ruang Kelas SMA / SMK / dengan kondisi baik	%	40,00	
1.1.2.5.	Rasio Ketersediaan Sekolah / penduduk Usia SMA/SMK	Murid/Sekoah	200,00	
1.1.2.6.	Persentasi Angka Melek Aksara Penduduk Usia \geq 15 tahun	%	80,00	
1.1.2.7.	Persentasi Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 – 59 thn.	%	95,00	
1.1.2.8.	Persentasi Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	80,00	
1.1.2.9.	Persentasi Guru SMA/SMK yang bersertifikasi pendidik	%	84,00	
1.1.2.10.	Persentasi Guru SLB yang bersertifikasi pendidik	%	70,00	
1.1.2.11.	Cakupan Guru SMK yg bersertifikasi sesuai program keahlian	%	56,00	
1.1.2.12.	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal yg dikembangkan dalam PBM	%	20,00	
1.1.2.13.	Cakupan Model Pendidikan Konteks Papua yang dikembangkan	Unit	5,00	
1.1.2.14.	Jumlah Kemitraan Pendidikan yang dikembangkan dengan Lembaga Sosial dan Keagamaan.	Unit	56,00	
1.1.2.15.	Cakupan Supervisi dan Monitoring PBM	%	56,00	
1.1.2.16.	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S-1 yang Lulus tepat waktu.	%	95,00	
1.1.2.17.	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S-2 yang lulus tepat waktu.	%	65,00	
1.1.2.18.	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S-3 yang lulus tepat waktu.	%	62,22	
1.1.2.19.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	%	25,00	
1.1.2.20.	Capaian Peserta Program Afirmasi Pendidikan yang difasilitasi.	Org/tahun	250,00	
1.1.2.21.	Capaian Siswa/Mahasiswa ADIK/ADEM yang difasilitasi	Org	1500	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



1.1.2.22.	Capaian Sekolah Khusus yang terbina	Unit	10,00
1.1.2.23.	Cakupan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang lulus	%	10,00
1.1.2.24.	Rasio kecukupan rombongan belajar terhadap siswa SLB	Siswa/rombel	20,00
1.1.2.25.	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	%	12,25
1.1.2.26.	Angka Putus Sekolah (APS) siswa OAP jenjang SMA/SMK	%	0,50
1.1.2.27.	Cakupan siswa OAP pada SMA/SMK yang lulus dengan nilai di atas rata-rata	%	52,44
1.1.2.28.	Cakupan siswa lulus OAP yang diterima di PTN	Per 1000 siswa OAP	200,00
1.1.2.29.	Angka Melek Huruf penduduk OAP	%	60,00
1.1.2.30.	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	%	85,00
1.1.2.31.	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	%	45,92
1.1.2.32.	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	Sekolah / tahun	2,00
1.1.2.33.	Jumlah Siswa SMK OAP yg mengikuti pelatihan dan magang	Org / tahun	100,00
1.1.2.34.	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar OAP	%	70,19
1.1.2.35.	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	5,00

1.2. *Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan*

*Dinas Kesehatan /RSUD
Jayapura – Abepura /RSJ*

1.2.2. *Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.*

1.2.2.1.	Cakupan Cistrik yang sudah memiliki Puskesmas.	%	30,00
1.2.2.2.	Cakupan Puskemas yang terakreditasi	%	10,62
1.2.2.3.	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	150
1.2.2.4.	Cakupan UKBM Kabupaten/Kota yang terpetakan.	%	70,00
1.2.2.5.	Rasio Kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	%	40,00
1.2.2.6.	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Data Profil Kesehatan Lengkap	%	89,66
1.2.2.6.	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	%	75,00
1.2.2.7.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	45,00
1.2.2.8.	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki PHBS	%	41,38
1.2.2.9.	Persentasi Puskesmas yang mempunyai ketersediaan Obat dan Vaksin yang memadai	%	90,00
1.2.2.10.	Persentasi Penyaluran PAK yang diawasi.	%	100
1.2.2.11.	Persentasi Obat yang memenuhi syarat	%	90,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



1.2.2.12.	Persentasi Makanan yang memenuhi syarat	%	90.00
1.2.2.13.	Tanaman Obat Tradisional yang berkembang di masyarakat	Jumlah	25
1.2.2.14.	API Malaria	%	25.64
1.2.2.15.	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	32.64
1.2.2.16	Tingkat Prevalensi DBD	%	60.74
1.2.2.17.	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (NCDR)	Per 1000 penduduk	30.57
1.2.2.18.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi penduduk	Per 1000 penduduk	9.00
1.2.2.19.	Non Polio AFP Rate	Per 1000 penduduk	34.18
1.2.2.20	Persentasi Perempuan umur 30 – 50 tahun yang dideteksi dini terhadap Kanker Serviks dan Payudara.	%	30.00
1.2.2.21.	Persentasi Pelayanan Kesehatan terhadap penduduk yang terdampak Kejadian Luar Biasa	%	100.00
1.2.2.22.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lembaga Mitra di 5 (lima) wilayah adat.	Kab./Kota	16.00
1.2.2.23.	Prevalensi Penggunaan Narkoba	%	5.00
1.2.2.24.	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	%	5.00
1.2.2.25.	Persentasi Lansia yang memiliki dan memanfaatkan Jaminan Kesehatan.	%	55.00
1.2.2.26.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per-1000 / kelahiran	4,00
1.2.2.27.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran Hidup	Kasus	150.00
1.2.2.28.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ke K4	%	60.00
1.2.2.29.	Cakupan pelayanan Nifas	%	45.00
1.2.2.30.	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI).	%	65.00
1.2.2.31.	Prevalensi Kekurangan Gizi pada anak	%	5,5
1.2.2.30.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di BaLiTa.	%	25.00
1.2.2.32.	Prevalensi Malnutrisi (wasting / obesitas) pada anak BaLiTa.	%	0.65
1.2.2.33.	Persentasi Bayi Usia < 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	40.00
1.2.2.34.	POSYANDU yang aktif	%	70.00
1.2.2.35.	Cakupan Kunjungan Bayi (KNI).	%	52.00
1.2.2.36.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	%	52.00
1.2.2.37.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (2.100 Kkal/perkapita/hari)	%	2.300
1.2.2.38.	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi.	%	50.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



1.2.2.39.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan untuk keluarga miskin.	%	70.00
1.2.2.40.	Cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Rumah Sakit	Unit	27
1.2.2.41.	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Rujukan di 5 Wilayah Adat.	Unit	8
1.2.2.42.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu persatuan penduduk	30.000/ penduduk	29.1
1.2.2.43.	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	100.000/ penduduk	4.5
1.2.2.44.	Rasio Dokter persatuan penduduk.	100.000/ penduduk	30.25
1.2.2.45.	Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk	1.000 / penduduk	1.2
1.2.2.46.	Ratio Dokter per 100.000 penduduk	100.000 / penduduk.	30.25
1.2.2.47.	Cakupan kecukupan Laboratorium dalam mendukung pelayanan Kesehatan	%	90.00
1.2.2.48.	Cakupan ketersediaan data bidang Kesehatan di tingkat Provinsi yang valid dan reliabel.	%	95.00
1.2.2.49.	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	%	60.00
1.2.2.50.	Cakupan Kabupaten Kabupaten / Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya Kesehatan jiwa	%	4
1.2.2.51	Cakupan Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi,	%	60.00
1.2.2.52.	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	%	40.00
1.2.2.53.	Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target.	%	80.00
1.2.2.54.	Bed Occupancy Ratio (BOR)..	Rasio	--
1.2.2.55.	Cakupan Rumah Sakit Kelas C	%	55.17
1.2.2.56.	Cakupan Pelayanan Kesehatan RSUD yang telah sesuai dengan standar nasional.	%	90.00
1.2.2.57.	Kecukupan Tenaga Medis sesuai dengan standar rumah sakit.	%	72.50
1.2.2.58.	Kecukupan Sarana/Prasarana sesuai dengan standar.	%	78.00
1.2.2.59.	Cakupan Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.	%	86.00
1.2.2.60.	Cakupan masyarakat yang terakses dengan sanitasi yang baik.	%	38.75
1.2.2.61.	Persentase Pelayanan Kesehatan terhadap penduduk yang berdampak bencana (SPM Provinsi)	%	100
1.2.2.62.	Persentase pelayanan Kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi).	%	100
1.2.2.63.	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	%	35.57
1.2.2.64.	Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	%	75,00
1.2.2.65.	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	%	70,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



1.2.2.66.	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	%	100
1.3.	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas PUPR
1.3.2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air		
1.3.2.1	Daerah Irigasi Provinsi yang berfungsi.	hektar	5.000,00
1.3.2.2.	Persentasi luas lahan yang terlayani irigasi	%	95,00
1.3.2.3.	Tingkat produktifitas lahan sawah yang teraliri irigasi	ton/hektar	60,00
1.3.2.4.	Persentasi jaringan irigasi Provinsi dengan kualitas baik	m	80,00
1.3.2.5.			
1.3.2.6.	Cakupan Kawasan rawan banjir yang tertangani.	%	65,00
1.3.2.7.	Cakupan Kawasan rawan abrasi yang tertangani.	%	45,00
1.3.2.8			
1.3.2.9.	Persentasi penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah (SPM Provinsi)	%	100,00
1.3.3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.		
1.3.3.1.	Cakupan Layanan air minum (SPM Provinsi)	%	100
1.3.3.2.	Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai / lokasi	20,00
1.3.3.3.	Cakupan keterlayanan air baku	%	45,00
1.3.3.4.	Cakupan keterlayanan air bersih	%	60,00
1.3.3.5.	Meningkatnya ketersediaan air bersih	%	60,00
1.3.3.6.	Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng.	Per-1000/kk	380,00
1.3.4.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-
1.3.3.1.	Persentasi sampah yang terangkut ke TPA	%	40,00
1.3.3.2.	Penyediaan sarana dan prasarana TPA/TPST/SPA lintas Kab./Kota	lokasi	1,00
1.3.3.3	Cakupan pengelolaan sampah di Kawasan strategis dan perkotaan.	%	50,00
1.3.5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah		
1.3.5.1.	Persentasi penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah (SPM Provinsi)	%	100,00
1.3.6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-
1.3.7.	Program Pengembangan Pemukiman	-	-
1.3.7.1.	Cakupan penataan lingkungan pemukiman kumuh.	%	75,00
1.3.7.2.	Persentasi lingkungan pemukiman yang sehat	%	45,00
1.3.8.	Program Penataan Bangunan Gedung	-	-
1.3.9.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-	-

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



1.3.9.1.	Cakupan Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh.	%	80,00	
1.3.9.2.	Presentasi Penduduk Relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni.	%	100,00	
1.3.9.3.	Persentasi penduduk yang terakses lingkungan sehat.	%	50,00	
1.3.9.4.	Komunitas Perumahan yang diberdayakan.	%	5,00	
1.3.10.	Program Penyelenggaraan Jalan			
1.3.10.1.	Panjang jalan Provinsi yang berfungsi	km	20,00	
1.3.10.2.	Panjang jembatan yang berfungsi	m	500,00	
1.3.10.3.	Persentasi Panjang jalan Provinsi yang dalam kondisi mantap	%	50,00	
1.3.10.4.	Persentasi Panjang jembatan Provinsi yg dalam kondisi mantap.	%	60,00	
1.3.10.7.	Cakupan perencanaan tehnik jalan dan jembatan	%	80,00	
1.3.11.	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	-	-	
1.3.11.1.	Terlaksananya pengendalian dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur perhubungan	%	100,00	
1.3.11.2.	Cakupan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan.	%	70,00	
1.3.11.3.	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi.	%	80,00	
1.3.12.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
1.3.12.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan pola tata ruang.	%	100,00	
1.3.12.2.	Persentasi implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	%	100,00	
1.3.12.3.	Persentasi ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan.	%	100,00	
1.3.12.4.	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang tersusun,	dokumen	1,00	
1.3.12.5.	Cakupan Pelaksanaan Pemanfaatan ruang.	%	100,00	
1.4.	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan			Dinas PUPR
1.4.2.	Program Pengembangan Perumahan			
1.4.2.1.	Cakupan rumah layak huni yang terbangun.	unit	3000	
1.4.2.2.	Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng,	Per 1000 / kk	300	
1.4.2.3.	Persentasi penduduk yg direlokasi akibat program pemerintah memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	%	100,00	
1.4.2.4.	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	%	37,22	
1.4.2.5.	Persentasi Penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	%	100,00	
1.4.2.6.	Persentasi Rumah Tangga dengan fasilitas Tempat BAB.	%	78,08	
1.5.2.	Progran Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.			Satpol PP / Kesbangpol
1.5.2.1.	Jumlah konflik horizontal	Kasus	2,00	
1.5.2.2.	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	%	100,00	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



1.5.2.3.	Rasio jumlah polisi pamong praja	Per 1000 penduduk	20.00
1.5.2.4.	Angka korban kejahatan pembunuhan	Per 1000 penduduk	1.2
1.5.2.5.	Tingkat partisipasi masyarakat dlm menjaga ketertiban dan keamanan	%	65.00
1.5.2.6.	Rasio jumlah linmas	Per 1000 penduduk	78.00
1.5.2.7.	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	%	85.00
1.5.2.8.	Jumlah pertemuan FKUB pertahun	kali	2.00
1.5.2.9.	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan dan wawasan kebangsaan.	orang	250.000
1.5.2.10.	Cakupan fasilitas Forkompinda	Kali	5.00
1.5.2.11.	Persentasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	%	3.00
1.5.2.12.	Persentasi penanganan kasus pelanggaran HAM	%	50.00
1.5.2.13.	Cakupan muatan Pendidikan politik dan demokrasi dalam Pendidikan menengah.	%	10.00
1.5.2.14.	Persentasi Lembaga dan partai politik yang dibina	%	90.00
1.5.2.15.	Tingkat Pembinaan terhadap LSM dan Ormas	%	90.00
1.5.2.14.	Cakupan pertemuan dengan Lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	2,00
1.5.2.15.	Persentasi penduduk yang memperoleh layanan akhibat penegakan Peraturan Daerah (Perda)	%	100.00

1.5.3. Program Penanggulangan Bencana BPBD

1.5.3.1	Cakupan lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	lokasi	2,00
1.5.3.2.	Persentasi Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana	%	100,00
1.5.3.3.	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/social.	unit/tahun	50,00
1.5.3.4.	Peresentasi kesiapsiagaan penanganan bencana	%	100,00
1.5.3.5.	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	%	100.00
1.5.3.6.	Cakupan pengembangan EWS (Early Warning System) kebencanaan.	%	40.00
1.5.3.7.	Persentasi penanganan krisis Kesehatan akibat bencana	%	100.00
1.5.3.8.	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	%	80,00
1.5.3.9.	Rata-rata waktu tanggap (Response Time Rate) Kabupaten/Kota dalam daerah layanan.	%	50.00
1.5.3.10.	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang trampil.	%	65.00
1.5.3.11.	Cakupan Kesiagaan dalam menghadapi bencana laut	%	90,00
1.5.3.12.	Persentasi penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		Dinas Sosial.	
1.6.2. Program Pemberdayaan Sosial.			
1.6.2.1.	Persentasi KAT yang memperoleh bantuan social.	%	55,00
	Persentasi KAT yang mandiri	%	45,00
1.6.2.2.	Persentasi PMKS yang tertangani	%	50,00
1.6.2.3.	Persentasi PMKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	55,00
1.6.2.4.	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan ketrampilan usaha	kk	200,00
1.6.2.5.	Persentasi Panti Sosial yang menerima pemberdayaan social melalui kelompok usaha Bersama.	%	90,00
1.6.2.6.	Persentase wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang enyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social.	%	85,00
1.6.2.7.	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	%	100,00
1.6.2.8.	Cakupan pengembangan jaminan social bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan.	%	50,00
1.6.2.9.	Persentasi penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.	%	35,00
1.6.2.10.	Cakupan Kabupaten / Kota yang terakses perlindungan dan jaminan social.	kab./kota	24
1.6.2.11.	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan social.	dokumen	2
1.6.2.12.	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	250
1.6.2.13.	Jumlah Kelembagaan Sosial yang Aktif.	kelompok	40,00
1.6.2.14.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Keluarga Miskin.	%	90,00
1.6.2.15.	Cakupan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi social	orang	50,00
1.6.2.16.	Jumlah Anak dan Remaja Terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi social.	orang	250,00
1.6.2.17.	Cakupan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi social.	%	50,00
1.6.2.18.	Cakupan jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi social	%	80,00
1.6.2.19.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Kesejahteraan Sosial	%	90,00
1.6.2.20.	Cakupan Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan social.	dokumen	2,00
1.6.3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindakan Kekerasan.			
		-	-
1.6.4. Program Rehabilitasi Sosial.			
1.6.4.1	Cakupan Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi social.	%	75

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



1.6.4.2	Persentasi anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi social.	%	100.00
1.6.4.3	Cakupan penyandang cacat Netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi social	%	100.00
1.6.4.4.	Cakupan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	50
1.6.5.	Program Jaminan Sosial	-	-
1.6.6.	Program Penanganan Bencana	-	-
1.6.7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-
2.	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar		
2.7.	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja		Disnaker
2.7.2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja.		
2.7.2.1	Frekwensi promosi bursa tenaga kerja.	kali	2
2.7.2.2.	Persentasi Kenaikan UMP	%	4,00
2.7.2.3.	Persentasi pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.	%	60.00
2.7.2.4.	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	%	80,00
2.7.2.5.	Persentasi Peningkatan Kinerja Organisasi Ketenagakerjaan	%	100,00
2.7.3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		
2.7.3.1.	Persentase lulusan Balai Diklat Tenaga Kerja yang terserap dalam lapangan kerja.	%	100,00
2.7.3.2.	Persentasi Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	50.00
2.7.3.3.	Pertumbuhan Ekonomi wilayah transmigrasi	%	5,90
2.7.3.4.	Jumlah transmigrasi lokal yang ditempatkan	orang	500,00
2.7.4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	-	-
2.7.4.1.	Persentasi peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja.	%	90,00
2.7.4.2.	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	80,00
2.7.4.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,00
2.7.5.	Program Hubungan Industrial		
2.7.5.1.	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	60,00
2.7.6.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan.	-	-
2.8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		Dinas PP & PA
2.8.2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
2.8.2.1.	Proporsi perempuan di Lembaga Legislatif	%	20,00
2.8.2.2.	Proporsi Perempuan yang berada di posisi pimpinan	%	30,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.8.2.3.	Implementasi Kebijakan yang responsive Gender	%	100,00
2.8.2.4.	Persentasi Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100,00
2.8.2.5.	Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	orang	150,00
2.8.3.	Program Perlindungan Perempuan	-	-
2.8.3.1.	Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	kasus	30,00
2.8.4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-
2.8.4.1.	Persentasi Posyandu Aktif	%	95,00
2.8.4.2.	Cakupan Penguatan Kader Posyandu di Kampung	%	100,00
2.8.4.3.	Persentasi PKK yang aktif	%	100,00
2.8.4.4.	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera I yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I	%	100,00
2.8.5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.	-	-
2.8.6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).	-	-
2.8.7.	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-
2.8.7.1.	Persentasi Kasus Trafficking dan Eksploitasi anak.	%	1,00
2.8.7.2.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate -ASFR)	per-1000 perempuan	30,00
2.8.7.3.	Persentasi pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan.	%	100,00
2.9	Urusan Pemerintah Bidang Pangan		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan
2.9.2.	Program Pengelolaan Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		
2.9.2.1	Tingkat Produktifitas Tanaman Perkebunan	kg/hektar	510,00
2.9.2.2.	Tingkat Produktifitas Tanaman Pertanian.	kg/hektar	510,00
2.9.2.3.	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	%	40
2.9.2.4.	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	2
2.9.2.5.	Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembangkan	bibit	50.000,00
2.9.2.6.	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	%	45,00
2.9.2.7.	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	2,00
2.9.2.8.	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	ton	3.760.000
2.9.2.9.	Frekwensi Promosi Produk Pertanian.	kali	2,00
2.9.3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
2.9.3.1	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	%	50,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.9.3.2.	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton/hektar	10,00
2.9.3.3.	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	%	75,00
2.9.3.4.	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta/hektar	4,00
2.9.3.5.	Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura	%	35,00
2.9.3.6.	Tingkat Swasembada Pangan	%	45,00
2.9.3.7.	Meningkatnya Produktifitas Komoditas Perkebunan	hektar	3.000,00
2.9.3.8.	Meningkatnya Hasil Produktifitas Perternakan.	%	3,5
2.9.3.9.	Persentasi Hasil Produksi Pangan Lokal berkualitas yang terserap.	%	15,00

2.9.4. Program Penangan Kerawanan Pangan

2.9.4.1.	Cakupan daerah rawan pangan	%	20,00
2.9.4.2.	Prevalensi penduduk kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	42,80
2.9.4.3.	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	%	7,07

2.9.5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

2.9.5.1.	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	%	25,00
5.9.5.2.	Skor PPH	Skor	20,00
2.9.5.3.	NTP peternakan	%	100,00
2.9.5.4.	NTP tanaman pangan	%	100,00
2.9.5.5.	NTP perkebunan	%	100,00
2.9.5.6.	Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak.	kegiatan	10,00
2.9.5.7.	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	%	70,00

2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

**Badan
Pertanahan**

2.10.2. Program Pengelolaan Izin Lokasi.

2.10.3. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

2.10.4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

2.10.4.1.	Persentasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	%	80,00
-----------	--	---	-------

2.10.5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

2.10.6. Program Restribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Maksimum dan Tanah Absentee

2.10.7. Program Penetapan Tanah Ulayat

2.10.7.1.	Cakupan Tanah Adat yang terpetakan.	%	60,00
-----------	-------------------------------------	---	-------

2.10.8. Program Pengelolaan Tanah Kosong.

2.10.10. Program Penatagunaan Tanah

2.10.10.1.	Terbangunnya Sistem Penataan Pertanahan.	%	50,00
2.10.10.2	Tingkat Ketertiban Penataan Pertanahan.		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.10.13.	Program Survey Pengukuran dan Pemetaan Tanah		
2.10.13.1	Cakupan Tanah Adat yang terpetakan	%	50,00
2.11.	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup		Dinas Kehutanan & LH
2.11.2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
2.11.2.1.	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas.	kali	12,00
2.11.2.2.	Cakupan Kawasan Ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	Lokasi/kab-kota	1,00
2.11.2.3.	Cakupan Akses Informasi Lingkungan Hidup yang berkualitas	kali	12,00
2.11.3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.		
2.11.3.1.	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	20,00
2.11.3.2.	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi/kab-kota.	50/10
2.11.3.3.	Persentasi kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	%	80,00
2.11.3.4.	Persentasi kontribusi sektor energy terhadap penurunan emisi	%	40,00
2.11.3.5.	Persentasi kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	%	50,00
2.11.3.6.	Proporsi degradasi lahan yang tercemar.	%	2,00
2.11.3.7.	Cakupan Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA	lokasi/kab-kota	1,00
2.11.4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
2.11.4.1.	Terfasilitasinya Kegiatan Peninhkatan, Perlindungan dan Pengelolaan Hidup	%	100,00
2.11.5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (L-B3)	-	-
2.11.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	-	-
2.11.6.1	Tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan	%	80,00
2.11.6.2.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan dibina	orang	2,00
2.11.7.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-	-
2.11.8.	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	-
2.11.8.1.	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup yang bersertifikasi	orang	20,00
2.11.9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-
2.11.10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	-
2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.		Dinas DUKAPIL & KB
2.12.2.	Program Pendaftaran Penduduk		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.12.2.1.	Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam pengurusan kependudukan	persen	
2.12.3.	Program Pencatatan Sipil		
2.12.3.1	Persentasi kepemilikan Akte Kenal Lahir	%	55,34
2.12.3.2	Persentasi Keluarga ber-Akte Pernikahan.	%	65,00
2.12.4.	Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan		
2.12.4.1.	Cakupan Penduduk ber-KTP elektronik	%	85,78
1.12.4.2.	Persentasi KK berkepemilikan KK elektronik	%	45,67
2.12.5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan.		
2.12.5.1.	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	ada/tidak	ada
2.13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Dinas PMK
2.13.2.	Program Penataan Desa	-	-
2.13.3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-
2.13.4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	-
2.13.5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-
2.13.6.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua		
2.13.6.1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.13.6.2.	Cakupan Kampung yang diberdayakan dengan TTG	%	45,00
2.13.6.3.	Jumlah BUMKAM yang kelolah komoditas unggulan di kampung.	unit	10,00
2.13.6.4.	Persentasi kampung tertinggal	%	75,00
2.13.6.5	Cakupan Kampung Mandiri	kampung	5,00
2.13.6.6.	Cakupan Kampung Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	%	60,00
2.13.6.7.	Jumlah Aparatur Kampung dan Distrik yang mendapatkan Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Orang	250,00
2.13.6.8.	Cakupan kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat.	kampung	10,00
2.13.6.9.	Persentasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi	%	30,00
2.13.6.10.	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	kegiatan	6,00
2.13.6.11.	Cakupan Lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di Distrik dan Kampung.	%	100,00
2.13.6.12.	Persentasi Pengembangan Data / Informasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung.	5	100,00
2.13.8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua.	-	-
2.14.	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Dinas DUKCAPIL & KB
2.14.2.	Program Pengendalian Penduduk		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.14.2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.	%	80,00
2.14.3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana		
2.14.3.1.	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok / tahun	100,00
2.14.3.2.	Cakupan Kampung KB	%	40,00
2.14.3.3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	2.25
2.14.3.4.	Cakupan tenaga Penyuluh KB yang terlatih	orang / tahun	30
2.14.4.	Program Perberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	-
2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		Dinas Perhubungan
2.15.2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
2.15.2.1.	Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antar wilayah adat	Wilayah adat	3,00
2.15.2.2.	Cakupan Pelayanan moda angkutan	%	40,00
2.15.2.3.	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor.	jiwa	100,00
2.15.2.4.	Jumlah terminal tipe B yang berfungsi	unit	2,00
1.15.2.5.	Cakupan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	%	80,00
1.15.2.6.	Tersedianya angkutan untuk pelayanan transportasi.	%	22,00
1.15.2.7.	Jumlah Balai / Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang beroperasi.	unit	1,00
1.15.2.8.	Jumlah Kendaraan Bermotor yang dilakukan Uji Petik	unit	150,00
2.15.3.	Program Pengelolaan Pelayaran		
2.15.3.1.	Jumlah bandara pengumpul dengan skala primer	unit	1
2.15.3.2.	Jumlah dermaga penyeberangan kelas II	unit	1,00
2.15.3.3.	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	1,00
2.15.3.4.	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut.	%	4,00
2.15.4.	Program Pengelolaan Penerbangan		
2.15.4.1	Pertumbuhan arus penumpang udara	%	7,00
	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	1,00
2.16.	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi		Dinas INFOKOM
2.16.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.		
2.16.2.1.	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis	1
2.16.2.2.	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	%	60,00
2.16.2.3.	Persentasi penduduk yang mengakses internet	%	20,00
2.16.2.4.	Meningkatnya Komunikasi dan Informasi melalui Media Massa	media	2

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.16.2.5.	Terlaksananya pengembangan komunikasi dan informasi di Lingkungan Pemda	media	1
2.16.2.6.	Peningkatan kerjasama media dan publikasi pembangunan daerah	%	75,00
2.16.2.7.	Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua	tahun/thn	10,00
2.16.2.8.	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil pembangunan	kerjasama/ tahun	5,00
2.16.2.9.	Cakupan Layanan PPID	%	70,00
2.16.2.10.	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	%	40,00
2.16.2.11.	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	%	40,00
2.16.3.	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.</i>		
2.16.3.1.	Cakupan SDM Kominfo yang berkompeten di bidang teknologi informasi.	%	80,00
2.16.3.2.	Persentase jaringan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi antar OPD	%	20,00
2.16.3.3.	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	%	35,00
2.16.3.4.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	95
2.17.	<i>Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>		<i>Dinas Koperasi / UMKM</i>
2.17.2.	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.</i>	-	-
2.17.3.	<i>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</i>	-	-
2.17.4.	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</i>	-	-
2.17.5.	<i>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>	-	-
2.17.6.	<i>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</i>		
2.17.6.1.	Persentase Koperasi aktif dan berkembang.	%	70,00
2.17.6.2.	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat yang melaksanakan RAT)	%	50,00
2.17.6.3.	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang akan difasilitasi menjadi Koperasi.	unit	10,00
2.17.7.	<i>Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM)</i>		
2.17.7.1.	Persentase peningkatan dan pengembangan UMKM keolahragaan.	%	2,00
2.17.7.2.	Cakupan Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola secara mandiri oleh pengusaha muda.	unit	9507,00
2.17.7.3.	Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	Rp./milyar	14.056
2.17.7.4.	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	%	25,00
2.17.7.5.	Terlaksananya penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah	kegiatan/thn	1,00
2.17.8.	<i>Program Pengembangan UMKM</i>		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.17.8.1.	Persentasi UMKM local yang bermitra dengan PMA / PMDN	%	30,00
2.17.8.2.	Persentasi Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru	%	35,00
2.17.8.3.	Persentasi Meningkatnya Wirausaha Baru dan UMKM yang Kompetitif.	%	100,00

2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal BAPPINDA

2.18.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.18.2.1.	Persentasi Invenstasi	%	95,00
2.18.2.2.	Tingkat investasi sektor unggulan	%	7,50
2.18.2.3.	Tingkat Pertumbuhan Nilai Sektor Unggulan.	%	7,50
2.18.2.4.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	35,00
2.18.2.5.	Proporsi biaya transaksi dalam total investasi	%	1,00

2.18.3 Program Promosi Penanaman Modal

2.18.3.1.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	35,00
-----------	-----------------------------	---	-------

2.18.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

2.18.4.1.	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	10
2.18.4.2.	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor	70,00
2.18.4.3.	Meningkatnya jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Papua.	perusahaan	272,00

2.18.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2.18.5.1.	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	%	85,00
2.18.5.2.	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	%	100,00

2.18.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.18.6.1.	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	%	80,00
1.18.6.2.	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran nasional/internasional.	kali	5

2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

2.19.2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

2.19.2.1.	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	250,00
2.19.2.2.	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	57,00
2.19.2.3.	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	35,00

2.19.3 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

2.19.3.1.	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	50,00
-----------	--	------------	-------

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.19.3.2.	Cakupan monitoring atlet berprestasi	%	95.00	
2.19.3.3.	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	30.00	
2.20.	Usuran Pemerintahan Bidang Statistik			
2.20.2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	
2.21.	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian			
2.21.2.	Program penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	
	Cakupan penyelenggaraan pelayanan persandian daerah	%	100,00	
2.22.	Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan			Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2.22.2.	Program Pengembangan Kebudayaan			
2.22.2.1	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	2.00	
2.22.2.2.	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1.00	
2.22.3.	Program Pengembangan Kesenian			
2.22.3.1.	Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	7.00	
2.22.3.2	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	5.00	
2.22.3.3.	Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	kali	1.00	
2.22.4.	Program Pembinaan Sejarah	-	-	
2.22.5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			
2.22.5.1.	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0.00	
2.22.5.2.	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	50.00	
2.22.6.	Program Pengelolaan Permesiuman	-	-	
2.23.	Usuran Pemerintahan Urusan Perpustakaan			Dinas PPAD
2.23.2.	Program Pembinaan Perpustakaan.			
2.23.2.1.	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	%	50.00	
2.23.2.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	%	85.00	
2.23.3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			
2.24.	Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan	-	-	Dinas PPAD
2.24.2.	Program Pengelolaan Arsip			
2.24.2.1.	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepustakaan	%	3.00	
2.24.2.2.	Pemenuhan penyelenggaraan 7 (tujuh) aspek Kearsipan di Papua.	dokumen / thn	2,00	
2.24.3.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



2.24.3.1.	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	%	90,00
2.24.4.	Program Perizinan Penggunaan Arsip.	-	-
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan		
3.25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau.		
3.25.2.1	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	%	4,00
3.25.2.2.	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	%	2,25
3.25.2.3.	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	%	80,00
3.25.2.4	Persentase nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	per-1000 / nelayan	800,00
3.25.2.5.	Cakupan Fungsional Penyuluh yang mempunyai kompetensi memadai	%	85,00
3.25.2.6.	Persentasi meningkatnya penyuluhan perikanan lapangan	%	30,00
3.25.2.7.	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	%	2,50
3.25.2.8.	Cakupan Ketersediaan Data Perikanan dan Kelautan.	%	20,00
3.25.3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.		
3.25.3.1	Produksi perikanan tangkap	ton	8.000,00
3.25.4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
3.25.4.1.	Produksi perikanan budidaya	ton	150,00
3.25.4.2.	Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	kelompok/thn.	6,00
3.25.5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
3.25.5.1.	Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	%	2,00
3.25.5.2.	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	13,00
3.25.5.3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan.	kelompok	20,00
3.25.6.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
3.25.6.1	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	50.000,00
3.25.6.2.	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	8.000,00
3.25.6.3.	Cakupan Unit Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi	unit/tahun	8,00
3.25.6.4.	Persentasi Kenaikan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	%	3,00
3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



3.26.2.1.	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	15,00
3.26.2.2.	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	1,00
3.26.3.	Program Pemasaran Pariwisata		
3.26.3.1	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	50,00
3.26.4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		
3.26.4.1.	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	10,00
3.26.5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
3.26.5.1	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	10,00
3.26.5.2.	Cakupan Pengembangan Kawasan peruntukan khusus	%	
3.27.	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian.		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan
3.27.2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
3.27.2.1.	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	12,00
3.27.2.2.	Cakupan teknologi pertanian rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	15,00
3.27.2.3.	Terlaksananya penerapan tehnologi tepat guna sektor perkebunan.	jenis	10,00
3.27.3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
3.27.3.1	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	3.74
3.27.4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier.		
3.27.4.1.	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit temak	%	65
3.27.5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.		
3.27.6.	Program Perizinan Usaha Pertanian		
3.27.6.1.	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	%	45
3.27.7.	Program Penyuluhan Pertanian		
3.27.7.1.	Cakupan bina kelompok tani	%	20,00
3.27.7.2.	Persentasi Peningkatan Kinerja Kelembagaan Penyuluh	%	50,00
3.27.7.3.	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	%	3,00
3.27.7.4.	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	%	85,00
3.27.7.5.	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	9.50
3.27.7.6.	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	2

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



3.27.7.7.	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg/ hektar	505.78
3.27.7.8.	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	%	40
3.27.7.9.	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	2
3.27.7.10.	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	Ton	36,240,603
3.27.7.11.	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	%	38,00
3.27.7.12	Cakupan Penerapan Standar Keamanan Pangan Asal Hewan	%	15
3.27.7.13.	Skor PPH	Skor	20,00
3.27.7.14.	NTP peternakan	%	100,00
3.17.7.15.	NTP tanaman pangan	%	100,00
3.17.7.16.	NTP perkebunan	%	100,00
3.17.7.17.	Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	unit	10,00
3.17.7.18.	Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	%	30,00
3.17.7.19.	Jumlah Sumber Daya Perkebunan yang ditingkatkan kemampuannya	kelompok	5,00
3.17.7.20.	Cakupan Kelompok Binaan Tani Lokal Pemasok Kebutuhan Makanan Sektor Pertambangan yang berkembang.	kelompok	20,00

3.28. *Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan* *Dinas Kehutanan LH*

3.28.2. *Program Pengelolaan Hutan*

3.28.2.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp milyar	2.500,00
3.28.2.2.	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	%	50,00
3.28.2.3.	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat.	unit/tahun	10,00

3.28.3. *Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

3.28.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.	%	30,00
3.28.3.2.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	ribu/ha	5.273,43
3.28.3.3.	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	%	30,00
3.28.3.4.	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284

3.28.4. *Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.*

3.28.5. *Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*

3.29. *Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* *Dinas ESDM*

3.29.2. *Program Pengelolaan Aspek Kegeologian*

3.29.2.1.	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	%	70,00
-----------	---	---	-------

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



3.29.2.2.	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	%	100,00
3.29.2.3.	Persentasi Penambangan Ilegal yang ditertibkan.	%	100,00
3.29.2.4.	Persentase pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Energi dan Mineral	%	100,00
3.29.2.5.	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	%	80,00
3.29.2.6.	Meningkatnya jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	%	100,00
3.29.2.7.	Meningkatnya jumlah Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan.	%	100,00
3.29.2.8.	Meningkatnya jumlah infestasi di bidang pertambangan dan energi.	investasi / thn	4,00
3.29.2.9.	Tersedianya Dokumen Sumber Data Energi dan Sumber Daya Mineral	dokumen/thn	10,00
3.29.3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara		
3.29.3.1.	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	%	60,00
3.29.3.2.	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	%	100,00
3.29.3.3.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat.	%	100,00
3.29.5.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan.		
3.29.5.1.	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumah tangga	1.250,00
3.29.5.2.	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumah tangga	2.500,00
3.29.5.3.	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	500,00
3.29.5.4.	Cakupan Ketersediaan Energi murah dan ramah lingkungan	%	30,00
3.29.5.5.	Cakupan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	%	20,00
3.29.6.	Program Pengelolaan Tenaga Kelistrikan.		
3.29.6.1.	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	Rp./liter	9,500
3.29.6.2.	Tingkat elektrifikasi	persen	60,00
3.29.6.3.	Persentase kampung terakses listrik	persen	60,00
3.29.6.4.	Meningkatnya ketersediaan BBM bagi Nelayan	%	10,00
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		Dinas Perindag
3.30.2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	-
3.30.3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-
3.30.3.1.	Rata-rata margin Pedagangan Barang-Barang Kebutuhan Pokok.	%	150,00
3.30.4.	Program Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.		
3.30.4.1.	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	%	100

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



3.30.4.2.			
3.30.4.3.	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	rata-rata kab/kota	189,26
3.30.5.	Program Pengembangan Ekspor		
3.30.5.1.	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp/milyar	3.000,00
3.30.5.2.	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kegiatan/thn	1,00
3.31.5.3.	Terlaksananya peningkatan pengembangan ekspor	%	100,00
3.30.6.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	-	-
3.30.7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
3.30.7.1.	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	20
3.30.7.2.	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	%	4,00
3.30.7.3.	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumah tangga	%	15,25
3.31.	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian		Dinas Perindag
3.31.2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	-	-
3.31.2.1.	Cakupan Industri kecil dan Menengah (IKM) yang dibina	unit usaha	50,00
3.31.2.2.	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit/tahun	10,00
3.31.2.3.	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan	1,00
3.31.2.4.	Jumlah IKM yang menerapkan Tehnologi Tepat Guna	kelompok	50,00
3.31.2.5.	Cakupan IKM OAP yang dibina	kelompok	90,00
3.31.2.6.	Jenis Komoditas Industri Lokal yang dilabeli HAKI	jenis	3,00
3.31.2.7.	Persentasi IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	%	5,00
3.31.2.8.	Jumlah sentra industri rakyat.	%	1,00
3.31.2.9.	Cakupan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang dikembangkan	%	50,00
3.31.3.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri.		
3.31.3.1.	Cakupan Penataan Struktur Industri	%	80,00
3.31.4.	Program Pengelolaan Sisten Informasi Perindustrian Nasional	-	-
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah		
4.1.	Sekretariat Daerah		
4.1.1.	Program Administrasi Umum		
	Tingkat Pelayanan Informasi Publik	%	100,00
4.1.2.	Program Penataan Organisasi		Biro Ortal
4.1.2.1	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	Tepat /tdk tepat	Tepat

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



4.1.2.2.	Persentasi OPD yang memiliki data uraian jabatan	%	100,00
4.1.2.3.	Persentasi OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan Kinerja Utama	%	100,00
4.1.2.4.	Persentasi OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan Analisis dan/atau Evaluasi Jabatan.	%	100,00
4.1.2.5.	Persentasi Rekomendasi dari Analisis Beban Kerja yang ditindaklanjuti.	%	85,88
	Cakupan Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	%	100,00

4.1.3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

4.1.3.1	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab./kota	20,00
---------	--	------------------	-------

4.1.4. Program Kesejahteraan Rakyat

4.1.5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Biro Hukum

4.1.5.1	Jumlah Perdasu Tentang Pemerintahan yang ditetapkan.	Dokumen/tahun	5,00
4.1.5.2.	Jumlah Perdasus yang ditetapkan.	Dokumen/tahun	5,00
4.1.5.3.	Pemberian Bantuan hukum dan Penegakan Perda	%	100,00
4.1.5.4.	Cakupan kasus hukum warga miskin yang memperoleh pendampingan hukum.	Kasus / thn	10,00
4.1.5.5.	Terlaksananya penegakan hukum	%	100,00
4.1.5.6.	Terlaksananya kegiatan pengawasan produk hukum Kab./Kota.	%	100,00
4.1.5.7.	Persentasi Produk Hukum Kab./Kota se Papua yang difasilitasi.	%	100,00
4.1.5.8.	Terlaksanakannya dokumentasi dan informasi hukum.	%	100,00
4.1.5.9.	Cakupan Produk Hukum Daerah yang didesiminasikan.	%	90,00

4.1.6. Program Perekonomian dan Pembangunan

4.1.7. Program Kebijakan dan Pelayanan Barang dan Jasa

4.1.7.1.	Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP.	%	100,00
----------	--	---	--------

4.1.8. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

4.1.9. Program Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua

4.1.9.1.	Tingkat capaian realisasi program- program Otsus yang direncanakan	%	100,00
4.1.9.2.	Persentasi penerapan Sistem Informasi dan Data Pengelolaan Keuangan Otsus	%	100,00
4.1.9.3.	Cakupan Implementasi regulasi Pengelolaan Dana Otsus	%	100,00

4.2. Sekretariat DPRD

Sekwan

4.2.1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

4.2.1.1	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen	Ada / tidak	Ada
---------	--	-------------	-----

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		
4.2.1.2.	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak	Ada
4.2.2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
4.2.2.1.	Jumlah Perdasi dan Perdasus yang ditetapkan	dokumen / thn	5,00
4.2.2.2	Persentasi Raperdasi / Raperdasus yang ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna.	%	75,00
4.2.2.3.	Persentasi penetapan Perdasi / Perdasus berdasarkan Prolegda.	dokumen / thn	5,00
4.2.3.	Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua		
4.2.3.1.	Tingkat Kehadiran Anggota DPR P	%	75,00
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.		
5.1.	Perencanaan		BAPPEDA
5.1.2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.		
5.1.2.1.	Penyusunan LKPJ Tepat Waktu	tepat/tidak tepat	tepat
5.1.2.2.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tdk tepat	tepat
5.1.2.3.	Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	%	100,00
5.1.2.4.	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	%	100,00
5.1.2.5.	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	%	100,00
5.1.2.6.	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	%	90,00
5.1.2.7.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	%	100,00
5.1.2.8.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	%	100,00
5.1.2.9.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	%	100,00
5.1.2.10.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	%	90,00
5.1.2.11.	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	100
5.1.2.12.	Cakupan ketersediaan data SIPD	%	95,00
5.1.2.13.	Cakupan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	5
5.1.2.14.	Cakupan Peningkatan SDM Perencanaan Pembangunan	%	100,00
5.1.3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



5.1.3.1.	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten /Kota	%	100
5.1.3.2.	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	%	100,00
5.1.3.3.	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah	4
5.1.3.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100,00
5.1.3.5.	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100,00
5.1.3.6.	Jumlah Rekomendasi Kajian/Survey Statistik Sektor yang memenuhi kriteria "Layak"	rekomendasi / tahun	2,00

5.2. Keuangan BPKAD

5.2.2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

5.2.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	%	100
5.2.2.2.	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	-
5.2.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	%	100
5.2.2.4.	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	tepat/tidak tepat	tepat
5.2.2.5.	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	%	100
5.2.2.6.	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	tepat/tdk tepat	tepat
5.2.2.7.	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	%	100
5.2.2.8.	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	%	100
5.2.2.9.	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	tepat/tdak tepat	tepat
5.2.2.10.	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	%	100
5.2.2.11.	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP
5.2.2.12.	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	tepat/tdak tepat	tepat

5.2.3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. - -

5.2.4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPPINDA

5.2.4.1.	Tertib Administrasi BUMD	tepat/tdak tepat	tepat
5.2.4.2.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	3,71
5.2.4.3.	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	%	12,70
5.2.4.4.	Efektifitas pendapatan asli daerah	%	3,00
5.2.4.5.	Persentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	Jenis/tahun	3,00
5.2.4.6.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	28,00
5.2.4.7.	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	%	50,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



5.2.4.8.	Tersedianya Regulasi BUMD	dokumen/ thn	1,00
5.2.4.9.	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Kinerja BUMB	keg./ tahn	1,00
5.2.4.10	Terlaksananya Forum Koordinasi Mitra BUMD	keg. / tahun	9,00
5.2.4.11.	Tersedianya Regulasi Pengelolaan SDA.	dokumen / thn	3,00
5.2.4.12.	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Pelaku Ekonomi	keg./ tahun	1,00
5.2.4.13.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.	rupiah	1.025.000.000
5.2.4.14.	Lamanya waktu penerbitan izin investasi	hari	10,00
5.2.4.15.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	skor	74,00

5.3. Kepegawaian BKD

5.3.2. Program Kepegawaian Daerah

5.3.2.1	Cakupan ketersediaan Data Kepegawaian Daerah	%	100,00
5.3.2.2.	Cakupan penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	%	80,00
5.3.2.3.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	100,00
5.3.2.4.	Persentase kasus pendampingan hukum yang didampingi	persen	80,00

5.4. Pendidikan dan Pelatihan BP-SDM

5.4.2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5.4.2.1.	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	Orang	100,00
5.4.2.2.	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	8,00
5.4.2.3.	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	90,00
5.4.2.4.	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	90,00
5.4.2.6.	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	85,00
5.4.2.7.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	100,00
5.4.2.8.	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	%	20,00
5.4.2.9.	Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	%	100,00
5.4.2.10.	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	%	20,00
5.4.2.11.	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	%	20,00
5.4.2.12.	Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	%	100,00

5.5. Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA

5.5.2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5.5.2.1	Jumlah hasil kelitbang yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis / tahun	10,00
---------	---	---------------	-------

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



5.5.2.2.	Cakupan Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	%	100,00
5.5.2.3.	Jumlah Tehnologi Tepat Guna dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah.	jenis / tahun	5,00

5.6. Pengelolaan Perbatasan **BPP/ Kerjasama**

5.6.2. Program Pengelolaan Perbatasan.

5.6.2.1.	Kesepakatan Kerjasama	dokumen / thn	2,00
5.6.2.2.	Cakupan Pos Lintas Batas Berstandar Internasional	lokasi	1,00
5.6.2.3.	Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di Kawasan perbatasan.	%	65,00
5.6.2.4.	Cakupan ketersediaan sekolah diperbatasan.	murid/sekolah	250,00
5.6.2.5.	Cakupan ketersediaan guru di perbatasan	guru/murid	25,00
5.6.2.6.	Cakupan ketersediaan kelas diperbatasan	murid/kelas	40,00
5.6.2.7.	Cakupan ketersediaan sarana prasarana Kesehatan di perbatasan.	puskesmas/1000 penduduk	0,8
5.6.2.8.	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar di perbatasan	%	60,00
5.6.2.9.	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ekonomi di perbatasan.	%	50,00

5.7. Pengelolaan Penghubung **Kantor Penghubung**

5.7.2. Program Pelayanan Penghubung

5.7.2.1.	Persentasi Peningkatan Jumlah Pengunjung pada Pentas Anjungan Papua.	%	3,5
5.7.2.2.	Jumlah Konsolidasi dan Konsultasi Pembinaan OAP dan Kemasyarakatan di Jakarta.	keg. / thn	5,00

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

6.1. Inspektorat Daerah **Inspektorat**

6.1.2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

6.1.2.1.	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	%	90,00
6.1.2.2.	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	90,00
6.1.2.3.	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	Orang/tahun	55,00
6.1.2.4.	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	85,00
6.1.2.5.	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	50,00
6.1.2.6.	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	%	50,00
6.1.2.7.	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	%	35,00
6.1.2.8.	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	%	80,00
6.1.2.9.	Persentasi Rekomendasi Auditor Eksternal Terhadap	%	95,00



- 6.1.3. Pengelolaan APBD Provinsi yang berindikasi kerugian daerah.
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

8.	Unsur Pemerintahan Umum		
8.1.	Kesatuan Bangsa dan Politik		Kesbangpol
8.1.2.	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</i>	-	-
8.1.3.	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.</i>	-	-
8.1.4.	<i>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.</i>	-	-
8.1.5.	<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.</i>	-	-
8.1.6.	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan dan Fasilitas Penanganan Konflik.</i>	-	-
9.	Unsur Kekhususan		
9.2.	Kekhususan Papua		
9.2.2.	Program Utama dan Penunjang Lembaga MRP Papua		
9.2.2.1.	Tingkat kehadiran Anggota MRP	persen	95,00
9.2.2.2.	Persentase Rancangan Perdasu dan Perdasus yang ditindaklanjuti	persen	100,00
9.2.2.3.	Jumlah perdasu dan perdasus yang mendapatkan rekomendasi oleh MRP	peraturan	10,00

Sumber : RPJMD Papua tahun 2019 – 2023 dan
Permendagri 050-5889 Tahun 2021

BAB VIII

PENUTUP

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2023. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2023, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2023, RKPD Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, hasil kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Papua;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat RENJA- Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2023;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;



5. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Papua wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2023 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2023, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Provinsi Papua;
7. RKPD Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 ini dengan sebaik-baiknya.

GUBENUR PAPUA
TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

LAMPIRAN

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 1.01.2.23.2.24.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.274.784.790,000	
			1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.299.862.640,000	
			1.01.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.746.647.320,000	
			1.01.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	204.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		
			1.01.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40 Dokumen	284.632.840,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40 Dokumen		
			1.01.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	194.063.380,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			1.01.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	870.519.100,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			860.975.000,000	
			1.01.01.1.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	195.500.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		
			1.01.01.1.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	133.200.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.01.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	335.800.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			1.01.01.1.02.06 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	133.080.000,000	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
			1.01.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	63.395.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			1.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.693.821.565,000	
			1.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	360.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		
			1.01.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	776.240.575,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen		
			1.01.01.1.05.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	597.950.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			1.01.01.1.05.05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	478.984.000,000	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
			1.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	480.646.990,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.711.950.585,000	
			1.01.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	206.300.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			1.01.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	350.319.215,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket		
			1.01.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	307.231.370,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		
			1.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	186.900.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			1.01.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	141.200.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		
			1.01.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	150.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			1.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	370.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			1.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			610.000.000,000	
			1.01.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	610.000.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			1.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.768.175.000,000	
			1.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.800.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			1.01.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	760.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.01.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	997.375.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			1.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan			330.000.000,000	
			1.01.01.1.14.01 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	330.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan		
			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			92.980.625.086,000	
			1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			34.782.519.975,000	
			1.01.02.1.01.14 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	58 Unit	12.359.717.075,000	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	58 Unit		
			1.01.02.1.01.41 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	5.003.900.000,000	
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		
			1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	280 Peserta Didik	3.860.222.310,000	
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	280 Peserta Didik		
			1.01.02.1.01.50 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	145 Orang	3.693.500.000,000	SUPD : penyediaan pendidik sebaiknya mengambil kuota guru PPPK yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat yang saat ini masih disiapkan hingga tahun depan Oleh : subpendidikan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:21:01.226261
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	145 Orang		
			1.01.02.1.01.51 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	18 Orang	2.772.900.000,000	SUPD : peningkatan kapasitas pendidik di daerah agar juga memperhatikan guru yang tergabung dalam program guru penggerak Oleh : subpendidikan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:21:42.113327
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180 Orang		
			1.01.02.1.01.52 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	1.320.309.300,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	150 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.1.01.61 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	2.422.776.150,000	
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	1 Dokumen		
			1.01.02.1.01.62 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	3.349.195.140,000	
				Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	1 Orang		
			1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			44.181.472.891,000	
			1.01.02.1.02.01 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	20 Unit	12.535.340.200,000	
				Sekolah Baru yang Terbangun	20 Unit		
			1.01.02.1.02.02 - Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	39 Ruang	9.449.033.780,000	
				Ruang Kelas Baru Bertambah	39 Ruang		
			1.01.02.1.02.10 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	4.099.876.890,000	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	20 Unit		
			1.01.02.1.02.17 - Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	21 Ruang	4.636.288.181,000	
				Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi	21 Ruang		
			1.01.02.1.02.39 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	3.544.493.015,000	
				Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.1.02.40 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	140 Satuan Pendidikan	2.732.280.500,000	
				Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	140 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.1.02.41 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	4.548.357.260,000	
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik		
			1.01.02.1.02.45 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	2.015.177.900,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.1.02.46 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Satuan Pendidikan	620.625.165,000	SUPD : agar memperhatikan link match antara Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan SMK agar lulusan dari SMK dapat diserap oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Oleh : subpendidikan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:23:13.841774
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	10 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus			14.016.632.220,000	
			1.01.02.1.03.08 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	2.700.000.000,000	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	1 Unit		
			1.01.02.1.03.47 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan	482.566.655,000	
				Satuan Pendidikan Khusus Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.1.03.51 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	350 Satuan Pendidikan	3.487.833.050,000	
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	350 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.1.03.52 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	5 Satuan Pendidikan	3.747.976.890,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	5 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.1.03.55 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	40 Orang	152.260.000,000	
				Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	40 Orang		
			1.01.02.1.03.59 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1.752.397.235,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		
			1.01.02.1.03.61 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang	1.693.598.390,000	
				Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	24 Orang		
			1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			10.387.616.404,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			9.110.330.640,000	
			1.01.03.1.01.01 - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1.742.356.000,000	
				Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1 Dokumen		
			1.01.03.1.01.02 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	5.815.408.000,000	
				Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersusun	1 Dokumen		
			1.01.03.1.01.04 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	120 Orang	1.552.566.640,000	
				Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkatkan Kompetensinya	120 Orang		
			1.01.03.1.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			1.277.285.764,000	
			1.01.03.1.02.06 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen	1.277.285.764,000	
				Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	1 Dokumen		
			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			17.353.810.250,000	
			1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			17.353.810.250,000	
			1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 Dokumen	3.325.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 Dokumen		
			1.01.04.1.01.02 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	5.533.700.000,000	
				Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan		
			1.01.04.1.01.03 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia	210 Orang	7.418.327.295,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua	210 Orang			
			1.01.04.1.01.04 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang Tersedia	50 Orang	1.076.782.955,000		
				Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua	50 Orang			
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	2.23 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			5.491.900.000,000		
				2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			4.463.446.000,000	
				2.23.02.1.01.01 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	10 Perpustakaan	528.630.000,000	
					Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	10 Perpustakaan		
				2.23.02.1.01.02 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	787.995.000,000	
					Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan		
				2.23.02.1.01.03 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	3 Eksemplar	164.400.000,000	
					Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	3 Eksemplar		
				2.23.02.1.01.04 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	198.820.825,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan		
			2.23.02.1.01.05 - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	25 Perpustakaan	148.412.175,000	
				Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25 Perpustakaan		
			2.23.02.1.01.06 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	11 Orang	341.950.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	11 Orang		
			2.23.02.1.01.07 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	7 Layanan	310.850.000,000	
				Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	7 Layanan		
			2.23.02.1.01.08 - Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	40 Perpustakaan	1.714.193.000,000	
				Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit	40 Perpustakaan		
			2.23.02.1.01.10 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	15 Dokumen	268.195.000,000	
				Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	15 Dokumen		
			2.23.02.1.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			1.028.454.000,000	
			2.23.02.1.02.01 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Lokus	860.676.000,000	
				Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	10 Lokus		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.23.02.1.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	167.778.000,000	
				Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	3 Perpustakaan		
			2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			251.900.000,000	
			2.23.03.1.04 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			251.900.000,000	
			2.23.03.1.04.01 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	500 Eksemplar	251.900.000,000	
				Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	500 Eksemplar		
	2.24 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			492.745.380,000	
			2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			492.745.380,000	
			2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	50 Berkas	492.745.380,000	
				Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	50 Berkas		
			2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			1.911.031.475,000	
			2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			262.650.815,000	
			2.24.03.1.01.01 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	262.650.815,000	
				Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip		
			2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota			384.100.000,000	
			2.24.03.1.03.02 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	5000 Arsip	384.100.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	5000 Arsip		
			2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi			1.264.280.660,000	
			2.24.03.1.04.01 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip	500.000.000,000	
				Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip		
			2.24.03.1.04.02 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	764.280.660,000	
				Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip		
			2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			125.000.000,000	
			2.24.04.1.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi			125.000.000,000	
			2.24.04.1.01.01 - Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	1 SOP	125.000.000,000	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 SOP		
Jumlah :						141.269.413.385,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.00 - DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			56.097.498.480,000	
			1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			47.260.539.450,000	
			1.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	47.260.539.450,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan		
			1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.564.459.375,000	
			1.02.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.564.459.375,000	
			1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.330.589.655,000	
			1.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.620.840.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			1.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	233.849.655,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			1.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			1.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.275.900.000,000	
			1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.769.500.000,000	
			1.02.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	140.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
			1.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.629.500.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			172.410.000,000	
			1.02.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	115.000.000,000	
			1.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	34.260.000,000	
			1.02.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	13.000.000,000	
			1.02.01.1.09.07 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.150.000,000	
			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102.444.190.735,040	
			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			69.178.072.371,040	
			1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	58.228.451.000,000	
				Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		
			1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	22 Unit	5.150.043.860,040	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	22 Unit		
			1.02.02.1.01.18 - Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	54 Unit	172.097.936,000	
				Terpeliharanya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	54 Unit		
			1.02.02.1.01.20 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	90 Unit	357.079.575,000	
				Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	90 Unit		
			1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1700 Dokumen	1.933.200.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1700 Dokumen		
			1.02.02.1.01.22 - Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	3.337.200.000,000	
				Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket		
			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			29.892.461.144,000	
			1.02.02.1.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	5000 Orang	1.900.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	5000 Orang		
			1.02.02.1.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	300.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	100 Orang		
			1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	49 Dokumen	1.537.514.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	49 Dokumen		
			1.02.02.1.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33 Dokumen	1.969.304.060,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33 Dokumen		
			1.02.02.1.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	618.685.930,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen		
			1.02.02.1.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	1.472.060.635,000	
			1.02.02.1.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	546.100.000,000	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen		
			1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29 Dokumen	10.011.243.894,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29 Dokumen		
			1.02.02.1.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	247.034.785,000	
			1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1000000000 Dokumen	6.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1000000000 Dokumen		
			1.02.02.1.02.17 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	90 Dokumen	596.000.000,000	
			1.02.02.1.02.18 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.702.289.340,000	
				Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
			1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	6 Dokumen	1.411.605.450,000	
				Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	6 Dokumen		
			1.02.02.1.02.22 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	80 Dokumen	254.873.050,000	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	80 Dokumen		
			1.02.02.1.02.25 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	90 Paket	225.750.000,000	
			1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			2.064.076.685,000	
			1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	2.064.076.685,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		
			1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1.309.580.535,000	
			1.02.02.1.04.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3 Unit	894.230,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3 Unit		
			1.02.02.1.04.02 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	35 Unit	464.546.305,000	
				Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	35 Unit		
			1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	844.140.000,000	
			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			31.570.873.870,000	
			1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			22.978.891.710,000	
			1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	15.014.391.220,000	
			1.02.03.1.01.02 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	1 Orang	7.964.500.490,000	
				Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Orang		
			1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			8.591.982.160,000	
			1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	1 Orang	7.513.050.660,000	
			1.02.03.1.02.02 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29 Dokumen	1.078.931.500,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29 Dokumen		
			1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.588.993.265,000	
			1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			1.588.993.265,000	
			1.02.04.1.01.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	86 Sarana	1.087.546.265,000	
			1.02.04.1.01.02 - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	55 Dokumen	501.447.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	55 Dokumen		
			1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			2.391.503.000,000	
			1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			391.503.000,000	
			1.02.05.1.01.01 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	391.503.000,000	
				Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen		
			1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			804.200.000,000	
			1.02.05.1.02.01 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	804.200.000,000	
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		
			1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			1.195.800.000,000	
			1.02.05.1.03.01 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1.195.800.000,000	
			1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			43.125.727.663,000	
			1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			600.000.000,000	
			1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	200.000.000,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		
			1.02.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		
			1.02.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	75.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen		
			1.02.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen		
			1.02.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		
			1.02.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	50.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		
			1.02.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.905.212.092,000	
			1.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/ Bulan	18.380.212.092,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/ Bulan		
			1.02.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147 Dokumen		
			1.02.01.1.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	75.000.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen		
			1.02.01.1.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	75.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen		
			1.02.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	75.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.02.06 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
			1.02.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	75.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan		
			1.02.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			275.000.000,000	
			1.02.01.1.03.01 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	175.000.000,000	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
			1.02.01.1.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen	75.000.000,000	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen		
			1.02.01.1.03.05 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,000	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			895.000.000,000	
			1.02.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	147 Paket	750.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	147 Paket		
			1.02.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen	75.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen		
			1.02.01.1.05.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	147 Dokumen	70.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	147 Dokumen		
			1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.500.000.000,000	
			1.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200 Paket	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200 Paket		
			1.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket		
			1.02.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	200.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Paket		
			1.02.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	800.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	50 Paket		
			1.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Paket		
			1.02.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	500.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50 Dokumen		
			1.02.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Bahan/Material	50 Paket		
			1.02.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	70 Laporan	500.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	70 Laporan		
			1.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2.500.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.100.000.000,000	
			1.02.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	50 Unit	1.400.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50 Unit		
			1.02.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit		
			1.02.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Mebel	50 Paket		
			1.02.01.1.07.07 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	50 Unit	200.000.000,000	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	50 Unit		
			1.02.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70 Unit		
			1.02.01.1.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit		
			1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.992.000.000,000	
			1.02.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	50.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		
			1.02.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	1.500.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Laporan		
			1.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	2.442.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 Laporan		
			1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.858.515.571,000	
			1.02.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	543.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit		
			1.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	550.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit		
			1.02.01.1.09.05 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	15 Unit		
			1.02.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	195.515.571,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit		
			1.02.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit		
			1.02.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	150.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit		
			1.02.01.1.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	420.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit		
			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			36.674.420.000,000	
			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			12.337.920.000,000	
			1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	500.000.000,000	
				Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.01.08 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	5 Unit	1.500.000.000,000	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit		
			1.02.02.1.01.09 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	10 Unit	3.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	10 Unit		
			1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.11 - Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.12 - Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.13 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	20 Unit	200.000.000,000	
				Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	20 Unit		
			1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	100 Paket	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	100 Paket		
			1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	10 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	20 Unit	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	20 Unit		
			1.02.02.1.01.17 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	937.920.000,000	
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Unit		
			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			19.136.500.000,000	
			1.02.02.1.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	700.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Jumlah kab/kota sehat 2. Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:50:23.053027
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen		
			1.02.02.1.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	200.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Jumlah kab/kota sehat 2. Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR 3. Jumlah Kab/Kota & 40% FKTP Yang Menyelenggarakan UBM 4. Jumlah Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:54:49.097095
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen		
			1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	500.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria 2. Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR 3. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage) 4. Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:58:55.780833

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen		
			1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2000 Dokumen	5.236.500.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	2000 Dokumen		
			1.02.02.1.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	100 Orang	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	100 Orang		
			1.02.02.1.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2000 Dokumen	9.500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2000 Dokumen		
			1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2000 Dokumen	1.500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2000 Dokumen		
			1.02.02.1.02.18 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	29 Dokumen	500.000.000,000	
				Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	29 Dokumen		
			1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	20 Dokumen	500.000.000,000	
				Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	20 Dokumen		
			1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.500.000.000,000	
			1.02.02.1.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20 Dokumen	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20 Dokumen		
			1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		
			1.02.02.1.03.03 - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	20 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	20 Unit		
			1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			3.700.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.04.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit	3.000.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi 2. Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi 3. Persentase rumah sakit terakreditasi. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:00:50.392098
				Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit		
			1.02.02.1.04.02 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	200 Unit	200.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi 2. Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi 3. Persentase rumah sakit terakreditasi. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:01:38.934308
				Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	200 Unit		
			1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10 Unit	500.000.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	10 Unit		
			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			9.400.000.000,000	
			1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			9.200.000.000,000	
			1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	300 Orang	9.000.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:03:30.980155
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	300 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.03.1.01.02 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	147 Orang	200.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:03:41.242551
				Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	147 Orang		
			1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			200.000.000,000	
			1.02.03.1.02.02 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen		
Jumlah :						283.293.207.013,04	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0004 - RUMAH SAKIT JIWA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.02 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			43.125.727.663,000	
			1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			600.000.000,000	
			1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	200.000.000,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		
			1.02.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		
			1.02.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen		
			1.02.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen		
			1.02.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		
			1.02.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	50.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		
			1.02.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.905.212.092,000	
			1.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/ Bulan	18.380.212.092,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/ Bulan		
			1.02.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147 Dokumen		
			1.02.01.1.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	75.000.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen		
			1.02.01.1.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	75.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen		
			1.02.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	75.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.02.06 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
			1.02.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	75.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			275.000.000,000	
			1.02.01.1.03.01 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	175.000.000,000	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
			1.02.01.1.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen	75.000.000,000	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen		
			1.02.01.1.03.05 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,000	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			895.000.000,000	
			1.02.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	147 Paket	750.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	147 Paket		
			1.02.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen	75.000.000,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen		
			1.02.01.1.05.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	147 Dokumen	70.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	147 Dokumen		
			1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.500.000.000,000	
			1.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200 Paket	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200 Paket		
			1.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket		
			1.02.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	200.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Paket		
			1.02.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	800.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	50 Paket		
			1.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Paket		
			1.02.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	500.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50 Dokumen		
			1.02.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Bahan/Material	50 Paket		
			1.02.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	70 Laporan	500.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	70 Laporan		
			1.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2.500.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		
			1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.100.000.000,000	
			1.02.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	50 Unit	1.400.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50 Unit		
			1.02.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit		
			1.02.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Mebel	50 Paket		
			1.02.01.1.07.07 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	50 Unit	200.000.000,000	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	50 Unit		
			1.02.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.01.1.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit		
			1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.992.000.000,000	
			1.02.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	50.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		
			1.02.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	1.500.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Laporan		
			1.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	2.442.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 Laporan		
			1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.858.515.571,000	
			1.02.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	543.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit		
			1.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	550.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit		
			1.02.01.1.09.05 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	15 Unit		
			1.02.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	195.515.571,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit		
			1.02.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	150.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit		
			1.02.01.1.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	420.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit		
			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			36.674.420.000,000	
			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			12.337.920.000,000	
			1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	500.000.000,000	
				Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		
			1.02.02.1.01.08 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	5 Unit	1.500.000.000,000	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit		
			1.02.02.1.01.09 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	10 Unit	3.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	10 Unit		
			1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.11 - Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.12 - Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.13 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	20 Unit	200.000.000,000	
				Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	20 Unit		
			1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	100 Paket	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	100 Paket		
			1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	20 Unit	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	20 Unit		
			1.02.02.1.01.17 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	937.920.000,000	
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Unit		
			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			19.136.500.000,000	
			1.02.02.1.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	700.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Jumlah kab/kota sehat 2. Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:50:23.053027
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	200.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Jumlah kab/kota sehat 2. Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR 3. Jumlah Kab/Kota & 40% FKTP Yang Menyelenggarakan UBM 4. Jumlah Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:54:49.097095
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen		
			1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	500.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria 2. Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR 3. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage) 4. Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:58:55.780833
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen		
			1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2000 Dokumen	5.236.500.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	2000 Dokumen		
			1.02.02.1.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	100 Orang	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	100 Orang		
			1.02.02.1.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2000 Dokumen	9.500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2000 Dokumen		
			1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2000 Dokumen	1.500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2000 Dokumen		
			1.02.02.1.02.18 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	29 Dokumen	500.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	29 Dokumen		
			1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	20 Dokumen	500.000.000,000	
				Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	20 Dokumen		
			1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.500.000.000,000	
			1.02.02.1.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20 Dokumen	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20 Dokumen		
			1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		
			1.02.02.1.03.03 - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	20 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	20 Unit		
			1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			3.700.000.000,000	
			1.02.02.1.04.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit	3.000.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase rumah sakit rukukan provinsi yang terakreditasi 2. Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi 3. Persentase rumah sakit terakreditasi. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:00:50.392098
				Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit		
			1.02.02.1.04.02 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	200 Unit	200.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase rumah sakit rukukan provinsi yang terakreditasi 2. Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi 3. Persentase rumah sakit terakreditasi. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:01:38.934308
				Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	200 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10 Unit	500.000.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	10 Unit		
			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			9.400.000.000,000	
			1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			9.200.000.000,000	
			1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	300 Orang	9.000.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:03:30.980155
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	300 Orang		
			1.02.03.1.01.02 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	147 Orang	200.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:03:41.242551
				Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	147 Orang		
			1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			200.000.000,000	
			1.02.03.1.02.02 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen		
Jumlah :						89.200.147.663,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.01 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			129.558.676.648,000	
			1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			105.580.022.800,000	
			1.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	800 Orang/ Bulan	105.318.422.800,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	800 Orang/ Bulan		
			1.02.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.800.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	30.800.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dokumen	200.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dokumen		
			1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.624.800.000,000	
			1.02.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	1.308.800.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket		
			1.02.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	191.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang		
			1.02.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	125.000.000,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
			1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.982.453.848,000	
			1.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			1.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	340.228.848,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			1.02.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		
			1.02.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	607.475.000,000	
				Tersedianya Bahan/Material	2 Paket		
			1.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	872.750.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			300.000.000,000	
			1.02.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		
			1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.511.400.000,000	
			1.02.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	49.372.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		
			1.02.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	10.295.500.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	8.166.528.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan		
			1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			750.000.000,000	
			1.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	550.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 Unit		
			1.02.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit		
			1.02.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan			810.000.000,000	
			1.02.01.1.14.01 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2 Laporan	810.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2 Laporan		
			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			151.259.034.094,000	
			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			123.147.420.000,000	
			1.02.02.1.01.01 - Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit	32.000.000.000,000	
				Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit		
			1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	12.598.000.000,000	
				Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit		
			1.02.02.1.01.09 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	6 Unit	3.200.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	6 Unit		
			1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.12 - Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	12.761.620.000,000	
				Tersedianya Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	6 Unit		
			1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	21 Paket	22.049.880.000,000	
				Tersedianya Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	21 Paket		
			1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	3.300.000.000,000	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	4 Unit		
			1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	20 Unit	8.137.920.000,000	
				Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	20 Unit		
			1.02.02.1.01.17 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	19 Unit	5.100.000.000,000	
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	19 Unit		
			1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	23.500.000.000,000	
				Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		
			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			27.200.010.000,000	
			1.02.02.1.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	200.010.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		
			1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	27.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		
			1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			911.604.094,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.04.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	700.000.000,000	
				Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit		
			1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 Unit	211.604.094,000	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	2 Unit		
			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			20.039.163.200,000	
			1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			18.739.163.200,000	
			1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150 Orang	18.739.163.200,000	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	150 Orang		
			1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1.300.000.000,000	
			1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	30 Orang	1.300.000.000,000	
				Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	30 Orang		
Jumlah :						300.856.873.942,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA (BLUD)

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			70.000.000.000,00	
			1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD			70.000.000.000,00	
			1.02.01.1.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	70.000.000.000,00	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja		
Jumlah :						70.000.000.000,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.03 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			94.777.411.884,000	
			1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000,000	
			1.02.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
			1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			78.471.411.884,000	
			1.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/ Bulan	78.381.411.884,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/ Bulan		
			1.02.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	30.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			1.02.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.000.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang		
			1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.850.000.000,000	
			1.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	150.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket		
			1.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	700.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Paket		
			1.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket		
			1.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	2.000.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		
			1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.800.000.000,000	
			1.02.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	5.800.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit		
			1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.706.000.000,000	
			1.02.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	100.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan		
			1.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	1.606.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 Laporan		
			1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.850.000.000,000	
			1.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	350.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit		
			1.02.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	3.500.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20 Unit		
			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			89.729.344.604,000	
			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			65.729.344.604,000	
			1.02.02.1.01.04 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	30.000.000.000,000	
				Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		
			1.02.02.1.01.05 - Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dilakukan Pengembangan	3 Unit	2.400.000.000,000	
			1.02.02.1.01.09 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	2 Unit	1.450.000.000,000	
			1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5.710.880.000,000	
			1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5 Unit	4.300.000.000,000	
				Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	5 Unit		
			1.02.02.1.01.22 - Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	5 Paket	21.868.464.604,000	
				Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Paket		
			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			24.000.000.000,000	
			1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	24.000.000.000,000	
			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			7.705.850.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			7.705.850.000,000	
			1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	243 Orang	7.705.850.000,000	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	243 Orang		
Jumlah :						192.212.606.488,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.05 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA (BLUD)

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			36.500.000.000,00	
			1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.500.000.000,00	
			1.02.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500.000.000,00	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		
			1.02.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	1.000.000.000,00	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Orang		
			1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.500.000.000,00	
			1.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.000.000,00	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket		
			1.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000,00	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket		
			1.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000,00	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket		
			1.02.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000,00	
				Tersedianya Bahan/Material	5 Paket		
			1.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	2.000.000.000,00	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		
			1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.000.000.000,00	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit		
			1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.000.000.000,000	
			1.02.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	1.000.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Laporan		
			1.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.000.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan		
			1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.000.000.000,000	
			1.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit		
			1.02.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit		
			1.02.01.1.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD			20.500.000.000,000	
			1.02.01.1.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja	20.500.000.000,000	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja		
			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			41.500.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			38.000.000.000,000	
			1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	10.000.000.000,000	
				Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		
			1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	8.000.000.000,000	
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit		
			1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	100 Unit	3.000.000.000,000	
				Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	100 Unit		
			1.02.02.1.01.17 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	1.500.000.000,000	
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Unit		
			1.02.02.1.01.19 - Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	12 Unit	1.500.000.000,000	
				Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	12 Unit		
			1.02.02.1.01.22 - Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	14 Paket	14.000.000.000,000	
				Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 Paket		
			1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			500.000.000,000	
			1.02.02.1.03.03 - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	8 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	8 Unit		
			1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			3.000.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	3.000.000.000,000	SUPD : Sub kegiatan ini agar ditagging indikator kinerja urusan: 1. Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi 2. Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi 3. Persentase rumah sakit terakreditasi. Target indikator kinerja urusan agar memperhatikan hasil kesepakatan Rakortek 2022. Oleh : subkesehatan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:07:13.970038
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	1 Unit		
			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			7.000.000.000,000	
			1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			6.000.000.000,000	
			1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	6.000.000.000,000	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	100 Orang		
			1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1.000.000.000,000	
			1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	40 Orang	1.000.000.000,000	
				Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	40 Orang		
Jumlah :						85.000.000.000,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			73.931.951.606,000	
			1.03.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500.000.000,000	
			1.03.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			1.03.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	800.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		
			1.03.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	500.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		
			1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			62.564.321.550,000	
			1.03.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/ Bulan	61.764.321.550,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/ Bulan		
			1.03.01.1.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	500.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		
			1.03.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.03.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	150.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			1.03.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			200.000.000,000	
			1.03.01.1.03.06 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	200.000.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		
			1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			900.000.000,000	
			1.03.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	450 Paket	400.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	450 Paket		
			1.03.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			1.03.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	200.000.000,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		
			1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.950.000.000,000	
			1.03.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			1.03.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	500.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150 Paket		
			1.03.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		
			1.03.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6700 Paket	150.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6700 Paket		
			1.03.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	200.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6 Paket		
			1.03.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10080 Dokumen	100.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10080 Dokumen		
			1.03.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	500.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		
			1.03.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000,000	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
			1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.867.630.056,000	
			1.03.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1.017.630.056,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan		
			1.03.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.350.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		
			1.03.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	105 Laporan	450.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105 Laporan		
			1.03.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	3.050.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 Laporan		
			1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			950.000.000,000	
			1.03.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	500.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50 Unit		
			1.03.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	150.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit		
			1.03.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit		
			1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			134.950.000.000,000	
			1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			25.500.000.000,000	
			1.03.02.1.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	1 Dokumen	200.000.000,000	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	1 Dokumen		
			1.03.02.1.01.04 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	200.000.000,000	
				Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		
			1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	40 KM	16.000.000.000,000	
				Terbangunnya Kanal Banjir	40 KM		
			1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.5 KM	8.000.000.000,000	
				Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0.5 KM		
			1.03.02.1.01.27 - Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	0.5 KM	1.100.000.000,000	
			1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			109.450.000.000,000	
			1.03.02.1.02.01 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	16 Dokumen	3.200.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	16 Dokumen		
			1.03.02.1.02.04 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0.8 KM	20.000.000.000,000	SUPD : Terjadi kendala teknis pada saat pengisian aplikasi sehingga Provinsi Papua belum dapat menginput sub kegiatan, pagu dan target. Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-23 15:33:35.879685
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	0.8 KM		
			1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	20 KM	80.000.000.000,000	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	20 KM		
			1.03.02.1.02.21 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	2.7 KM	6.250.000.000,000	
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.7 KM		
			1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			321.500.000.000,000	
			1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			321.500.000.000,000	
			1.03.03.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	12 Dokumen	4.000.000.000,000	SUPD : Input indikator dan kegiatan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun ada mencek kembali target dan pagu anggaran pada subkegiatan ini apakah double input anggaran atau ada hal lainnya. Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 15:35:27.702243
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	12 Dokumen		
			1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	150 Liter/Detik	310.000.000.000,000	SUPD : Input indikator dan kegiatan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun ada mencek kembali target dan pagu anggaran pada subkegiatan ini apakah double input anggaran atau ada hal lainnya. Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 15:37:14.795063
				Terbangunnya SPAM Regional	150 Liter/Detik		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.03.03.1.01.07 - Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitas kerjasama penyelenggaraan SPAM	1 Kab/Kota	1.000.000.000,000	SUPD : Input indikator dan kegiatan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun ada mencek kembali target dan pagu anggaran pada subkegiatan ini apakah double input anggaran atau ada hal lainnya. Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 15:37:20.893634
				Terfasilitasinya Kerjasama antar Penyelenggara SPAM	1 Kab/Kota		
			1.03.03.1.01.08 - Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	1.000.000.000,000	SUPD : Input indikator dan kegiatan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun ada mencek kembali target dan pagu anggaran pada subkegiatan ini apakah double input anggaran atau ada hal lainnya. Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 15:37:57.544603
				Meningkatnya kelembagaan pelaksana penyelenggaraan SPAM Provinsi	1 Kab/Kota		
			1.03.03.1.01.09 - Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Beroperasi dan Terpeliharanya SPAM Lintas Kabupaten/Kota	10 Unit	5.000.000.000,000	SUPD : Input indikator dan kegiatan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun ada mencek kembali target dan pagu anggaran pada subkegiatan ini apakah double input anggaran atau ada hal lainnya. Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 15:38:04.260632
				Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	10 Unit		
			1.03.03.1.01.12 - Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk	1 Badan Usaha	500.000.000,000	SUPD : Input indikator dan kegiatan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun ada mencek kembali target dan pagu anggaran pada subkegiatan ini apakah double input anggaran atau ada hal lainnya. Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 15:38:09.737402

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbentuknya Badan Usaha Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1 Badan Usaha		
			1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.000.000.000,000	
			1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			1.000.000.000,000	
			1.03.05.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000.000,000	SUPD : Input indikator dan kegiatan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun ada mencek kembali target dan pagu anggaran pada subkegiatan ini apakah double input anggaran atau ada hal lainnya. Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 15:38:38.608495
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Dokumen		
			1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			30.000.000.000,000	
			1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			30.000.000.000,000	
			1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	500 Sistem Jaringan	30.000.000.000,000	
				Terbangunnya dan Berkembangnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	500 Sistem Jaringan		
			1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			120.000.000.000,000	
			1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			120.000.000.000,000	
			1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4121334 Dokumen	120.000.000.000,000	SUPD : Mohon untuk di cek kembali untuk indikator, target, dan anggaran untuk sub kegiatan tersebut, mohon di sesuaikan dengan kepmendagri 050-5889 tahun 2021 Oleh : subpu@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 13:47:14.743165
				Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4121334 Dokumen		
			1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			6.809.406.428.571,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi			6.809.406.428.571,000	
			1.03.10.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	86 Dokumen	110.000.000.000,000	
				Terlaksananya Advis dan Layanan Teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	86 Dokumen		
			1.03.10.1.01.02 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	20000 M ²	20.000.000.000,000	
				Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	20000 M ²		
			1.03.10.1.01.04 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2.500.000.000,000	
				Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen		
			1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	500 KM	2.356.100.000.000,000	
				Terbangunnya Jalan	500 KM		
			1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	8670.45 KM	3.473.431.428.571,000	
				Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	8670.45 KM		
			1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	62 KM	114.000.000.000,000	
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	62 KM		
			1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	14500 M	679.250.000.000,000	
				Terbangunnya Jembatan	14500 M		
			1.03.10.1.01.18 - Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	40 M	30.000.000.000,000	
				Terehabilitasinya Jembatan	40 M		
			1.03.10.1.01.21 - Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	5 KM	4.125.000.000,000	
				Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	5 KM		
			1.03.10.1.01.23 - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	319 Dokumen	20.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	319 Dokumen		
			1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			14.750.000.000,000	
			1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			14.750.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.03.11.1.01.04 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	1400 Orang	5.350.000.000,000	
				Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1400 Orang		
			1.03.11.1.01.05 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	8 Dokumen	9.400.000.000,000	
				Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	8 Dokumen		
	1.04 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			17.100.000.000,000	
			1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			400.000.000,000	
			1.04.02.1.01.01 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	200.000.000,000	SUPD : Diharapkan Pemda mengakomodir pendataan rumah di lokasi rawan bencana, dan pendataan rumah yang harus direlokasi. Kedua hal tersebut merupakan layanan 1 dan 2 di SPM Perumahan Rakyat. Keterangan bencana alam apa saja yang dapat diinput kedalam pendataan, dan lokasi yang perlu dilakukan relokasi, Pemda dapat meninjau kembali Lampiran Permendagri 59 tahun 2021 urusan Perumahan Rakyat yaitu halaman 151-191. Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:42:01.812049
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen		
			1.04.02.1.01.02 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	200.000.000,000	SUPD : Pemda dapat melakukan pendataan sesuai dengan Lampiran B Form 4.A. 2 Permendagri 59 Tahun 2021 Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:46:23.32407
				Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		
			1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			200.000.000,000	
			1.04.02.1.02.02 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	600 Orang	200.000.000,000	SUPD : Setuju Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:48:07.60344

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	600 Orang		
			1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			16.500.000.000,000	
			1.04.02.1.03.01 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	5.000.000.000,000	SUPD : Setuju, agar rehabilitasi rumah memenuhi kriteria rumah layak huni sehingga menjamin mutu kualitas layanan yang diberikan Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:49:56.489273
				Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	50 Unit Rumah		
			1.04.02.1.03.03 - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	1 Ha	1.500.000.000,000	SUPD : Setuju Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:50:14.900172
				Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	1 Ha		
			1.04.02.1.03.04 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	50 Unit Rumah	5.000.000.000,000	SUPD : Setuju, agar pembangunan rumah memenuhi kriteria rumah layak huni sehingga menjamin mutu kualitas layanan yang diberikan. Mutu kualitas terhadap layanan yang diberikan mempunyai bobot 20% terhadap penghitungan Indeks Pencapaian SPM. Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:50:43.059037
				Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	50 Unit Rumah		
			1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah	5.000.000.000,000	SUPD : Setuju, agar pembangunan rumah memenuhi kriteria rumah layak huni sehingga menjamin mutu kualitas layanan yang diberikan. Mutu kualitas terhadap layanan yang diberikan mempunyai bobot 20% terhadap penghitungan Indeks Pencapaian SPM. Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:54:58.137668
				Terbangunnya Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	10 Unit Rumah		
			1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			600.000.000,000	
			1.04.03.1.01 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			200.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.04.03.1.01.08 - Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	200.000.000,000	SUPD : Setuju. Subkegiatan ini dapat digunakan untuk melakukan penyusunan dokumen RP3KP Provinsi. Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:04:40.721569
				Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen		
			1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			400.000.000,000	
			1.04.03.1.02.01 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen	200.000.000,000	SUPD : Diharapkan lokasi penyusunan site plan dan DED sesuai dengan SK Kumuh daerah yang berlaku. Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:05:59.360618
				Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen		
			1.04.03.1.02.07 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	1 Ha	200.000.000,000	SUPD : Diharapkan lokasi penanganan sesuai dengan SK Kumuh daerah yang berlaku, agar perhitungan penanganan kawasan kumuh dapat terhitung dengan baik dalam rangka mendukung 0% kumuh. Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:08:01.77156
				Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Ha		
			1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			10.200.000.000,000	
			1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			10.200.000.000,000	
			1.04.05.1.01.01 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	200.000.000,000	SUPD : Setuju. Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:42:22.828295
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.04.05.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 Lokasi	10.000.000.000,000	SUPD : Pembangunan PSU di kawasan permukiman perlu diawali dengan perubahan perilaku masyarakat melalui pemberdayaan/pendampingan sehingga perlu berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar penyediaan PSU di permukiman dapat optimal. Oleh : subpkp@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:43:29.640704
				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 Lokasi		
Jumlah :						7.533.438.380.177,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.05.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			47.227.492.970,000	
			1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			191.482.900,000	
			1.05.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	98.229.760,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		
			1.05.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.630.190,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			1.05.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.336.550,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			1.05.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	68.286.400,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		
			1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.570.533.300,000	
			1.05.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/ Bulan	19.536.347.700,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan		
			1.05.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.617.800,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			1.05.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	20.567.800,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		
			1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			351.000.000,000	
			1.05.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	351.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang		
			1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.508.270.420,000	
			1.05.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.441.400,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket		
			1.05.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			1.05.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		
			1.05.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	127.800.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket		
			1.05.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	21.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		
			1.05.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	175.749.020,000	
				Tersedianya Bahan/Material	2 Paket		
			1.05.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.583.280.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		
			1.05.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69 Laporan	1.547.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69 Laporan		
			1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.920.319.000,000	
			1.05.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	421.099.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan		
			1.05.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	105.620.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan		
			1.05.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.393.600.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.685.887.350,000	
			1.05.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	527.937.350,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40 Unit		
			1.05.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	1.077.950.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit		
			1.05.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit		
			1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.709.355.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.161.205.000,000	
			1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	50 Kasus	454.505.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:45:52.764236
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Kasus		
			1.05.02.1.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Kasus	298.950.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:46:03.742454
				Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30 Kasus		
			1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	103.050.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:46:11.184321
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen		
			1.05.02.1.01.04 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	304.700.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:46:19.025311
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		
			1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			548.150.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.05.02.1.02.01 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	245.750.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:46:28.186139
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan		
			1.05.02.1.02.02 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	302.400.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:46:35.821422
				Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan		
			1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.244.309.730,000	
			1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			99.000.000,000	
			1.05.03.1.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	18 Orang	99.000.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:49:43.023178
				Tersediannya Personil untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kabupaten/Kota dalam Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	18 Orang		
			1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			254.200.000,000	
			1.05.03.1.02.02 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	60 Orang	154.600.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:49:36.510472
				Terlaksananya Dukungan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Menyelenggarakan dan Memberikan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya Berpotensi menjadi Urusan Provinsi	60 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.05.03.1.02.08 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	25 Orang	99.600.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:49:29.929832
				Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Personil TRC Tingkat Provinsi Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	25 Orang		
			1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			200.440.000,000	
			1.05.03.1.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	200.440.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:49:24.996392
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang		
			1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			690.669.730,000	
			1.05.03.1.04.03 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	68.700.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:49:18.313914
				Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen		
			1.05.03.1.04.05 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	4 Laporan	299.999.900,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:49:12.062104
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	4 Laporan		
			1.05.03.1.04.06 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	100.000.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:49:05.195753
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.05.03.1.04.07 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	221.969.830,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:48:57.381178
				Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	5 Dokumen		
			1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			199.990.000,000	
			1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			199.990.000,000	
			1.05.04.1.01.03 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	199.990.000,000	SUPD : Mohon klarifikasi dan di cek kembali terkait dengan besaran target, satuan dan alokasi jumlah anggaran yang sama, untuk dua indikator yang berbeda Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:50:19.472297
				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan		
Jumlah :						50.381.147.700,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 1.06.2.08.2.12.07.00 - DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.06 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			48.245.032.956,000	
			1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			224.886.555,000	
			1.06.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	40.386.560,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		
			1.06.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	40.386.560,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen		
			1.06.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	48.484.535,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen		
			1.06.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	41.695.725,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		
			1.06.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	53.933.175,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		
			1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.898.121.366,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.06.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/ Bulan	34.898.121.366,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	292 Orang/ Bulan		
			1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			792.400.000,000	
			1.06.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202 Paket	242.400.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202 Paket		
			1.06.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	550.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang		
			1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.557.758.555,000	
			1.06.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	150.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	50 Paket		
			1.06.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	300.858.555,000	
				Tersedianya Bahan/Material	1 Paket		
			1.06.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.920.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
			1.06.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.056.980.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		
			1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			795.000.000,000	
			1.06.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	795.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit		
			1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.091.339.000,000	
			1.06.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 Laporan	12.500.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 Laporan		
			1.06.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	757.472.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.06.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	321.367.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Laporan		
			1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.885.527.480,000	
			1.06.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	668.990.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit		
			1.06.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14.560.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit		
			1.06.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	8.201.977.480,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit		
			1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			4.807.328.558,000	
			1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			4.807.328.558,000	
			1.06.02.1.02.02 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	494.809.747,000	
				Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	20 Orang		
			1.06.02.1.02.03 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	140 Keluarga	3.806.177.331,000	
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	140 Keluarga		
			1.06.02.1.02.04 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 Lembaga	506.341.480,000	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Lembaga		
			1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			6.443.224.883,400	
			1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			1.371.948.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.06.04.1.01.01 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	18 Orang	541.600.000,000	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	18 Orang		
			1.06.04.1.01.02 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	18 Orang	159.100.000,000	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	18 Orang		
			1.06.04.1.01.03 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	18 Orang	346.050.000,000	
				Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	18 Orang		
			1.06.04.1.01.05 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	18 Orang	36.928.000,000	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	18 Orang		
			1.06.04.1.01.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	18 Orang	24.000.000,000	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	18 Orang		
			1.06.04.1.01.07 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	18 Orang	75.170.000,000	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	18 Orang		
			1.06.04.1.01.12 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	18 Dokumen	189.100.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	18 Dokumen		
			1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			1.750.979.778,400	
			1.06.04.1.02.04 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.306.579.778,400	
				Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.06.04.1.02.13 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	16 Dokumen	444.400.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	16 Dokumen		
			1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			2.344.726.020,000	
			1.06.04.1.03.01 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.925.200.000,000	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang		
			1.06.04.1.03.03 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	147.326.020,000	
				Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang		
			1.06.04.1.03.05 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	64.200.000,000	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang		
			1.06.04.1.03.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	24.000.000,000	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang		
			1.06.04.1.03.07 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	84.000.000,000	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang		
			1.06.04.1.03.12 - Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	50 Orang	100.000.000,000	
				Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	50 Orang		
			1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			975.571.085,000	
			1.06.04.1.05.05 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	462.946.085,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang		
			1.06.04.1.05.11 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	5 Dokumen	512.625.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	5 Dokumen		
			1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			5.068.943.560,000	
			1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			5.068.943.560,000	
			1.06.05.1.02.01 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	500 Keluarga	1.383.207.560,000	
				Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	500 Keluarga		
			1.06.05.1.02.02 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	147 Keluarga	3.685.736.000,000	
			1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			6.962.543.500,000	
			1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			6.962.543.500,000	
			1.06.06.1.01.01 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	500 Orang	905.855.500,000	
				Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	500 Orang		
			1.06.06.1.01.03 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	29 Unit	4.472.000.000,000	
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	29 Unit		
			1.06.06.1.01.04 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.584.688.000,000	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.085.507.873,200		
			2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			453.288.745,000		
			2.08.02.1.01.03 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah	453.288.745,000		
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Pemerintah	20 Perangkat Daerah			
			2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi				378.600.000,000	
			2.08.02.1.02.01 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	50 Dokumen	378.600.000,000		
				Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	50 Dokumen			
			2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				253.619.128,200	
			2.08.02.1.03.03 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	30 Dokumen	253.619.128,200		
				Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 Dokumen			
			2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				988.602.085,000	
	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				517.945.710,000			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.08.03.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	517.945.710,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		
			2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			145.649.190,000	
			2.08.03.1.02.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	35 Layanan	145.649.190,000	
				Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	35 Layanan		
			2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			325.007.185,000	
			2.08.03.1.03.03 - Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	177.157.370,000	
				Tersedianya Kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	50 Orang		
			2.08.03.1.03.04 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	147.849.815,000	
				Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen		
			2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			435.090.090,000	
			2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			435.090.090,000	
			2.08.04.1.01.02 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	30 Dokumen	435.090.090,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Dokumen		
			2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			592.130.380,000	
			2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			448.981.190,000	
			2.08.06.1.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	75 Organisasi	448.981.190,000	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	75 Organisasi		
			2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			143.149.190,000	
			2.08.06.1.02.01 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	35 Orang	143.149.190,000	
				Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	35 Orang		
			2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			360.273.275,000	
			2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			126.440.275,000	
			2.08.07.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	20 Dokumen	126.440.275,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	20 Dokumen		
			2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			165.119.000,000	
			2.08.07.1.02.01 - Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	20 Orang	68.714.000,000	
				Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	20 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.08.07.1.02.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	19 Layanan	96.405.000,000	
				Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	19 Layanan		
			2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			68.714.000,000	
			2.08.07.1.03.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	68.714.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		
	2.12 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			295.600.000,000	
			2.12.02.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			295.600.000,000	
			2.12.02.1.03.01 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	295.600.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:58:07.524201
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan		
			2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			1.121.500.000,000	
			2.12.03.1.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil			497.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.12.03.1.01.05 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 Dokumen	497.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Setuju). 2). Indikator Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:58:51.481706
				Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen		
			2.12.03.1.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			513.700.000,000	
			2.12.03.1.02.04 - Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	20 Dokumen	513.700.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:59:38.734714
				Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	20 Dokumen		
			2.12.03.1.03 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			110.800.000,000	
			2.12.03.1.03.02 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan	110.800.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:00:21.000358
				Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan		
			2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			1.750.587.205,000	
			2.12.04.1.01 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			720.258.815,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.12.04.1.01.01 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	468.917.515,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Setuju). 2). Indikator Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tidak sesuai dengan Keppmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:01:18.748407
				Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen		
			2.12.04.1.01.02 - Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	251.341.300,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Setuju). 2). Indikator Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan Keppmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:02:15.764216
				Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
			2.12.04.1.02 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			720.099.860,000	
			2.12.04.1.02.02 - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	413.799.860,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Setuju). 2). Indikator Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan tidak sesuai dengan Keppmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:02:51.210463
				Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.12.04.1.02.04 - Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	306.300.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:04:01.104248
				Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		
			2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			310.228.530,000	
			2.12.04.1.03.02 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	55 Orang	310.228.530,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:05:03.103311
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	55 Orang		
			2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			135.010.000,000	
			2.12.05.1.01 - Penyediaan Profil Kependudukan			135.010.000,000	
			2.12.05.1.01.02 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	60 Dokumen	135.010.000,000	SUPD : 1). Indikator Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun diubah menjadi Jumlah dokumen penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain karena tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:06:02.205094
				Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	60 Dokumen		

Jumlah :

78.291.374.365,60

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 2.09.3.27.0.00.01.00 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			96.256.764.400,000	
			2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.188.242.800,000	
			2.09.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.572.322.800,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			2.09.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	152.500.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			2.09.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	463.420.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			83.993.944.400,000	
			2.09.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/ Bulan	83.918.844.400,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/ Bulan		
			2.09.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	75.100.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		
			2.09.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.790.586.000,000	
			2.09.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	476 Paket	985.436.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	476 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.09.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	425.150.000,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			2.09.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	380.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Orang		
			2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.474.013.400,000	
			2.09.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.297.277.400,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket		
			2.09.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	152.836.000,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Paket		
			2.09.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		
			2.09.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	102.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket		
			2.09.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	218.400.000,000	
				Tersedianya Bahan/Material	12 Paket		
			2.09.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	1.503.500.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		
			2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.180.200.000,000	
			2.09.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
			2.09.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	903.200.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.09.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	158.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan		
			2.09.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	104.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.629.777.800,000	
			2.09.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	164 Unit	866.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164 Unit		
			2.09.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2.763.777.800,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit		
			2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			10.393.156.906,000	
			2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			4.975.638.565,000	
			2.09.03.1.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	749.935.985,000	
				Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan		
			2.09.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	1.567.650.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan		
			2.09.03.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	988.195.000,000	
				Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen		
			2.09.03.1.01.06 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3 Dokumen	1.669.857.580,000	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			2.902.530.000,000	
			2.09.03.1.02.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	2 Laporan	932.730.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	2 Laporan		
			2.09.03.1.02.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	3 Laporan	1.969.800.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	3 Laporan		
			2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			2.514.988.341,000	
			2.09.03.1.04.01 - Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Dokumen	730.950.000,000	
				Terlaksananya Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Dokumen		
			2.09.03.1.04.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	20 Laporan	1.311.500.001,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	20 Laporan		
			2.09.03.1.04.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	25 Laporan	472.538.340,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	25 Laporan		
			2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			1.132.401.570,000	
			2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			1.132.401.570,000	
			2.09.04.1.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	29 Dokumen	1.132.401.570,000	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	29 Dokumen		
			2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.254.749.040,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.254.749.040,000	
			2.09.05.1.01.02 - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	1.116.161.090,000	
				Tersertifikasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Sertifikat		
			2.09.05.1.01.03 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	420.287.950,000	
				Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen		
			2.09.05.1.01.04 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 Dokumen	718.300.000,000	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 Dokumen		
3 . URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	3.27 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			32.299.425.740,843	
			3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			2.424.291.810,000	
			3.27.02.1.01.01 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1.353.874.290,000	
				Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		
			3.27.02.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.070.417.520,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		
			3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			17.955.714.240,843	
			3.27.02.1.02.01 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	26000 Sertifikat	1.962.825.396,400	
				Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	226000 Sertifikat		
			3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	3 Laporan	1.583.005.855,443	
				Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	18000 Dokumen	3.664.929.264,000	
				Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	18000 Dokumen		
			3.27.02.1.02.04 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	26000 Laporan	10.744.953.725,000	
				Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	26000 Laporan		
			3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			5.774.763.690,000	
			3.27.02.1.04.01 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2.752.113.690,000	
				Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		
			3.27.02.1.04.02 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	3.022.650.000,000	
				Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan		
			3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			6.144.656.000,000	
			3.27.02.1.05.01 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	6.144.656.000,000	
				Terkendalinya Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1 Laporan		
			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			8.933.693.105,333	
			3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian			8.933.693.105,333	
			3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen	600.548.658,000	
				Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen	4.003.565.799,333	
				Terkendali dan Termanfaatkannya Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen		
			3.27.03.1.01.09 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1.215.960.355,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		
			3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	11 Unit	3.113.618.293,000	
				Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	11 Unit		
			3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			2.066.368.645,000	
			3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.061.873.455,000	
			3.27.04.1.01.02 - Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1.061.873.455,000	
				Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		
			3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			1.004.495.190,000	
			3.27.04.1.03.03 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1.004.495.190,000	
				Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		
			3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			3.091.244.313,750	
			3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			3.091.244.313,750	
			3.27.05.1.01.01 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	165 Ha	3.091.244.313,750	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	165 Ha		
			3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			506.255.000,000	
			3.27.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			506.255.000,000	
			3.27.06.1.01.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	30 Laporan	506.255.000,000	
				Terbina dan Terawasinya Penerapan Izin Usaha Pertanian	30 Laporan		
			3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			23.663.955.678,874	
			3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			14.965.532.051,847	
			3.27.07.1.01.01 - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	7.167.761.186,597	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	500 Orang		
			3.27.07.1.01.02 - Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang	7.797.770.865,250	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	500 Orang		
			3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			4.257.391.322,050	
			3.27.07.1.02.01 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1000 Dokumen	1.406.545.322,050	
				Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	1000 Dokumen		
			3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	40 Kelompok	2.850.846.000,000	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	40 Kelompok		
			3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			4.441.032.304,977	
			3.27.07.1.03.01 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	20 Unit	778.942.304,977	
				Terbentuk dan Beroperasinya Kelembagaan Koorporasi Petani	20 Unit		
			3.27.07.1.03.02 - Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	2 Laporan	3.662.090.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	2 Laporan		
Jumlah :						180.598.014.399,80	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 2.11.3.28.0.00.02.00 - DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			133.583.062.485,000	
			2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.774.012.635,000	
			2.11.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	72.500.000,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			2.11.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	55.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			2.11.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	55.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			2.11.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	55.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
			2.11.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	55.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
			2.11.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	26.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			2.11.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.455.512.635,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		
			2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			113.503.409.850,000	
			2.11.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	751 Orang/ Bulan	113.288.409.850,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	751 Orang/ Bulan		
			2.11.01.1.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	50.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		
			2.11.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	50.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		
			2.11.01.1.02.06 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
			2.11.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	47.500.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			2.11.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	42.500.000,000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			110.500.000,000	
			2.11.01.1.03.01 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	110.500.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
			2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			563.000.000,000	
			2.11.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38.000.000,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			2.11.01.1.05.05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000,000	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
			2.11.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	300.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang		
			2.11.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	25.000.000,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		
			2.11.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	150.000.000,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		
			2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.821.894.000,000	
			2.11.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket		
			2.11.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	150.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket		
			2.11.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		
			2.11.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	500.000.000,000	
			2.11.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	200.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.11.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	30.000.000,000	
			2.11.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	500.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan		
			2.11.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	4.001.894.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan		
			2.11.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	270.000.000,000	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
			2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.779.636.000,000	
			2.11.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		
			2.11.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.750.000.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit		
			2.11.01.1.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	748.716.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit		
			2.11.01.1.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.280.920.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit		
			2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.755.000.000,000	
			2.11.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	100.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		
			2.11.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	38 Laporan	1.100.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.11.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	55.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan		
			2.11.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	3.500.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Laporan		
			2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.275.610.000,000	
			2.11.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	475.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit		
			2.11.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	50.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit		
			2.11.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			2.11.01.1.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	750.610.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit		
			2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			1.299.998.293,000	
			2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			450.000.000,000	
			2.11.02.1.01.02 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen	450.000.000,000	SUPD : terdapat 2 penginputan indikator yang sama (duplikasi). Mohon untuk diklarifikasi/disesuaikan kembali Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:31:01.927343

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen		
			2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			849.998.293,000	
			2.11.02.1.02.01 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	3 Dokumen	849.998.293,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang terintegrasi dengan perencanaan darat dan laut adalah kinerja dari sub kegiatan ini bukan indikator. Jadi mohon diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:40:35.685636
				Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	3 Dokumen		
			2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			50.202.187.090,000	
			2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			49.740.687.177,000	
			2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	3.683.000.000,000	SUPD : terdapat 2 penginputan indikator yang sama (duplikasi). Mohon untuk diklarifikasi/disesuaikan kembali Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:42:35.80814
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		
			2.11.03.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	46.057.687.177,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim adalah kinerja dari sub kegiatan ini bukan indikator. Jadi mohon diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:45:42.162036
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 Dokumen		
			2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			199.999.913,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.11.03.1.02.03 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	199.999.913,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan adalah kinerja dari sub kegiatan ini bukan indikator. Jadi mohon diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:48:07.94476
				Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik		
			2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			261.500.000,000	
			2.11.03.1.03.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	261.500.000,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan LH kewenangan pemerintah dan/atau kabupaten/kota adalah kinerja dari sub kegiatan ini bukan indikator. Jadi mohon diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:49:37.425179
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
			2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			6.750.000.000,000	
			2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			6.750.000.000,000	
			2.11.04.1.01.01 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	250.000.000,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun adalah kinerja dari sub kegiatan ini bukan indikator. Jadi mohon diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:50:29.166266
				Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	1 Dokumen		
			2.11.04.1.01.02 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5 Ha	3.500.000.000,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola adalah kinerja dari sub kegiatan ini bukan indikator. Jadi mohon diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:51:31.169777
				Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	5 Ha		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.11.04.1.01.03 - Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	150 Ha	3.000.000.000,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu kebun raya yang dikelola merupakan kinerja dari sub kegiatan ini bukan indikator. Jadi mohon diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:53:13.856237
				Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	150 Ha		
			2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			515.000.000,000	
			2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			515.000.000,000	
			2.11.05.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	515.000.000,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya merupakan kinerja dari sub kegiatan ini. Mohon diklarifikasi/ disesuaikan lagi Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:54:02.098902
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen		
			2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			894.347.725,000	
			2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			894.347.725,000	
			2.11.06.1.01.02 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	253.847.725,000	SUPD : Terkait indikator yang diinput yaitu meningkatnya kapasitas pejabat pengawas LH daerah merupakan kinerja dari sub kegiatan ini bukan indikator. Jadi mohon diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:56:01.054028
				Meningkatnya Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	1 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.11.06.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	640.500.000,000	SUPD : terkait indikator yang diinput yaitu terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kinerja dari sub kegiatan ini. Mohon diklarifikasi/disesuaikan kembali, Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:56:36.695432
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen		
			2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.302.042.500,000	
			2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			1.302.042.500,000	
			2.11.08.1.01.01 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	146.400.000,000	SUPD : terkait penginputan indikator yaitu Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Provinsi/ yang Terdaftar di Provinsi yang Ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya merupakan kinerja dari sub kegiatan ini. Mohon untuk diklarifikasi/disesuaikan lagi Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:58:45.771898
				Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Provinsi/ yang Terdaftar di Provinsi yang Ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	3 Lembaga		
			2.11.08.1.01.03 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1000 Orang	1.155.642.500,000	SUPD : terkait penginputan indikator Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi adalah merupakan kinerja dari sub kegiatan ini. Mohon utk diklarifikasi/disesuaian lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:00:02.4855
				Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	1000 Orang		
			2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			800.000.000,000	
			2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			800.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.11.09.1.01.01 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	800.000.000,000	SUPD : terkait penginputan indikator Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah merupakan kinerja dari sub kegiatan ini. Mohon untuk diklarifikasi/disesuaikan kembali Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:01:01.336446
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Entitas		
			2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			298.007.460,000	
			2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			298.007.460,000	
			2.11.10.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	3 Dokumen	298.007.460,000	SUPD : terkait penginputan indikator Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan adalah merupakan kinerja dari sub kegiatan ini. Mohon untuk diklarifikasi/disesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:03:46.375817
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	3 Dokumen		
			2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			899.947.992,000	
			2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			899.947.992,000	
			2.11.11.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	899.947.992,000	SUPD : terkait penginputan terkait Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan adalah merupakan kinerja dari sub kegiatan ini. Mohon untuk klarifikasi/ sesuaikan lagi. Oleh : sublh@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:05:44.763178
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3 . URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.28 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			37.016.082.305,000	
			3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			812.500.000,000	
			3.28.03.1.01.03 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	14 Unit	812.500.000,000	
				Tersedianya Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor	14 Unit		
			3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			1.852.086.000,000	
			3.28.03.1.02.01 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	14 Dokumen	1.852.086.000,000	
				Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	14 Dokumen		
			3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			5.489.317.365,000	
			3.28.03.1.03.01 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	8 Dokumen	2.671.750.000,000	
				Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen		
			3.28.03.1.03.02 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	434.400.000,000	
				Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen		
			3.28.03.1.03.03 - Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	2 Dokumen	30.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	2 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2.353.167.365,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen		
			3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			8.940.055.000,000	
			3.28.03.1.04.02 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	6.484.480.000,000	SUPD : Mohon untuk menyesuaikan target terkait Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kesepakatan pada Rakortekrenbang 2022, yakni seluas 5.270 Ha. Oleh : subkehutanan@bangda.kemendagri.go.id
				Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha		
			3.28.03.1.04.04 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	243 Ha	1.974.975.000,000	
				Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	243 Ha		
			3.28.03.1.04.08 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	480.600.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan		
			3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			12.795.000.000,000	
			3.28.03.1.05.01 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	200 Ha	3.160.000.000,000	
				Tercegahnya Kerusakan Hutan	200 Ha		
			3.28.03.1.05.02 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	200 Ha	4.940.000.000,000	
				Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	200 Ha		
			3.28.03.1.05.04 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	38 Dokumen	3.950.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	38 Dokumen		
			3.28.03.1.05.05 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	745.000.000,000	
				Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	15 Laporan		
			3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			2.000.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.28.03.1.06.04 - Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	2 Unit Managemen	2.000.000.000,000	
				Terpenuhinya Hak Akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah	2 Unit Managemen		
			3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			1.627.123.940,000	
			3.28.03.1.07.02 - Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1.627.123.940,000	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		
			3.28.03.1.09 - Perbenihan Tanaman Hutan			3.500.000.000,000	
			3.28.03.1.09.02 - Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	3 Sertifikat	1.096.621.080,000	
				Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	3 Sertifikat		
			3.28.03.1.09.04 - Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1.502.194.620,000	
				Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	1 Sertifikat		
			3.28.03.1.09.05 - Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	601.184.300,000	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	1 Laporan		
			3.28.03.1.09.06 - Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5 Ha	300.000.000,000	
				Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	5 Ha		
			3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			7.064.820.000,000	
			3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			7.064.820.000,000	
			3.28.04.1.03.01 - Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 Dokumen	863.600.000,000	
				Terencanakan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 Dokumen		
			3.28.04.1.03.04 - Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	10 Ha	1.501.220.000,000	
				Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	10 Ha		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang	3.000.000.000,000	
				Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50 Orang		
			3.28.04.1.03.06 - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	200 Ha	1.700.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	200 Ha		
			3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			2.235.400.000,000	
			3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			2.235.400.000,000	
			3.28.05.1.01.01 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	24 Orang	118.400.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	24 Orang		
			3.28.05.1.01.02 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	168.660.000,000	
				Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	6 Kelompok		
			3.28.05.1.01.03 - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	40 Ha	1.948.340.000,000	SUPD : Mohon untuk menyesuaikan target terkait Perhutanan Sosial sesuai dengan kesepakatan pada Rakortekrenbang 2022 sebesar 20.000 Ha Oleh : subkehutanan@bangda.kemendagri.go.id
				Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	40 Ha		
			3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			24.678.225.000,000	
			3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			24.678.225.000,000	
			3.28.06.1.01.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	700 Orang	23.294.225.000,000	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	700 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.28.06.1.01.05 - Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	3 Lembaga	1.384.000.000,000	
				Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	3 Lembaga		
Jumlah :						267.539.120.850,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 2.13.0.00.0.00.01.00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.151.998.687,500	
			2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			341.118.400,000	
			2.13.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30.190.700,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			2.13.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.190.700,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			2.13.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.345.350,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			2.13.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.405.350,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
			2.13.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.435.350,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
			2.13.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	60.193.150,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
			2.13.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	129.357.800,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.308.758.050,000	
			2.13.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	13.106.667.950,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan		
			2.13.01.1.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	30.987.350,000	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		
			2.13.01.1.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	79.407.800,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		
			2.13.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.649.350,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			2.13.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	30.057.800,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			2.13.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.987.800,000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			2.13.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			60.913.400,000	
			2.13.01.1.03.01 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.546.600,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
			2.13.01.1.03.05 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.366.800,000	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
			2.13.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			487.364.400,000	
			2.13.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	258 Paket	270.900.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	258 Paket		
			2.13.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	31.464.400,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		
			2.13.01.1.05.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			2.13.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	35.000.000,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
			2.13.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	120.000.000,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		
			2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.137.500.000,000	
			2.13.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket		
			2.13.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	47.500.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket		
			2.13.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	75.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.13.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	75.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket		
			2.13.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	75.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Dokumen		
			2.13.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	105.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		
			2.13.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	1.750.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		
			2.13.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			246.115.437,500	
			2.13.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	46.115.437,500	
				Tersedianya Mebel	5 Paket		
			2.13.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	200.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit		
			2.13.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			786.240.000,000	
			2.13.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	198.240.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			2.13.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	588.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Laporan		
			2.13.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			783.989.000,000	
			2.13.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	274.080.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit		
			2.13.01.1.09.05 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	14.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	2 Unit		
			2.13.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	85.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit		
			2.13.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	410.909.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit		
			2.13.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit		
			2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			5.040.500.000,000	
			2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			5.040.500.000,000	
			2.13.04.1.01.05 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	5.040.500.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:11:15.074558
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		
			2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			6.951.729.600,000	
			2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			6.951.729.600,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.13.05.1.01.02 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.604.729.600,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:12:11.988209
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		
			2.13.05.1.01.05 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	3.627.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:13:09.577694
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen		
			2.13.05.1.01.09 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	720.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:14:00.975086

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		
			2.13.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA			7.376.071.650,000	
			2.13.06.1.01 - Pengembangan Data/Informasi			896.900.000,000	
			2.13.06.1.01.02 - Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	1 Dokumen	896.900.000,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK (Setuju). 2). Indikator Terlaksananya Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id
				Terlaksananya Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	1 Dokumen		
			2.13.06.1.02 - Pemberdayaan Masyarakat Kampung			6.479.171.650,000	
			2.13.06.1.02.02 - Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	6.479.171.650,000	SUPD : 1). Indikator Terfasilitasinya Pengembangan Teknologi Tepat Guna tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:53:58.819706
				Terfasilitasinya Pengembangan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		
			2.13.08 - PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA			37.275.968.000,000	
			2.13.08.1.01 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua			12.208.829.000,000	
			2.13.08.1.01.06 - Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	1 Dokumen	3.650.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.13.08.1.01.11 - Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung	5 Orang	8.558.829.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:56:21.842901
				Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	5 Orang		
			2.13.08.1.02 - Pemberdayaan Orang Asli Papua			25.067.139.000,000	
			2.13.08.1.02.02 - Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	5 Dokumen	25.067.139.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:57:06.517138
				Terlaksananya Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	5 Dokumen		
Jumlah :						74.796.267.937,50	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 2.15.2.15.2.15.15.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			35.821.130.606,000	
			2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.481.248.920,000	
			2.15.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.149.887.880,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			2.15.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	66.611.040,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		
			2.15.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	264.750.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		
			2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.925.258.086,000	
			2.15.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	17.803.958.086,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan		
			2.15.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	88.800.000,000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		
			2.15.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	32.500.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.671.750.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.15.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	185 Paket	621.750.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	185 Paket		
			2.15.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	800.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150 Orang		
			2.15.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	250.000.000,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		
			2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.793.325.000,000	
			2.15.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket		
			2.15.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	786.325.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket		
			2.15.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			2.15.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		
			2.15.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	417.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			2.15.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.350.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.574.537.600,000	
			2.15.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.15.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	704.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit		
			2.15.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	820.537.600,000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit		
			2.15.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.000.000.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.647.800.000,000	
			2.15.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			2.15.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	560.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan		
			2.15.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.041.800.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			727.211.000,000	
			2.15.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	150.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit		
			2.15.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	577.211.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit		
			2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			23.338.115.000,000	
			2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			1.888.115.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.15.02.1.01.01 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3 Dokumen	1.888.115.000,000	SUPD : 1.setuju tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA Dinas Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:08:50.165874
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3 Dokumen		
			2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			740.000.000,000	
			2.15.02.1.02.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1 Unit	740.000.000,000	SUPD : 1.setuju tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA Dinas Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:10:54.154564
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1 Unit		
			2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			20.710.000.000,000	
			2.15.02.1.03.01 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	2 Dokumen	1.600.000.000,000	SUPD : 1.tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA Dinas 3. pagu terlalu besar perlu adanya penjelasan yg lebih rinci apakah menyusun dokumen membutuhkan dana sebesar tersebut Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:19:04.96437
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	2 Dokumen		
			2.15.02.1.03.02 - Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	16.660.000.000,000	SUPD : 1.setuju tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA Dinas Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:24:57.184472
				Terbangunnya Gedung Terminal	2 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.15.02.1.03.03 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit	2.350.000.000,000	SUPD : 1.setuju tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA 3.perlu penjelasan lebih rinci terkait sub kegiatan ini di renja dan DPA karena besarnya pagu yang dianggarkan Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:31:24.847052
				Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	2 Unit		
			2.15.02.1.03.04 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	100.000.000,000	SUPD : 1.setuju tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:44:28.480037
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1 Unit		
			2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			52.821.446.465,240	
			2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			46.066.446.465,240	
			2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	3 Unit	46.066.446.465,240	SUPD : 1.tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA 3 perlu dipastikan kembali apakah status aset pelabuhan apakah milik Kemenhub atau Pemprov papua, apabila milik Kemenhub perlu dilakukan P3D pelabuhan pengumpan regional terlebih dahulu, apabila aset milik pemda maka dapat dilaksanakan Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:55:23.904722
				Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	3 Unit		
			2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			6.755.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	3 Unit	5.220.000.000,000	SUPD : 1.setuju tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:57:42.509834
				Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Unit		
			2.15.03.1.10.05 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	1 Unit	1.535.000.000,000	SUPD : 1.setuju tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:58:04.356209
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Unit		
			2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			58.252.000.000,000	
			2.15.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi			58.252.000.000,000	
			2.15.04.1.01.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	3 Unit	58.252.000.000,000	SUPD : 1.setuju tapi tidak perlu menulis kinerja pada sub kegiatan ini cukup indikator yang sesuai dengan kepmendagri 050-5889, jadi kalimat kinerja sebaiknya dihapus 2. perlu penjelasan lebih lanjut terkait unit yang akan dibangun.di Renja atau DPA 3.perlu penjelasan lebih rinci terkait sub kegiatan ini di renja dan DPA karena besarnya pagu yang dianggarkan Oleh : subperhubungan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 10:00:17.224426
				Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	3 Unit		
Jumlah :						170.232.692.071,24	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 2.16.2.20.2.21.04.00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			22.975.571.130,000		
			2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.712.903.706,000	
			2.16.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ Bulan	16.712.903.706,000		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ Bulan			
			2.16.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				412.800.000,000	
			2.16.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	412.800.000,000		
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			
			2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.230.947.424,000	
			2.16.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.065.847.424,000		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket			
			2.16.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	240.000.000,000		
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4 Paket			
			2.16.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	99.600.000,000		
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	20 Paket			
			2.16.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.825.500.000,000		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan			
			2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				618.920.000,000	
	2.16.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	600.000.000,000				
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit					

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.16.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.920.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit		
			2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3.534.532.576,000	
			2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			3.534.532.576,000	
			2.16.02.1.01.05 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7 Dokumen	1.964.020.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7 Dokumen		
			2.16.02.1.01.06 - Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	1.570.512.576,000	
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen		
			2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			34.677.890.490,000	
			2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			34.677.890.490,000	
			2.16.03.1.02.07 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1.500.000.000,000	
				Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Unit		
			2.16.03.1.02.10 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	33.177.890.490,000	
				Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen		
	2.21 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			733.800.000,000	
			2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			733.800.000,000	
			2.21.02.1.01.01 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Dokumen	733.800.000,000	
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen		
Jumlah :						61.921.794.196,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30.619.602.668,000	
			2.18.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			381.588.150,000	
			2.18.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	312.893.470,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
			2.18.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	68.694.680,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		
			2.18.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.207.023.395,000	
			2.18.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	10.032.454.400,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan		
			2.18.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	174.568.995,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		
			2.18.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			663.337.270,000	
			2.18.01.1.03.01 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	24.937.270,000	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		
			2.18.01.1.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	638.400.000,000	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.18.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.501.020.450,000	
			2.18.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	417.500.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		
			2.18.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	29.120.450,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		
			2.18.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	1.054.400.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang		
			2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.384.373.745,000	
			2.18.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.605.650,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			2.18.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	827.500.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			2.18.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		
			2.18.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	370.580.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			2.18.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.320.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Dokumen		
			2.18.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	518.368.095,000	
				Tersedianya Bahan/Material	1 Paket		
			2.18.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	3.626.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.18.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.366.450.016,000	
			2.18.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	1.050.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit		
			2.18.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	683.130.000,000	
				Tersedianya Mebel	1 Paket		
			2.18.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	763.320.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit		
			2.18.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.650.000.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			2.18.01.1.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	220.000.016,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.200.900.000,000	
			2.18.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	12.700.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		
			2.18.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	290.200.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan		
			2.18.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	898.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan		
			2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.914.909.642,000	
			2.18.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	460.810.900,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.18.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	120.800.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit		
			2.18.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.333.298.742,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit		
			2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1.079.340.617,000	
			2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			382.168.600,000	
			2.18.02.1.01.02 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	100 Kegiatan usaha	382.168.600,000	
				Terlaksananya Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	100 Kegiatan usaha		
			2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			697.172.017,000	
			2.18.02.1.02.02 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	5 Dokumen	697.172.017,000	
				Tersedianya Peta Potensi Investasi Dan Peluang Usaha Provinsi	5 Dokumen		
			2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			5.411.847.200,000	
			2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			5.411.847.200,000	
			2.18.03.1.01.01 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	316.118.600,000	
				Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur promosi penanaman modal	7 Dokumen		
			2.18.03.1.01.02 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	8 Dokumen	5.095.728.600,000	
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	8 Dokumen		
			2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.305.684.715,000	
			2.18.04.1.01 - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.305.684.715,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.18.04.1.01.01 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1000 Pelaku Usaha	618.437.115,000	
				Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1000 Pelaku Usaha		
			2.18.04.1.01.02 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	200 Kegiatan usaha	687.247.600,000	
				Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan usaha		
			2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.770.808.750,000	
			2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.770.808.750,000	
			2.18.05.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan usaha	1.014.300.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan usaha		
			2.18.05.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	366.266.115,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha		
			2.18.05.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan usaha	390.242.635,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan usaha dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan usaha		
			2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			689.970.450,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			689.970.450,000	
			2.18.06.1.01.01 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	689.970.450,000	
Jumlah :						40.877.254.400,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 2.19.0.00.0.00.01.00 - DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2 .	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.19 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30.883.023.550,000	
			2.19.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			183.500.000,000	
			2.19.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	168.500.000,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			2.19.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			2.19.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.973.353.550,000	
			2.19.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/ Bulan	18.545.103.550,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/ Bulan		
			2.19.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	181.250.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan		
			2.19.01.1.02.06 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	185.900.000,000	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
			2.19.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	61.100.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		
			2.19.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			350.000.000,000	
			2.19.01.1.03.04 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	350.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
			2.19.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			799.850.000,000	
			2.19.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150150 Paket	225.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		
			2.19.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang		
			2.19.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	374.850.000,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		
			2.19.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.959.580.400,000	
			2.19.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.829.620,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket		
			2.19.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	225.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket		
			2.19.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	72.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		
			2.19.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	63.910.250,000	
				Tersedianya Bahan/Material	1 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.19.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			2.19.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.244.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			2.19.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	308.840.530,000	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		
			2.19.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200.000.000,000	
			2.19.01.1.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit		
			2.19.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.317.458.000,000	
			2.19.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			2.19.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	130.658.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan		
			2.19.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.162.800.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			2.19.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.049.281.600,000	
			2.19.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	17.600.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.19.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	34.260.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit		
			2.19.01.1.09.07 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	5.977.421.600,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21 Unit		
			2.19.01.1.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			2.19.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD			50.000.000,000	
			2.19.01.1.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	50.000.000,000	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		
			2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			3.762.240.000,000	
			2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			2.501.240.000,000	
			2.19.02.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	551.500.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	10 Orang		
			2.19.02.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	761.750.000,000	
				Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota	10 Orang		
			2.19.02.1.01.04 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	30 Orang	523.740.000,000	
				Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	30 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.19.02.1.01.09 - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	30 Orang	664.250.000,000	
				Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	30 Orang		
			2.19.02.1.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			1.261.000.000,000	
			2.19.02.1.02.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	10 Orang	600.500.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	10 Orang		
			2.19.02.1.02.02 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1 Dokumen	660.500.000,000	
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1 Dokumen		
			2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			24.941.130.375,000	
			2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.489.000.000,000	
			2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1.489.000.000,000	
				Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1 Unit		
			2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			6.726.325.000,000	
			2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1.670.125.000,000	
				Terselenggaranya Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	1 Dokumen		
			2.19.03.1.02.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Dokumen	1.029.000.000,000	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.19.03.1.02.03 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	50 Orang	4.027.200.000,000	
				Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	50 Orang		
			2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			14.250.555.375,000	
			2.19.03.1.03.01 - Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	162.000.000,000	
				Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	100 Orang		
			2.19.03.1.03.02 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3 Pelatda	2.049.000.000,000	
				Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3 Pelatda		
			2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80 Orang	10.794.805.375,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	80 Orang		
			2.19.03.1.03.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Dokumen	1.244.750.000,000	
				Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	2 Dokumen		
			2.19.03.1.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.475.250.000,000	
			2.19.03.1.04.01 - Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	863.750.000,000	
				Terlaksananya Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen		
			2.19.03.1.04.02 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	955.500.000,000	
				Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen		
			2.19.03.1.04.03 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	656.000.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen		
			2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			213.629.625,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.19.04.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			213.629.625,000	
			2.19.04.1.01.02 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	213.629.625,000	
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1 Organisasi		
Jumlah :						59.800.023.550,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 2.22.3.26.0.00.03.00 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30.415.442.659,000	
			2.22.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			258.000.000,000	
			2.22.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000,000	
			2.22.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			2.22.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			2.22.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	44.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
			2.22.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	64.000.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		
			2.22.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.747.083.550,000	
			2.22.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	26.559.583.550,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan		
			2.22.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	163.000.000,000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.22.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	24.500.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan		
			2.22.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			878.450.000,000	
			2.22.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	480.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket		
			2.22.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	240.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang		
			2.22.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	158.450.000,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		
			2.22.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.538.385.029,000	
			2.22.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	21.960.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket		
			2.22.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		
			2.22.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	212.757.500,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	50 Paket		
			2.22.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket	15.000.000,000	
			2.22.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	3.600.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Dokumen		
			2.22.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	192.000.000,000	
			2.22.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	993.067.529,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
			2.22.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			915.364.080,000	
			2.22.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	159.364.080,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14 Laporan		
			2.22.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	756.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan		
			2.22.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78.160.000,000	
			2.22.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	63.160.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit		
			2.22.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	15.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit		
			2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			4.267.275.000,000	
			2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.602.600.000,000	
			2.22.02.1.01.01 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1 Objek	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Objek		
			2.22.02.1.01.02 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	1.566.100.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang		
			2.22.02.1.01.03 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	536.500.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	1 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			1.314.675.000,000	
			2.22.02.1.02.01 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	439.550.000,000	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1 Objek		
			2.22.02.1.02.02 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	29 Laporan	450.000.000,000	
				Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	29 Laporan		
			2.22.02.1.02.03 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	2 Sertifikat	425.125.000,000	
				Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2 Sertifikat		
			2.22.02.1.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			350.000.000,000	
			2.22.02.1.03.02 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang	350.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	100 Orang		
			2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			1.712.493.717,000	
			2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.712.493.717,000	
			2.22.03.1.01.01 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	498.566.540,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100 Orang		
			2.22.03.1.01.02 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	60 Sertifikat	634.507.177,000	
				Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	60 Sertifikat		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.22.03.1.01.03 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	579.420.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1 Lembaga		
			2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			2.450.000.000,000	
			2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			2.450.000.000,000	
			2.22.04.1.01.01 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	80 Orang	900.000.000,000	
				Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	80 Orang		
			2.22.04.1.01.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	14 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	14 Unit		
			2.22.04.1.01.03 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	550.000.000,000	
				Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	1 Dokumen		
			2.22.04.1.01.04 - Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	500.000.000,000	
				Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen		
			2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1.697.926.893,000	
			2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			749.929.805,000	
			2.22.05.1.01.01 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	400.000.000,000	
				Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2 Objek		
			2.22.05.1.01.02 - Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	349.929.805,000	
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	5 Objek		
			2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			947.997.088,000	
			2.22.05.1.02.02 - Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	400.000.000,000	
				Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	5 Objek		
			2.22.05.1.02.04 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	547.997.088,000	
				Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			4.529.103.832,000	
			2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi			4.529.103.832,000	
			2.22.06.1.01.01 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	2 Unit	1.339.104.283,000	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	2 Unit		
			2.22.06.1.01.02 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	30 Orang	690.000.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	30 Orang		
			2.22.06.1.01.03 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit	1.599.999.549,000	
				Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit		
			2.22.06.1.01.04 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	4 Unit	260.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	4 Unit		
			2.22.06.1.01.05 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2 Unit	640.000.000,000	
				Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	2 Unit		
	3 .	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	3.26 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			18.466.090.000,000	
			3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			7.816.090.000,000	
			3.26.02.1.01.03 - Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	7.816.090.000,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Setuju). 2). Indikator Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:48:23.190295
				Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			10.150.000.000,000	
			3.26.02.1.03.03 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	9.550.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Setuju). 2). Indikator Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:49:52.958748
				Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi		
			3.26.02.1.03.05 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	600.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:50:38.737171
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen		
			3.26.02.1.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			500.000.000,000	
			3.26.02.1.04.04 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	500.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:51:24.824066
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan		
			3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			500.000.000,000	
			3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			500.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.26.03.1.01.01 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2000 Dokumen	500.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Setuju). 2). Indikator Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:52:22.279453
				Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2000 Dokumen		
			3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			900.000.000,000	
			3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			900.000.000,000	
			3.26.04.1.01.01 - Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	900.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia diubah menjadi Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif karen tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. 2). Indikator Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:54:03.313357
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	2 Unit		
			3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			1.835.011.448,640	
			3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			1.235.011.448,640	
			3.26.05.1.01.01 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Orang	699.011.448,640	SUPD : 1). Indikator Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya (Setuju). 2). Indikator Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-5889. Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:54:53.194096
				Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	100 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.26.05.1.01.04 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	536.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata tidak sesuai dengan Keppmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:55:39.483522
				Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang		
			3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			600.000.000,000	
			3.26.05.1.02.01 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	600.000.000,000	SUPD : 1). Indikator Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif tidak sesuai dengan Keppmendagri 050-5889. 2). Indikator Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Setuju). Oleh : subpariwisata@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 08:56:41.788008
				Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang		
Jumlah :						66.773.343.549,64	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3 . URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	3.25 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			31.361.649.849,750	
			3.25.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.378.842.725,000	
			3.25.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	476.368.380,000	SUPD : Daerah perlu klarifikasi terkait target sub kegiatan sebanyak 1 dokumen, dokumen jenis apa yang akan disusun dengan pagu sebesar Rp 476.368.380,- Oleh : subkelautan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 21:28:33.695958
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			3.25.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.100.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			3.25.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.100.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			3.25.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.100.000,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
			3.25.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.100.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.25.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	305.100.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			3.25.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	536.974.345,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			3.25.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.023.729.850,000	
			3.25.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/ Bulan	19.023.729.850,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/ Bulan		
			3.25.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.303.748.470,000	
			3.25.01.1.05.01 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35 Unit	789.388.470,000	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35 Unit		
			3.25.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	137 Paket	330.700.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	137 Paket		
			3.25.01.1.05.05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	57.800.000,000	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
			3.25.01.1.05.08 - Pindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	10 Orang	68.500.000,000	
				Terlaksananya Pindahan Tugas ASN	10 Orang		
			3.25.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67 Orang	757.360.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67 Orang		
			3.25.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	300.000.000,000	SUPD : Daerah perlu klarifikasi terkait target sub kegiatan sebanyak 1 orang dengan pagu yang cukup besar yakni Rp 300.000.000,- Oleh : subkelautan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 21:32:25.388663
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.25.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.889.257.304,750	
			3.25.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	696.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			3.25.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.707.304,750	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			3.25.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.099.550.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			3.25.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.147.055.000,000	
			3.25.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	700.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
			3.25.01.1.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.447.055.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit		
			3.25.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			833.150.000,000	
			3.25.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26.350.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			3.25.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			3.25.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	107.600.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan		
			3.25.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	199.200.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.25.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.785.866.500,000	
			3.25.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	626.866.500,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32 Unit		
			3.25.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.159.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			8.888.536.200,000	
			3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			2.090.536.200,000	
			3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	6730000 Ha	349.400.000,000	SUPD : 1. Daerah belum menyantumkan sub kegiatan terkait materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi. Hal ini sudah disepakati dalam Berita Acara Rakortekrenbang 2022 dengan target 1 Provinsi. 2. Daerah perlu klarifikasi terkait target sub kegiatan yakni 6730000 Ha, apakah luasan kawasan konservasi tersebut sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab, dalam Berita Acara kesepakatan Rakortekrenbang 2022, Provinsi Papua menyepakati bahwa luasan kawasan konservasi yang dicadangkan dan segera ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebesar 400270.62 Ha. Oleh : subkelautan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 21:34:11.311417
				Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	6730000 Ha		
			3.25.02.1.01.04 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200 Orang	1.741.136.200,000	
				Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.25.02.1.02 - Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			750.000.000,000	
			3.25.02.1.02.01 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Rekomendasi	750.000.000,000	
				Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Rekomendasi		
			3.25.02.1.03 - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			6.048.000.000,000	
			3.25.02.1.03.01 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	7 Orang	1.378.000.000,000	
				Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7 Orang		
			3.25.02.1.03.02 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Kelompok	1.900.000.000,000	
				Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Kelompok		
			3.25.02.1.03.03 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6 Orang	850.000.000,000	
				Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6 Orang		
			3.25.02.1.03.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	1.920.000.000,000	
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok		
			3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			58.570.710.000,000	
			3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			20.335.800.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.25.03.1.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	308.300.000,000	SUPD : Provinsi Papua belum menyantumkan target produksi perikanan tangkap seperti yang sudah disepakati dalam Berita Acara Rakortekrenbang 2022 yakni sebesar 302210 Ton. Oleh : subkelautan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 21:43:22.20699
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		
			3.25.03.1.01.02 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	86 Unit	18.877.500.000,000	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	86 Unit		
			3.25.03.1.01.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	14 Unit	1.150.000.000,000	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	14 Unit		
			3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.400.000.000,000	
			3.25.03.1.02.02 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	10 Unit	1.400.000.000,000	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	10 Unit		
			3.25.03.1.03 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			300.000.000,000	
			3.25.03.1.03.01 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	200 Dokumen	300.000.000,000	
				Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	200 Dokumen		
			3.25.03.1.04 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil			300.000.000,000	
			3.25.03.1.04.02 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	200 Rekomendasi	300.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	200 Rekomendasi		
			3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			36.234.910.000,000	
			3.25.03.1.06.01 - Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	9 Pelabuhan Perikanan	5.999.910.000,000	
				Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	9 Pelabuhan Perikanan		
			3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Unit	27.600.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3 Unit		
			3.25.03.1.06.03 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	2.635.000.000,000	
				Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3 Layanan		
			3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			24.365.730.000,000	
			3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			14.440.478.000,000	
			3.25.04.1.05.01 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	606.389.000,000	SUPD : Provinsi Papua belum menyantumkan target produksi perikanan budidaya seperti yang sudah disepakati dalam Berita Acara Rakortekrenbang 2022 yakni sebesar 23500.22 Ton. Oleh : subkelautan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 21:55:20.411057
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
			3.25.04.1.05.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	94 Unit	12.996.700.000,000	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	94 Unit		
			3.25.04.1.05.04 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit	367.389.000,000	
				Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit		
			3.25.04.1.05.07 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	10 Orang	470.000.000,000	
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 Orang		
			3.25.04.1.06 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			9.925.252.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.25.04.1.06.01 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48 Unit	8.150.000.000,000	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48 Unit		
			3.25.04.1.06.02 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1.775.252.000,000	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		
			3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			10.002.198.000,000	
			3.25.05.1.01 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			9.286.598.000,000	
			3.25.05.1.01.01 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.221.898.000,000	SUPD : 1. Daerah belum mengakomodir sub kegiatan terkait Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi yang sudah disepakati dalam Berita Acara Rakortekrenbang 2022 dengan target 4 Forum. 2. Daerah belum mengakomodir sub kegiatan terkait Operasi kapal/speedboat pengawas yang sudah disepakati dalam Berita Acara Rakortekrenbang 2022 dengan target 50 Hari. 3. Daerah belum mengakomodir sub kegiatan terkait Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya yang sudah disepakati dalam Berita Acara Rakortekrenbang 2022 dengan target 85 Pelaku Usaha. Oleh : subkelautan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 22:06:55.09766
				Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.25.05.1.01.02 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1.194.250.000,000	
				Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		
			3.25.05.1.01.03 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	70.450.000,000	
				Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		
			3.25.05.1.01.04 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	100 Kelompok	4.800.000.000,000	SUPD : Daerah perlu menyesuaikan target sub kegiatan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan Rakortekrenbang 2022 yakni sebanyak 200 kelompok. Oleh : subkelautan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 21:59:16.438298
				Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	100 Kelompok		
			3.25.05.1.02 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			715.600.000,000	
			3.25.05.1.02.03 - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	715.600.000,000	
				Terawasinya Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		
			3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			10.114.075.800,000	
			3.25.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			149.100.000,000	
			3.25.06.1.01.03 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	149.100.000,000	SUPD : Daerah belum mengakomodir sub kegiatan terkait konsumsi ikan yang sudah disepakati dalam Berita Acara kesepakatan Rakortekrenbang 2022 dengan target sebesar 66.98 Kg/KAP/TH. Oleh : subkelautan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 22:02:58.530237
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			8.335.892.400,000	
			3.25.06.1.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	150.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha		
			3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	20 Unit Usaha	8.185.892.400,000	
				Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	20 Unit Usaha		
			3.25.06.1.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.629.083.400,000	
			3.25.06.1.03.02 - Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Unit Usaha	1.629.083.400,000	
				Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	3 Unit Usaha		
Jumlah :						143.302.899.849,75	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 3.29.0.00.0.00.01.00 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3 .	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	3.29 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			53.145.857.406,000	
			3.29.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			325.350.000,000	
			3.29.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	93.800.000,000	
			3.29.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	231.550.000,000	
			3.29.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.801.343.750,000	
			3.29.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	21.801.343.750,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan		
			3.29.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.585.463.600,000	
			3.29.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	592.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	160160 Paket		
			3.29.01.1.05.06 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	12 Orang	190.800.000,000	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	12 Orang		
			3.29.01.1.05.08 - Pemindehan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	23 Orang	240.900.000,000	
				Terlaksananya Pemindehan Tugas ASN	23 Orang		
			3.29.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	2.612.500.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17 Orang		
			3.29.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	5.949.263.600,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang		
			3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.923.722.540,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.29.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket	500.682.540,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126 Paket		
			3.29.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.200.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket		
			3.29.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	242.610.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket		
			3.29.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.400.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen		
			3.29.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	355.680.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
			3.29.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420 Laporan	4.284.150.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420 Laporan		
			3.29.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	462.000.000,000	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
			3.29.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.916.149.116,000	
			3.29.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 Paket	315.364.920,000	
				Tersedianya Mebel	47 Paket		
			3.29.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	122 Unit	1.385.854.196,000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	122 Unit		
			3.29.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	11.214.930.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit		
			3.29.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			581.138.400,000	
			3.29.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	581.138.400,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		
			3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.012.690.000,000	
			3.29.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	239.690.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit		
			3.29.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	51.600.000,000	
			3.29.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.721.400.000,000	
			3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			52.202.413.640,000	
			3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			51.520.535.000,000	
			3.29.02.1.01.01 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2 Dokumen	49.221.010.000,000	
				Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2 Dokumen		
			3.29.02.1.01.02 - Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	2.222.085.000,000	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen		
			3.29.02.1.01.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	77.440.000,000	
				Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		
			3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			681.878.640,000	
			3.29.02.1.03.01 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	203.440.000,000	
				Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.29.02.1.03.02 - Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	399.463.640,000	
				Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		
			3.29.02.1.03.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	78.975.000,000	
				Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		
			3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			2.211.850.000,000	
			3.29.03.1.03 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			578.400.000,000	
			3.29.03.1.03.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	10 Laporan	283.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	10 Laporan		
			3.29.03.1.03.04 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan	295.400.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.29.03.1.06 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			329.700.000,000	
			3.29.03.1.06.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	329.700.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		
			3.29.03.1.13 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			484.150.000,000	
			3.29.03.1.13.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3 Laporan	484.150.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3 Laporan		
			3.29.03.1.14 - Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			461.300.000,000	
			3.29.03.1.14.02 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	4 Laporan	461.300.000,000	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	4 Laporan		
			3.29.03.1.16 - Penetapan Harga Patokan Batuan			358.300.000,000	
			3.29.03.1.16.01 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	3 Dokumen	358.300.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Minera Bukan Logam	3 Dokumen		
			3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			1.364.900.000,000	
			3.29.05.1.03 - Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			1.364.900.000,000	
			3.29.05.1.03.03 - Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	590.400.000,000	
			3.29.05.1.03.04 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	774.500.000,000	
			3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			104.296.484.149,600	
			3.29.06.1.01 - Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			1.252.034.501,600	
			3.29.06.1.01.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1.252.034.501,600	
				Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		
			3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			103.044.449.648,000	
			3.29.06.1.06.01 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	89.500.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.29.06.1.06.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	266.800.000,000	
			3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1201 Unit	102.263.349.648,000	
				Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1201 Unit		
			3.29.06.1.06.07 - Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	424.800.000,000	
Jumlah :						213.221.505.195,60	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 3.30.2.07.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			1.301.710.750,000	
			2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			1.301.710.750,000	
			2.07.02.1.01.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	441.834.000,000	<p>SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu:</p> <p>1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua tidak sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi.</p> <p>2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:11:53.836831</p>
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.07.02.1.01.02 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	100 Orang	859.876.750,000	SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu: 1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua tidak sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:10:09.425328
				TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	100 Orang		
			2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.218.054.750,000	
			2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			1.583.008.000,000	
			2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	100 Orang	1.583.008.000,000	SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu: 1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua tidak sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi. 2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:28:19.126073
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100 Orang		
			2.07.03.1.02 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			365.762.750,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.07.03.1.02.01 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	4 LPK	365.762.750,000	SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu: 1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua tidak sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi. 2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:27:58.039423
				Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	4 LPK		
			2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			269.284.000,000	
			2.07.03.1.04.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	269.284.000,000	SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu: 1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua tidak sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi. 2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:23:17.167248
				Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Dokumen		
			2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			970.703.850,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			970.703.850,000	
			2.07.04.1.01.01 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	722.750.000,000	<p>SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu:</p> <p>1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua belum sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi.</p> <p>2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:40:07.278271</p>
				Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	30 Orang		
			2.07.04.1.01.03 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	600 Orang	247.953.850,000	<p>SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu:</p> <p>1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua tidak sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi.</p> <p>2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:36:21.267991</p>
				Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	600 Orang		
			2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			3.218.102.195,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			2.200.928.400,000	
			2.07.05.1.01.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	1 Perusahaan	421.645.000,000	<p>SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu:</p> <p>1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua belum sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi.</p> <p>2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:50:01.953089</p>
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	1 Perusahaan		
			2.07.05.1.01.02 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	5 Perusahaan	1.000.320.000,000	<p>SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu:</p> <p>1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua belum sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi.</p> <p>2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:49:45.477617</p>
				Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.07.05.1.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	778.963.400,000	SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu: 1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua belum sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi. 2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:46:02.81925
				Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan		
			2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			460.267.460,000	
			2.07.05.1.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	460.267.460,000	SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu: 1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua belum sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi. 2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:43:09.044602

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Perkara		
			2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			556.906.335,000	
			2.07.05.1.03.01 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	1 Surat Keputusan	556.906.335,000	<p>SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu:</p> <p>1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua belum sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi.</p> <p>2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:42:04.350534</p>
				Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		
			2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			1.022.308.390,000	
			2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			1.022.308.390,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.07.06.1.01.01 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	100 Perusahaan	551.355.265,000	<p>SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu:</p> <p>1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua belum sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi.</p> <p>2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:55:07.351001</p>
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	100 Perusahaan		
			2.07.06.1.01.03 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan	470.953.125,000	<p>SUPD : Berdasarkan telaahan terhadap Indikator yang diinput, maka berikut catatan/masukan dari SUBDIT - Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu:</p> <p>1) Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, maka antara nomenklatur Kepmen 050 dengan indikator Subkegiatan yang diinput oleh Pemprov Papua belum sesuai, mohon untuk dapat mengikuti nomenklatur yang ada tanpa ada penambahan/ modifikasi.</p> <p>2) Mohon untuk dapat memperhatikan kembali hasil Desk/ Rakortek mengenai Target/ Anggaran yang telah disepakati. Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:54:56.099781</p>
				Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	50 Perusahaan		
	2.17 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			819.487.860,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			819.487.860,000	
			2.17.03.1.01.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	9 Dokumen	437.355.095,000	
				Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	9 Dokumen		
			2.17.03.1.01.02 - Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	30 Unit Usaha	382.132.765,000	
				Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	30 Unit Usaha		
			2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			922.205.330,000	
			2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			922.205.330,000	
			2.17.04.1.01.01 - Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	8 Unit Usaha	411.394.690,000	
				Terlaksananya Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	8 Unit Usaha		
			2.17.04.1.01.02 - Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	80 Unit Usaha	510.810.640,000	
				Terukurnya Tingkat Kesehatan Koperasi	80 Unit Usaha		
			2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			2.503.949.456,000	
			2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.503.949.456,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1 Orang	2.503.949.456,000	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1 Orang		
			2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			5.421.041.401,000	
			2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			5.421.041.401,000	
			2.17.06.1.01.02 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	4 Unit Usaha	4.120.247.065,000	
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	4 Unit Usaha		
			2.17.06.1.01.03 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	270 Keluarga	1.300.794.336,000	
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	270 Keluarga		
			2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			9.949.377.195,000	
			2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			9.949.377.195,000	
			2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	954 Unit Usaha	7.939.813.195,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	954 Unit Usaha			
			2.17.07.1.01.02 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	350 Orang	2.009.564.000,000		
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	350 Orang			
			2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			6.152.532.430,000		
			2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			6.152.532.430,000		
			2.17.08.1.01.01 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 Unit Usaha	4.946.170.000,000		
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 Unit Usaha			
			2.17.08.1.01.02 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	150 Orang	1.206.362.430,000		
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	150 Orang			
			3 . URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	3.30 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			68.648.765.989,887		
				3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			106.065.285,000	
				3.30.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	63.501.835,000	
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen		
				3.30.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	42.563.450,000

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		
			3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			56.406.938.515,000	
			3.30.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/ Bulan	56.310.845.990,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/ Bulan		
			3.30.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	55.282.875,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan		
			3.30.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	40.809.650,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan		
			3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.689.600.000,000	
			3.30.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	302 Paket	804.600.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	302 Paket		
			3.30.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	885.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 Orang		
			3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.132.994.189,887	
			3.30.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.805.327,887	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			3.30.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	288.665.580,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.30.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	95.500.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25 Paket		
			3.30.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	157.800.000,000	
				Tersedianya Bahan/Material	4 Paket		
			3.30.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	600.000.000,000	
			3.30.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	2.915.223.282,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		
			3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.188.258.000,000	
			3.30.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	360.000.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit		
			3.30.01.1.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	828.258.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit		
			3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.191.570.000,000	
			3.30.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	41.250.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		
			3.30.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	712.720.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			3.30.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	437.600.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.933.340.000,000	
			3.30.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	685.060.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit		
			3.30.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	88.280.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit		
			3.30.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.160.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit		
			3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			20.001.264.878,000	
			3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			20.001.264.878,000	
			3.30.03.1.01.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	13.492.368.978,000	
			3.30.03.1.01.02 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	6.508.895.900,000	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan		
			3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			4.309.503.595,000	
			3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			4.309.503.595,000	
			3.30.04.1.02.01 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.785.821.850,000	
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan		
			3.30.04.1.02.02 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1.523.681.745,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		
			3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			2.942.188.750,000	
			3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			2.942.188.750,000	
			3.30.05.1.01.05 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20 Pelaku Usaha	2.942.188.750,000	
				Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	20 Pelaku Usaha		
			3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			8.184.188.859,000	
			3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1.328.317.800,000	
			3.30.06.1.01.01 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	1.328.317.800,000	
				Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1 BPSK		
			3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			5.633.837.159,000	
			3.30.06.1.02.02 - Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	100 Dokumen	3.866.331.159,000	
				Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	100 Dokumen		
			3.30.06.1.02.04 - Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	25 Sertifikat	1.767.506.000,000	
				Meningkatnya Layanan Kalibrasi	25 Sertifikat		
			3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1.222.033.900,000	
			3.30.06.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	1.222.033.900,000	
				Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1 Laporan		
	3.31 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			15.447.492.391,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			15.447.492.391,000	
			3.31.02.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	740.888.000,000	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		
			3.31.02.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	495.053.410,000	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		
			3.31.02.1.01.04 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	14.211.550.981,000	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		
			3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			588.865.525,000	
			3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			588.865.525,000	
			3.31.04.1.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	137.879.055,000	
				Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		
			3.31.04.1.01.02 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	231.830.980,000	
				Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.31.04.1.01.03 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	219.155.490,000	
				Terantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		
	3.32 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			377.836.395,000	
			3.32.03.1.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			377.836.395,000	
			3.32.03.1.01.06 - Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	20 Orang	377.836.395,000	SUPD : 1) Terima kasih kepada Pemda yang telah menganggarkan utk penyelenggaraan transmigrasi lokal Rp.377.836.395,00 2) Indikator dan satuan disesuaikan dengan Kepmendagri 5889 Oleh : subketenagakerjaan@bangda.kemendagri.go.id Pada : 2022-06-22 09:27:38.264713
			Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	20 Orang			
Jumlah :						154.999.579.989,89	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 .	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01 .	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			562.831.602.207,000	
			4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			39.608.700.000,000	
			4.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	39.608.700.000,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan		
			4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			597.000.000,000	
			4.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	700 Paket	597.000.000,000	
			4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			102.657.719.057,000	
			4.01.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	350.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35 Paket		
			4.01.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.270.189.057,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		
			4.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	3.350.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	130 Paket		
			4.01.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	199.800.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen		
			4.01.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	71.968.040.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			4.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.519.690.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.010.080.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.010.080.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.362.286.150,000	
			4.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	147 Unit	9.362.286.150,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147 Unit		
			4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			219.437.375.000,000	
			4.01.01.1.11.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.586.955.000,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		
			4.01.01.1.11.02 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	312.500.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 Paket		
			4.01.01.1.11.03 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	500.000.000,000	
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		
			4.01.01.1.11.04 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	217.037.920.000,000	
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan		
			4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			77.874.000.000,000	
			4.01.01.1.12.03 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	77.874.000.000,000	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5 Paket		
			4.01.01.1.13 - Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			51.286.355.555,000	
			4.01.01.1.13.02 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	51.286.355.555,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		
			4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan			59.998.086.445,000	
			4.01.01.1.14.01 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	59.998.086.445,000	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan		
Jumlah :						562.831.602.207,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01.0001 - BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 .	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01 .	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			78.894.562.871,000	
			4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			588.374.600,000	
			4.01.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17 Dokumen	143.904.700,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17 Dokumen		
			4.01.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	310.600.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan		
			4.01.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	133.869.900,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		
			4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			51.917.622.971,000	
			4.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/ Bulan	51.764.122.971,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/ Bulan		
			4.01.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Laporan	63.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Laporan		
			4.01.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33 Laporan	90.500.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33 Laporan		
			4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.695.000.000,000	
			4.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	327 Paket	1.235.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	327 Paket		
			4.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	460.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33 Orang		
			4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.744.662.365,000	
			4.01.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Paket	378.932.580,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27 Paket		
			4.01.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.250.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket		
			4.01.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5700 Paket	2.867.418.785,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5.7 Paket		
			4.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	972.311.000,000	
			4.01.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	54.750.000,000	
			4.01.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2700 Laporan	1.096.500.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	2700 Laporan		
			4.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	373.500.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		
			4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			153.000.000,000	
			4.01.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	96.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit		
			4.01.01.1.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	57.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit		
			4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.221.485.000,000	
			4.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28 Laporan	213.988.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28 Laporan		
			4.01.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.007.497.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		
			4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.265.282.745,000	
			4.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	220 Unit	400.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220 Unit		
			4.01.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	2.020.350.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65 Unit		
			4.01.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	753.400.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320 Unit		
			4.01.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	900.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit		
			4.01.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	991.260.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit		
			4.01.01.1.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.200.272.745,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit		
			4.01.01.1.14 - Fasilitas Keprotokolan			1.309.135.190,000	
			4.01.01.1.14.03 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	3 Laporan	1.309.135.190,000	
			4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			16.052.280.100,000	
			4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			16.052.280.100,000	
			4.01.07.1.01.02 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Laporan	16.052.280.100,000	
				Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	20 Laporan		
Jumlah :						94.946.842.971,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 .	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01 .	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			24.144.711.065,000	
			4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			874.000.000,000	
			4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			4.01.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	374.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			4.01.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.109.832.600,000	
			4.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	14.109.832.600,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan		
			4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			497.000.000,000	
			4.01.01.1.05.05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	90.000.000,000	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
			4.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	407.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang		
			4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.882.000.000,000	
			4.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	780.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.01.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.831.600.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			4.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.270.400.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			794.148.465,000	
			4.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	646.548.465,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			4.01.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	147.600.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.987.730.000,000	
			4.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1.914.730.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
			4.01.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	73.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit		
			4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			2.000.000.000,000	
			4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			2.000.000.000,000	
			4.01.02.1.02.04 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen		
			4.01.02.1.02.05 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen		
			4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			10.201.921.535,000	
			4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			4.201.921.535,000	
			4.01.03.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1.000.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen		
			4.01.03.1.01.02 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1.644.921.535,000	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		
			4.01.03.1.01.03 - Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1.557.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen		
			4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah			3.500.000.000,000	
			4.01.03.1.02.01 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	11 Dokumen	1.500.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	11 Dokumen		
			4.01.03.1.02.02 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	1 Dokumen		
			4.01.03.1.02.03 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	30 Laporan	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	30 Laporan		
			4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah			2.500.000.000,000	
			4.01.03.1.03.01 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen		
			4.01.03.1.03.02 - Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	500.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	1 Dokumen		
			4.01.03.1.03.03 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		
			4.01.09 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA			8.608.000.000,000	
			4.01.09.1.02 - Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus			8.608.000.000,000	
			4.01.09.1.02.01 - Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	1 Dokumen	1.608.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	1 Dokumen		
			4.01.09.1.02.02 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	1 Laporan	7.000.000.000,000	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah :	44.954.632.600,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01.04 - BIRO HUKUM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 .	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01 .	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17.977.608.594,000	
			4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000,000	
			4.01.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		
			4.01.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		
			4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.499.290.894,000	
			4.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	10.499.290.894,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan		
			4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			585.000.000,000	
			4.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	385.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket		
			4.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang		
			4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.634.538.700,000	
			4.01.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.149.038.700,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.01.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2000 Laporan	240.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	2000 Laporan		
			4.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	3.245.500.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		
			4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			600.000.000,000	
			4.01.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	600.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit		
			4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.628.779.000,000	
			4.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	817.870.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32 Unit		
			4.01.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	810.909.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit		
			4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			10.763.950.000,000	
			4.01.05.1.01 - Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan			7.400.200.000,000	
			4.01.05.1.01.01 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	75 Dokumen	4.757.100.000,000	
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	75 Dokumen		
			4.01.05.1.01.03 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	800 Dokumen	777.600.000,000	
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	800 Dokumen		
			4.01.05.1.01.04 - Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	150 Dokumen	1.865.500.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	150 Dokumen		
			4.01.05.1.02 - Fasilitas Bantuan Hukum			3.363.750.000,000	
			4.01.05.1.02.01 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	15 Kasus	2.113.750.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	15 Kasus		
			4.01.05.1.02.02 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	1.250.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	5 Kasus		
Jumlah :						28.741.558.594,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01.05 - BIRO ORGANISASI

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 .	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01 .	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.343.457.450,000	
			4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.350.000,000	
			4.01.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.550.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			4.01.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
			4.01.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.800.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
			4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.137.389.060,000	
			4.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	6.996.089.060,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan		
			4.01.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	108.500.000,000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
			4.01.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.01.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16.800.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			624.516.500,000	
			4.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	342.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket		
			4.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	282.516.500,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32 Orang		
			4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.820.727.890,000	
			4.01.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Paket	1.036.900.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64 Paket		
			4.01.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	165 Paket	68.800.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	165 Paket		
			4.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	766.600.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	15 Paket		
			4.01.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	153 Dokumen	19.800.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	153 Dokumen		
			4.01.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	71 Paket	328.027.890,000	
				Tersedianya Bahan/Material	71 Paket		
			4.01.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 Laporan	375.500.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Laporan	2.178.600.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Laporan		
			4.01.01.1.06.10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	27 Dokumen	46.500.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	27 Dokumen		
			4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			330.920.000,000	
			4.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996 Laporan	12.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996 Laporan		
			4.01.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	97.350.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan		
			4.01.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	116 Laporan	161.570.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116 Laporan		
			4.01.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	60.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan		
			4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			374.554.000,000	
			4.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	374.554.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit		
			4.01.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit		
			4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			19.907.250.180,000	
			4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			13.114.849.980,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.01.02.1.01.01 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	3.000.000.000,000	
				Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	35 Dokumen		
			4.01.02.1.01.02 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4.114.850.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
			4.01.02.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	35 Dokumen	5.999.999.980,000	
				Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	35 Dokumen		
			4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			6.792.400.200,000	
			4.01.02.1.02.01 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1.500.000.000,000	
				Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		
			4.01.02.1.02.02 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1.246.500.000,000	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen		
			4.01.02.1.02.03 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Laporan	350.000.200,000	
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Laporan		
			4.01.02.1.02.04 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	1.695.900.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen		
			4.01.02.1.02.05 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	2.000.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen		
Jumlah :						33.250.707.630,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01.12 - BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 .	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01 .	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			22.476.600.200,000	
			4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			524.800.000,000	
			4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	294.800.000,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			4.01.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			4.01.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			4.01.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.471.800.200,000	
			4.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	7.331.800.200,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan		
			4.01.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			4.01.01.1.02.06 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	30.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
			4.01.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	30.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			4.01.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000.000,000	
			4.01.01.1.03.06 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
			4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.800.000.000,000	
			4.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	93 Paket	600.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	93 Paket		
			4.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 Orang		
			4.01.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	700.000.000,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		
			4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.600.000.000,000	
			4.01.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			4.01.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			4.01.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		
			4.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	800.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			4.01.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	70.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20 Dokumen		
			4.01.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	800.000.000,000	
				Tersedianya Bahan/Material	1 Paket		
			4.01.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	200.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			4.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.000.000.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.400.000.000,000	
			4.01.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		
			4.01.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	500.000.000,000	
				Tersedianya Mebel	1 Paket		
			4.01.01.1.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.050.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			4.01.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			4.01.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan		
			4.01.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan	2.500.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	29 Laporan		
			4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600.000.000,000	
			4.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	400.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit		
			4.01.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	100.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit		
			4.01.01.1.09.07 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit		
			4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			15.400.000.000,000	
			4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			5.400.000.000,000	
			4.01.07.1.01.01 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	1.700.000.000,000	
				Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan		
			4.01.07.1.01.02 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.700.000.000,000	
				Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		
			4.01.07.1.01.03 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	2.000.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan			
			4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			5.000.000.000,000		
			4.01.07.1.02.01 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	2.500.000.000,000		
				Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan			
			4.01.07.1.02.02 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.500.000.000,000		
				Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan			
			4.01.07.1.02.03 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.000.000.000,000		
				Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan			
			4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			5.000.000.000,000		
			4.01.07.1.03.01 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	1.500.000.000,000		
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang			
			4.01.07.1.03.02 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1.710.000.000,000		
				Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen			
			4.01.07.1.03.03 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1.790.000.000,000		
				Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen			
			Jumlah :				37.876.600.200,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 4.02.0.00.0.00.03.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 .	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.02 .	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			165.877.202.230,000	
			4.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.012.000.000,000	
			4.02.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.012.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			4.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.140.029.740,000	
			4.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/ Bulan	15.584.029.740,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/ Bulan		
			4.02.01.1.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.644.000.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		
			4.02.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	517.500.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			4.02.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	394.500.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.625.038.704,000	
			4.02.01.1.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.625.038.704,000	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
			4.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.127.580.000,000	
			4.02.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	612.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		
			4.02.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	2.869.600.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120 Orang		
			4.02.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	645.980.000,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		
			4.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.947.483.980,000	
			4.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	306.954.480,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			4.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.981.735.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			4.02.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.959.971.500,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		
			4.02.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.779.155.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		
			4.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.025.118.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			4.02.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	298.800.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.02.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.090.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			4.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.505.750.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			4.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.071.358.500,000	
			4.02.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.003.117.500,000	
				Tersedianya Mebel	1 Paket		
			4.02.01.1.07.07 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.068.241.000,000	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	1 Unit		
			4.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.176.785.968,000	
			4.02.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			4.02.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.285.600.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			4.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.391.185.968,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			4.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.159.311.083,000	
			4.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	858.260.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		
			4.02.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.130.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit		
			4.02.01.1.09.07 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.123.331.083,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit		
			4.02.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.047.720.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit		
			4.02.01.1.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			76.617.614.255,000	
			4.02.01.1.15.01 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	69 Orang/ Bulan	75.122.614.255,000	
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	69 Orang/ Bulan		
			4.02.01.1.15.02 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	805.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Paket		
			4.02.01.1.15.03 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	69 Orang	690.000.000,000	
				Terlaksananya Medical Check Up DPRD	69 Orang		
			4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			119.126.850.000,000	
			4.02.02.1.01 - Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			4.392.450.000,000	
			4.02.02.1.01.01 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.520.950.000,000	
				Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
			4.02.02.1.01.02 - Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	2.036.500.000,000	
			4.02.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	835.000.000,000	
			4.02.02.1.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran			3.550.950.000,000	
			4.02.02.1.02.01 - Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	792.000.000,000	
				Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		
			4.02.02.1.02.02 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	792.000.000,000	
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		
			4.02.02.1.02.03 - Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	544.450.000,000	
				Terlaksananya Pembahasan APBD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.02.04 - Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	526.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.02.05 - Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	234.000.000,000	
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		
			4.02.02.1.02.06 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	662.500.000,000	
				Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.537.000.000,000	
			4.02.02.1.03.01 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	2.605.200.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		
			4.02.02.1.03.02 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	2.805.600.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
			4.02.02.1.03.03 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	2.605.200.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		
			4.02.02.1.03.04 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	2.404.800.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan		
			4.02.02.1.03.06 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	595.000.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		
			4.02.02.1.03.07 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	2.957.200.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen		
			4.02.02.1.03.08 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.564.000.000,000	
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.02.02.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD			12.464.340.000,000	
			4.02.02.1.04.02 - Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	5.736.840.000,000	
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.04.03 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1.385.000.000,000	
				Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen		
			4.02.02.1.04.04 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	28 Orang	3.636.000.000,000	
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	28 Orang		
			4.02.02.1.04.05 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	28 Orang	720.000.000,000	
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	28 Orang		
			4.02.02.1.04.06 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	660.000.000,000	
				Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		
			4.02.02.1.04.07 - Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	326.500.000,000	
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			43.169.030.000,000	
			4.02.02.1.05.01 - Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	4.350.030.000,000	
				Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan		
			4.02.02.1.05.02 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	359.900.000,000	
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.05.03 - Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	38.459.100.000,000	
				Terlaksananya Reses	1 Dokumen		
			4.02.02.1.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			1.200.000.000,000	
			4.02.02.1.06.01 - Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1.200.000.000,000	
				Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.08 - Fasilitasi Tugas DPRD			38.813.080.000,000	
			4.02.02.1.08.01 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	22.114.080.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.08.02 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	248.000.000,000	
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	1 Laporan		
			4.02.02.1.08.03 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	3.000.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen		
			4.02.02.1.08.04 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	11.836.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		
			4.02.02.1.08.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	1.615.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen		
			4.02.03 - PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA			163.626.500.000,000	
			4.02.03.1.01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			163.626.500.000,000	
			4.02.03.1.01.01 - Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 Dokumen	116.045.700.000,000	
				Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 Dokumen		
			4.02.03.1.01.02 - Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	1 Dokumen	1.112.000.000,000	
				Tersusunnya LKPJ dan Rencana Kerja	1 Dokumen		
			4.02.03.1.01.03 - Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	1 Dokumen	41.464.800.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	1 Dokumen		
			4.02.03.1.01.04 - Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	1 Dokumen	5.004.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	1 Dokumen		
Jumlah :						448.630.552.230,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 5.01.5.05.1.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.03 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.499.999.300,000	
			1.03.12.1.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			1.499.999.300,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.03.12.1.01.02 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	1 Dokumen	749.999.400,000	<p>SUPD : Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah telah menganggarkan kegiatan penetapan RTRW dan RTR Provinsi dalam mendukung program penyelenggaraan penataan ruang di daerah.</p> <p>Catatan: 1. Perlu penambahan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang sesuai hasil Rakortekrenbang Tahun 2022 dalam mendukung terlaksananya penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota: 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kab/Kota Berdasarkan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022 didapatkan bahwa: - Target indikatif penetapan RTRW sebanyak 2 Perda - Target indikatif penetapan RDTR sebanyak 5 Perkada</p> <p>2. Perlu penambahan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang sesuai hasil Rakortekrenbang Tahun 2022 dalam mendukung terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1.03.12.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Target indikatif daerah yang melaksanakan kegiatan Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada DAS di Provinsi Papua pada Tahun 2023 sebanyak 1 DAS.</p> <p>3. Perlu penambahan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang sesuai hasil Rakortekrenbang Tahun 2022 dalam mendukung terlaksananya penertiban pemanfaatan ruang: 1.03.12.1.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1.03.12.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Target indikatif daerah yang melaksanakan kegiatan fasilitasi penertiban pelanggaran SDEW di Provinsi Papua pada Tahun 2023 sebanyak 1 kasus diantaranya pada WS Memberamo Tami Apauvar di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua</p>

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.03.12.1.01.04 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	749.999.900,000	
5 . UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01 .	PERENCANAAN		5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			67.612.817.468,000	
			5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.263.688.928,000	
			5.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/ Bulan	56.548.111.583,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/ Bulan		
			5.01.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	530.450.000,000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
			5.01.01.1.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	366.300.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		
			5.01.01.1.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	30.300.000,000	
			5.01.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	200.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			5.01.01.1.02.06 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	236.700.000,000	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
			5.01.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	151.327.345,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			5.01.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	200.500.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.730.338.140,000	
			5.01.01.1.05.01 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	367.900.000,000	
			5.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.240.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		
			5.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	225.000.000,000	
			5.01.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	365.430.250,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
			5.01.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	532.007.890,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		
			5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.280.820.000,000	
			5.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket		
			5.01.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	60.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen		
			5.01.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	92.000.000,000	
			5.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	737.500.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
			5.01.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.191.320.000,000	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
			5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.795.320.400,000	
			5.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			5.01.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.040.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			5.01.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	774.096.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan		
			5.01.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	721.184.400,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.542.650.000,000	
			5.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	884.050.000,000	
			5.01.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	158.600.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit		
			5.01.01.1.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			8.184.196.740,000	
			5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			2.260.469.780,000	
			5.01.02.1.02.02 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	420 Orang	610.469.950,000	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	420 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.01.02.1.02.03 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Orang	1.399.999.840,000	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Orang		
			5.01.02.1.02.04 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	249.999.990,000	
			5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.923.726.960,000	
			5.01.02.1.03.01 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	724.593.000,000	
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan		
			5.01.02.1.03.02 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2 Kerja Sama	749.740.000,000	
				Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	2 Kerja Sama		
			5.01.02.1.03.03 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	3.449.693.960,000	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan		
			5.01.02.1.03.04 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	1 Dokumen	999.700.000,000	
				Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
			5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			23.154.147.170,000	
			5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			6.575.651.100,000	
			5.01.03.1.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	931.500.000,000	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.01.03.1.01.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1.576.451.000,000	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		
			5.01.03.1.01.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	491.999.800,000	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		
			5.01.03.1.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	750.000.100,000	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		
			5.01.03.1.01.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	750.000.100,000	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		
			5.01.03.1.01.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1.325.700.000,000	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		
			5.01.03.1.01.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	750.000.100,000	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		
			5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			6.100.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.01.03.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.000.000.000,000	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		
			5.01.03.1.02.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1.100.000.000,000	
				Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		
			5.01.03.1.02.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	500.000.000,000	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		
			5.01.03.1.02.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	500.000.000,000	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		
			5.01.03.1.02.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	500.000.000,000	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		
			5.01.03.1.02.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	500.000.000,000	
				Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		
			5.01.03.1.02.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1.000.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		
			5.01.03.1.02.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1.000.000.000,000	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		
			5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			10.478.496.070,000	
			5.01.03.1.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	799.997.665,000	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen		
			5.01.03.1.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.290.059.780,000	
				Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
			5.01.03.1.03.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.599.974.560,000	
			5.01.03.1.03.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	786.366.145,000	
			5.01.03.1.03.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	2.249.999.125,000	
			5.01.03.1.03.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	15 Laporan	1.249.998.925,000	
				Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	15 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.01.03.1.03.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	973.799.870,000	
			5.01.03.1.03.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1.528.300.000,000	
	5.05 .	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			10.288.150.130,000	
			5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			3.422.800.000,000	
			5.05.02.1.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	872.920.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan		
			5.05.02.1.01.02 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	267.280.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan		
			5.05.02.1.01.03 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	987.600.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan		
			5.05.02.1.01.05 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1.275.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan		
			5.05.02.1.01.12 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	20.000.000,000	
				Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			2.309.050.130,000	
			5.05.02.1.02.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	662.950.000,000	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen		
			5.05.02.1.02.05 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	807.150.130,000	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen		
			5.05.02.1.02.06 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	838.950.000,000	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen		
			5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			1.654.740.000,000	
			5.05.02.1.03.03 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	686.240.000,000	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen		
			5.05.02.1.03.07 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	968.500.000,000	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		
			5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi			2.901.560.000,000	
			5.05.02.1.04.02 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1.000.000.000,000	
				Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan		
			5.05.02.1.04.03 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1.001.560.000,000	
				Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		
			5.05.02.1.04.04 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	900.000.000,000	
				Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah :	110.739.310.808,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 .	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.02 .	KEUANGAN	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			199.224.978.639,000	
			5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.180.240.000,000	
			5.02.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.052.300.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.02.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	442.900.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.02.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	442.900.000,000	
			5.02.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.242.140.000,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			162.318.408.779,000	
			5.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang/ Bulan	161.161.588.779,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan		
			5.02.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	514.400.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			5.02.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	642.420.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.313.500.000,000	
			5.02.01.1.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	1.313.500.000,000	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		
			5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.004.400.000,000	
			5.02.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	340 Paket	723.600.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	340 Paket		
			5.02.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	2.280.800.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35 Orang		
			5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			19.748.272.190,000	
			5.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	4.178.814.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket		
			5.02.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	1.592.448.990,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	150 Paket		
			5.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80025 Paket	1.935.759.200,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	80025 Paket		
			5.02.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	333.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.02.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.200.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		
			5.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6.785.150.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
			5.02.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	723.100.000,000	
			5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	
			5.02.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		
			5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.975.057.770,000	
			5.02.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1600 Laporan	2.529.960.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1600 Laporan		
			5.02.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.467.097.770,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		
			5.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	978.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 Laporan		
			5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.685.099.900,000	
			5.02.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	88 Unit	2.633.620.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88 Unit		
			5.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	305.200.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 Unit		
			5.02.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	1.027.080.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit		
			5.02.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	719.199.900,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit		
			5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			44.175.013.000,000	
			5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			20.813.710.000,000	
			5.02.02.1.01.01 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.525.000.000,000	
				Tersusunnya KUA dan PPAS	2 Dokumen		
			5.02.02.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	3.453.200.000,000	
				Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		
			5.02.02.1.01.03 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1.916.800.000,000	
				Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.02.02.1.01.04 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	1.740.000.000,000	
				Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	60 Dokumen		
			5.02.02.1.01.05 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	607.500.000,000	
				Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	60 Dokumen		
			5.02.02.1.01.06 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	600.000.000,000	
				Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	60 Dokumen		
			5.02.02.1.01.07 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	60 Dokumen	4.242.600.000,000	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	60 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.02.02.1.01.08 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	60 Dokumen	3.094.250.000,000	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	60 Dokumen		
			5.02.02.1.01.09 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	29 Dokumen	3.132.480.000,000	
				Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	29 Dokumen		
			5.02.02.1.01.13 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	25 Orang	501.880.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	25 Orang		
			5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			3.999.695.000,000	
			5.02.02.1.02.02 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	29 Laporan	1.831.375.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	29 Laporan		
			5.02.02.1.02.04 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	29 Laporan	1.146.370.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	29 Laporan		
			5.02.02.1.02.12 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	29 Dokumen	1.021.950.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	29 Dokumen		
			5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.999.808.000,000	
			5.02.02.1.03.01 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	668.800.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		
			5.02.02.1.03.04 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	532.560.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen		
			5.02.02.1.03.05 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	645.184.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen		
			5.02.02.1.03.06 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	806.240.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen		
			5.02.02.1.03.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	1.307.254.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan		
			5.02.02.1.03.09 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	852.576.000,000	
				Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		
			5.02.02.1.03.10 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	36 Dokumen	565.000.000,000	
				Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	36 Dokumen		
			5.02.02.1.03.11 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	622.194.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang		
			5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			6.500.000.000,000	
			5.02.02.1.04.02 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	700.000.000,000	
			5.02.02.1.04.03 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	700.000.000,000	
			5.02.02.1.04.04 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	2.400.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.02.02.1.04.05 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	5 Dokumen	2.000.000.000,000	
			5.02.02.1.04.06 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 Dokumen	700.000.000,000	
			5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			6.861.800.000,000	
			5.02.02.1.06.03 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	12 Orang	6.861.800.000,000	
			5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			4.045.400.000,000	
			5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah			4.045.400.000,000	
			5.02.03.1.01.01 - Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	649.900.000,000	
				Tersedianya Standar Harga	1 Dokumen		
			5.02.03.1.01.02 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	800.650.000,000	
				Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		
			5.02.03.1.01.03 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	294.870.000,000	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		
			5.02.03.1.01.07 - Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.099.980.000,000	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
			5.02.03.1.01.10 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	400.000.000,000	
				Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		
			5.02.03.1.01.11 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	800.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
Jumlah :						247.445.391.639,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 5.02.0.00.0.00.03.00 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 .	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.02 .	KEUANGAN	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			116.858.523.285,200	
			5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			207.420.000,000	
			5.02.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	207.420.000,000	
			5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			68.448.316.104,000	
			5.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	68.448.316.104,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan		
			5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			756.000.000,000	
			5.02.01.1.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	756.000.000,000	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
			5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.926.491.040,000	
			5.02.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	273 Paket	409.500.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	273 Paket		
			5.02.01.1.05.08 - Pindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	9 Orang	97.425.000,000	
				Terlaksananya Pindahan Tugas ASN	9 Orang		
			5.02.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	2.419.566.040,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27 Orang		
			5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.189.369.660,000	
			5.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	220.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.02.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.163.480.250,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			5.02.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	2.193.426.410,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	18 Paket		
			5.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.584.343.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			5.02.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	32.400.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		
			5.02.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	372.840.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			5.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.622.880.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17.832.671.000,000	
			5.02.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	325.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
			5.02.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	600.000.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit		
			5.02.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	239 Paket	712.700.000,000	
				Tersedianya Mebel	239 Paket		
			5.02.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	16.194.971.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit		
			5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.111.945.862,200	
			5.02.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.695.025.094,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			5.02.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.182.174.432,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		
			5.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.234.746.336,200	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.386.309.619,000	
			5.02.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	143 Unit	2.003.367.600,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143 Unit		
			5.02.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	537.760.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit		
			5.02.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	286 Unit	807.295.500,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286 Unit		
			5.02.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.037.886.519,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit		
			5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			23.779.817.000,000	
			5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			23.779.817.000,000	
			5.02.04.1.01.02 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	3.960.030.000,000	
				Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	4 Laporan		
			5.02.04.1.01.03 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	17 Laporan	396.180.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	17 Laporan		
			5.02.04.1.01.05 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	999.625.000,000	
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan		
			5.02.04.1.01.06 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	5.520.610.000,000	
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan		
			5.02.04.1.01.08 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	5.943.207.600,000	
				Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4 Laporan		
			5.02.04.1.01.09 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17 Dokumen	809.784.400,000	
				Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17 Dokumen		
			5.02.04.1.01.10 - Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	80 Dokumen SSPD	2.030.060.000,000	
				Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	17 Dokumen SSPD		
			5.02.04.1.01.12 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	17 Laporan	3.256.670.000,000	
				Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	17 Laporan		
			5.02.04.1.01.13 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	863.650.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		
Jumlah :						140.638.340.285,20	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 5.03.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5 . UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	5.03 . KEPEGAWAIAN		5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			27.892.723.755,000	
			5.03.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			721.573.685,000	
			5.03.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	145.000.400,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			5.03.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	155.598.435,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.03.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	131.729.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.03.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	151.769.950,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			5.03.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	137.475.900,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			5.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.194.843.430,000	
			5.03.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/ Bulan	15.642.130.950,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/ Bulan		
			5.03.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	332.327.295,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
			5.03.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	114.977.275,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			5.03.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	105.407.910,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			5.03.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			101.941.340,000	
			5.03.01.1.03.05 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	101.941.340,000	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
			5.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.692.604.088,000	
			5.03.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	585.200.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		
			5.03.01.1.05.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.286.997.063,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			5.03.01.1.05.05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	272.189.825,000	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
			5.03.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	383.750.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.03.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	293.749.380,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang		
			5.03.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	870.717.820,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		
			5.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.178.478.690,000	
			5.03.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.761.160,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			5.03.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.662.453.755,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			5.03.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	134.138.775,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			5.03.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	740.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			5.03.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.531.125.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			5.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			165.000.000,000	
			5.03.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	165.000.000,000	
				Tersedianya Mebel	1 Paket		
			5.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.394.082.522,000	
			5.03.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	333.055.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			5.03.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	455.657.516,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			5.03.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	605.370.006,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			5.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			444.200.000,000	
			5.03.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	169.400.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40 Unit		
			5.03.01.1.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	274.800.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22 Unit		
			5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			43.375.499.761,500	
			5.03.02.1.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			7.518.551.081,500	
			5.03.02.1.01.03 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.813.843.650,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		
			5.03.02.1.01.04 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	2.909.200.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		
			5.03.02.1.01.06 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1.009.151.284,000	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		
			5.03.02.1.01.08 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	762.287.200,000	
				Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga		
			5.03.02.1.01.09 - Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	478.498.947,500	
				Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.03.02.1.01.10 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	73.974.400,000	
				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			5.03.02.1.01.11 - Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	471.595.600,000	
				Terkelolanya Data Kepegawaian	1 Dokumen		
			5.03.02.1.02 - Mutasi dan Promosi ASN			4.357.287.420,000	
			5.03.02.1.02.01 - Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	1.600.845.385,000	
				Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen		
			5.03.02.1.02.02 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	2.756.442.035,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan		
			5.03.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi ASN			21.885.997.040,000	
			5.03.02.1.03.03 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	2.708.700.000,000	
				Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen		
			5.03.02.1.03.04 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	14.590.735.300,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen		
			5.03.02.1.03.06 - Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	600 Orang	727.875.000,000	
				Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN	600 Orang		
			5.03.02.1.03.12 - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	912.366.400,000	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan		
			5.03.02.1.03.13 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	100 Orang	1.451.094.140,000	
				Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100 Orang		
			5.03.02.1.03.14 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1.495.226.200,000	
				Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.03.02.1.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			9.613.664.220,000	
			5.03.02.1.04.04 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	7.720.549.520,000	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	300 Orang		
			5.03.02.1.04.05 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	740.511.440,000	
				Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	200 Orang		
			5.03.02.1.04.07 - Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	700 Orang	621.855.185,000	
				Meningkatnya Disiplin ASN	700 Orang		
			5.03.02.1.04.10 - Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	530.748.075,000	
				Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan		
Jumlah :						71.268.223.516,50	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 5.04.0.00.0.00.01.00 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 .	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.04 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			26.944.672.350,000	
			5.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			405.245.200,000	
			5.04.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	405.245.200,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		
			5.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.407.262.150,000	
			5.04.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/ Bulan	20.807.262.150,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/ Bulan		
			5.04.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	350.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			5.04.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	250.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			5.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			550.000.000,000	
			5.04.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	350.000.000,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			5.04.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		
			5.04.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150.000.000,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
			5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.389.165.000,000	
			5.04.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			5.04.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket		
			5.04.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2.113.675.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		
			5.04.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	201.490.000,000	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
			5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			215.000.000,000	
			5.04.01.1.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	215.000.000,000	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.928.000.000,000	
			5.04.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.428.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		
			5.04.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		
			5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.04.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	50.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit		
			5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			92.951.509.800,000	
			5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis			3.190.520.000,000	
			5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	1.990.520.000,000	
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	120 Orang		
			5.04.02.1.01.04 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	2900 Dokumen	1.200.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2900 Dokumen		
			5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			89.760.989.800,000	
			5.04.02.1.02.02 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	400.000.000,000	
				Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	1 Dokumen		
			5.04.02.1.02.03 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	2600 Orang	86.751.000.000,000	
				Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2600 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.04.02.1.02.04 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	914.450.000,000	
				Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan		
			5.04.02.1.02.05 - Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	600.000.000,000	
				Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen		
			5.04.02.1.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	52 Orang	695.539.800,000	
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	52 Orang		
			5.04.02.1.02.08 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	42 Dokumen	400.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	42 Dokumen		
Jumlah :						119.896.182.150,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A

PERANGKAT DAERAH : 5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJA SAMA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 .	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.06 .	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			23.243.263.304,715	
			5.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			451.554.000,000	
			5.06.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	177.315.200,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		
			5.06.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	92.279.600,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.06.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	61.644.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.06.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	62.315.200,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		
			5.06.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	58.000.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		
			5.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.211.352.160,000	
			5.06.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan	8.078.921.760,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.06.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	79.872.800,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			5.06.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	52.557.600,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			5.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.133.997.200,000	
			5.06.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	310.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		
			5.06.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	104.195.200,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			5.06.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	610.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang		
			5.06.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	109.802.000,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		
			5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.516.714.874,340	
			5.06.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.527.010,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		
			5.06.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	56.473.430,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.06.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	254.388.636,500	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		
			5.06.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.311.667.795,840	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4 Paket		
			5.06.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	231.987.500,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket		
			5.06.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	88.200.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 Dokumen		
			5.06.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	659.800.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan		
			5.06.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.832.170.502,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			5.06.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	58.500.000,000	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
			5.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.811.722.005,375	
			5.06.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15 Unit	166.500.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit		
			5.06.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.337.100.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit		
			5.06.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	430.352.200,000	
				Tersedianya Mebel	1 Paket		
			5.06.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	275.569.805,375	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.06.01.1.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.602.200.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit		
			5.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			458.650.000,000	
			5.06.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	47.450.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		
			5.06.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.200.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		
			5.06.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	276.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan		
			5.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.659.273.065,000	
			5.06.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	947.440.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit		
			5.06.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	211.360.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65 Unit		
			5.06.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	500.473.065,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit		
			5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			15.680.458.455,000	
			5.06.02.1.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			4.917.065.955,000	
			5.06.02.1.01.01 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	2 Dokumen	4.917.065.955,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	2 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			9.285.752.500,000	
			5.06.02.1.02.01 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	703.480.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen		
			5.06.02.1.02.02 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	4 Dokumen	4.342.404.900,000	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	4 Dokumen		
			5.06.02.1.02.03 - Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	3 Dokumen	4.239.867.600,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	3 Dokumen		
			5.06.02.1.03 - Monitoring dan Evaluasi			1.477.640.000,000	
			5.06.02.1.03.03 - Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.477.640.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
Jumlah :						38.923.721.759,72	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 .	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.07 .	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			28.725.682.400,000	
			5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			190.000.000,000	
			5.07.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
			5.07.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.07.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			5.07.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
			5.07.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
			5.07.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
			5.07.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
			5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.324.842.400,000	
			5.07.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	5.249.842.400,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan		
			5.07.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
			5.07.01.1.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		
			5.07.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			5.07.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	15.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
			5.07.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,000	
			5.07.01.1.03.01 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,000	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.07.01.1.03.04 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,000	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
			5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.157.022.500,000	
			5.07.01.1.05.01 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	344.022.500,000	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit		
			5.07.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	168.000.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	71 Paket		
			5.07.01.1.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			5.07.01.1.05.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			5.07.01.1.05.05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
			5.07.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Orang		
			5.07.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100.000.000,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
			5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.022.500.000,000	
			5.07.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.07.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			5.07.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		
			5.07.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			5.07.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		
			5.07.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,000	
				Tersedianya Bahan/Material	1 Paket		
			5.07.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	840.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		
			5.07.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.267.500.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
			5.07.01.1.06.10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,000	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		
			5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.235.556.300,000	
			5.07.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	925.556.300,000	
				Tersedianya Mebel	1 Paket		
			5.07.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	110.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit		
			5.07.01.1.07.07 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,000	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	1 Unit		
			5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.216.071.200,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.07.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	109.400.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			5.07.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.743.871.200,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			5.07.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan		
			5.07.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.312.800.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.474.690.000,000	
			5.07.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	246.690.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit		
			5.07.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	375.700.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit		
			5.07.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	117.300.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit		
			5.07.01.1.09.07 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	635.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10 Unit		
			5.07.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.100.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit		
			5.07.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			9.300.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.07.01.1.11.04 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1000 Orang/ Bulan	9.300.000.000,000	
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1000 Orang/ Bulan		
			5.07.01.1.13 - Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			325.000.000,000	
			5.07.01.1.13.01 - Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	1 Dokumen	25.000.000,000	
				Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	1 Dokumen		
			5.07.01.1.13.02 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	100.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		
			5.07.01.1.13.03 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan		
			5.07.01.1.14 - Fasilitas Keprotokolan			460.000.000,000	
			5.07.01.1.14.01 - Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	90.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan		
			5.07.01.1.14.02 - Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan	300.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan		
			5.07.01.1.14.03 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Laporan	70.000.000,000	
				Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Laporan		
			5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			1.200.000.000,000	
			5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			1.200.000.000,000	
			5.07.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan	200.000.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan		
			5.07.02.1.01.02 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	200.000.000,000	
				Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5.07.02.1.01.03 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	1 Laporan	300.000.000,000	
				Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 Laporan		
			5.07.02.1.01.04 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 Laporan	300.000.000,000	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 Laporan		
			5.07.02.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan	200.000.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan		
Jumlah :						29.925.682.400,00	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6 .	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	6.01 .	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			40.382.065.345,000	
			6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.191.906.200,000	
			6.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/ Bulan	24.191.906.200,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/ Bulan		
			6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.409.480.000,000	
			6.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	541.500.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket		
			6.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	4.867.980.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95 Orang		
			6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.819.244.745,000	
			6.01.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	644.140.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
			6.01.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	585.523.650,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		
			6.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	645.131.095,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		
			6.01.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	18.500.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		
			6.01.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	547.200.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			6.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.378.750.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
			6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.788.259.000,000	
			6.01.01.1.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	1.891.200.000,000	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit		
			6.01.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	97.059.000,000	
				Tersedianya Mebel	1 Paket		
			6.01.01.1.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.800.000.000,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		
			6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.393.315.400,000	
			6.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.725.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
			6.01.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	203.990.400,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		
			6.01.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.178.600.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			779.860.000,000	
			6.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	168.400.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit		
			6.01.01.1.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	37.500.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit		
			6.01.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	473.960.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit		
			6.01.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	100.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit		
			6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			30.792.468.000,000	
			6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal			27.063.718.000,000	
			6.01.02.1.01.01 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	5.335.310.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan		
			6.01.02.1.01.02 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	5.922.100.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		
			6.01.02.1.01.03 - Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	97.950.000,000	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		
			6.01.02.1.01.04 - Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan	3.149.100.000,000	
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan		
			6.01.02.1.01.05 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan	8.191.900.000,000	
				Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		
			6.01.02.1.01.06 - Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	258.258.000,000	
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	1 Kesepakatan		
			6.01.02.1.01.07 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	4.109.100.000,000	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen		
			6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			3.728.750.000,000	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 8.01.0.00.0.00.01.00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	8 .	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	8.01 .	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.815.633.216,500	
			8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72.823.270,000	
			8.01.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.271.930,000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		
			8.01.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23.541.930,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		
			8.01.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	29.009.410,000	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		
			8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.824.280.310,000	
			8.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	8.774.102.180,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan		
			8.01.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.081.830,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
			8.01.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	20.096.300,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		
			8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.555.950.520,000	
			8.01.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	285.600.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket		
			8.01.01.1.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	810.000.000,000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang		
			8.01.01.1.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang	427.732.740,000	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang		
			8.01.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	93 Orang	2.032.617.780,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	93 Orang		
			8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.835.269.116,500	
			8.01.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	32.903.800,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80 Paket		
			8.01.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	264.000.000,000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Paket		
			8.01.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27.300.000,000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Paket		
			8.01.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	283.013.950,000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	20 Paket		
			8.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	276.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	500 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8.01.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	184.800.000,000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dokumen		
			8.01.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22 Paket	59.511.366,500	
				Tersedianya Bahan/Material	22 Paket		
			8.01.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	714.240.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
			8.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	2.905.100.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan		
			8.01.01.1.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	88.400.000,000	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
			8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			371.020.000,000	
			8.01.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	17.000.000,000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan		
			8.01.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.120.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		
			8.01.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Laporan	124.900.000,000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 Laporan		
			8.01.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		
			8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.156.290.000,000	
			8.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	656.290.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit		
			8.01.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit		
			8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			3.999.994.730,000	
			8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.999.994.730,000	
			8.01.02.1.01.02 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	30 Dokumen	792.041.540,000	
			8.01.02.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	910.431.080,000	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang		
			8.01.02.1.01.05 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 Laporan	240.350.000,000	
			8.01.02.1.01.06 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	51 Dokumen	2.057.172.110,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Berneqara	51 Dokumen		
			8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			8.810.372.138,000	
			8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			8.810.372.138,000	
			8.01.03.1.01.01 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	80 Dokumen	4.828.447.148,000	
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 Dokumen		
			8.01.03.1.01.02 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	84 Dokumen	3.010.568.170,000	
				Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	84 Dokumen		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8.01.03.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 Orang	971.356.820,000	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 Orang		
			8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.671.228.825,000	
			8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			1.671.228.825,000	
			8.01.04.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	1.419.303.825,000	
				Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		
			8.01.04.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	251.925.000,000	
				Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang		
			8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			2.208.027.680,000	
			8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2.208.027.680,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8.01.05.1.01.01 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	50 Dokumen	1.618.990.320,000	
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Dokumen		
			8.01.05.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	589.037.360,000	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang		
			8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			4.113.557.000,760	
			8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			4.113.557.000,760	
			8.01.06.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	2.793.619.640,760	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8.01.06.1.01.05 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Laporan	1.319.937.360,000	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Laporan		
Jumlah :						39.618.813.590,26	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

PROVINSI : 9100 - P A P U A
PERANGKAT DAERAH : 9.02.0.00.0.00.05.0000 - SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	9 .						
	9.02 . KEKHUSUSAN PAPUA		9.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			162.284.469.815,000	
			9.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.390.000.000,000	
			9.02.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	185.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen		
			9.02.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen	210.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen		
			9.02.01.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40 Dokumen	190.000.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40 Dokumen		
			9.02.01.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	192.500.000,000	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen		
			9.02.01.1.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	192.500.000,000	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		
			9.02.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75 Laporan	420.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75 Laporan		
			9.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.194.029.740,000	
			9.02.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	12.392.575.950,000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan		
			9.02.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	480.000.000,000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		
			9.02.01.1.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan	675.000.000,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan		
			9.02.01.1.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan	646.453.790,000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		
			9.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.812.500.000,000	
			9.02.01.1.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	1.316.500.000,000	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket		
			9.02.01.1.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	4.496.000.000,000	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
			9.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			53.109.625.000,000	
			9.02.01.1.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.800.000.000,000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			9.02.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	1.400.000.000,000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	30 Paket		
			9.02.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	1.848.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan		
			9.02.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	48.061.625.000,000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan		
			9.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			82.142.065.075,000	
			9.02.01.1.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	82.142.065.075,000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75 Unit		
			9.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.455.000.000,000	
			9.02.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	775.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Laporan		
			9.02.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	3.680.000.000,000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Laporan		
			9.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.181.250.000,000	
			9.02.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	1.181.250.000,000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit		
			9.02.02 - PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA			224.482.293.488,000	
			9.02.02.1.01 - Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			136.322.700.000,000	
			9.02.02.1.01.01 - Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	51 Dokumen	11.460.000.000,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	51 Dokumen		
			9.02.02.1.01.02 - Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	51 Dokumen	29.500.000.000,000	
				Tersalurkannya Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	51 Dokumen		
			9.02.02.1.01.03 - Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	25 Dokumen	30.000.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	25 Dokumen		
			9.02.02.1.01.04 - Orientasi MRP	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP	51 Dokumen	33.212.700.000,000	
				Terlaksananya Orientasi MRP	51 Dokumen		
			9.02.02.1.01.06 - Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	3 Unit	18.000.000.000,000	
				Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	3 Unit		
			9.02.02.1.01.07 - Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	45 Dokumen	2.650.000.000,000	
				Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	30 Dokumen		
			9.02.02.1.01.08 - Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	15 Dokumen	11.500.000.000,000	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	15 Dokumen		
			9.02.02.1.02 - Pelaksanaan Hak dan Kewajiban			88.159.593.488,000	
			9.02.02.1.02.01 - Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan	51 Orang	38.784.233.000,000	
				Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	51 Orang		
			9.02.02.1.02.09 - Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	17 Dokumen	1.458.453.496,000	
				Terlaksananya Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	17 Dokumen		
			9.02.02.1.02.10 - Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan kehidupan Beragama	30 Dokumen	1.458.453.496,000	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	30 Dokumen		
			9.02.02.1.02.11 - Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan	17 Dokumen	1.458.453.496,000	
				Terlaksananya Monitoring Pemberdayaan Perempuan	17 Dokumen		
			9.02.02.1.02.12 - Peningkatan Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP	51 Orang	20.570.500.000,000	
				Meningkatnya Kapasitas MRP	51 Orang		
			9.02.02.1.02.13 - Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran	Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran	15 Lembaga	24.429.500.000,000	
				Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran	15 Lembaga		
Jumlah :						386.766.763.303,00	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam PP Nomor 12 tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh



Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penyusunan dokumen KUA-PPAS Provinsi Papua Tahun 2023 harus mempedomani pada RKPD Provinsi Papua tahun 2023 yang didalamnya memuat prioritas pembangunan daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.

Mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, sinergitas kebijakan pemerintah Provinsi Papua dengan kebijakan nasional yang telah tertuang dalam RKPD lebih lanjut dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS Provinsi Papua berpedoman pada RKPD Provinsi Papua 2023 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berpedoman pada RKP Tahun 2023, Tema Pembangunan RKP 2023 yang harus diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dirumuskan diatas yaitu: **“Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”**, maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban



5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kelima Prioritas pembangunan daerah diatas telah selaras dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
I.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Rendahnya budaya baca pada masyarakat Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat Kurangnya Prestasi Olah Raga Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah Belum terinternalisasinya nilai adat dan budaya asli tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Belum efektifnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan Masih kurangnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan prestasi & pemanfaatan sarpras olahraga Perlindungan sosial Peningkatan internalisasi adat dan budaya Pengarusutamaan Gender & perlindungan anak 	PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMERATAAN SDM
II.	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Belum optimalnya perananan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim Belum terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif Rendahnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan Kurangnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja Kurangnya daya saing dan realisasi investasi pada sektorsektor andalan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan komoditas unggulan berbasis wilayah adat Implementasi pembangunan berkelanjutan (green growth dan rendah karbon) Peningkatan pemenuhan pangan berkelanjutan 	PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN



No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
	daerah <ul style="list-style-type: none"> • Kurang tersedianya pangan yang berkelanjutan 		
III.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah • Belum terimplementasinya Rencana Tata Ruang secara konsisten • Belum tersedianya sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah • Masih kurangnya pemenuhan rumah layak huni dan penataan pemukiman • Kurangnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan • Minimnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah • Rendahnya kualitas pembangunan berbasis kampung • Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan • Kurangnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan konektivitas transportasi antar moda 2. Penyediaan infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah (air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi) 3. Percepatan pembangunan infrastruktur kampung, perbatasan dan wilayah terpencil) 4. Ketangguhan dalam adaptasi dan mitigasi bencana 	<p>PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS WILAYAH</p>
IV.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum • Kurangnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat • Belum optimalnya Penegakan HAM • Kurangnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. 	Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi papua	<p>PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN</p>
V.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua • Rendahnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik • Rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah • Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan knerja daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan tata kelola penyelenggaraan Otsus 2. Peningkatan pelayanan publik 3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 	<p>PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</p>



Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma "Money Follow Program Priority" atau dalam terjemahan "Uang Mengikuti Program Prioritas". Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu "Money Follow Function" yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2023, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 memuat: kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian. (KUA) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

2.1 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 ini, adalah :

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

3.1 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, ini adalah:

1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua;
20. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2022.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada era masa pandemic Covid 19, terutama pada kondisi perekonomian mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktifitas perekonomian. Kebijakan yang diterapkan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan dan menekan penyebaran Covid 19. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk tetap dan terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian masyarakat.

2.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

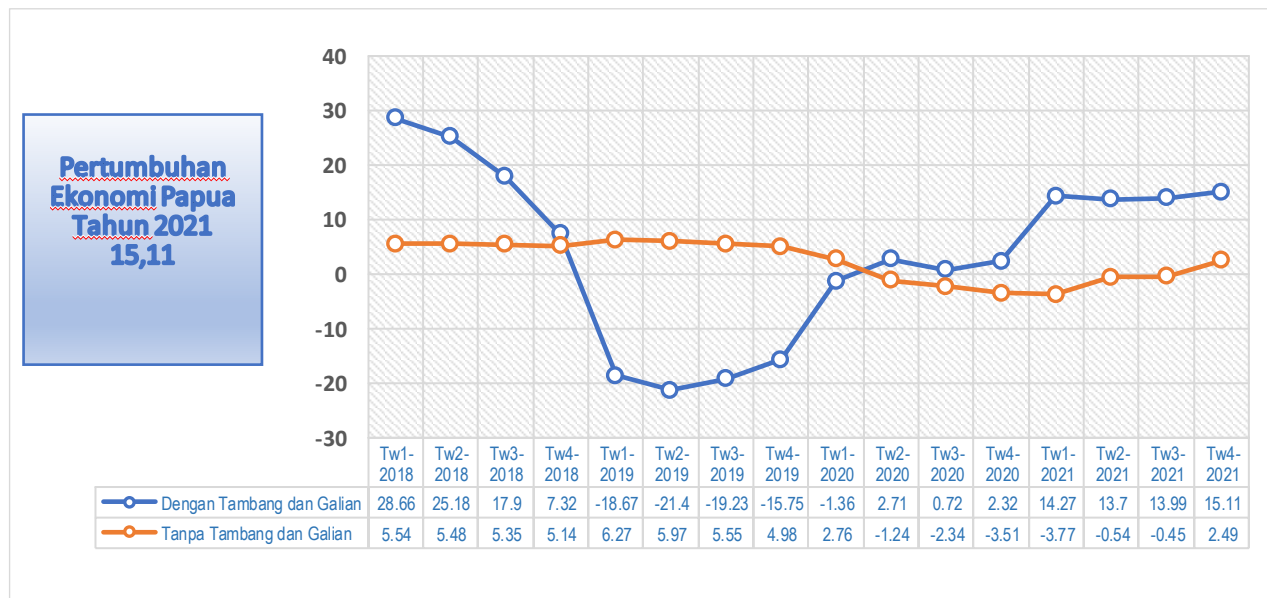
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha memiliki 17 lapangan usaha. Dirinci berdasarkan total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB berdasarkan pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen terdiri komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Untuk Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.



Tabel 2.1
Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Tiap Triwulan Pada Tahun 2018 – 2021



Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2022

Dari tabel 2.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 15,11 % dengan tambang dan penggalian serta tanpa tambang dan penggalian mencapai 2,49 %. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua ini terutama didorong oleh kinerja Sektor Usaha pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ini juga menunjukkan semakin membaiknya kinerja sektor tersebut yang ditunjukkan dengan peningkatan produktifitas hasil kerja. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian sangat menopang sektor non pertambangan yang masih terus mengalami kontraksi setiap tahunnya.

Tabel 2.1
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Papua Tahun 2019 - 2021

Dari sisi permintaan, konsumsi RT masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Papua. Secara agregat, pada tahun 2022 konsumsi RT diperkirakan tumbuh positif. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2022 secara umum didorong oleh penanganan pandemic COVID-19 serta peningkatan aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2022.

Kemudian konsumsi pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh.



Secara umum, kinerja konsumsi pemerintah akan didorong oleh program penanganan dampak COVID-19 yang ditunjukkan untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Program penanganan pemerintah diperkirakan tetap berlangsung pada tahun 2022 dengan skema penyaluran yang lebih baik setelah mempelajari penyaluran pada tahun 2020 dan 2021.

Ekspor pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif. Peningkatan ekspor tahun 2022 diperkirakan akan didorong oleh perkembangan pemulihan perekonomian negara tujuan utama dan peningkatan produktifitas serta kadar mineral pada tambang terbesar di Papua.

Kemudian investasi pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif. Peningkatan investasi pada tahun 2022 terutama didorong dengan percepatan pembangunan tambang bawah tanah Papua. Investasi ini diperkirakan akan berjalan sesuai dengan rencana tahunan pengembangan tambang.

Tabel 2.2
Perkembangan PDRB Provinsi Papua dari sisi Lapangan Usaha

PDRB(% ,yoy)	2019					2020				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Sisi Produksi Pertanian										
Pertanian, Kehutanan Perikanan	3,59	1,38	0,97	1,15	1,75	0,29	1,74	3,21	2,30	1,88
Pertambangan dan	0,08	1,56	2,87	2,95	1,98	5,39	5,29	10,83	8,33	8,03
Industri Pengolahan	2,27	3,58	2,10	0,28	2,05	0,91	1,09	0,73	2,28	1,24
Pengadaan Listrik, Gas	2,45	3,22	2,65	2,91	2,80	0,98	-0,34	-0,24	-1,42	-0,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,78	1,23	1,32	0,71	0,99	-0,19	0,03	-0,33	-0,80	-0,31
Konstruksi	3,23	3,35	3,32	3,20	3,25	1,50	1,29	1,27	1,79	1,45
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,86	4,06	3,17	0,17	3,18	1,87	3,95	4,63	5,00	3,85
Transportasi dan	9,86	6,57	6,30	1,63	5,87	1,04	-6,67	0,09	-2,79	-1,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	3,87	3,63	1,37	3,14	2,43	2,73	2,53	2,95	2,57
Informasi dan	6,54	5,19	-1,44	-1,65	1,87	-2,83	-1,22	0,93	0,90	-0,52
Jasa Keuangan dan	2,79	2,44	1,09	0,82	1,74	0,88	-0,70	-0,18	0,48	0,14
Jasa Perantara Keuangan	2,65	2,52	0,82	0,72	1,63	0,66	-1,82	-1,10	-0,28	-0,61
Real Estate	4,42	2,07	0,34	-0,67	1,45	-2,76	1,19	0,84	0,36	-0,08
Jasa Perusahaan	6,59	2,58	1,56	-1,98	1,95	-1,46	1,89	3,40	3,25	1,78



Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Umum	6,24	3,44	6,14	7,24	5,74	8,91	7,70	8,77	6,10	7,80
Jasa Pendidikan	1,48	2,40	1,31	1,52	1,68	1,36	2,06	2,19	2,82	2,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,12	5,69	7,38	7,71	6,05	7,48	4,59	3,74	1,72	4,22
Jasa Lainnya	5,19	4,58	3,54	-0,07	3,16	1,40	3,99	5,15	5,70	4,07

Sumber data : Bank Indonesia, 2020 (diolah)

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pada tahun 2022 LU pertambangan dan penggalian masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Papua. LU pertambangan dan penggalian pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sejalan dengan target produksi dan penjualan mineral yang lebih tinggi oleh tambang terbesar di Papua. Peningkatan produktifitas tambang sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan pada tambang bawah tanah. Dengan pembangunan tambang bawah tanah yang dilaksanakan sesuai dengan target, maka produktifitas dari tambang bawah tanah dapat berada pada kisaran 80-90 % kapasitas penuh. Hal ini akan memberikan peningkatan produksi yang tinggi dibandingkan tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, hasil tambang pada tambang bawah tanah yang memiliki kadar lebih tinggi akan dapat memberikan nilai tambah pada produksi pertambangan.

Sementara itu, kinerja konstruksi diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja konstruksi sepanjang tahun 2021 yang disebabkan oleh perubahan jangka waktu proyek oleh pemerintah serta penundaan beberapa proyek pemerintah. Kemudian, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2022. Peningkatan kinerja pertanian sejalan dengan kondisi cuaca yang relative stabil pada tahun 2022 sehingga mendorong produksi pertanian dan perikanan lebih tinggi. Pemulihan konsumsi rumah tangga diperkirakan mendorong kinerja LU pertanian dan perikanan. Di samping itu, pemulihan permintaan industri pengolahan baik di dalam maupun di luar Papua yang membutuhkan bahan baku hasil hutan, diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Melihat dampak pandemic COVID-19 pada sektor non pertambangan sepanjang tahun 2021, maka diperlukan strategi dalam pemulihan daya beli masyarakat pada tahun 2022. Pemberian insentif kepada UMKM dan pelaku usaha



yang terdampak sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan. Pemberian bantuan kepada rumah tangga yang terdampak juga diperlukan untuk memberikan bantalan untuk meminimalkan dampak keuangan. Hal ini diperlukan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2022. Penguatan digitalisasi pada sektor pemerintahan dan perdagangan menjadi strategi untuk penjualan selama masa pemulihan pasca pandemic COVID-19.

2.1.2 Tingkat Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Papua

Tabel 2.3
Perkembangan Inflasi Provinsi Papua

Inflasi (%yoy)	2018				2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nasional	3,40	3,12	2,88	3,13	2,48	3,28	3,39	2,72	2,96	1,96	1,42	1,45
Papua	3,16	4,09	5,31	6,36	2,58	2,79	2,69	0,66	1,21	1,03	1,93	1,65
Jayapura	4,18	4,42	5,63	6,70	2,98	3,00	2,63	0,59	0,28	0,14	1,38	0,60
Merauke	0,44	3,22	4,43	5,42	2,13	1,44	2,44	1,06	-0,20	1,94	1,48	1,45
Timika	n/a	n/a	n/a	n/a	1,98	3,30	3,10	0,53	-0,13	2,48	3,54	4,23

Sumber data: BPS, 2021 (diolah)

Inflasi Provinsi Papua selama triwulan III tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh relative tingginya inflasi pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau serta sandang. Terkait terbatasnya pasokan daging sapi menjadi pemicu relative lebih tingginya inflasi pada triwulan laporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan harga emas global pada triwulan III tahun 2019 ikut memengaruhi dinamika harga emas perhiasan di Provinsi Papua. Dengan dinamika perkembangan harga pada triwulan III Tahun 2019, Provinsi Papua mencatat inflasi sebesar 3,72 persen (yoy). Sampai dengan akhir Desember 2019 inflasi di perkirakan sebesar 3,4 persen (yoy) meningkat dari inflasi 2018 sebesar 3,27 persen (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan III Tahun 2019 bersumber dari kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Tekanan inflasi Papua pada triwulan IV 2020 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2020. Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2020 diperkirakan didorong oleh penurunan persediaan makanan dari dalam Papua akibat berakhirnya musim panen. Selain itu,



faktor curah hujan dan gelombang tinggi yang meningkat pada triwulan IV 2020 baik diwilayah utara maupun selatan Papua memberikan tekanan produksi pertanian serta penangkapan ikan oleh nelayan.

Tekanan peningkatan permintaan menjelang libur akhir tahun dan hari besar keagamaan nasional perayaan Natal dan Tahun Baru dapat mendorong peningkatan inflasi pada triwulan IV 2020. Mengingat liburan akhir tahun 2020 lebih Panjang dibandingkan dengan akhir tahun 2019 karena penundaan cuti Bersama hari raya Idul Fitri menjadi di akhir Desember 2020. Berdasarkan surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020, 03 Tahun 2020, libur akhir tahun 2020 ditetapkan pada 24 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

Relaksasi pembatasan perjalanan dapat mendorong momentum libur panjang akhir tahun untuk dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan ke/dari/intra Papua. Dengan demikian, peningkatan permintaan pada kelompok transportasi, khususnya komoditas angkutan udara, dapat mendorong tekanan inflasi pada komoditas angkutan udara di triwulan IV 2020.

Pada triwulan IV 2020 tepatnya bulan Desember, terdapat agenda besar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di 11 Kabupaten di Provinsi Papua. Berdasarkan pengalaman sebelumnya di beberapa daerah, Pilkada dapat mendorong belanja dan meningkatkan inflasi.

Tabel 2.4
Indikator-Indikator Kemiskinan Di Provinsi Papua

Tahun	Bulan	GarisKemiskinan (Rupiah/Kapital /bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persentase Penduduk Miskin
2017	Maret	457.541	7,49	2,82	27,62
	September	464.056	6,24	1,93	27,76
2018	Maret	499.463	6,73	2,28	27,74
	September	518.811	5,91	1,82	27,43
2019	Maret	540.099	7,17	2,60	27,53
	September	557.099	6,07	1,98	26,64
2020	Maret	563.099	6,16	2,08	26,6
	September	580,643	6,90	2,35	26,8

Sumber data : BPS, 2021 (diolah)



Pada bulan Maret 2020, tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan Bulan Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 mengalami penurunan 1,62% (yoy) menjadi 911,37 ribu orang, namun meningkat 1,12% dibandingkan dengan Bulan September 2020. Persentase penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 memiliki tren yang sama dengan jumlah penduduk miskin, yaitu menurun dibandingkan dengan Bulan Maret 2019, namun meningkat jika dibandingkan dengan Bulan September 2019. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,64%. Meskipun telah mengalami peningkatan, Provinsi Papua masih menjadi Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Sementara, persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2020 sebesar 10,08%, Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan. pada periode September 2019, GK Papua Rp 557.236,00 lalu mengalami peningkatan menjadi Rp 562.992,00 pada periode Maret 2020, nilai tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata GK nasional sebesar Rp 454.652,00. Hal tersebut menandakan biaya hidup minimal di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan. Kemudian, dari tingkat kesenjangan pendapatan menunjukkan terjadinya penurunan, terjadinya penurunan dilihat dari nilai gini 0,394 pada periode Maret 2019 menjadi 0,392 pada periode Maret 2020. Kesenjangan antara pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan GK yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan mencapai sebesar 6,16 pada periode Maret 2020 dibandingkan dengan periode Maret 2019 yang tercatat sebesar 7,17.

Dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia, sebagaimana telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam



perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik juga PDB per kapita yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dari Tabel diatas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada Tahun 2020 sebesar 60,44. Angka ini menurun sebesar 0,40 poin atau turun -0,66 persen dibandingkan tahun 2019 dan Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh Pendidikan selama 6,69 tahun, hampir setara masa pendidikan untuk menamatkan jenjang pendidikan kelas 1 SMP. Nilai tersebut lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.3 Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2022

Secara agregat, prospek perekonomian Papua pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2021. Secara umum peningkatan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2022 didorong oleh perbaikan kinerja pertambangan terbesar di Papua dimana produksi tambang berasal dari tambang bawah tanah yang mengalami peningkatan produktivitas sejalan dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi dibandingkan tambang terbuka. Penanganan pandemic COVID-19 di tahun 2021 yang menjadi penentu pemulihan aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2022. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas pada semester I tahun 2022 diperkirakan akan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tumbuh meskipun terbatas. Efektivitas dan penyebaran vaksin COVID-19 yang diperkirakan dapat didistribusikan pada triwulan II atau III 2021 menjadi penentu pemulihan perekonomian sepanjang tahun 2022.

2.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2022

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, melalui kebijakan yang diarahkan pada:



- a. Reformasi prosedur perijinan investasi;
 - b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan
 - c. Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
- a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri;
 - c. Pengendalian laju inflasi.
3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
- a. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah;
 - b. Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah;
 - c. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
 - d. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - e. Pengembangan sarana promosi hasil produksi;
 - f. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah;
 - g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
- a. Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
 - b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
 - c. Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah;
 - d. Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
 - e. Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
 - f. Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir;
 - g. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.
 - h. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.



5. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
 - a. Optimalisasi lahan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
 - c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat;
 - d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
6. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
 - b. Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat;
 - c. Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 - d. Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat;
 - e. Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat;
 - f. Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan
 - g. Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
7. Berkembangnya perekonomian wilayah berbasis ekonomi kerakyatan, berkelanjutan dan merata, melalui kebijakan yang diarahkan :
 - a. Pengembangan Perekonomian Wilayah Berbasis Komoditas Lokal, yaitu : (1) pengembangan sektor primer berupa komoditi perkebunan (kopi, kakao, karet, sagu, tebu, kelapa sawit, buah merah), komoditi tanaman pangan (ubi jalar, padi), perikanan laut dan budidaya, peternakan besar, kecil, dan unggas, serta pertambangan rakyat; (2) pengembangan sektor sekunder berupa komoditi industri pengolahan tepung sagu dan ubi jalar, buah merah, minyak curah, pengolahan ikan, dan pengolahan kayu; (3) pengembangan sektor tersier berupa pariwisata, perdagangan dan jasa.
 - b. Pengembangan Klaster Ekonomi yang memiliki daya saing, yang diarahkan pada pengembangan : (1) Klaster Pertanian di Wamena, Tanah Merah, Kepi, Merauke, Mimika, Sarmi, dan Jayapura; (2) Klaster Perkebunan di Wamena,



Nabire, Jayapura, (3) Klaster Perikanan di Keki, Merauke, Mimika, Sarmi, Keerom, Jayapura, Biak Numfor dan Waropen; (4) Klaster Pariwisata KPPN Timika-Lorentz di Kabupaten Mimika, KPPN Jayawijaya di Kabupaten Jayawijaya; KSPN Wasur dan KPPN Kimaam di Kabupaten Merauke; KPPN Danau Bian di Kabupaten Merauke; KPPN C.A. Weyland di Kabupaten Nabire; KPPN Paniai di Kabupaten Paniai; KSPN Agats- Asmat di Kabupaten Asmat; KPPN di Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya; KSPN Sentani di Kab. Jayapura, KPPN Jayapura; KSPN Biak dan KPPN Numfor Kabupaten Biak numfor; KPPN Serui di Kabupaten Kep.Yapen; KPPN Supiori di kabupaten Supiori.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan peñata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pajak daerah dan retribusi daerah
 - a. Peningkatan kemudahan pembayaran pajak berbasis teknologi (ATM, android, Payment Point)
 - b. Peningkatan reward bagi masyarakat taat pajak dan penghapusan denda pajak berdasar tingkat tunggakan
 - c. Peningkatan pendataan masyarakat wajib pajak dan sosialisasi pada perusahaan wajib pajak air permukaan
 - d. Peningkatan pendataan potensi dan asset provinsi yang dapat menjadi obyek retribusi daerah
 - e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan OPD penghasil
 - f. Peningkatan akses pelayanan samsat, terutama di daerah pedalaman



2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
 - b. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD penghasil
 - c. Identifikasi perusahaan potensial untuk investasi modal
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

3. Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah Provinsi Papua akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pembagian dana hasil pajak dan bukan pajak termasuk perolehan Dana Alokasi Umum

Penyusunan anggaran belanja tahun 2022 berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang didasarkan pada beberapa hal yaitu : (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD; (4) Teknis penyusunan APBD; dan (5) Hal khusus lainnya.

Adapun untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat
5. waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
7. Mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
8. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
9. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2023 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, dan RKP 2023;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
9. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
10. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.
11. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
12. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;



14. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Perekonomian global pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4 persen yang didasarkan oleh kinerja ekonomi pada tahun 2021 dan potensi ekonomi kedepan.

Dari sisi domestik, di awal tahun 2021 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih terkontraksi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan tekanan yang cukup berat dari segi banyak aspek. Resiko ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi serta keberlanjutan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM) berimbas terhadap menurunnya produktivitas sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam.

Berdasarkan kondisi terkini, perkembangan kasus Covid-19 hingga pertengahan bulan Juli terus 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi terjadi dikarenakan beberapa faktor, yakni munculnya virus varian baru, penanganan penyebaran Covid-19 yang belum efektif serta longgarnya penerapan protokol kesehatan. Tingginya kasus Covid-19 mendorong pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat khususnya untuk wilayah yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga melakukan akselerasi pelaksanaan vaksinasi secara masif diberbagai wilayah di Indonesia guna mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 melalui kekebalan imun kelompok (herd immunity). Langkah-langkah tersebut diimplementasikan guna memutus penyebaran kasus Covid-19, namun disisi lain pembatasan mobilitas masyarakat yang terus berlanjut tersebut menimbulkan penurunan produktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Berdasarkan perkembangan terkini, pemulihan ekonomi hingga triwulan II 2021 terus menunjukkan perbaikan seiring upaya vaksinasi. Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional tumbuh positif. Tren pemulihan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun 2021.



Pemulihan ekonomi global yang terjadi juga mendorong perbaikan ekonomi domestik dari sisi investasi dan perdagangan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2022 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2022

Indikator	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,0-5,5 persen
Inflasi	3,0 persen
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,82 persen
Nilai Tukar	14.350
Harga Minyak Mentah Indonesia	63 US\$/barel
Lifting Minyak	703 barel/ hari
Lifting Gas	1.036 barel/ hari

Sumber : Laporan APBN 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Kementerian Keuangan RI, 2021

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Pendapatan Provinsi Papua terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan menguat menuju Rp15.000 per dolar US\$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,5–8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Pertumbuhan ekonomi wilayah pada tahun 2021 diarahkan pada peningkatan peranan Kawasan Timur Indonesia. Berikut pada Tabel 3.2 adalah sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah tahun 2022.



Tabel 3.2
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2022 (Persen)

Wilayah	RPJMN*	Revisi Sasaran**
Sumatera	5,6	3,9 – 5,1
Jawa – Bali	5,8	4,8 – 5,5
Nusa Tenggara	5,6	3,5 – 5,2
Kalimantan	6,1	3,6 – 5,7
Sulawesi	7,2	5,4 – 7,0
Maluku	6,9	5,2 – 6,2
Papua	6,0	2,6 – 5,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas, Mei 2020



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pemerintah Provinsi Papua menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2023 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

1. Pajak daerah dan retribusi daerah
 - a. Peningkatan kemudahan pembayaran pajak berbasis teknologi (ATM, android, Payment Point)



- b. Peningkatan reward bagi masyarakat taat pajak dan penghapusan denda pajak berdasar tingkat tunggakan
 - c. Peningkatan pendataan masyarakat wajib pajak dan sosialisasi pada perusahaan wajib pajak air permukaan
 - d. Peningkatan pendataan potensi dan aset provinsi yang dapat menjadi obyek retribusi daerah
 - e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan OPD penghasil
 - f. Peningkatan akses pelayanan samsat, terutama di daerah pedalaman
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
 - b. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD
 - c. Identifikasi perusahaan potensial untuk investasi modal
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
3. Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah provinsi papua akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pembagian dana hasil pajak dan bukan pajak termasuk perolehan Dana Alokasi Umum

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Transfer

Pada Tahun 2023 Pendapatan APBD Provinsi Papua direncanakan sebesar Rp.2.926.498.854.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp.6,016,042,605,743.00 pada APBD Induk Tahun 2022 sebesar Rp.8,942,541,460,543.00 dengan rincian sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.587.427.517.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp.649,848,260,743.00 pada APBD Induk TA. 2022 sebesar Rp.1,237,275,778,543.00 dengan rincian sebagai berikut :



1. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.366,773,361,800.00 mengalami penurunan sebesar Rp.658,024,354,116.00 pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp.1,024,797,715,916.00.
2. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.14,510,000,000,00 juga mengalami penurunan sebesar Rp.17,351,201,441.00 pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp.31,861,201,441.00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.41.518.763.000,00.
4. Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.164.625.393.000,00

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebesar Rp.7.705.265.682.000,00 te

Tabel 4.1
ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH PADA RAPBD PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		APBD INDUK TA. 2022	RANCANGAN APBD TA. 2023	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	8,942,541,460,543.00	2,926,498,854,800.00	(6,016,042,605,743.00)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,237,275,778,543.00	587,427,517,800.00	(649,848,260,743.00)
1.1.1	Pajak Daerah	1,024,797,715,916.00	366,773,361,800.00	(658,024,354,116.00)
1.1.2	Retribusi Daerah	31,861,201,441.00	14,510,000,000.00	(17,351,201,441.00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,304,338,272.00	41,518,763,000.00	16,214,424,728.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	155,312,522,914.00	164,625,393,000.00	9,312,870,086.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	7,705,265,682,000.00	2,339,071,337,000.00	(5,366,194,345,000.00)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7,705,265,682,000.00	2,339,071,337,000.00	(5,366,194,345,000.00)



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 dan Rencana Strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita



Acara Kesepakatan, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun No 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.6.466.974.877.012,00 dari Tahun 2022 sebesar Rp.15.758.964.362.330,00 menjadi sebesar Rp.9.291.989.485.318,00.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Perkiraan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3,291,163,299,247.82 mengalami penurunan sebesar Rp.6,530,826,186,070.18 pada APBD Induk TA. 2022 sebesar Rp.9,821,989,485,318.00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.2,622,883,535,247.58 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.1,183,884,469,225.00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1,305,618,381,656.58
 - c. Belanja Hibah sebesar Rp.129,699,204,490.00
 - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.3,681,479,876.00
2. Belanja Modal sebesar Rp.480,196,868,275.24 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.3,800,000,000.00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.115,543,759,054.24
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.63,938,588,620.00
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.295,521,320,601.00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.393,200,000.00
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.1,000,000,000.00



3. Belanja Tidak terduga sebesar Rp.9,769,705,425.00
4. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.178,313,190,300.00

Tabel 5.1
PROYEKSI BELANJA DAERAH PADA RAPBD PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		APBD INDUK TA. 2022	RANCANGAN APBD TA 2023	(Rp)
2	BELANJA DAERAH	9,821,989,485,318.00	3,291,163,299,247.82	(6,530,826,186,070.18)
2.1	BELANJA OPERASI	7,712,514,652,782.00	2,622,883,535,247.58	(5,089,631,117,534.42)
2.1.1	Belanja Pegawai	2,416,088,711,130.00	1,183,884,469,225.00	(1,232,204,241,905.00)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,083,347,543,252.00	1,305,618,381,656.58	(2,777,729,161,595.42)
2.1.5	Belanja Hibah	1,196,866,461,400.00	129,699,204,490.00	(1,067,167,256,910.00)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16,211,937,000.00	3,681,479,876.00	(12,530,457,124.00)
2.2	BELANJA MODAL	1,509,658,467,842.00	480,196,868,275.24	(1,029,461,599,566.76)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0.00	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131,153,245,529.00	115,543,759,054.24	(15,609,486,474.76)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618,392,117,492.00	63,938,588,620.00	(554,453,528,872.00)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	755,672,754,821.00	295,521,320,601.00	(460,151,434,220.00)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,440,350,000.00	393,200,000.00	(4,047,150,000.00)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	55,000,000,000.00	9,769,705,425.00	(45,230,294,575.00)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	55,000,000,000.00	9,769,705,425.00	(45,230,294,575.00)
2.4	BELANJA TRANSFER	544,816,364,694.00	178,313,190,300.00	(366,503,174,394.00)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	544,816,364,694.00	178,313,190,300.00	(366,503,174,394.00)



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Untuk pos penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp..... dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 389,664,444,447.83

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Provinsi Papua menerapkan sistem penganggaran surplus/devisit pada Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (investasi) sebesar Rp.25.000.000.000,00.

Tabel 6.1
**PEMBIAYAAN PADA RAPBD PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0.00
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	389,664,444,447.83
6 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	389,664,444,447.83
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25,000,000,000.00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	25,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	364,664,444,447.83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Papua tahun 2021, adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
2. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;
3. Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah;
4. Pemantapan kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan pendapatan daerah, Pengembangan kordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD penghasil, kabupaten/kota serta mitra kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat;
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi pendapatan yang optimal pada Pemerintah Daerah.
6. Melakukan koordinasi yang lebih intens dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Dana Otonomi Khusus, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di samping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;



8. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN) dan PPh pasal 21;
9. Meningkatkan kordinasi yang lebih optimal dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI daerah pemilihan Papua dalam pelaksanaan dana perimbangan.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan



7. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

Sementara itu Pengelolaan Belanja Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 34 huruf e dimana penerimaan khusus besarnya setara 2,25% dimana alokasi belanjanya diarahkan sebagai berikut :

1. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk :
 - a. Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - b. Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga ada; dan
 - c. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditunjukkan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan besaran paling sedikit:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan ; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan

Sementara untuk Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus anggarannya ditujukan untuk pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, energi, Listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

Untuk Provinsi Papua Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang diterima Tahun Anggaran 2022, besaran adalah 1 % Penerimaan yang bersifat umum, dan sebesar 1,25% Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja. Akibat dari pembagian presentasi tersebut diatas, maka penerimaan Provinsi menjadi berkurang sehingga kebijakan yang terkait dengan urusan bersama sudah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.



7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi pencapaian kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar bagi penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

Jayapura, November 2022

GUBERNUR PAPUA

TTD

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dokumen PPAS merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan OPD, program/kegiatan, belanja operasi dan belanja modal, dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan, selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan APBD Provinsi Papua Tahun 2023.

PPAS APBD Provinsi Papua Tahun 2023 selanjutnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I, PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

- **BAB II, RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH**

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana transfer pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022.

- **BAB III, PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

- **BAB IV, PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program kegiatan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer ke daerah.

- **BAB V, Penutup**



TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Papua Tahun 2023, ini adalah :

1. Pembagian Plafon Anggaran SKPD Berdasarkan Kemendesakan terhadap penanganan Isu Strategis Daerah;
2. Pemilihan Prioritas daerah yang berbasis pada agenda-agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Papua;
3. Menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran bagi seluruh pelaku pembangunan daerah dalam konteks penyusunan APBD Provinsi Papua Tahun 2023.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2023, ini adalah:

1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);



7. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua;
20. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023.



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2023 Pendapatan pada Rancangan APBD Provinsi Papua diproyeksi sebesar Rp.2.926.498.854.800,00 dengan rincian terlampir :

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.649.848.260.743,00 atau 52,52 persen dari tahun 2022 sebesar Rp.1.237.275.778.543,00 menjadi sebesar Rp.587.427.517.800,00, penurunan ini berasal dari target pajak daerah, dan retribusi daerah. Dasar perhitungan penetapan target PAD pada tahun 2023 tersebut adalah perkiraan PAD yang dapat diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Papua sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 disamping itu juga melihat kecenderungan dan dinamika pertumbuhan ekonomi Papua dalam satu tahun berjalan :

Tabel 2.1.1.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.237.275.778.543,00	587.427.517.800,00	-649.848.260.743,00	-52,52
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.024.797.715.916,00	366.773.361.800,00	-658.024.354.116,00	-64,21
1.1.2	Retribusi Daerah	31.861.201.441,00	14.510.000.000,00	-17.351.201.441,00	-54,46
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.338.272,00	41.518.763.000,00	16.214.424.728,00	64,08
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.312.522.914,00	164.625.393.000,00	9.312.870.086,00	6,00



2.1.2. Pendapatan Transfer

Pada Tahun 2023 Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp.5.366.194.345.000,00 atau turun 69,64 persen dari tahun 2022 sebesar Rp.7.705.265.682.000,00 menjadi sebesar Rp.2.339.071.337.000,00 penurunan Pendapatan Transfer terdapat pada pos Pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Otonomi Khusus, Adapun penurunan Pendapatan Transfer Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2
Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2023

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.705.265.682.000,00	2.339.071.337.000,00	-5.366.194.345.000,00	-69,64
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.705.265.682.000,00	2.339.071.337.000,00	-5.366.194.345.000,00	-69,64
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	3.071.553.835.000,00	1.067.412.098.000,00	-2.004.141.737.000,00	-65,25
	- DBH	756.633.768.000,00	243.175.790.000,00	-513.457.978.000,00	-67,86
	- DAU	2.314.920.067.000,00	824.236.308.000,00	-1.490.683.759.000,00	-64,39
	b. Dana Transfer Khusus	841.056.511.000,00	220.460.581.000,00	-620.595.930.000,00	-73,79
	- DAK Fisik	417.888.971.000,00	195.899.501.000,00	-221.989.470.000,00	-53,12
	- DAK Non Fisik	423.167.540.000,00	24.561.080.000,00	-398.606.460.000,00	-94,20
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	1.580.796.000.000,00	470.837.581.000,00	-1.109.958.419.000,00	-70,22
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	2.211.859.336.000,00	580.361.077.000,00	-1.631.498.259.000,00	-73,76

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa Penurunan yang sangat signifikan terdapat pada Pos Pendapatan Dana Otonomi Khusus, dimana Dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota telah disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke masing-masing Kabupaten/Kota, selain itu juga dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi salah satu faktor penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Papua.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun 2023 tidak mengalami Perubahan dari Tahun 2022, atau tidak ada Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai Ketentuan.



2.2. Pembiayaan Daerah

2.2.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) di Tahun 2023 sebesar Rp.191.255.150.000,00 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.400.000.000.000,00.

2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.25.000.000.000,00.

Sehubungan dengan target pendapatan daerah diatas, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	679.448.024.775,00	191.255.150.000,00	-488.192.874.775,00	-71,85
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	300.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100.000.000.000,00	33,33
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	979.448.024.775,00	591.255.150.000,00	-388.192.874.775,00	-39,63
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-75.000.000.000,00	-75,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-75.000.000.000,00	-75,00



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah diarahkan dalam Tema Pembangunan RKP 2023 yang diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dirumuskan diatas yaitu: **"Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan"**, maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan



Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma "Money Follow Program Priority" atau dalam terjemahan "Uang Mengikuti Program Prioritas". Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu "Money Follow Function" yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2023, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tentu akan diarahkan untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat, dan ini selaras dengan Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dicanangkan yaitu **"Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan"**.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Prioritas belanja daerah berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
7. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

Sementara itu Pengelolaan Belanja Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 34 huruf e dimana penerimaan khusus besarnya setara 2,25% dimana alokasi belanjanya diarahkan sebagai berikut :



1. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk :
 - a. Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - b. Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga ada; dan
 - c. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditunjukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatandan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan besaran paling sedikit:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan ; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan

Sementara untuk Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus anggarannya ditujukan untuk pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, energi, Listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

Untuk Provinsi Papua Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang diterima Tahun Anggaran 2022, besaran adalah 1 % Penerimaan yang bersifat umum, dan sebesar 1,25% Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja. Akibat dari pembagian presentasi tersebut diatas, maka penerimaan Provinsi menjadi berkurang sehingga kebijakan yang terkait dengan urusan bersama sudah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 menggunakan struktur belanja yang telah disesuaikan dengan PP N0.12 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Penganggaran yang dijabarkan dalam Permendagri Noomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Terknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Struktur Belanja dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :



Tabel 3.1
Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.492.754.004.800,00. secara garis besar telah terjadi penurunan belanja dari Tahun 2022 sebesar Rp.7.264.877.688.711,00. atau turun 95,72 persen. Penurunan tersebut sangat wajar, dikarenakan terjadi penurunan pada Pendapatan Daerah yang sangat signifikan dari Tahun 2022, dan penambahan Daerah Otonomi Baru (DOB).

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	7.589.365.559.996,00	2.397.728.925.209,00	-7.264.877.688.711,00	-95,72
2.1.1	Belanja Pegawai	2.763.871.573.535,00	798.438.540.017,00	-1.965.433.033.518,00	-71,11
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.515.376.325.061,00	1.469.624.432.576,00	-2.045.751.892.485,00	-58,19
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.298.187.661.400,00	123.682.472.740,00	-1.174.505.188.660,00	-90,47
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	11.930.000.000,00	5.983.479.876,00	-5.946.520.124,00	-49,85
2.2	BELANJA MODAL	1.537.807.560.628,00	501.687.033.666,00	-1.036.120.526.962,00	-67,38
5.2.1	Belanja Modal Tanah	540.000.000,00	3.800.000.000,00	3.260.000.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.869.091.354,00	116.176.950.813,00	39.307.859.459,00	51,14
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	744.792.225.217,00	85.635.474.802,00	-659.156.750.415,00	-88,50
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	711.325.894.057,00	294.575.408.051,00	-416.750.486.006,00	-58,59
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.280.350.000,00	499.200.000,00	-3.781.150.000,00	-88,34
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00	409.769.705.425,00	259.769.705.425,00	173,18
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00	409.769.705.425,00	259.769.705.425,00	173,18
2.4	BELANJA TRANSFER	544.816.364.694,00	183.568.340.500,00	-361.248.024.194,00	-66,31
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	544.816.364.694,00	183.568.340.500,00	-361.248.024.194,00	-66,31
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	9.821.989.485.318,00	3.492.754.004.800,00	-6.329.235.480.518,00	-64,44



BAB IV

PLAFON ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN/PROGRAM KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Menunjuk pada pasal 10 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintah terklasifikasi sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, terbagi atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan
 - a. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari :
 - urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketentraman, ketertiban umum dan pelindung masyarakat;
 - 6) sosial.
 - Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;



- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari bidang :

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energy dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari bidang :

- 1) Administrasi Pemerintahan;
- 2) Pengawasan;
- 3) Perencanaan;
- 4) Keuangan;
- 5) Kepegawaian;
- 6) Pendidikan dan Pelatihan;
- 7) Penelitian dan Pengembangan.



Tabel 4.1
**Plafon Anggaran Sementara SKPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023**

KODE.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU INDUK 2023
1	2	3
1.01.1.01.1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	164.312.070.157
1.02.1.01.1	Dinas Kesehatan	85.280.593.464
1.02.2.01.1	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	208.739.526.329
1.02.2.02.1	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)	78.000.000.000
1.02.3.01.1	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	80.917.799.540
1.02.3.02.1	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (BLUD)	75.000.000.000
1.02.4.01.1	Rumah Sakit Jiwa	24.972.109.119
1.03.1.01.1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	691.874.435.560
1.05.1.01.1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	22.504.298.150
1.06.1.01.1	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.233.420.190
2.09.1.01.1	Dinas Pertanian dan Pangan	61.902.153.325
2.11.1.01.1	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	85.297.469.477
2.13.1.01.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	29.505.402.600
2.15.1.01.1	Dinas Perhubungan	37.894.097.010
2.16.1.01.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.791.251.300
2.18.1.01.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.001.208.622
2.19.1.01.1	Dinas Olah Raga dan Pemuda	15.769.371.596
2.22.1.01.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40.469.705.900
3.25.1.01.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	34.120.636.897
3.29.1.01.1	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	39.901.832.925
3.30.1.01.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	38.520.157.186
4.01.1.01.1	Sekretariat Daerah	120.302.293.722
4.01.1.01.1	Biro Umum dan Protokol	42.982.324.185
4.01.1.01.2	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	22.633.098.622
4.01.1.01.4	Biro Hukum	27.448.726.913
4.01.1.01.5	Biro Organisasi	20.737.042.150
4.01.1.01.12	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	21.603.106.650
4.02.1.01.1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	282.553.782.528
5.01.1.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.716.285.285
5.02.1.01.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	742.214.212.215
5.03.1.01.1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	67.879.848.700
5.05.1.01.1	Badan Kepegawaian Daerah	40.917.497.280
5.04.1.01.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.303.535.730
5.06.1.01.1	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	20.803.529.450
5.07.1.01.1	Badan Penghubung Daerah	16.085.305.329
6.01.1.01.1	Inspektorat	40.600.447.813
8.01.1.01.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.074.954.180
9.02.1.01.1	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	42.890.474.701
TOTAL		3.517.754.004.800,00



4.2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Sebagaimana telah disebutkan dalam prioritas belanja daerah, **“Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”** maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. yakni sejumlah program prioritas yang telah ditentukan berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan dengan memastikan program yang dialokasikan bermanfaat, sehingga tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dapat tercapai pada tahun rencana 2023.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2023 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, dan RKP 2023;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;



7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
9. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
10. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.
11. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
12. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
14. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

Adapun plafon anggaran dimaksud dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
(Terlampir)



4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Plafond anggaran pada Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.2.397.728.925.209,00.

4.4. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Modal.

Plafond anggaran untuk Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.501.687.033.666,00.

4.5. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Terduga.

Plafond anggaran untuk Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.409.769.705.425,00.

4.6. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Transfer

Plafond anggaran untuk Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.183.568.340.500,00.



BAB V

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Papua Tahun 2023 ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama, sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Jayapura, November 2022

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, S.IP.MH



LAMPIRAN : STRUKTUR RANCANGAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.237.275.778.543,00	587.427.517.800,00	-649.848.260.743,00	-52,52
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.024.797.715.916,00	366.773.361.800,00	-658.024.354.116,00	-64,21
1.1.2	Retribusi Daerah	31.861.201.441,00	14.510.000.000,00	-17.351.201.441,00	-54,46
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.338.272,00	41.518.763.000,00	16.214.424.728,00	64,08
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.312.522.914,00	164.625.393.000,00	9.312.870.086,00	6,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.705.265.682.000,00	2.339.071.337.000,00	-5.366.194.345.000,00	-69,64
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.705.265.682.000,00	2.339.071.337.000,00	-5.366.194.345.000,00	-69,64
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	3.071.553.835.000,00	1.067.412.098.000,00	-2.004.141.737.000,00	-65,25
	- DBH	756.633.768.000,00	243.175.790.000,00	-513.457.978.000,00	-67,86
	- DAU	2.314.920.067.000,00	824.236.308.000,00	-1.490.683.759.000,00	-64,39
	b. Dana Transfer Khusus	841.056.511.000,00	220.460.581.000,00	-620.595.930.000,00	-73,79
	- DAK Fisik	417.888.971.000,00	195.899.501.000,00	-221.989.470.000,00	-53,12
	- DAK Non Fisik	423.167.540.000,00	24.561.080.000,00	-398.606.460.000,00	-94,20
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	1.580.796.000.000,00	470.837.581.000,00	-1.109.958.419.000,00	-70,22
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	2.211.859.336.000,00	580.361.077.000,00	-1.631.498.259.000,00	-73,76
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	8.942.541.460.543,00	2.926.498.854.800,00	-6.016.042.605.743,00	-67,27
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	7.589.365.559.996,00	2.397.728.925.209,00	-7.264.877.688.711,00	-95,72
2.1.1	Belanja Pegawai	2.763.871.573.535,00	798.438.540.017,00	-1.965.433.033.518,00	-71,11
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.515.376.325.061,00	1.469.624.432.576,00	-2.045.751.892.485,00	-58,19
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.298.187.661.400,00	123.682.472.740,00	-1.174.505.188.660,00	-90,47
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	11.930.000.000,00	5.983.479.876,00	-5.946.520.124,00	-49,85
2.2	BELANJA MODAL	1.537.807.560.628,00	501.687.033.666,00	-1.036.120.526.962,00	-67,38
5.2.1	Belanja Modal Tanah	540.000.000,00	3.800.000.000,00	3.260.000.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.869.091.354,00	116.176.950.813,00	39.307.859.459,00	51,14
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	744.792.225.217,00	85.635.474.802,00	-659.156.750.415,00	-88,50
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	711.325.894.057,00	294.575.408.051,00	-416.750.486.006,00	-58,59
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.280.350.000,00	499.200.000,00	-3.781.150.000,00	-88,34
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00	409.769.705.425,00	259.769.705.425,00	173,18
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00	409.769.705.425,00	259.769.705.425,00	173,18
2.4	BELANJA TRANSFER	544.816.364.694,00	183.568.340.500,00	-361.248.024.194,00	-66,31
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	544.816.364.694,00	183.568.340.500,00	-361.248.024.194,00	-66,31
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	9.821.989.485.318,00	3.492.754.004.800,00	-6.329.235.480.518,00	-64,44
	Total Surplus/ (Defisit)	-879.448.024.775,00	-566.255.150.000,00	313.192.874.775,00	-35,61
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	679.448.024.775,00	191.255.150.000,00	-488.192.874.775,00	-71,85
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	300.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100.000.000.000,00	33,33
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	979.448.024.775,00	591.255.150.000,00	-388.192.874.775,00	-39,63
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-75.000.000.000,00	-75,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-75.000.000.000,00	-75,00
	Pembiayaan Netto	879.448.024.775,00	566.255.150.000,00	-313.192.874.775,00	-35,61
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL APBD	9.921.989.485.318,00	3.517.754.004.800,00	-6.404.235.480.518,00	-64,55

“Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”